

BUKU
1



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH ACEH**

**RKPA
TAHUN 2023**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2022





GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh 62);
24. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Aceh;
 - b. prioritas program Aceh;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaan dan prakiraan maju termasuk didalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Aceh Tahun 2023.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja - SKPA) Tahun 2023;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2022
24 Dzulqaidah 1443



GUBERNUR ACEH, *h*

NOVA IRIANSYAH
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2022
24 Dzulqaidah 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *fr.*

TAQWALLAH
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 22

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -----	i
DAFTAR TABEL -----	v
DAFTAR GAMBAR -----	xi
BAB I PENDAHULUAN -----	I - 1
1.1. Latar Belakang -----	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan -----	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen -----	I - 7
1.4. Sistematika Dokumen RKPA -----	I - 9
1.5. Maksud dan Tujuan -----	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH -----	II - 1
2.1. Gambaran Umum Aceh -----	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi -----	II - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah -----	II - 1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi -----	II - 1
2.1.1.1.2. Topografi -----	II - 2
2.1.1.1.3. Geologi -----	II - 3
2.1.1.1.4. Hidrologi -----	II - 3
2.1.1.1.5. Klimatologi -----	II - 8
2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan -----	II - 9
2.1.1.2. Demografi -----	II - 9
2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk -----	II - 9
2.1.1.2.2. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk	II - 14
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah -----	II - 16
2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana -----	II - 17
2.1.1.5. Sosiologi -----	II - 21
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	II - 22
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi -----	II - 22
2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB -----	II - 22
2.1.2.1.2. Laju Inflasi -----	II - 28
2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi Aceh -----	II - 29
2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita -----	II - 32
2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) -----	II - 34
2.1.2.1.6. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional) -----	II - 36
2.1.2.1.7. Kemiskinan -----	II - 37
2.1.2.1.8. Pengangguran -----	II - 43
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial -----	II - 45
2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf -----	II - 45
2.1.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah -----	II - 47
2.1.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah -----	II - 49

2.1.2.2.4.	Angka Kematian Ibu (AKI) -----	II - 51
2.1.2.2.5.	Angka Kematian Bayi (AKB) -----	II - 51
2.1.2.2.6.	Angka Usia Harapan Hidup -----	II - 52
2.1.2.2.7.	Indeks Pembangunan Manusia-----	II - 53
2.1.2.2.8.	Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) -----	II - 55
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya-----	II - 57
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum-----	II - 61
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh -----	II - 61
2.1.3.1.1.	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama-----	II - 61
2.1.3.1.1.1.	Syariat Islam-----	II - 61
2.1.3.1.1.2.	Pelaksanaan Ibadah-----	II - 63
2.1.3.1.2.	Penyelenggaraan Kehidupan Adat -----	II - 64
2.1.3.1.3.	Penyelenggaraan Pendidikan -----	II - 65
2.1.3.1.4.	Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah-----	II - 66
2.1.3.1.5.	Perdamaian -----	II - 68
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib -----	II - 70
2.1.3.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar-----	II - 70
2.1.3.2.1.1.	Pendidikan -----	II - 70
2.1.3.2.1.2.	Kesehatan-----	II - 77
2.1.3.2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -----	II - 79
2.1.3.2.1.4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman -----	II - 98
2.1.3.2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat -----	II - 100
2.1.3.2.1.6.	Sosial -----	II - 103
2.1.3.2.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar -----	II - 105
2.1.3.2.2.1.	Ketenagakerjaan -----	II - 105
2.1.3.2.2.2.	Pangan -----	II - 109
2.1.3.2.2.3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-----	II - 110
2.1.3.2.2.4.	Pertanahan-----	II - 114
2.1.3.2.2.5.	Lingkungan Hidup -----	II - 117
2.1.3.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil -----	II - 119
2.1.3.2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong -	II - 120
2.1.3.2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -----	II - 122
2.1.3.2.2.9.	Perhubungan -----	II - 123
2.1.3.2.2.10.	Komunikasi dan Informatika-----	II - 129
2.1.3.2.2.11.	Persandian-----	II - 129
2.1.3.2.2.12.	Statistik-----	II - 130
2.1.3.2.2.13.	Komunikasi, Usaha Kecil, dan Menengah---	II - 131
2.1.3.2.2.14.	Penanaman Modal-----	II - 132
2.1.3.2.2.15.	Kepemudaan dan Olah Raga -----	II - 134
2.1.3.2.2.16.	Kebudayaan -----	II - 137

2.1.3.2.2.17. Perpustakaan -----	II - 138
2.1.3.2.2.18. Kearsipan -----	II - 140
2.1.3.2.2.19. Gedung dan Pembangunan Terbangkalai---	II - 141
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan-----	II - 143
2.1.3.3.1. Pariwisata -----	II - 143
2.1.3.3.2. Pertanian -----	II - 145
2.1.3.3.3. Perkebunan -----	II - 147
2.1.3.3.4. Peternakan-----	II - 149
2.1.3.3.5. Kehutanan-----	II - 154
2.1.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral-----	II - 158
2.1.3.3.7. Perdagangan-----	II - 167
2.1.3.3.8. Perindustrian -----	II - 169
2.1.3.3.7. Kelautan dan Perikanan -----	II - 171
2.1.3.3.10. Transmigrasi-----	II - 174
2.1.3.4. Penunjang Urusan -----	II - 175
2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan -----	II - 175
2.1.3.4.2. Keuangan -----	II - 176
2.1.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan----	II - 177
2.1.3.4.4. Penelitian Pengembangan -----	II - 179
2.1.3.4.5. Pengawasan -----	II - 179
2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD-----	II - 179
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah-----	II - 180
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) -----	II - 180
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Daerah -----	II - 181
2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita -----	II - 181
2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani -----	II - 183
2.1.4.2.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Non-Pangan-----	II - 185
2.1.4.2.4. Keterbukaan Ekonomi -----	II - 186
2.1.4.2.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank----	II - 187
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur-----	II - 188
2.1.4.3.1. Indeks Akseibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh-----	II - 188
2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Bersih-----	II - 189
2.1.4.3.3. Rasio Ketersediaan Daya listrik-----	II - 191
2.1.4.3.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik -----	II - 191
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA Tahun 2017-2022 -----	II - 192
2.2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2021 Terhadap RKPA Tahun 2021 -----	II - 192
2.2.2. Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Terhadap RKPA Tahun 2021-----	II - 196
2.2.3. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan -----	II - 198

2.2.3.1.	Realisasi Pendanaan -----	II - 198
2.2.3.2.	Realisasi Pendapatan-----	II - 199
2.2.3.3.	Realisasi Belanja -----	II - 203
2.2.3.4.	Realisasi Pembiayaan -----	II - 204
2.2.3.5.	Trend APBA-----	II - 205
2.2.3.6.	Metode Evaluasi-----	II - 206
2.2.3.7.	Capaian Anggaran -----	II - 206
2.2.3.8.	Capaian Kinerja-----	II - 225
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021-----	II - 226
2.3.1.	Bidang Urusan Pendidikan -----	II - 226
2.3.2.	Bidang Urusan Kesehatan-----	II - 230
2.3.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum-----	II - 233
2.3.3.1.	Sub Urusan Air Minum-----	II - 234
2.3.3.2.	Sub Urusan Limbah -----	II - 235
2.3.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat-----	II - 237
2.3.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat -----	II - 241
2.3.5.	Bidang Urusan Sosial-----	II - 246
2.4.	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs-----	II - 255
2.4.1.	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Apapun-----	II - 257
2.4.2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan -----	II - 260
2.4.3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia-----	II - 262
2.4.4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua-----	II - 264
2.4.5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan-----	II - 267
2.4.6.	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua -----	II - 270
2.4.7.	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua -----	II - 273
2.4.8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua-----	II - 275
2.4.9.	Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi-----	II - 276
2.4.10.	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara -----	II - 277
2.4.11.	Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman,Tangguh dan Berkelanjutan -----	II - 279
2.4.12.	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan -----	II - 281

2.4.13.	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya-----	II - 283
2.4.14.	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan -----	II - 284
2.4.15.	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati-----	II - 285
2.4.16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh-----	II - 287
2.4.17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan -----	II - 290
2.5.	Permasalahan Pembangunan Daerah -----	II - 291
2.5.1.	Aspek Geografi dan Demografi-----	II - 292
2.5.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	II - 292
2.5.3.	Aspek Pelayanan Umum -----	II - 294
2.5.4.	Aspek Daya Saing Daerah-----	II - 305
2.6.	Isu Strategis -----	II - 313
2.6.1.	Peningkatan Kualitas Demokrasi -----	II - 314
2.6.2.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur -----	II - 314
2.6.3.	Penguatan Adat Isitiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam-----	II - 314
2.6.4.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia -----	II - 315
2.6.5.	Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan-----	II - 315
2.6.6.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat -----	II - 315
2.6.7.	Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem ----	II - 316
2.6.8.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi-----	II - 316
2.6.9.	Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan -----	II - 317
2.6.10.	Optimalisasi Kemandirian Pangan-----	II - 317
2.6.11.	Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran -	II - 318
2.6.12.	Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis -----	II - 318
2.6.13.	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana-----	II - 319
2.6.14.	Penguatan Perdamaian Secara Berkelanjutan -----	II - 320
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH-----	III - 1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Aceh -----	III - 3
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Aceh -----	III - 4
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Aceh -----	III - 4
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Aceh -----	III - 6
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh-----	III - 10

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH -----	IV - 1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan-----	IV - 1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional-----	IV - 1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh-----	IV - 2
4.2.	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023-----	IV - 20
4.2.1.	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2023-----	IV - 20
4.2.2.	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran-----	IV - 22
4.2.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	IV - 25
4.2.4.	Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh 2023-----	IV - 40
4.2.5.	Ketertaitan dan Konsistensi Prioritas Aceh (PA), Program Prioritas (PP) dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023----	IV - 91
4.3.	Pemenuhan SPM-----	IV - 111
4.4.	Pembangunan Rendah Karbon-----	IV - 114
4.4.1.	Bidang Pertanian-----	IV - 116
4.4.2.	Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut-----	IV - 118
4.4.3.	Bidang Energi dan Transportasi-----	IV - 121
4.4.4.	Bidang Pengelolaan Limbah-----	IV - 126
4.5.	Inovasi-----	IV - 128
4.5.1.	SIKARZA (Sistem Informasi Karyawan RSUD-ZA)-----	IV - 131
4.5.2.	SIGAP (Sistem Informasi Gampong)-----	IV - 131
4.5.3.	BaGAH(Baitul Mal Gerak Aksi Humanis)-----	IV - 132
4.5.4.	Pelayanan Adminduk oleh Petugas Registrasi Gampong (PRG)-----	IV - 133
4.5.5.	Aplikasi PPID Aceh-----	IV - 135
4.5.6.	Donor Darah ASN Aceh-----	IV - 135
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA -----	V - 1
5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota-----	V - 1
5.1.1.	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-----	V - 1
5.1.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-----	V - 1
5.1.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi-----	V - 2
5.1.1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-----	V - 4
5.1.1.4.	Persentase Penduduk Miskin-----	V - 5
5.1.2.	Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh -----	V - 7
5.2.	Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota-----	V - 8
5.3.	Proyek Pembangunan Kabupaten/Kota Pendukung PN-----	V - 26
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH -----	VI - 1
6.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2023---	VII - 1
6.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2023---	VII - 10

BAB VII	KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH -----	VII - 1
7.1.	Perkembangan Kasus Covid-19-----	VII - 1
7.2.	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19 -----	VII - 2
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH -----	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP -----	IX - 1
LAMPIRAN I	- HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPA TAHUN 2021 DAN REALISASI RPJMA 2017-2022	
LAMPIRAN II	- FOTO-FOTO VISUAL PENYUSUNAN RKPA TAHUN 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan Tahun 2017 -----	II - 5
Tabel 2.2.	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016-----	II - 6
Tabel 2.3.	Potensi Danau Aceh -----	II - 6
Tabel 2.4.	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh -----	II - 7
Tabel 2.5.	Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2015-2021 -----	II - 8
Tabel 2.6.	Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 -----	II - 9
Tabel 2.7.	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021-----	II - 10
Tabel 2.8.	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-----	II - 11
Tabel 2.9.	Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021	II - 12
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-----	II - 14
Tabel 2.11.	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021-----	II - 19
Tabel 2.12.	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan UsahaTahun 2017-2021 -----	II - 24
Tabel 2.13.	Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha,Tahun 2017 - 2021 (Persen) ----	II - 25
Tabel 2.14.	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017- 2021-----	II - 26
Tabel 2.15.	Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2017-2021 (Persen)-----	II - 30
Tabel 2.16.	Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2017-2021 (Persen)an; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran -----	II - 32
Tabel 2.17.	Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 -----	II - 35
Tabel 2.18.	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 (Maret) -----	II - 40
Tabel 2.19.	Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas Menurut Karakteristik, Tahun 2017-2021-----	II - 43
Tabel 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2017-2021 --	II - 44
Tabel 2.21.	Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus 2021 -----	II - 44
Tabel 2.22.	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2021-----	II - 45
Tabel 2.23.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2017 – 2020 -----	II - 46

Tabel 2.24.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Aceh, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016– 2020 -----	II - 47
Tabel 2.25.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 -----	II - 48
Tabel 2.26.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2017 – 2021-----	II - 49
Tabel 2.27.	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021 -----	II - 50
Tabel 2.28.	Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II - 53
Tabel 2.29.	Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021 -----	II - 59
Tabel 2.30.	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2017-2021-----	II - 62
Tabel 2.31.	Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2017-2021-	II - 63
Tabel 2.32.	Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Fardhu 5 (Lima) Waktu Tahun 2021 -----	II - 63
Tabel 2.33.	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2017 – 2021 -----	II - 65
Tabel 2.34.	Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2017 - 2021	II - 67
Tabel 2.35.	Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021 -----	II - 69
Tabel 2.36.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020 -----	II - 69
Tabel 2.37.	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2016– 2020 -----	II - 70
Tabel 2.38.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2016 – 2020 -----	II - 71
Tabel 2.39.	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2019--	II - 72
Tabel 2.40.	Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2019-----	II - 74
Tabel 2.41.	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2016– 2019 -----	II - 75
Tabel 2.42.	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2016– 2019 -----	II - 75
Tabel 2.43.	Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat Tahun 2018-2019	II - 76
Tabel 2.44.	Angka Kematian Neonatus Tahun 2016 – 2020 -----	II - 77
Tabel 2.45.	Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2010– 2020-----	II - 78
Tabel 2.46.	Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2016 – 2020-	II - 78
Tabel 2.47.	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2016 – 2020-----	II - 80
Tabel 2.48.	Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2020-----	II - 81
Tabel 2.49.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 -----	II - 82
Tabel 2.50.	Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC Tahun 2022-----	II - 85

Tabel 2.51.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021 -----	II - 87
Tabel 2.52.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021 ---	II - 88
Tabel 2.53.	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 -----	II - 89
Tabel 2.54.	Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020 -----	II - 91
Tabel 2.55.	Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya -----	II - 92
Tabel 2.56.	Jenis Irigasi dan Luasannya -----	II - 92
Tabel 2.57.	Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota -----	II - 92
Tabel 2.58.	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan -----	II - 93
Tabel 2.59.	Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan -----	II - 94
Tabel 2.60.	Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2017-2021-----	II - 95
Tabel 2.61.	Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2015-2019 -----	II - 96
Tabel 2.62.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021 -----	II - 99
Tabel 2.63.	Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021 -----	II - 99
Tabel 2.64.	Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh-----	II - 100
Tabel 2.65.	Pemberian Hibah kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh-----	II - 101
Tabel 2.66.	Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial Milik Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017–2021-----	II - 103
Tabel 2.67.	Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021 ----	II - 104
Tabel 2.68.	Penanganan PMKS di Provinsi Aceh Tahun 2017–2021 -----	II -104
Tabel 2.69.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Aceh Tahun 2017–2021 -----	II - 105
Tabel 2.70.	Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2020 -----	II - 108
Tabel 2.71.	Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2017-2021-----	II - 120
Tabel 2.72.	Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2016-2020-----	II - 122
Tabel 2.73.	Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II -126
Tabel 2.74.	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II - 126
Tabel 2.75.	Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II - 127

Tabel 2.76.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II - 128
Tabel 2.77.	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II - 128
Tabel 2.78.	Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2013-2020-----	II - 131
Tabel 2.79.	Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2017-2021 -----	II - 133
Tabel 2.80.	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2017-2021 -----	II - 133
Tabel 2.81.	Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2017-2021 -	II - 135
Tabel 2.82.	Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020 -----	II - 139
Tabel 2.83.	Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 -----	II - 139
Tabel 2.84.	Data Arsip Tahun 2016-2020-----	II - 141
Tabel 2.85.	Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020 -----	II - 141
Tabel 2.86.	Gedung dan Bangunan Terbangkalai (tidak fungsional) -----	II - 142
Tabel 2.87.	Bangunan dan Gedung Terbangkalai kewenangan Kabupaten/Kota. -----	II - 143
Tabel 2.88.	Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton) -----	II - 149
Tabel 2.89.	Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021-----	II - 151
Tabel 2.90.	Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020 -----	II - 153
Tabel 2.91.	Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya -----	II - 154
Tabel 2.92.	Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2020-----	II - 155
Tabel 2.93.	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2020	II - 156
Tabel 2.94.	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2015-2019 (dalam Miliar Rupiah) -----	II - 157
Tabel 2.95.	Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2016-2020 -----	II - 157
Tabel 2.96.	Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020	II - 160
Tabel 2.97.	Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting -----	II - 160
Tabel 2.98.	Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) -----	II - 161
Tabel 2.99.	Rencana Pembangunan Pembangkit-----	II - 162
Tabel 2.100.	Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020-----	II - 163
Tabel 2.101.	Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2015-2020-----	II - 169
Tabel 2.102.	Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2016-2020-----	II - 170
Tabel 2.103.	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 -----	II - 174

Tabel 2.104. Predikat WTP Kabupaten Kota 2020 -----	II - 177
Tabel 2.105. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020 -----	II - 178
Tabel 2.106. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020-----	II - 178
Tabel 2.107. Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan-----	II - 179
Tabel 2.108. Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) Tahun 2020-----	II - 182
Tabel 2.109. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019 -----	II - 188
Tabel 2.110. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2020 -----	II - 190
Tabel 2.111. Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2015-2019 -----	II - 191
Tabel 2.112. Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap Target RKPA 2021 -----	II - 295
Tabel 2.113. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2021 Terhadap Target RKPA Tahun 2021-----	II - 196
Tabel 2.114. Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2021 -----	II - 199
Tabel 2.115. Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2021 -----	II - 200
Tabel 2.116. Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2021 -----	II - 203
Tabel 2.117. Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2021-----	II - 204
Tabel 2.118. Kriteria Kinerja-----	II - 206
Tabel 2.119. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022) -----	II - 206
Tabel 2.120. Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2021 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah-----	II - 208
Tabel 2.121. Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022-----	II - 217
Tabel 2.122. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022 -----	II - 225
Tabel 2.123. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah Tahun 2021 -----	II - 227
Tabel 2.124. Pencapaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 227
Tabel 2.125. Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 228
Tabel 2.126. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021-----	II - 229
Tabel 2.127. Sasaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 231
Tabel 2.128. Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021-----	II - 231

Tabel 2.129. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Tahun 2021-----	II - 233
Tabel 2.130. Jenis Pelayanan Menurut Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 -----	II - 234
Tabel 2.131. Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Air Minum Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 235
Tabel 2.132. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota -----	II - 235
Tabel 2.133. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Air Limbah Tahun 2021	II - 236
Tabel 2.134. Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021 -----	II - 237
Tabel 2.135. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021-----	II - 238
Tabel 2.136. Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat -----	II - 239
Tabel 2.137. Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 239
Tabel 2.138. Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh dari Tahun 2008 s.d 2021-----	II - 241
Tabel 2.139. Target dan Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 241
Tabel 2.140. Target dan Indikator Capaian SPM Satpol PP-WH Aceh Tahun 2021 -----	II - 242
Tabel 2.141. Realisasi Capaian SPM Satpol PP-WH Aceh Tahun 2021 -----	II - 243
Tabel 2.142. Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Trantibum Tahun 2021 ----	II - 245
Tabel 2.143. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 247
Tabel 2.144. Target Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021-----	II - 248
Tabel 2.145. Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II - 249
Tabel 2.146. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan(Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan) -----	II - 260
Tabel 2.147. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 2 Tanpa Kelaparan) -----	II - 262
Tabel 2.148. Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan (Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia -----	II - 264
Tabel 2.149. Perkembangan Indikator TPB/SDGs Yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus (Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas) -----	II - 267
Tabel 2.150. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 5 Kesetaraan Gender)-----	II - 270

Tabel 2.151. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi layak)-----	II - 273
Tabel 2.152. Form 1. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau) -----	II - 274
Tabel 2.153. Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 16)-----	II - 276
Tabel2.154. Form 1. Perkembangan Indikator TPB/SDGs Yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus (Tujuan 9)-----	II - 277
Tabel 2.155. Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 10)-----	II - 279
Tabel 2.156. Form 1. Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan (Tujuan 11) --	II - 281
Tabel2.157. Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 -----	II - 282
Tabel 2.158. Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 13)-----	II - 284
Tabel2.159. Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 14)-----	II - 285
Tabel 2.160. Kelas Penutupan Lahan Tahun 2021 -----	II - 286
Tabel 2.161. Luas Deforestasi Aceh Tahun 2019-2020-----	II - 287
Tabel 2.162 Predikat WTP Kabupaten Kota Tahun 2020 -----	II - 288
Tabel 2.163. Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan (Tujuan 16)-----	II - 290
Tabel 2.164. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB/Kontribusi Pajak terhadap PAA (proxy)-----	II - 291
Tabel 2.165. Form 1 Perkembangan Indikator TPB/SDGs yang Mengalami Perkembangan (Tujuan 17) -----	II - 291
Tabel 2.166 Permasalahan Pembangunan Aceh yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah -----	II - 307
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Aceh Tahun 2020 s.d 2024 -----	III - 5
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2020 s.d Tahun 2024 -----	III - 9
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2020 s.d 2024 -----	III - 10
Tabel 4.1. Target Sasaran dan Indikator Sasaran Indikator Pembangunan Tahun 2023 -----	IV - 2
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	IV - 6
Tabel 4.3. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Aceh dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2023 -----	IV - 8
Tabel 4.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	IV - 31

Tabel 4.5.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023-----	IV - 40
Tabel 4.6.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Permasalahan Pembangunan Tahun 2023 -----	IV - 47
Tabel 4.7.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Isu Strategis Tahun 2023 -----	IV - 52
Tabel 4.8.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026 -----	IV - 53
Tabel 4.9.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Pokok Pokok Pikiran DPRa Tahun 2023 -----	IV - 57
Tabel 4.10.	Program Prioritas Pendukung PA 1 : Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif -----	IV - 62
Tabel 4.11.	Program Prioritas Pendukung PA 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing-----	IV - 66
Tabel 4.12.	Program Prioritas Pendukung PA 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan-----	IV - 71
Tabel 4.13.	Program Prioritas Pendukung P4 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh -----	IV - 76
Tabel 4.14.	Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	IV - 81
Tabel 4.15.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 -----	IV - 91
Tabel 4.16.	Keselarasan Program Daerah dengan Kegiatan Prioritas PN Tahun 2023 -----	IV - 93
Tabel 4.17.	Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Tahun 2023 -----	IV - 112
Tabel 4.18.	Hasil Perhitungan Emisi Historis Bidang Pertanian Provinsi Aceh Tahun 2000-2010 -----	IV - 116
Tabel 4.19.	Hasil Proyeksi BAU Baseline Emisi Provinsi Aceh Tahun 2011-2030 ----	IV - 117
Tabel 4.20.	Hasil Identifikasi Rencana Aksi Mitigasi Bidang Pertanian Provinsi Aceh	IV - 117
Tabel 4.21.	Identifikasi Awal Sumber Emisi di Provinsi Aceh-----	IV - 118
Tabel 4.22.	Identifikasi Aksi Mitigasi Inti dan Pendukung-----	IV - 120
Tabel 4.23.	Sumber-sumber Emisi GRK-----	IV - 121
Tabel 4.24.	Rencana Aksi Mitigasi GRK Kelompok Bidang Energi -----	IV - 124
Tabel 4.25.	Sumber Emisi GRK Bidang Pengelolaan Limbah-----	IV - 127
Tabel 4.26.	Daftar Inovasi Layak Kirim Untuk Kompetisi IGA Tahun 2021-----	IV - 129
Tabel 5.1.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021 -----	V - 3
Tabel 5.2.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021 -----	V - 4

Tabel 5.3.	Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021 -----	V - 6
Tabel 5.4.	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/ Kota se-Aceh Tahun 2023 --	V - 8
Tabel 5.5.	Wilayah Pengembangan di Provinsi Aceh-----	V - 10
Tabel 5.6.	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Wilayah Pengembangan Aceh Tahun 2023-----	V - 16
Tabel 5.7.	Proyek Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	V - 27
Tabel 6.1.	Hasil Desk Kewilayahan Aceh pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2022 -----	VI - 3
Tabel 6.2.	Hasil Pembahasan Desk Aceh pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 -----	VI - 8
Tabel 6.3.	Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Per SKPA -----	VI - 11
Tabel 6.4.	Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 -----	VI - 13
Tabel 7.1.	Perkembangan Kasus COVID-19 di Aceh per 11 Desember 2021-----	VII - 1
Tabel 7.2.	Program dan Alokasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2023 -----	VII - 4
Tabel 8.1.	Target Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2023-----	VIII - 1
Tabel 8.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2023 -----	VIII - 2
Tabel 8.3.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2023 -----	VIII - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Aceh -----	II - 2
Gambar 2.2.	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016-----	II - 4
Gambar 2.3.	Gambar Rata-rata Curah Hujan Tertinggi-----	II - 9
Gambar 2.4.	Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 (jiwa)-----	II - 15
Gambar 2.5.	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh -----	II - 18
Gambar 2.6.	Lapisan Tanah Pasir di Gua Eek Lunttie Aceh Besar sejak 7500 Tahun Lalu-----	II - 20
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016-2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (persen) -----	II - 22
Gambar 2.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016- 2021 (Persen) -----	II - 23
Gambar 2.9.	Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021 -----	II - 29
Gambar 2.10.	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Aceh 2017-2021-----	II - 33
Gambar 2.11.	Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021 (Maret) -----	II - 34
Gambar 2.12.	Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2020 -----	II - 37
Gambar 2.13.	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2021 -----	II - 39
Gambar 2.14.	Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015-2021 (Kondisi September) -----	II - 39
Gambar 2.15.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dab Nasional Tahun 2016-2021, (September) -----	II - 41
Gambar 2.16.	Garis Kemiskinan Makanan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September) -----	II - 42
Gambar 2.17.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021-----	II - 49
Gambar 2.18.	Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021 -----	II - 51
Gambar 2.19	Angka Kematian Bayi (ABI) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021 -----	II - 52
Gambar 2.20.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2017 – 2021-----	II - 54
Gambar 2.21.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 -2020-----	II - 55
Gambar 2.22.	Kondisi kasus Covid-19 di Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 --	II - 56
Gambar 2.23.	Capaian Vaksinasi Aceh Per 31 Desember 2021 -----	II - 57
Gambar 2.24.	Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017	II - 62
Gambar 2.25.	Penerbitan Sertifikat Halal 2016-2021 -----	II - 68
Gambar 2.26.	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2019-----	II - 73

Gambar 2.27. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak Tahun 2020-2022-----	II - 83
Gambar 2.28. Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2021-----	II - 87
Gambar 2.29. Pembagian Wilayah Sungai Aceh-----	II - 97
Gambar 2.30. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2015-2021-----	II - 106
Gambar 2.31. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020 -----	II - 107
Gambar 2.32. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019 -----	II - 110
Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 – 2021-----	II - 111
Gambar 2.34. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2016 – 2021-----	II - 111
Gambar 2.35. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR Aceh dan DPR Kab/Kota)-----	II - 112
Gambar 2.36. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh-----	II - 113
Gambar 2.37. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Tahun 2016-2020 --	II - 114
Gambar 2.38. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021 ---	II - 116
Gambar 2.39. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 -----	II - 116
Gambar 2.40. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh -----	II - 118
Gambar 2.41. Status Desa di Aceh Tahun 2020-2021-----	II - 121
Gambar 2.42. IDM Aceh Tahun 2021-----	II - 121
Gambar 2.43. Total Fertility Rate (TFR) Nasional dan Aceh Tahun 2017-2021-----	II - 122
Gambar 2.44. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014 2020 -----	II - 123
Gambar 2.45. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2020 -----	II - 124
Gambar 2.46. Prasarana Transportasi Aceh -----	II - 125
Gambar 2.47. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-202 -----	II - 127
Gambar 2.48. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh tahun 2020-2021 -----	II - 140
Gambar 2.49. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen). Tahun 2016 – 2021-----	II - 144
Gambar 2.50. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan-----	II - 145
Gambar 2.51. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ---	II - 146
Gambar 2.52. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh -----	II - 147
Gambar 2.53. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020-----	II - 148

Gambar 2.54. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha)-----	II - 148
Gambar 2.55. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020-----	II - 155
Gambar 2.56. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021-----	II - 155
Gambar 2.57. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh Tahun 2016- 2020-----	II - 152
Gambar 2.58. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh-----	II - 159
Gambar 2.59. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020 --	II - 163
Gambar 2.60. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2021-----	II - 164
Gambar 2.61. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen) -----	II - 166
Gambar 2.62. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021(persen) -----	II - 167
Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016-2020 -----	II - 168
Gambar2.64. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2016-2021-----	II - 170
Gambar 2.65. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun) -----	II - 171
Gambar 2.66. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020 -----	II - 172
Gambar 2.67. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim -----	II - 173
Gambar 2.68. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar -----	II 181
Gambar 2.69. Perkembangan Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2021-----	II - 182
Gambar 2.70. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020 -----	II - 184
Gambar 2.71. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020-----	II - 184
Gambar 2.72. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020 -----	II - 185
Gambar 2.73. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2015-2020 -----	II - 186
Gambar 2.74. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2017-2021-----	II - 186
Gambar 2.75. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun Des 2017- Des 2020-----	II - 187
Gambar 2.76. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2020-----	II -192

Gambar 2.77. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2021 (dalam persentase)-----	II - 198
Gambar 2.78. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliyun rupiah)-----	II - 202
Gambar 2.79. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2021 -----	II - 202
Gambar 2.80. Struktur Belanja Aceh Tahun 2021-----	II - 204
Gambar 2.81. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah) -----	II - 205
Gambar 2.82. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2021 (%)--	II - 215
Gambar 2.83. Tujuan/Goals TPB/SDGs -----	II - 256
Gambar 2.84. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2018 - 2021 (Persentase) -----	II - 257
Gambar 2.85. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan/Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Tahun 2018 - 2021 -----	II - 258
Gambar 2.86. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh Tahun 2018 - 2021-----	II - 259
Gambar 2.87. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari Tahun 2018 - 2021-----	II - 261
Gambar 2.88. Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa Tahun 2018 – 2021 -----	II - 269
Gambar 2.89. Persentase SMA/MA Berakreditasi A Tahun 2018 - 2021-----	II - 263
Gambar 2.90. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /Sederajat Tahun 2018 - 2021-----	II - 265
Gambar 2.91. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif/ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018-2021 ----	II - 267
Gambar 2.92. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif/ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018-2021 ----	II - 269
Gambar 2.93. Luas Pengembangan Hutan Serta Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Untuk Pemulihan Kawasan DAS/ Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan (Proxy) Tahun 2018-2021 -----	II - 271
Gambar 2.94. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi/Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (proxy) Tahun 2018 - 2021-----	II - 272
Gambar 2.95. Rasio Elektrifikasi di Aceh Tahun 2018 - 2021 -----	II - 274
Gambar 2.96. PDRB Per Kapita Aceh Tahun 2018 – 2021 (Jutaan) -----	II - 275
Gambar 2.97. Kondisi Mantap Jalan Provinsi/ Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (proxy) (Persentase) -----	II - 276
Gambar 2.98. Jumlah Desa Mandiri Tahun 2018-2021 -----	II - 278

Gambar 2.99. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani/Persentase Sampah Terangkut (Persentase)-----	II - 280
Gambar 2.100. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang/Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (proxy)-----	II - 283
Gambar 2.101. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman-----	II - 284
Gambar 2.102. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komperensif/Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018-2020-----	II - 289
Gambar 2.103. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumusan Isu Strategis Aceh ----	II - 313
Gambar 2.104. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman-----	II - 284
Gambar 2.105. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komperensif/Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018-2020-----	II - 289
Gambar 3.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyusun PDRB Aceh Tahun 2021 (Persen) -----	III - 2
Gambar 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024-----	IV - 1
Gambar 4.2. Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 -----	IV - 21
Gambar 4.3. Alur Penyampaian Pokok Pokok Pikiran Dewan Dalam SIPD -----	IV - 23
Gambar 4.4. Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 -----	IV - 41
Gambar 4.5. Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023 (PA 1: Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif)-----	IV - 59
Gambar 4.6. Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023 (PA 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing) -----	IV - 60
Gambar 4.7. Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023 (PA 3: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan)-----	IV - 60
Gambar 4.8. Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023 (PA 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh)-----	IV - 61
Gambar 4.9. Peta Kerapatan Karbon Tahun 2006 – 2011 -----	IV - 115
Gambar 4.10. Demarkasi Antara Perhitungan Emisi RAN dan RAD GRK-----	IV - 125

Gambar 4.11. Sumber Utama GRK dari Pengelolaan Limbah -----	IV - 127
Gambar 4.12. Pelatihan Aplikasi SIGAP Oleh Tim DPMG dan KOMPAK -----	IV - 132
Gambar 4.13. Gerak Cepat Tim BaGAH (Baitul Mal Gerak Aksi Humanis) -----	IV - 133
Gambar 4.14. Pelayanan Adminduk oleh Petugas Registrasi Gampong (PRG)-----	IV - 134
Gambar 4.15. Dampak Inovaasi Petugas Registrasi Gampong (PRG) Tahun 2017- 2018-----	IV - 134
Gambar 4.16. Dashboard dan Penandatanganan Komitmen PPID Aceh -----	IV - 135
Gambar 4.17. Aksi Donor Darah ASN di Lingkup Pemerintah Aceh -----	IV - 136
Gambar. 5.1. IPM Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021 -----	V - 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis sebagai berikut:

1. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
2. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
3. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Aceh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023 bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tahun 2023. Penyusunan RKPA Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Disamping itu, perumusan RKPA Tahun 2023 juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh RPA Tahun 2023 – 2026

Arah Kebijakan Pembangunan Aceh dalam RKPA Tahun 2023 mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Aceh yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam rangka mengatasi dampak social ekonomi dari COVID-19.

2. Sasaran dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPA Tahun 2023 mengacu pada Sasaran dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 yaitu terwujudnya lumbung energi dan pangan serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah serta pengembangan kawasan ekonomi untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. IPM Aceh Tahun 2021 sebesar 72,14 lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini untuk Aceh sebesar 0,324 lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh sebesar 6,30 persen lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Namun, untuk tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada Tahun 2020 menurun menjadi -0,37 persen dan untuk pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi -2,07 persen. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh ini sudah membaik menjadi 2,82 persen dan nasional 3,51 persen. Sementara itu, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan dalam RKPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Pandemi COVID-19

Penanganan pandemi COVID-19 dan dampak negatif COVID-19 masih menjadi prioritas pembangunan Tahun 2023 baik dibidang kesehatan, social dan ekonomi.

2. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.

3. Penurunan Alokasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Penurunan Alokasi Dana Otsus mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi 1 persen dari DAU Nasional dan pada tahun 2028 diprediksikan tidak ada lagi. Dengan demikian, kedisiplinan pemanfaatan dana harus difokuskan sesuai dengan UU-PA Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018, yaitu: 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, 2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 3) Pengentasan Kemiskinan, 4) Pendanaan Pendidikan, 5) Sosial, 6) Kesehatan, 7) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan 8) Penguatan Perdamaian (6+2).

4. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024

Aceh bersama dengan Provinsi Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024, namun sampai dengan saat ini Aceh belum menyiapkan lokasi (lahan) termasuk penyiapan *Detail Engineering Desain* (DED) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan PON.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPA Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPA Tahun 2023 tanggal 01 Desember 2021 s.d 31 Januari 2022;
2. Penginputan Rancangan Awal RKPA dalam SIPD tanggal 01 s.d 11 Februari 2022;
3. Penyampaian Rancangan Awal Renja SKPA kepada Bappeda tanggal 14 .sd 17 Februari 2022;
4. Penyampaian Pokok Pokok Pikiran Reses DPRA tanggal 15 Februari 2022;
5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPA Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2022;

6. Penyampaian Rancangan Renja SKPA kepada Bappeda tanggal 07 Maret 2022;
7. Verifikasi kesesuaian Rancangan renja SKPA dengan Ranwal RKPA Tahun 2023 tanggal 08 s.d 09 Maret 2022;
8. Penginputan Pokok Pokok Pikiran DPRA kedalam e-pokir tanggal 17 s.d 23 Maret 2022;
9. Penyampaian SE Gubernur kepada Kepala SKPA tentang Penyusunan Renja SKPA tanggal 11 April 2022;
10. Penginputan Rancangan Renja SKPA kedalam aplikasi SIPD tanggal 05 s.d 08 April 2022;
11. Pengajuan Rancangan RKPA Tahun 2023 kepada Gubernur tentang Persetujuan Rancangan RKPA Tahun 2023 dan Pelaksanaan Musrenbang RKPA Tahun 2023 tanggal 11 April 2022;
12. Penyampaian Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tanggal 11 April 2022;
13. Pembukaan Musrenbang RKPA Tahun 2023 tanggal 14 April 2022;
14. Pembahasan Renja SKPA tanggal 18 s.d 20 April 2022;
15. Pembahasan DOKA Kabupaten/Kota tanggal 21 s.d 26 April 2022;
16. Perumusan Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 tanggal 23 s.d 27 Mei 2022;
17. Penyelesaian Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Pergub tentang RKPA Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2022;
18. Penyampaian Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 ke DPRA untuk konsultasi tanggal 02 Juni 2022;
19. Penyampaian Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 ke Inspektorat untuk review APIP tanggal 27 Mei 2022;
20. Penyampaian Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 ke Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI untuk difasilitasi tanggal 07 Juni 2022;
21. Penyampaian Laporan Hasil Reviu APIP Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 oleh Inspektorat Aceh tanggal 10 Juni 2022.
22. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI untuk tanggal 17 Juni 2022;
23. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPA Tahun 2023 hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 17 s.d 21 Juni 2022;
24. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPA Tahun 2023 kepada Gubernur untuk persetujuan penetapan dan pengundangan tanggal 22 Juni 2022;
25. Penetapan Peraturan Gubernur Aceh tentang RKPA Tahun 2023 tanggal 24 Juni 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPA Tahun 2023 meliputi peraturan perundang-undangan baik yang berskala nasional maupun lokal yang memuat ketentuan langsung terkait penyusunan RKPD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPA Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkenaan hal tersebut diatas,

maka dapat dijelaskan hubungan RKPA Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

a. Hubungan dengan RKP Tahun 2023

RKPA Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keterkaitan RKPA Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 meliputi pemetaan kebijakan (tema pembangunan), sasaran dan prioritas pembangunan serta program prioritas Tahun 2023.

b. Hubungan dengan RPJMA Tahun 2017-2022

Perumusan permasalahan dan isu strategis RKPA Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022. Evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dan menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target kinerja program Tahun 2022 terhadap RPJMA Tahun 2017-2022. Selain itu, evaluasi capaian kinerja RPJMA Tahun 2017-2022 menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPA Tahun 2023.

c. Hubungan dengan RPA Tahun 2023-2026

RKPA Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPA Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPA Tahun 2023 berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026 dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

d. Hubungan dengan Renja SKPA Tahun 2023

RKPA Tahun 2023 menjadi pedoman bagi SKPA dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPA Tahun 2023. Keselarasan antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif Tahun 2023.

e. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBA 2023

RKPA Tahun 2023 akan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) Tahun 2023. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBA Tahun 2023 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPA Tahun 2023.

1.4. Sistematika Dokumen RKPA

Sistematika dokumen RKPA Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumentasi RKPA serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

Memuat kondisi umum Aceh, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPA sampai tahun 2022 dan realisasi RPJMA sampai dengan Tahun 2022, permasalahan dan isu strategis pembangunan Aceh.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

Memuat kondisi ekonomi Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022, arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan serta realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Aceh.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Menjelaskan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas Tahun 2023 yang dikaitkan dengan arahan kebijakan dan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan dan target makro yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Aceh.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Aceh yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPA Tahun 2023-2026.

BAB VII KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI ACEH

Memuat arahan kebijakan, program/kegiatan serta anggaran pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) yang akan dicapai Tahun 2023.

BAB IX PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPA Tahun 2023 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Aceh Tahun 2023, dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA Tahun 2023;
3. Menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2023;
4. Menjadi pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023;
5. Sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) Tahun 2023; dan
6. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

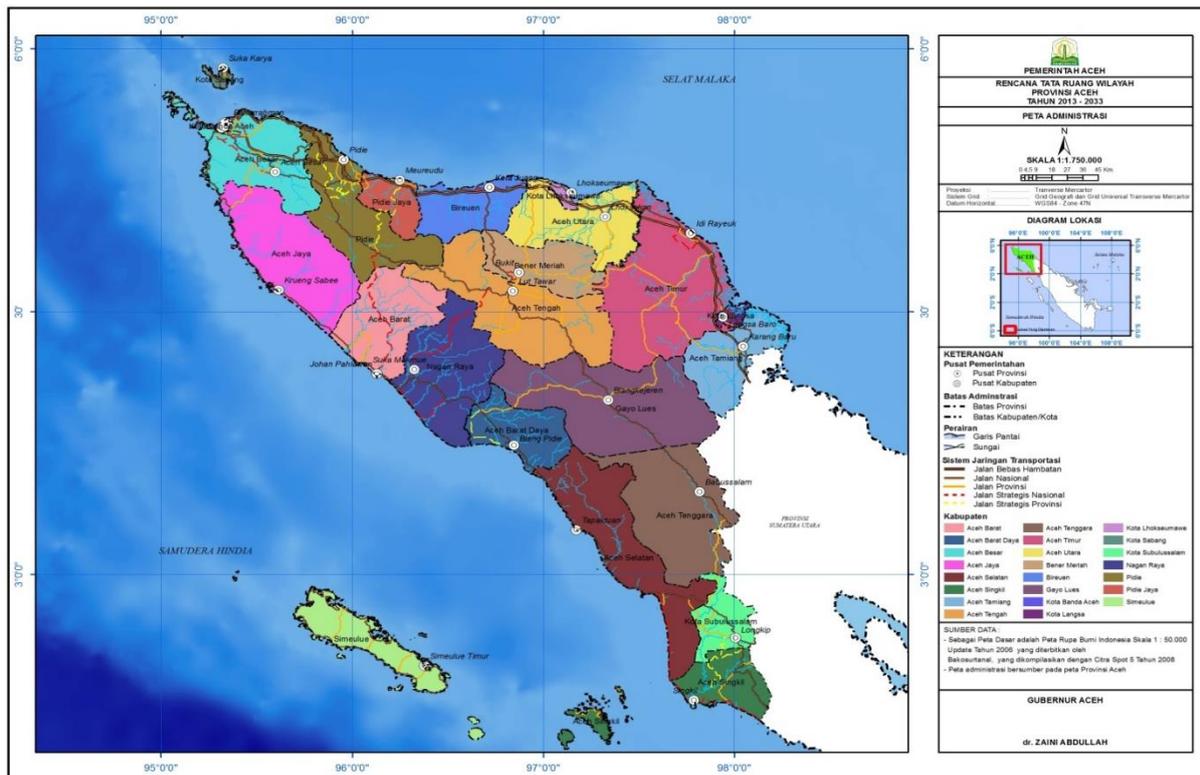
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada $01^{\circ}58'37,2''$ - $06^{\circ}04'33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}57'57,6''$ - $98^{\circ}17'13,2''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km² atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km² atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km² atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.



Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

2.1.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengannya wilayah Aceh memiliki kelerengannya datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah

berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

2.1.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
- b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- c. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
- e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment (gravel, sand, silt, clay)*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

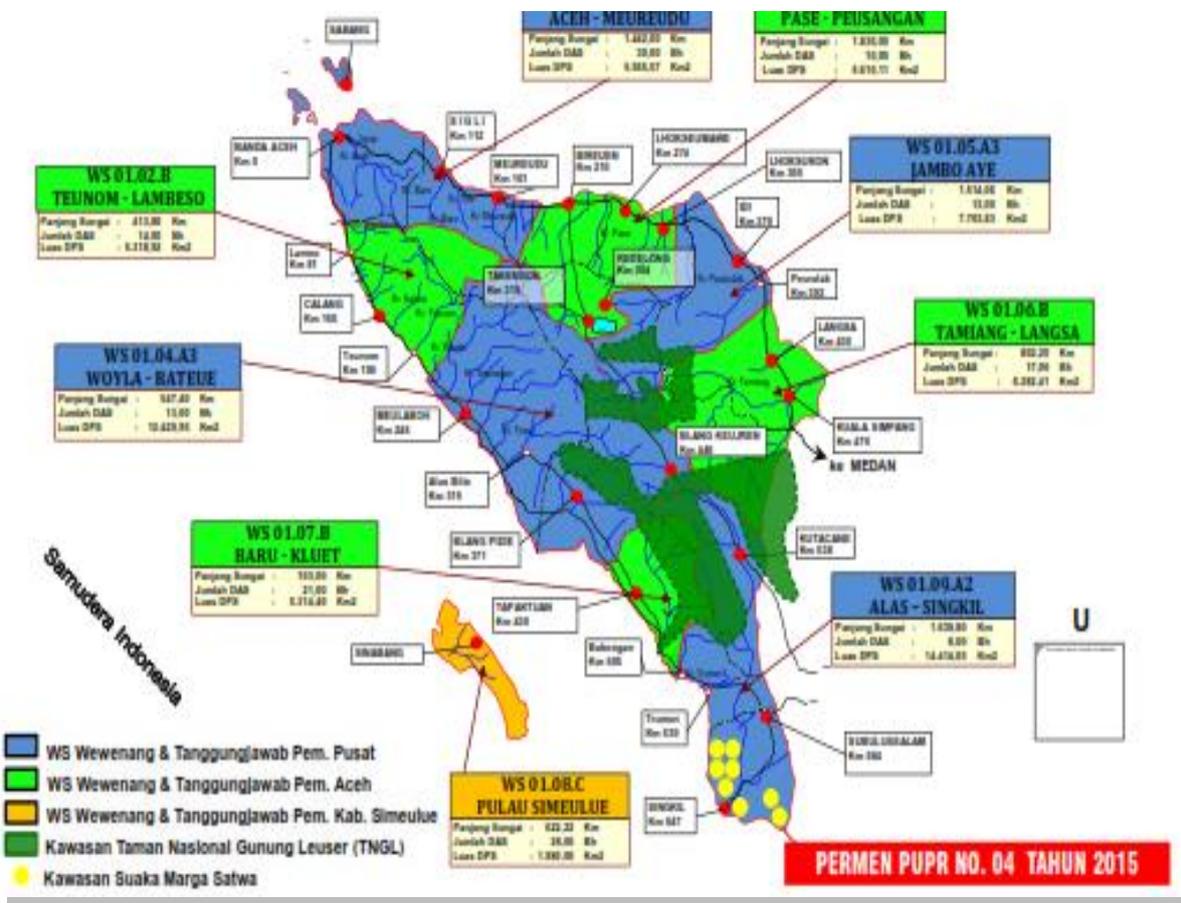
2.1.1.1.4. Hidrologi

A. Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

1. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yang meliputi yaitu Wilayah Sungai Aceh - Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla - Bateue, dan Wilayah Sungai Alas - Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase - Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang - Langsa, Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru - Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)	Jumlah DAS (Buah)
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh Meureudue –	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase Peusangan –	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang Langsa –	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom Lambesoi –	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2021

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar. m ³ /thn	m ³ /dt	milyar. m ³ /thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom- Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017" data termuthakhir".

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km².

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.

2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

2.1.1.1.5. Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban
Tahun 2015-2021

Kondisi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu Udara (C)	27,4	27,1	27,49	28,4	26,0
Curah Hujan (mm)	209,1	199,9	254,8	239,9	249,7
Kelembaban (%)	79,7	78,7	82,53	66,5	88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Suhu udara selama periode tahun 2016 hingga 2021 berfluktuatif pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 sampai 2019 dan menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 26-27 °C. Pada tahun 2021, rata-rata suhu

udara di Aceh sebesar 27,15 °C. Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 254,8 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,3 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2016 sampai 2020 meskipun pada tahun 2019 menurun hingga 66,5 persen.



Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Stasiun BMKG BMKG Station	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Durasi Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
Aceh Besar	Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda	3 872,90	157,00	47,64
Aceh Besar	Stasiun Klimatologi Aceh Besar	2 293,40	212,00	65,00
Aceh Utara	Stasiun Meteorologi Malikussaleh	1 772,30	117,00	59,41
Nagan Raya	Stasiun Meteorologi Tjut Nyak Dien Meulaboh	3 667,60	181,00	59,46
Sabang	Stasiun Meteorologi Cut Bau Maimun Saleh	2 310,50	142,00	58,10

Gambar 2.3. Gambar Rata-rata Curah Hujan Tertinggi

2.1.1.2. Demografi

2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2021 sebanyak 5.325.010 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 593.511 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.559 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Aceh Selatan	236.322	3.841,60	61,52
2	Aceh Tenggara	227.297	4.231,43	53,72
3	Aceh Timur	428.580	6.286,01	68,18
4	Aceh Tengah	218.944	4.318,39	50,70
5	Aceh Barat	198.278	2.927,95	67,72
6	Aceh Besar	407.755	2.969,00	137,34
7	Pidie	435.492	3.086,95	141,08
8	Aceh Utara	593.511	3.236,86	183,36

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
9	Simeulue	94.251	2.051,48	45,94
10	Aceh Singkil	129.230	2.185,00	59,14
11	Bireuen	444.072	1.901,20	233,91
12	Aceh Barat Daya	153.067	1.490,60	102,69
13	Gayo Lues	101.650	5.719,58	17,77
14	Aceh Jaya	94.645	3.812,99	24,82
15	Nagan Raya	172.363	3.363,72	51,24
16	Aceh Tamiang	300.618	1.956,72	153,63
17	Bener Meriah	164.964	1.454,09	113,45
18	Pidie Jaya	159.829	1.073,60	148,87
19	Banda Aceh	251.288	61,36	4.095,31
20	Sabang	42.559	153,00	278,16
21	Lhokseumawe	190.903	181,06	1.054,36
22	Langsa	185.662	262,41	707,53
23	Subulussalam	93.710	1.391,00	67,37
Provinsi Aceh		5.325.010	57.956,00	91,88

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2021 Provinsi Aceh, DRKA, 2021

Ditinjau dari tingkat kepadatan, kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Tahun 2021, Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk kota tertinggi 4.095,31 jiwa/km², disusul Lhokseumawe 1.054,36 jiwa/km² dan Langsa 707,53 jiwa/km², sedangkan Kota Subulussalam memiliki kepadatan penduduk terendah 67,37 jiwa/km². Kepadatan penduduk kabupaten yang tertinggi di Kabupaten Bireuen 233,91 jiwa/km² dan kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 17,77 jiwa/km² merupakan kepadatan penduduk terendah. Secara rinci luas wilayah, sebagaimana pada tabel di atas tentang jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/Kota di Aceh.

A. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2017-2021 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Simeulue	91.375	92.393	93.228	94.146	94.251
2	Aceh Singkil	119.490	121.681	124.101	127.711	129.230
3	Aceh Selatan	231.893	235.115	238.081	237.326	236.322

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Aceh Tenggara	208.481	212.417	216.495	227.174	227.297
5	Aceh Timur	419.594	427.567	436.081	426.398	428.580
6	Aceh Tengah	204.273	208.505	212.494	216.072	218.944
7	Aceh Barat	201.682	205.971	210.113	196.834	198.278
8	Aceh Besar	409.109	417.302	425.216	403.711	407.755
9	Pidie	432.599	439.131	444.976	444.149	435.492
10	Bireuen	453.224	461.726	471.635	442.953	444.072
11	Aceh Utara	602.554	611.435	619.407	590.536	593.511
12	Aceh Barat Daya	145.726	148.111	150.393	152.949	153.067
13	Gayo Lues	91.024	92.602	94.100	101.540	101.650
14	Aceh Tamiang	287.007	291.112	295.011	299.487	300.618
15	Nagan Raya	161.329	164.483	167.294	172.257	172.363
16	Aceh Jaya	89.618	91.087	92.892	92.781	94.645
17	Bener Meriah	142.526	145.086	148.175	161.627	164.964
18	Pidie Jaya	154.795	158.091	161.215	162.174	159.829
19	Banda Aceh	259.913	265.111	270.321	248.892	251.288
20	Sabang	33.978	34.571	34.874	42.457	42.559
21	Langsa	171.574	174.318	176.811	188.244	185.662
22	Lhokseumawe	198.98	203.284	207.202	190.479	190.903
23	Subulussalam	78.725	80.215	81.417	91.423	93.710
Provinsi Aceh		5.189.466	5.281.314	5.371.532	5.311.320	5.325.010

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021, dan data tahun 2020-2021 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021 "data termutakhir"

B. Pertumbuhan Penduduk

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2021.

Tabel 2.8.
Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
11.01	Aceh Selatan	237.326	236.487	-0,35
11.02	Aceh Tenggara	227.174	227.456	0,12
11.03	Aceh Timur	426.398	429.094	0,63

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2021(Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
11.04	Aceh Tengah	216.072	219.098	1,40
11.05	Aceh Barat	196.834	198.411	0,80
11.06	Aceh Besar	403.711	416.532	3,18
11.07	Pidie	444.149	435.797	-1,88
11.08	Aceh Utara	590.536	600.163	1,63
11.09	Simeulue	94.146	94.368	0,24
11.10	Aceh Singkil	127.711	129.333	1,27
11.11	Bireuen	442.953	444.383	0,32
11.12	Aceh Barat Daya	152.949	153.213	0,17
11.13	Gayo Lues	101.540	101.754	0,21
11.14	Aceh Jaya	92.781	94.761	2,13
11.15	Nagan Raya	172.257	172.484	0,13
11.16	Aceh Tamiang	299.487	300.831	0,45
11.17	Bener Meriah	161.627	166.448	2,98
11.18	Pidie Jaya	162.174	159.941	-1,38
11.71	Banda Aceh	248.892	253.198	1,73
11.72	Sabang	42.457	42.696	0,56
11.73	Lhokseumawe	190.479	191.034	0,29
11.74	Langsa	188.244	185.836	-1,28
11.75	Subulussalam	91.423	94.571	3,44
11	Provinsi Aceh	5.311.320	5.347.889	0,69

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2021, diolah.

b) Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9.
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.01	Aceh Selatan	0,67	0,41	-0,35
11.02	Aceh Tenggara	0,45	0,45	0,12
11.03	Aceh Timur	-1,26	0,65	0,63
11.04	Aceh Tengah	0,82	0,58	1,40
11.05	Aceh Barat	0,63	0,45	0,80
11.06	Aceh Besar	0,98	2,43	3,18
11.07	Pidie	0,5	0,38	-1,88
11.08	Aceh Utara	0,59	0,62	1,63
11.09	Simeulue	0,79	0,45	0,24
11.10	Aceh Singkil	0,17	0,56	1,27

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.11	Bireuen	0,39	0,59	0,32
11.12	Aceh Barat Daya	0,5	0,46	0,17
11.13	Gayo Lues	1,09	0,49	0,21
11.14	Aceh Jaya	1,61	0,72	2,13
11.15	Nagan Raya	0,78	0,41	0,13
11.16	Aceh Tamiang	1,03	0,69	0,45
11.17	Bener Meriah	0,62	0,61	2,98
11.18	Pidie Jaya	0,81	0,46	-1,38
11.71	Banda Aceh	0,44	1,25	1,73
11.72	Sabang	0,41	0,63	0,56
11.73	Lhokseumawe	-2,05	0,51	0,29
11.74	Langsa	0,51	0,45	-1,28
11.75	Subulussalam	1,78	4,53	3,44
11	Provinsi Aceh	0,42	0,78	0,69

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan dan juga penurunan angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan dan penurunan angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan pembersihan data anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Tabel 2.9, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 0,69 persen. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 3,44 persen, kemudian disusul Kabupaten Aceh Besar 3,18 persen dan Kabupaten Bener Meriah 2,98 persen serta Kabupaten Aceh Jaya sebesar 2,13 persen. Sementara di Kabupaten Pidie terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 1,88 persen, Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,38 persen, Kota Langsa sebesar 1,28 persen dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,35 persen.

c) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 2.10 di bawah, penduduk laki-laki di Aceh pada tahun 2021 lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.667.159 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.657.851 jiwa. Untuk kelompok umur, jumlah penduduk berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 537.104 jiwa, dan kelompok-kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 65.612 jiwa.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

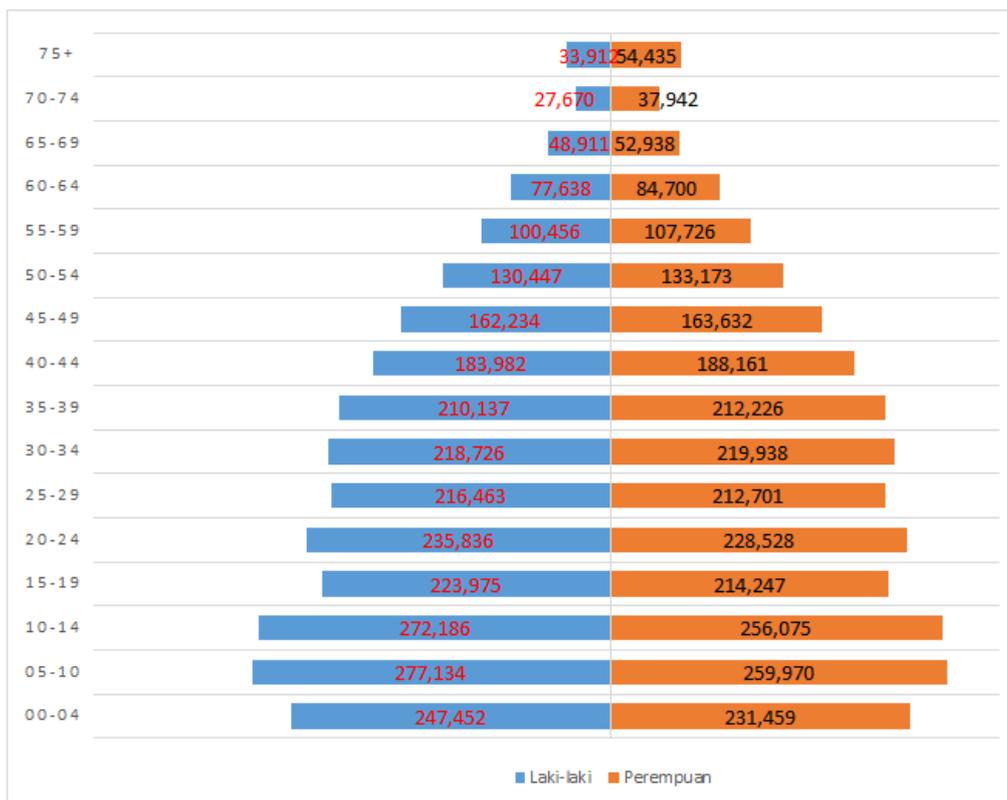
No.	Kelompok Usia	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perempuan (Jiwa)	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	0 - 4 tahun	250.805	234.404	485.209
2.	5 - 9 tahun	276.533	259.297	535.830
3.	10 -14 tahun	273.215	257.080	530.295
4.	15 - 19 tahun	214.130	205.989	420.119
5.	20 -24 tahun	235.806	228.765	464.571
6.	25 -29 tahun	219.101	214.645	433.746
7.	30 -34 tahun	214.351	214.595	428.946
8.	35 -39 tahun	215.429	217.895	433.324
9.	40 - 44 tahun	183.010	186.651	369.661
10.	45 - 49 tahun	166.661	169.523	336.184
11.	50 - 54 tahun	132.543	134.676	267.219
12.	55 -59 tahun	103.001	111.435	214.436
13.	60 -64 tahun	76.920	84.108	161.028
14.	65 -69 tahun	51.219	56.669	107.888
15.	70 - 74 tahun	28.917	38.229	67.146
16.	> 75 tahun	35.057	57.230	92.287
	TOTAL	2.676.698	2.671.191	5.347.889

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah

2.1.1.2.2. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan-perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas).



Gambar 2.4. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 (jiwa)

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase; Sumbu vertical menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 pada Gambar 2.4.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh

tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatkan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
- c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
- d. Kawasan khusus.
Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (world intangible cultural heritage) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep “Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan”. Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu : Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

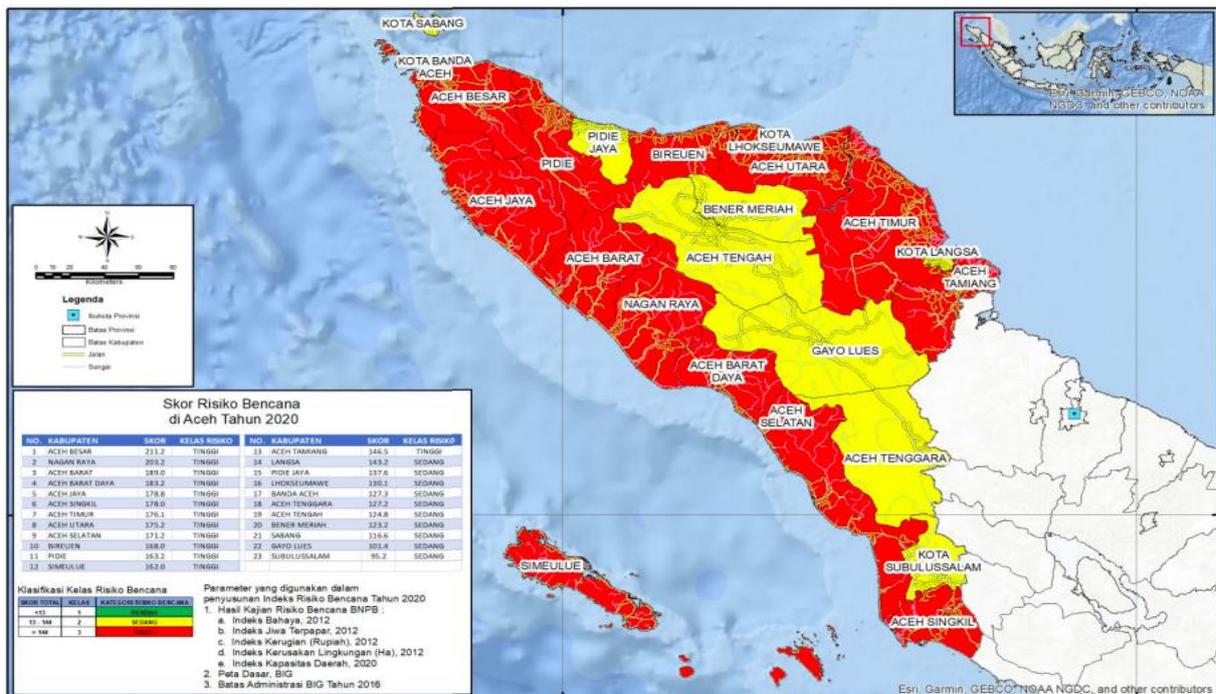
Aceh kerap didera bencana yang datang silih berganti. Ada sebelas jenis bencana yang tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, cedera, kerugian materiel, dan kerusakan lingkungan di Bumi Serambi Mekkah ini. Catatan kejadian bencana sejak tahun 1815 hingga 2015 (selama 200 tahun) yang menimbulkan risiko dan dinukilkan di dalam buku ini diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12

bencana berdasarkan kerangka acuan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sebagai berikut.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Sumber: Badan nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Gambar 2.5. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, banjir genangan, banjir luapan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dilaporkan sebanyak 2.739 kejadian bencana atau rata-rata 548 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN					JUMLAH	KET
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Abrasi			6	12	5	23	
2	Abrasi, Erosi dan Sedimentasi		7				7	
3	Angin Kencang			7			7	
4	Angin Puting Beliung	17	59	95	100	89	360	
5	Banjir				95	100	195	
6	Banjir Bandang	5	8	8	5	6	32	
7	Banjir dan Longsor			8	13	12	33	
8	Banjir Genangan	61	60	70			191	
9	Banjir Luapan			24			24	
10	Banjir Rob				2	5	7	
11	Cuaca Ekstrem			2			2	
12	Gelombang Pasang	2			1		3	
13	Gempa Bumi	1	6	14	21	1	43	
14	Hujan Abu			2			2	
15	Kabut Asap			5			5	
16	Kapal Tenggelam			1			1	
17	Karhutla	9	33	220	205	133	600	
18	Kebakaran	71	96	285	289	269	1.010	
19	Kekeringan				2		2	
20	Longsor	18	25	46	57	42	188	
21	Orang Tenggelam			1			1	
22	Petir	1					1	
23	Semburan Gas			2			2	
JUMLAH		185	294	796	802	662	2.739	

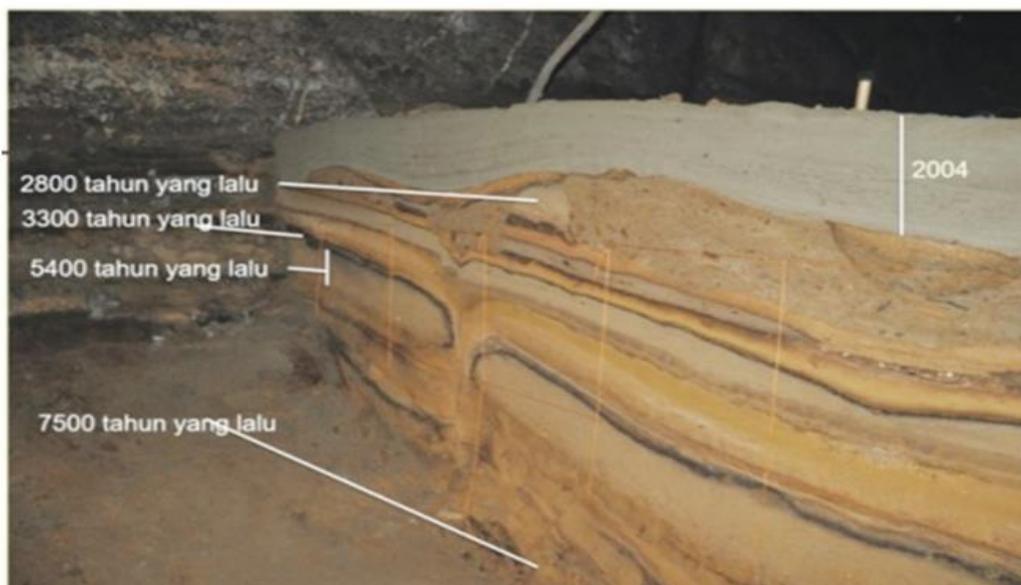
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;

3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Dalam penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkrit terutama pendanaan dari kewenangan pusat dan provinsi yang perlu diperbesar porsinya terutama untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan wilayah sungai.



Sumber : Buku *Paleo Smong*, penerbit BPBA 2019

Gambar 2.6. Lapisan Tanah Pasir di Gua Eek Lunttie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu

Gambar 2.6. menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Eek Lunttie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7500 tahun yang lalu.

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untukantisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004.

Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi ke dalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.

2.1.1.5. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

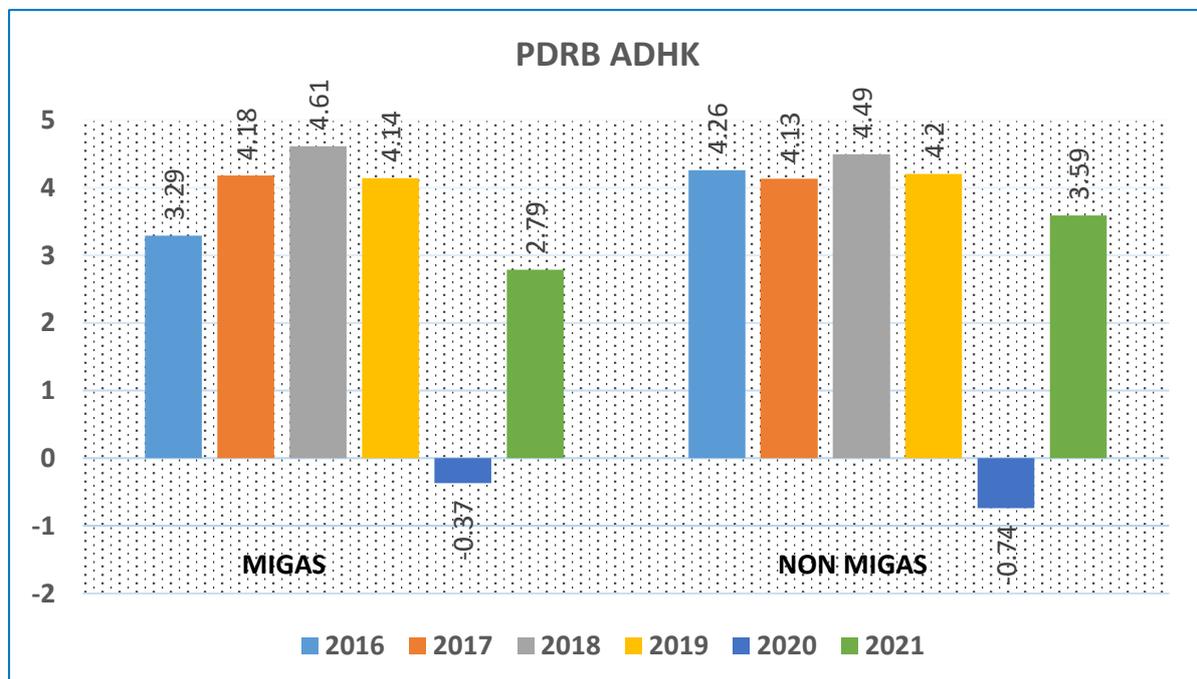
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on- y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relative antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Aceh) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas maupun non migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kinerja ekonomi Aceh tumbuh positif dan signifikan masing-masing sebesar 3.29 persen, 4.18 persen dan 4.61 persen. Pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4.14 persen karena pada tahun 2019 terjadi penurunan harga beberapa komoditi non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*)



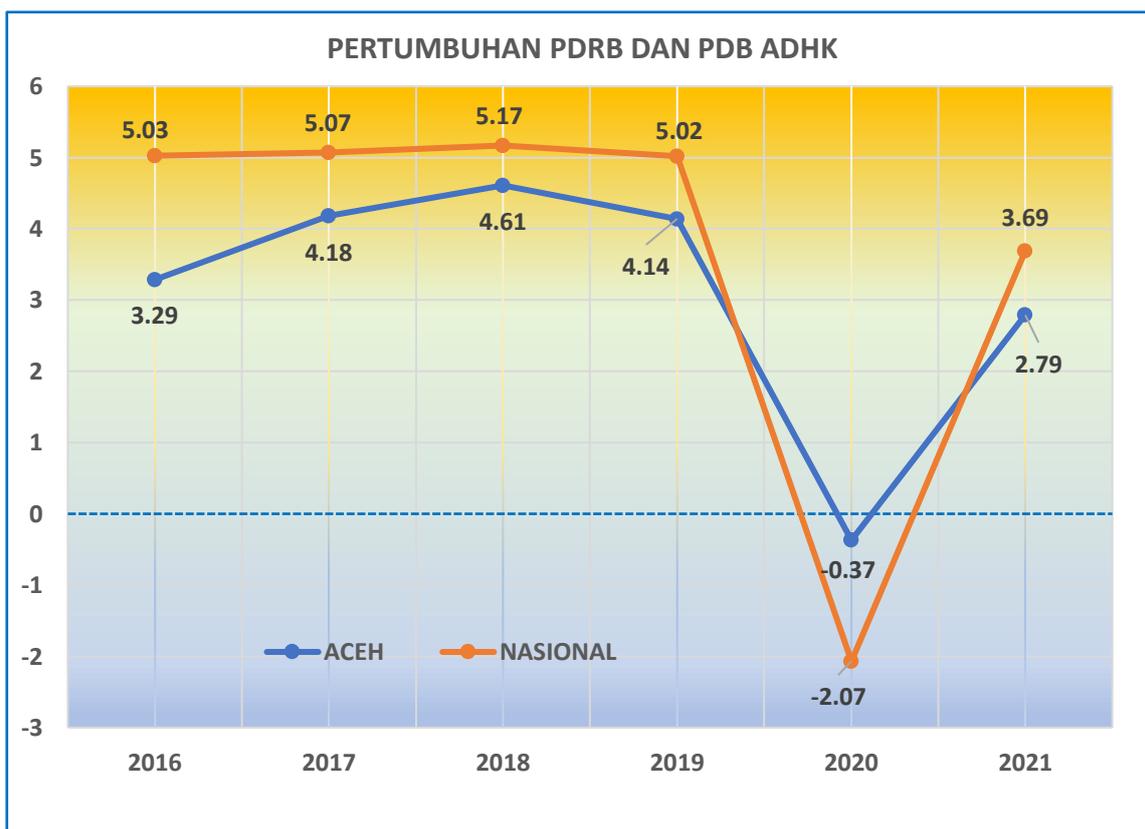
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016 - 2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen)

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-0.34 persen) akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, rata-rata relative tumbuh lebih

tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-0.74 persen). Pada tahun 2021 perekonomian non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen.

Perkembangan laju pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 Tahun 2016-2021 sebagai mana pada Gambar 2.7 mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Selama periode tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Nasional di atas 5 persen atau rata-rata 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.01 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016- 2021 (Persen)

Pada tahun 2020 perekonomian Nasional dan Aceh mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing tumbuh sebesar -2.07 persen dan -0.34 persen, pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usah dengan migas dan non migas periode 2016 -2021 (c to c) sebagaimana pada Tabel 2.12 menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2016-2021 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha.

Tabel 2.12.
Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

KATEGORI	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,25	4,03	3,39	3,47	-0,35
B	Pertambangan dan Penggalian	5,58	6,66	5,91	8,23	-0,95
C	Industri Pengolahan	-2,87	8,26	-1,1	-4,43	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,54	7,48	6,95	2,78	-2,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	7,19	24,2	-2,87	2,54
F	Konstruksi	-4,2	2,74	5,16	10,61	-0,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,55	4,05	3,01	-5,34	4,23
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	2,67	2,96	-28,44	19,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,29	8,28	6,73	-7,63	-6,11
J	Informasi dan Komunikasi	2,71	2,23	5,26	11,98	7,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,48	0,87	12,58	0,55	-5,08
L	Real Estate	7,88	6,09	6,87	-1,19	4,06
M, N	Jasa Perusahaan	4,67	6,61	5,83	-3,19	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,62	6,28	3,18	-3,31	6,38
P	Jasa Pendidikan	9,98	7,94	8,65	3,47	1,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,04	5,79	7,52	4,48	9,71
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,25	5,33	7,24	1,47	2,23
Produk Domestik Regional Bruto		4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
PDRB Nonmigas		4,13	4,49	4,19	-0,74	3,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tahun 2017, terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Industri Pengolahan dan Konstruksi masing-masing sebesar -2.87 persen, -4.2 persen. Pada tahun 2019 hanya 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -1.1 persen.

Kemudian pada tahun 2021 perekonomian relatif membaik dan hanya beberapa sektor yang tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi masing-masing berkontraksi sebesar -0.35, persen, -0.95, persen, -2.01 persen, -0.46 persen, -6.11 persen dan -5.08 persen.

Pada Tabel 2.13 Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan). Pada tahun 2016-2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar pada urutan pertama yaitu sebesar 30,06 persen dari PDRB Aceh. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama periode tersebut berfluktuasi dan terus cenderung mengalami peningkatan. Lapangan Usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 15,74 persen pada tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 14.30 persen.

Sedangkan Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ke tiga dengan menyumbang sebesar 10.30 persen pada tahun 2021. Kontraksi menempati urutan ke empat, dengan kontribusi terbesar pada tahun 2020 yaitu 10.56 persen dan kemudian pada tahun 2021 terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan sebesar 9.90 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 6.65 persen, sedangkan lapangan usaha yang lainnya dengan kontribusi di bawah 5 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 (c to c) tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1.05 persen dan lapangan Usaha Lainnya sebesar 1.03 persen.

Tabel 2.13.
Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017 - 2021 (Persen)

KATEGORI	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,09	27,93	27,77	28,8	30,06
B	Pertambangan dan Penggalian	7,08	7,22	7,29	7,97	6,65
C	Industri Pengolahan	4,88	5,05	4,8	4,6	5,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,16	0,17	0,12

KATEGORI	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	9,59	9,59	9,51	10,56	9,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,64	15,56	15,39	14,62	14,3
H	Transportasi dan Pergudangan	7,69	7,55	7,47	5,36	5,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,32	1,35	1,25	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,55	3,47	3,51	3,94	3,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	1,64	1,77	1,79	1,91
L	Real Estate	4,01	4,07	4,17	4,14	4,07
M, N	Jasa Perusahaan	0,63	0,65	0,66	0,64	0,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,91	9,06	8,97	8,71	10,3
P	Jasa Pendidikan	2,48	2,56	2,67	2,77	2,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,89	2,93	3,02	3,17	3,13
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,38	1,39	1,44	1,45	1,39
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2017-2021 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.14, pada tahun 2017 -2020 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri rata-rata sebesar 15. 08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen.

Tabel 2.14.
Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2017- 2021

NO.	KOMPONEN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi RT	3,37	3,59	3,81	0,64	1,16
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,02	4,41	11,65	-3,45	-3,98

NO.	KOMPONEN	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	97,90	-9,56	8,32	-8,06	8,12
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,08	3,53	6,79	3,75	0,38
5.	Ekspor Luar Negeri	-23,73	-10,04	3,53	-14,72	48,19
6.	Impor Luar Negeri	170,05	-39,30	6,66	-78,53	-10,06
PDRB		4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tahun 2017 Ekspor Luar Negeri mengalami penurunan yaitu sebesar -23,73 persen dan meningkat sebesar 48.19 persen pada tahun 2021. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 97.90 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Rumah Tangga (LNPR) terjadi pada tahun 2019 sebesar 11.65 persen, dan ekspor Luar Negeri pada tahun 2021 tumbuh sangat signifikan mencapai 48.19 persen.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tertinggi menurut pengeluaran tahun 2021 adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1.33 persen, kemudian Ekspor Luar Negeri sebesar 1.32 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0.65 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0.13 persen.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 57.578.455 USD atau naik sebesar 12,65 persen. Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Oktober 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 43.376.215 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 sebesar 277.090 USD. Selama bulan Oktober 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas nonmigas yaitu senilai 277.090 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami surplus sebesar 57.301.365 USD, atau mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen jika dibandingkan bulan September 2021. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada Oktober 2021 sebesar 16,20 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh.

Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas Bahan Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas

utamanya adalah *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor bahan bakar mineral mengalami kenaikan sebesar 14,14 persen dibandingkan bulan September 2021. Kelompok komoditas Kopi, Teh, dan Rempah-rempah menempati urutan kedua dengan nilai ekspor sebesar 4.158.977 USD atau naik sebesar 1,01 persen dibandingkan bulan September 2021. Sementara kelompok komoditas Buahbuahan menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor sebesar 2.726.683 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh bulan November 2021 sebesar 61.199.469 USD. Nilai impor masuk ke Aceh bulan November 2021 sebesar 838.322 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh bulan November 2021 surplus sebesar 60.361.147 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan November 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Oktober 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 61.199.469 USD atau naik sebesar 6,29 persen. „ Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan November 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 48.370.754 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). „ Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan November 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 36.237.254 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan November 2021 sebesar 838.322 USD. Selama bulan November 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas migas yaitu senilai 838.322 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan November 2021 mengalami surplus sebesar 60.361.147 USD, atau mengalami kenaikan sebesar 5,34 persen jika dibandingkan bulan Oktober 2021. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada November 2021 sebesar 17,86 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; *cost push inflation, demand pull inflation dan expected inflation*. Unsur ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecenderungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

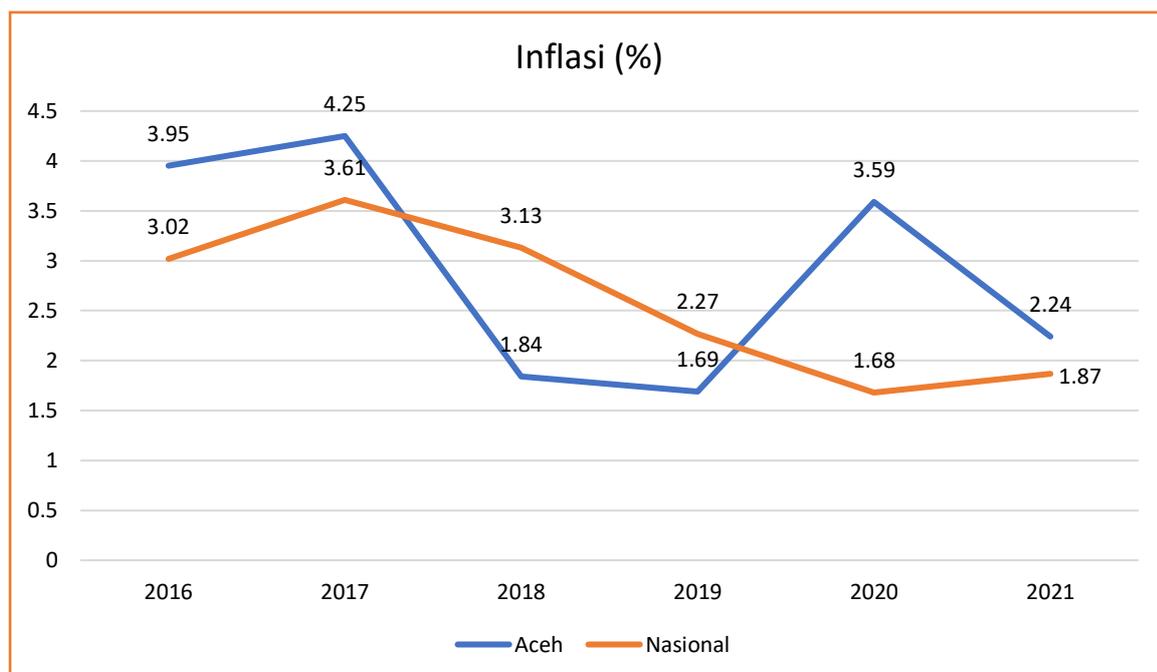
Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya.

Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

2.1.2.1.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh

Selama periode 2016 - 2021 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.25 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,24 persen, sedangkan inflasi pada tahun 2021 (tahun rencana) tercatat sebesar 2,24 persen (Grafik 2.8). Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.9. Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2017 antara lain Tarif Listrik dengan andil sebesar 0,82 persen, Angkutan Udara 0,25 persen, Nasi Dengan Lauk 0,21 persen, Rokok Kretek Filter 0,21 persen dan Tongkol/Ambu-Ambu sebesar 0,19 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Bawang Merah 0,11 persen, Cabai Rawit 0,08 persen, Gula Pasir 0,08 persen dan Cabe Hijau sebesar 0,05 persen.

Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 (Tabel 2.16). Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 pada tahun 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01.

Tabel 2.15.
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2017-2021 (Persen)

BULAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	0.40	-0.11	0.40	0.66	0.79
Februari	-0.08	-0.31	-0.60	0.44	-0.65
Maret	-0.51	-0.09	-0.34	0.60	-0.37
April	-0.33	-0.26	0.42	-0.15	0.51
Mai	0.77	0.69	1.27	0.26	0.25
Juni	0.79	0.84	0.47	-0.15	-0.06
Juli	0.29	0.24	-0.04	-0.31	-0.07
Agustus	0.60	0.26	-0.10	0.46	0.08
September	0.45	-0.74	-0.32	-0.10	-0.20
Oktober	0.16	0.32	0.22	0.65	0.43
November	-	0.62	-0.12	0.19	0.80
Desember	1.26	0.38	0.42	0.99	0.71
INFLASI	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24

Sumber, BPS Aceh, 2022

Selama tahun 2019 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 1,69 persen. Inflasi tahun 2019 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi : kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok- kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok-kelompok rekreasi, kelompok olahraga, dan kelompok budaya; kelompok-kelompok pendidikan.

Tabel 2.16.
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2017-2021
(Persen); dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

BULAN	2017		2018		2019		2020		2021	
	NAS	ACEH								
JANUARI	127.94	122.64	132.10	127.19	135.83	130.20	104.33	103.53	105.95	107.38
FEBRUARI	128.24	122.55	132.32	126.80	135.72	129.42	104.62	103.00	106.06	106.68
MARET	128.22	121.92	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29
APRIL	128.33	121.52	132.71	126.35	136.47	129.53	104.80	104.45	106.29	106.83
MEI	128.83	122.45	132.99	127.23	137.40	131.18	104.87	104.72	106.63	107.10
JUNI	129.72	123.42	133.77	128.29	138.16	131.80	105.06	104.56	106.46	107.04
JULI	130.00	123.78	134.14	128.60	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96
AGUSTUS	129.91	124.51	134.07	128.93	138.75	131.61	104.90	104.72	106.57	107.05
SEPTEMBER	130.08	125.07	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84
OKTOBER	130.09	125.27	134.20	128.39	138.40	131.48	104.92	105.30	106.66	107.30
NOVEMBER	130.35	125.74	134.56	129.19	138.60	131.82	105.21	105.50	107.05	108.16
DESEMBER	131.28	127.33	135.39	129.68	139.07	131.87	105.86	106.54	106.54	108.93
INFLASI	4.25	3.61	1.84	3.13	1.69	2.72	1.68	3.59	1.87	3.59

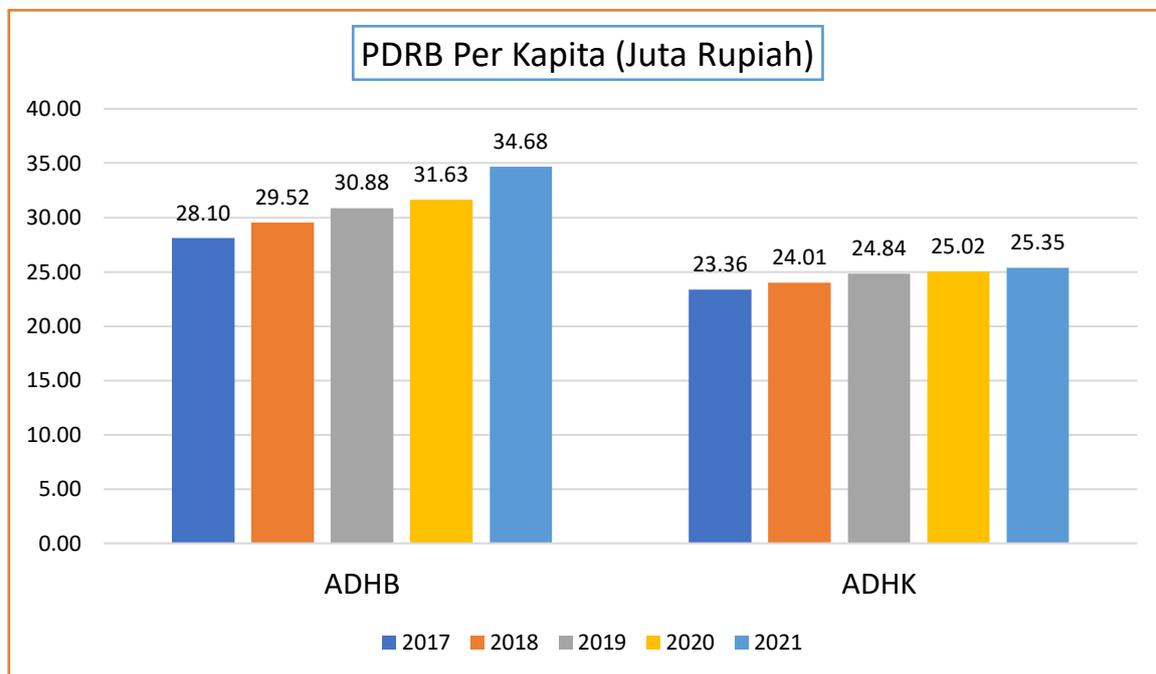
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada bulan Desember 2021, di Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 0,81 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,74 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,59 persen. Secara agregat, Aceh (Gabungan 3 Kota) pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.

2.1.2.1.4. Pendapatan Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan

penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.



Sumber : Berita Resmi Statistik (BPS Aceh) Tahun 2022

Gambar 2.10. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Aceh 2017-2021

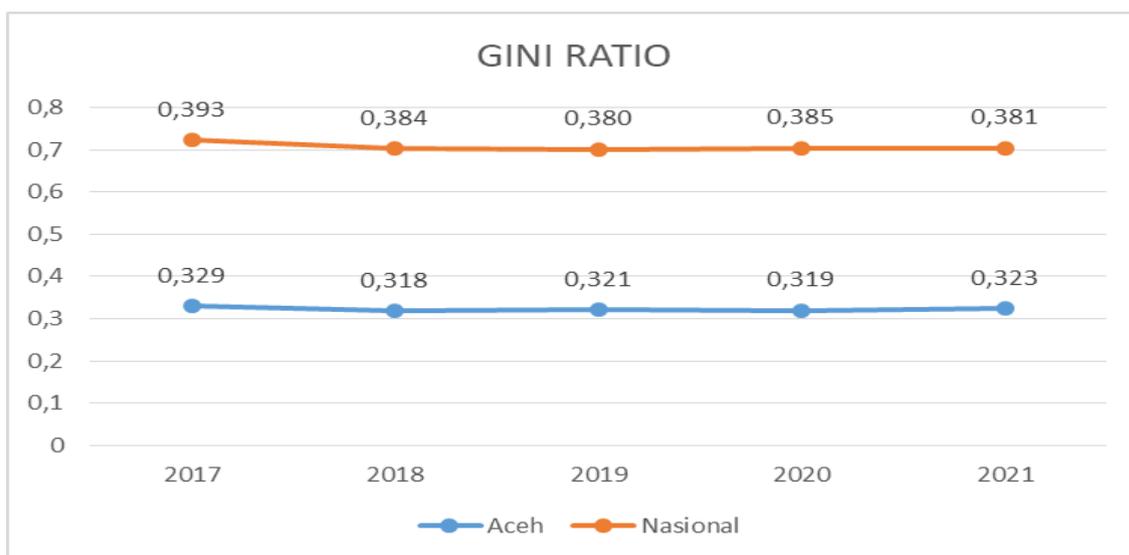
Pada Gambar 2.10, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2017 – 2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2017 sebesar 0,329 dan mengalami penurunan menjadi 0,318. Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,319. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 0,324 atau meningkat sebesar 0,004 poin.

Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indeks Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2017-2021 Indeks Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2017 sebesar 0.393 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,381.

2.1.2.1.5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2022 "data termutakhir"

Gambar 2.11. Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 (Maret)

Pada Gambar 2.10, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2017 – 2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2017 sebesar 0,329 dan mengalami penurunan menjadi 0,318. Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020

menjadi 0,319. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 0,323 atau meningkat sebesar 0,004 poin.

Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indeks Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2017-2021 Indeks Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2017 sebesar 0,393 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0,380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,381.

Tabel 2.17.
Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021

No.	Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh	GINI RASIO					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Simeulue	0,268	0,307	0,343	0,34	0,296	0,310
2	Aceh Singkil	0,307	0,321	0,336	0,282	0,287	0,336
3	Aceh Selatan	0,313	0,321	0,312	0,273	0,313	0,295
4	Aceh Tenggara	0,317	0,284	0,295	0,278	0,315	0,247
5	Aceh Timur	0,243	0,265	0,272	0,249	0,282	0,271
6	Aceh Tengah	0,31	0,238	0,26	0,256	0,331	0,290
7	Aceh Barat	0,325	0,333	0,276	0,33	0,304	0,295
8	Aceh Besar	0,292	0,291	0,306	0,288	0,352	0,296
9	Pidie	0,268	0,305	0,262	0,249	0,249	0,220
10	Bireuen	0,279	0,315	0,305	0,295	0,304	0,296
11	Aceh Utara	0,270	0,266	0,292	0,308	0,261	0,283
12	Aceh Barat Daya	0,276	0,246	0,286	0,301	0,273	0,282
13	Gayo Lues	0,308	0,301	0,315	0,290	0,280	0,263
14	Aceh Tamiang	0,332	0,295	0,328	0,289	0,264	0,276
15	Nagan Raya	0,282	0,231	0,284	0,252	0,275	0,257
16	Aceh Jaya	0,305	0,287	0,264	0,253	0,252	0,312
17	Bener Meriah	0,283	0,213	0,254	0,267	0,259	0,255
18	Pidie Jaya	0,249	0,22	0,233	0,236	0,227	0,236
19	Banda Aceh	0,308	0,314	0,294	0,289	0,303	0,347
20	Sabang	0,299	0,247	0,277	0,281	0,271	0,293

No.	Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh	GINI RASIO					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
21	Langsa	0,359	0,342	0,356	0,363	0,356	0,340
22	Lhokseumawe	0,291	0,291	0,305	0,306	0,307	0,296
23	Subulussalam	0,329	0,33	0,291	0,342	0,344	0,303
Aceh		0,333	0,329	0,325	0,319	0,323	0,324
Nasional		0,397	0,393	0,389	0,380	0,381	0,384

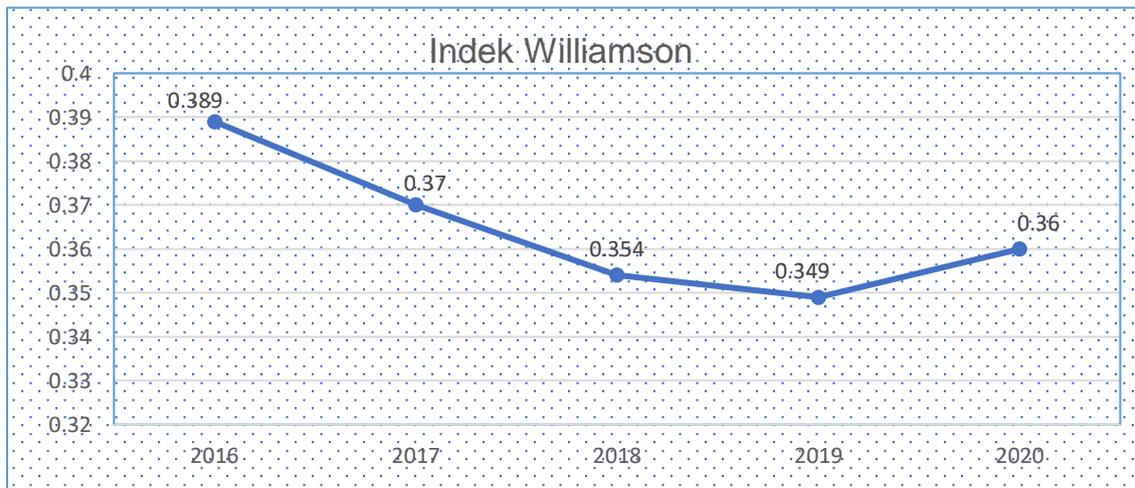
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2021 (Belum rilis untuk kabupaten/kota) 'data termutakhir'

Merujuk pada Tabel 2.17, persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatu kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, pada tahun 2016 sebesar 0,249 dan terus menurun hingga menjadi 0,236 pada tahun 2020 dan gini rasio yang tertinggi terdapat di Kota Langsa yaitu pada tahun 2016 sebesar 0.359 dan cenderung meningkat menjadi sebesar 0,340 pada tahun 2021. Kondisi ini mengindikasi bahwa keimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi untuk dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.1.6. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran (*coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Kelemahan. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW= 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah.

Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.11 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Gambar 2.12. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2020

Pada gambar 2.12 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 0,389 persen dan tahun 2019 sebesar 0,349 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01 persen. Penurunan ini diperkirakan akibat dari adanya percepatan pembangunan ekonomi di daerah yang didukung dengan pendanaan Otonomi Khusus. Pada tahun 2020 indeks williamson mengalami peningkatan sebesar 0.360 persen yang diakibatkan oleh tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota dan terdapat signifikansi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya.

2.1.2.1.7. Kemiskinan

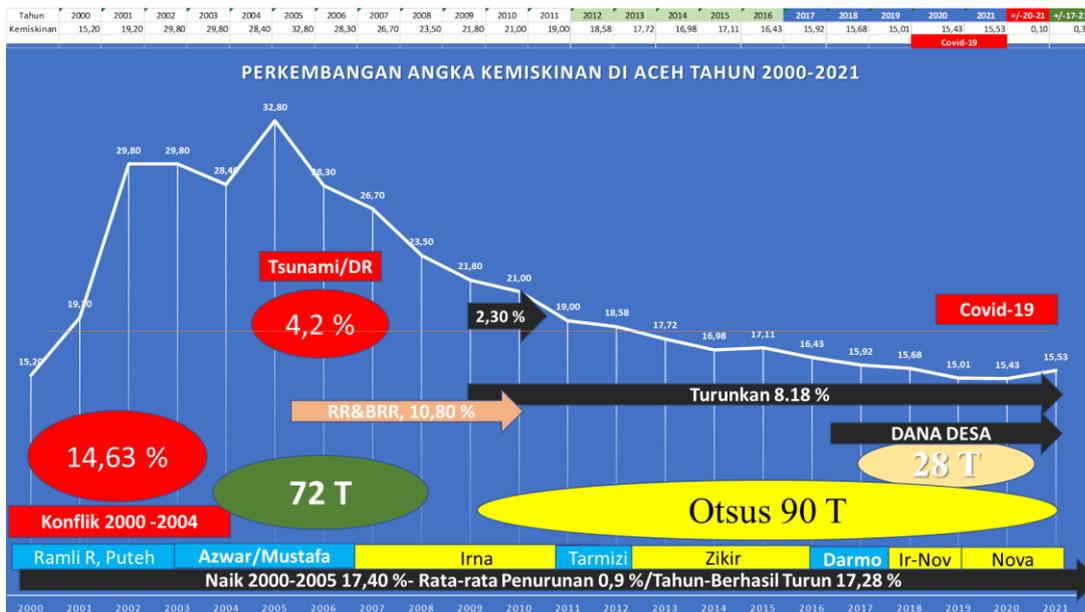
Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2021. Gambar 2.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.53 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1.57 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional.

Akumulasi konflik bersenjata yang terjadi di Aceh telah melambungkan angka kemiskinan tertinggi pada Tahun 2002 mencapai 29,80 persen dari 15,20 persen pada Tahun 2000 dan ditambah dengan bencana alam gempa dan Tsunami pada akhir tahun 2004 sangat berdampak semakin tingginya angka kemiskinan mencapai 32,80 persen di tahun 2005, dan tingkat pengangguran mencapai 14,00 persen (Agustus 2005).

Pasca hadirnya Dana Otonomi Khusus di Aceh hingga saat ini (tahun 2021) angka kemiskinan dan pengangguran mengalami trend menurun secara terus menerus sehingga angka kemiskinan mencapai 15,53 persen dan angka pengangguran mencapai 6,30 persen pada tahun 2021. Angka-angka ini menunjukkan pada dasarnya Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Point kembali ke Zero Point. Untuk memasuki tahapan pembangunan berikutnya dari Zero Point menuju Positif Point maka niscaya dibutuhkan Dana Otonomi Khusus Abadi untuk mensejajarkan Aceh dengan provinsi-provinsi lain, khususnya di Sumatera.

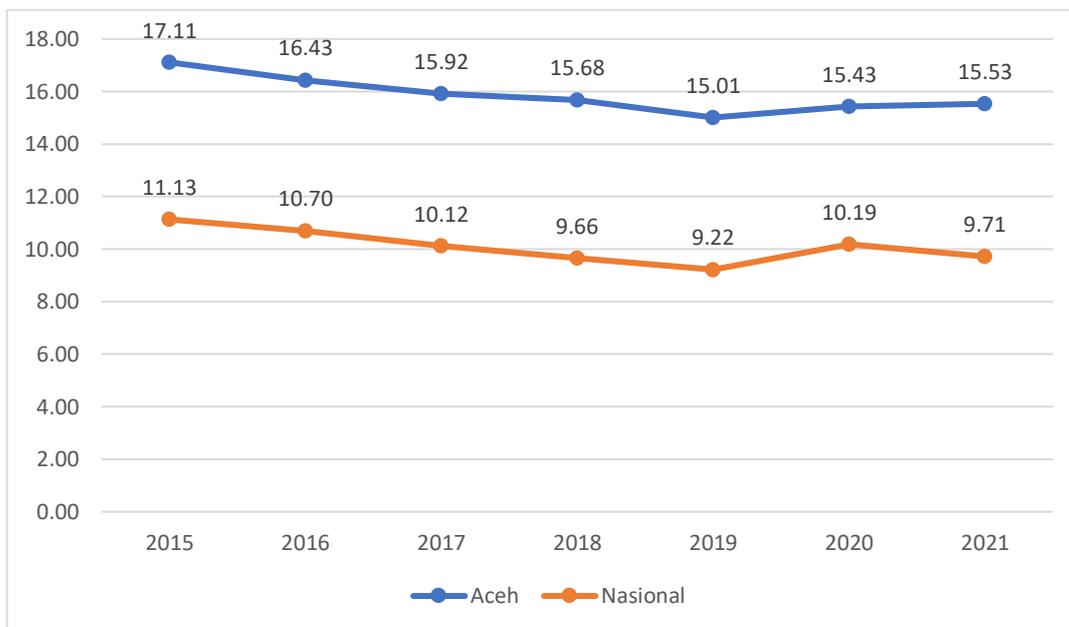
Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 850,26 ribu orang (15,53 persen), bertambah sebanyak 16.350 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43 persen). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera, karena sangat relevan dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada September 2020 – September 2021 antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 (6,30 persen) lebih rendah dibanding Agustus 2020 (6,59 persen) dan juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -0,37 persen.

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya penduduk miskin di Aceh. komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/ cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Pada periode September 2020 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,85 pada September 2020 menjadi 2,95 pada September 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,83 pada September 2020 menjadi 0,81 pada September 2021.



Gambar 2.13.
Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000 – 2021

Dari data yang disajikan, Aceh masih berada pada posisi nomor satu sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentase 15,53 persen. Selama periode September 2020 – September 2021, persentase penduduk miskin di Aceh naik dari 15,43 persen menjadi 15,53 persen, dan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 850,26 ribu orang atau 15,53 persen. Persentase kemiskinan di daerah perdesaan naik 0,08 poin (dari 17,96 persen menjadi 18,04 persen) demikian pula di perkotaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,27 poin (dari 10,31 persen menjadi 10,58 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.14. **Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015 – 2021 (Kondisi September)**

Pada tabel 2.18 menggambarkan sebaran data tahun 2017-2021, persentase kemiskinan (*Head count-PO*) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sebesar 7.44 persen dan 7.61 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2017 sebesar 22.11 persen dan 2021 sebesar 20.36 persen. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Maret sebagaimana Tabel 2.18 berikut.

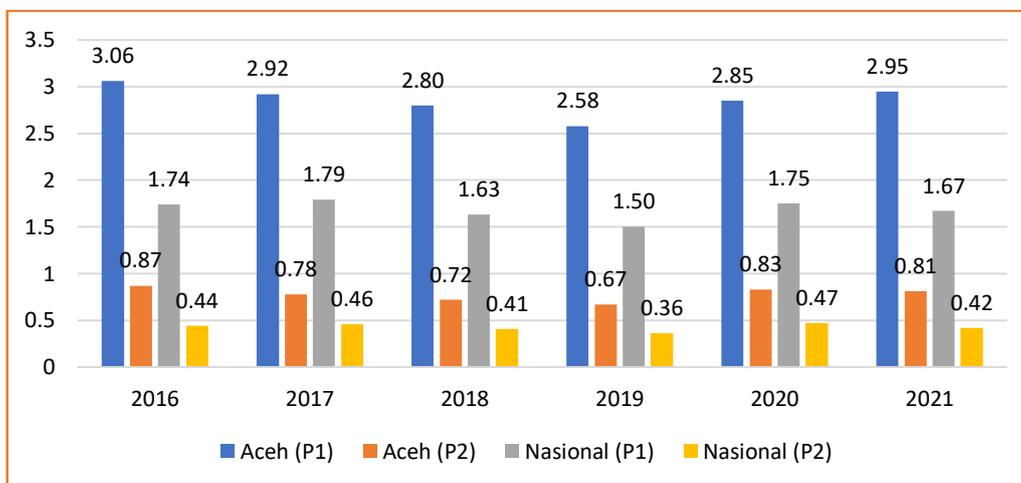
Tabel 2.18.
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 (Maret)

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SIMEULUE	20,20	19,78	18,99	18,49	18,98
ACEH SINGKIL	22,11	21,25	20,78	20,20	20,36
ACEH SELATAN	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18
ACEH TENGGARA	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41
ACEH TIMUR	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45
ACEH TENGAH	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26
ACEH BARAT	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81
ACEH BESAR	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05
PIDIE	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59
BIREUEN	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25
ACEH UTARA	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43
ACEH BARAT DAYA	18,31	17,1	16,26	15,93	16,34
GAYO LUES	21,97	20,7	19,87	19,32	19,64
ACEH TAMIANG	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34
NAGAN RAYA	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23
ACEH JAYA	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23
BENER MERIAH	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16
PIDIE JAYA	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55
BANDA ACEH	7,44	7,25	7,22	6,9	7,61
SABANG	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32
LANGSA	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96
LHOKSEUMAWA	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16
SUBULUSSALAM	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65
ACEH	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33
NASIONAL	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Aceh pada periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), dan Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) Aceh dan Nasional, periode 2016-2021 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3.06 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2.58, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,74 dan 1.50. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh nilai indeks bergerak meningkat (masing-masing sebesar 2.85 dan 2.95) sedangkan Nasional sebaliknya, nilai Indeks bergerak turun (masing-masing 1.75 dan 1,67).



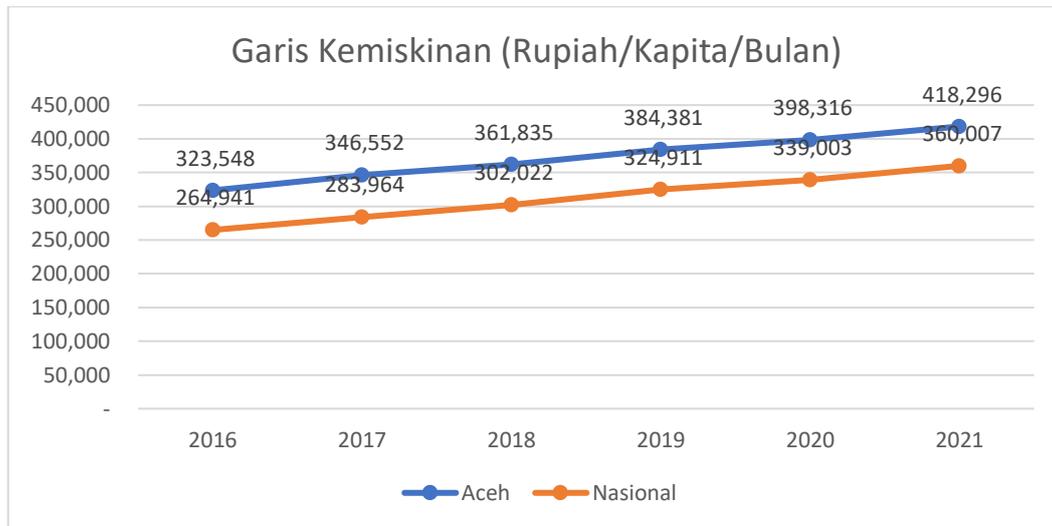
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.15. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September)

Perbandingan kedua nilai Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya Kemiskinan (P2) Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks Keparahannya Kemiskinan Aceh Tahun 2021 sebesar 0,81 lebih tinggi dari Indeks Keparahannya Nasional sebesar 0,42. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relatif lebih

baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.16. Garis Kemiskinan Makanan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September)

Tingkat kemiskinan di Aceh lebih dominan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan pada tahun 2021 sebesar 18,04 persen, sedangkan di kawasan perkotaan adalah sebesar 10,58 persen. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk miskin dan berpendapatan rendah, maka sektor pertanian tanaman padi dan palawija merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja miskin terbesar yaitu 40,4 persen atau sejumlah 307.913 orang (BDT 2015), diikuti oleh sektor perkebunan dan perdagangan masing-masing menampung 19,4 persen (147.952 orang) dan 7,7 persen (58.793 orang) dari total pekerja yang berpendapatan rendah. Rendahnya pendapatan pekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani (NTP) pada kedua sektor tersebut (rata-rata Tahun 2020) masing-masing sebesar 99,17 dan 99,08.

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2016-2021, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2016 dan tahun 2021 GK Aceh masing-masing sebesar Rp. 323.548 dan Rp. 418.296 sedangkan Nasional tercatat sebesar Rp. 264.941 dan Rp.349.474.

Bila merujuk pada GK Perkotaan dan Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK Perkotaan Nasional lebih tinggi dari Aceh. Namun secara persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan di Aceh dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata tumbuh sebesar 5,28 persen, sedangkan Nasional rata-rata tumbuh sebesar 6,33 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih cenderung tinggi; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

2.1.2.1.8. Pengangguran

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh sangat variatif. Bila dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan jumlah tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Aceh yang juga memiliki tren yang meningkat dari 3,51 juta orang menjadi 3,88 juta orang. Namun demikian, tren positif tersebut tidak terjadi pada jumlah pengangguran yang harus mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 167 ribu orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,59 persen. Perkembangan ketenagakerjaan di Aceh tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19.
Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas Menurut Karakteristik , Tahun 2017-2021

KARAKTERISTIK	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	3.590.825	3.663.250	3.734.614	3.881.000	3.951.368
a. Angkatan Kerja	2.288.777	2.353.440	2.366.320	2.527.000	2.520.157
- Bekerja	2.138.512	2.203.717	2.219.698	2.360.000	2.361.300
- Pengangguran	150.265	149.723	146.622	167.000	158.857
b. Bukan Angkatan Kerja	1.302.048	1.309.810	1.368.294	1.354.000	1.431.211

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMTA

kejuruan, SMTA dan yang menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Ketiga kelompok pendidikan tersebut mengalami peningkatan jumlah penganggur pada tahun 2021 dengan persentase SMTA kejuruan sebesar 10,55 persen, SMTA sebesar 8,88 persen dan penganggur di tingkat universitas sebesar 6,53 persen. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2017-2021

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
≤ SD	2,32	3,22	2,90	2,57	2,88
SMPT	4,53	3,42	5,04	4,90	4,76
SMTA Umum	10,74	9,83	8,50	9,39	8,88
SMTA Kejuruan	10,95	10,72	10,76	10,87	10,55
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	8,20	5,92	7,45	6,67	7,27
UNIVERSITAS	8,06	9,30	7,04	8,42	6,53
TPT	6,57	6,36	6,20	6,59	6,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Tabel 2.21.
Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus 2021

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Total
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	39,85	29,99	14,54	46,88	36,13
B. Pertambangan & Penggalian	0,85	0,14	0,65	0,55	0,57
C. Industri Pengolahan	6,37	11,65	10,63	7,23	8,89
D. Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air Panas & Udara Dingin	0,42	0,06	0,5	0,18	0,29
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	0,27	0,06	0,42	0,08	0,19
F. Konstruksi	9,46	0,17	6,03	5,93	5,96
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil	15,17	18	19,95	14,39	16,24
H. Pengangkutan & Pergudangan	5,5	0,12	5,65	2,89	3,47
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,9	7,3	7,58	3,99	5,18
J. Informasi & Komunikasi	0,62	0,35	0,97	0,3	0,52
K. Aktivitas Keuangan	0,54	0,38	1,03	0,21	0,48
L. Real Estate	0,03	0,03	0,06	0,02	0,03
M.N Jasa Profesional & Perusahaan	0,94	0,57	1,19	0,6	0,8
O. Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial Wajib	8,69	5,92	12,48	5,24	7,65
P. Pendidikan	3,61	14,61	10,34	6,47	7,76
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1,11	5,81	4,09	2,28	2,88
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,65	4,86	4,9	2,78	3,48
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2021 terjadi hampir di semua kategori jenjang pendidikan di Aceh. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab keterpurukan tersebut, dengan jumlah laki-laki yang menganggur akibat Covid-19 sebanyak 121.637 orang dan perempuan sebanyak 85.100 orang. Bila dilihat dari sebarannya berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penganggur terbanyak akibat Covid-19 berada di wilayah perdesaan sebanyak 107.400 orang dan perkotaan sebanyak 99.337 orang. Jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 (Tabel 2.22)

Tabel 2.22.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2021

No.	Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	Pengangguran Karena Covid-19	10.011	5.648	9.416	6.243	15.659
2	BAK Karena Covid-19	1.721	1.785	2.219	1.287	3.506
3	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	3.576	3.519	3.531	3.564	7.095
4	Penduduk bekerja yang mengalami Pengurangan jam kerja (shorter hours) karena Covid-19	106.329	74.148	84.171	96.306	180.477
5	Total	121.637	85.100	99.337	107.400	206.737

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berusia 15 tahun keatas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Walaupun pada masa kini dimana angka melek huruf sudah tidak lagi digunakan dalam salah satu komponen pembentuk nilai IPM karena dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Namun angka tersebut masih dijadikan indikator untuk

menlihat kemajuan suatu pendidikan di suatu daerah, dimana pencapaian nilai Angka Melek Huruf (AMH) dijadikan sebagai suatu metoda pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 96,00 sedangkan AMH Aceh 98,25. Angka Melek Huruf di Aceh yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya memperlihatkan bahwa berbagai upaya Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka melek huruf melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang membanggakan seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Namun, bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (99,16) dan rata-rata Sumatera (98,51). Capaian ini menunjukkan bahwa sekitar 98,25 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Aceh telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 1,75 persen penduduk yang masih belum dapat membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020 dan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2016 – 2020 masing disajikan pada Tabel 2.22 dan Tabel 2.23.

Tabel 2.23.

Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2017 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	98,84	98,49	99,25	98,80	98,82
Aceh Singkil	96,14	96,24	98,28	96,89	96,88
Aceh Selatan	96,15	94,95	95,97	96,82	96,16
Aceh Tenggara	99,24	98,13	99,33	98,60	98,78
Aceh Timur	98,35	98,42	98,60	99,24	98,55
Aceh Tengah	99,31	98,93	99,45	98,55	99,05
Aceh Barat	98,37	97,67	98,01	97,84	97,77
Aceh Besar	97,21	98,74	98,66	98,48	98,23
Pidie	96,57	96,64	96,65	97,05	96,56
Bireuen	98,98	99,43	98,89	98,88	99,03
Aceh Utara	97,63	98,44	98,21	99,18	98,30
Aceh Barat Daya	97,12	96,38	96,63	95,55	96,36
Gayo Lues	96,72	94,08	94,98	93,91	94,78
Aceh Tamiang	98,45	98,90	97,70	98,14	98,17
Nagan Raya	95,58	96,61	97,22	97,05	96,54
Aceh Jaya	96,46	96,47	98,11	96,93	96,97
Bener Meriah	99,25	99,78	99,69	99,10	99,36

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	
Pidie Jaya	97,51	96,09	97,51	96,89	96,73
Banda Aceh	99,42	99,66	99,69	99,79	99,53
Sabang	98,71	98,16	98,46	99,76	98,81
Langsa	98,50	98,40	99,44	99,03	98,93
Lhokseumawe	99,43	99,50	99,24	99,51	99,33
Subulussalam	98,08	97,59	97,25	97,01	97,17
Aceh	97,94	98,03	98,21	98,25	98,03
Nasional	95,50	95,66	95,90	96,00	95,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Tabel 2.24.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Aceh, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016– 2020

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-rata Sumatera	Nasional
2016	97,74	98,88	98,20	95,38
2017	97,94	98,89	98,29	95,50
2018	98,03	99,07	98,40	95,66
2019	98,21	99,15	98,26	95,90
2020	98,25	99,16	98,51	96,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan AMH, maka Pemerintah Aceh dan Kab/Kota berupaya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca; (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) “merawat” kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf.

Upaya pemberantasan buta huruf diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Singkil. Rendahnya angka melek huruf di daerah ini tampaknya berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yang juga relatif rendah. Oleh karena itu, daerah ini menjadi lokasi prioritas pemberantasan buta huruf di Aceh.

2.1.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

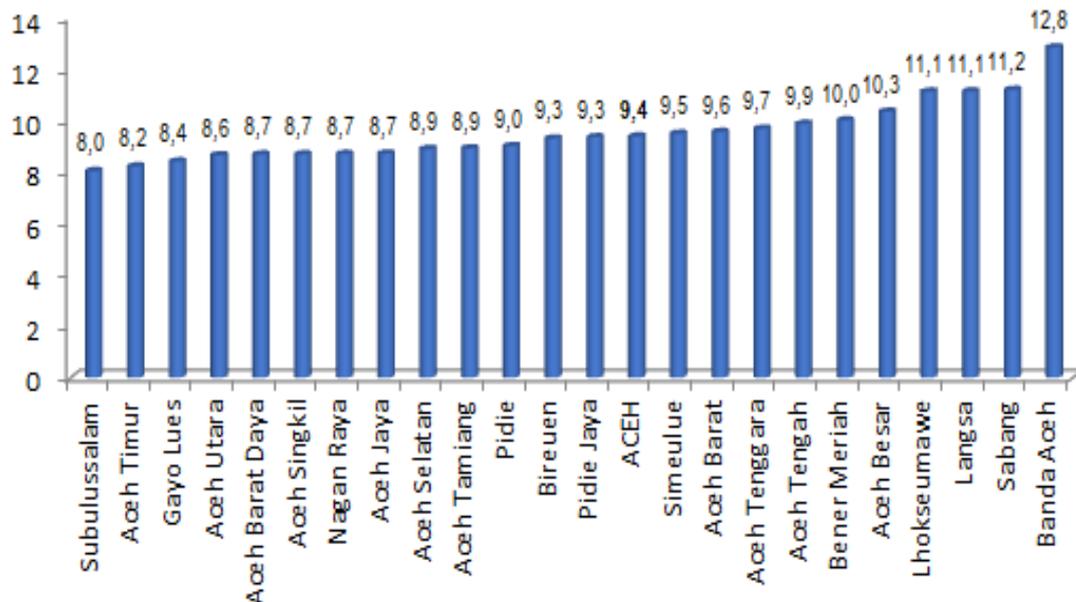
Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat menurut jenis kelamin, RLS di Aceh perkembangan RLS di Aceh relative merata seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	9,06	9,07	9,08	9,34	9,48	1.15
Aceh Singkil	7,84	8,05	8,52	8,53	8,68	2.60
Aceh Selatan	8,33	8,38	8,59	8,87	8,88	1.62
Aceh Tenggara	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67	0.10
Aceh Timur	7,80	7,85	7,86	8,15	8,21	1.30
Aceh Tengah	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86	0.49
Aceh Barat	9,04	9,08	9,09	9,37	9,55	1.39
Aceh Besar	9,93	10,14	10,31	10,32	10,33	1.00
Pidie	8,76	8,81	8,82	8,99	9,00	0.68
Bireuen	9,16	9,17	9,27	9,28	9,29	0.35
Aceh Utara	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64	1.64
Aceh Barat Daya	8,12	8,13	8,35	8,66	8,67	1.66
Gayo Lues	7,39	7,69	7,91	8,20	8,40	3.26
Aceh Tamiang	8,47	8,70	8,89	8,90	8,91	1.28
Nagan Raya	8,25	8,26	8,50	8,68	8,69	1.31
Aceh Jaya	8,13	8,37	8,66	8,70	8,71	1.75
Bener Meriah	9,55	9,56	9,78	9,79	10,00	1.16
Pidie Jaya	8,84	8,86	9,04	9,33	9,34	1.39
Banda Aceh	12,59	12,60	12,64	12,65	12,83	0.47
Sabang	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18	1.11
Langsa	10,90	11,06	11,10	11,11	11,12	0.50
Lhokseumawe	10,88	10,89	10,90	10,91	11,11	0.53
Subulussalam	7,12	7,39	7,58	7,84	8,03	3.05
Aceh	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37	1.07
Nasional	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	1.33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Kota Subulussalam merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah dan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah. Untuk lebih rinci, angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera (9,26 tahun), namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara (9,58 tahun), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2017 – 2021

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2017	8,98	9,25	8,57	8,10
2018	9,09	9,34	8,59	8,17
2019	9,18	9,45	8,78	8,34
2020	9,33	9,54	8,89	8,48
2021	9,37	9,58	9,26	8,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

2.1.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. HLS

Aceh Tahun 2021 berada diatas nasional yaitu sebesar 14,63 tahun, sedangkan Nasional 13,08 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,63 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Kabupaten/Kota dengan HLS terendah pada Tahun 2021 terdapat pada Kabupaten Aceh Timur (13,04) dan Kabupaten Bener Meriah (13,47), Kabupaten dengan HLS terendah akan menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam empat tahun ke depan.

Tabel 2.27.
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	13,23	13,25	13,51	13,76	13,90	1.245
Aceh Singkil	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	0.070
Aceh Selatan	13,80	14,15	14,41	14,42	14,60	1.423
Aceh Tenggara	13,97	13,98	13,33	14,00	14,01	0.130
Aceh Timur	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04	0.077
Aceh Tengah	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28	0.070
Aceh Barat	14,57	14,58	14,59	14,60	14,61	0.069
Aceh Besar	14,49	14,70	14,71	14,72	14,73	0.413
Pidie	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	0.385
Bireuen	14,80	14,81	14,82	14,83	14,84	0.067
Aceh Utara	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71	0.502
Aceh Barat Daya	13,55	13,56	13,57	13,58	13,65	0.184
Gayo Lues	13,28	13,49	13,73	13,77	13,78	0.931
Aceh Tamiang	13,56	13,57	13,58	13,59	13,76	0.368
Nagan Raya	14,10	14,11	14,12	14,13	14,14	0.071
Aceh Jaya	13,95	13,96	13,97	13,98	13,99	0.072
Bener Meriah	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	0.074
Pidie Jaya	14,52	14,53	14,54	14,82	14,97	0.769
Banda Aceh	17,10	17,26	17,39	17,79	17,80	1.011
Sabang	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13	0.998
Langsa	15,18	15,19	15,34	15,35	15,63	0.736
Lhokseumawe	15,17	15,18	15,19	15,20	15,21	0.066
Subulussalam	14,19	14,20	14,21	14,61	14,62	0.756
Aceh	14,13	14,27	14,30	14,31	14,63	0.877
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0.445

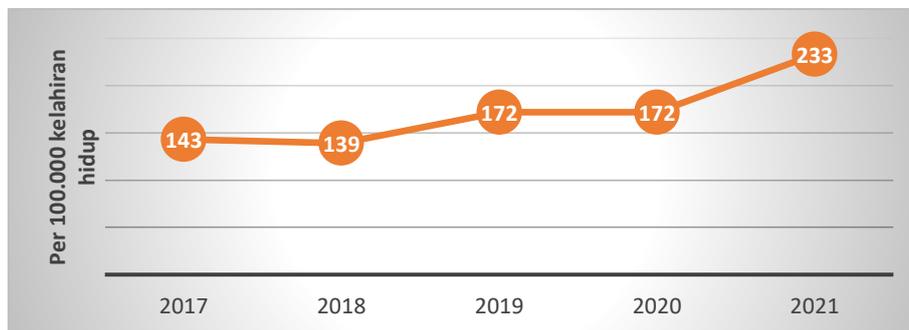
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

2.1.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 143/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 139/100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat lagi menjadi 233/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, serta terjadinya Pandemi Covid-19.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2022

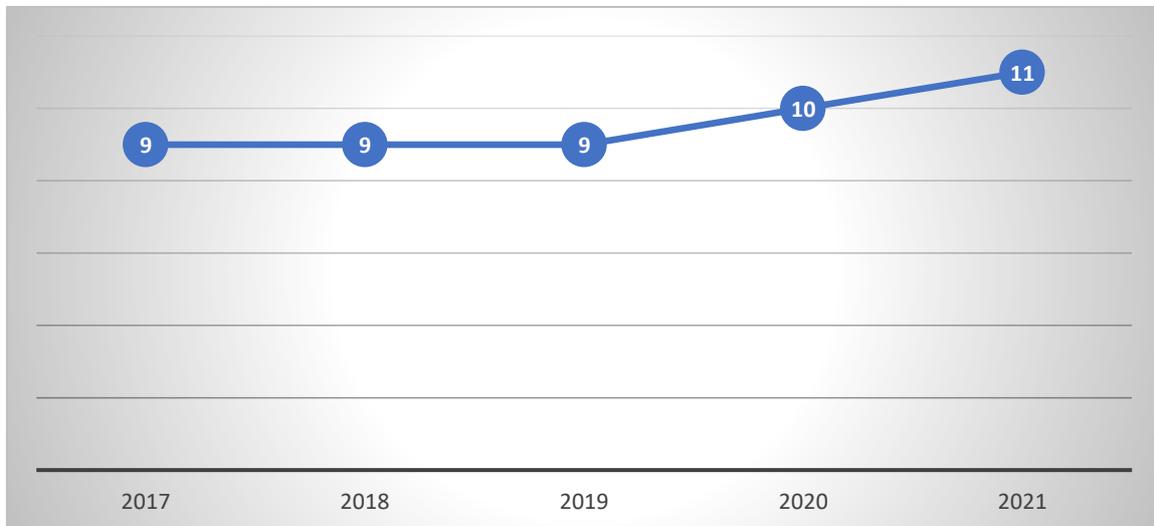
Gambar 2.18. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021

2.1.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi. Pada tahun 2021 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar

Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2022

Gambar 2.19. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021

2.1.2.2.6. Angka Usia Harapan Hidup

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Disamping itu, terjadinya pandemic Corona Virus Disease 19 (Covid 19) juga telah menyebar ke Aceh. Hal ini akan berpengaruh pada capaian status Kesehatan seperti UHH yang pada akhirnya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2017–2021. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,52 di tahun 2017 menjadi 69,96 di tahun 2021 dan masih berada dibawah angka Nasional (71,57). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota.

Penduduk di Kota Lhokseumawe mempunyai UHH tertinggi mencapai 71,64 di tahun 2021 sedangkan yang berdomisili di Kota Subulussalam merupakan daerah yang paling rendah UHH di Aceh hanya 64,07 pada tahun 2021 (BPS, 2022). Salah satu penyebab masih rendahnya UHH di Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.28.
Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2017-2021

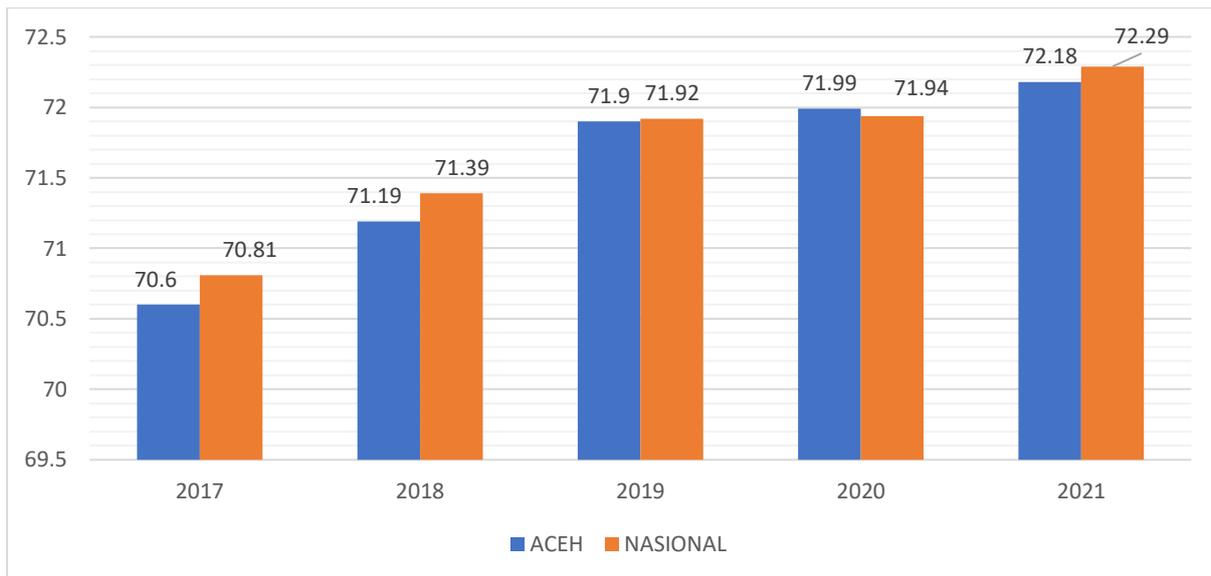
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	64,90	65,00	65,22	65,26	65,28
Aceh Singkil	67,07	67,16	67,36	67,39	67,43
Aceh Selatan	63,89	64,02	64,27	64,35	64,40
Aceh Tenggara	67,62	67,77	68,04	68,14	68,22
Aceh Timur	68,33	68,44	68,67	68,72	68,74
Aceh Tengah	68,53	68,62	68,82	68,85	68,86
Aceh Barat	67,62	67,72	67,93	67,98	67,99
Aceh Besar	69,52	69,59	69,77	69,78	69,79
Pidie	66,58	66,68	66,89	66,94	66,95
Bireuen	70,80	70,92	71,16	71,22	71,26
Aceh Utara	68,54	68,61	68,79	68,80	68,81
Aceh Barat Daya	64,51	64,65	64,91	65,00	65,06
Gayo Lues	64,98	65,12	65,38	65,47	65,53
Aceh Tamiang	69,16	69,28	69,52	69,58	69,63
Nagan Raya	68,76	68,89	69,14	69,22	69,24
Aceh Jaya	66,77	66,88	67,11	67,16	67,19
Bener Meriah	68,90	68,99	69,19	69,22	69,26
Pidie Jaya	69,68	69,81	70,06	70,14	70,18
Banda Aceh	70,96	71,10	71,36	71,45	71,52
Sabang	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
Langsa	69,06	69,06	69,37	69,42	69,43
Lhokseumawe	71,14	71,27	71,52	71,60	71,64
Subulussalam	63,56	63,69	63,94	64,02	64,07
Aceh	69,52	69,64	69,87	69,93	69,96
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Dari tabel 2.28 diatas diketahui bahwa UHH masyarakat Aceh masih berada dibawah angka nasional, namun jika dibandingkan dengan Sumatera Utara yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh, diketahui bahwa UHH Aceh berada diatas Sumatera Utara.

2.1.2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPM Aceh sebesar 70,60 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Tren IPM Provinsi Aceh dari tahun 2017-2021 adalah seperti terlihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:



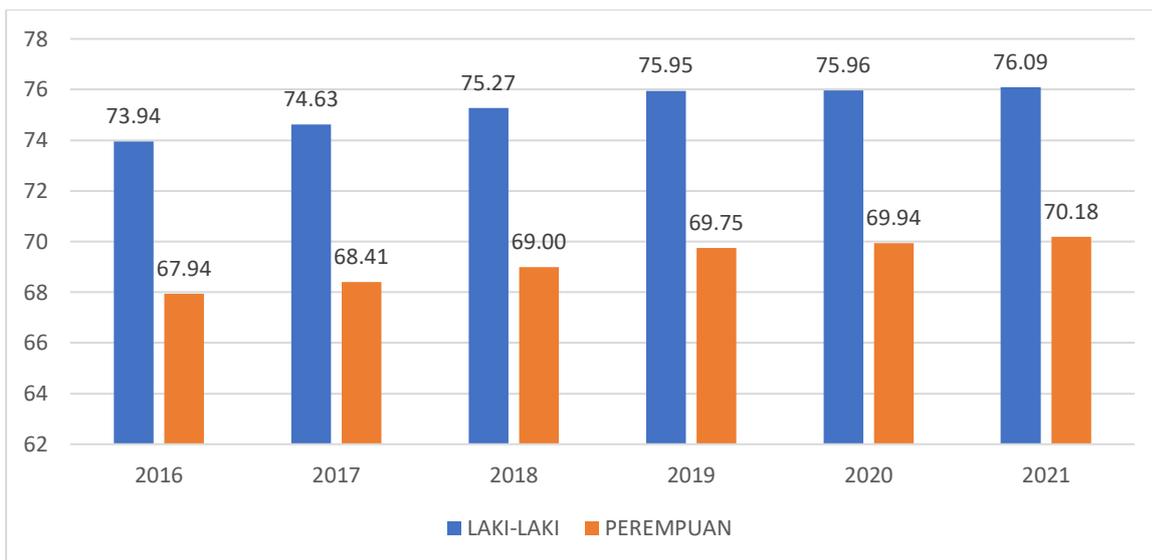
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2017 – 2021

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh berada di atas nasional. Tahun 2021 IPM kembali penurunan dibandingkan dengan nasional, seperti terlihat pada gambar di atas nilai IPM Aceh (72,18) menjadi lebih rendah dari angka nasional (72,29).

Secara umum Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini memerlukan upaya yang lebih menyentuh pada kesejahteraan dasar masyarakat melalui perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun konsep pembangunan manusia melalui peningkatan nilai IPM ini mengalami reduksi karena tidak sepenuhnya menjelaskan secara komprehensif dan utuh mengenai kualitas manusia, namun konsep ini telah digunakan secara luas untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di sebuah negara atau wilayah/daerah.

Capaian IPM Aceh berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Gambar 2.21 secara umum IPM laki-laki jauh lebih tinggi dari capaian IPM perempuan. Selama kurun waktu tahun 2016-2021 baik IPM laki-laki maupun IPM perempuan menunjukkan peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2021

Dari Gambar 2.21 terlihat bahwa walaupun IPM meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2016, IPM Perempuan Aceh 67.94, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73.94. data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik dari pada IPM Perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2020, IPM Perempuan Aceh mencapai 69.94, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 75.96. Pada tahun 2021 tercatat peningkatan terhadap IPM laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 76,09 dan 70,18.

2.1.2.2.8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)

Sampai dengan bulan Desember 2021, Indonesia telah melaporkan 4.262.720 kasus positif, 144.094 kasus meninggal. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara 4.114.347 dinyatakan sembuh.

Khusus di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara massif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia.

Namun, sejak awal November 2020 peningkatan mulai melandai hingga sekarang. Per 31 Desember 2021 terkonfirmasi 38.430 kasus positif, meliputi telah sembuh 36.361 orang dan meninggal dunia 2066. Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah berjalan

	SDM KESEHATAN	VAKSINASI 1 65,733 (-292) 116.4%	VAKSINASI 2 60,535 (-168) 107.2%	VAKSINASI 3 36,809 (-7) 65.2%
1	56,470			
	LANSIA	VAKSINASI 1 196,381 (+18399) 57.9%	VAKSINASI 2 54,707 (+928) 16.1%	VAKSINASI 3 0 (0) 0.0%
2	339,125			
	PETUGAS PUBLIK	VAKSINASI 1 281,458 (-832) 58.8%	VAKSINASI 2 231,879 (+352) 48.5%	VAKSINASI 3 0 (0) 0.0%
3	478,489			
	MASYARAKAT RENTAN & UMUM	VAKSINASI 1 1,771,064 (+57827) 68.7%	VAKSINASI 2 678,906 (+12582) 26.3%	VAKSINASI 3 0 (0) 0.0%
4	2,577,792			
	REMAJA	VAKSINASI 1 344,192 (+9832) 59.7%	VAKSINASI 2 162,835 (+2108) 28.2%	VAKSINASI 3 0 (0) 0.0%
5	577,015			

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Total sasaran Aceh adalah 4.028.891, Total Vaksinasi 1 adalah 2.658.828 (66,0%), Total Vaksinasi 2 adalah 1.188.862 (29,5%) dan Total vaksinasi 3 adalah 36.809 (65,2%).

Gambar 2.23. Capaian Vaksinasi Aceh Per 31 Desember 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (*cultural heritage*). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (smong). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.057 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar

Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, seperti *tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.133 sanggar kesenian dan seniman/budayawan berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang memiliki nilai tinggi hal ini dikarenakan Aceh didiami oleh beragamnya etnis masyarakat dan ditunjang posisi geografis yang strategis sehingga memudahkan bangsa lain mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya, baik budaya benda (*tangible*) maupun budaya tak benda (*intangible*). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	25	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	10	56
2.	Aceh Tenggara	10	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	15
3.	Aceh Timur	37	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	42
4.	Aceh Tengah	6	3	2	2	1	-	-	4	1	-	-	1	-	20
5.	Aceh Barat	9	5	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	19
6.	Aceh Besar	129	11	2	3	-	24	1	1	3	1	4	-	3	182
7.	Pidie	33	16	1	6	1	2	-	2	-	-	1	-	1	63
8.	Aceh Utara	73	1	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	84
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5
10.	Aceh Singkil	11	3	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	5	25
11.	Bireuen	35	11	3	5	-	2	-	4	-	-	-	1	1	62
12.	Aceh Barat Daya	32	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	38
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	25
14.	Aceh Jaya	43	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	64
15.	Nagan Raya	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16.	Aceh Tamiang	26	3	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	36
17.	Bener Meriah	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18.	Pidie Jaya	21	5	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4	34
19.	Banda Aceh	49	6	6	1	3	-	-	13	6	-	-	-	1	85
20.	Sabang	4	1	-	-	-	22	-	92	1	-	-	-	4	124
21.	Lhokseumawe	11	1	4	2	-	1	-	-	1	-	2	-	1	23
22.	Langsa	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
23.	Subulussalam	16	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	20
Jumlah		602	79	26	25	7	63	1	176	34	1	9	2	32	1.057

Sumber: data Statistik Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.28, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 182 situs (terdiri dari 129 makam, 11 masjid, 2 tugu, 3 rumah tradisonal, 24 benteng, 1 perpustakaan, 1 bangunan/gedung, 3 tempat bersejarah, 1 arca dan 4 gua, 1 benda), Kabupaten Aceh Utara 70 situs (terdiri dari 69 makam dan 1 tugu). Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Simeulue dan Bener Meriah yaitu masing-masing sebanyak 5 situs, berupa 5 makam di kabupaten Bener Meriah, sedangkan di kabupaten Simeulu berupa 2 Makam dan 3 Benteng.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.057 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2022 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperti: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri mauid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Gedung kesenian adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk memwadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Auditorium dan galeri dilengkapi dengan tata pencahayaan serta akustik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan maupun pameran. Sampai saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh

Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil. Kondisi gedung kesenian tersebut ada yang baru dibangun, ada juga yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti di Sabang, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat kurang, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

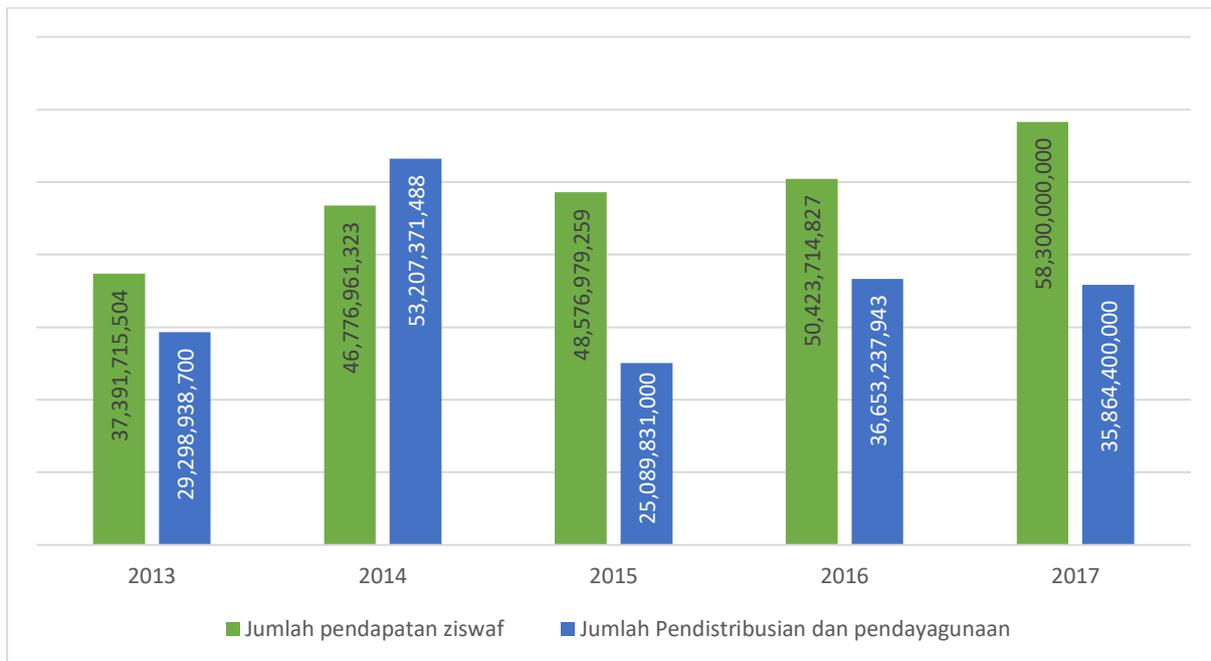
2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

2.1.3.1.1.1. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.



Sumber : Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2017

Gambar 2.24. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017

Dari tahun 2017–2021, kondisi pelanggaran seperti khamar mengalami penambahan menjadi 18 kasus pada tahun 2021, kasus maisir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 123 kasus menjadi 194 kasus pada tahun 2021, dan pelanggaran khalwat mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus menjadi 10 kasus pada tahun 2021.

Tabel 2.30. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Khamar	23	33	11	18	18
2	Maisir	123	123	83	65	194
3	Khalwat	25	18	9	7	10
4	Ikhtilath	59	43	84	39	46
5	Zina	26	33	32	49	51
6	Pelecehan Seksual	26	43	16	41	36
7	Pemeriksaan	9	18	21	49	115
8	Liwath	-	1		1	2
Jumlah Kasus		291	312	256	269	472

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2022

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam

rangka meningkatkan pemahaman syariat islam didaerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan da'i perbatasan di 6 kabupaten/kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Da'i Terpencil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 200 Da'i. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31.
Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	Pbts	Tpcl								
Aceh Singkil	16	31	32	15	26	16	26	17	26	17
Subulussalam	11	13	13	11	8	18	8	18	8	18
Aceh Selatan	0	19	0	19	0	18	-	18	-	18
Aceh Tamiang	22	17	17	22	15	24	24	15	24	15
Aceh Tenggara	4	42	42	4	40	3	38	5	38	5
Simeulue	0	25	0	25	0	32	-	31	-	31
Jumlah	53	147	104	96	89	111	96	104	96	104
Total	200									

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2022

Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

2.1.3.1.1.2. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi rumah ibadah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.32 di bawah ini :

Tabel 2.32.
Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Fardhu 5 (Lima) Waktu Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
1	Sabang	1	2	7	10	20
2	Lhokseumawe	1	5	14	30	50
3	langsa	1	5	42	15	63
4	Bener Meriah	1	10	20	96	127
5	Bireuen	1	17	90	68	176
6	Aceh Barat Daya	1	9	44	95	149
7	Subulussalam	1	5	11	80	97
8	Banda Aceh	1	9	3	83	96
9	Aceh Besar	1	23	34	126	184
10	Pidie	1	21	88	71	181
11	Pidie Jaya	1	8	29	50	88

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
12	Aceh Utara	1	22	73	204	300
13	Aceh Timur	1	21	45	255	322
14	Aceh Tenggara	1	16	51	149	217
15	Aceh Singkil	1	10	0	116	127
16	Aceh Selatan	1	16	234	111	362
17	Nagan Raya	1	10	27	197	235
18	Aceh Barat	1	12	270	53	336
19	Aceh Jaya	1	6	15	98	120
20	Gayo Lues	1	11	10	108	130
21	Simeulue	1	8	0	150	159
22	Aceh Tengah	1	14	55	146	216
23	Aceh Tamiang	1	12	30	246	289
	Jumlah	23	272	1,192	2,559	4,044

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Aceh pada tahun 2021 terbanyak berada pada Kabupaten Aceh Selatan yaitu 362 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Sabang yaitu 20 mesjid. Jumlah mesjid yang melaksanakan shalat fardhu 5 (lima) waktu di Aceh sebanyak 4.044 mesjid yang terdiri dari 23 Mesjid Agung, 272 Mesjid Besar, 1.192 Mesjid Jamik dan 2.557 Mesjid Gampong. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan sebanyak 2 mesjid di Gampong karena ada perubahan status dari masjid menjadi meunasah dikarenakan penggabungan mesjid.

Tahun 2021 dilakukan survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh oleh Dinas Syariat Islam dan Tim Surveyor UIN Ar-raniry. Survei ini dilakukan berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam dan dilakukan di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei IPS Aceh 81,84, dimana kabupaten Aceh Selatan mendapat hasil yang tertinggi 84,58 dan yang terendah kota Sabang 75,50. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui kemajuan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya izin bahkan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai tugas wajib pemerintahan dan izin menyusun hukum positif Aceh berdasar Syariat melalui Qanun Aceh.

2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam (Tabel 2.33).

Tabel 2.33.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2017	24	86	194	314	122	387	1,127	7,410
2018	27	83	194	313	122	-	739	-
2019	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2020	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2021	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.33. diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2017 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 24 (dua puluh empat) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018, menjadi 27 (dua puluh tujuh) dayah. Namun pada 2019, jumlah dayah dengan Tipe A+ mengalami penurunan menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam

penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-Dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam database dayah Aceh untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh. Tahun 2021, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh juga belum mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan oleh BADA. Walaupun demikian proses verifikasi dayah di Aceh telah dilakukan dan sedang dipacu agar dapat segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dayah, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah dengan pelaksanaan akreditasi dayah yang akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah.

2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-

tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.34.
Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2017 - 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Fatwa, Himpunan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	Dokumen	5	8	7	13	12
2 Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	Naskah	0	0	0	0	0
3 Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	25	284	72	0	24
4 Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	143	172	184	150	213

Sumber : Sekr. MPU Aceh, Tahun 2022

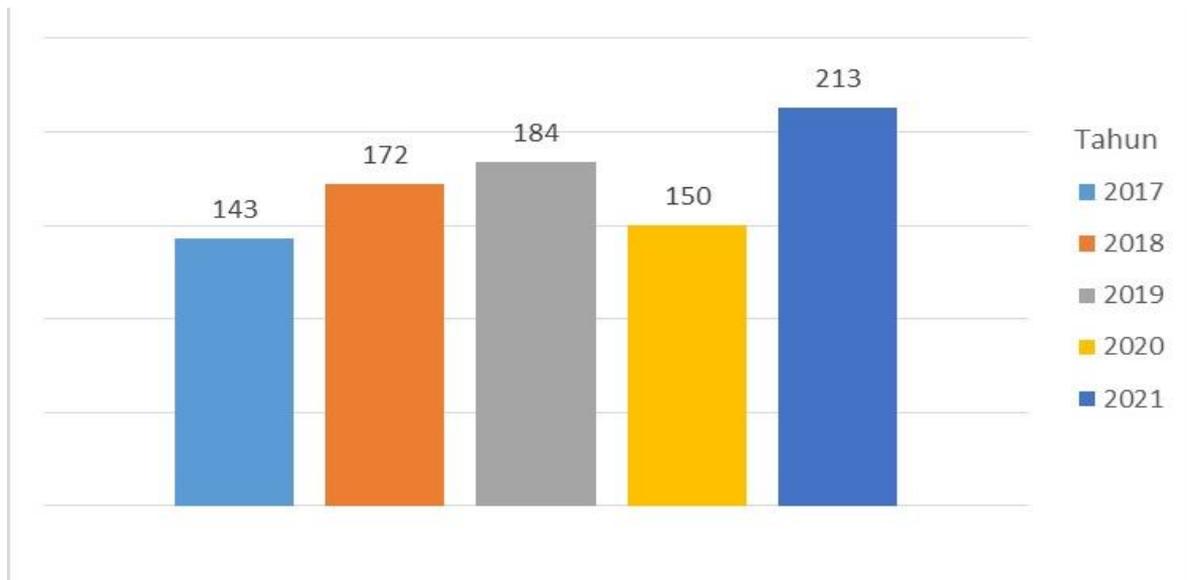
Berdasarkan data Tabel 2.34 dapat diketahui jumlah fatwa, himbauan dan taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2017 sebanyak 5 Dokumen mengalami penambahan yang signifikan di tahun 2021 sebanyak 12 Dokumen. Sedangkan jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas, hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2017 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2018 jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya mengalami kenaikan yang sangat tinggi mencapai 284 orang, tetapi pada tahun 2021 pengkaderan ulama turun menjadi 24 orang. Pada tahun 2020 kegiatan Pendidikan Kader Ulama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami refocusing akibat pandemi covid-19. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan untuk 23 Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang

berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) MPU Aceh.

Penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh terus meningkat. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2016 telah menerbitkan 60 sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 184 sertifikat. Akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, LP-POM Aceh hanya menerbitkan 150 sertifikat halal akibat refocusing pandemi covid-19, hal ini seperti terlihat pada Gambar 2.25.



Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Tahun 2021

Gambar 2.25. Penerbitan Sertifikat Halal 2016-2021

2.1.3.1.5. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 4 (empat) program utama reintegrasi (pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021

No	Kelompok Target	Jumlah
1	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	3042 Orang
2	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	918 Orang
3	Jumlah Anak Korban Konflik yang Mendapat Perhatian Pemerintah	2050 orang
4	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	13 Unit

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2022

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh (Tabel 2.36).

Tabel 2.36.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020

Aspek	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aspek kebebasan sipil	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49
Aspek hak-hak politik	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94
Aspek lembaga demokrasi	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91
Indeks Demokrasi Indonesia	72,48	70,93	79,97	78,00	73,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020 (Data diolah)

Pada tahun 2020, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tidak terkecuali semua aspek. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai penurunan indeksnya terendah dibanding aspek lainnya. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 8,79 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 0,28 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan 4,17 poin. Serupa tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.2.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, APM Aceh tercatat sebesar 70,70 persen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh
Tahun 2016– 2020

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	78,53	80,07	80,70	81,02	80,90	0,75
Aceh Singkil	73,08	72,36	67,52	68,59	68,57	-1,53
Aceh Selatan	70,56	68,66	71,59	72,67	75,41	1,71
Aceh Tenggara	72,81	71,42	67,91	68,12	68,50	-1,49
Aceh Timur	52,13	54,64	58,46	58,21	58,76	3,08
Aceh Tengah	71,31	71,41	72,54	72,76	74,12	0,97
Aceh Barat	75,49	74,72	70,80	71,15	71,08	-1,47
Aceh Besar	66,87	68,61	72,36	72,62	72,27	1,99
Pidie	75,03	75,31	73,98	74,05	74,19	-0,28
Bireuen	66,54	69,58	72,82	72,84	72,98	2,36
Aceh Utara	63,44	65,69	62,46	62,63	62,87	-0,18
Aceh Barat Daya	75,96	74,73	74,98	73,97	73,92	-0,67
Gayo Lues	71,70	73,15	70,17	70,57	73,52	0,67
Aceh Tamiang	65,06	66,23	65,85	66,23	66,51	0,56
Nagan Raya	72,04	71,61	68,11	68,39	68,60	-1,19
Aceh Jaya	72,41	74,20	74,35	74,42	74,82	0,83
Bener Meriah	72,63	70,83	66,51	66,88	67,28	-1,86
Pidie Jaya	75,16	73,99	78,84	79,14	78,92	1,28
Banda Aceh	85,79	78,29	82,45	81,47	81,51	-1,14
Sabang	83,56	82,59	79,72	78,24	78,84	-1,43
Langsa	75,46	72,93	72,16	72,14	73,96	-0,48
Lhokseumawe	80,83	77,49	75,93	75,26	75,18	-1,78
Subulussalam	79,84	79,42	77,24	76,51	77,40	-0,76

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	70,00	70,15	70,26	70,35	70,70	0,25
Nasional	59,95	60,37	60,67	60,84	61,25	0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota tahun 2016 – 2020, ada beberapa kabupaten/kota yang pencapaian APM nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Tamiang. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di luar wilayah asalnya, dengan dasar pertimbangan sekolah diluar wilayahnya memiliki kualitas yang lebih baik dari pada wilayah tempat tinggalnya.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2016-2020, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, APS penduduk usia 16-18 tahun mencapai 83,27 persen, ini berarti masih terdapat 16,73 persen penduduk usia 16-18 tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat atau tidak bersekolah lagi. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat Bireuen. Perkembangan APS Penduduk Aceh usia 16 – 18 tahun terlihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	89,75	86,44	89,29	89,02	88,63	-0,28
Aceh Singkil	82,33	80,15	85,35	85,03	84,89	0,83
Aceh Selatan	84,75	83,67	83,43	82,64	83,18	-0,46
Aceh Tenggara	81,67	83,50	84,57	83,95	83,48	0,56
Aceh Timur	73,27	68,26	74,48	73,96	73,28	0,16
Aceh Tengah	81,87	84,06	88,05	87,64	88,51	1,99
Aceh Barat	84,79	86,31	77,50	79,70	78,68	-1,71
Aceh Besar	76,89	84,78	79,50	83,47	83,08	2,14
Pidie	86,64	90,04	86,14	85,95	86,48	0,00
Bireuen	79,24	79,54	78,10	78,76	79,55	0,10
Aceh Utara	75,49	80,16	79,73	79,52	79,84	1,45
Aceh Barat Daya	87,53	82,63	85,58	85,26	84,53	-0,81
Gayo Lues	81,76	91,08	90,03	89,79	89,20	2,33
Aceh Tamiang	71,50	78,77	82,59	82,43	83,11	3,91
Nagan Raya	93,46	87,42	85,22	84,34	84,55	-2,44

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh Jaya	83,17	80,79	80,61	84,56	84,90	0,55
Bener Meriah	85,47	78,45	84,49	83,47	83,82	-0,33
Pidie Jaya	84,96	76,57	85,16	87,74	87,29	0,96
Banda Aceh	96,74	93,70	92,70	92,23	91,89	-1,27
Sabang	93,86	91,66	99,55	98,86	98,93	1,41
Langsa	84,21	79,94	86,27	86,92	86,76	0,85
Lhokseumawe	86,17	83,20	87,01	87,02	86,87	0,24
Subulussalam	89,37	83,82	89,64	89,14	88,96	-0,01
Aceh	81,82	82,15	82,92	83,26	83,27	0,44
Nasional	70,83	71,42	71,99	72,36	72,72	0,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

B. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Jumlah sekolah dalam Provinsi Aceh, terus mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang, begitu juga dengan kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Data kondisi ruang kelas sekolah Negeri/ Swasta tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

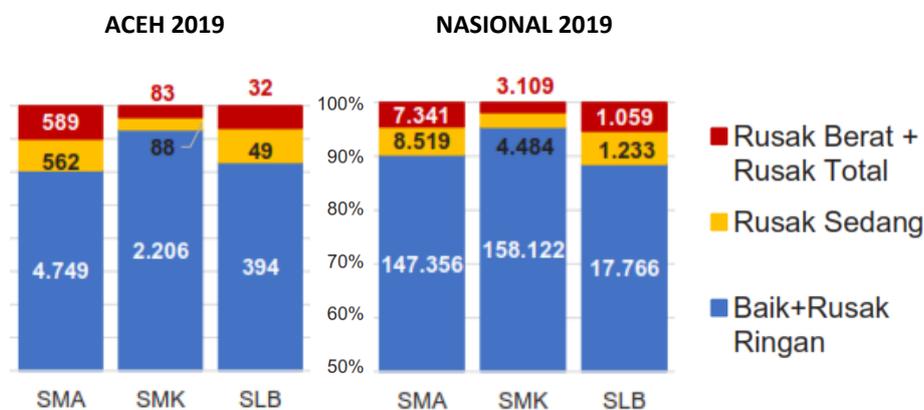
Tabel 2.39.
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2019

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2015	SMA/SMK	3.486	5.409	448	9.343	37,31
2016	SMA/SMK	2.759	3.996	237	6.992	39,46
2017	SMA	1.785	3.588	248	5.621	31,76
	SMK	943	1.154	36	2.133	44,21
2018	SMA	4.864	499	513	5.876	82,78
	SMK	2.197	87	79	2.363	92,98
2019	SMA	4.749	562	589	5.900	80,49
	SMK	2.206	88	83	2.377	92,81
	SLB	394	49	32	475	82,9

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2021

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh). Berdasarkan data Tabel 2.33 diatas dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jenjang pendidikan SMA/SMK ruang kelas

berjumlah 8.277 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 6.955 ruang kelas (84%). Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh, namun Jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas nasional, maka ini masih menjadi pekerjaan besar karena ruang kelas baik/rusak ringan rata-rata nasional (SMA, SLB dan SMK) tahun 2019 pada tingkat 93 persen.



Gambar 2.26. Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA, SMK dan SLB Tahun 2019

C. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Jadi Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik dapat diartikan bahwa Guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi Guru tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SMA					
	SMA		SMK		SLB	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Simeulue	23,3	77,7	23,8	76,2	9,1	90,9
Aceh Singkil	37,4	62,6	20,7	79,3	11,1	88,9
Aceh Selatan	39,1	60,9	39,7	60,3	39,7	60,3
Aceh Tenggara	37,1	62,9	20,7	79,3	21,4	78,6
Aceh Timur	34,5	65,5	22,6	77,4	9,1	90,9
Aceh Tengah	48,0	52,0	54,0	46,0	14,4	85,6
Aceh Barat	41,5	58,5	41,5	58,5	12,9	87,1
Aceh Besar	52,7	47,3	34,0	66,0	11,8	88,2
Pidie	40,2	59,8	26,8	73,2	25,0	75,0
Bireuen	42,5	57,5	39,9	60,1	20,9	79,1
Aceh Utara	40,9	59,1	23,4	76,6	4,4	95,6
Aceh Barat Daya	39,6	60,4	37,1	62,9	34,8	65,2
Gayo Lues	36,6	63,7	24,5	75,5	7,1	92,9
Aceh Tamiang	41,0	59,0	40,7	59,3	22,5	77,5
Nagan Raya	35,4	64,6	17,8	82,2	4,5	95,5
Aceh Jaya	32,5	67,5	21,4	78,6	-	-
Bener Meriah	31,2	68,8	24,5	75,5	21,4	78,6
Pidie Jaya	36,5	63,5	19,8	80,2	4,2	95,8
Banda Aceh	72,4	27,6	52,0	48,0	31,3	68,7
Sabang	60,3	39,7	61,1	38,9	30,0	70,0
Langsa	55,0	45,0	51,4	48,6	27,3	72,7
Lhokseumawe	60,0	40,0	40,4	59,6	4,0	96,0
Subulussalam	27,3	72,7	24,8	75,2	-	-
Aceh	42,6	57,4	34,0	66,0	18,6	81,4

Sumber: Kemendikbud, 2020

Berdasarkan data persentase sertifikasi guru jenjang pendidikan SMA maka Kabupaten Simeuleu merupakan Kabupaten terendah yang guru sudah bersertifikasi (16,9%) dan yang belum bersertifikasi (83,1); pada jenjang pendidikan SMK Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten terendah yang guru sudah bersertifikasi (9,0%) dan yang belum bersertifikasi (91,9); dan pada jenjang SLB ada beberapa Kabupaten/ Kota yang belum ada guru bersertifikasi (0%), yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Tahun 2020, kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19.

D. Kualifikasi Pendidik

Kualifikasi pendidik adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan

sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesarjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Data kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel 2.41 dan Tabel 2.42.

Tabel 2.41.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2016–2019

Kabupaten/Kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	7,0	4,5	2,7	2,7	93,0	95,5	97,3	97,3
Aceh Singkil	1,5	0,4	0,0	0,0	98,5	99,6	100,0	100,0
Aceh Selatan	1,3	2,7	1,9	1,1	98,7	97,3	98,1	98,9
Aceh Tenggara	2,8	2,8	1,3	0,7	97,2	97,2	98,7	99,3
Aceh Timur	4,4	3,0	2,8	2,4	95,6	97,0	97,2	97,6
Aceh Tengah	3,1	5,8	3,2	1,8	96,9	94,2	96,8	98,2
Aceh Barat	2,8	2,1	1,3	1,2	97,2	97,9	98,7	98,8
Aceh Besar	2,8	2,8	1,9	0,9	97,2	97,2	98,1	99,1
Pidie	3,2	2,2	1,4	1,4	96,8	97,8	98,6	98,6
Bireuen	2,8	2,2	1,6	0,8	97,2	97,8	98,4	99,2
Aceh Utara	4,5	5,6	2,4	1,6	95,5	94,4	97,6	98,4
Aceh Barat Daya	2,5	2,3	2,2	2,1	97,5	97,7	97,8	97,9
Gayo Lues	2,1	39,7	2,6	1,8	97,9	60,3	97,4	99,2
Aceh Tamiang	2,6	5,7	2,9	2,2	97,4	94,3	97,1	97,8
Nagan Raya	6,7	4,2	3,3	2,5	93,3	95,8	96,7	97,5
Aceh Jaya	3,1	1,5	0,8	1,1	96,9	98,5	99,2	98,9
Bener Meriah	2,3	2,6	1,1	0,7	97,7	97,4	98,9	99,3
Pidie Jaya	2,5	2,0	1,2	0,8	97,5	98,0	98,8	99,2
Banda Aceh	2,0	1,6	1,6	0,8	98,0	98,4	98,4	99,2
Sabang	0,0	2,1	2,4	0,0	100,0	97,9	97,6	100,0
Langsa	2,9	3,4	2,1	1,5	97,1	96,6	97,9	98,5
Lhokseumawe	2,5	3,6	2,2	1,3	97,5	96,4	97,8	98,7
Subulussalam	1,0	2,1	2,2	0,0	99,0	97,9	97,8	100,0
ACEH	3,1	3,2	2,0	1,3	96,9	96,8	98,0	98,7

Sumber: Kemendikbud, 2020

Tabel 2.42.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2016–2019

Kabupaten/kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	5,9	5,7	3,0	1,9	94,1	94,3	97,0	98,1
Aceh Singkil	11,2	3,9	2,2	1,5	88,8	96,1	97,8	98,5
Aceh Selatan	5,0	5,0	5,7	2,8	95,0	95,0	94,3	97,2
Aceh Tenggara	15,7	8,8	5,9	4,8	84,3	91,2	94,1	95,2
Aceh Timur	8,6	6,6	4,0	1,8	91,4	93,4	96,0	98,2
Aceh Tengah	9,8	5,0	2,4	0,5	90,2	95,0	97,6	99,5

Aceh Barat	7,7	6,3	5,4	3,7	92,3	93,7	94,6	96,3
Aceh Besar	4,4	3,0	3,1	1,7	95,6	97,0	96,9	98,3
Pidie	6,7	3,8	4,3	2,7	93,3	96,2	95,7	97,3
Bireuen	6,0	3,2	2,0	1,7	94,0	96,8	98,0	98,3
Aceh Utara	11,3	8,1	6,5	1,7	88,7	91,9	93,5	98,3
Aceh Barat Daya	10,1	2,5	2,7	2,7	89,9	97,5	97,3	97,3
Gayo Lues	19,1	9,1	2,0	0,0	80,9	90,1	98,0	100,0
Aceh Tamiang	11,5	1,3	1,6	0,6	88,5	98,7	98,4	99,4
Nagan Raya	5,6	3,7	1,1	1,1	94,4	96,3	98,9	98,9
Aceh Jaya	5,4	2,4	2,8	0,0	94,6	97,6	97,2	100,0
Bener Meriah	10,5	3,8	7,0	2,8	89,5	96,2	93,0	97,2
Pidie Jaya	6,4	4,9	4,3	1,8	93,6	95,1	95,7	98,2
Banda Aceh	7,1	3,5	5,4	2,6	92,9	96,5	94,6	97,4
Sabang	8,7	0,0	0,0	0,0	91,3	100,0	100,0	100,0
Langsa	6,1	1,5	1,1	0,5	93,9	98,5	98,9	99,5
Lhokseumawe	8,5	6,3	3,8	2,2	91,5	93,7	96,2	97,8
Subulussalam	12,5	8,6	4,7	2,9	87,5	91,4	95,3	97,1
ACEH	8,4	4,8	3,9	2,0	91,6	95,3	96,1	98,0

Sumber: Kemendikbud, 2020

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

E. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berikut adalah Status Akreditasi Sekolah tahun 2018 dan 2019 jenjang SMA/SMK/Sederajat (Tabel 2.43).

Tabel 2.43.
Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	SMA								SMA							
	2018				2019				2018				2019			
	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm
Simeulue	20,0	52,0	28,0	-	16,0	52,0	32,0	-	0,8	35,0	15,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Aceh Singkil	31,3	50,0	6,3	12,5	35,7	50,0	14,3	-	2,4	19,5	17,1	61,0	14,3	57,1	28,6	-

Kabupaten/ Kota	SMA								SMA							
	2018				2019				2018				2019			
	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm
Aceh Selatan	36,4	45,5	18,2	-	36,4	45,5	18,2	-	3,8	61,5	3,8	30,8	-	81,8	0,8	-
Aceh Tenggara	14,3	64,3	10,7	10,7	14,3	64,3	14,3	7,1	21,2	39,4	9,1	30,3	12,5	62,5	18,8	6,3
Aceh Timur	46,7	40,0	13,3	-	43,3	43,3	13,3	-	19,2	34,6	1,9	44,2	26,7	53,3	13,3	6,7
Aceh Tengah	40,0	40,0	15,0	5,0	45,0	35,0	15,0	5,0	30,4	47,8	21,7	-	40,0	60,0	-	-
Aceh Barat	42,9	42,9	14,3	-	38,1	47,6	14,3	-	18,2	48,5	9,1	24,2	-	81,8	18,2	-
Aceh Besar	38,1	42,9	14,3	4,8	35,7	45,2	14,3	4,8	33,3	23,1	10,3	33,3	45,5	36,4	18,2	-
Pidie	57,1	35,7	7,1	-	50,0	36,7	6,7	6,7	29,7	27,0	5,4	37,8	21,4	35,7	7,1	35,7
Bireuen	22,9	57,1	11,4	8,6	21,6	54,1	10,8	13,5	18,6	41,9	-	39,5	-	91,7	-	8,3
Aceh Utara	36,4	47,3	12,7	3,6	36,4	43,6	18,2	1,8	25,7	21,4	7,1	45,6	16,7	62,5	8,3	12,5
Aceh Barat Daya	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	11,8	52,9	11,8	23,5	20,0	80,0	-	-
Gayo Lues	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	-	66,7	-	33,3	-	100,0	-	-
Aceh Tamiang	55,6	33,3	7,4	3,7	51,9	22,2	22,2	3,7	9,1	54,5	6,1	30,3	11,1	55,6	22,2	11,1
Nagan Raya	22,2	72,2	5,5	-	22,2	72,2	5,6	-	11,8	52,9	-	35,3	-	60,0	20,0	20,0
Aceh Jaya	21,4	64,3	7,1	7,1	28,6	57,1	7,1	7,1	14,3	64,3	7,1	14,3	14,3	85,7	-	-
Bener Meriah	8,7	69,6	21,7	-	8,7	65,2	21,7	4,3	18,8	50,0	6,3	25,0	16,7	16,7	33,3	33,3
Pidie Jaya	42,9	50,0	-	-	42,9	42,9	7,1	7,1	5,3	31,6	-	63,2	28,6	28,6	-	42,9
Banda Aceh	60,7	32,1	7,1	-	60,0	30,0	6,7	3,3	57,1	25,0	-	17,9	40,0	60,0	-	-
Sabang	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	44,4	-	-	55,6	100,0	-	-	-
Langsa	22,2	77,8	-	-	20,0	70,0	-	10,0	32,4	23,5	11,8	32,4	30,0	70,0	-	-
Lhokseumawe	66,7	33,3	-	-	66,7	33,3	-	-	48,7	17,9	-	33,3	46,2	46,2	7,7	-
Subulussalam	33,3	58,3	8,3	-	38,5	46,2	7,7	7,7	14,3	28,6	7,1	50,0		20,0	20,0	60,0
Aceh	37,0	48,4	11,9	2,7	36,4	46,7	13,9	3,0	23,2	35,9	6,0	34,8	20,7	57,7	12,7	8,9

Sumber: Kemendikbud 2020

Berdasarkan data Tabel 2.43 di atas, dapat diketahui bahwa Tahun 2018 jenjang SMA jumlah sekolah yang belum terakreditasi sebesar 13,5 persen di Kabupaten Bireuen dan 10,0 persen di Kota Langsa. Untuk jenjang SMK secara keseluruhan masih ada 8,9 persen SMK yang belum terakreditasi. Persentase SMK yang belum terakreditasi terbanyak di Kab. Pidie Jaya yaitu 42,9 persen dan Kab. Pidie sebesar 35,7 persen. Dalam rangka meningkatkan/mempertahankan Akreditasi Sekolah, sekolah harus memenuhi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan serta standar sarana dan prasarana.

2.1.3.2.1.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2016-2020 AKN Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Angka Kematian Neonatus Tahun 2016–2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran)	8	7	7	7	8

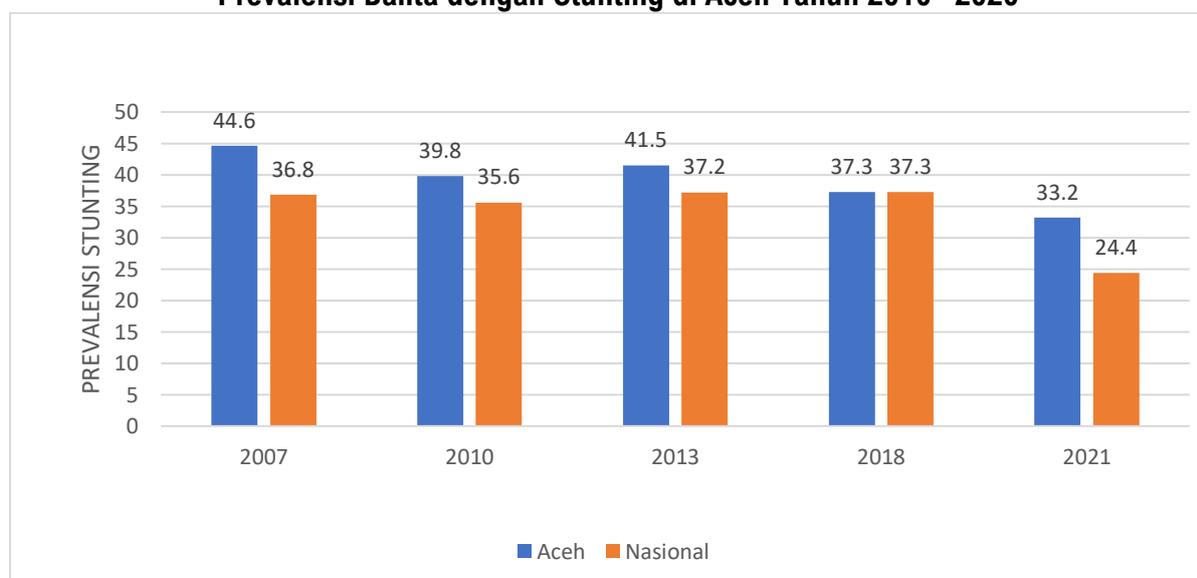
Sumber: Dinas Kesehatan Aceh (2021')

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal berdasarkan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh, dan asfiksia.

B. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2010– 2020



Sumber : Riskedes 2018 dan SSGI 2021

Dari hasil Riskedesdas dan SSGBI diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh berada di atas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	16.7	24,8	N/A	N/A	8,8
2	Nasional	19.6	17.8	N/A	N/A	

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2021

2.1.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.102,07 km (Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.781,72 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi).
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.766,26 km.

A.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.

Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,08	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,08	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,08	1.161,86	812,22	0,94
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,08	1.203,61	828,54	0,97
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.111,39	1.210,51	821,74	0,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2020 dan Satker P2JN Aceh 2021

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,62 di tahun 2016 menjadi 0,79 di tahun 2020. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

A.2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai

rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2016	2.102,08	1.781,72	17.918,40	21.802,20	5.096.248	233,75
2017	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.189.466	219,43
2018	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23650,05	5.281.314	223,31
2019	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.371.532	227,13
2020	2.111,39	1.781,72	19,766,26	23650,05	5.274.871	223,04

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2021

Pada Tabel 2.48, menggambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2020, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Sementara pada tahun 2016, 1 km jalan melayani 233 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

A.3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kondisi mantap adalah sebesar 79,36 persen atau 1.413,96 Km, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 61,89 persen atau 1.102,63 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020

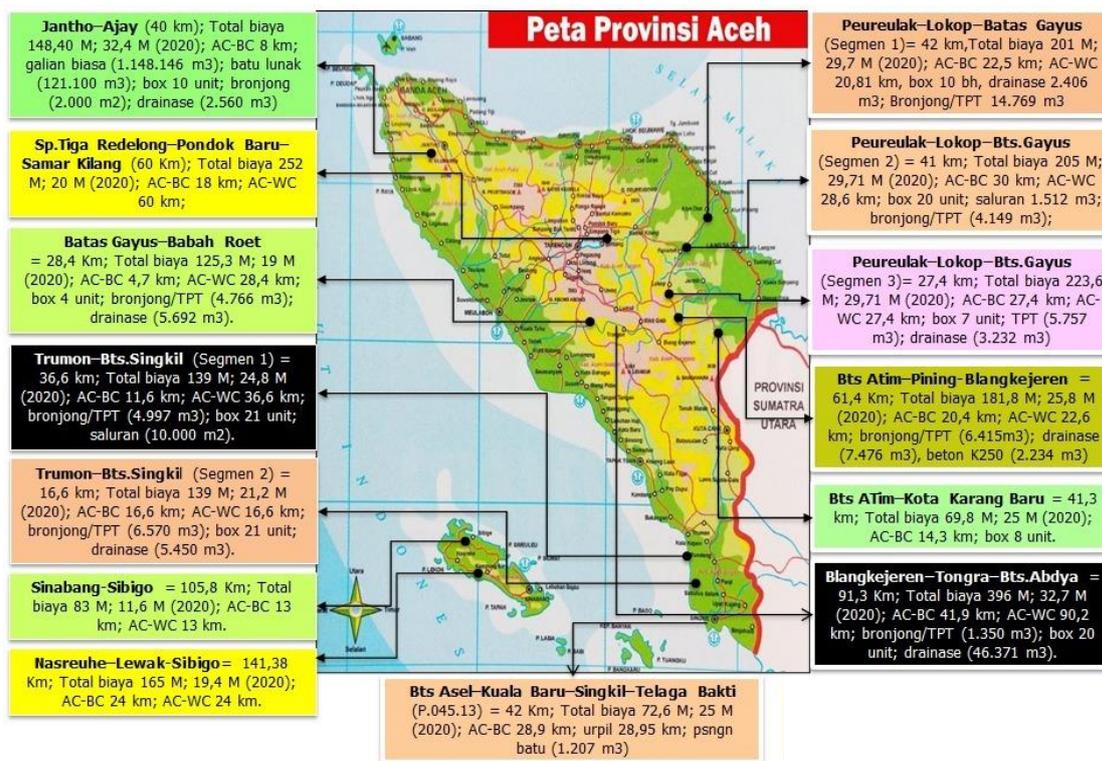
Tahun	Jalan Provinsi	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (km)	% Baik	Sedang (S) (km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100	(5)	(6)=(5)/(2)*100	(7)=(3)/(5)	(8)=(7)/(2)*100
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2022

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

A.4. Pencapaian Target Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.413,96 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 79,36%. Tentunya Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya-upaya lanjutan penanganan jalan provinsi, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan prioritas yang sebelumnya pelaksanaannya menggunakan sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy years contract/MYC*), seperti Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.27. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (multy years contract/MYC) Tahun 2020-2022

Pembangunan jalan yang merupakan lintas strategis ini sudah dimulai sejak Gubernur Aceh Ibrahim Hasan diawal tahun 1990-an yang diberi nama dengan "**Ruas Jalan Terobosan**" kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud dengan nama "**Jaring Laba-laba**", berganti dengan Gubernur Abdullah Puteh program itu diberi nama "**Ladia Galaska**". Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Penanganan jalan dengan mekanisme MYC pada tahun 2020-2022 sebanyak 11 ruas dilakukan berdasarkan pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau MYC harus mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditanda-tangani bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS dan tidak melampaui masa jabatan kepala daerah dan RPJMA.

Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan DPRA (Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST dan Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si) dan Gubernur Aceh dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022, tanggal 10 September 2019;

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kesepakatan bersama proyek Multi Years 2020-2022, ditanda tangani bersamaan dengan KUA/PPAS dan menjadi bagian dari QANUN APBA TA. 2020, yang sebelumnya juga telah dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun APBA 2019 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 903-5297 Tahun 2019. Selanjutnya telah dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019, dengan Alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.477.278.761.000,-. Selanjutnya penganggaran pelaksanaan peningkatan dan pengawasan jalan MYC masing-masing terbagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 341.147.757.000,-, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.169.586.659.000,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 966.544.345.000,-.

Penyelesaian pembangunan 11 ruas jalan strategis ini diperkirakan turut memberikan kontribusi kenaikan persentase kondisi mantap jalan provinsi keseluruhan yang sebelumnya sebesar 76,86 persen pada tahun 2019 dan diharapkan menjadi sebesar 95,30 persen pada akhir tahun 2026. Namun demikian, pada saat pelaksanaan diperkirakan beberapa ruas jalan sampai dengan akhir tahun 2022 tidak mencapai kondisi mantap jalan 100 persen, sebagai berikut:

1. Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, dengan kondisi mantap jalan sebesar 88,50 persen.
2. Jl. Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, dengan kondisi mantap jalan sebesar 81,08 persen.
3. Jl. Sinabang – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 83,80 persen.
4. Jl. Nasreuhe - Lewak – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 69,09 persen.

Dengan demikian pada akhir tahun 2022, prediksi kondisi mantap 11 ruas jalan MYC sebesar 90,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 9,17 persen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.50 di bawah ini.

Tabel 2.50.
Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KONDISI PERMUKAAN TAHUN 2021 (KM)							PERKIRAAN PERSENTASE KONDISI MANTAP AKHIR TAHUN 2022
				BAIK	SEDANG	RUSAK RINGA N	RUSAK BERAT	BELUM TEMBU S	MANTA P	TIDAK MANTA P	
1	Aceh Besar	Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya	41,30	36,30	0,50	-	4,50	-	36,80	10,90	100
2	Bener Meriah	Jl. Sp.Tiga Redelong- Pondok Baru - Samar Kilang	57,08	36,40	1,30	1,10	18,28	-	37,70	33,95	100
3	Aceh Timur	Jl. Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues	107,30	49,40	6,70	4,90	46,30	-	56,10	47,72	100
4	Gayo Lues	Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren	61,42	54,52	2,70	0,20	4,00	-	57,22	6,84	100
5	Aceh Tamiar	Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru	43,52	38,40	1,40	1,70	2,02	-	39,80	8,55	88,50
6	Gayo Lues	Jl. Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya	90,15	72,75	4,60	6,00	6,80	-	77,35	14,20	100
7	Abdya	Jl. Batas Gayo Lues - Babah Roet	27,57	21,80	1,17	-	4,60	-	22,97	16,68	100
8	Aceh Selatan	Jl. Trumon - Batas Singkil	51,42	19,90	5,00	0,60	25,92	-	24,90	51,58	100
9	Aceh Singkil	Jl. Bts. A. Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti	44,93	21,93	5,60	0,50	16,90	-	27,53	38,73	81,08
10	Simeulue	Jl. Sinabang - Sibigo	92,64	67,94	9,10	6,60	9,00	-	77,04	16,84	83,80
11	Simeulue	Jl. Nasreuhe - Lewak - Sibigo	129,42	61,42	0,90	0,20	66,90	-	62,32	51,85	69,09
JUMLAH			746,75	480,76	38,97	21,80	205,22	-	519,73	297,82	
PERSENTASE (%) TOTAL			100,00	64,38	5,22	2,92	27,48	-	69,60	30,40	
REKAP KONDISI (%)			MANTAP	69,60							90,83
			TDK MANTAP	30,40							9,17

Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan 11 lintas strategis dengan sistim kontrak MYC sebagai berikut:

1. Adanya hambatan Administrasi selama proses pengadaan Barang dan jasa;
2. Proses lelang yang berlarut-larut, malah ada yang sampai akhir tahun 2021;
3. Terdapat beberapa jembatan yang belum terbangun/tertangani didalam ruas penanganan kontrak tahun jamak.

Untuk mengfungsionalkan beberapa lintas strategis dimaksud sekaligus pencapaian target kondisi mantap jalan provinsi Aceh menjadi 95,30 persen di akhir tahun 2026, maka masih diperlukan diprioritaskan lanjutan pembangunan ruas jalan MYC yang belum mencapai kondisi mantap 100 persen. Selain itu, terhadap beberapa ruas jalan dimaksud dilakukan pemeliharaan baik rutin maupun berkala untuk menjaga umur rencana jalan dan kondisi mantap jalan.

B. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi).

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

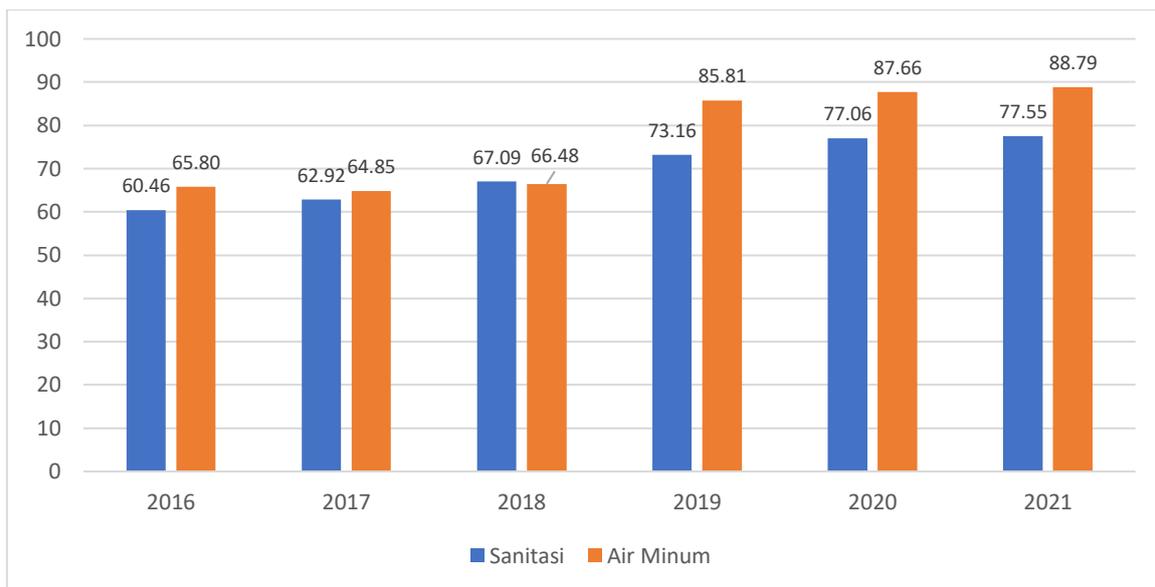
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

B.1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal's*).

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,33 persen. Pada tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan pelayanan sebesar 1,85 persen. Sedangkan kondisi pelayanan akses sanitasi layak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,60 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.28.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.28. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2021

Menurut Kabupaten/Kota persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021 disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	61,11	59,43	55,27	65,47	66,51	71,56
Aceh Singkil	51,04	60,05	63,53	73,54	64,22	69,56
Aceh Selatan	54,48	54,35	57,83	62,28	68,78	62,55
Aceh Tenggara	38,98	39,88	46,73	51,18	54,04	62,71
Aceh Timur	44,72	52,29	58,38	64,52	74,65	66,75
Aceh Tengah	55,61	62,61	55,43	79,99	81,26	90,58
Aceh Barat	72,87	73,65	76,8	78,28	83,45	89,60
Aceh Besar	81,90	80,62	84,99	85,94	87,51	87,40
Pidie	45,27	50,79	53,22	59,06	63,54	54,10
Bireuen	70,54	66,10	73	77,97	84,16	81,89
Aceh Utara	48,46	49,75	61,83	63,66	75,83	79,97
Aceh Barat Daya	29,25	36,30	37,07	54,96	50,27	65,71
Gayo Lues	28,97	30,33	36,75	44,52	43,32	47,63
Aceh Tamiang	66,30	72,50	79,61	80,34	84,61	87,45
Nagan raya	42,36	59,85	62,92	70,52	80,35	74,86
Aceh Jaya	67,65	75,01	71,91	82,13	83,27	81,60

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bener Meriah	69,29	68,02	60,8	79,84	84,12	86,69
Pidie Jaya	52,95	60,77	57,73	72,83	66,39	74,30
Banda Aceh	99,73	98,26	99,21	99,62	99,41	99,88
Sabang	86,09	83,69	91,65	89,71	89,20	92,25
Langsa	92,47	89,90	90,00	90,96	91,57	91,81
Lhokseumawe	82,13	82,82	89,83	91,00	88,07	93,10
Subulussalam	49,27	34,63	52,99	75,14	73,54	69,71
Aceh	60,46	62,92	67,09	73,16	77,06	77,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.52. Kota Banda Aceh adalah yang mendominasi tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

Tabel 2.52.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2021

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	76,17	69,30	67,42	83,27	79,79	87,45
Aceh Singkil	52,94	54,07	55,23	80,14	72,72	78,58
Aceh Selatan	63,98	56,09	45,42	82,27	80,44	79,65
Aceh Tenggara	50,83	67,57	69,53	78,03	90,92	86,71
Aceh Timur	51,51	51,67	52,54	74,04	74,67	83,16
Aceh Tengah	65,10	55,93	61,41	93,63	89,38	90,10
Aceh Barat	71,59	69,94	67,85	87,20	94,03	94,22
Aceh Besar	84,77	69,05	82,87	92,54	88,59	82,36
Pidie	49,67	58,68	59,06	87,21	90,35	89,24
Bireuen	65,78	60,80	60,91	93,98	91,32	93,53
Aceh Utara	47,32	57,25	53,42	75,57	86,25	91,09
Aceh Barat Daya	72,10	52,68	46,21	94,26	93,87	95,34
Gayo Lues	46,41	65,07	66,78	77,53	71,76	84,68
Aceh Tamiang	74,35	67,35	75,91	78,54	78,73	83,12
Nagan Raya	69,36	61,39	70,60	86,94	93,32	90,13
Aceh Jaya	64,21	73,08	76,99	90,64	89,89	86,36
Bener Meriah	70,61	64,71	63,36	89,50	89,50	89,71
Pidie Jaya	58,80	62,53	70,24	88,89	93,18	93,46
Banda Aceh	99,09	97,71	97,23	98,79	98,85	99,37
Sabang	94,52	90,86	95,20	97,13	97,04	96,18
Langsa	84,80	87,18	88,61	98,21	99,13	97,14
Lhokseumawe	95,39	91,67	91,75	94,46	93,92	94,44
Subulussalam	43,39	35,42	34,03	45,51	64,28	60,87

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	65,80	64,85	66,48	85,81	87,66	88,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

C. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

C.1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	2.938.579,68	Jumlah	2.949.506,83

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.53 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

C.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2.54.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020

Keterangan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	14,72	18,71	16,99	17,16	17,76	22.26	33.23	21,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2021

D. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkap nya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjut nya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten

1.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)		Total	
		Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Ha	DI
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622 Ha	13 DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468 Ha	47 DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428 Ha	1.439 DI
Total		28.541	361.977	390.518 Ha	1.499 DI

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencakup 1.400 D.I; irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencakup 66 D.I; irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencakup 3 D.I; dan irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencakup 30 D.I sebagaimana disajikan pada Tabel 2.56

Tabel 2.56.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		13	108.622	47	78.468	1.439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.55, menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pidie	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		13	108,622	47	78,468	1,439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.58 dan Tabel 2.59.

Tabel 2.58.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

2021										
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran					
		Baku (Ha)	Fungsional (Ha)		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
					(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Pusat	101,622	90,544	1.011	817	68,36	351	29,40	27	2,24
2	Provinsi	65,409	28,376	515,75	395,77	76,70	45,44	6,87	35,65	6,91
3	Kab/Kota	196,261	104,018	2,770	1,395.72	50.38	716.02	25.85	658.48	23.77

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2022

Tabel 2.59.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

2019								
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	101,622	90,544	1011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65,409	54,793	1,117	928	83,08	189	16,92
3	Kab/Kota	196,261	104,018	10,943	5,023	45,90	5,920	54,10

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Tabel 2.58 dan Tabel 2.59 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data tahun 2019, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.770 km, jumlah bangunan sebanyak 10.943 unit dan luas layanan fungsional 104.018 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.011 km, jumlah bangunan 3.347 unit dengan luas layanan fungsional 90,544 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2021, memiliki panjang jaringan 515,75 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 28.376 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun – tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2021 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 76,70 %, dalam kondisi rusak ringan 9,48 %, dalam kondisi rusak sedang 6,87 % dan dalam kondisi rusak berat 6,91 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pelayanan kepada masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi layanan suatu Daerah Irigasi dilakukan melalui Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

1.2. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian yang dalam hal ini merupakan luas areal irigasi permukaan. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2017-2021

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0.673	0.679	0.699	0.714	0.741
Luasan Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	67.37	71.16	74.20	78.79	79.55

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2022

Perhitungan rasio jaringan irigasi hanya didasarkan pada data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas lahan budidaya pertanian merupakan luas areal irigasi permukaan yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 38 Daerah Irigasi dengan luasan 65.409 ha/654,09 km². Berdasarkan Tabel 2.60. Rasio jaringan irigasi dan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik belum mencapai angka – angka yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMA 2017 – 2022, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai angka – angka yang sudah ditargetkan tersebut.

1.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

1.4. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis

yang telah teridentifikasi pada tahun 2019 adalah sepanjang 232,01 Km. Rincian besaran pantai dalam kondisi kritis di kabupaten/kota di Aceh ditunjukkan pada Tabel 2.61:

Tabel 2.61.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sabang	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5.78	5.78	5.86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	39.31	38.69	38.69	38.69	38.52
4	Aceh Jaya	35.45	35.03	35.03	34.76	35.50
5	Aceh Barat	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
6	Nagan Raya	5	5	5	5	5
7	Aceh Barat Daya	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
8	Aceh Selatan	18.3	18.3	18.3	18.3	17.39
9	Aceh Singkil	2.41	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Aceh Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12	Bireuen	5.17	5.17	3.66	3.66	3.52
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.53	15.53	15.22	15.22	15.22
15	Aceh Timur	9.74	9.47	9.12	8.42	8.42
16	Langsa	5.34	5.34	5.11	4.15	4.15
17	Simeulue	11.27	11.27	10.54	10.54	10.54
Jumlah		246.71	238.49	236.99	233.94	232.01

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Berdasarkan Tabel 2.60, total panjang pantai kritis pada tahun 2015 adalah sepanjang 238,49 246,71 km, dimana 16,48 15,93 % diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 231,53 232,01 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 6,96 14,70 km selama rentang waktu 2015 hingga 2019. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2019, panjang pantai kritis terbesar masih tetap berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 16,64 16,60 %.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Aceh tahun 2004, gelombang tsunami memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pergeseran pantai berkisar antara 20 - 50 meter ke arah daratan serta terjadi penurunan daratan di beberapa Kabupaten/Kota yaitu; Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Pulau Simeulue. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2019 diperkirakan sepanjang 232,01 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan

bangunan pengaman pantai pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai.

1.5. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.29. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban

pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

2.1.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan

peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi ACEH memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni	%	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,13	0,127	0,175	0,144	0,190

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688.76 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	362	5,814.07	319	5,310.68	473	6,688.76
Banda aceh	21	797.56	22	462.73	20	451,40
Aceh barat	15	175.49	12	152.29	12	152,29
Sabang	6	28.26	3	48.73	4	123,713
Aceh besar	21	226.48	7	190.50	7	185,37
Langsa	14	90.14	9	87.66	18	359,398
Simeulue	5	97.92	3	97.92	1	29,55
Aceh tamiang	6	61.83	3	61.66	41	348,12
Aceh timur	10	567.90	10	567.90	20	538,85
Bireuen	29	1,031.72	29	1,031.72	29	1.031,72
Aceh tenggara	52	563.89	52	563.89	52	563,89
Bener meriah	10	337.25	10	337.25	10	337,25
Aceh utara	7	62.97	7	62.97	7	62,97
Aceh singkil	9	108.86	9	108.86	9	108,86

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh barat daya	41	561.44	41	561.44	33	832,51
Nagan raya	4	108.33	4	108.33	43	108,33
Gayo lues	30	69.34	30	69.34	30	69,34
Pidie jaya	12	206.10	12	206.10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208.50	5	81.30	17	120,87
Subulussalam	5	61.77	5	61.77	12	320,17
Aceh tengah	23	189.59	23	189.59	14	187,37
Pidie	10	67.04	10	67.04	66	294,3
Aceh selatan	5	55.40	5	55.40	8	120,1
Aceh jaya	8	136.29	8	136.29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

Dalam hal infrastruktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah – langkah signifikan sebagai berikut.

- 1) Mengubah infrastruktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi sarana umum sehingga ramah disabilitas;
- 2) Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

2.1.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Perkembangan organisasi/lembaga sosial masyarakat di Aceh dapat dilihat dari jumlah akumulasi Ormas, LSM dan lembaga yang telah menerima Surat Keterangan Terdaftar dan SK KemenkumHam keberadaan Lembaga dari Tahun 2012 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.64.
Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Organisasi/Lembaga	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Organisasi/Lembaga Kesamaan Agama	2	1	-		
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	25	19	16		
3	Organisasi/Lembaga Kesamaan Profesi	3	5	-		
4	Yayasan	-	5	18	25	37

No	Organisasi/Lembaga	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Organisasi/Lembaga Kesamaan Fungsi	9	8	8		
6	Organisasi Kemasyarakatan				12	14
Jumlah		39	38	42	37	51

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2020

Berdasarkan tabel diatas sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dikeluarkan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK KemenkumHam Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI. Sejak tahun 2019 masih terdapat organisasi/lembaga sosial masyarakat yang belum melaporkan keberadaannya secara tertulis. Selanjutnya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tingkat Provinsi Aceh difokuskan pada Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM yang bersumber dari APBA, di tingkat pemerintah Aceh dari tahun 2015 s.d 2019 yang berupa bantuan hibah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Pemberian Hibah kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019
di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	500.000.000	2015	SK. Gub 180/1344/2015, 10 Desember 2015
	Polda Aceh	500.000.000		
2	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh	1.280.000.000	2016	SK. Gub 220/630/2016, 29 Juli 2016
	Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh	1.000.000.000		
	Panwaslih KIP Aceh	37.511.630.000		SK. Gub 220/940/2016, 15 Desember 2016
	KIP Aceh	69.478.201.600		
	Polda Aceh	24.870.493.100		
	Panwaslih KIP Aceh	17.000.000.000		
Polda Aceh	110.000.000.000	SK Gub 220/380/2016, 28 April 2016		
Polda Aceh	8.000.000.000			
3	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.500.000.000	2017	SK Gub, 220/657/2017, 22 Juni 2017
4	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	2.000.000.000	2018	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018
	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	102.000.000		

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	493.880.000		
5	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	500.000.000	2019	SK Gub, 903/868/2019, 10 April 2019
	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	100.000.000		SK Gub, 815/1656/2019, 11 Oktober 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

B. Kegiatan pembinaan politik daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2018-2019 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya dalam 1 Tahun anggaran Periode berikutnya

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 diberikan dalam 2 tahap, Tahap pertama diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Periode 2014 – 2019 di hitung berdasarkan perolehan suara, sedangkan tahap kedua diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara. Hak Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu 2019.
- b. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan, maka bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu tahun 2014.

2.1.3.2.1.6. Sosial

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

a. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran, asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 13 unit termasuk Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Kampung Ateuk Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik. Panti pelayanan social merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi social dasar secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan social. Daftar panti pelayanan social milik Pemerintah Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.66.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial Milik Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2017	17	10	4	3	0
2	2018	38	30	5	3	0
3	2019	51	40	8	3	0
4	2020	57	50	4	3	0
5	2021	58	50	5	3	0

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

Panti Pelayanan Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.67.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021

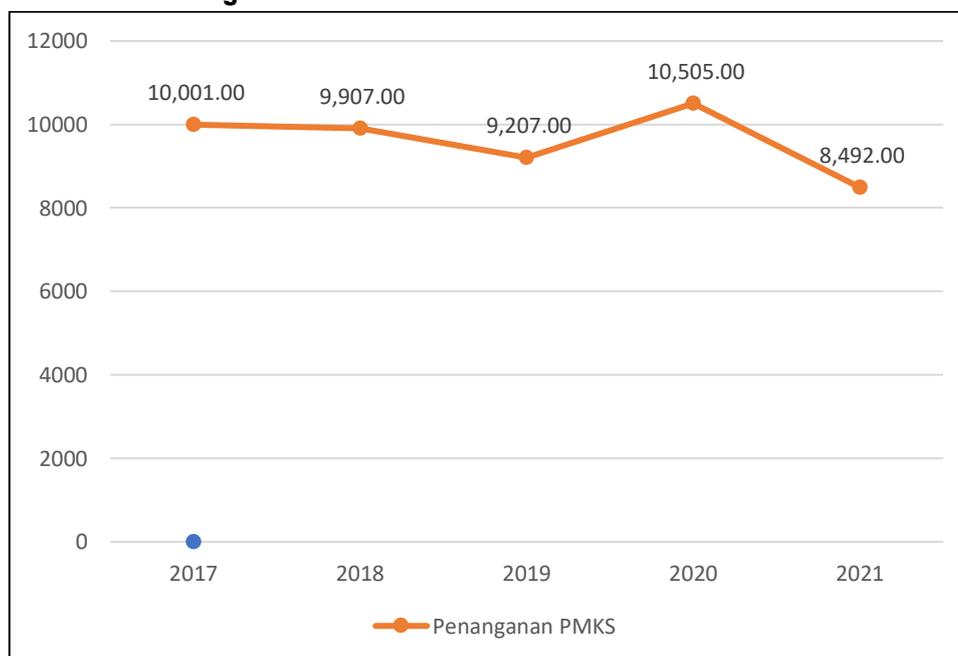
NO	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
1	Rumoh Seujahtera Bejroh Meukarya	Disabilitas dan Gelandangan Pengemis	50/25 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong - Aceh Besar
2	Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang	Lanjut Usia	80 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Ulee Kareng - Banda Aceh
3	Rumoh Seujahtera Jroh Naguna	Remaja Putus Sekolah	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung - Banda Aceh
4	Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Geu Gajah - Aceh Besar

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS di Aceh cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinsos tahun 2017-2021 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5 persen selama 5 tahun, dimana 48.112 jiwa diantaranya adalah PMKS non produktif dan terlantar penerima bantuan sosial program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Tabel 2.68.
Penanganan PMKS di Provinsi Aceh Tahun 2017–2021



Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2021 terdiri atas 6.568 orang.

Tabel 2.69.

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Aceh Tahun 2017–2021

NO	JENIS	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karang Taruna	-	-	-	-	-
2	LKS / Orsos	-	-	-	-	-
3	PSM	-	-	-	1.252	-
4	TKSK	298	298	295	289	289
5	LK3	-	-	-	-	-
6	Kader Perempuan	-	-	-	-	-
7	Dunia Usaha	-	-	-	-	-
8	Tagana	1.970	819	778	772	759
	JUMLAH	2268	1117	1073	1062	1048

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

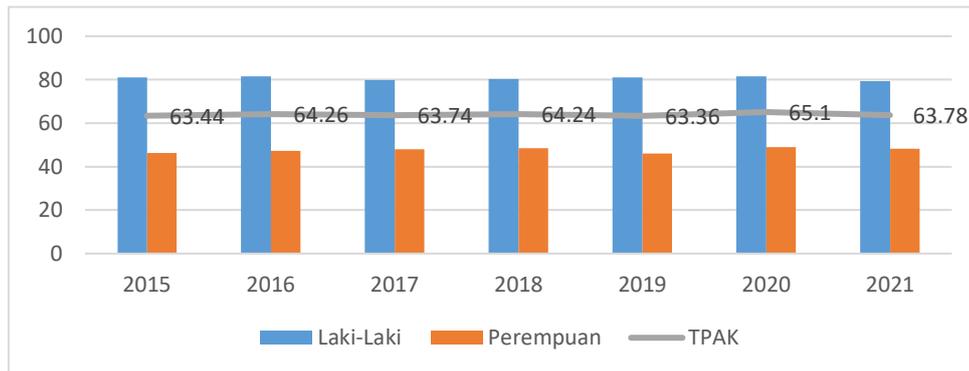
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.1.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.2.1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Gambar 2.30. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2015-2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Gambar 2.30. mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2015 hingga 2020.

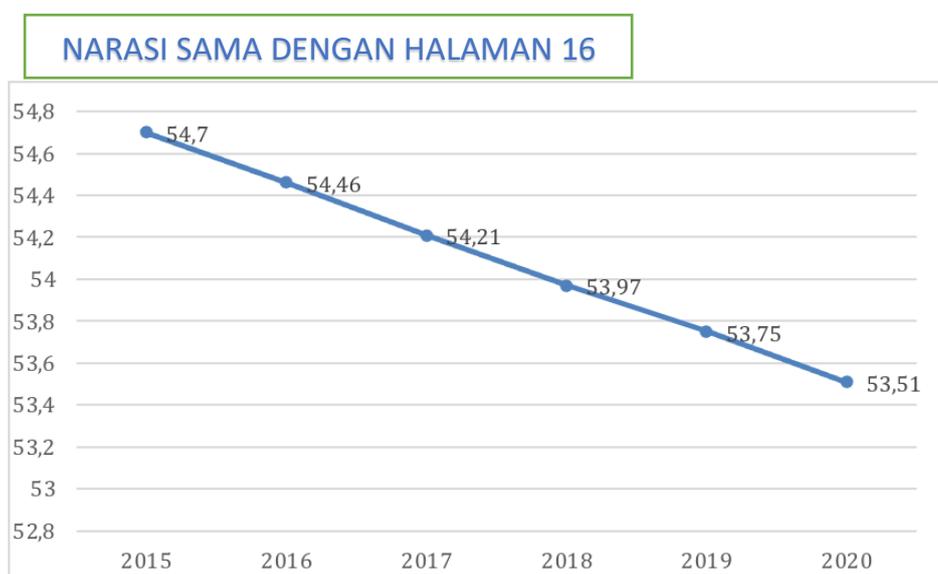
Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen.

Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur \geq 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.31 berikut :



Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.31. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020

C. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 878.000 jiwa. Tahun 2020 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 43 juta. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 372.000 orang dengan produktivitas sebesar 51,7 juta. Sektor jasa keuangan memiliki penyerapan tenaga kerja

sebesar 12.000 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar 655 juta. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar 14,4 juta.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat. Produktivitas tenaga kerja tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2020

Lapangan Usaha	Produktivitas	PDRB	Penduduk yang Berkerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.166.287	37.900.000.000.000	878.000
Pertambangan dan Penggalian	655.625.000	10.490.000.000.000	16.000
Industri Pengolahan	31.076.923	6.060.000.000.000	195.000
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20.769.231	270.000.000.000	13.000
Konstruksi	94.557.823	13.900.000.000.000	147.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	51.720.430	19.240.000.000.000	372.000
Transportasi dan Pergudangan	80.227.273	7.060.000.000.000	88.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.473.684	1.650.000.000.000	114.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	196.666.667	2.360.000.000.000	12.000
Informasi dan Komunikasi Real Estat Jasa Perusahaan	410.000.000	11.480.000.000.000	28.000
Administrasi Pemerintahan,	70.306.748	11.460.000.000.000	163.000

Lapangan Usaha	Produktivitas	PDRB	Penduduk yang Berkerja
Pertahanan dan Jaminan Sosial			
Jasa Pendidikan	22.121.212	3.650.000.000.000	165.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.571.429	4.170.000.000.000	70.000
R,S,T,U Jasa Lainnya	19.489.796	1.910.000.000.000	98.000
Total	59.506.952	132.087.462.199.231	2.219.698

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 48,94 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,47 persen. Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

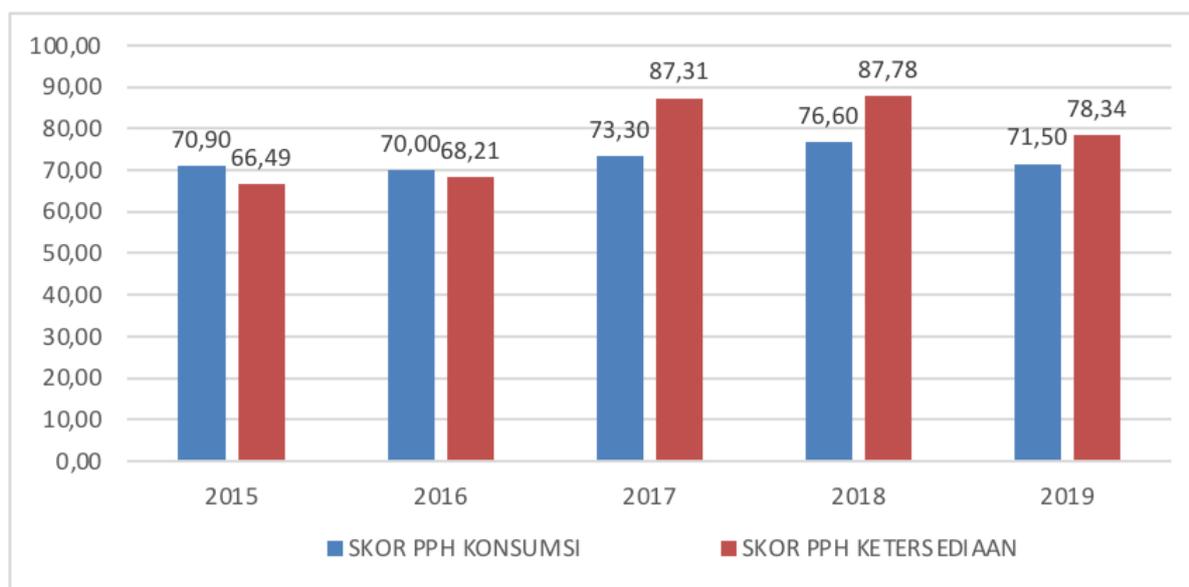
2.1.3.2.2.2. Pangan

Pangan masih menjadi isu strategis di Aceh bukan hanya periode pembangunan tahun sebelumnya namun juga periode pembangunan saat ini. Nilai ketersediaan pangan di Aceh saat ini. Pada tahun 2019 angka ketersediaan pangan utama Aceh sebesar 4.006 Kkal/kapita/hari. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar 4.694 kkal/kapita/hari (tahun 2018). Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa angka ketersediaan pangan utama di Aceh masih dengan angka konsumsi standar 3.600 kkal/kapita, namun bila dikaji secara lebih mendalam bahwa angka konsumsi tersebut sebagian besarnya merupakan konsumsi karbohidrat sedangkan proporsi konsumsi protein masih rendah.

Indikasi capaian ketersediaan pangan utama akan terlihat dari besarnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi maupun produksi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka skor PPH ketersediaan atau produksi pada tahun 2016 terlihat nilai skor PPH cenderung meningkat dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018 (87,78 persen) dan namun nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 78,34 persen diakibatkan karena angka AKE (Angka Kecukupan Energi) yang ditetapkan oleh Lembaga Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 2.150 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tahun 2019 AKE (Angka Kecukupan Energi) sebesar 2.400 kkal/kap/tahun. Sebab apabila nilai pembandingnya yang ditentukan oleh nasional semakin besar maka angka Skor PPH semakin kecil. Sedangkan skor PPH konsumsi juga mengalami hal yang sama mengalami penurunan di tahun 2019 padahal

sebelumnya mengalami peningkatan terus dari tahun 2016 sebesar 70,00 persen sampai tahun 2018.

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabeneanya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan-kecamatan rawan pangan di wilayah Provinsi Aceh yang masih mencapai 29 kecamatan pada tahun 2019.



Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2020 (diolah)

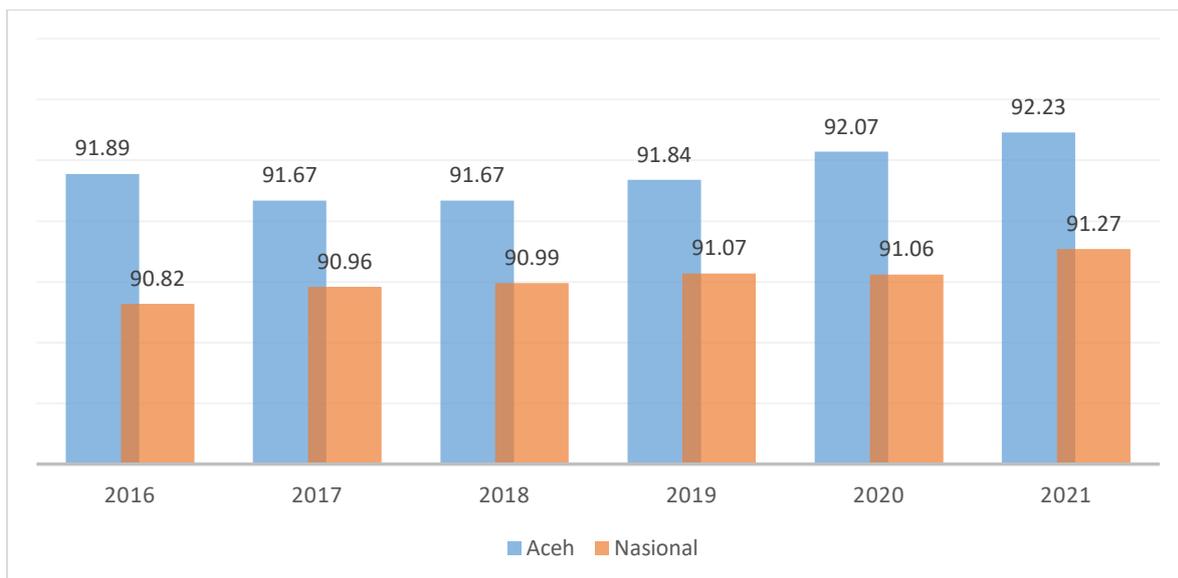
Gambar 2.32. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019

2.1.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2016 (91.89) lebih tinggi pada nasional (90.82), namun turun menjadi 91.67 di tahun 2017 dan 2018 dan kembali naik di tahun 2019 (91.84). Kemudian tahun 2020 menjadi 92.07 dan lebih baik dari nasional (91.06).

Demikian pula pada tahun 2021 IPG Aceh meningkat kembali menjadi 92,23 dan masih di atas rata-rata IPG Nasional, seperti terlihat pada Gambar 2.33 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 – 2021

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dari tahun ke tahun semakin menurun dan masih jauh lebih rendah daripada nasional. IDG Aceh tahun 2016 (67.4) lebih rendah daripada nasional (71.39), dan turun lagi menjadi 66.28 di tahun 2017, dan menjadi 63.47 di tahun 2020, namun pada tahun 2021 IDG Aceh mengalami penurunan berbanding terbalik dengan IDG Nasional yang mengalami peningkatan pada tahun yang sama, seperti terlihat pada gambar 2.34 di bawah ini.



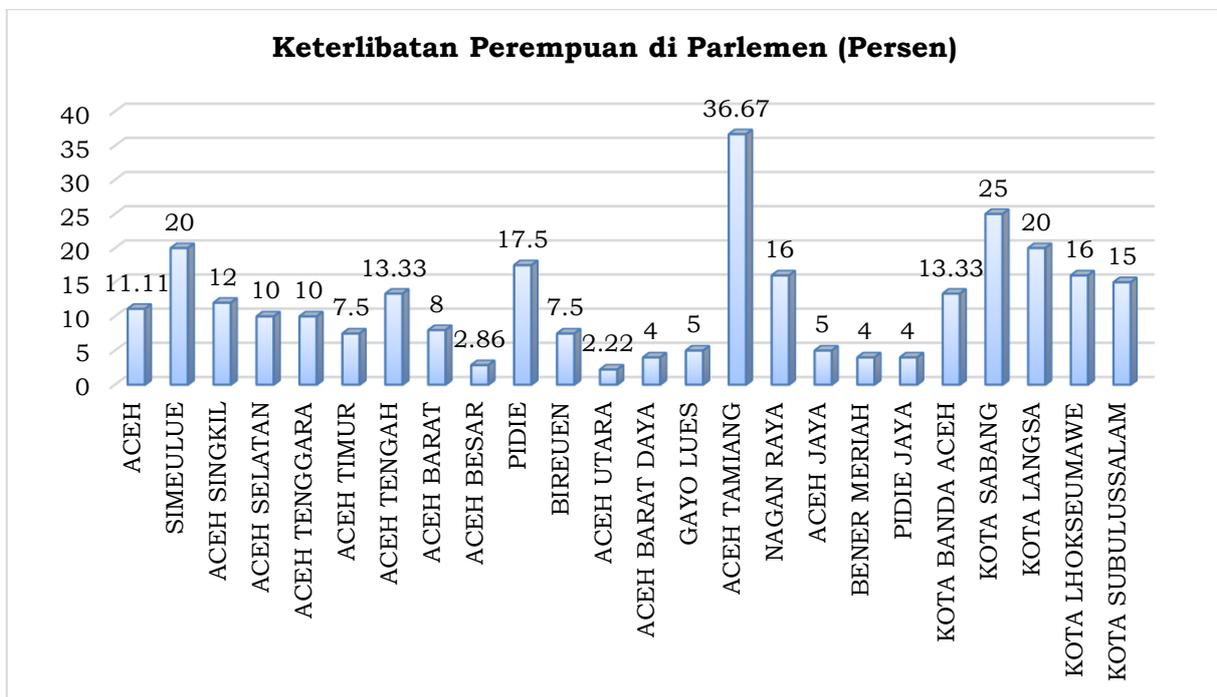
Gambar 2.34. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2016 – 2021

C. Proporsi Perempuan di Parlemen

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

Gambar 2.35 di bawah ini menggambarkan keadaan jumlah anggota legislatif perempuan se-Aceh, jumlah lembaga legislatif yang di tampilkan adalah 23 (dua puluh tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Namun sampai saat ini jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya agar lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

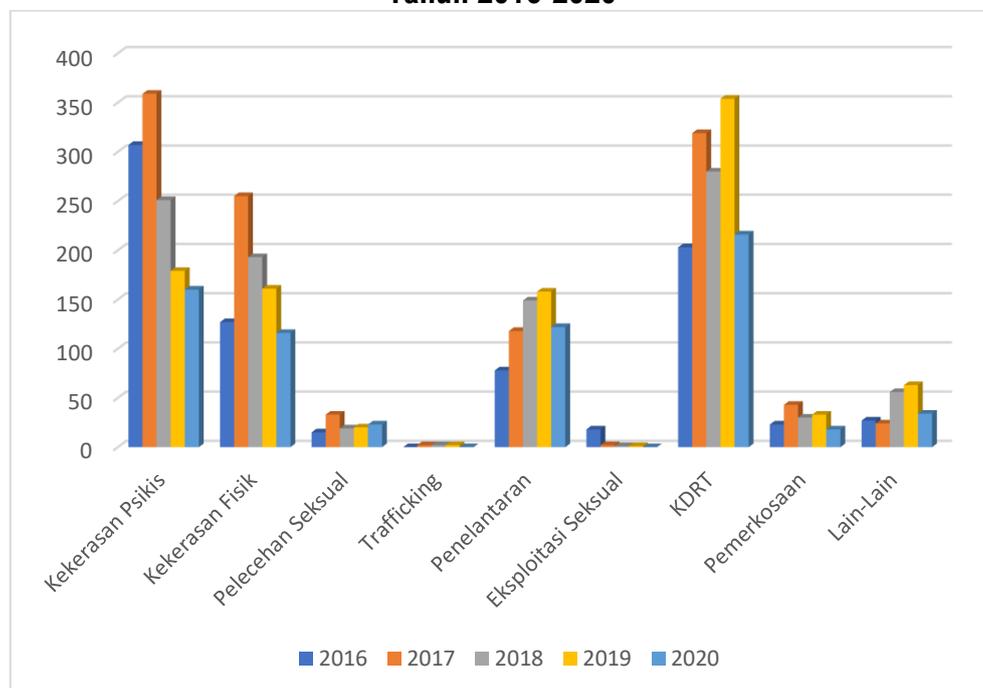
Gambar 2.35. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota)

Gambar diatas menunjukkan bahwa hanya di Kabupaten Aceh Tamiang yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30 persen yaitu 36,67 persen. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk provinsi, keterwakilannya bervariasi dari yang paling rendah terdapat di Kabupaten Aceh Utara (2.22%) sampai yang tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk tingkat provinsi, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya 11,11 persen.

D. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan, walaupun kecenderungan jumlah kasus menurun. Pada tahun 2016 tercatat ada 798 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan psikis (307 kasus) dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 203 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 1.155 kasus dengan jumlah kasus terbanyak adalah kekerasan psikis (359 kasus) dan KDRT sebanyak 319 kasus. Di tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun menjadi 689 kasus di tahun 2020, dimana kasus KDRT menjadi kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan (216 kasus) dan kekerasan psikis sebanyak 160 kasus. Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut.

Gambar 2.36.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh
Tahun 2016-2020



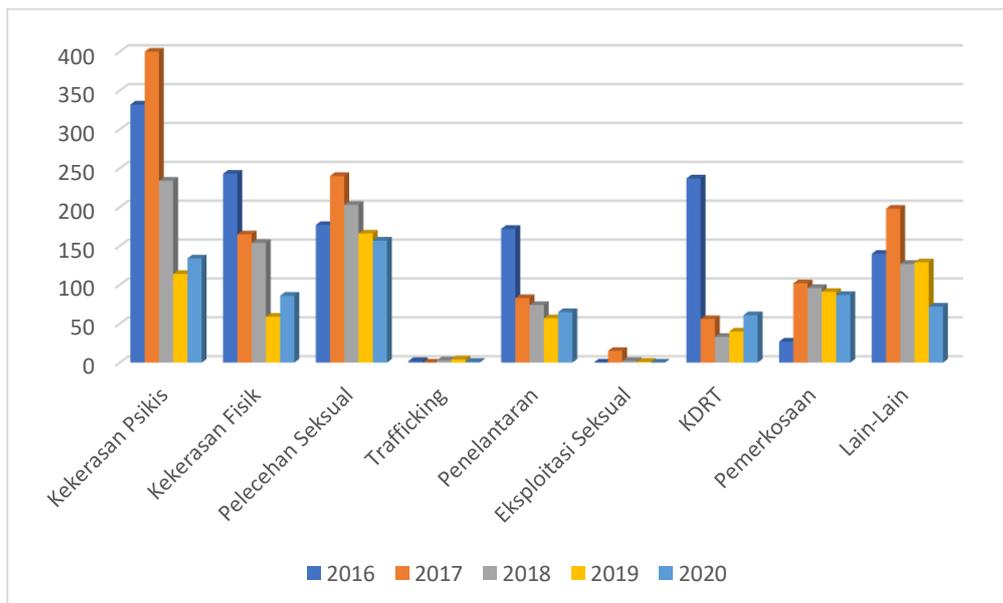
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2021

Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, ada 5.195 kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah, meningkat menjadi 6.063 kasus di tahun 2019 dan 6.115 kasus di tahun 2020. Penyebab perceraian sebagian besar disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus perselisihan meningkat dari 3.426 kasus di tahun 2018 meningkat menjadi 4.547 kasus di tahun 2020. Selain itu, penyebab perceraian karena KDRT yang juga mengalami peningkatan, dari 107 kasus di tahun 2018 menjadi 127 kasus di tahun 2020.

E. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Angka kekerasan terhadap anak juga masih terus terjadi di Aceh. Pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 1.330 kasus dengan kasus terbanyak adalah kasus kekerasan psikis (332 kasus) dan kekerasan fisik (243 kasus). Walaupun jumlah kasus terus turun dari tahun ke tahun, namun anak-anak Aceh masih terus mengalami kekerasan. Pada tahun 2020, ada 663 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dengan kasus terbanyak adalah pelecehan seksual (157 kasus) dan kekerasan psikis (134 kasus). Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.37.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Aceh
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2021

2.1.3.2.2.4. Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

b. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

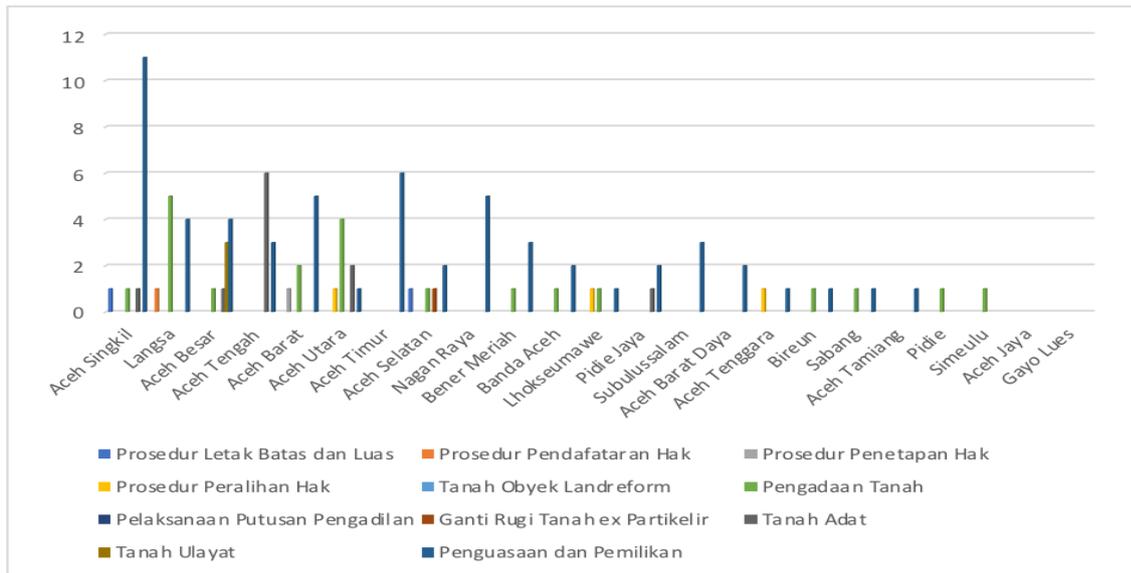
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

c. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitas

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang datur dalam Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

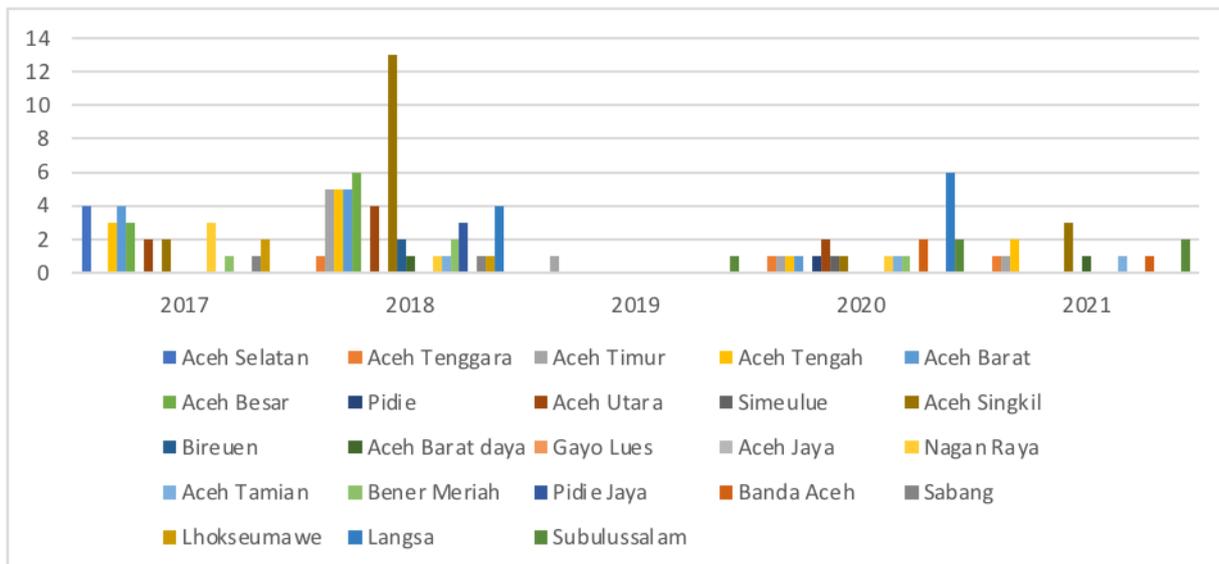
- a) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022

Gambar 2.38. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindakan lanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparat pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak KanwilBPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022

Gambar 2.39. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021

d. Penyelesaian izin lokasi

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

e. Penyelesaian Penetapan Lokasi (pemerintah)

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

f. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

g. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

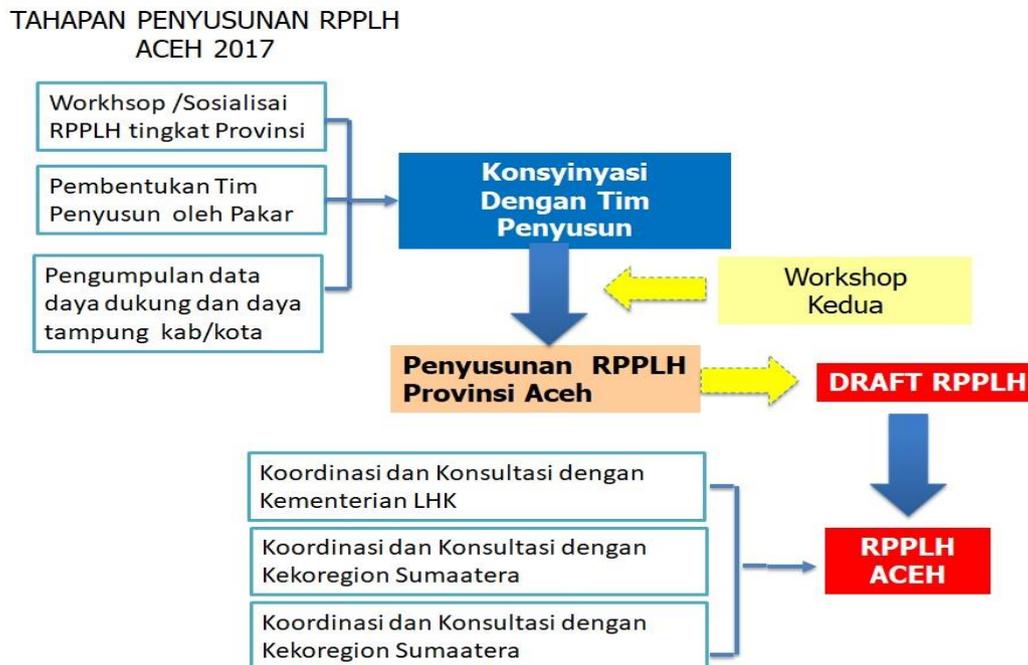
Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan didistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dalam penyusunan RPPLH, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi

hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tahapan penyusunan RPPLH dapat dilihat dalam Gambar 2.37.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Gambar 2.40. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH masih belum tersedia.

B. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2013 – 2017, RPPLH belum terintegrasi di dalam RPJM daerah.

C. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

- 1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
- 2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
- 3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum tersedia.

D. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

2.1.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan yang dilakukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	%								
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	1.752.659	49,15	3.296.329	98,25	3.309.730	98,07	3.382.639	99,49	3.588.123	97,45
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	1,198,459	65.65	1,419,965	75.58	1.584.813	84,1	1.623.818	87,03	1.776.750	93,83
3	Kepemilikan Akta Nikah	487,91	22.42	582,599	26.33	831.963	36,93	1.033.668	45,21	1.122.897	48,81

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2022

A. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 49,15 persen penduduk sudah memiliki KTP elektronik, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 97,45 persen.

B. Persentase Bayi yang memiliki Akta Kelahiran

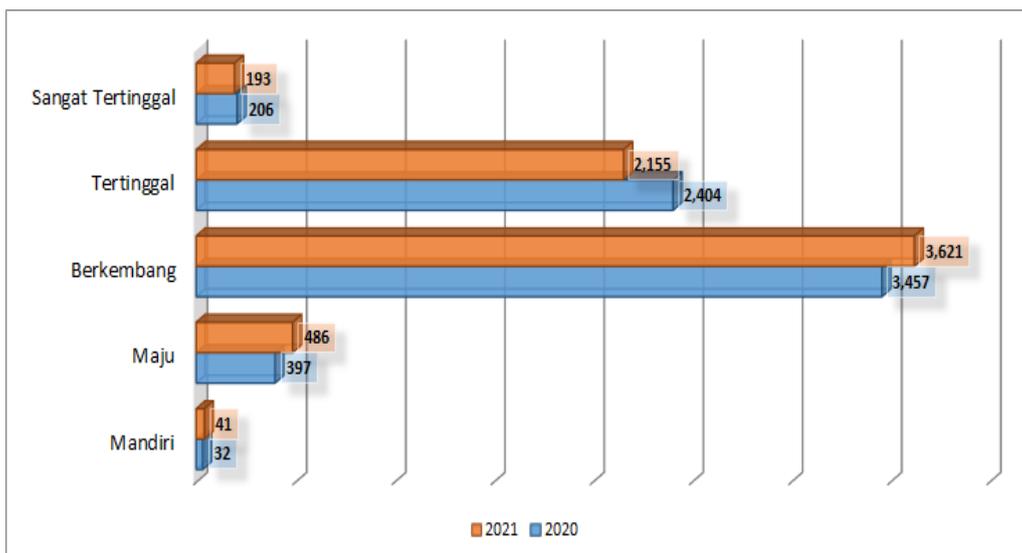
Pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun belum semua orang tua melaporkan kelahiran anaknya kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2017–2021, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, hanya 65,65 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 93,83 persen di tahun 2021.

C. Persentase Pasangan yang Memiliki Akta Nikah

Persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 48,81 persen. Namun jika dibandingkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2017 kepemilikan akta nikah sebanyak 22,42 persen dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 48,81 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat serta terobosan dari pemerintah dalam pembuatan akta nikah masih harus terus diupayakan.

2.1.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2020-2021 dapat kita lihat dalam Gambar 2.42 di bawah ini.

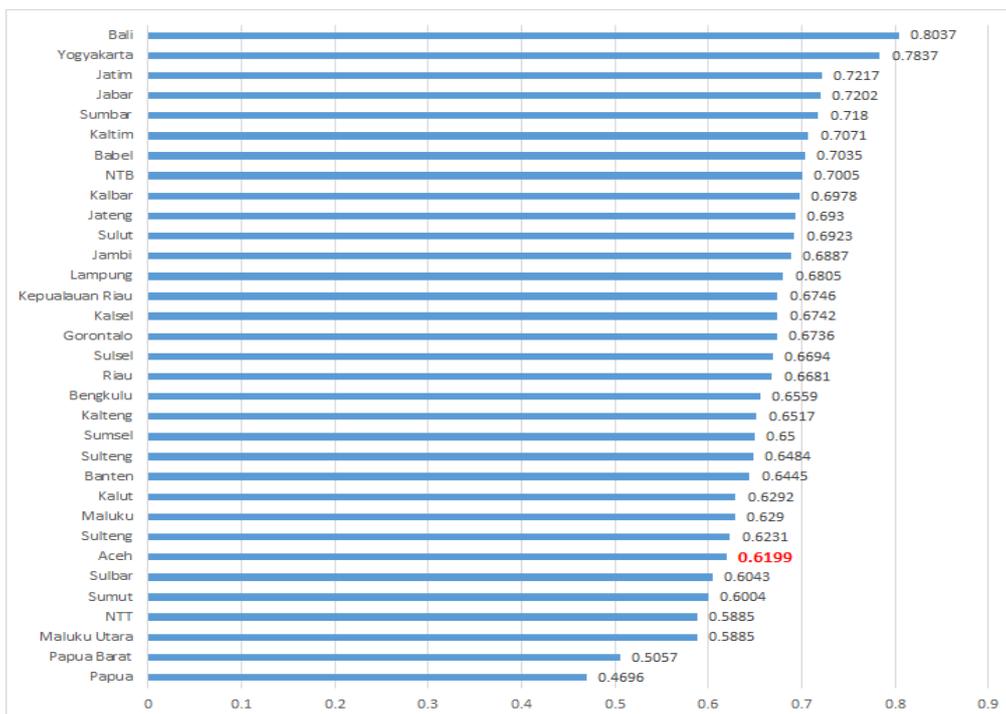


Sumber: DPMG Aceh, 2021

Gambar 2.41. Status Desa di Aceh Tahun 2020-2021

Dari Gambar 2.41 di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Status IDM Aceh (0.6199) masih sangat rendah dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia (Peringkat 7 dari bawah). Papua menjadi provinsi dengan IDM terendah yaitu 0.4696, sedangkan Bali adalah provinsi dengan IDM tertinggi yaitu 0.8037. secara rinci status IDM Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.42.



Sumber: DPMG, 2021

Gambar 2.42. IDM Aceh Tahun 2021

2.1.3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Peserta KB aktif di Aceh pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 46,83 persen menjadi 76,81 persen, namun pada tahun 2019 jumlah peserta KB aktif turun menjadi 58,86 persen dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 67,23 persen.

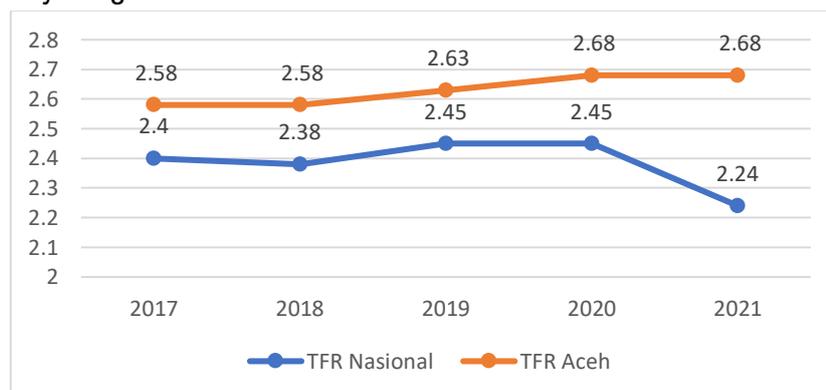
Tabel 2.72.
Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB	Persentase
2016	889,765	416,710	46.83
2017	939,962	443,442	47.18
2018	931,270	715,349	76.81
2019	687,298	404,527	58.86
2020	773,045	519,709	67.23

Sumber: Aceh Dalam Angka 2016-2020

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

Total *Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. Berdasarkan hasil Survei Kinerja Akuntabilitas (SAKAP) TFR Aceh dibandingkan dengan nasional dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 masih tertinggal. Tahun 2021 TFR Aceh 2,68 sedangkan nasional 2,24, angka ini menunjukkan bahwa belum terkendalinya tingkat kelahiran total di Aceh.



Sumber : SAKAP BKKBN, 2022

Gambar 2.43. Total Fertility Rate (TFR) Nasional dan Aceh Tahun 2017-2021

Perkembangan TFR Aceh tahun 2017 sampai tahun 2021 masih menunjukkan trend negatif yaitu dengan semakin meningkatnya angka kelahiran di Aceh selama periode tersebut. Tahun 2017 TRF Aceh 2,58 dan tahun 2021 meningkat sebesar 2,68. Tidak terkendalinya angka kelahiran total di Aceh disebabkan sebagian besar masyarakat masih berpola pikir jumlah anak ideal dalam keluarga adalah 3, disamping itu pengaruh ekonomi, usia kawin dan factor pendidikan juga berpengaruh pada tingginya TFR Aceh.

Kewenangan provinsi terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai saat ini belum ada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi pengampu. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Gubernur terkait struktur organisasi yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saat ini masih dalam proses pada Kementerian Dalam Negeri.

2.1.3.2.9. Perhubungan

A. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara belum menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk periode tahun 2014-2020 (Gambar 2.31). Jumlah arus penumpang pada tahun 2020 menurun sangat drastis, hal ini disebabkan karena pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia mulai dari bulan Maret 2020 dan berimbas pada penurunan warga yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.44. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2020

B. Rasio ijin trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum. Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2020 sebanyak 1 : 1407 izin/jumlah penduduk.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.45. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2020

C. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

- a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
- b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
- c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
- d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
- e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
- f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
- g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).



Gambar 2.46. Prasarana Transportasi Aceh

Sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 9 tipe B dan 23 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal. Di tahun 2021 terdapat penambahan status terminal tipe B Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan

terminal tipe C berkurang menjadi 21 terminal. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	4	4	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	9	9	9	10
Jumlah Terminal Tipe C	23	23	22	22	21

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

D. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkutan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021

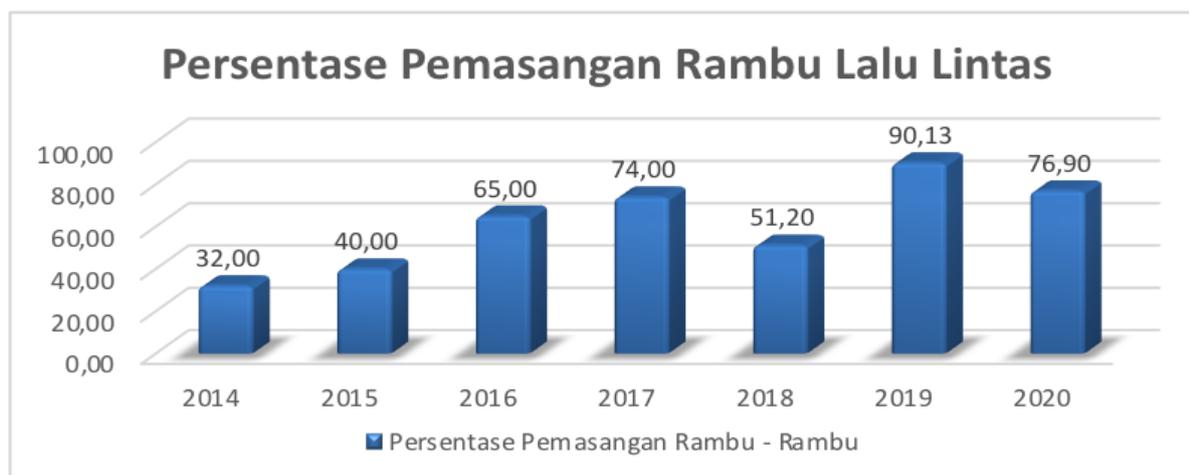
Uraian		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	76,30	73.89	58.3	47	10
	Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kepemilikan angkutan umum KIR	Aceh	n/a	13	10	27	64
	Nasional	13.19	16.7	10.27	27	27

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

E. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.47. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2020

F. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2014-2020 di sajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.

Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05
Total Jumlah Kendaraan (unit)	1.898.398	2.073.051	2.179.295	3.058.000	3.544.000
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	80,27	87,65	92,15	0,13	0,15
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	1,25	1,14	1,09	773,40	667,30

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

G. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2021 didominasi oleh angkutan laut yaitu 729.669 orang (48,62%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan darat yaitu 612.980 orang (40,85%) dan angkutan udara sebesar 157.957 orang (10,53%). Kondisi ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana Angkutan Darat mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya. Pada Tahun 2020 Angkutan Darat sebesar 44,60 persen diikuti angkutan laut yaitu 39,91 dan angkutan laut 15,45 persen. Hal ini menunjukkan angkutan darat menjadi moda utama, meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020 dibandingkan jumlah

orang pada tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2011-2021 disajikan pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkutan Darat	13.754.257	15.288.280	12.672.542	633.082	612.980
Angkutan Laut	702.801	889.329	1.099.089	566.099	729.669
Angkutan Udara	652.938	694.866	586.508	219.111	157.975
Jumlah	15.109.996	16.872.475	14.358.139	1.418.292	1.500.624

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

H. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 52,78 persen cenderung menurun dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2017 sebesar 66,30 persen atau menurun sebesar 13,52 persen. Dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas moda transportasi udara lebih sesuai untuk digunakan. Numun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Terminal	4.586.484	1.719.924	1.689.953	1.153.344	1.154.013
Bandara	1.242.102	1.310.898	1.290.213	427.028	302.616

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dermaga	1.088.949	1.016.418	1.103.034	566.099	729.669
Jumlah	6.917.535	4.047.240	4.083.200	2.146.471	2.186.298

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2021

2.1.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dimana sebelumnya sebanyak 0.45 persen, pada 2019 meningkat menjadi 0.48 persen dan ditargetkan untuk 2020 akan meningkat menjadi 0.51 persen.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

2.1.3.2.2.11. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial

ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

2.1.3.2.2.12. Statistik

1. Statistik Sektorial Daerah

Keberadaan Statistik Sektorial Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

2.1.3.2.2.13. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembang menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Belum berkembangnya koperasi sebagaimana diharapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, Koperasi dan UMKM merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2020 mencapai 6.602 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 3.777 unit atau sebesar 57,21 persen, sedangkan koperasi tidak aktif sebanyak 2.825 unit atau sebesar 42,79 persen. Selanjutnya persentase koperasi aktif dan tidak aktif di Aceh Tahun 2013-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.78.
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh
Tahun 2013-2020

No	Tahun	Total Koperasi (unit)	Koperasi Aktif (unit)	Persentase Koperasi Aktif (%)	Tidak Aktif (unit)	Persentase Koperasi Tidak Aktif (%)
1	2016	7.184	4.837	67,33	2.347	32,67
2	2017	6.317	4.293	67,96	2.023	32,04
3	2018	6.432	3.692	57,40	2.740	42,60
4	2019	6.408	3.545	55,32	2.863	44,68
5	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2021

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor

transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

Dari data tersebut menggambarkan bahwa jumlah Koperasi tidak aktif masih relatif banyak. Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi adalah disebabkan oleh:

- 1) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;
- 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

Perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan modal; dan
6. Kondisi Pandemi Covid-19.

2.1.3.2.2.14. Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga. Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing. Pada tahun 2017 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing sebanyak 31 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yaitu 70 investor dan kemudian menjadi 173 Investor pada tahun 2020. Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 346 investor menjadi 211 investor pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat yakni sebanyak 376 investor hingga 2241 investor pada tahun 2020.

Tabel 2.79.
Realisasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2017-2021

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)	Jumlah Perusahaan	Realisasi (Rp. Juta)
2017	31	149.089	336	1.680.961
2018	29	48.016	211	1.232.545
2019	70	1.196.941	376	4.615.150
2020	61	737.974	2.241	8.373.043
2021	51	1.399.697	1.003	7.059.417

Sumber : DPMPTSP 2022

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah investor berkaitan erat dengan besarnya nilai investasi yang terealisasi di Aceh. Dalam periode tahun 2016 - 2020 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh juga mengikuti tren fluktuatif bahkan cenderung menurun sampai pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan secara tajam yaitu dari 87.80 juta US\$ menjadi 3,58 US\$, namun pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 79.79 Juta US\$. Sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun yaitu menjadi 51,24 Juta US\$.

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami perkembangan yang kurang baik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun terjadi peningkatan secara signifikan mulai tahun 2019. Pada tahun 2016 – 2018 dengan besaran yaitu 3,79 triliun rupiah, 1,68 triliun rupiah dan hanya 1,23 triliun rupiah pada tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,61 triliun rupiah dan 8,73 triliun rupiah pada tahun 2020

Ada beberapa penyebab turunnya realisasi Inventasi di Aceh sejak tahun 2017-2018 diantaranya Pembangunan pabrik Semen Laweung masih sangat lambat atau tidak ada proses kemajuan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur/Kamirzu proses pembangunan kontruksinya belum berjalan sesuai perencanaan awal. beberapa pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo juga melambat. hal ini disebabkan pada saat tersebut (tahun 2017) belum terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. sehingga proses pembangunannya terkendala. Selain hal tersebut menurunnya realisasi Investasi di Aceh juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan Kawasan Industri Ladong Aceh Besar maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Namun mulai tahun 2019 terjadi kenaikan nilai realisasi investasi yang begitu signifikan karena iklim investasi dirasakan relatif membaik di Aceh. Terlaksananya realisasi investasi di Aceh juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan publik pada lintas sektor. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pemahaman secara

holistik kepada semua sektor. Pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

2.1.3.2.2.15. Kepemudaan dan Olahraga

A. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2019 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 70 (OKP) namun pada tahun 2020 bertambah 1 (OKP) menjadi 71 (OKP). Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan partner pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80.
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan
Tahun 2017-2021

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemuda	Orang	1.488.419	1.373.142	1.343.768	1.343.768	1.319.818
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	10	45	61	2	80
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	68	69	70	71	66

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Tahun 2022

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari kurangnya pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, social, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda Aceh tahun 2020 bertambah sebanyak 1.843.964 orang, hanya 2 (dua) orang jumlah pemuda yang berprestasi. Mungkin ini di pengaruhi dengan kondisi dunia karena kejadian covid-19 sehingga berpengaruh pada jumlah pemuda untuk prestasi.

B. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga
- (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga

Dengan demikian Pembudayaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, futsal, voley, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olah raga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan.

Tabel 2.81.
Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh
Tahun 2017-2021

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	16	16	20	24	29
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	434	443	454	456	309
3	Atlit Berprestasi	Orang	50	45	42	3	84

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Pelatih Berprestasi	Orang	8	10	13	13	55
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	79	82	84	84	56
6	Prestasi Olahraga	Cabor	8	10	15	1	30
7	Gedung Pemuda	Unit	2	2	1	0	1
8	Lapangan Olahraga	Unit	12	37	122	19	19

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2022

Dari Tabel 2.81 di atas diketahui bahwa ada peningkatan cabang olahraga binaan dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 13 cabor. Hal ini dikarenakan beberapa cabang olahraga yang memiliki potensi dibina pada beberapa kabupaten/kota dalam provinsi Aceh telah diminta untuk dilatih pada kabupaten/kota tersebut dengan dukungan penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru. Adapun 29 cabang olahraga binaan pada tahun 2021 diantaranya yaitu 1) Angkat Besi, 2) Soft Tenis, 3) Taekwondo, 4) Wushu, 5) Muaythai, 6) Panahan, 7) Petanque, 8) Karate, 9) Tenis Meja, 10) Anggar, 11) Atletik, 12) Dayung, 13) Renang, 14) Bulu Tangkis, 15) Catur, 16) Pencak Silat, 17) Tarung Derajat, 18) Bola kaki, 19) Sepak Takraw, dan 20) Bola Volly. Dari 29 cabor yang dibina 15 diantaranya merupakan cabang olahraga yang menyumbang medali bagi Aceh pada tahun 2019. Sementara jumlah atlit untuk olahraga binaan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: 1) atlit binaan pada PPLP/PPLPD/SMAKOR Aceh tahun 2021 berjumlah 147 atlit yang ditempatkan pada asrama PPLP/PPLPD, dan 2) atlit olahraga binaan yang dibina provinsi/kabupaten/kota sebanyak 251 atlit. Jumlah atlit berprestasi pada tahun 2021 meningkat sebanyak 84 orang, pelatih olahraga binaan sebanyak 56 orang. Dan pelatih yang mengukir prestasi hanya 55 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga prestasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2021 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

Melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII berdasarkan penyerahan petaka pada Tanggal 13 November 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, maka dengan terbitnya Keputusan tersebut Pemerintah Aceh sudah dapat melakukan persiapan-persiapan untuk berbenah dalam Perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Olahraga serta pembangunan Venue-Venue cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh. Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII tentu mempunyai banyak keuntungan. Selain sarana dan prasarana olahraga

yang dibangun dan diperbaiki, aspek ekonomi pun juga akan terdongkrak dengan kedatangan ribuan atlet dan official dari provinsi seluruh Indonesia tentu akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besarnya. Seperti hotel, penginapan, rumah makan, pariwisata, souvenir dan cenderamata akan menjadi efek positif yang dinikmati tuan rumah, siaran langsung televisi, tentu juga membawa manfaat promosi yang efektif bagi tuan rumah. Adapun calon Cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh sebanyak 33 cabang olahraga (Cabor) di antaranya : Terbang layang, Aero Modeling, Aero Spor, Triatlon, Kurash, Yongmodo, Terjun Payung, Sepak Bola Putri, Layar, Selam Laut, Sepak Bola Pol A dan B, Anggar, Angkat Besi, Angkat Berat, Bina Raga, Dayung, Bridge, Sepatu Roda, Soft Tennis, Golf, Panahan, Rugby, Menembak, Wood Ball, Panjat Tebing, Tennis, Arung Jeram, Hapkido, Tarung Derajat, Muaythai, Sepak Bola Polo, Bola Tangan, Bola Basket, Kempo, Base Ball/soft ball, Sepak Takraw, Berkuda. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di beberapa Kab/kota yaitu; Sabang,, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

2.1.3.2.2.16. Kebudayaan

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendapatan, kareakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
- b. keputusan bersama
- c. Berbagi sumberdaya
- d. Bekerja bersama disertai berbagai peran
- e. Partisipatif
- f. Murah dan mudah

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaraan festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam

kurun waktu 2013-2016 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival sebanyak 5 hingga 25 festival, dengan jumlah festival terbanyak dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 25 festival.

Pembangunan sektor Aceh ditujukan dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan. baik budaya benda (tangible) maupun bukan benda (intangible). Namun, keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya. Terkait hal ini, Pemerintah Aceh terus menggalakkan pembangunan kebudayaan Aceh yang diarahkan sebagai pembangunan karakter bangsa atau *character building* yang sesuai dengan identitas ke-Aceh-an diantaranya melalui penyelenggaraan festival seni, adat dan budaya serta pelestarian benda, situs, artefak dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 sebanyak 27 festival seni dan budaya yang dilaksanakan dan sebanyak 73 unit benda, situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Aceh

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya dapat berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, dll. Aceh terdapat sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Aceh yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2013 sampai tahun 2016 telah dilakukan pelestarian terhadap 35 situs cagar budaya, 210 buah naskah kuno, 410 buah koin emas dan 4 buah peralatan emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2016 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya sebanyak 806 buah.

2.1.3.2.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan terus meningkat, tahun 2017 jumlah pengunjung sebesar 385.269 orang, namun wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, sehingga angka kunjungan ke gedung perpustakaan menurun drastis menjadi 29.709 orang, dan pengunjung di perpustakaan keliling sebesar 4.222 orang pada tahun 2020, dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 246.800 eksamplar dan jumlah *E-Book* (Buku Digital) sebanyak 26.070 eksamplar.

Selain itu juga telah dilakukan supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal kepada 15 Kabupaten/kota.

Tabel 2.82.
Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	130 judul
2.	Cetak Buku Muatan Lokal	3 judul
3.	Jumlah Buku Perpustakaan Kab/kota	246.800 eksamplar
4.	Jumlah E-Book/Buku Digital	26.070 eksamplar
5.	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/ Alihmedia	13 naskah
6.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan	29.709 orang
7.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling	4.222 orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

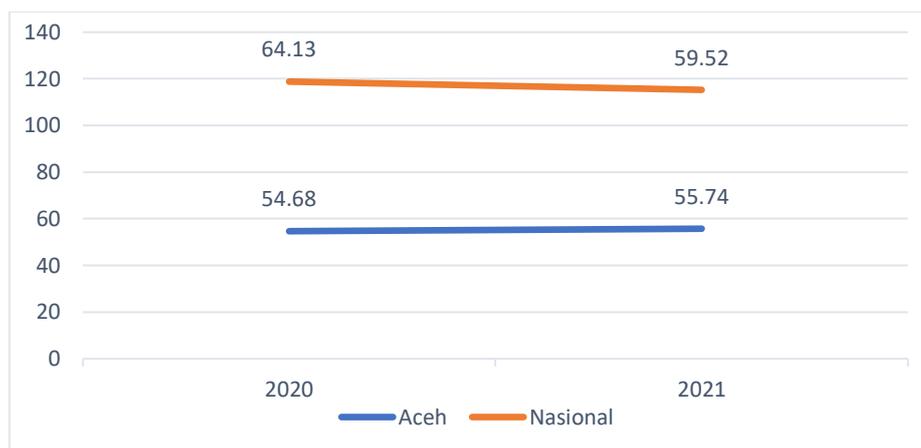
Dilihat dari kondisi data kunjungan dan data pendukung perpustakaan untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	73.313	51.664	45.337	36.559	29.709
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	246.913	247.082	270.092	278.828	278.902
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	55.905	57.006	60.618	63.702	63.772
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3	-	-	-	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

Dilihat dari tingkat kegemaran membaca, kebiasaan membaca masyarakat Aceh masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh jauh dibawah nasional, tahun 2020 tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh sebesar 54,68 sedangkan nasional sebesar 64,13. Tahun 2021 tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh naik sebesar 1,06 menjadi 55,74 sedangkan nasional mengalami penurunan sebesar 59,52. Pemerintah Aceh berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca.



Sumber: Perpusnas, 2021

Gambar 2.48. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2021

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 10,12 menjadi 13,54 pada tahun 2021. Pada tahun 2018, Aceh berada pada di atas nasional yaitu 12,11, namun sangat senjang jika dibandingkan dengan capaian tertinggi IPLM oleh provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,70.

2.1.3.2.2.18. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

Selama periode tahun 2013-2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku cenderung meningkat dari tahun 2013 (11,11 persen) menjadi 21,82 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku sudah mengacu kepada standar pelayanan minimum.

Dalam bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas. naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan

Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Tahun 2014 Data Arsiparis di Aceh sebanyak 77 Orang yang terdiri dari 44 laki-laki dan 33 perempuan, sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak data Arsiparis kita sebanyak 57 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 28 perempuan.

Tabel 2.84.
Data Arsip Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	55%	60%	65%	70%
2	Jumlah Arsiparis	66	45	55	57	70
3	Jumlah Arsiparis yang memiliki Sertifikat Sertifikasi	2	4	7	8	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebanyak 3.075 berkas. Sedangkan untuk kunjungan layanan arsip telah dikunjungi oleh 130 orang, dan kunjungan layanan arsip digital sebanyak 1.200 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85.
Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Arsip yang terinput ke dalam Aplikasi SIKN-JIKN	3.075 Berkas
2.	Jumlah kunjungan layanan Arsip	130 orang
3.	Jumlah kunjungan Arsip Digital	1.200 orang
4.	Jumlah Arsip yang diolah/ditata	14 DPA
5.	Pendataan dan Penataan Arsip di Kab/kota	7 Kab/kota
6.	Restorasi Arsip	490 lembar
7.	Jumlah Reproduksi/Alihmedia Arsip	10.410 lembar
8.	Pendampingan Arsip SKPA di Pemerintah Aceh	46 SKPA, 6 Biro
9.	Supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal Kab/kota	15 Kab/kota
10.	Penyusutan Arsip	1.944 berkas

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

2.1.3.2.2.19. Gedung dan bangunan terbengkalai

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 masih menyisakan pembangunan beberapa gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai. Lokasi bangunan tersebar di 19 kabupaten/kota dengan jenis bangunan publik yang

beragam, mulai dari gedung/bangunan untuk kebutuhan pendidikan, budaya, sumberdaya air, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan jembatan. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan pembangunan gedung/bangunan yang terbengkalai sehingga fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2.86.
Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG	LOKASI KAB/KOTA	TAHUN PELAKSANAAN	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN	SKPA PELAKSANA
				47	562.129.384.462	
1	Pemb.Stadion Olah Raga Sabang	Kota Sabang	2018	1	40.000.000.000	Dispora
2	Gedung RS Gigi Kedokteran USK; Gedung MM Fak. Ekonomi USK; Lab.Terpadu Tarbiyah UNMUHA; Ruang Dikti Keterampilan Hafiz Qur'an Deah Baro; Asrama Mahasiswa P. Aceh Kec. Meuraxa; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Gedung oncologycentre	Banda Aceh	2013 - 2021	8	253.559.095.000	Perkim, Dinkes
3	Sarpras Masjid Al-Ikhlash Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie; Jembatan Panca	Aceh Besar	2016 - 2018	2	44.400.000.000	Perkim, PUPR
4	Ruang Kuliah Yayasan P.T Islam Al Hilal Kab. Pidie	Pidie	2014	1	2.000.000.000	Disdik
5	RKB SMKN 1 Ulim; Padang HMT; Lanjutan 4 RKB Lt. 2 SMAN 1 Bandar Dua	Pidie Jaya	2015 - 2016	4	2.200.000.000	Disdik, Disnak
6	D.I. Aneuk Gajah Rheut; D.I. Mon Seukee Pulot	Bireun	2018 - 2020	2	45.000.000.000	Pengairan
7	Jmmt Rangka Baja Krueng Kreh - Pirak Timur; Jmmt Langkahan; Jmmt Rayeek Pangee.	Aceh Utara	2015 - 2017	3	13.700.000.000	PUPR
8	Lab Kimia SMAN 4 Lhoks; Balai Promosi Perdagangan dan Industri Aceh; Gedung Kampus STIE dan STIA; Pabrik Garam Beryodium; Kontruksi Fisik Lanjutan; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Pasar Induk Kota Lhoks.	Lhokseumawe	2008 - 2018	7	33.916.289.462	Disdik, Perkim, Budpar, Indag
9	Lanjutan Lab. Kimia SMAN 1 Ranto Peureulak; Lanjutan RKB SMAN 1 Peureulak; Asrama IKAWI Limpuk Abes	Aceh Timur	2008 - 2014	3	3.904.000.000	Disdik, Perkim
10	Pembangunan RSU Regional Langsa	Langsa	2016	1	35.000.000.000	Dinkes
11	Stadion Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2009	1	40.000.000.000	Dispora
12	Sarana Kolam Renang; Lapangan H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka; Pemb. Komplek Reje Linge	Aceh Tengah	2008 - 2015	3	5.000.000.000	Disdik, Perkim, Dispora
13	Pemb. Lab Kimia SMAN 1 Putri Betung	Gayo Lues	2008	1	100.000.000	Disdik
14	RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane	Aceh Tenggara	2015	1	2.000.000.000	Perkim
15	Sarpras Mesjid Alue Peuyareng	Aceh Barat	2016 - 2018	1	15.000.000.000	Perkim
16	Pembangunan Lanjutan Kantor dan Ruang Pertemuan SMAN 4	Aceh Barat Daya	2007 - 2009	2	750.000.000	Disdik
17	STAI ARRAHMAN; Komplek Pendidikan Pasya Blangkejeren; Sarana Air Bersih SMKN Trumon Timur; Pembangunan Mushalla SMKN 1 Trumon Timur	Aceh Selatan	2014 - 2017	3	2.100.000.000	Dayah, Disdik
18	Kolam Renang Kota dan Kantor MPU	Subulussalam	2013 - 2020	2	8.500.000.000	Dispora, Perkim
19	Jembatan Kilangan	Singkil	2020	1	15.000.000.000	PUPR

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan bangunan dan gedung pada pemerintah kabupaten/kota dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 juga menyisakan kewajiban penuntasan pembangunan gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai yang tersebar di 17 kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANGUNAN GEDUNG	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN
			39	563.620.000.000
1	Aceh Besar	Jembatan Lampanah Tunong; Jembatan Lam Sie	2	40.000.000.000
2	Pidie	Mesjid Raya Keumala Kec.Keumala; Gedung PDAM Tirta Dharma; Sarana Air Bersih Desa Lhok Panah; Mesjid Agung Al-Falah	4	175.700.000.000
3	Pidie Jaya	Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai	1	1.500.000.000
4	Bireun	Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim; Pustu Lamkuta Kec. Jangka	2	370.000.000
5	Lhokseumawe	Jalan menuju Terminal Type A Kota Lhokseumawe	1	4.500.000.000
6	Aceh Timur	Revitalisasi Pasar Tradisional; Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Peunaron	2	7.800.000.000
7	Tamiang	Jalan Elak Tamiang Bypass; Jembatan Jalan Elak Bypass; Jembatan Pantai Keutapang; Pentas Seni Tamiang	4	141.000.000.000
8	Bener Meriah	Lanjutan Stadion Sepak Bola Mini; Jembatan Gp. Pilar Jaya, Kec. Bandar	2	2.000.000.000
9	Gayo Lues	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Akul; Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Uning Pune	2	3.700.000.000
10	Aceh Tenggara	Ruang Ibadah SDN Lawe Sekerah; RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane; Jalan Lingkungan Pasar Salim Pining, Simpang Semadan dan Titi Pasar; Kantor SDN Rambung Teledak; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Bale Lutu ; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Uning Sigugur; Mesjid Kec. Lawe Alas	6	54.150.000.000
11	Aceh Jaya	Lapangan Volly Gampong Dayah Baru	1	400.000.000
12	Aceh Barat	Stadion Alue Peunyareng Rehab Stadion	1	10.000.000.000
13	Nagan Raya	Pembangunan Gor Kec. Kuala Pesisir	1	1.700.000.000
14	Aceh Barat Daya	Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya	1	70.000.000.000
15	Aceh Selatan	Tapaktuan Sport Center (TSC); Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II	2	27.100.000.000
16	Subulussalam	Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Subulussalam	1	1.500.000.000
17	Simeulue	Gedung Stadion Kabupaten Simeulue; Pengembangan wisata Pantai Ganting; Landscape Taman PAUD Mulia Dharma; Sarana dan Prasarana MIN Sinabang; Sarana Komplek BLK; Gedung Pelatihan Maritim	6	22.200.000.000

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.3.1. Pariwisata

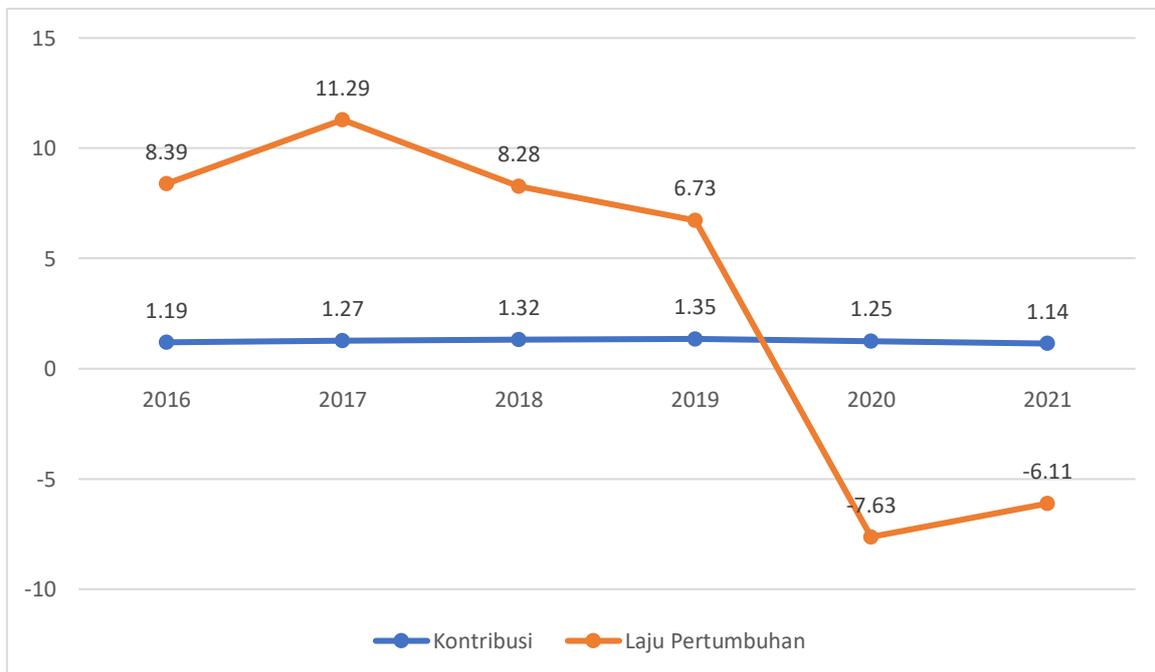
Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor ini jugadapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus.

tapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Dalam kurun waktu 2016-2020 kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 1,19 persen meningkat menjadi 1,35 persen pada tahun 2019 dengan tren pertumbuhan yang cukup baik yaitu 8,39 persen pada tahun 2016 dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan sebesar 6,73 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan sebesar -7,63 persen dan -6,11 persen pada tahun 2021 akibat dari pandemi covid-19, dengan kontribusi sebesar 1,25 persen pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 1,14 persen.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada bulan November 2019 sebanyak 4.166 orang atau mengalami peningkatan sebesar 62,54 persen dibandingkan dengan bulan Oktober 2019, juga mengalami peningkatan sebesar 145,06 persen dibandingkan bulan November 2018.

Adapun secara keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 54.488 orang, minat terhadap Aceh terus meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 107.037 orang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Gambar 2.49. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen). Tahun 2016 – 2021

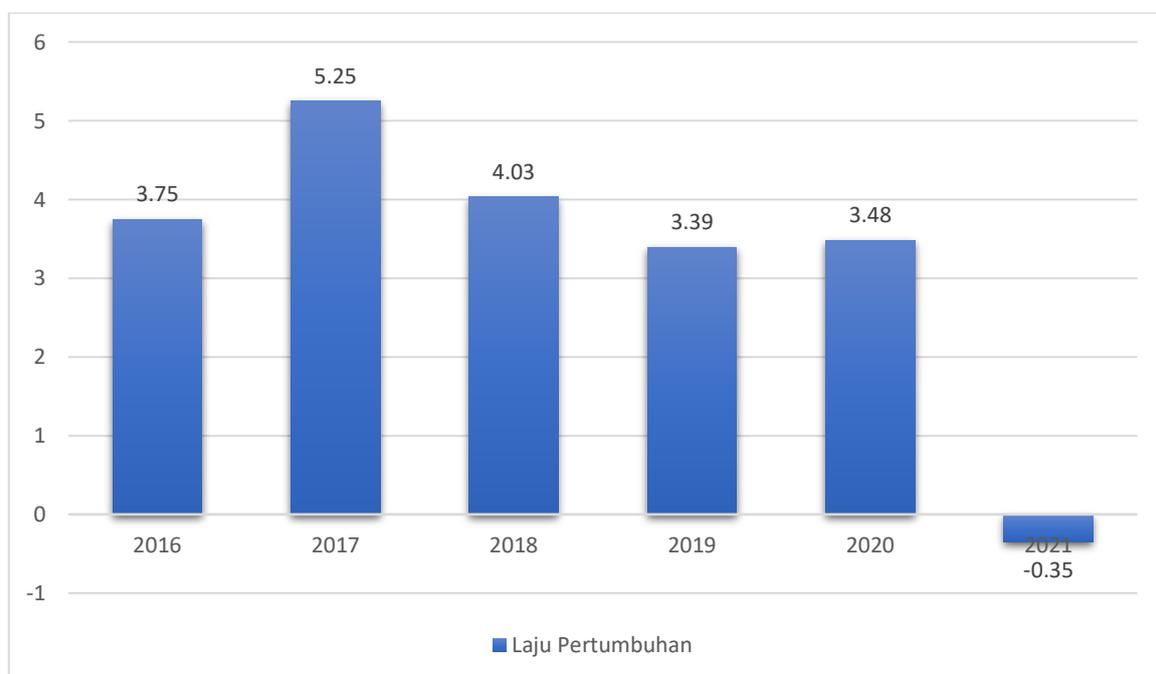
Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar 53,18 persen, sedangkan pada akomodasi lainnya paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar 31,75 persen. Rata - rata lama menginap tamu asing di hotel pada

tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,92 hari, sedangkan pada tamu domestik paling tinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 1,80 hari.

Selain infrastruktur, permasalahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala utama dalam peningkatan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga langkah pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) akan memberikan andil yang besar terhadap pengembangan SDM kepariwisataan di Aceh. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand “The Light of Aceh” atau disebut juga “Cahaya Aceh” belum mampu dioptimalkan.

2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sector Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,92 persen.

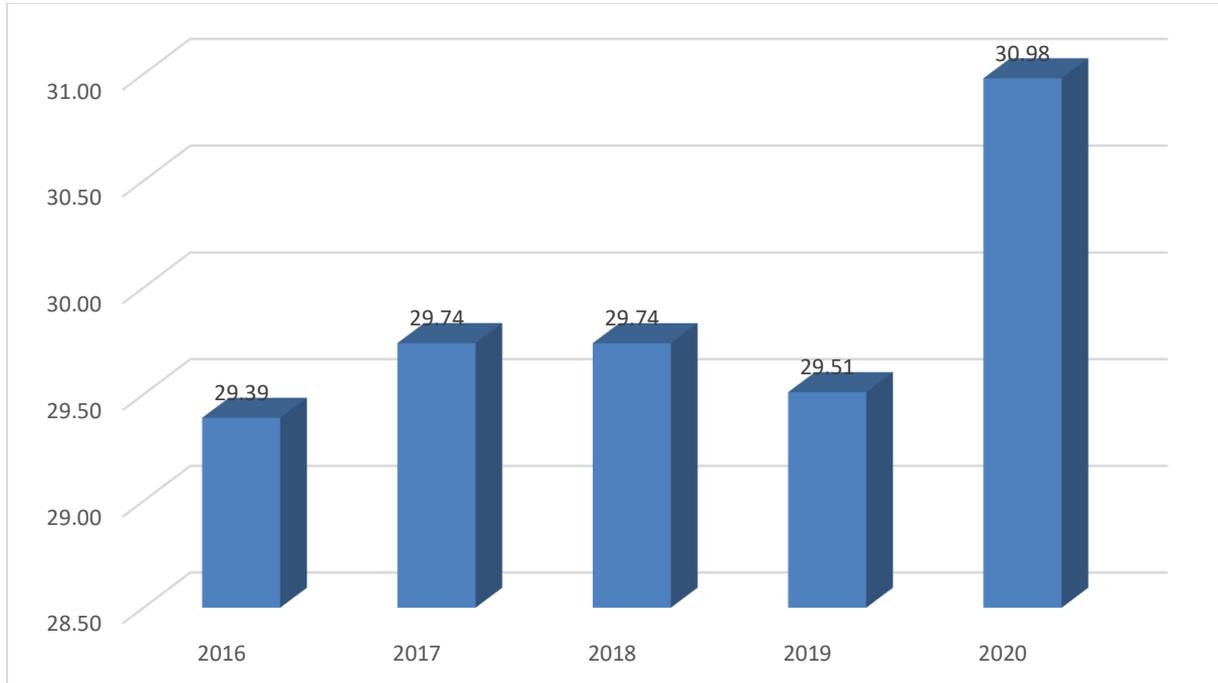


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.50. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2021

Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti, melainkan pertumbuhan

ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya rata-rata pertahun naik 1 persen, namun pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,35 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.51. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2022

Dampak kebijakan penyesuaian luas baku sawah pada tahun 2019, akan mempengaruhi kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Aceh kedepan. Luas baku sawah di Aceh tahun 2019 bertambah sebesar 358.051 Ha. Luas lahan baku sawah akan berdampak langsung pada alokasi pupuk subsidi dan input pertanian lainnya. Dibandingkan tahun 2018 luas baku sawah Aceh sebesar 213.997 Ha hal ini terjadi karena lahan sawah yang belum terpetakan/terdeliniasi lebih besar daripada lahan sawah yang mengalami alih fungsi. Luas lahan baku sawah Aceh tahun 2019 berkurang seluas 287.051 Ha dibandingkan tahun 2013 karena alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya.

Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah. Tahun 2017 produksi gabah Aceh sudah mencapai 2,54 juta ton, tahun 2018 mencapai 2,56 juta ton sedangkan Tahun 2019 hanya mencapai 1,86 juta ton dan pada tahun 2020 mencapai 1,75 juta ton.



Gambar 2.52. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh

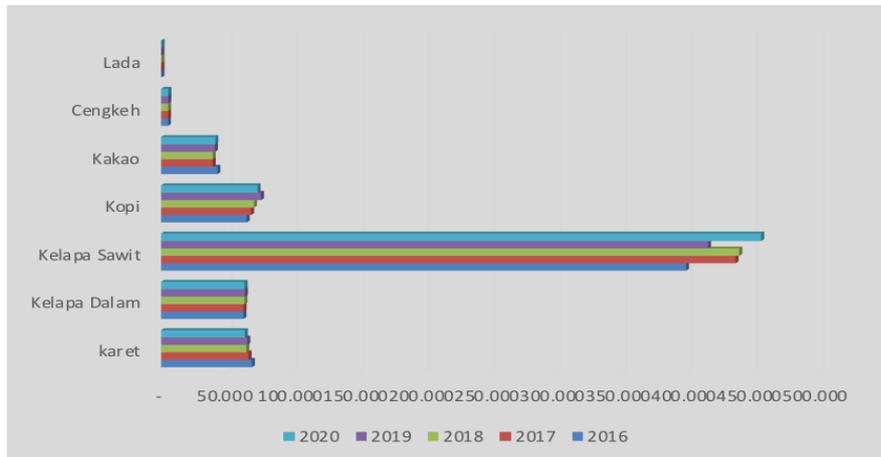
Sub sektor perkebunan dengan komoditi andalannya masih pada (5K) Kelapa, kakao, kopi, kelapa sawit, karet dan Nilam) yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh. Kopi masih merupakan andalan ekspor dimana pada triwulan 2019 mencapai USD 91,26 juta atau meningkat 70,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 53,64 juta. Peningkatan ini disebabkan karena melimpahnya pasokan biji kopi sebagai dampak kondisi cuaca dan alam yang mendukung produksi kopi. Ekpor perdana CPO di Kabupen Aceh Jaya sebesar 4.9000 MT dan Lhokseumawe sebanyak 5.422 T juga mempengaruhi nilai ekspor aceh untuk negara India.

2.1.3.3.3. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6.63 sampai 10.17 persen dalam periode 2013-2019. Persentase kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, Karet, Kopi, kakao dan kelapa dalam.

Perkembangan jumlah produksi kelapa sawit Aceh terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 produksi kelapa sawit sebesar 399.618 ton dan pada tahun 2020 sebesar 456.760 ton. Komoditi kelapa sawit masih merupakan andalan sektor perkebunan, yang didukung melalui program replanting melalui dana APBN sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit pada tahun mendatang. Komoditas kopi memiliki jumlah produksi menunjukkan tren yang kurang baik pada tahun 2020 sebesar 73.411 ton, produksi meningkat pada tahun 2016 sebesar 65.231 ton sampai tahun 2019 produksi sebesar 76.027 ton. Jenis Produksi utama adalah kopi Arabica. Untuk Kakao, karet dan kelapa dalam belum memperlihatkan produksi yang menggembirakan, dimana rata-rata produksi untuk enam (2016-2020) tahun terakhir komoditi kakao adalah 40.752 ton, karet 66.034

ton dan kelapa dalam 63.306 ton, cengkeh 5.378 ton dan lada hanya 326 ton. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.49.

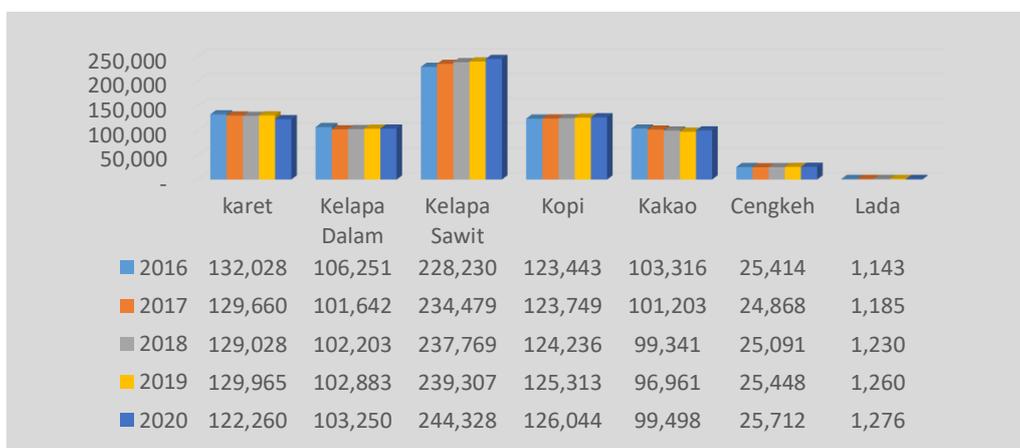


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.53. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020

Dalam pembangunan sektor perkebunan, permasalahan yang sering dihadapi masih berkisar pada kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan dan juga fluktuasi harga komoditas perkebunan yang juga masih menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan penguatan kelompok tani melalui korporasi yang kuat, ekstensifikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020) kondisi luasan tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana perkembangan luas areal perkebunan rakyat dari tahun 2016–2020 komoditi unggulan rata-rata hampir tidak ada perkembangan luas areal yang signifikan.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2020

Gambar 2.54. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha)

Perkembangan perkebunan Aceh tahun 2020 dapat digambarkan bahwa komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao masih tinggi luasannya karena masih dibudidayakan petani. Luas perkebunan rakyat di Aceh 2020 yang terbesar adalah kelapa sawit sebesar 244.328 ha terus meningkat 6,59 persen dari tahun 2016 sebesar 228.230 ha. Tanaman karet seluas 122.260 ha pada tahun 2020 turun -7,99 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 132.028 ha. Komoditi kopi berada pada urutan 3 sebesar 126,044 ha, kemudian kelapa dalam dan kakao.

Tabel 2.88.
Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)

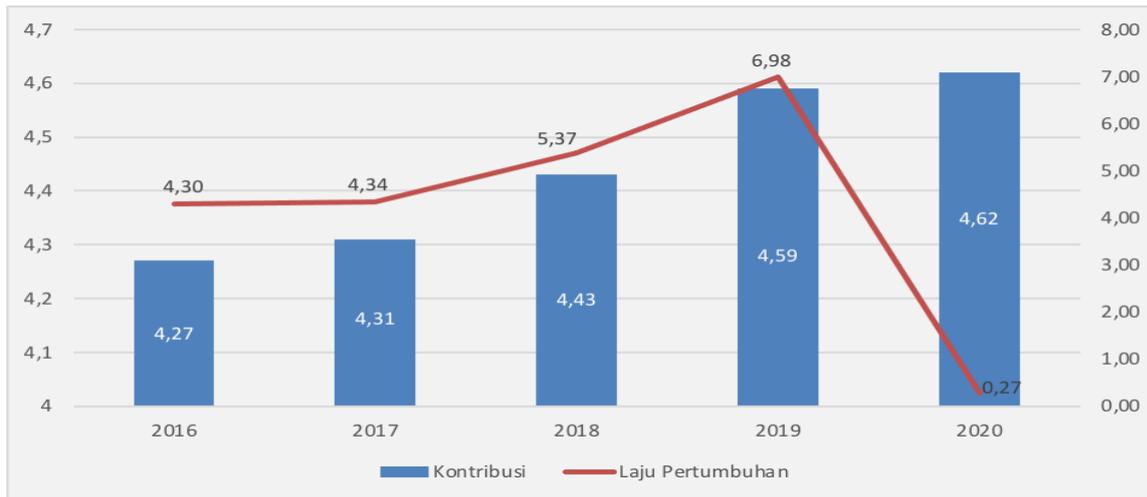
Komoditi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
karet	69.169	66.671	64.926	65.629	63.774
Kelapa Dalam	62.752	62.832	63.500	63.868	63.579
Kelapa Sawit	399.618	437.292	440.087	416.387	456.760
Kopi	65.231	68.493	70.774	76.027	73.411
Kakao	42.889	39.295	39.295	41.028	41.252
Cengkeh	5.221	5.268	5.316	5.490	5.594
Lada	322	324	352	265	368

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2021

Perkembangan harga komoditas global masih tertekan seiring dengan belum membaiknya perkembangan perekonomian global, Namun demikian beberapa komoditas seperti kakao dan kelapa terlihat mengalami perbaikan. Sedangkan komoditas karet harganya belum banyak mengalami perubahan masih berada di level bawah.

2.1.3.3.4. Peternakan

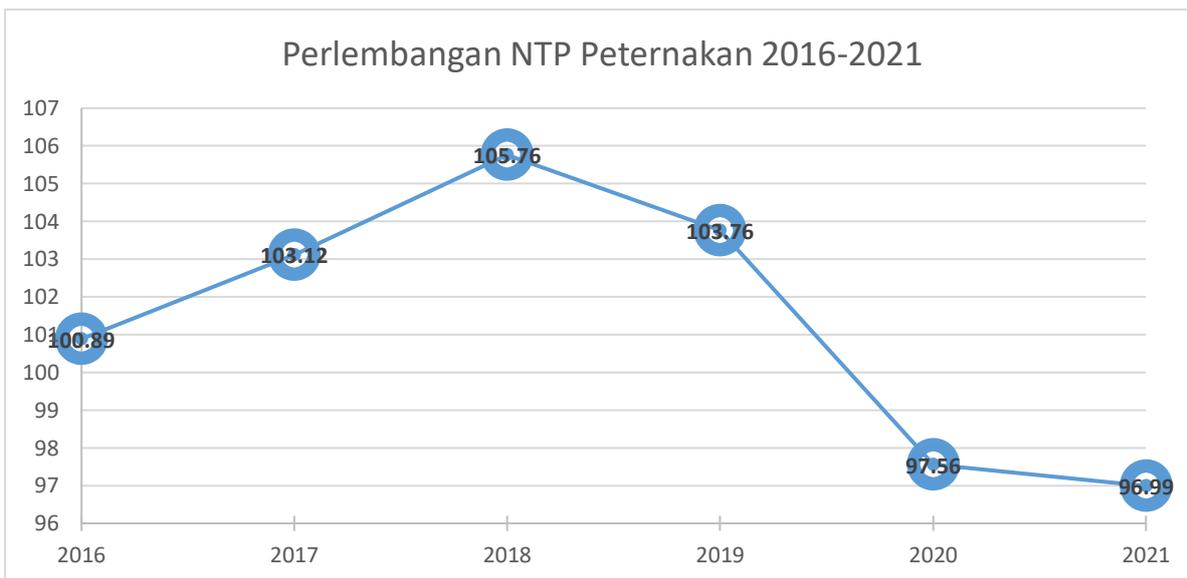
Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 3.92 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Pada tahun 2020 dan 2021 kontribusinya menurun karena dipengaruhi oleh covid-19 di awal tahun 2020. Penurunan ini juga diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2022

Gambar 2.55. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2021

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.56. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021

Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu berada di atas 100, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,56 pada tahun 2020, dan menjadi 96,99 pada tahun 2021. Penurunan Rata-rata NTP tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata

harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Hal ini berarti bahwa produksi hasil peternakan yang dihasilkan telah mampu mengimbangi pengeluaran para peternak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan harga-harga produk peternakan. Secara rinci indeks harga yang diterima petani dan indeks yang dibayarkan petani dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89.
Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021

Tahun	Indeks Harga yang diterima Petani (IT)	Indeks Harga yang dibayar Petani (IB)	NTP Peternak
2016	120.26	119.2	100.89
2017	125.96	122.19	103.12
2018	133.55	126.27	105.76
2019	135.01	130.11	103.76
2020	102.66	105.22	97.56
2021	104.67	107.92	96.99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022 (diolah)

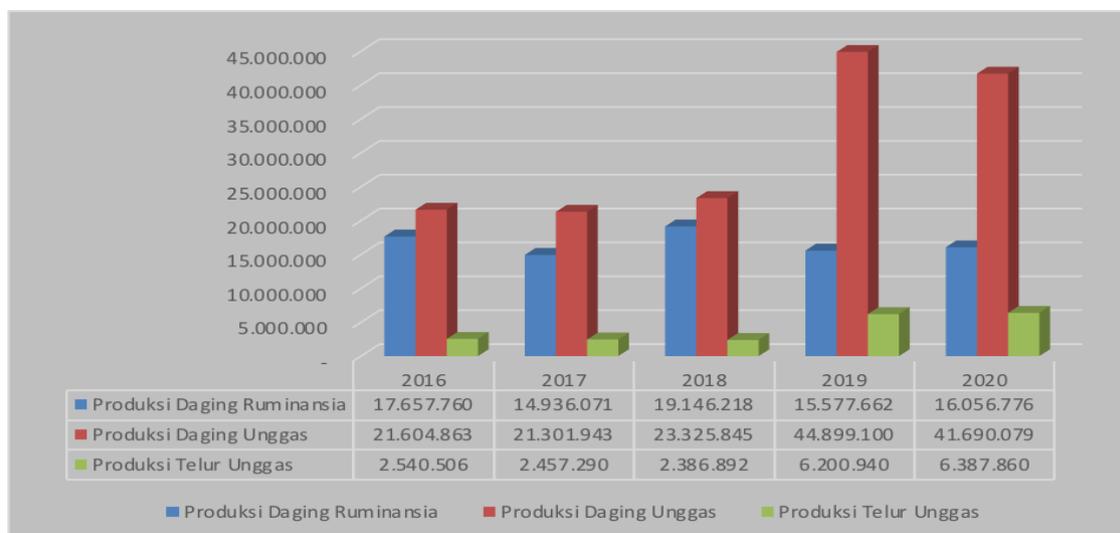
Pada tahun 2019, rata-rata It adalah 135,01. Pergerakan It petani subsektor peternakan pada tahun 2019 cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2019, pola It meningkat hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga akhir tahun. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2019 juga berada pada triwulan dua dan tiga. It petani subsektor peternakan tahun 2019 mengalami penurunan terbesar pada bulan Desember sebesar 0,81 persen dengan rendahnya harga jual ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) Sedangkan kenaikan It dengan angka tertinggi terjadi pada Mei 2019 sebesar 2.10 persen dengan tingginya harga jual komoditas daging menyambut tradisi Meugang dan Idul Fitri.

Pada tahun 2018, rata-rata Ib adalah 126.27. Pola Ib pada tahun 2018 ini terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, rata-rata IB adalah 130.11. Selama tahun 2019, pola Ib cenderung meningkat hingga Agustus menurun hingga akhir tahun, Pola perubahan Ib mengikuti Indeks Kelompok Konsumsi Rumahtangga (KRT). Selama tahun 2019, Ib meningkat paling tinggi pada Mei yang disebabkan meningkatnya indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan penurunan dengan angka tertinggi terjadi pada September 2019 dengan rendahnya indeks KRT. KRT mengalami deflasi dengan menurunnya harga pada kelompok bahan makanan seperti komoditas ikan, cabe merah dan bawang.

Pada Desember 2020, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPt) sebesar 96.75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani Ib naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Perkembangan produksi daging ternak ruminansia dan daging unggas selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 produksi daging ternak ruminansia sebesar 16.056.776 kg, tertinggi terdapat pada kelompok ternak sapi sebesar 10.740.148 kg, kerbau sebesar 2.593.879 kg, dan kambing sebesar 2.275.780 kg. Namun untuk produksi daging unggas sebesar 41.690.079 kg di tahun 2020, tertinggi pada ternak ayam pedaging sebesar 34.437.000 kg, ayam kampung sebesar 5.548.861 kg dan itik sebesar 1.696.849 kg. Tingginya peningkatan produksi dan konsumsi daging unggas dikarenakan banyaknya tempat makan siap saji. Meskipun produksi daging pada kedua kelompok ternak cukup tinggi namun secara jumlah populasi masih sangat rendah karena sebagiannya peternakan rakyat dengan jumlah populasi terbatas.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (diolah)

Gambar 2.57. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.90.
Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Sapi Perah <i>Dairy Cattle</i>		Sapi Potong <i>Beef Cattle</i>		Kerbau <i>Buffalo</i>	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Simeulue	-	-	719	741	9 923	10 221
Aceh Sinakil	-	-	3 540	3 646	182	187
Aceh Selatan	-	-	1 696	1 747	3 567	3 674
Aceh Tenggara	-	-	4 825	4 970	156	161
Aceh Timur	-	-	38 663	39 823	5 458	5 622
Aceh Tenoah	13	14	4 451	4 585	4 959	5 108
Aceh Barat	-	-	7 467	7 691	24 244	24 971
Aceh Besar	-	-	77 192	79 508	10 727	11 049
Pidie	-	-	44 344	45 674	3 468	3 572
Bireuen	-	-	44 895	46 242	945	973
Aceh Utara	-	-	53 072	54 664	1 143	1 177
Aceh Barat Daya	-	-	2 830	2 915	3 850	3 966
Gavo Lues	4	4	4 430	4 563	2 734	2 816
Aceh Tamiana	-	-	42 930	44 218	129	133
Nagan Raya	-	-	10 830	11 155	4 246	4 373
Aceh Java	-	-	19 229	19 806	5 591	5 759
Bener Meriah	2	2	779	802	2 293	2 362
Pidie Jaya	-	-	21 613	22 261	2 708	2 789
Banda Aceh	-	-	1 714	1 765	32	33
Sabana	-	-	2 092	2 155	32	33
Lanasa	-	-	5 952	6 131	150	155
Lhokseumawe	-	-	7 192	7 408	36	37
Subulussalam	-	-	2 576	2 653	144	148
Aceh	19	20	403 031	415 123	86 717	89 319

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2021

Tabel 2.89. menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau terus meningkat bila dibandingkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Adapun populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 75.908 ekor sapi potong dan 11.049 ekor kerbau pada tahun 2020. Secara keseluruhan Pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dalam menunjukkan bahwa populasi sapi perah 20 ekor, sapi perah 415.123 ekor dan Kerbau sebanyak 89.319 ekor.

Capaian keberhasilan dari sub sektor peternakan bukan hanya terletak pada kemampuan memproduksi daging semata, namun juga ditentukan dari capaian produksi telur dan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya, produksi telur dan susu yang dihasilkan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan,

dimana pada tahun 2019 produksi susu sebanyak 5.250 liter dan meningkat menjadi 6.300 liter pada tahun 2020. Sedangkan produksi telur pada tahun 2019 adalah sejumlah 22.863.738 kg dan meningkat menjadi 23.834.852 kg pada tahun 2020. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan produksi susu dipengaruhi oleh belum berkembangnya pengelolaan susu di sektor hilir melalui ketersediaan industri susu. sehingga menyebabkan ketersediaan susu sapi perah Aceh menjadi belum cukup stabil. Sedangkan telur juga belum menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik. sehingga untuk memenuhi kebutuhan telur harus dipasok dari Sumatera Utara.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

2.1.3.3.5. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.058.364,40	29.81
Hutan Lindung	1.781.677,92	50.18
Hutan Produksi Tetap (HP)	549.794,88	15.49
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.178,34	4.09
Hutan Produksi Konversi	15.374,88	0.43
Jumlah	3.550.390,23	100,00

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Tabel 2.90. memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

A. Deforestasi

Deforestasi di Aceh tahun 2015 sampai 2020 menurun. Deforestasi tertinggi pada tahun 2015 mencapai 23.072 ha atau 0,648 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase deforestasi di Aceh disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2020

Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Persentase
2015 - 2016	23.072	3.557.928,00	0,648
2016 - 2017	15.515	3.557.928,00	0,435
2017 - 2018	7.502	3.563.813,00	0,211
2018 - 2019	11.608	3,550,390.23	0,327
2019 - 2020	1.956	3,550,390.23	0,055

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021

Penyebab deforestasi antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan *Illegal Logging*. Deforestasi dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju deforestasi Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan *Illegal logging* dan tertanganinya kasus *illegal logging*, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Deforestasi juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017

BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

Selain itu, masih tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat di Aceh, dengan jumlah kasus sebanyak 582 kasus dalam kurun waktu 2015-2021. Dari 582 kasus tersebut, sebanyak 46 ekor gajah mati. Tingginya konflik disebabkan maraknya kasus perambahan hutan, alih fungsi hutan dan praktik penebangan liar. Penyebab kematian gajah didominasi konflik gajah dengan masyarakat yakni 57%, sementara 10% akibat perburuan dan 33% mati secara alami.

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24.10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2020

Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2016	23.876	99.052.00	24.10
2017	23.876	99.052.00	24.10
2018	3,144	95,884.00	12.87
2019	12,520	94,949.00	15.89
2020	4,009	82,429.00	4,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2020

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan. sub sektor tanaman perkebunan. sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan. PDRB Aceh beberapa tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pertanian dan mempunyai

trend peningkatan yang menggembirakan. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan ADHB tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2015-2019
(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	1.923.080.000	1.535.841.275	16.481.769.326	18.716.089.216	4.631.207.936
PDRB Dengan Migas	136843.82	145806.92	155911.12	164210.64	164210.64
PDRB Tanpa Migas	132614	141076.46	150350.45	158555.41	158555.41
Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas	1.41	1.36	1.33	1.23	1.13
Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.45	1.41	1.38	1.27	1.27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Tabel 2.93. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai Rp. 18.716.089.216 menjadi Rp. 4.631.207.936 pada tahun 2020. selanjutnya Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2020 dengan migas sebesar 1.13 persen.

D. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut ini.

Tabel 2.95.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2016-2020

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2016	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2017	1.794.350.00	3.563.813.00	0.5
2018	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2019	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2020	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2021

E. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

F. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 55 izin dengan luasan 116.248,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 25 izin dengan luas 61.519 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 18 izin dengan luas 47.645 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.084,94 Ha. Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh.

2.1.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated*. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta Meulaboh dan sekitarnya sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 sebesar 525 MW terjadi di bulan Maret. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.58, di bawah ini :



Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Gambar 2.58. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Pada tahun 2020 jumlah Pelanggaran Listrik sebanyak 1.556.984 pelanggan meningkat sebanyak 63.616 dibanding tahun 2019 atau terjadi peningkatan sebesar 4,3% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 1.807 MVA, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.692 MVA yang berarti terjadi peningkatan sebesar 6,8% (persen). Jumlah daya mampu pembangkit tahun 2020 sebesar 641,7 MW, bertambah 55 MW dari sebanyak 586,7 MW unit pada tahun 2019.

Jumlah kWh yang dibangkitkan pada tahun 2020 sebesar 3.351 TWh, sedangkan pada tahun 2019, jumlah kWh 3.161 TWh, atau meningkat sebesar 190 TWh (6%) TWh. Untuk jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100% (persen) sejak tahun 2019.

Jumlah kWh terjual juga mengalami kenaikan sebesar 195 TWh (7%) persen yaitu dari 2.781 TWh tahun 2019 naik menjadi 2.976 TWh pada tahun 2020. Begitupun Volt Ampere tersambung yang naik sebesar 6,8% (persen), yaitu pada tahun 2019 adalah 1.692 MVA, pada tahun 2020 menjadi 1.807 MVA. Untuk melihat jumlah pelanggan dan persentase listrik pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.95, seperti di bawah ini :

Tabel 2.96.
Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020

No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase (%)
1.	Rumah Tangga	1.354.112	87,0
2.	Sosial	48.577	3,1
3.	Bisnis	135.764	8,7
4.	Industri	3.582	0,2
5.	Pemerintah	14.645	0,9
Total		1.556.680	100

Sumber : ESDM

Kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.97 dan 2.98.

Tabel 2.97.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumbagut	2,0	220,0	180,0	180,0
PLTMG	Sumbagut	19,0	184,9	179,9	179,9
PLTMH	Sumbagut	4,0	2,4	2,0	2,0
PLTD	Sumbagut	199,0	187,7	121,1	121,1
	Sinabang	18,0	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15,0	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		257,0	621,7	500,8	500,8
IPP					
PLTMG	Sumbagut	1,0	24,0	24,0	24,0
PLTMH	Sumbagut	6,0	1,5	1,5	1,5
Jumlah IPP		7,0	25,5	25,5	25,5
SEWA					
PLTD	Sumbagut	6,0	33,0	33,0	33,0
Jumlah SEWA		6,0	33,0	33,0	33,0
Jumlah		270,0	680,0	559,3	559,3

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Tabel 2.98.
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua / Langsa	150/20	2	60
2	Tualang Cut	150/20	3	60
3	Alue Batee / Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	1	30
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	30
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
TOTAL			24	950

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 1.655 MW yang tersebar di 18 lokasi di wilayah Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 1.307 MW yang tersebar di 19 lokasi. Adapun potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 151 MMSTB dan 6.93 TSCF. Sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh sebesar 452 juta ton kubik.

Terdapat juga potensi pembangkit listrik tenaga Gas Weehead dengan kapasitas sekitar 140 MW. Potensi ini dapat dikembangkan apabila telah diselesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan sistem yang telah diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Rencana Pembangunan Pembangkit

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembangan
1	Sumatera	PLTGU	MPP Banda Aceh	55	2021	Pengadaan	PLN
2	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	45	2021	Konstruksi	PLN
3	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2021	Konstruksi	IPP
4	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) Tersebar	3	2021	Perencanaan	IPP
5	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	3,7	2021	Perencanaan	IPP
6	Sumatera	PLTG	MPP Banda Aceh 2	110	2022	Pengadaan	PLN
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2022	Konstruksi	IPP
8	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	48,0	2022	Perencanaan	IPP
9	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	50,0	2022	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (Kuoata)**	200	2022	Perencanaan	IPP
11	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	Konstruksi	IPP
12	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2024	Committed	PLN
13	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) tersebar	2	2024	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,6	2024	Perencanaan	IPP
15	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota) Tersebar	195,0	2024	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	87,6	2024	Perencanaan	IPP
17	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2024	Perencanaan	IPP
18	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	720,0	2025	Perencanaan	IPP
19	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (kuota) tersebar*	235,0	2025	Perencanaan	IPP
20	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,0	2026	Perencanaan	IPP
21	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebut*	20,0	2026	Perencanaan	IPP
22	Sumatera	PLT Bio	PLT Bio Sumatera (kuota) tersebar*	5,0	2026	Perencanaan	IPP
23	Sinabang	PLTS	Sinabang (kuota) tersebar	2,0	2027	Perencanaan	IPP
24	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	62,0	2027	Perencanaan	IPP
25	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	20,0	2027	Perencanaan	IPP
26	Sabang	PLTS	Sabang (Storage Sistem)	2,0	2028	Perencanaan	PLN
27	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	10,0	2028	Perencanaan	IPP
28	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2028	Perencanaan	IPP
Total				3.183,9			

Sumber: PLN Aceh, 2021

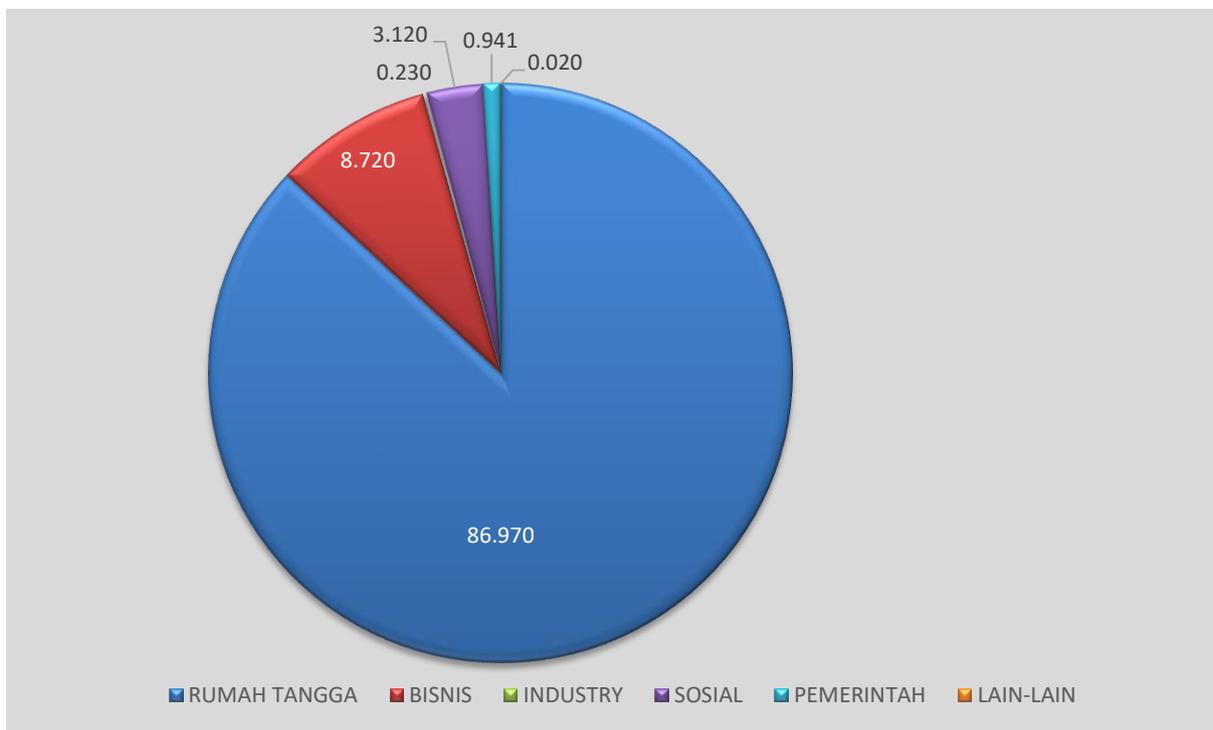
Ket.

* Kuota Sistem Sumatera

** Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)

B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Berdasarkan Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh Tahun 2020 adalah 1.556.984 pelanggan dengan persentase daya tersambung per sektor pelanggan paling besar adalah kelompok rumah tangga dengan persentase 86,97persen dengan jumlah pelanggan 1.354.12 Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.23 persen dengan jumlah pelanggan 3.582 pelanggan (Gambar 2.55 dan Tabel 2.99).



Sumber : Overview PLN Aceh 2020

Gambar 2.59. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020

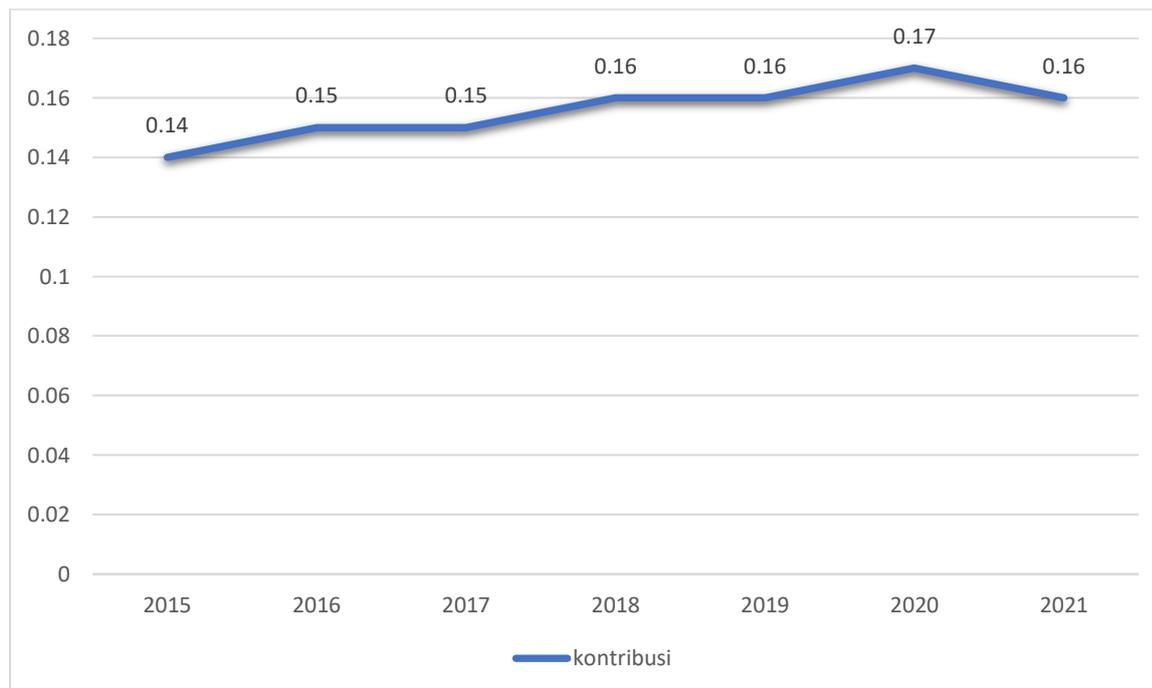
Tabel 2.100.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020

Kelompok Pelanggan	Jumlah	Persentase
Rumah Tangga	1.354.112	86,970
Sosial	48.577	3,120
Bisnis	135.764	8,720
Industri	3.582	0,230
GD. Kantor Pemerintah	14.645	0,230
Lain-lain	304	0,020
Jumlah	1.556.984	100,00

Sumber : Overview PLN Aceh 2021

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2014 masih menunjukkan besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh pada Tahun 2015 secara agregat mencapai 0.14 persen, semakin meningkat di tahun 2016 mencapai 0.15 persen hingga 0.16 pada 2019 tahun 2020 sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2021 capaiannya menurun menjadi 0,16 persen. Kontribusi terhadap Struktur PDRB Aceh sub sektor listrik dan gas pada Gambar 2.60. berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021

Gambar 2.60. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2021

D. Pertambangan tanpa ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang ilegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa ijin (PETI). tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabeneanya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang marak dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas. baik emas primer yang terdapat di wilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

Lokasi Kecamatan Geumpang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Tangse	: komoditas emas (primer);
Lokasi Gunung Ujeun	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Manggamat	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Sawang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas	: komoditas emas (placer);
Lokasi Pantou Reu	: komoditas emas (placer);
Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut	: komoditas emas (placer);

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah dilakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik. perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

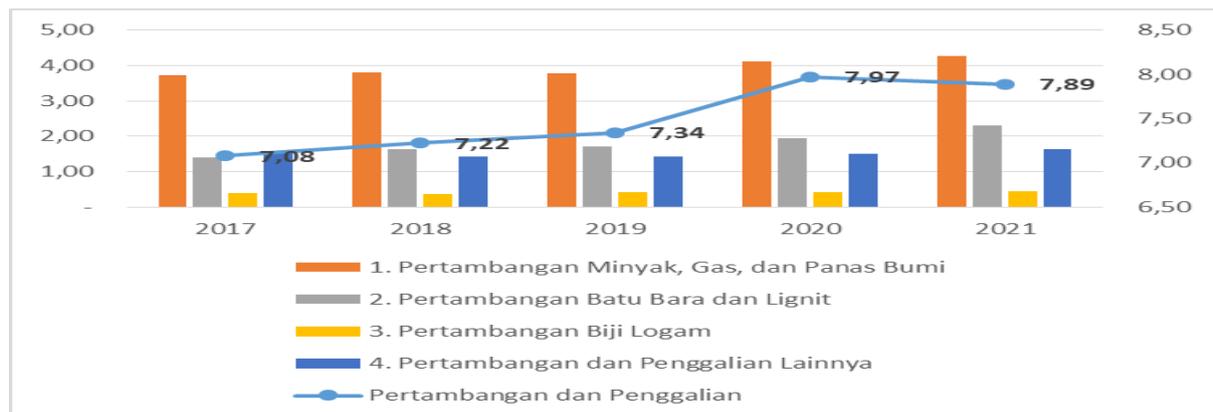
Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi a

Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan kegiatan pertambangan dan penggalian di Aceh, yaitu penggalian batubara. Kegiatan eksplorasi batubara di Aceh telah dimulai sejak tahun 2008 dan kegiatan produksi telah dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan eksplorasi ini banyak yang berakhir di tahun 2015 yang berpengaruh pada menurunnya nilai tambah pada tahun 2016 karena biaya eksplorasi merupakan bagian dari nilai tambah dalam PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2016 sebesar 4.67 persen mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.64 persen, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.99 persen. Tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.46 persen. Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 2.16 perser, dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 1.46 persen.

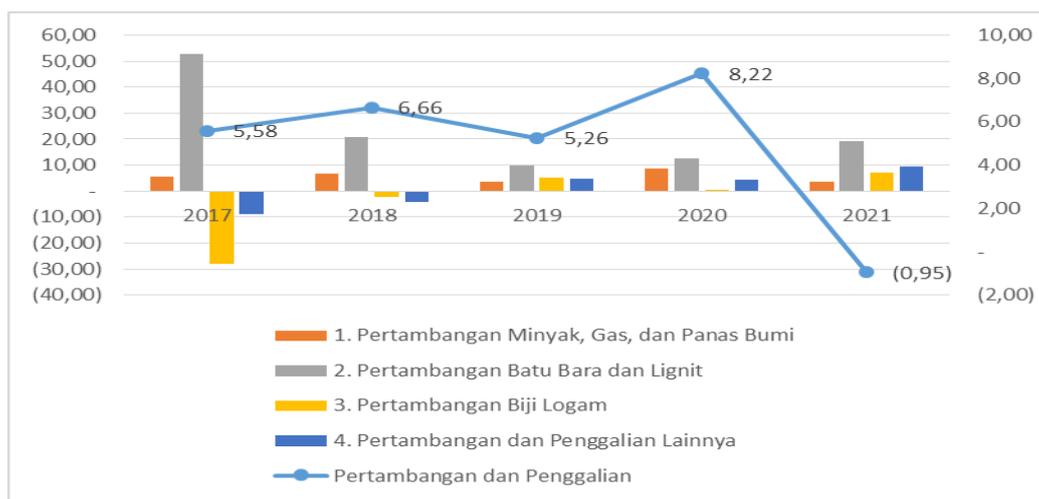


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Gambar 2.61. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen)

Namun demikian, selama setahun terakhir peranan dari pertambangan dan penggalian bergerak mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT.Perta Arun Gas yang sudah mulai berproduksi sejak tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada nilai peranan minyak, gas dan panas bumi memiliki peranan yang paling besar, yaitu 8.55 persen, selanjutnya peranan yang paling kecil dimiliki oleh sub sektor pertambangan biji logam sebesar 0.49 persen di tahun 2020.

Subkategori Pertambangan bijih logam mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) tahun 2014 yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah. Dibandingkan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 sudah tidak terlalu dalam, yaitu 2,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang turun sebesar 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya tumbuh sebesar 0,49 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14, 99 persen dan sub sektor yang terakhir yang mengalami kenaikan pada pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal sehubungan dengan naiknya permintaan bahan bangunan meskipun izin belum dicabut.



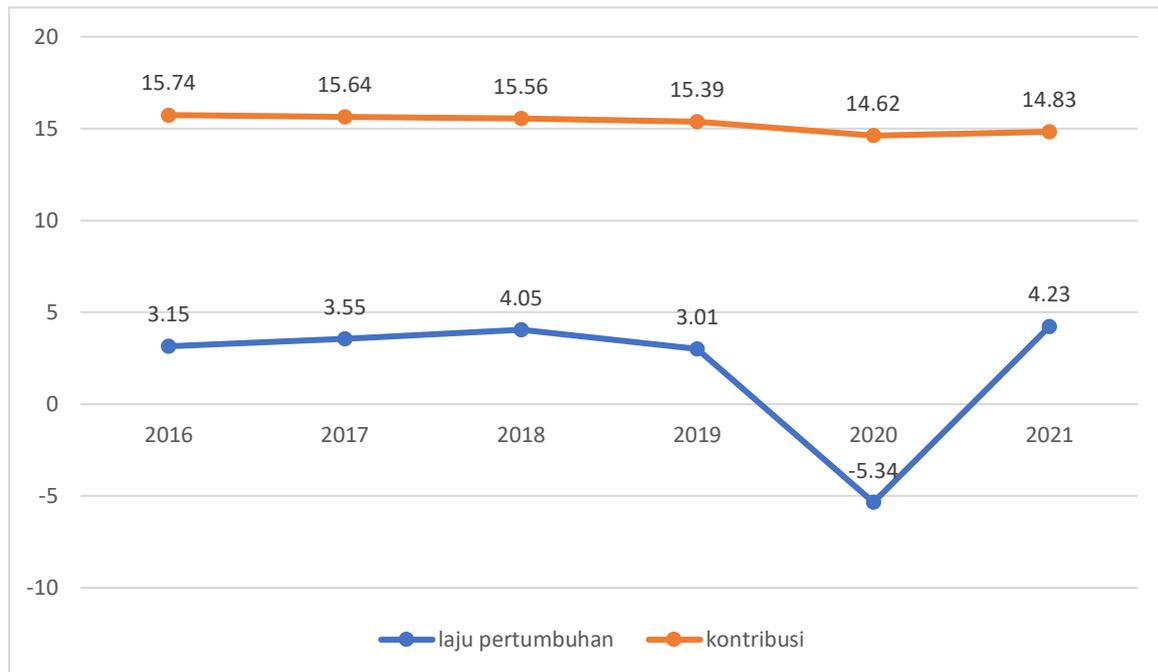
Gambar 2.62. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 – 2021 (persen)

Pada tahun 2020, semua subkategori mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,94 persen. Ditinjau dari perkembangannya, pertambangan minyak dan gas bumi mulai tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 7,88 persen dimana tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen sedangkan Laju pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017, namun kembali melambat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 52,7 persen menjadi 20,61 persen dan 9,83 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi batubara oleh PT. Mifa pada tahun 2018 dan 2019 tidak lebih besar dibandingkan pada tahun 2017, karena harga sedikit menurun. pada pertambangan Batu bara dan Lignit pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen

2.1.3.3.7. Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2022

Gambar 2.63. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016-2021

Gambar 2.63 menjelaskan bahwa besaran nilai kontribusi dan laju pertumbuhan selama kurun waktu 5 (lima). Sub urusan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan restoran merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terus berfluktuatif. Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan Aceh sebesar 15,74 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 sebesar 14,83 persen. Tingkat pertumbuhannya sebesar 3,15 persen terjadi pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2021 sektor ini meningkat menjadi 4,23 persen.

Tabel 2.101.

Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2015-2020

Tahun	Ekspor			Impor			Neraca (USD)	Neraca (%)
	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)		
2017	2.543.819.826	146.735.786	161,71	92.321.035	39.313.804	35,59	107.421.982	296,76
2018	5.121.043.757	250.735.059	70,88	97.582.007	29.690.002	(24,48)	221.045.057	105,77
2019	7.110.631.807	317.684.911	26,70	97.374.479	131.223.716	341,98	186.461.195	(15,65)
2020	8.118.173.063	300.417.274	(5,43)	109.695.439	25.776.718	(80,36)	274.640.556	47,29
2021	9.623.714.831	502.956.835	67,42	72.354.768,00	119.048.309	361,84	383.908.526,00	39,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Neraca perdagangan Aceh pada tahun 2017 sebesar 146.735.786USD yang merupakan nilai ekspor terendah. Sedangkan nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 502.956.835 USD yang diakibatkan oleh melonjaknya harga komoditas batu bara. Selain itu urutan kedua diikuti oleh kelompok komoditas kopi, teh dan rempah-rempah dengan nilai ekspor sebesar 8.394.707 USD.

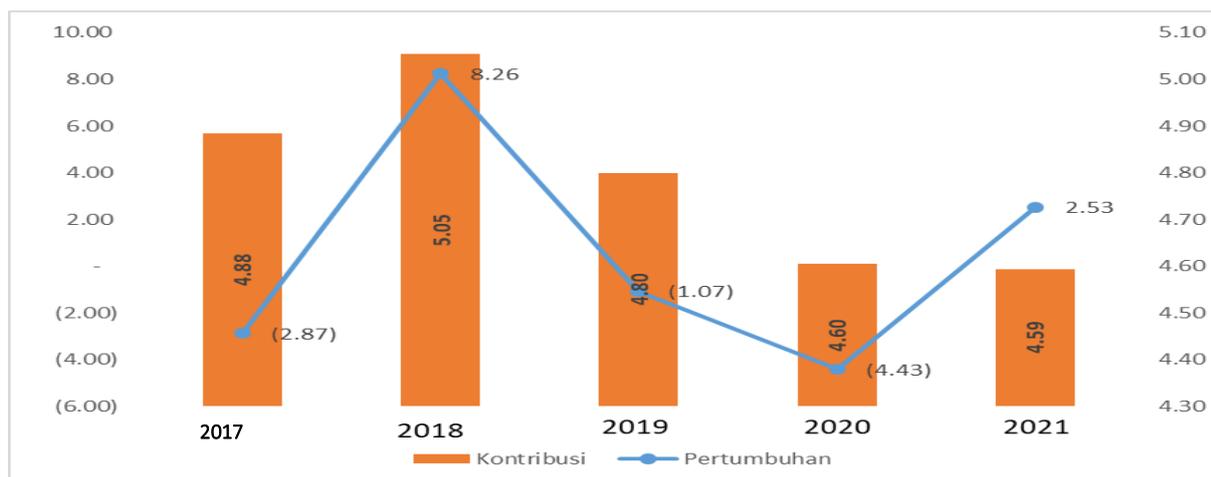
Negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh adalah Amerika Serikat, Vietnam, India, Tiongkok dan Thailand. Ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang di ekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh terdiri dari komoditi ikan dan udang, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian, dan berbagai produk kimia.

Sedangkan Nilai impor Aceh dari kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Nilai impor tertinggi pada tahun 2019 mencapai 131.223.715 USD dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 25.776.341 USD. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 341,98 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar -24,48 persen sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan nilai Impor pada tahun 2021 sebesar 119.408.309 USD atau meningkat sebesar 361,84 persen.

Nilai impor terbesar berupa mesin atau mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya senilai 64.609.090 USD. Impor non migas Provinsi Aceh bersal dari negara Tiongkok, Singapura dan Thailand. Provinsi Aceh hanya melakukan impor komoditas non migas yaitu melalui pelabuhan Calang, Kuala Langsa dan Lhokseumawe.

2.1.3.3.8. Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.64. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2016-2021

Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.64 menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kecil dan menengah adalah pembinaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan kemitraan dengan pengusaha. Permasalahan pada sektor perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Aceh, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB..

Perkembangan sektor industri pengolahan di Aceh selama lima tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan dan kondisi covid-19 yang terjadi saat ini. Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8.26 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 5.05 persen dari keseluruhan PDRB Aceh. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar -4,43 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,61 persen. Sedangkan untuk perkembangan jumlah dan nilai IKM terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.
Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2016-2020

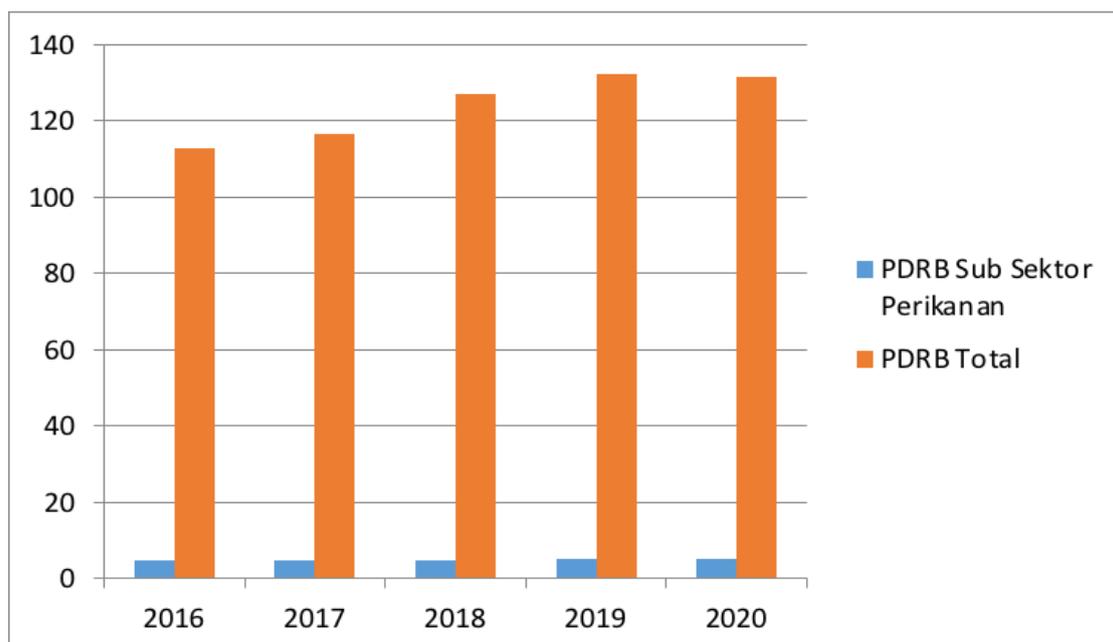
NO.	Tahun	JUMLAH		NILAI (Rp. 000)		
		IKM (Unit)	T. Kerja (Org)	Investasi	Produksi	BB/BP
1.	2016	27.047	92.306	75.785.786.986	52.097.070.047	8.026.891.033
2.	2017	29.433	93.021	1.953.591.710	10.617.821.720	8.091.411.409
3.	2018	32.156	98.778	4.440.271.128	19.970.690.510	16.945.097.289
4.	2019	38.827	108.225	1.284.418.039	10.751.674.843	7.899.307.767
5.	2020	41.672	111.216	4.316.270.654	17.992.842.392	7.900.555.231

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2020

Perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2016 sebesar 27.047 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 92.306 orang, dengan nilai investasi sebesar 75.785.786.986 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah IKM sebesar 41.672 unit dan tenaga kerja sebanyak 111.216 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.316.270.654 rupiah dibandingkan dengan tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 nilai investasi mengalami peningkatan.

2.1.3.3.9. Kelautan dan Perikanan

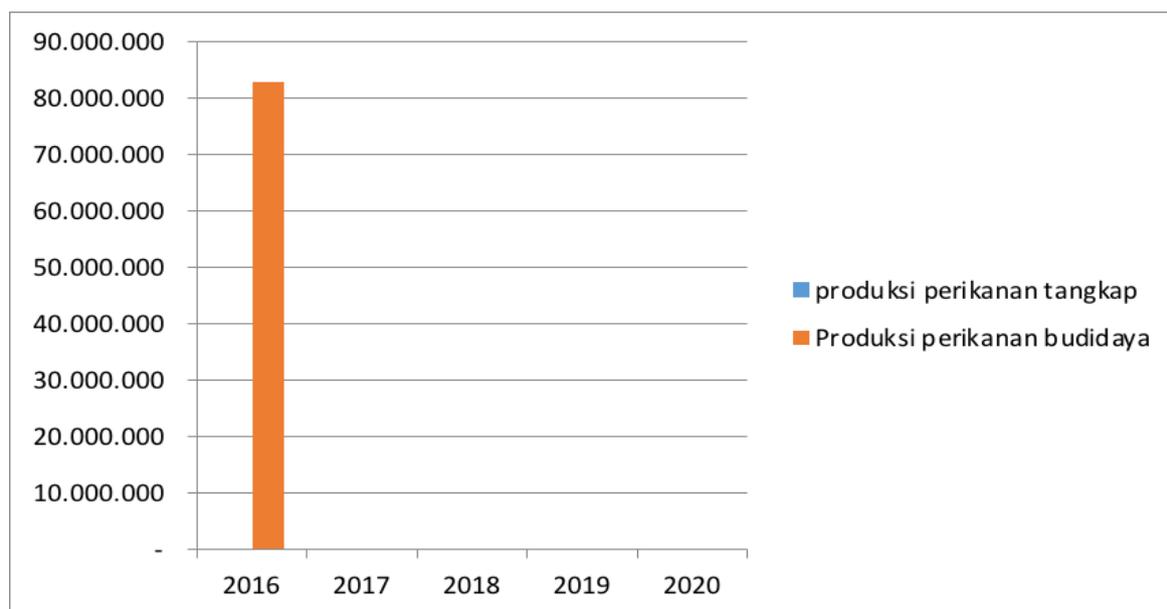
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Besarnya peranan sektor tersebut tergambar dari nilainya yang mencapai 5,71 triliun dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sebesar 166,38 triliun atau US\$ 11,41 milyar di tahun 2020. Pencapaian nilai sub sektor tersebut terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.65. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun)

Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan upaya pemberian berbagai alternative pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Besarnya untuk kontribusi sub sektor perikanan tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang dicapai dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Besarnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 184.190,40 ton meningkat menjadi 211.266,13 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi budidaya sebesar 82.692,060 ton di tahun 2016 meningkat menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020. Besarnya produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2016 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.66 berikut.



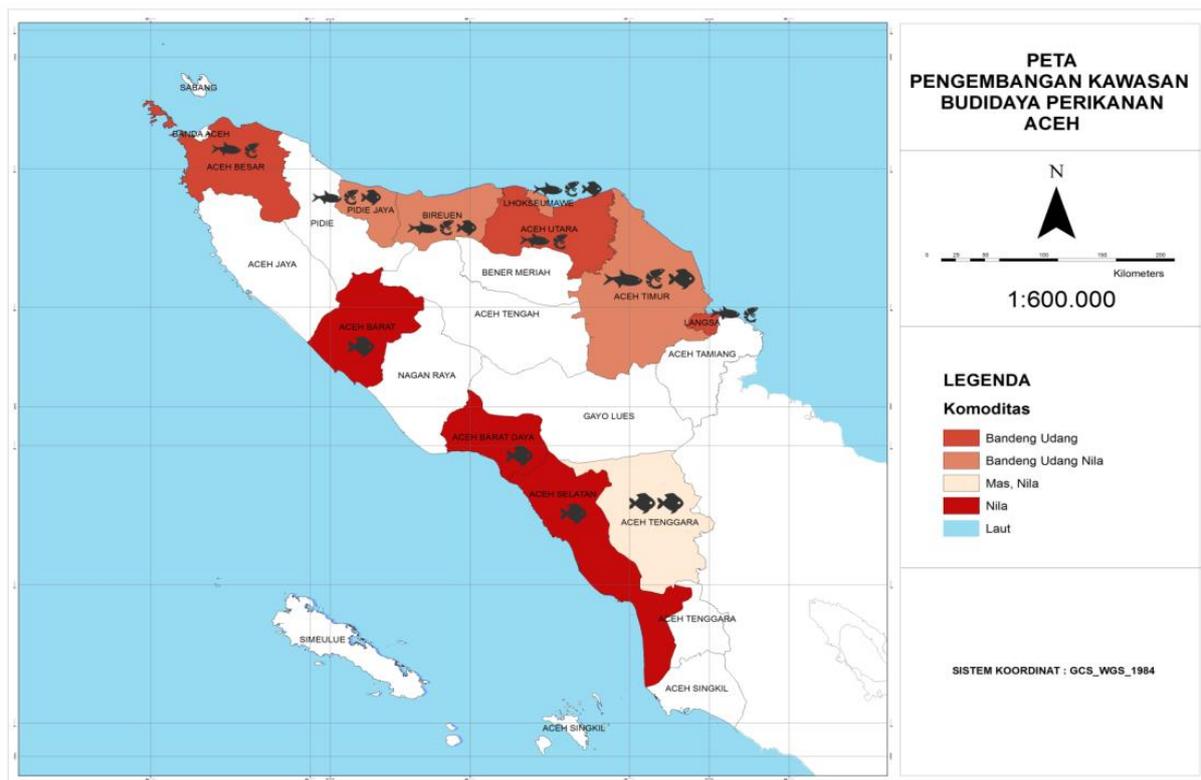
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020

Gambar 2.66. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020

Bila dilihat dari komposisinya perikanan tangkap memiliki produksi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produksi budidaya. Kondisi tersebut juga dapat diasumsikan bahwa potensi perikanan tangkap Aceh cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara produksi budidaya belum sepenuhnya mampu dioptimalkan. Namun secara umum produksi keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi pembangunan sektor perikanan Aceh.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng, ikan nila, dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek, Jambo Aye, Jangka, Julok Cut, Lampanah Leungah, Lancok, Seunebok Antara, Muara Satu, dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat

selatan terdiri dari Kemukinan Pasié. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.67 berikut.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2.67. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 45,88 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.

Dampak dari pencapaian produksi ekspor perikanan tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan dari kelompok pengolahan maupun kelompok nelayan tangkap dan budidaya. Saat ini cakupan kelompok nelayan tangkap Aceh sebanyak 20 kelompok pada tahun 2020. jumlah tersebut sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah kelompok nelayan tangkap terbanyak terdapat pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah berturut-turut 73 dan 70 kelompok. sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat kelompok yang dibina. Pada sektor budidaya. pembinaan kelompok budidaya terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebanyak 60 kelompok sementara jumlah terkecil di tahun 2017 sebanyak 15 kelompok. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tangkap dan budidaya di Aceh terdapat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.103.
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

Cakupan Bina Kelompok	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Tangkap	73	70	0	50	20
Kelompok Budidaya	20	15	20	60	20
Kelompok Pengolah Ikan	13	15	13	20	10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020

Keberhasilan pembinaan kelompok perikanan juga akan berimplikasi bagi upaya konservasi yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok bukan hanya berfungsi untuk menangkap ikan semata, namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya ikan yang tersedia. Upaya konservasi yang terus dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. Ini terlihat dari perkembangan luas kawasan konservasi perairan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas kawasan konservasi sebesar 71.856,66 Ha. luas tersebut meningkat menjadi 161.772.35 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan target di akhir tahun RPJMA luas kawasan konservasi perairan dapat meningkat hingga menjadi 281.100 Ha di tahun 2022.

Selain indikator luas kawasan konservasi, keberlanjutan sumberdaya perikanan juga tergambar dari besarnya proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Saat ini nilai proporsi tangkapan tersebut sudah mencapai 76.70 persen pada tahun 2019. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2015 sebesar 63.46 persen atau meningkat dengan rata-rata 9 Ha per tahunnya. Meskipun hampir mencapai 100 persen, namun proporsi tangkapan tersebut masih kategori aman untuk ditangkap karena belum melewati ambang batas penangkapan atau lebih dikenal dengan *over fishing*.

2.1.3.3.10. Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Aceh diprioritaskan khusus untuk masyarakat Aceh atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal dengan harapan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Aceh. Kehadiran transmigrasi lokal ini dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Aceh. Prasarana dan sarana berupa jalan dan beberapa infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, jaringan listrik masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi terhambat. Tahun 2018 pembangunan rumah transmigrasi dilakukan pada 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Rumah yang dibangun pada UPT tersebut masing-masing 20 (dua puluh) unit pada setiap UPT. Disamping itu, untuk meningkatkan SDM anak-anak transmigran dilakukan pembangunan rumah sekolah sebanyak 1 unit di UPT Ujong Lamie, dengan harapan mempermudah akses bagi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Untuk

kebutuhan air bersih pemerintah juga membangun 10 unit saluran air bersih pada 10 UPT serta penyediaan perpipaan untuk masyarakat transmigran.

Berdasarkan jumlah penempatan, transmigran yang ditempatkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2017 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 115 kepala keluarga (KK), sedangkan tahun 2018 penempatan transmigran sebanyak 60 kepala keluarga. Adapun lokasi penempatan yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Perkembangan transmigrasi lokal di Aceh juga masih harus mendapat perhatian besar dari segi pengembangan sumberdaya manusianya. Sehingga dengan pembekalan yang baik dapat meningkatkan pendapatan transmigran lokal dan terkoneksi antar wilayah dalam kawasan transmigrasi. Selain pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Aceh juga akan menetapkan status salah satu kawasan transmigrasi di Aceh menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh periode tahun 2012 sampai tahun 2032 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012. Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “ACEH YANG ISLAMI. MAJU. DAMAI DAN SEJAHTERA” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012 – 2032 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Aceh periode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh periode tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh untuk periode 2017-2022 adalah “TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI.

C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh (RKPA) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Aceh pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPA ini SKPA akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBA setiap tahunnya.

2.1.3.4.2. Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh,

secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104.
Predikat WTP Kabupaten Kota 2020

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	13 Kali	13	Pemerintah Aceh	6 Kali
2	Aceh Besar	9 Kali	14	Aceh Barat Daya	6 Kali
3	Kota Sabang	9 Kali	15	Aceh Selatan	6 Kali
4	Kota Lhokseumawe	9 Kali	16	Aceh Timur	6 Kali
5	Kota Langsa	9 Kali	17	Aceh Utara	6 Kali
6	Aceh Barat	7 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	7 Kali	19	Pidie	6 Kali
8	Aceh Tamiang	7 Kali	20	Pidie Jaya	6 Kali
9	Aceh Tengah	7 Kali	21	Simeulue	6 Kali
10	Bener Meriah	7 Kali	22	Aceh Singkil	5 Kali
11	Bireuen	7 Kali	23	Subulusalam	4 Kali
12	Gayo Lues	7 Kali	24	Aceh Tenggara	4 Kali

Sumber: BPK, 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh.

Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

2.1.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Dari Tabel 2.104 di bawah ini terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar (60,20) menjadi (61,63) di tahun 2020.

Tabel 2.105.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	60.20	62.00	62.10	64.20	61,63

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2021

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tabel 2.106.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2016	9.075	330	3,64
2	2017	23.180	455	1,96
3	2018	22.544	651	2,89
4	2019	22.685	813	3,58
5	2020	21.690	40	0,18

Sumber : BPSDMA/ BKA. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.106. dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional tahun 2016 sebesar 3,64 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Pada tahun 2019 persentase yang mengikuti diklat kembali meningkat menjadi 3,58 persen atau sebanyak 813 peserta. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan Diklat bagi Aparatur sesuai harapan dan kewajiban Aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung Program Unggulan Aceh Carong terus memberikan beasiswa Diploma, S1, S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat aceh dan Aparatur Pemerintah Aceh. Pada tahun 2021, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.107.
Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	No.	Jenjang
1	Diploma I Agraria	12	S2 Kerjasama DAAD
2	Diploma STTD	13	S2 Tahfidz Luar Negeri
3	Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik	14	Dokter Spesialis
4	S1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh	15	S3 Kerjasama DAAD
5	S1 Prestasi Dalam Negeri	16	S3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri
6	S1 Tahfidz Luar Negeri	17	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
7	S2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri	18	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
8	S2 Masyarakat Aceh Luar Negeri	19	Dosen PTN/PTS Luar Negeri
9	Pendidikan Profesi Guru	20	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S2
10	S2 Guru PAUD Luar Negeri	21	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S3
11	S2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island)		

Sumber : BPSDMA, 2021

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.1.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaaawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

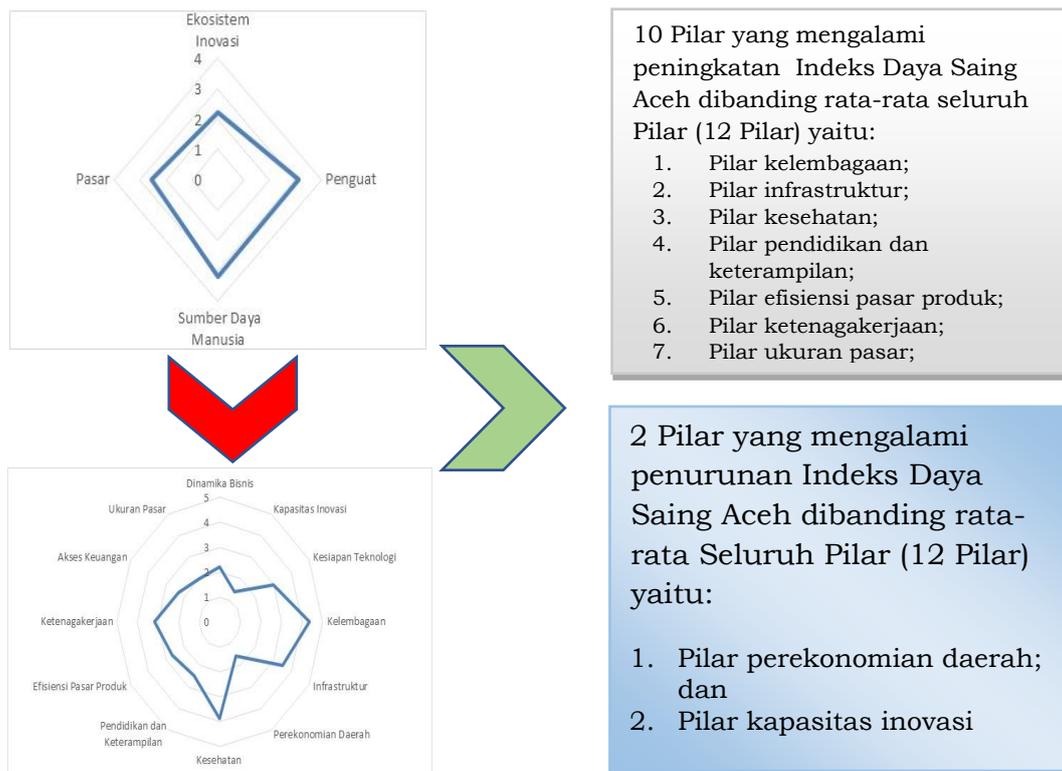
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan provinsi lain. Namun saat ini Aceh masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Aceh. Meskipun ditengah lesunya aktifitas perekonomian Aceh, namun terdapat beberapa sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif diantaranya sektor pertanian, pertambangan, listrik dan gas, konstruksi, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Diantara sektor-sektor penopang perekonomian tersebut, informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,98 persen atau meningkat tajam dari 5,26 persen pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh konstruksi yang tumbuh sebesar 10,61 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Aceh mencapai kategori tinggi yaitu 2,763, yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh nilai indeks sebesar 2,206; faktor penguat memperoleh indeks sebesar 3,134; sumber daya manusia memperoleh indeks sebesar 3,169; dan faktor pasar sebesar 2,541. Selanjutnya, dari hasil pemetaan 12 (duabelas) pilar dari aspek daya saing yang diukur, ada 10 pilar yang mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Pilar-pilar yang mengalami peningkatan yaitu dinamika bisnis sebesar 2,208; kesiapan teknologi sebesar 3, kelembagaan sebesar 4,333; infrastruktur sebesar 3,5; kesehatan sebesar 3,875; pendidikan dan keterampilan sebesar 2,464; efisiensi pasar produk sebesar 2,667; ketenagakerjaan sebesar 3,167; akses keuangan sebesar 2,333; dan ukuran pasar sebesar 2.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek, maka dari 12 (duabelas pilar) tersebut ada dua pilar yang nilainya masih berada dibawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar perekonomian daerah sebesar 1,571 dan kapasitas inovasi sebesar 1,411, seperti Gambar 2.68 dibawah ini:



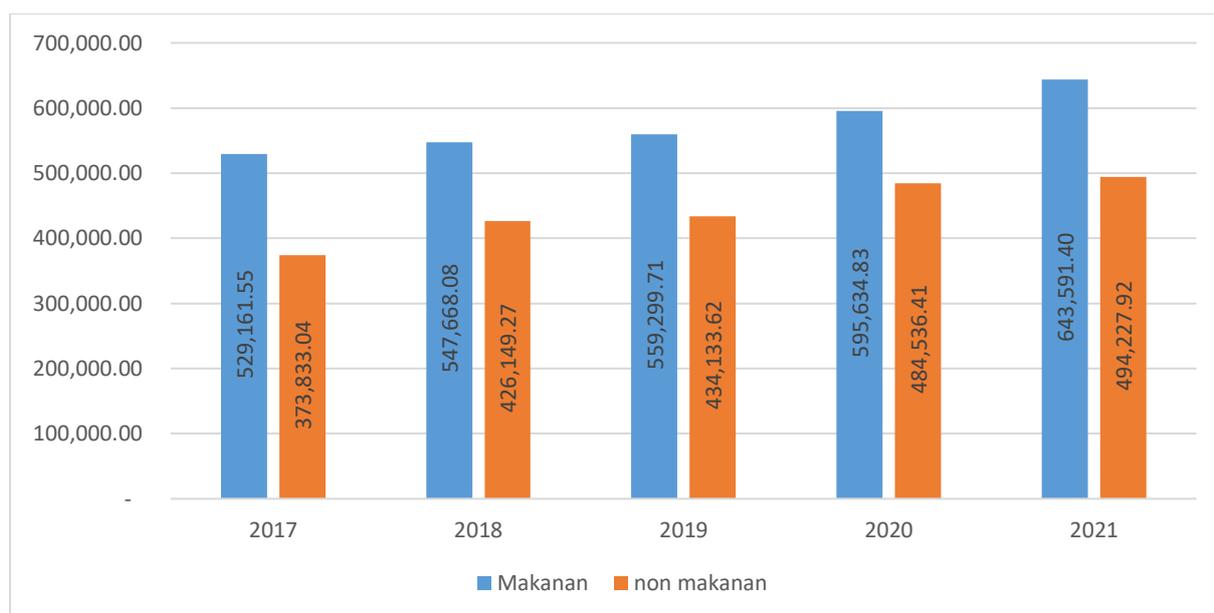
Gambar 2.68. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar

2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.1.4.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 58,60 persen dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 55,14 persen. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, persentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 44,46 persen. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.65 berikut.



Sumber: BPS 2020

Gambar 2.69. Perkembangan Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2021

Bila dilihat dari pengeluaran konsumsi berdasarkan kabupaten dan kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Banda Aceh memiliki jumlah tertinggi sebesar 2 juta dengan komposisi pengeluaran non makanan sebesar 1,1 juta dan makanan sebesar 839 ribu. Banda Aceh masih menjadi kota dengan pengeluaran non makanan tertinggi sebesar 1,1 juta dan Langsa sebesar 721 ribu. Sedangkan kabupaten Aceh Tengah merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan makanan dengan nilai sebesar 1,49 juta. Kecenderungan konsumsi non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga pemenuhan kebutuhan makanan lebih kecil dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di kabupaten dan kota terdapat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108.
Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
Tahun 2020

Kab/Kota	Makanan	Non makanan	Makanan dan Non makanan
Simeulue	477.616	357.001	834.617
Aceh Singkil	524.442	392.315	916.757
Aceh Selatan	571.914	449.331	1.021.245
Aceh Tenggara	532.866	402.438	935.304
Aceh Timur	598.023	384.624	982.647
Aceh Tengah	720.128	772.672	1.492.800
Aceh Barat	730.224	640.719	1.370.943
Aceh Besar	594.044	503.387	1.097.431
Pidie	609.935	396.693	1.006.629

Kab/Kota	Makanan	Non makanan	Makanan dan Non makanan
Bireuen	530.591	399.495	930.087
Aceh Utara	473.847	286.145	759.992
Aceh Barat Daya	554.299	395.943	950.242
Gayo Lues	688.399	513.728	1.202.127
Aceh Tamiang	442.060	353.667	795.727
Nagan Raya	629.616	525.893	1.155.509
Aceh Jaya	633.065	409.931	1.042.996
Bener Meriah	712.018	497.186	1.209.204
Pidie Jaya	762.984	450.972	1.213.957
Kota Banda Aceh	839.685	1.161.846	2.001.531
Kota Sabang	802.788	672.673	1.475.461
Kota Langsa	621.888	721.192	1.343.080
Kota Lhokseumawe	612.788	567.104	1.179.892
Subulussalam	484.105	433.839	917.945
Aceh	595.635	484.536	1.080.171

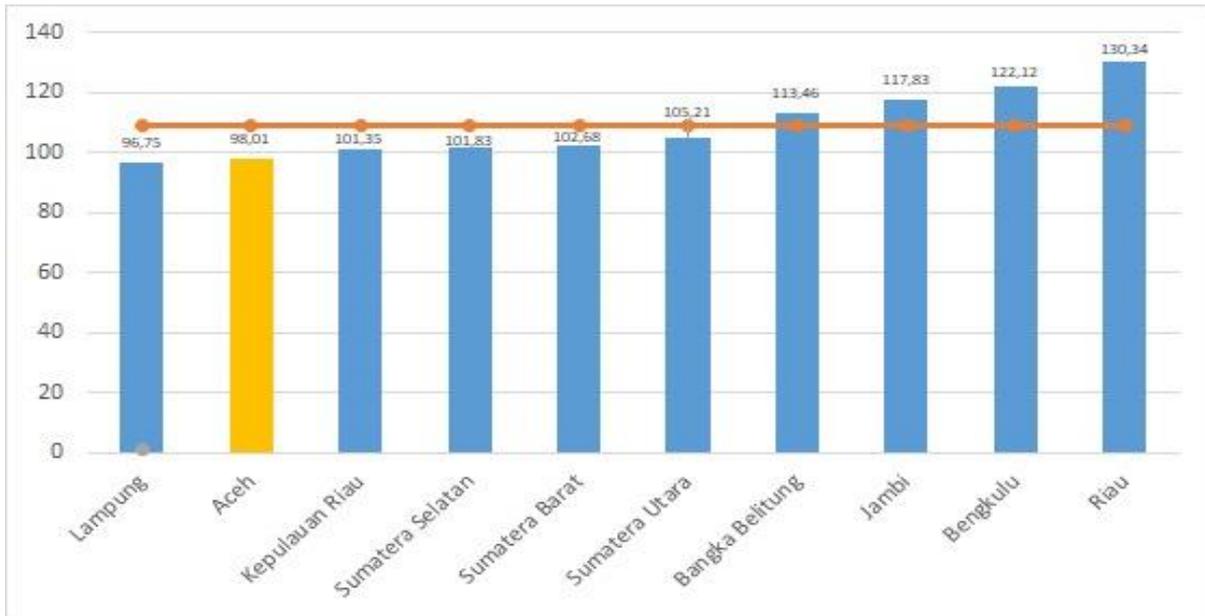
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.1.4.2.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Secara umum nilai tukar petani di kepulauan Sumatera tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019. Hanya saja Lampung yang selama ini mempunyai nilai terbaik NTP nya malah terjadi penurunan sebesar 5.76 point. Ada Tiga provinsi yang secara signifikan mengalami perbaikan nilai NTP yaitu Jambi meningkat 34.75 point, Bangka Belitung 30.44 point dan Bengkulu 28.22 point.

Nilai Tukar Petani Aceh untuk wilayah sumatera tahun 2020 juga mengalami peningkatan, tetapi masih berada pada peringkat yang tidak menggembirakan, Aceh turun ke peringkat 2 dari bawah dibandingkan tahun 2019, dimana hanya berada satu tingkat diatas provinsi Lampung atau posisi 9 dari seluruh provinsi di sumatera, yang menarik adalah provinsi Lampung yang NTP nya tertinggi tahun sebelumnya tahun ini turun drastis dari 102.51 menjadi 96.75 atau berada pada peringkat terakhir se Sumatera. Nilai Tukar petani tertinggi adalah pada Provinsi Riau yaitu sebesar 130.34.

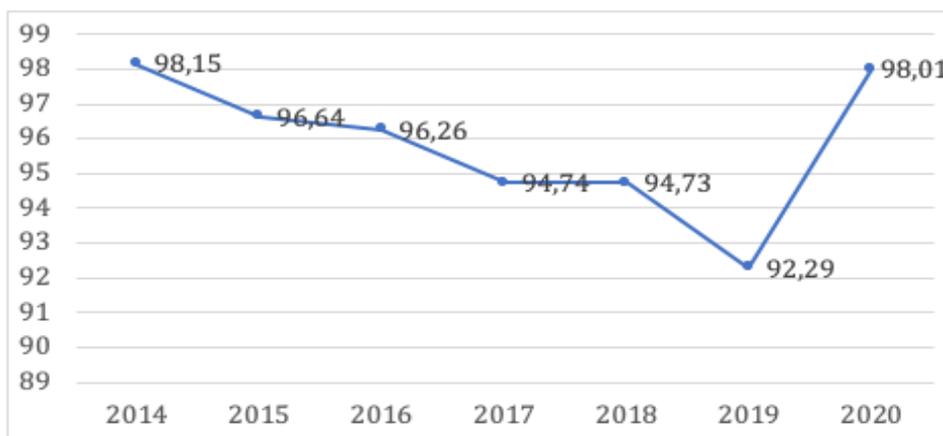


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.70. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Tahun 2014 NTP Aceh berada pada angka 98.15 dan terus tertekan sampai tahun 2019 yang sudah menyentuh angka 92.29. Dalam kurun waktu lima tahun NTP jatuh lebih dari 5 poin (5.86). Tahun 2020 inflasi sudah dapat ditekan sampai angka 0,99 persen dan NTP juga sedikit mengalami perbaikan 5.72 point yaitu menjadi sebesar 98.01.

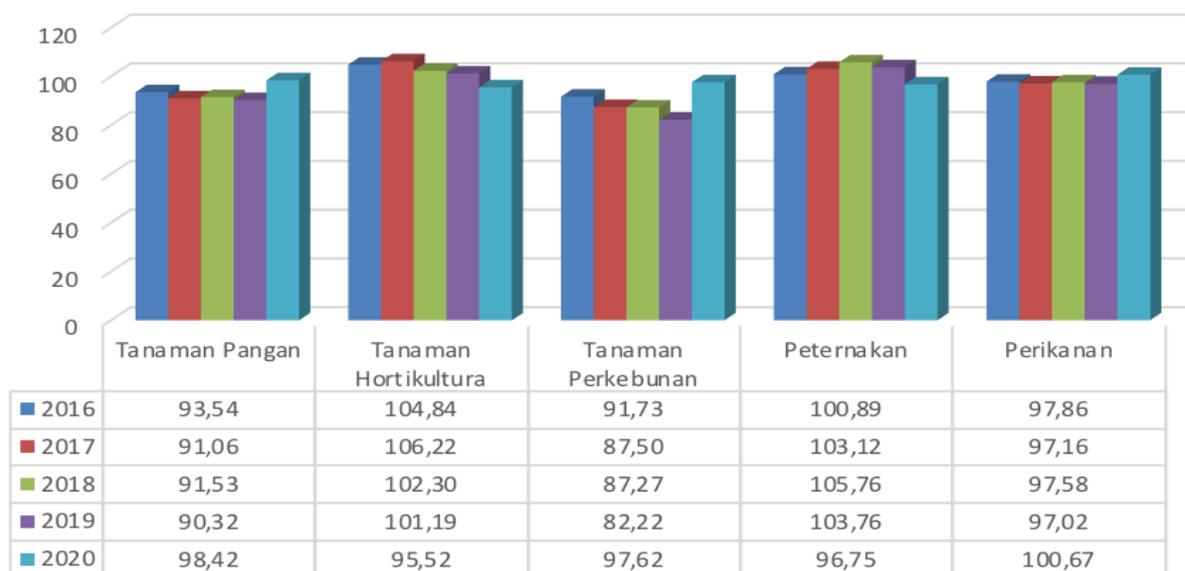
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Akibat NTP yang mengalami penurunan ini berdampak melemahnya daya beli petani yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.71. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020

Bila dilihat per sub sektor NTP sub sektor pertanian mengalami pergerakan. Sub sektor peternakan NTP selama enam tahun terakhir masih mampu berada pada NTP Nilai 100, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 96.75. Sub sektor Tanaman hortikultura yang bergerak pada komoditi buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga mengalami penurunan nilai tukar petani yaitu 95.52. Akan tetapi pada sub sektor perikanan NTP nya mengalami peningkatan melebihi angka 100 yaitu menjadi 100.67.



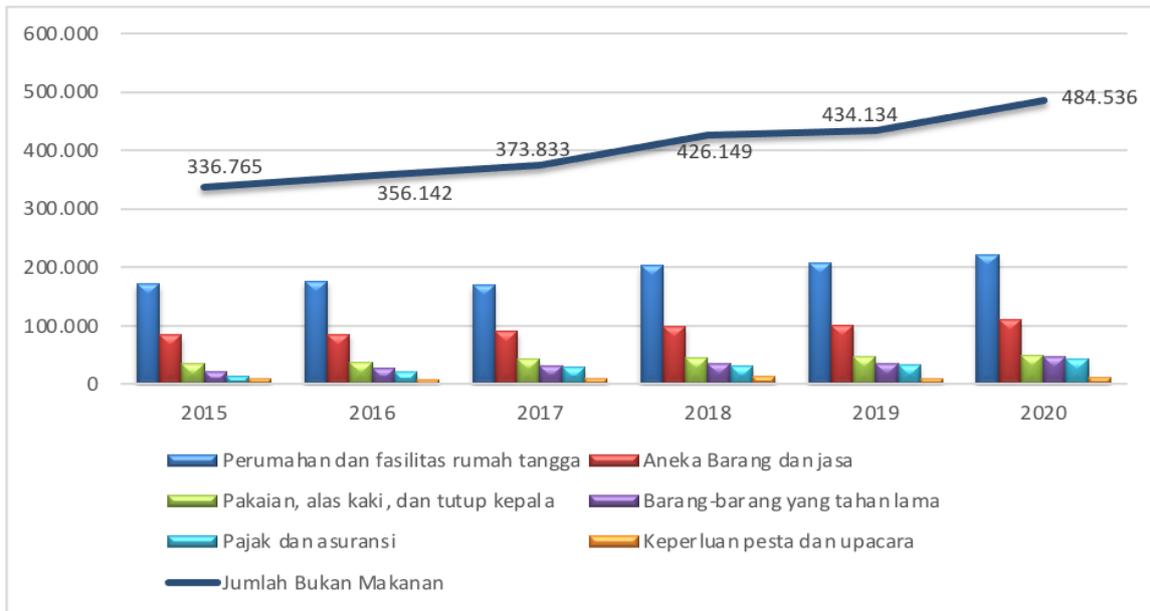
Sumber: NTP Aceh 2020. (diolah)

Gambar 2.72. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020

2.1.4.2.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein perkapita per hari. Tahun 2015 rata-rata pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan penduduk Aceh sebesar 336.765 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 484.536 rupiah.

Besarnya konsumsi non makanan yang dikeluarkan oleh masyarakat Aceh pada tahun 2020, umumnya digunakan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 221.637 rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk aneka barang dan jasa sebesar 110.563 rupiah dan terbesar ketiga yaitu untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 43.186 rupiah. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk pengeluaran keperluan pesta dan upacara sebesar 12.154 rupiah (Gambar 2.73).

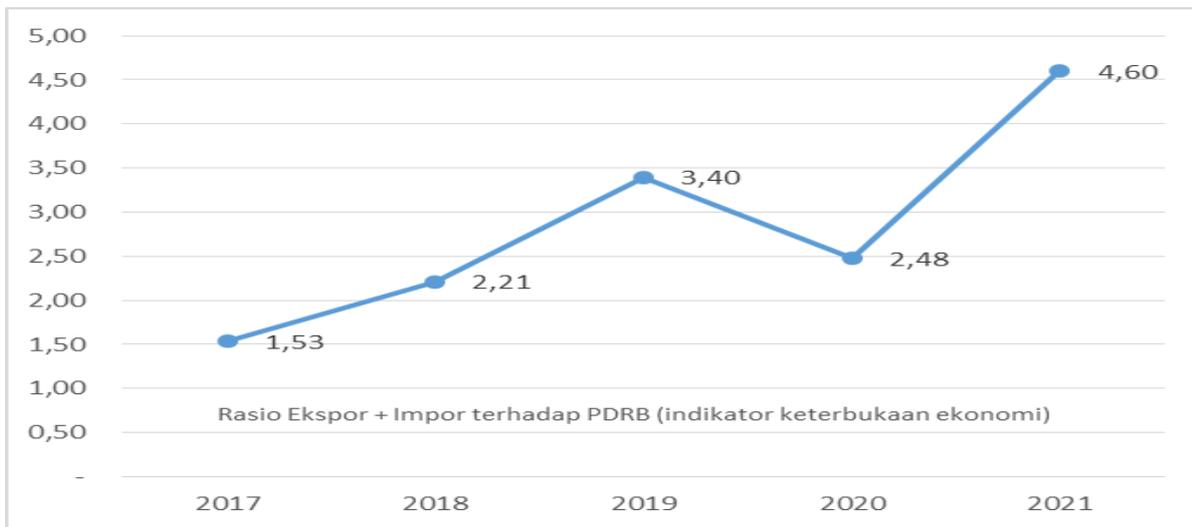


Sumber: Aceh Dalam Angka, 2021

Gambar 2.73. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2015-2020

2.1.4.2.4. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.74. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2017-2021

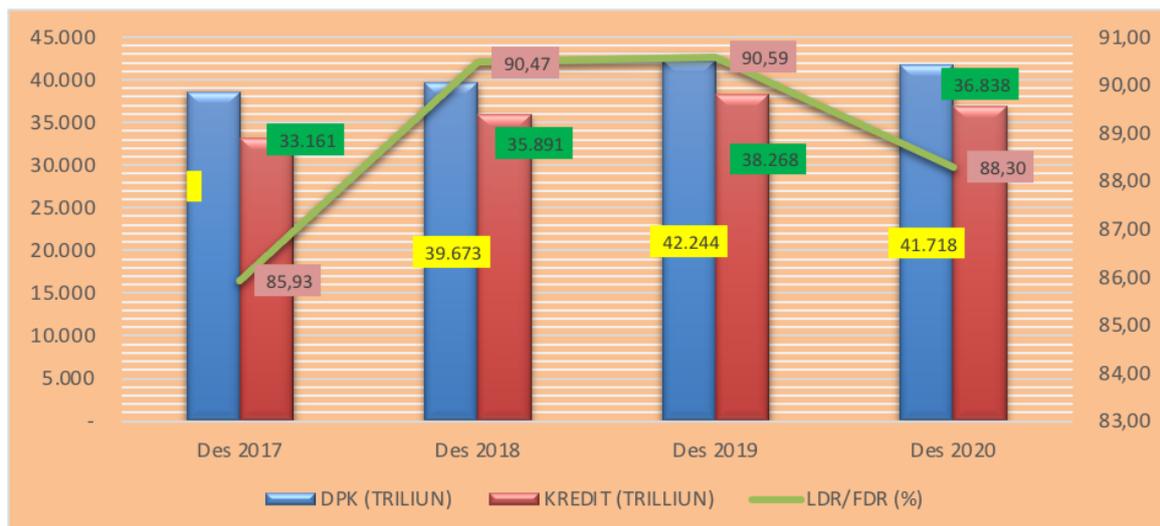
Nilai keterbukaan ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 2.72. Nilai tersebut dapat dihitung dari rasio ekspor dan impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh

terendah pada tahun 2016 sebesar 0,73 persen, namun dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 3,40 persen. Nilai PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 112.665.532 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 132.087.460 rupiah. Nilai ekspor Provinsi Aceh dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 146.735.786 USD terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 317.684.991 USD. Sedangkan nilai impor dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 131.223.716 USD.

Pada tahun 2019, ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh terbesar yaitu ke negara India dengan nilai ekspor sebesar 139,63 juta USD, diikuti oleh negara Thailand sebesar 11.824.121 USD. Sedangkan negara pengimpor terbesar untuk Provinsi Aceh adalah Italia dan Finlandia dengan nilai impor sebesar 74,54 USD dan 37,19 USD. Anjloknya nilai ekspor Aceh ke luar negeri sebagai dampak dari penurunan hingga habisnya produksi minyak dan gas di Aceh, di mana sejak tahun 2016 sampai 2019 tidak adanya nilai ekspor migas Aceh.

2.1.4.2.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Kondisi stabilitas keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III-2020 terlihat dalam kondisi yang kurang baik, lebih cenderung menurun. Ini tercerminkan dari ketahanan dan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2019

Gambar 2.75. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun Des 2017- Des 2020

Kondisi perbankan di Aceh selama tahun 2020 menunjukkan bahwa penyaluran dana ke dana pihak ketiga (DPK) yang sedikit, dilihat dari nilai LDR (*Loan Defisit Ratio*) yang menurun dilihat dari kurva perkembangan Intermediasi perbankan di provinsi Aceh dalam 4 Tahun terakhir. Perkembangan LDR di Aceh mengalami tren menurun mencapai titik 88,30 persen dibandingkan

tahun 2019 yang penyaluran dananya mencapai 90,59 persen dan lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 90,47 persen.

Penurunan penggunaan Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dampak dari wabah covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Aceh ikut terimbas karena berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh perbankan.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.4.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	2051.48	93228	767.67	0.37	8.23
Aceh Singkil	2185	124101	555.49	0.25	4.48
Aceh Selatan	3841.6	238081	1225.62	0.32	5.15
Aceh Tenggara	4231.43	216495	1253.59	0.30	5.79
Aceh Timur	6286.01	436081	1763.71	0.28	4.04
Aceh Tengah	4318.39	212494	1143.73	0.26	5.38
Aceh Barat	2927.95	210113	884.95	0.30	4.21
Aceh Besar	2969	425216	1635.1	0.55	3.85
Pidie	3086.95	444976	1282.71	0.42	2.88
Bireuen	1901.2	471635	1317.82	0.69	2.79
Aceh Utara	3236.86	619407	2185.75	0.68	3.53
Aceh Barat Daya	1490.6	150393	843.86	0.57	5.61
Gayo Lues	5719.58	94100	1115.17	0.19	11.85

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Aceh Tamiang	1956.72	295011	1053.53	0.54	3.57
Nagan Raya	3363.72	167294	1151.96	0.34	6.89
Aceh Jaya	3812.99	92892	710.69	0.19	7.65
Bener Meriah	1454.09	148175	1484.35	1.02	10.02
Pidie Jaya	1073.6	161215	582.06	0.54	3.61
Banda Aceh	61.36	270321	764.12	12.45	2.83
Sabang	153	34874	202.24	1.32	5.80
Langsa	262.41	176811	660.71	2.52	3.74
Lhokseumawe	181.06	207202	455.72	2.52	2.20
Subulussalam	1391	81417	609.5	0.44	7.49

Sumber: BPS 2020, diolah

Tabel 2.109, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,45 km/km²), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,19 km/Km²). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (11,85 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,20 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 7.9) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

2.1.4.3.2. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh pada Tahun 2020 yaitu dengan perpipaan sebesar 6,41 persen, pompa sebesar 8,25 persen, air dalam kemasan sebesar 42,59 persen, sumur terlindung sebesar 25,64 persen, sumur tak terlindung sebesar 4,79 persen, mata air terlindung sebesar 8,25 persen, mata air tak terlindung sebesar 1,44 persen, air permukaan sebesar 2,24 persen, air hujan sebesar 0,23 persen dan lainnya sebesar 0,17 persen. Selanjutnya Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di
Provinsi Aceh, 2020

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Simeulue	1,01	1,76	72,17	8,45	3,06	3,16
Aceh Singkil	4,47	13,48	36,2	22,26	11,24	0,34
Aceh Selatan	0,29	11,71	40,13	29,57	3,01	6,8
Aceh Tenggara	4,81	12,34	15,22	10,49	4,05	50,91
Aceh Timur	8,9	12,93	27,69	29,71	10,25	0,8
Aceh Tengah	9,39	3,52	20,4	10,42	1,81	46,85
Aceh Barat	0	13,62	44,89	32,51	3,2	4,53
Aceh Besar	2,9	1,95	70,35	17,25	2,64	1,94
Pidie	2,04	7,47	42,12	37,06	2,77	4,04
Bireuen	13,63	3,01	28,25	49,93	3,99	0,77
Aceh Utara	11,58	7,97	25,43	42,5	9,43	0,35
Aceh Barat Daya	0	33,33	29,11	20,47	3,1	12,72
Gayo Lues	14,85	1,78	28,25	7,97	3,24	23,5
Aceh Tamiang	6,75	18,26	50,42	10,23	12,15	0,22
Nagan raya	0	8,52	32,7	42,82	3,69	10,3
Aceh Jaya	10,63	5,98	35,49	18,36	4,13	22,94
Bener Meriah	14,88	3,51	12,69	15,18	2,81	42,26
Pidie Jaya	10,36	4,18	30,21	50,81	1,14	0,44
Banda Aceh	3,62	0,23	95,53	0,62	0	0
Sabang	5,47	0,06	91,75	1	0	1,33
Langsa	4,34	15,7	76,5	3,47	0	0
Lhokseumawe	1,85	1,34	85,95	9,92	0,6	0,35
Subulussalam	5,83	15,37	21,14	29,91	18,08	0,36
Aceh	6,41	8,25	42,59	25,64	4,79	8,25

Lanjutan tabel....

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Simeulue	5,02	2,25	3,12	0	100
Aceh Singkil	4,58	5,66	1,61	0,16	100
Aceh Selatan	1,87	6,62	0	0	100
Aceh Tenggara	1,93	0,25	0	0	100
Aceh Timur	1,66	6,98	0	1,08	100
Aceh Tengah	6,13	0,87	0,62	0	100
Aceh Barat	0,71	0,47	0	0,06	100
Aceh Besar	0,98	1,99	0	0	100
Pidie	0,38	4,11	0	0	100
Bireuen	0	0,27	0	0,14	100
Aceh Utara	0	2,25	0	0,49	100
Aceh Barat Daya	0,52	0,75	0	0	100
Gayo Lues	19,44	0,82	0	0,15	100
Aceh Tamiang	0,7	0,93	0,07	0,26	100
Nagan raya	0,8	1,17	0	0	100
Aceh Jaya	0,51	1,96	0	0	100
Bener Meriah	3,15	2,37	3,14	0	100
Pidie Jaya	0,15	2,55	0,17	0	100
Banda Aceh	0	0	0	0	100

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Sabang	0,16	0,08	0,15	0	100
Langsa	0	0	0	0	100
Lhokseumawe	0	0	0	0	100
Subulussalam	0,24	8,25	0,71	0,1	100
Aceh	1,44	2,24	0,23	0,17	100

Sumber: BPS 2021, diolah

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem penyediaan air minum regional.

2.1.4.3.3. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2015-2019 meningkat sebesar 0.64. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0.92 dan meningkat menjadi 1.13 pada tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.111.

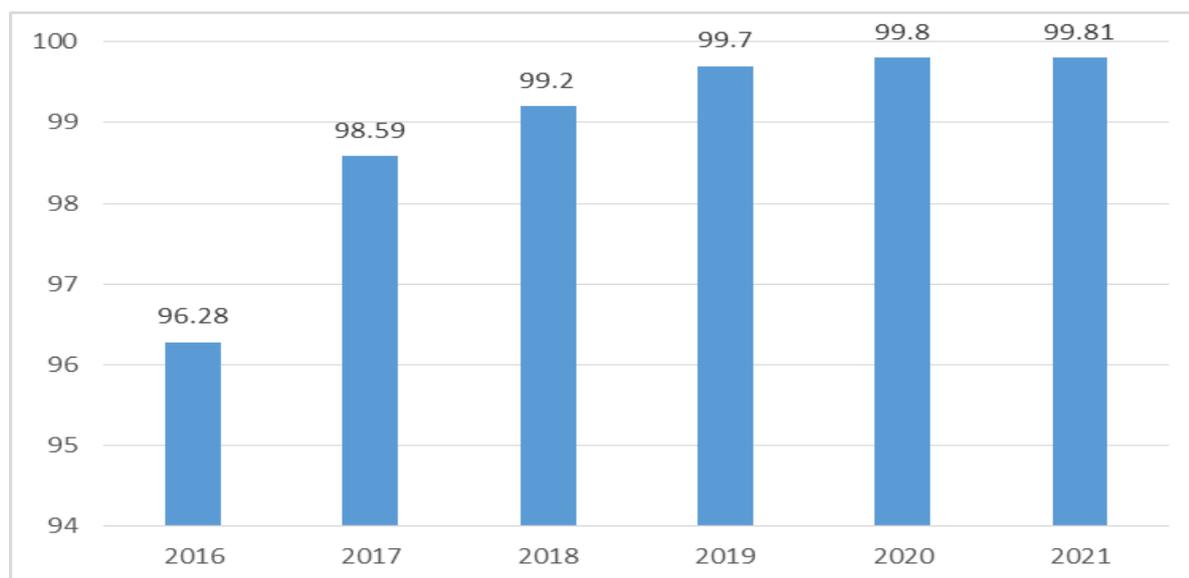
Tabel 2.111.
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2015-2019

Jenis Penerangan	Tahun (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Daya Listrik Terpasang (MW)	432,51	484	524	580	605
Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW)	470	456	470	496	535
Rasio	0,92	1,06	1,11	1,17	1,13

Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2020

2.1.4.3.4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 3,53 %. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 1.367.417 Rumah Tangga. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat dilihat pada gambar 2.76.



Sumber : Statistik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Gambar 2.76. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2020

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 % melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

2.2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2021 TERHADAP RKPA TAHUN 2021

Capaian Indikator Makro Aceh Tahun 2021 masih dipengaruhi oleh mewabahnya virus covid-19 di Aceh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa beberapa bagian dari indikator makro yang diproyeksikan pada Tahun 2021 dalam RKPA Tahun 2021 tercatat sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target (notifikasi warna hijau), sedangkan sisanya adalah sebanyak 4 (empat) indikator lain tidak tercapai targetnya di tahun 2021 (notifikasi warna kuning). Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.215.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 masih di bawah target RKPA 2021. Target pertumbuhan ekonomi Aceh yang ditetapkan dalam RKPA adalah sebesar 3,50 persen namun realisasi dalam rilis BPS sebesar 2,79 persen atau kurang 0,71 persen terhadap target RKPA 2021. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan

tertinggi diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 19,51 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,57 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 6,11 persen dan jasa keuangan sebesar 5,08 persen. Namun meskipun belum mencapai target RKPA 2021, jika di lihat dalam angka nasional pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata nasional dimana pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 3,69 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun 2021 tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang mana besarnya dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat berpengaruh terhadap melemahnya laju pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,06 persen, diikuti oleh perdagangan dan reparasi mobil motor sebesar 14,30 persen, administrasi pemerintah sebesar 10,30 persen, konstruksi sebesar 9,90 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,65 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 71,22 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 48,19 persen, hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kelompok komoditas bahan bakar mineral yaitu batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya. Selanjutnya pertumbuhan diikuti pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,12 persen, hal ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBA dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,16 persen, kondisi pandemi COVID-19 yang melandai dan masyarakat yang sudah banyak melakukan aktivitas diluar rumah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan pada komponen ini. Komponen PMTB juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,38 persen, terutama pada subkomponen nonbangunan yaitu dipengaruhi oleh pengadaan barang modal berupa mesin-mesin pendukung pembangunan pembangkit listrik. Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dan impor luar negeri mengalami penurunan masing-masing 3,98 persen dan 10,06 persen. Berkurangnya kegiatan partai maupun beberapa lembaga non profit lainnya pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi faktor utama menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT.

Tingkat kemiskinan Aceh yang ditetapkan dalam RKPA Tahun 2021 sebesar 15,50 persen tidak tercapai. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Kemiskinan Aceh kondisi September 2021 tercatat sebesar 15,53 persen.

Tingkat kemiskinan Aceh belum tercapai masih dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam kurun waktu 2018-2021 tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,15 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2021 ini berada cukup jauh di

atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 9,71 persen. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 16,35 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 833,91 ribu orang (kondisi September).

Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan Aceh September 2021 antara lain (BPS Aceh, 2021):

1. Sebagian besar penduduk Aceh bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain kondisi sektor pertanian di Aceh pada September 2021 belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan.
2. Luas panen padi di Aceh mengalami penurunan sebesar 40,2 persen yaitu dari 45.230,45 hektar menjadi 27.037,8 hektar. Demikian juga dengan produksi padi yang juga mengalami penurunan sebesar 39,3 persen dari 250.989,71 Ton-GKG menjadi 152.260,69 Ton-GKG.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum terjadi peningkatan namun pada sub sektor tanaman pangan pada September 2021 yang sebesar 96,56, lebih rendah dibanding Maret 2021 sebesar 99,13.
4. Konsumsi rumah tangga juga masih belum sepenuhnya stabil dimana sisi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Triwulan I sd III 2021 terhadap Triwulan I sd III 2021 c to c masih berkontraksi (-0,66%).
5. Berdasarkan data progres penyaluran Bansos sembako alokasi Juli-September 2021 per 2 Oktober 2021 baru tersalur 70,2% dari pagu KPM. Demikian juga yang tergambar melalui Susenas September 2021 dimana terjadi penurunan persentase rumah tangga penerima program sembako pada khususnya pada desil 1.
6. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021 masih terdapat sekitar 207 ribu penduduk usia kerja di Aceh yang terdampak Covid-19 baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja dan lainnya

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,323. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,324. Meskipun Gini Ratio Aceh di tahun 2021 belum mencapai target, namun jika di lihat dalam angka nasional Provinsi Aceh sudah lebih baik dari targetnya yaitu sebesar 0,381. Semakin besar nilai Gini Ratio semakin baik ketimpangannya dengan kata lain semakin tinggi koefisien gini maka semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh, target Tingkat Pengangguran Terbuka yang sudah ditetapkan dalam RKPA 2021 tidak tercapai, namun dalam tahun 2021 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS sebesar 6,30 persen dengan jumlah penduduk menganggur tercatat sejumlah 158.857 jiwa. Secara nasional, TPT Aceh berada

di bawah rata-rata TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, TPT Aceh tahun 2021 turun sebesar 0,29 persen. Dilihat dari tingkat Pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada tingkat Pendidikan SMK diantara tingkat Pendidikan lainnya atau sebesar 10,55 persen dan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,87 persen. Dilihat dengan karakteristik penduduk bekerja di Aceh yaitu sebesar 36,13 persen penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan sebesar 35,57 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaiannya sesuai dengan target RKPA 2021 (notifikasi hijau), namun pencapaian IPM tahun 2021 masih di bawah capaian nasional. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas Kesehatan, Pendidikan maupun pengeluaran per kapita.

Tingkat inflasi yang dapat dikendalikan pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,24 persen dan capaiannya sangat baik karena di bawah target RKPA Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 4,00 persen. Namun capaian tingkat inflasi masih di bawah rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (1,69 persen) inflasi tercatat menurun sebesar 1,35 poin, hal ini menunjukkan pengendalian inflasi masih relatif baik.

Tabel 2.112.
Capaian Indikator Tahun 2021 Terhadap
Target RKPA 2021

NO	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi 2021	Capaian 2021	
			2018	2019	2020		Aceh	Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61	4,14	(0,37)	3,50	2,79	3,69
2	Tingkat Kemiskinan	%	15,68	15,01	15,43	15,50	15,53	9,71
3	Indeks Gini (Gini Ratio)	Indeks	0,318	0,321	0,319	0,313	0,323	0,381
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34	6,17	6,59	5,60	6,30	6,49
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,19	71,90	71,99	72,15	72,18	72,29
6	Tingkat Inflasi	%	1,84	1,69	3,59	4,00	2,24	1,87

Sumber: BPS, 2022

Keterangan : Hijau : tercapai

Kuning : tidak tercapai

2.2.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 TERHADAP RKPA TAHUN 2021

Capaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Kabupaten Aceh Utara. Jika di bandingkan dengan tahun 2020 peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di hamper seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terpuak akibat pandemi covid-19 yang muncul di seluruh dunia tidak terkecuali dengan Aceh dan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, dimana terdapat 13 kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun atau minus. Berdasarkan target RKPA Tahun 2021 terdapat 8 kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang tumbuh sebesar 5,67 persen sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara yang turun sebesar 0,55 persen.

Tingkat kemiskinan di Aceh Kondisi Maret 2021 mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan dengan perbaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota dan pencapaiannya memenuhi target RKPA 2021. Sesuai dengan target RKPA 2021 terdapat 9 (Sembilan) kabupaten/kota yang tercapai sedangkan 14 (empat belas kabupaten/kota belum tercapai targetnya. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 20,36 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Banda Aceh sebesar 7,61 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 (kondisi Agustus 2021) belum memenuhi target RKPA 2021, terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota yang capaian realisasinya sesuai dengan target RKPA 2021 sedangkan 11 (sebelas) kabupaten/kota targetnya tidak tercapai. TPT tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 11,16 persen sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sebesar 1,24 persen.

Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021 terhadap RKPA 2021 yang tercapai (notifikasi hijau) hanya 6 Kabupaten/Kota. Terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat capaian IPM di atas rata-rata Aceh, dengan tingkat capaian IPM tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 85,17 persen dan terendah di Kota Subulussalam yaitu sebesar 65,27 persen.

Tabel 2.113.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota
Tahun 2021 Terhadap Target RKPA Tahun 2021

NO	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tahun 2021							
		Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Pembangunan Manusia	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

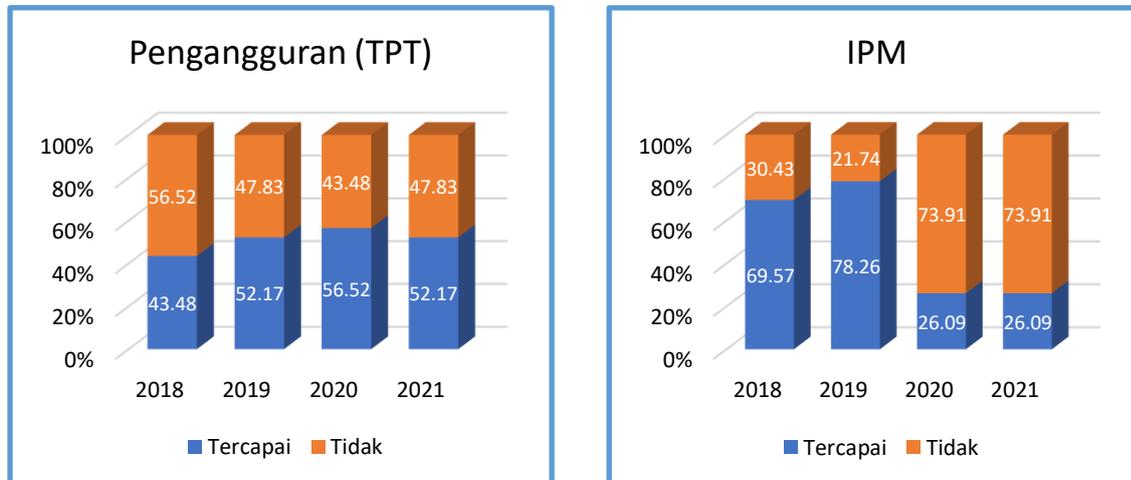
NO	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tahun 2021							
		Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Pembangunan Manusia	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Simeulue	3,85	2,85	18,67	18,98	4,00	5,71	66,69	66,41
2	Aceh Singkil	3,50	3,90	20,90	20,36	9,04	8,36	70,38	69,22
3	Aceh Selatan	3,48	2,46	12,42	13,18	5,70	6,46	67,67	67,44
4	Aceh Tenggara	3,48	1,48	12,94	13,41	1,38	6,43	70,64	69,44
5	Subulussalam	3,61	3,87	14,18	17,65	7,08	6,26	68,73	65,27
6	Pidie Jaya	2,63	2,03	15,42	19,55	2,65	3,57	74,07	73,60
7	Banda Aceh	4,29	5,53	18,52	7,61	8,50	8,94	72,35	85,71
8	Aceh Timur	3,57	1,94	13,71	14,45	7,98	7,13	74,07	67,83
9	Aceh Tengah	3,64	3,21	19,83	15,26	7,41	2,61	71,27	73,37
10	Aceh Barat	4,01	5,67	13,47	18,81	4,21	7,09	73,61	71,67
11	Aceh Besar	3,05	2,44	17,48	14,05	8,39	7,70	70,38	73,58
12	Pidie	3,80	2,63	16,40	19,59	3,18	7,28	67,17	70,70
13	Bireuen	0,92	4,13	20,51	13,25	0,71	4,32	67,65	72,33
14	Aceh Utara	3,68	(0,55)	13,18	17,43	5,94	8,31	70,15	69,46
15	Aceh Barat Daya	4,63	2,88	17,76	16,34	5,81	4,04	70,26	66,99
16	Gayo Lues	3,21	2,32	12,56	19,64	3,85	1,84	70,55	67,56
17	Aceh Tamiang	3,58	0,88	19,08	13,34	0,69	5,87	74,30	69,48
18	Nagan Raya	3,43	5,34	19,26	18,23	4,33	4,99	73,79	69,31
19	Aceh Jaya	3,49	2,59	6,83	13,23	6,25	3,47	86,24	69,84
20	Bener Meriah	4,52	3,15	15,20	19,16	3,60	1,24	76,88	73,27
21	Sabang	3,65	2,67	9,76	15,32	7,93	3,56	78,41	76,11
22	Langsa	3,43	4,23	10,91	10,96	12,75	7,21	78,81	77,44
23	Lhokseumawe	3,03	3,84	17,73	11,16	7,55	11,16	65,36	77,57
24	Aceh	3,50	2,79	15,50	15,33	5,60	6,30	72,15	72,18

Sumber : BPS Aceh

Keterangan : Hijau : Tercapai
Kuning : Tidak tercapai

Rata-rata ketercapaian target makro RKPA dalam tahun 2018-2021 di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di atas rata-rata 50 persen antara lain terhadap indikator tingkat pengangguran

terbuka, sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat ketercapaiannya di bawah 50 persen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.77.



Gambar 2.77. Rata-Rata Ketercapaian Target Makro Kabupaten/Kota dalam RKPA Selama Tahun 2018-2021 (dalam persentase)

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6 kabupaten/kota berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi di Aceh, namun tahun 2019 menurun menjadi 3 kabupaten/kota kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1 kabupaten saja. Pada tahun 2021 ketercapaiannya meningkat menjadi 8 kabupaten/kota. Pencapaian target tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebanyak 7 kabupaten/kota dan pada tahun 2019 menurun menjadi 6 kabupaten/kota, pada tahun 2020 meningkat menjadi 13 kabupaten/kota, namun pada tahun 2021 pencapaiannya menurun menjadi 9 kabupaten/kota saja.

Pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebanyak 10 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 12 kabupaten/kota dan pada tahun 2020 meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 13 kabupaten/kota, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 12 kabupate/kota. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2018 sebanyak 16 kabupaten/kota, meningkat pada tahun 2019 menjadi 18 kabupaten/kota dibandingkan, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 6 kabupaten/kota saja. Demikian pula pada tahun 2021 kabupaten/kota yang mencapai target IPM tercatat hanya 6 kabupaten/kota terhadap proyeksi RKPA Tahun 2021.

2.2.3 Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

2.2.3.1 Realisasi Pendanaan

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar Rp. 13.948.381.469.096,- atau sebesar 99,59 persen dari target RKPA Tahun 2021 sebesar Rp.

14.006.275.954.424,-. Realisasi pendapatan ini menurun jika dibandingkan dengan capaian Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester II Tahun 2020 (audited) sebesar Rp. 14.439.920.557.021,- dan capaian realisasi pendapatan Tahun 2019 (audited) yang tercatat sebesar Rp. 15.752.800.901.652.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Aceh Tahun 2021 mencapai Rp. 13.683.574.081.222,- atau 92,20 persen dari target RKPA Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 14.841.275.954.424,- dan nilai capaian realisasi ini lebih besar dari. realisasi belanja Aceh Tahun 2020 (audited) mencapai Rp. 9.899.914.199.650,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 tersebut menyebabkan terjadinya surplus terhadap anggaran sebesar Rp 264.807.387.875,-. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.114.

Tabel 2.114.
Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021 Rp	Realisasi 2021				Jumlah Realisasi	
			Semester I		Semester II		Tahun 2021	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Daerah	14.006.275.954.424	3.343.191.815.045	23,87	10.605.189.654.051	75,72	13.948.381.469.096	99,59
2	Belanja Daerah	14.841.275.954.424	2.640.195.315.649	17,79	11.043.378.765.573	74,41	13.683.574.081.222	92,20
3	Surplus/Defisit	(835.000.000.000)	702.996.499.396		(438.189.111.522)		264.807.387.875	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah),2021

2.2.3.2 Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2021 diproyeksikan menurun sebesar 0,09 persen dari RKPA Tahun 2021 yang sebesar Rp. 15.457.220.461.974. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2021 terhadap target RKPA tahun 2021 mencapai 99,59 persen. Jumlah realisasi pendapatan tertinggi berasal dari Dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 11.431.169.265.498,- atau sebesar 81,95 persen dari total pendapatan Aceh, diikuti oleh pendapatan asli Aceh sebesar Rp. 2.505.881.104.691,- (17,97 persen) dan lain-lain pendapatan Aceh sebesar Rp.11.331.098.907,- (0,08 persen).

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase Pendapatan Asli Aceh masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan/Penerimaan

Aceh yaitu sebesar 16,38 persen, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
- Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

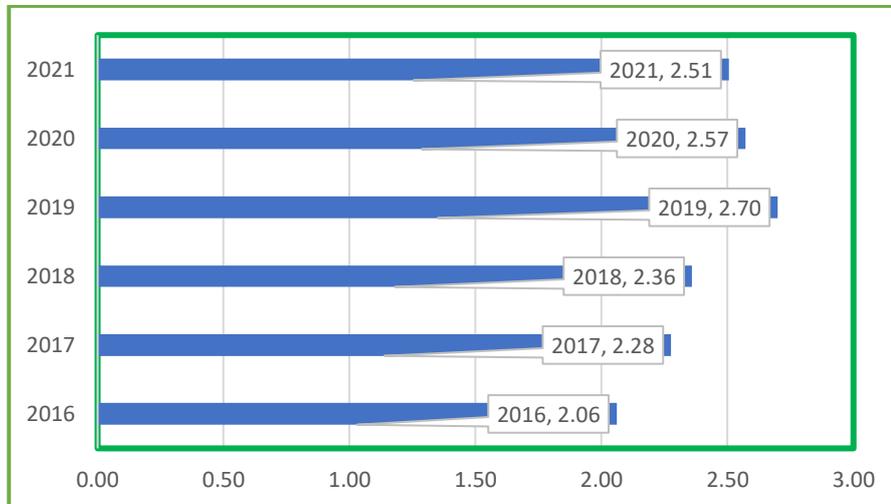
Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2021 mencerminkan bahwa keuangan Aceh masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen "rendah sekali") atau sebesar 16,38 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Semester II tahun 2021 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 17,97 persen dari total Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah sekali.

Tercatat pada Semester II Tahun 2021 dari target RKPA Tahun 2021, pendapatan dari retribusi Aceh merupakan sektor yang masih sangat rendah perannya dalam kontribusi realisasi Pendapatan Aceh atau sebesar 0,33 persen. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan, dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel 2.115.
Realisasi Pendapatan RKPA Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021	Realisasi Tahun 2021				Jumlah Realisasi Tahun 2021 (Unaudited)	
			Semester I		Semester II		(Rp)	%
			(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	4	5	6	7
I	PENDAPATAN ASLI ACEH	2.294.904.942.424	539.976.461.540	23,53	1.965.904.643.151	85,66	2.505.881.104.691	109,19
I.1	Pajak Aceh	1.285.757.350.499	481.934.689.210	37,48	1.047.675.628.898	81,48	1.529.610.318.108	118,97
I.2	Retribusi Aceh	12.133.554.700	2.223.295.562	18,32	6.083.808.118	50,14	8.307.103.680	68,46

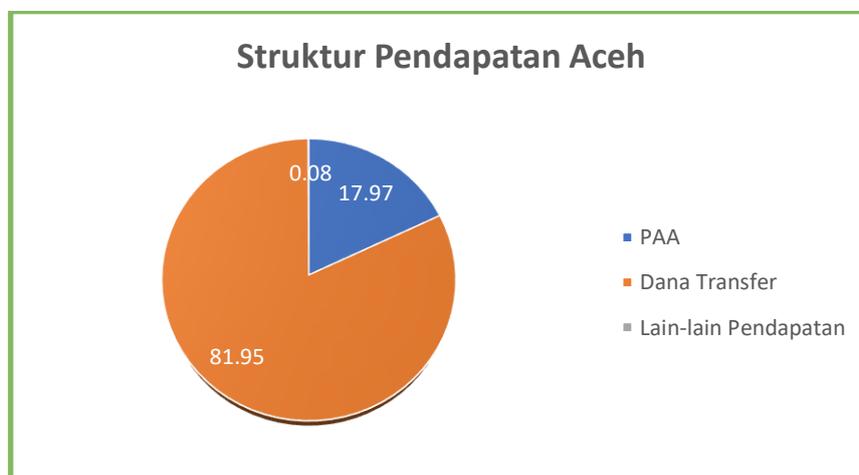
dibandingkan dengan tahun 2020 (audited) yang besarnya mencapai Rp. 2.505.881.104.691. Kontribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2021 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 61,04 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2021.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah)

Gambar 2.78. Pendapatan Asli Aceh Tahun 2016-2021 (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2021 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 81,95 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 17,97 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,08 persen. Gambar 2.79 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2021.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah) 2021

Gambar 2.79. Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2021

2.2.3.3 Realisasi Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 jenis belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur jenis belanja menjadi 4 jenis belanja.

Realisasi Belanja Aceh pada Semester II tahun 2021 (sampai dengan periode pelaporan) mencapai 92,18 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Operasi merupakan belanja dengan capaian realisasi tertinggi yaitu sebesar 100,60 persen terhadap proyeksi RKPA tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.116.

Tabel 2.116.
Perbandingan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi				Jumlah Realisasi	
		2021	Semester I		Semester II		Rp	%
		Rp	Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BELANJA OPERASI	8.568.932.037.593	1.799.940.552.331	21,01	6.820.521.881.994	79,60	8.620.462.434.326	100,60
2	BELANJA MODAL	2.950.259.081.497	249.963.489.946	8,47	1.974.592.416.546	66,93	2.224.555.906.492	75,40
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.220.770.552	409.571.890	0,51	2.500.000	0,00	412.071.890	0,51
4	BELANJA TRANSFER	3.241.864.064.782	589.881.701.482	18,20	2.244.637.843.273	69,24	2.834.519.544.755	87,43
JUMLAH BELANJA		14.841.275.954.424	2.640.195.315.649	17,79	11.039.754.641.813	74,39	13.679.949.957.463	92,18

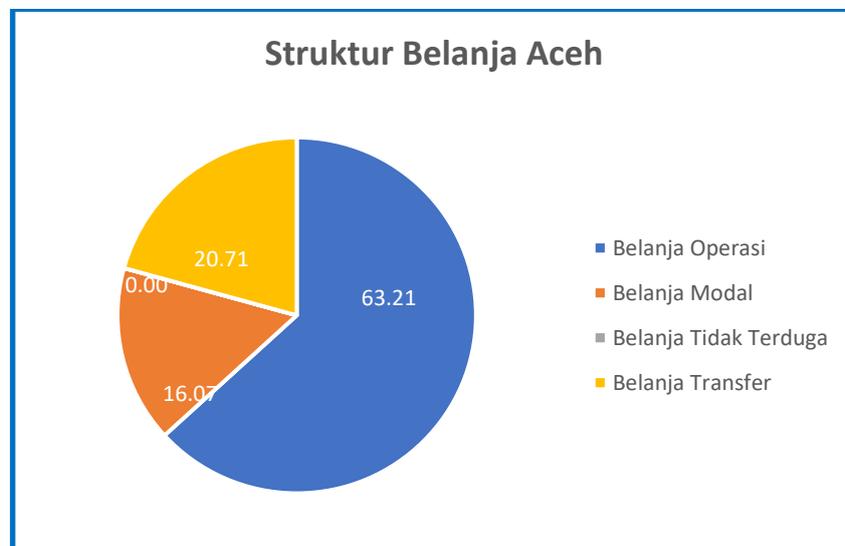
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah) 2021

Jumlah realisasi Belanja Aceh Tahun 2021 sebesar Rp. 13.679.949.957.463 atau mencapai 92,18 persen dari proyeksi RKPA 2021 yang ditetapkan sebesar Rp.14.841.275.954.424,-. Jumlah realisasi belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 8.620.462.434.326,- atau sebesar 100,60 persen, Belanja Modal sebesar Rp. 2.224.555.906.492,- atau sebesar 75,40 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 412.071.890,- atau sebesar 0,51 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp. 2.834.519.544.755,- atau sebesar 87,43 persen terhadap proyeksi RKPA 2021.

Dari gambaran realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 masih kurang optimal, hal ini terlihat pada realisasi belanja modal tercatat hanya sebesar 75,40 persen dari target RKPA, pada umumnya disebabkan oleh

proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat dan membutuhkan waktu menjadi penyebab penyerapan belanja modal cenderung rendah.

Berdasarkan realisasi semester II tahun 2021, struktur realisasi belanja Aceh didominasi oleh belanja operasi (63,21 persen), diikuti oleh belanja transfer (20,72 persen), belanja modal (16,26 persen), dan belanja tidak terduga (0,003 persen).



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah), 2021

Gambar 2.80. Struktur Belanja Aceh Tahun 2021

2.2.3.4 Realisasi Pembiayaan

Sampai dengan semester II tahun 2021, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 3.668.874.466.386 berasal dari penggunaan SILPA Tahun lalu dari sisi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi dari pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pembentukan dana cadangan dan realisasi penyertaan modal daerah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel 2.117. Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2021

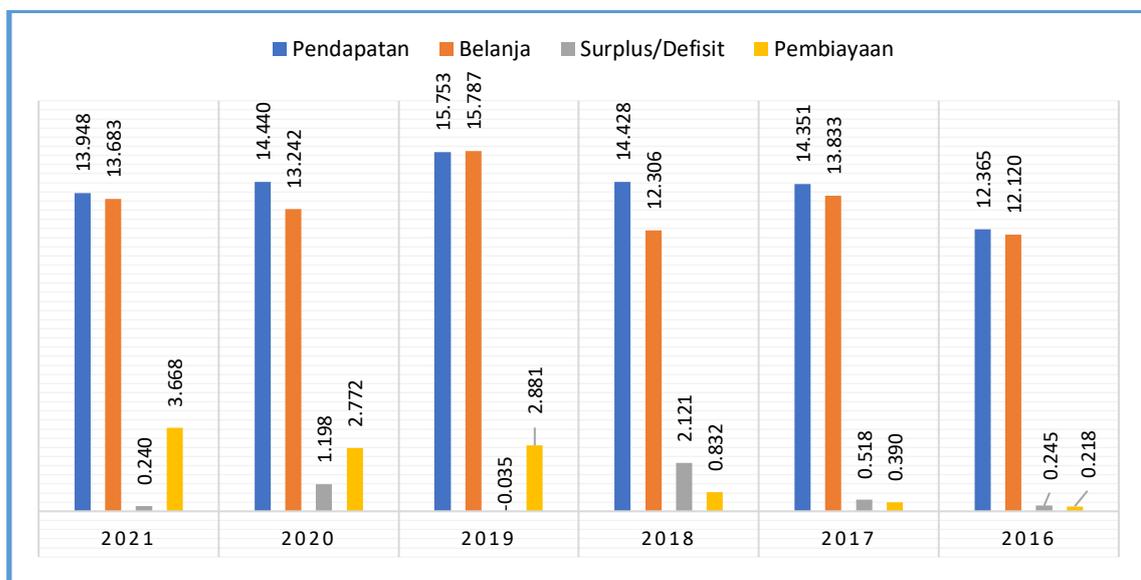
No	Jenis Belanja	Target 2021 Rp	Realisasi 2021				Jumlah Realisasi	
			Semester I		Semester II		Tahun 2021	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000	3.969.617.354.782	441,07	485.820.813	0,05	3.970.103.175.595	441,12
3.1.1	Penggunaan SILPA	900.000.000.000	3.969.617.354.782	441,07	485.820.813	0,05	3.970.103.175.595	441,12

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000	-	-	301.228.709.209	91,99	301.228.709.209	463,43
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000		-	59.791.509.209	91,99	59.791.509.209	91,99
	Penyertaan Modal Daerah				241.437.200.000		241.437.200.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	835.000.000.000	3.969.617.354.782	475,40	(300.742.888.396)	(36,02)	3.668.874.466.386	(22,31)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah) 2021

2.2.3.5 Trend APBA

Berdasarkan data realisasi APBA kurun waktu 2016-2021, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2016-2020 audited, 2021 angka sementara)

Gambar 2.81. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

Dari gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan pendapatan daerah, namun pendapatan mengalami penurunan mulai di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 15,753 triliun sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 12,365 triliun. Trend belanja daerah mengalami fluktuatif, realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2016. Trend realisasi surplus menunjukkan fluktuatif, defisit terjadi pada tahun 2019. Demikian pula dengan Pembiayaan daerah netto juga menunjukkan trend yang fluktuatif, pada kurun tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 pembiayaan daerah netto menunjukkan penurunan namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan kembali.

2.2.3.6 Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Jenis belanja yang dievaluasi hanya Belanja Operasi dan belanja Modal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021. Penentuan predikat, ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah diatur seperti Tabel 2.118

Tabel 2.118.
Kriteria Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	T
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR

2.2.3.7 Capaian Anggaran

Target anggaran RPJMA 2017-2022 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, dengan target alokasi anggaran sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 48.358.533.415.075, dan target alokasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp. 14.841.275.954.424,- dengan tingkat realisasi keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar 92,18 persen dengan kriteria nilai sangat tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan anggarannya sudah optimal dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2021 merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJMA 2017-2022.

Secara lebih terperinci mengenai kondisi penggunaan anggaran untuk membiayai program/kegiatan selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119.
Tingkat Capaian Realisasi RPJMA (2018 s.d. 2022)

No	Uraian	Target Anggaran RPJMA 2018 s.d 2022	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2020	Realisasi RKPA Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s.d 2021
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah (Rp)	48.358.533.415.075	14.841.275.954.424	24.068.687.209.491	13.679.949.957.463	37.748.637.166.953
Persentase (%)	100	30,69	49,77	92,18	78,06

No	Uraian	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA 2018 s.d 2021	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Persentase (%)	75,77	92,18	86,74	78,06
	Predikat Kinerja	T	ST	T	T

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah),2021

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%)

S = Sedang (66% ≤ 75%)

R = Rendah (51% ≤ 65%)

SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Ditinjau secara lebih spesifik dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 92,18 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.
- Rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 75,77 persen dengan nilai kriteria Tinggi.
- Urusan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat realisasi sebesar 111,75 persen dari Target Anggaran RKPA Tahun 2021, sedangkan urusan dengan nilai realisasi terendah adalah Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang hanya mencapai 51,03 persen terhadap Target Anggaran RKPA Tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat realisasi anggaran pada RKPA Tahun 2021 berdasarkan masing-masing urusan/bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120.
Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2021 Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		7.293.845.018.446	8.150.787.457.639	47,89	111,75	SR	ST
1	1.01	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan	3.078.566.642.519	3.818.515.779.705	31,93	124,04	SR	ST
2	1.02	Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan	2.362.533.773.378	2.429.814.950.278	21,99	102,85	SR	ST
3	1.03	Usuran pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1.475.532.495.179	1.191.803.854.546	78,96	80,77	T	T
4	1.04	Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	177.757.511.512	517.059.755.568	54,49	290,88	R	ST
5	1.05	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	96.225.136.589	84.475.162.280	0,00	87,79	ERR	T
6	1.06	Usuran Pemerintahan Bidang Sosial	103.229.459.269	109.117.955.262	237,04	105,70	ST	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
					II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		817.959.593.670
7	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	40.587.935.953	37.799.323.156	58,68	93,13	R	ST
8	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.310.259.333	16.126.597.530	71,83	79,40	S	T
9	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	39.711.833.268	37.190.224.108	-	93,65	ERR	ST
10	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	13.740.905.219	11.167.643.237	87,91	81,27	T	T
11	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	112.046.387.287	101.346.621.149	99,27	90,45	ST	ST
12	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.344.803.617	13.406.186.707	101,52	100,46	ST	ST
13	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.600.271.300	23.890.559.791	77,69	65,27	T	S
14	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
					15	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	97.153.161.084
16	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	40.613.002.393	37.630.074.991	128,35	92,66	ST	ST
17	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	41.441.679.057	49.945.337.048	19,57	120,52	SR	ST
18	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	33.096.006.715	45.273.117.182	111,11	136,79	ST	ST
19	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	177.083.700.752	152.380.944.960	63,97	86,05	R	T
20	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	-	357.777.804	-	#DIV/O!	ERR	#DIV/O!
21	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	-	297.177.479	-	#DIV/O!	ERR	#DIV/O!
22	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	55.846.142.322	105.439.746.628	-	188,80	ERR	ST
23	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	95.253.005.370	105.249.294.104	-	110,49	ERR	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
					24	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.130.500.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		809.063.246.872	652.227.659.116	66,99	80,62	S	T
25	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	176.304.617.258	137.015.863.977	139,92	77,72	ST	T
26	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	28.996.830.704	28.771.187.623	-	99,22	ERR	ST
27	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	434.201.785.832	337.977.864.155	206,50	77,84	ST	T
28	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	64.335.200.000	59.188.742.216	-	92,00	ERR	ST
29	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	34.305.870.607	35.933.643.932	98,87	104,74	ST	ST
30	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	37.952.824.471	11.675.420.115	90,66	30,76	ST	SR
31	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	19.881.118.000	34.504.263.586	-	173,55	ERR	ST
32	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	13.085.000.000	7.160.673.512	-	54,72	ERR	R

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021 (ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		514.821.650.445	435.163.200.872	72,89	84,53	S	T
33	4.01	Sekretariat Daerah	296.321.961.252	238.591.127.854	48,33	80,52	SR	T
34	4.02	Sekretariat DPRD	218.499.689.193	196.572.073.018	97,44	89,96	ST	T
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		4.830.209.878.406	3.298.683.160.570	68,33	68,29	S	S
35	5.01	Perencanaan	113.539.055.288	58.478.676.995	71,79	51,51	S	R
36	5.02	Keuangan	4.442.664.356.754	3.000.320.320.283	-	67,53	ERR	S
37	5.03	Kepegawaian	40.912.263.400	26.005.841.415	88,60	63,56	T	R
38	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	201.327.998.657	185.325.293.861	114,61	92,05	ST	ST
39	5.05	Penelitian dan Pengembangan *)	2.550.000.121	2.550.144.956	-	100,01	ERR	ST
40	5.06	Penghubung	29.216.204.186	26.002.883.059	66,65	89,00	S	T
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		49.672.353.975	39.829.994.928	96,85	80,19	ST	T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran RKPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2021	
					(%)		(ST/T/S/R/SR)	
					(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
41	6.01	Inspektorat Daerah	49.672.353.975	39.829.994.928	96,85	80,19	ST	T
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		30.665.691.744	29.041.145.425	92,23	94,70	ST	ST
42	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	30.665.691.744	29.041.145.425	92,23	94,70	ST	ST
VIII	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		495.038.520.866	252.639.839.350	92,85	51,03	ST	R
43	9.01	Kekhususan Aceh						
		Pendidikan	-	-				
		Kebudayaan	30.584.830.099	10.604.043.013	55,96	34,67	R	SR
		Keagamaan	455.187.506.431	209.573.417.958	91,97	46,04	ST	SR
		Kesatuan dan Perdamaian	9.266.184.336	32.462.378.379	135,06	350,33	ST	ST
Jumlah			14.841.275.954.424	13.679.949.957.463				
Rata-Rata					75,77	92,18		
Predikat Kinerja							T	ST

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)2021

Ket :

ST = (Sangat tinggi / $91\% \leq 100\%$)

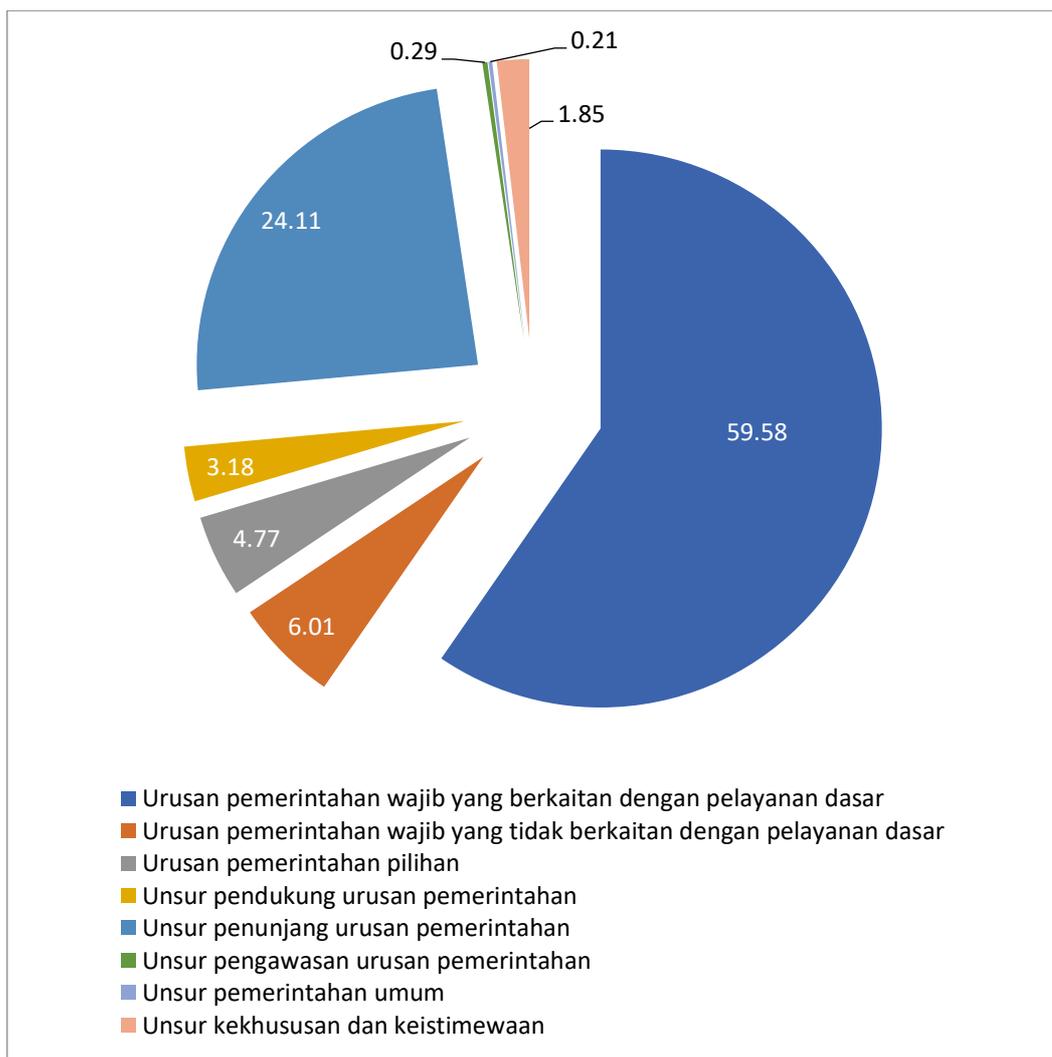
T = (Tinggi / $76\% \leq 90\%$)

S = (Sedang / $66\% \leq 75\%$)

R = (Rendah / $51\% \leq 65\%$)

SR = (Sangat Rendah / $\leq 50\%$)

Berdasarkan strukturnya, realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2021 yang terbesar adalah pendanaan untuk bidang urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 8,151 Triliun atau sebesar 59,58 persen dari total realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2021, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urutan kedua adalah urusan penunjang urusan pemerintahan dengan tingkat capaian sebesar 24,11 persen atau sebesar Rp. 3,299 Triliun, meliputi bidang Perencanaan, bidang Keuangan, bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan serta bidang penghubung. Ketiga adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat capaian sebesar 6,01 persen atau sebesar Rp. 0,822 Triliun, meliputi bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada gambar 2.82.



Gambar 2.82. Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2021 (%)

Tingkat Penggunaan anggaran RPJMA disajikan pada Gambar 2.82. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan RPJMA mencapai 85,24 persen dengan nilai kriteria Tinggi, sedangkan rata-rata capaian kinerja anggaran program/kegiatan mencapai 86,74 persen dengan nilai kriteria Tinggi. Jumlah anggaran RPJMA menggunakan pagu RPJMA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Sampai dengan tahun 2021, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan dengan tingkat realisasi RPJMA tertinggi yaitu sebesar 244,05 persen dan Urusan Pemerintahan Pilihan memiliki tingkat realisasi RPJMA terendah atau sebesar 49,76 persen. Sedangkan berdasarkan distribusinya, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan realisasi belanjanya terbesar yaitu

sebesar Rp. 26,015 Triliun atau sebesar 68,92 persen dari total realisasi RPJMA Tahun 2018 s/d 2021.

Capaian realisasi di atas 100 persen dan capaian kinerja memiliki nilai ERR disebabkan RPJMA 2017-2022 tidak dilakukan perubahan karena adanya beberapa peraturan yang berubah seperti (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.121.
Tingkat Capaian Realisasi RPJMA 2018-2022**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		33.355.902.529.973	17.864.168.489.965	8.150.787.457.639	26.014.955.947.605	51,58	77,99	R	T
1	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	9.037.329.629.489	5.296.772.199.117	3.818.515.779.705	9.115.287.978.822	31,93	100,86	SR	ST
2	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	8.923.075.582.655	5.549.301.823.293	2.429.814.950.278	7.979.116.773.571	58,93	89,42	R	T
3	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	10.549.658.138.740	4.440.051.753.563	1.191.803.854.546	5.631.855.608.109	78,96	53,38	T	R
4	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.319.747.211.754	1.891.327.759.536	517.059.755.568	2.408.387.515.104	54,49	72,55	R	S
5	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	667.615.558.285	283.421.828.006	84.475.162.280	367.896.990.286	54,45	55,11	R	R
6	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	858.476.409.051	403.293.126.450	109.117.955.262	512.411.081.712	237,04	59,69	ST	R

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Kinerja Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.805.278.354.535	1.899.962.656.770	821.577.499.563	2.721.540.156.333	68,13	56,64	S	R
7	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	274.539.845.888	90.025.797.281	37.799.323.156	127.825.120.437	58,68	46,56	R	SR
8	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	64.941.974.873	28.961.576.643	16.126.597.530	45.088.174.173	71,83	69,43	S	S
9	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	318.387.976.142	98.664.530.050	37.190.224.108	135.854.754.158	124,44	42,67	ST	SR
10	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	61.951.115.000	20.873.635.429	11.167.643.237	32.041.278.666	87,91	51,72	T	R
11	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	370.006.872.227	72.148.109.713	101.346.621.149	173.494.730.862	99,27	46,89	ST	SR
12	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	83.772.451.436	31.799.547.426	13.406.186.707	45.205.734.133	101,52	53,96	ST	R
13	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	132.740.100.002	96.315.088.917	23.890.559.791	120.205.648.708	77,69	90,56	T	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-				
15	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	1.261.193.154.416	547.867.894.042	82.550.757.979	630.418.652.021	77,61	49,99	T	SR
16	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	225.289.248.364	110.878.682.960	37.630.074.991	148.508.757.951	128,35	65,92	ST	S
17	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	359.951.935.190	106.601.279.850	49.945.337.048	156.546.616.898	19,57	43,49	SR	SR
18	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	138.171.108.465	62.871.677.555	45.273.117.182	108.144.794.737	111,11	78,27	ST	T
19	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	686.544.376.919	323.074.101.288	152.380.944.960	475.455.046.248	63,97	69,25	R	S
20	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	-	-	357.777.804	357.777.804		-	ERR	ERR
21	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	-	-	297.177.479	297.177.479		-	ERR	ERR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	305.847.910.050	163.057.434.356	105.439.746.628	268.497.180.985	0,00	87,79	ERR	T
23	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	319.424.616.241	102.401.613.231	105.249.294.104	207.650.907.335	0,00	65,01	ERR	S
24	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	202.515.669.322	44.421.688.030	1.526.115.709	45.947.803.739	0,00	22,69	ERR	SR
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5.945.005.436.590	2.306.231.512.257	652.227.659.116	2.958.459.171.373	133,99	49,76	ST	SR
25	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.400.830.629.867	580.206.968.239	137.015.863.977	717.222.832.216	139,92	51,20	ST	R
26	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	563.588.553.777	136.454.189.920	28.771.187.623	165.225.377.543	-	29,32	ST	SR
27	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	2.057.443.307.741	913.844.279.438	337.977.864.155	1.251.822.143.593	206,50	60,84	ST	R
28	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	702.933.943.478	272.488.444.738	59.188.742.216	331.677.186.954	-	47,18	ST	SR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	339.305.472.437	157.636.626.410	35.933.643.932	193.570.270.342	98,87	57,05	ST	R
30	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	273.592.638.166	74.021.572.682	11.675.420.115	85.696.992.797	90,66	31,32	ST	SR
31	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	292.237.486.089	74.406.963.084	34.504.263.586	108.911.226.670	-	37,27	ST	SR
32	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	315.073.405.035	97.172.467.746	7.160.673.512	104.333.141.258	-	33,11	ST	SR
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		1.292.995.059.996	714.671.256.534	435.163.200.872	1.149.834.457.406	72,89	88,93	S	T
33	4.01	Sekretariat Daerah	890.762.027.975	477.133.062.002	238.591.127.854	715.724.189.856	48,33	80,35	SR	T
34	4.02	Sekretariat DPRD	402.233.032.021	237.538.194.532	196.572.073.018	434.110.267.550	97,44	107,93	ST	ST
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		1.645.675.078.037	717.545.188.580	3.298.683.160.570	4.016.228.349.149	85,41	244,05	T	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	5.01	Perencanaan	254.873.678.068	94.989.634.152	58.478.676.995	153.468.311.147	71,79	60,21	S	R
36	5.02	Keuangan	393.408.672.824	270.940.090.037	3.000.320.320.283	3.271.260.410.320	-	831,52	ST	ST
37	5.03	Kepegawaian	158.832.921.217	37.537.668.890	26.005.841.415	63.543.510.305	88,60	40,01	T	SR
38	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	790.637.572.338	264.895.600.523	185.325.293.861	450.220.894.384	114,61	56,94	ST	R
39	5.05	Penelitian dan Pengembangan *)			2.550.144.956	2.550.144.956				
40	5.06	Penghubung	47.922.233.590	49.182.194.978	26.002.883.059	75.185.078.037	66,65	156,89	S	ST
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		83.667.489.701	40.617.572.783	39.829.994.928	80.447.567.711	96,85	96,15	ST	ST
41	6.01	Inspektorat Daerah	83.667.489.701	40.617.572.783	39.829.994.928	80.447.567.711	96,85	96,15	ST	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		93.520.170.029	40.679.305.363	29.041.145.425	69.720.450.788	92,23	74,55	ST	S
42	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	93.520.170.029	40.679.305.363	29.041.145.425	69.720.450.788	92,23	74,55	ST	S
VIII	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		1.136.489.296.214	484.811.227.239	252.639.839.350	737.451.066.589	92,85	64,89	ST	R
43	9.01	Kekhususan Aceh								
		Pendidikan		-	-	-				
		Kebudayaan	190.401.709.954	100.297.561.163	10.604.043.013	110.901.604.176	55,96	58,25	R	R
		Keagamaan	906.345.702.510	333.675.694.693	209.573.417.958	543.249.112.651	91,97	59,94	ST	R
		Kesatuan dan Perdamaian	39.741.883.750	50.837.971.383	32.462.378.379	83.300.349.762	135,06	209,60	ST	ST
Jumlah			48.358.533.415.075	24.068.687.209.491	13.679.949.957.463	37.748.637.166.953				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RPJMA (2018 s.d 2022)	Realisasi Capaian Anggaran s/d Tahun 2020 (Audited)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s.d Tahun 2021 (%)		Predikat Capaian Kinerja RPJMA 2018-2022 (ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rata-Rata							86,74	85,24		
Predikat Kinerja									T	T

Sumber: BPKA (diolah),2021

Keterangan :

- ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
- T = Tinggi (76% ≤ 90%)
- S = Sedang (66% ≤ 75%)
- R = Rendah (51% ≤ 65%)
- SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

2.2.3.8 Capaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut di atas, tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Semester II tahun 2021 RKPA sebesar 75,77 persen sedangkan Kinerja capaian RPJMA sampai dengan Semester II tahun 2021 tercatat sebesar 86,74 persen.

Tabel 2.122.

Lebih Detail terkait hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022 dilihat pada tabel 2.122 terlampir.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Aceh menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “Minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas Minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Provinsi/Kabupaten/Kota pada batas waktu yang ditentukan. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi Dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan

SPM bidang urusan pendidikan mencakup 2 (dua) indikator pencapaian yang meliputi sebagai berikut:

1. Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
2. Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.

Berdasarkan Tabel 2.123 diketahui Pemerintah Aceh tahun 2021 menargetkan 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun yang menerima Pendidikan Menengah dan 100% bagi warga dengan usia 4-18 tahun pada pendidikan khusus.

Tabel 2.123.

Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	2021
2.	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.	100%	2021

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 untuk indikator jumlah warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tahun 2021 mencapai 70,03 persen atau sebesar 179.785 orang dari 256.741 orang jumlah warga negara usia 16-18 tahun. Sementara itu untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus, dari jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas sebesar 7.662 orang hanya sebesar 4.275 orang atau sebesar 55.79 persen jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124.

Pencapaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun	256.741 org	70,03%
		Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	179.785 org	
2.	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas	7.662 org	55,79%
		Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam	4.275 org	

	pendidikan Khusus		
--	-------------------	--	--

Lebih rinci pencapaian indikator kinerja SPM bidang urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.125 dibawah ini:

Tabel 2.125.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
		256.741	26.816	129.925	49,39%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	capaian
	1. Buku teks pelajaran	256.741	212.009	44.732	82,58%
	2. Perlengkapan belajar	0	0	0	-
	3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5.006	5.006	0	100.00 %
	4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	126.816	126.816	0	100.00 %
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	13.325	13.122	203	98.48%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	512	511	1	99.80%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3.509	3.370	139	96.04%
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	533	513	20	96.25%
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Kejuruan			

Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	256.741	52.969	203.772	20,63%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	capaian
1. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6.342	6.199	143	97,75%
2. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	208	204	4	98,08%
3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.567	2.567	0	100.00%
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	52,969	52,969	0	100.00%
5. Perlengkapan belajar	0	0	0	-
6. Buku teks pelajaran	52.969	49.764	3.205	93,95%
7. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.783	1.713	70	96,07%
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	221	205	16	92,76%
3 Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			
Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	7,662	4,275	3,387	55,79%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	capaian
1. Perlengkapan belajar	0	0	0	-
2. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	65	48	17	73.85%
3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,260	1,260	0	100.00%
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	4,275	4,275	0	100.00%

5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,005	958	47	95.32%
6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	62	60	2	96.77%
7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	277	255	22	92.06%
8. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	0	0	0	-

2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan dasar pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencakup 2 (dua) indikator pencapaian yaitu 1) Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan dan 2) Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan. Lebih jelas terkait target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126.
Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021
2	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021

Dari Tabel 2.127 diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 untuk jenis Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi mencapai 81,25 persen atau sebesar 130 dari 160 yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi hanya mencapai 15 persen atau sebesar 18.224 dari 121.499 yang direncanakan.

Tabel 2.127.
Sasaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	160	130	81,25%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	121.499	18.224	15%

Lebih detail terkait penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 per jenis layanan SPM dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provins	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
		160	130	30	81,25%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	capaian
	1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0	0	0	-
	2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian	0	0	0	-

	Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)				
	3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	0	0	0	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
		121.499	18.224	103.275	15,00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	capaian
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	0	0	0	-
	2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	121,499	18,224	103,275	15.00%
	3. Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)	0	0	0	-
	4. Tempat Sampah Biologis	0	0	0	-
	5. Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	65	65	0	100.00%
	6. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	0	0	0	-
	7. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	65	65	0	100.00%

Pada tahun 2021 tidak ada kabupaten/kota yang meminta dukungan logistic Kesehatan pada saat terjadi bencana, namun Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan melakukan Sosialisasi Penanggulangan Kejadian Krisis Kesehatan pada 8 desa di 6 kabupaten dengan target 160 orang, namun yang hadir 130 orang.

Untuk indikator pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak dilakukan kajian Epidemiologi Provinsi karena KLB yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya tidak memiliki hubungan epidemiologi yang meluas dengan tidak ada pengajuan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Provinsi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota terhadap dampak KLB yang terjadi di wilayahnya (sesuai dengan PMK Nomor. 4 tahun 2019 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Penanggulangan KLB yang dilakukan Dinas Kesehatan tahun 2021 berdasarkan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) berbasis KLB :

- Keracunan makanan (Kab. Aceh Timur, Kab. Bireuen dan Kab. Pidie)
- Campak (Kab. Bireuen)
- Difteri (4 kasus di Kab. Nagan Raya, 3 kasus di Kota Lhokseumawe, 3 kasus di Kab. Bireuen, 2 kasus di Kota Banda Aceh, dan 2 kasus di Kab. Aceh Timur).

Dalam kondisi pandemi COVID-19 kegiatan pelayanan Kesehatan pada penduduk kondisi KLB tidak dapat dilakukan secara maksimal menyangkut kegiatan pemeriksaan terhadap kontak erat, pengobatan, perawatan termasuk karantina, profilaksis dan Outbreak Respon Immunitation (ORI) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan pelayanan Kesehatan yang dilakukan dalam kajian epidemiologi akan berhubungan langsung dengan massa yang dikhawatirkan penularan COVID-19.

2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Target SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 adalah sebesar 100 persen dengan 2 (dua) indikator pencapaian yang meliputi: 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (lihat Tabel 2.129).

Tabel 2.129.

Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	2021
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	2021

domestik regional lintas kabupaten/ kota	pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		
---	---	--	--

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Urusan yang meliputi: Sub Urusan Air Minum (Tabel 2.129) dan Sub Urusan Air Limbah (Tabel 2.130).

2.3.3.1 Sub Urusan Air Minum

Jenis pelayanan dasar standar teknis perumahan rakyat Pemenuhan kebutuhan layanan dasar Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.130.
Jenis Pelayanan Menurut Permen PUPR No 29/PRT/M/2018

	Provinsi	Kab/Kota
Jenis Pelayanan Dasar	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Penerima Pelayanan Dasar	Penyelenggara SPAM oleh BUMD dan UPTD pada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima layanan Air Minum Curah Lintas kabupaten/kota.	Rumah Tangga, yang diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
Mutu Pelayanan Dasar	Kuantitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rumah Tangga, yang diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari. Kualitas Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan (Kekeruhan, Warna, Rasa, Busa, Bau)	

Untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Air pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Aceh telah merencanakan penyelenggaraan 2 (dua) SPAM Regional Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu :

- SPAM Regional Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara
- SPAM Regional Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar

Sementara itu, realisasi capaian indikator pencapaian SPM Sub Urusan Air Minum yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota sampai Tahun 2021 masih nol persen, hal ini mengingat belum adanya SPAM Regional yang dibangun di Aceh (Lihat Tabel 2.131).

Tabel 2.131.
Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Air Minum Provinsi Aceh Tahun 2021

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	0	0	0	
	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	0	0	0	0%

2.3.3.2 Sub Urusan Limbah

Jenis pelayanan dasar standar teknis perumahan rakyat meliputi Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional lintas kabupaten/kota, dapat kita lihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.132.
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik Kualitas Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah provinsi, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. 	<p>pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.</p>
--	---	--

Target Dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi : 1) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (SPALD-S) dan 2) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/Kawasan/kota (SPALD-T). Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133.

Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Sub Urusan Air Limbah Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (SPALD-S)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik berupa cubluk (penduduk < 25 jiwa/Ha) - Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT (penduduk > 25 jiwa/Ha) 	100 %	2021
2.	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (SPALD-T).	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	100 %	2021

Realisasi capaian indikator kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021 adalah sebesar nol persen, hal ini disebabkan karena tidak adanya SPALD-S/T di Aceh.

Tabel 2.134.
Capaian Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Penanganan Air Limbah Tahun 2021

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			
Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
	0	0	0	
	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian
Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan .	0	0	0	0%
Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman	0	0	0	0%

2.3.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan dasar SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.135.
Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2021
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2021

Sementara itu, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar standar teknis SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Dari Tabel 2.135 diperoleh informasi mutu pelayanan dasar untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi adalah standar jumlah, dimana setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, untuk kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Selanjutnya, untuk Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, mutu pelayanan dasar meliputi standar jumlah, dimana setiap rumah tangga yang terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani dan kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Tabel 2.136.
Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Perumahan Rakyat	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi	<p>Standar jumlah : Setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>Kualitas pelayanan dasar : Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.</p>	Setiap Rumah Tangga korban bencana provinsi yang memenuhi kriteria
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	<p>Standar Jumlah: Setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani</p> <p>Kualitas pelayanan dasar: Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.</p>	Setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi

Untuk capaian indikator SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.137.
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	

	layak huni bagi korban bencana provinsi				
	Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	0
		0	0	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0	0%
4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani	
		0	0	0	0
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	0%
	2. Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	0%

Pemerintah Aceh menyediakan rumah layak huni tidak hanya untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi, namun juga untuk masyarakat Aceh yang masuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2021 tidak ada

bencana skala provinsi dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2017-2022, penyediaan rumah layak huni dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kegiatan Pengembangan Rumah sehat Sederhana difokuskan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan Basis data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dengan target sebanyak 30.000 Unit selama 5 tahun.

Jumlah Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dari tahun 2017 s.d Tahun 2021 adalah sebanyak 10.077 Unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.138.
Rumah Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh dari Tahun 2008 s.d 2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	1.272 unit
2.	2018	0 unit
3.	2019	4.007 unit
4.	2020	4.041 unit
5.	2021	757 unit
TOTAL		10.077 unit

2.3.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi meliputi jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum nprovinsi dengan indikator pencapaian adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi. Lebih jelas terkait target dan penerima layanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi disajikan pada Tabel 2.128.

Tabel 2.139.
Target dan Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi Aceh	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	100%	2021

		perda dan perkada di Provinsi		
--	--	-------------------------------	--	--

Target pencapaian SPM Satpol PP-WH Aceh tahun 2021 yang dapat dilaporkan adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.140.
Target dan Indikator Capaian SPM Satpol PP-WH Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			
		Indikator	Komponen	Nilai	
1.	Standar Operasional Prosedur Pol PP	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda	Tidak ada	0%
2.	Standar Sarana dan Prasarana	Tersedianya Kendaraan Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasi	46 unit	100%
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Perorangan Pol PP	Jumlah Perlengkapan perorangan yang tersedia (handy talky)	34	100%
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Beregu	Jumlah Perlengkapan beregu yang tersedia	0	0%
		Tersedianya Perlengkapan Patroli	Jumlah Perlengkapan patroli yang dimiliki	5 item	100%
		Tersedianya Perlengkapan Penegakan Perda	Jumlah Perlengkapan Penegakan Perda yang dimiliki	9	100%
3.	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota	Persentase Pol PP yang mengikuti Pendidikan Dasar	Jumlah Pol PP yang mengikuti Pendidikan Dasar	0	0%

	Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat	Persentase Pol PP yang mengikuti Diklat Teknis PPNS	Jumlah Pol PP yang mengikuti Diklat Teknis PPNS	0	0%
4.	Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Pemenuhan Penanganan Kerusakan Ringan terhadap Keseluruhan Jumlah Kerusakan Ringan yang ditimbulkan	a. Jumlah kerusakan ringan yang memperoleh penggantian. b. Jumlah Keseluruhan Kerusakan Ringan yang terjadi.	Tidak ada	0%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pertolongan Pertama terhadap Keseluruhan Jumlah Cidera Fisik yang ditimbulkan dari Penegakkan	a. Jumlah Cedera Fisik yang telah diberikan Tindakan pertolongan Pertama. b. Jumlah Keseluruhan Cedera Fisik yang terjadi.	Tidak ada	0%

Realisasi pencapaian SPM Satpol PP dan WH Aceh tahun 2021 yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.141.
Realisasi Capaian SPM Satpol PP-WH Aceh Tahun 2021

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				KET/ Permasalahan
			Indikator	Komponen	Rumus	Nilai	
1.	SOP Satppol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda	Ada atau tidak	0%	Dokumen masih dalam bentuk draf belum disahkan
2.	Standar Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP	Tersedianya Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Operasi yang tersedia	47 unit/61 orang x 100%	75%	Truk 3 unit; kendaraan roda 4 patroli 5 unit; kendaraan roda 2 patroli 18

							unit; kendaraan operasional administratif roda 2 sebanyak 8 unit; mobil tahanan 2 unit; kendaraan operasional perorangan 8 unit; kendaraan operasional penumpang 1 unit; kendaraan double cabin 2 unit
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Perorangan Pol PP	Jumlah Perlengkapan perorangan yang tersedia	34 unit/61 orang x 100%	55%	Handy Talky 34 unit
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Beregu	Jumlah Perlengkapan beregu yang tersedia	0 unit/12 regu x 100%	0%	
			Tersedianya Perlengkapan Patroli	Jumlah Perlengkapan patroli yang dimiliki	5/5 x 100%	100%	Mobil patroli, Toa (pengeras suara), HT, Senter, Jas Hujan
			Tersedianya Perlengkapan Penegakan Perda	Jumlah Perlengkapan Penegakan Perda yang dimiliki	9/9 x 100%	100%	Mobil Dalmas, HT, Borgol, Tongkat T/pentungan, Helm Dalmas, Baju anti huru hara, Tameng, Sarung tangan, papper spray
3.	Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Satpol PP	Persentase Pol PP yang mengikuti Pendidikan Dasar	Jumlah Pol PP yang mengikuti Pendidikan Dasar	0/0x 100%	0%	Recofusing Anggaran menyebabkan kegiatan peningkatan kapasitas Anggota Pol PP dan Linmas tidak terlaksana

			Persentase Pol PP yang mengikuti Diklat Teknis PPNS	Jumlah Pol PP yang mengikuti Diklat Teknis PPNS	0/0 x 100%	0%	
4.	Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Pemenuhan Kerugian Material	Persentase Pemenuhan Penanganan Kerusakan Ringan terhadap Keseluruhan Jumlah Kerusakan Ringan yang ditimbulkan	a. Jumlah Kerusakan Ringan yang memperoleh Penggantian b. Jumlah Keseluruhan Kerusakan Ringan yang terjadi	0/0 x 100%	0%	Tidak dianggarkan
		Pemenuhan Pelayanan Pengobatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pertolongan Pertama terhadap Keseluruhan Jumlah Cidera Fisik yang ditimbulkan dari Penegakkan	a. Jumlah Cedera Fisik yang telah diberikan Tindakan pertolongan pertama b. Jumlah Keseluruhan Cedera Fisik yang terjadi	0/0 x 100%	0%	

Capaian indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.142.
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Trantibum Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
	Jumlah yang Harus Dilayani:	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
		0	0	0	0

		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0%
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			
	Jumlah yang Harus Dilayani:	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
		1.602	1.602	0	100%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	1.602	1.602	0	100%
	2. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	1.602	1.602	0	100%
	3. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	1.602	1.602	0	100%

2.3.6 Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang

tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.143.
Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100 %	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	2021
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100 %	2021

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	2021
----	---	--	-------	------

Sementara itu, dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Aceh mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.144.
Target Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2021
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	2021

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	2021
---	---	--	-------	------

Dari Tabel 2.134 diketahui capaian indikator kinerja SPM Bidang Urusan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebesar 99.03 persen atau 6.101 orang dari jumlah total yang harus dilayani sebesar 6.161 orang;
2. Capaian indikator jumlah lanjut usia telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebesar 82.50 persen atau 858 orang dari jumlah total yang dilayani sebanyak 1.040 orang;
3. Capaian indikator jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen;
4. Capaian indikator jumlah penyandang disabilitas telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen;
5. Capaian indikator jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 97.96 persen atau sebesar 480.500 orang dari jumlah total yang dilayani sebesar 490.500 orang.

Lebih jelas capaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145.

Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	99,03%
		6.161	6.101	60	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Pengasuhan	0	0	0	0%
	2. Penyediaan Perumahan Bagi	6.161	6.101	60	99%

	Daerah Yang Memiliki Panti Anak				
	3. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0%
	4. Penyediaan Sandang	6.161	6.101	60	99%
	5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	101	101	0	100%
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	101	101	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	101	101	0	100%
	8. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	101	101	0	100%
	9. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	101	101	0	100%
	10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	101	101	0	100%
	11. Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	0	0	0	0%
	12. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%
	13. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	101	101	0	100%
	14. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	0	0	0	0%
	15. Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	91	91	0	100%
	16. Penyediaan Permakanan Bagi	0	0	0	0%

	Daerah Yang Belum Memiliki PantI Anak dan Merujuk Ke PantI Masyarakat				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam PantI Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam pantI yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
		1.040	858	7	82,50%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki PantI Lanjut Usia	0	0	0	0%
	2. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki PantI Lanjut Usia dan Merujuk Ke PantI Masyarakat	0	0	0	0%
	3. Penyediaan Sandang	87	87	0	100%
	4. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki PantI Lanjut Usia	70	70	0	100%
	5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki PantI Lanjut Usia	0	0	0	0%
	6. Penyediaan Alat bantu	99	46	0	46%
	7. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam PantI Sosial	87	63	0	72%
8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	87	63	0	72%	
9. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	87	63	0	72%	

	10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	40	35	0	88%
	11. Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	87	63	0	72%
	12. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	35	16	0	46%
	13. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12	10	0	83%
	14. Pemulasaraan	4	4	0	100%
	15. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	345	338	7	0%
	16. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
		50	50	0	100%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	50	50	0	100%
	2. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat	50	50	0	100%
	3. Penyediaan Sandang	50	50	0	100%

4. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	50	50	0	100%
5. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0%
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	50	50	0	100%
7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	50	50	0	100%
8. Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	50	50	0	100%
9. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	50	50	0	100%
10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	50	50	0	100%
11. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	50	50	0	100%
12. Pemulangan ke Daerah Asal	50	50	0	100%
13. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	50	50	0	100%
14. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
		50	50	0	100%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%
	2. Penyediaan Sandang	50	50	0	100%
	3. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	50	50	0	100%
	4. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0%
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	50	50	0	100%
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	50	50	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	50	50	0	100%
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	10	10	0	100%
	9. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	15	0	500%
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40	10	0	25%	
11. Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%	
12. Penyediaan Permakanan Bagi	0	0	0	0%	

	Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas				
	13. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50	50	0	100%
	14. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%
	15. Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
		490.500	480.500	10.000	97,96%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	1. Penyediaan Sandang	120.000	120.000	0	100%
	2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	500.000	500.000	0	100%
	3. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	125.000	120.000	0	96%
	4. Pelayanan Dukungan Psikososial	125.000	120.000	0	96%
	5. Penyediaan Permakanan	120.000	120.000	0	100%

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) global yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 pada saat UN Sustainable

Summit 2015 mengadopsi dokumen “*Transformasi Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*” sebagai dokumen Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dokumen tersebut memuat tujuan/goals dan target dari TPB/SDGs yang terdiri atas 17 tujuan/goals dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut menjadi panduan bagi masyarakat global selama 15 tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan/goals TPB dapat dilihat pada Gambar 2.73.

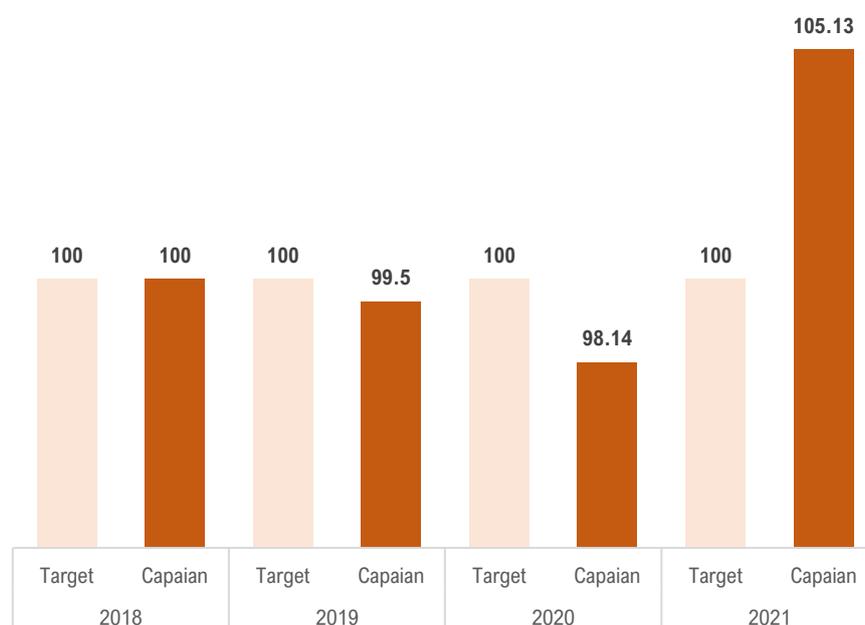


Gambar 2.83.
Tujuan/Goals TPB/SDGs

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

2.4.1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan jaminan tersebut merupakan upaya dalam penuntasan kemiskinan yang terjadi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin. Salah satu program Jaminan Sosial Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Persentase proporsi kepesertaan JKA mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2020 dengan capaian berturut-turut sebesar 99,5 dan 98,14 persen. Namun sebaliknya pada tahun 2021 persentasenya meningkat tajam menjadi sebesar 105,13 persen. Perkembangan persentase kepesertaan JKA Tahun 2018 s.d 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.74 berikut:

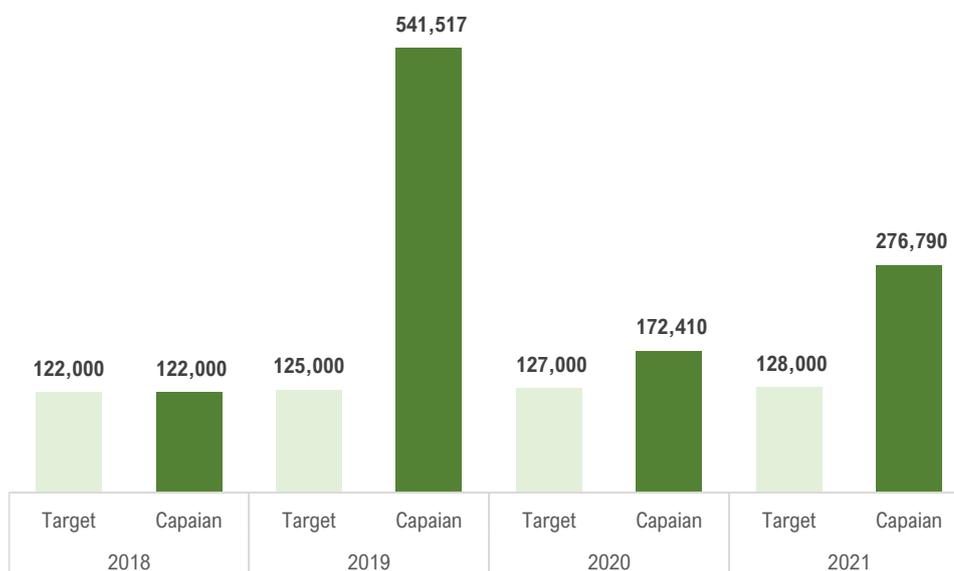


Gambar 2.84.

Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2018 - 2021 (Persentase)

Pencapaian indikator JKA telah diupayakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh dengan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat yang telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.021.230.712.617. Selain jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi hal mendasar dalam pencapaian tujuan ke-1 TPB/SDGs ini. Program jaminan sosial ketenagakerjaan dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja atas risiko finansial akibat kecelakaan atau kerugian lainnya yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerjaan. Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Aceh memiliki capaian yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pencapaiannya melebihi angka target yang telah ditetapkan di dalam RAD TPB/SDGs. Pada tahun 2021, kepesertaannya mencapai 276.790 peserta dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 128.000 peserta. Perkembangan indikator kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Aceh dari tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.75.

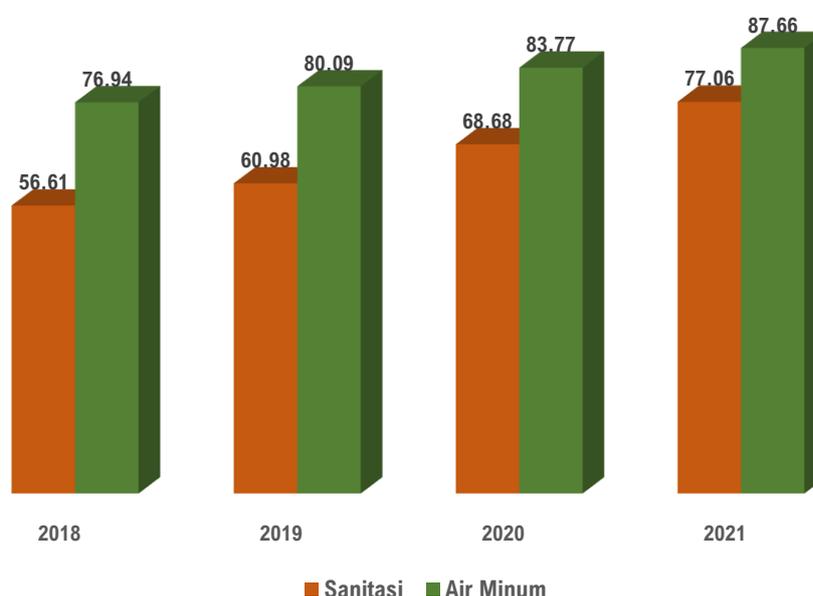


Gambar 2.85.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan/Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Tahun 2018 - 2021

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Jamsostek non ASN pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp.3.290.449.500.-. Selain JKA dan Jamsostek, terdapat beberapa indikator lainnya yang juga mengalami kemajuan, yakni Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah). Namun bila dilihat dari perkembangannya, indikator RT air minum layak telah mencapai target dan meningkat setiap tahun. Namun pada indikator RT sanitasi layak mengalami peningkatan per tahun namun belum mencapai target.

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Perkembangan RT sanitasi dan air minum layak di Aceh dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.76 berikut.



Gambar 2.86.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Aceh Tahun 2018 - 2021

Berdasarkan Gambar 2.76 diketahui persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak Tahun 2016 s.d 2021 mengalami peningkatan. Capaian sanitasi dan air minum secara berurutan 77,06 dan 87,66 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Pencapaian terhadap kedua indikator tersebut telah diupayakan melalui 2 (dua) program yang terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yakni Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) melalui kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 282.609.704.628,-. Program berikutnya yang dilakukan dalam menunjang perbaikan air minum yakni Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.247.368.904,-. Selain sanitasi dan air minum terdapat beberapa indikator lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah

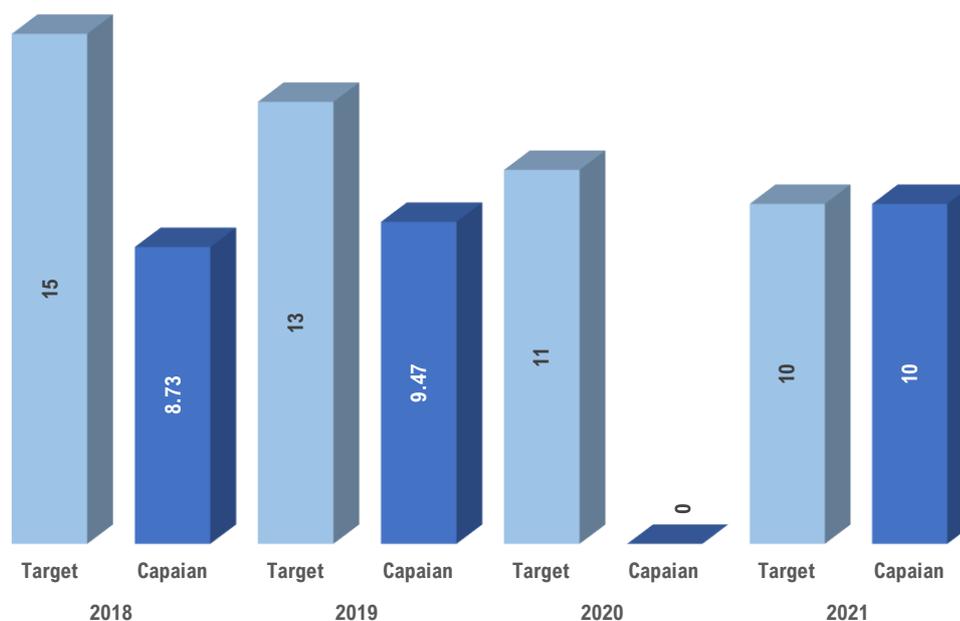
Aceh. Secara detail status indikator yang mengalami kemajuan tahun 2021 pada tujuan ke-1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.146.

Tabel 2.146.
Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan)

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan/Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS	%	95.051	128.000	276.790	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	98,28	98,5	99,81	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial/ Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (proxy)	Dinas Sosial; BPBA; Podes	Persen	100	100	100	
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan/ JKA (proxy)				100	105,13	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	55,6	77,2	87,66	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	48,03	81,53	77,06	

2.4.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Proporsi asupan kalori penduduk sangat erat kaitannya dengan pencapaian derajat kesehatan dan Garis Kemiskinan Masyarakat (GKM). Pencapaian indikator tersebut tahun 2021 cukup baik dengan pencapaian <10 atau sama dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, tahun 2018 dan 2019 capaian tidak mencapai target yang telah direncanakan Sedangkan pada tahun 2020 indikator tersebut tidak tersedia. Perkembangan indikator tersebut dari tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.77.



Gambar 2.87.
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari Tahun 2018 - 2021

Pencapaian indikator proporsi penduduk dengan asupan kalori <1400 kkal/kapita/hari tersebut dapat dicapai dengan beberapa upaya Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan dengan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.959.450.935,-. Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat beberapa kegiatan utama diantaranya: a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun; c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; d) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; e) dsb. Program dan kegiatan tersebut di atas juga merupakan upaya Pemerintah dalam menurunkan daerah rawan pangan di Aceh yang saat ini telah berkurang dengan kecamatan rawan pangan sebanyak 77 kecamatan. Untuk melihat capaian serta status beberapa indikator yang mengalami kemajuan pada tujuan ke-2 TPB/SDGs Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.136 berikut.

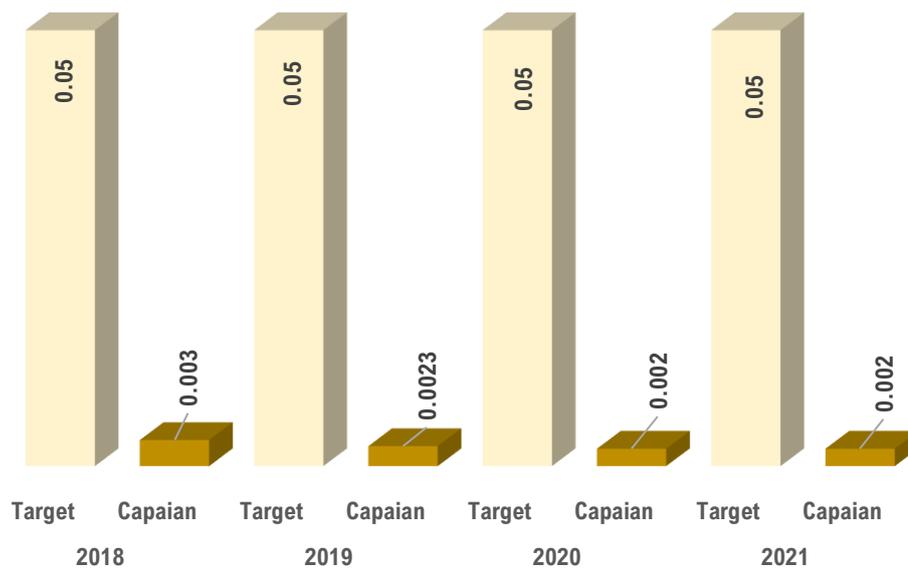
Tabel 2.147.
Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 2 Tanpa Kelaparan)

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita/ Pravelensi Gizi buruk dan Gizi Kurang (proxy)	Dinkes	%	16,7	14,00	7,01	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3)	FSVA	Kecamatan	117	105	77	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS	%	<15	<10	<10	

2.4.3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

HIV/ AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (perinatal). Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) (Profil Kesehatan Aceh, 2017).

Angka prevalensi HIV pada populasi dewasa di Aceh tahun 2021 tercatat sebesar 0,002 persen. Angka tersebut jauh berada dari target penurunan yang ingin dicapai sebesar 0,005 persen pertahunnya. Angka tersebut juga memiliki tren yang terus menurun dari tahun 2018 hingga 2021. Perkembangan angka prevalensi HIV di Aceh Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.78 berikut:



Gambar 2.88.
Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa Tahun 2018 – 2021

Penurunan angka prevalensi HIV tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan yang telah melakukan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.554.204.817,-. Selain itu juga dalam upaya sosialisasi, telah dilakukan kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi serta kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, yang telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.054.661.500,-.

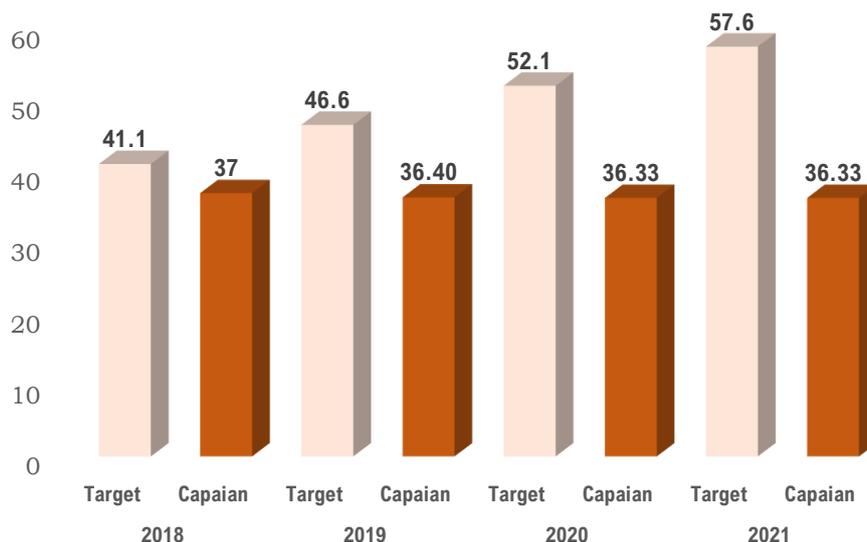
Selain angka prevalensi HIV, indikator lainnya yang juga mempunyai capaian yang cukup baik yakni Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B dan Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Aceh. Gambaran pencapaian status indikator tersebut tahun 2021 dapat dilihat secara detil pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148.
Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia)

TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	BPS	persen	0,007	< 0,05	0,002	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	riskesdas	%	100	100	100	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk/Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Aceh (proxy)	BPS	persen	99,8	100	105,13	

2.4.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Gambar 2.79 berikut menunjukkan perkembangan status Akreditasi Sekolah Tahun 2018-2020 jenjang SMA/SMK/Sederajat.



Gambar 2.89.
Persentase SMA/MA Berakreditasi A Tahun 2018 - 2021

Berdasarkan Gambar 2.79 diketahui persentase jenjang SMA yang memiliki akreditasi A tahun 2018 sebesar 37 persen. Angka tersebut belum mencapai target sebesar 41,1 persen. Capaian persentase sekolah berakreditasi A tersebut terus menurun hingga tahun 2021 dengan capaian sebesar 36,33 persen. Bila ditelisik lebih mendalam, sekolah dengan jenjang SMK secara keseluruhan masih ada 8,9 persen SMK yang belum terakreditasi. Persentase SMK yang belum terakreditasi terbanyak di Kab. Pidie Jaya yaitu 42,9 persen dan Kab. Pidie sebesar 35,7 persen. Dalam rangka meningkatkan/mempertahankan Akreditasi Sekolah, sekolah harus memenuhi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan serta standar sarana dan prasarana.

Selain indikator status sekolah dengan akreditasi A, indikator pendidikan lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat. Indikator ini mengukur kemudahan akses bagi penduduk terutama remaja usia sekolah dalam menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. APK untuk jenjang sekolah SMA/SMK/MA/sederajat nilainya dibawah seratus. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua penduduk usia 16-18 tahun sedang mengenyam pendidikan pada jenjang tersebut, kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawah atau di atasnya. Selama tahun 2018-2021, APK SMA/SMK/MA/sederajat cenderung meningkat. APK pada jenjang ini meningkat 0,81 poin pada tahun 2020 dan 2021 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan terjadi pada APK SMA/SMK/MA/sederajat jenis kelamin perempuan, yaitu dari 91,65 persen di tahun 2019 menjadi 93,36 persen di tahun 2020.

Di sisi lain, perbedaan APK SMA/SMK/MA/sederajat antar wilayah tempat tinggal juga cukup signifikan, pada tahun 2020 APK SMA/SMK/MA/sederajat di wilayah perkotaan adalah 95,31 persen sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 88,74 persen. Diperlukan perhatian pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang dilakukan di

perdesaan, agar APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perkotaan dan perdesaan menjadi lebih seimbang. Meskipun secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian APK tahun 2021 belum mencapai atau sama dengan target yang telah ditetapkan sebesar 99,3 persen, sehingga indikator ini masih dikelompokkan ke dalam indikator yang masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Perkembangan APK SMA/MA/SMK sederajat di Aceh tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.90 berikut.



Gambar 2.90.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /Sederajat Tahun 2018 - 2021

Upaya peningkatan status akreditasi sekolah dan peningkatan APK dengan jenjang SMA/MA/SMK di Aceh telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh di tahun 2021 melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas dan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan, dengan realisasi kegiatan masing-masing sebesar Rp. 1.947.563.300,- dan Rp. 2.253.834.620,-. Penguatan indikator tersebut juga dioptimalkan melalui dana BOS dengan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan, dimana masing-masing kegiatan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 907.832.940.026,- dan Rp. 91.068.552.100,-.

Pencapaian indikator tersebut diatas juga tidak terlepas dari peran serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan direalisasikan pada tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 17.060.546.990,- dan Rp. 5.751.619.538,-. Selain itu juga, kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Penyiapan dan Tindak Lanjut

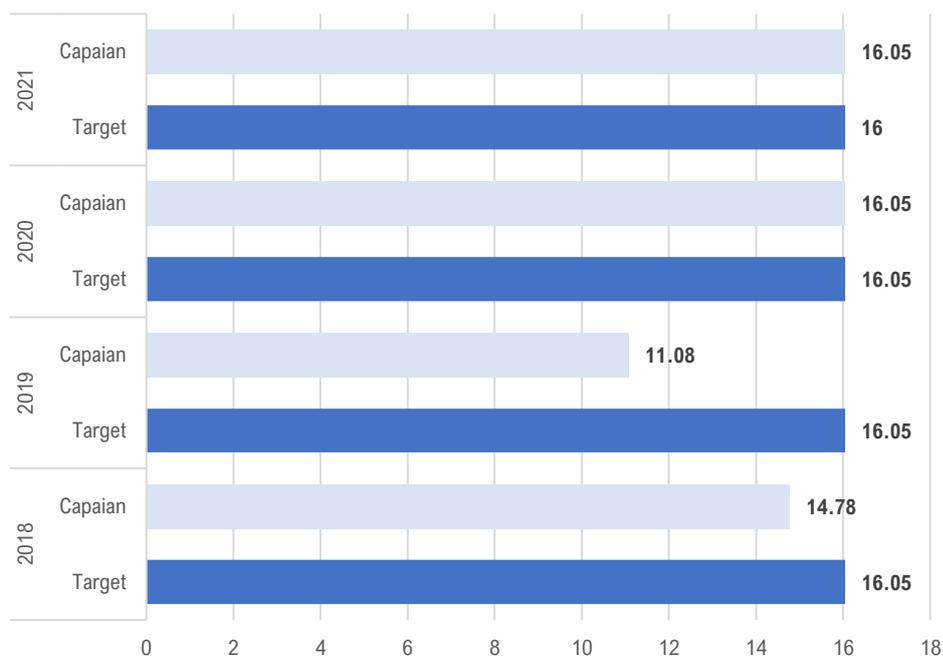
Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan turut direalisasikan dengan anggaran berturut-turut sebesar Rp. 585.274.600,- dan Rp. 342.329.000,-. Secara umum pencapaian derajat pendidikan di Aceh sudah cukup baik, namun belum dapat mencapai target dan melampaui rata-rata nasional. Untuk melihat status pencapaian indikator Pendidikan yang masih memerlukan perhatian khusus pada tujuan ke-4 TPB/SDGs Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149.
Perkembangan Indikator TPB/SDGs Yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus
(Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas)

TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
Indikator 4.1.1.	(c) Persentase SMA/MA berakreditasi A	Neraca Pendidikan Daerah	Persen	35,6	57,6	36,33	
	(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat	BPS	Persen	87,47	92	90,9	
	(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS (indikator tambahan)	Tahun	8,77	12	9,37	
Indikator 4.3.1.	(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	Persen	87,47	92	90,9	
Indikator 4.6.1.	(a) Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Indikator SDGs Provinsi Aceh 2018, BPS Provinsi Aceh	Persen	97,94	99,3	98,25	

2.4.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak hak perempuan dan masyarakat. Secara umum keterwakilan perempuan dalam menempati kursi legislatif di DPRA dan DPRD Kab/Kot pada tahun 2021 masih cukup rendah sebesar 16,05 persen. Namun demikian bila dicermati dari target yang ditetapkan kondisi tersebut sudah melebihi dari nilai target sebesar 16 persen. Secara detail, hanya di Kabupaten Aceh Tamiang yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30 persen yaitu 36,67 persen. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk provinsi, keterwakilannya bervariasi dari yang paling rendah di Kabupaten Aceh Utara (2.22%) sampai yang tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang. Perkembangan indikator keterwakilan perempuan di DPR Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.91 berikut.

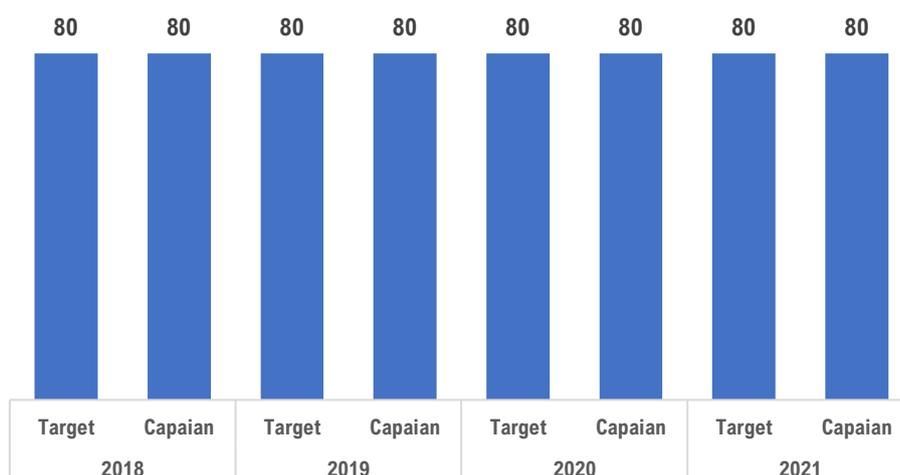


Gambar 2.91.

Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah/Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR (proxy) Tahun 2018 - 2021

Peran dan fungsi pemerintah tidak luput dalam memberikan pendidikan dan pelayanan politik bagi perempuan Aceh. Hal tersebut terlihat dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi. Kegiatan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 499.677.968,- pada tahun 2021.

Selain keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan, pada tujuan ke-5 TPB/SDGs juga menitikberatkan pada indikator perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang mendapatkan layanan hukum dari pemerintah. Meskipun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan, dengan kasus 689 kasus di tahun 2020, namun perempuan korban kekerasan tersebut telah difasilitasi melalui bantuan hukum sebanyak 80% dari angka total korban kekerasan. Kasus KDRT menjadi kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan (216 kasus) dan kekerasan psikis sebanyak 160 kasus. Secara garis besar perkembangan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan bantuan hukum oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.92 berikut.



Gambar 2.92.

Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif/ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Proxy) Tahun 2018-2021

Dalam memberikan layanan dan partisipasi terhadap perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan sejumlah program dan kegiatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Program tersebut diantaranya: a) Program Perlindungan Perempuan dan b) Program Perlindungan Khusus Anak. Pada program perlindungan perempuan, realisasi kegiatan terbesar yakni kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 618.991.600,-. Selain itu juga dilakukan kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi. Kedua kegiatan tersebut telah direalisasikan berturut-turut sebesar Rp. 416.750.730,- dan Rp. 243.086.720,-

Pada program perlindungan khusus anak, terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang telah direalisasikan pada tahun 2021 yakni kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan kegiatan Advokasi Kebijakan, Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp. 397.661.900,- dan Rp. 160.519.430,-. Status pencapaian kedua indikator tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150.
Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 5 Kesetaraan Gender)

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
5.2.2 (a)	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy)	DP3A	%	80	80	80	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah/Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (proxy)	DP3A	%	13,58	16,05	16,05	

2.4.6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arah Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh.

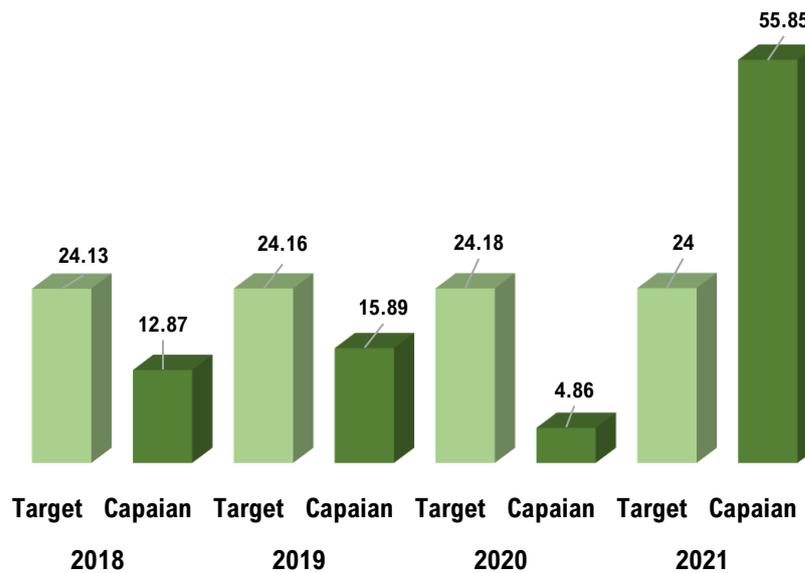
Secara umum capaian luas kawasan lindung di Aceh terhadap luas kawasan hutan cukup baik dengan capaian > 50 persen. Meskipun terjadi fluktuasi, namun pencapaiannya telah mencapai target tahunan sebesar 29 persen. Perkembangan persentase rasio luas kawasan hutan lindung Aceh terhadap luas kawasan hutan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.93 berikut.



Gambar 2.93.

Luas Pengembangan Hutan Serta Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Untuk Pemulihan Kawasan DAS/ Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan (Proxy) Tahun 2018-2021

Selain luas kawasan hutan lindung, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal tidak produktif atau lahan kritis di Aceh cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai 2021. Total luas lahan kritis yang direhabilitasi baik di dalam kawasan hutan (reboisasi) dan luar kawasan hutan (hutan rakyat dan penghijauan) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluas 17.161 ha baik yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Aceh dan BPDASHL Krueng Aceh. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Berdasarkan persentase pemulihan lahan kritis tersebut pada tahun 2021 sebesar 55,85 persen dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lahan kritis yang direhabilitasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.94.



Gambar 2.94.
Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi/Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (proxy) Tahun 2018 - 2021

Upaya rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan jumlah luas Kawasan lindung di Aceh dapat diupayakan oleh Pemerintah Aceh melalui DLHK melalui 3 (tiga) program diantaranya: a) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); b) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan; dan c) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pada program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatan utama yang dilakukan yakni fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH serta kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH yang telah direalisasikan pada tahun 2021 berturut-turut sebesar Rp. 147.207.800,- dan Rp. 35.928.000,-.

Program berikutnya yakni Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan kegiatan utama diantaranya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah serta Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi. Secara total ketiga kegiatan tersebut telah direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.978.368.607,-. Sementara dalam upaya penyuluhan telah dilakukan kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial yang direalisasikan sebesar Rp. 170.109.500,-. Pencapaian status indikator pada tujuan ke-6 dapat dilihat secara terperinci pada Tabel 2.140.

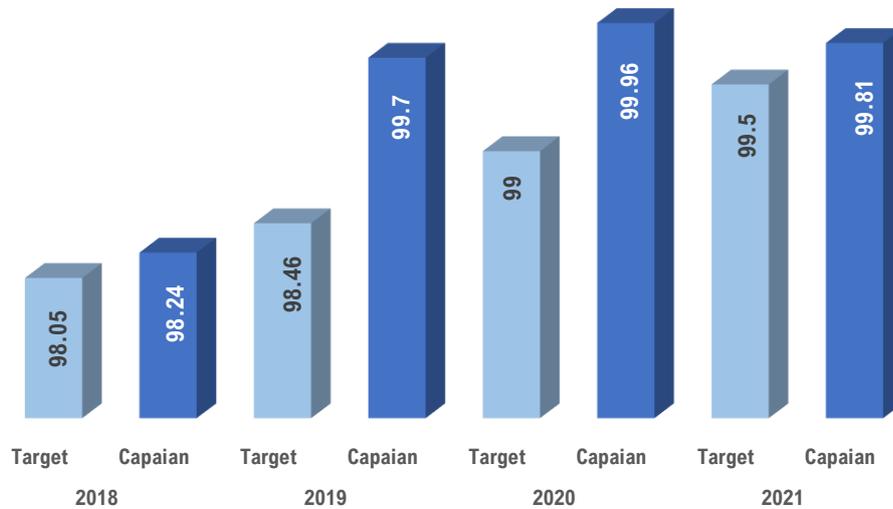
Tabel 2.151.
Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi layak)

TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	BPS	%	43,45	77,20	87,66	
6.5.1 (e)	Luas Pengembangan Hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS/ Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (Proxy)	DLHK	%	29	29	50,01	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi/Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	DLHK	%	24,1	24,21	55,85	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DLHK	DAS Prioritas	4	4	4	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak/Persentase rumah tinggal bersanitasi (proxy)	BPS	%	76,13	81,53	77,06	

2.4.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 3,53 %. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 1.367.417 Rumah Tangga. Besarnya penggunaan listrik pada RT tersebut akan tercermin dari besarnya rasio elektrifikasi atau persentase masyarakat yang dapat mengakses energi listrik dalam setiap rumah tangganya. Perkembangan rasio elektrifikasi di Aceh cukup baik, yang ditandai dengan rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi tersebut sebesar 98,24 persen, persentasenya terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 99,81 persen di tahun 2021. Namun demikian, persentase tersebut belum dapat mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat 0,19 persen RT di Aceh belum memiliki akses terhadap listrik dan persentase tersebut merupakan RT

masyarakat miskin di Aceh. Secara jelas perkembangan rasio elektrifikasi di Aceh tahun 2018-2021 tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.85 berikut.



Gambar 2.95.

Rasio Elektrifikasi di Aceh Tahun 2018 - 2021

Dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh telah melakukan 2 (dua) kegiatan utama dalam menjadikan daerah terpencil dan sebagian masyarakat miskin mendapatkan akses kelistrikan. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Berdasarkan Tabel 2.141 diketahui capaian rasio elektrifikasi tahun 2021 mencapai 98.24 persen. Capaian ini melebihi dari target yang telah direncanakan yakni sebesar 98.05 persen.

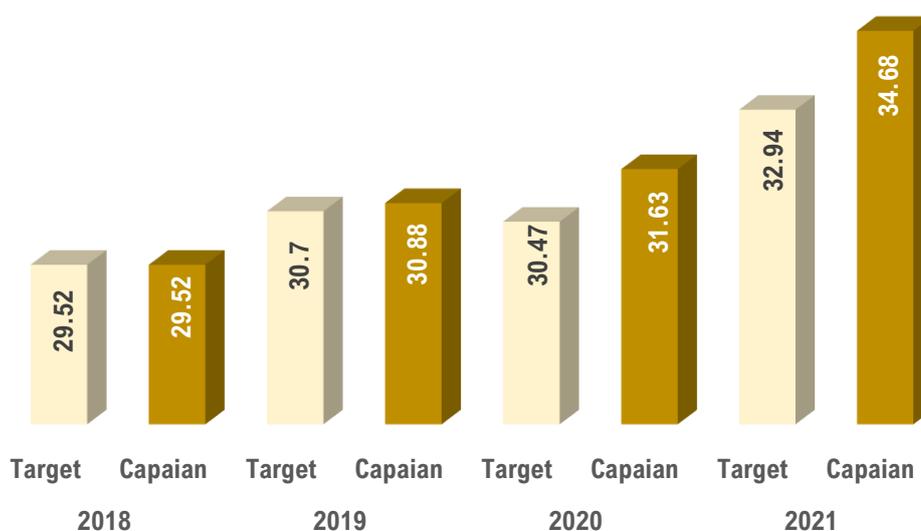
Tabel 2.152.

**Form 1. Perkembangan Indikator Yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau)**

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
07.01.01	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	95,69	98,05	98,24	●

2.4.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

Satu diantara indikator pada tujuan ke-8 TPB/SDGs yang memiliki perkembangan yang cukup baik yakni PDRB per kapita. Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.



Gambar 2.96.
PDRB Per Kapita Aceh Tahun 2018 – 2021 (Jutaan)

Berdasarkan Gambar 2.86 terlihat bahwa perkembangan PDRB Per kapita Aceh dengan ADHB migas memiliki tren meningkat setiap tahun, dari tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHB tercatat sebesar 29.52 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 34,68 juta. Pada tahun 2022 kecenderungan PDRB ADHB per Kapita diproyeksikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi. Secara garis besar pencapaian PDRB per kapita tidak lepas dari kemajuan yang telah dilakukan semua *stakeholders*, baik pemerintah maupun swasta. Perkembangan status PDRB per kapita Aceh tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.153.
Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 8)

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS Aceh	Juta rupiah	26,94	29,52	29,52	●

2.4.9 Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Panjang jalan kondisi baik menjadi satu diantara indikator pada tujuan ke-9 yang masih memerlukan perhatian khusus. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 67,07 persen di tahun 2018 menjadi 76,55 persen di tahun 2021. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional. Perkembangan persentase jalan kondisi baik tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.87 berikut.



Gambar 2.97.
Kondisi Mantap Jalan Provinsi/ Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)
(proxy) (Persentase)

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (*Integrated Road Management System/IRMS*).

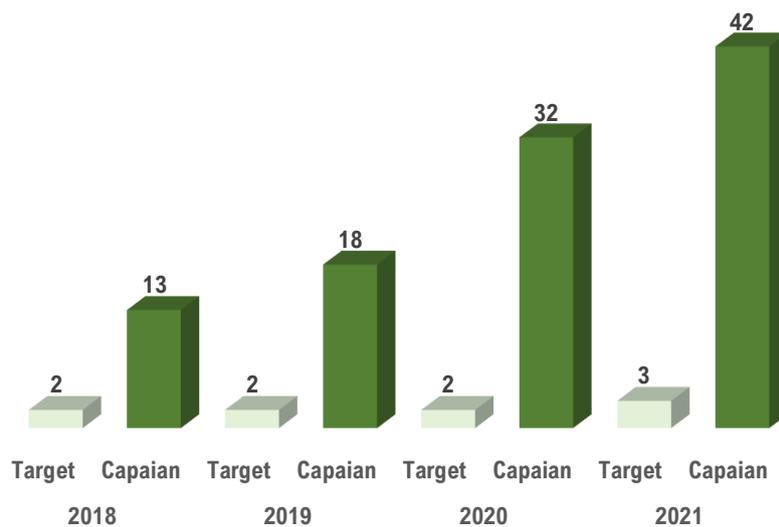
Dalam mengembangkan peningkatan indikator jalan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh melakukan mewujudkannya melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Program tersebut direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 853.365.787.027,-. Kegiatan Rekonstruksi Jalan menjadi kegiatan yang memiliki realisasi terbesar mencapai Rp. 759.524.527.777,-. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dengan proyek MYC dan akan berakhir di tahun 2022. Meskipun demikian, penuntasan ruas-ruas jalan MYC tetap dilakukan secara *single year*, dimana untuk mendukung proyek tersebut, PUPR juga melakukan kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pembangunan Jembatan, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp. 14.974.912.138,- dan Rp. 27.621.403.985. Capaian persentase jalan kondisi baik pada tujuan ke-9 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154.
Form 1. Perkembangan Indikator TPB/SDGs Yang Masih Memerlukan Perhatian Khusus (Tujuan 9)

TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi/ Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (proxy)	Dinas PUPR	%	63,39	92,88	76,55	

2.4.10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara

Desa mandiri menjadi satu diantara indikator lainnya pada tujuan ke-10 yang mengalami kemajuan. Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Pada Gambar 2.88 menunjukkan bahwa jumlah desa mandiri di Aceh sebanyak 13 desa, kemudian bertambah menjadi 42 desa di tahun 2021 atau mengalami penambahan sebanyak 10 desa. Jumlah tersebut meningkat dan melewati angka target yang ditetapkan sebanyak 3 desa.



Gambar 2.98.
Jumlah Desa Mandiri Tahun 2018-2021

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), pengembangan desa mandiri tersebut diupayakan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan realisasi Rp. 5.894.372.597,-. Dalam program tersebut dilakukan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang direalisasikan sebesar Rp. 2.150.942.674,-. Selain itu, dalam mengembangkan desa mandiri tersebut dilakukan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis, dengan realisasi secara berturut-turut sebesar Rp. 322.815.363,- dan Rp. 372.499.479,-. Dari Tabel 2.144 diperoleh informasi bahwa capaian indicator tujuan10 TPB berkurangnya kesenjangan untuk semua indicator telah memenuhi target yang diharapkan seperti:

1. Koefisien gini
2. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
3. Jumlah desa mandiri
4. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy)
5. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tabel 2.155.
Perkembangan Indikator yang Mengalami Kemajuan
(Tujuan 10)

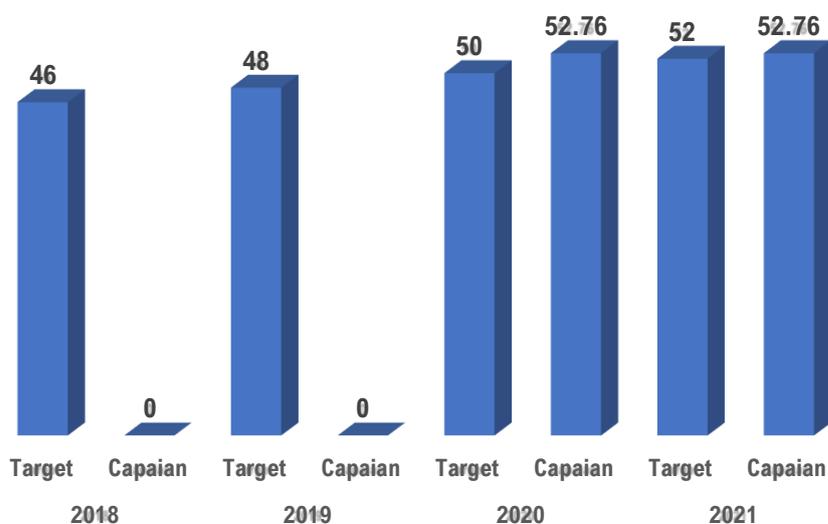
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Koefisien	0,3	0,327	0,318	
10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi	Kab	1	0	0	
10.1.1 (d)	Jumlah desa mandiri	Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi	Jumlah	5	3	42	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	80	80	80	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan/ Disnakermob duk/ BP2TKI		95.051	128.000	276.790	

2.4.11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Penanganan sampah di Aceh terbilang cukup baik, terutama penanganan sampah yang terdapat di Aceh Besar dan Banda Aceh. Bila dilihat dari grafik sampah perkotaan yang tertangani tersebut capaiannya mencapai 100 persen pertahun. Pengelolaan sampah tersebut menjadi fokus Pemerintah Aceh sebagaimana langkah besar dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang, Kabupaten Aceh

Besar. Sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar itu nantinya akan dikelola secara modern dan ramah lingkungan hingga menjadi sumber bahan bakar atau energi terbarukan.

Sebagaimana diketahui, selama ini penanganan sampah di TPA Regional Blang Bintang dilakukan melalui kegiatan penimbunan, pemadatan, dan penutupan pada landfield, namun belum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Padahal, produksi sampah dari waktu ke waktu terus meningkat sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di TPA. “Rata-rata produksi sampah harian Kota Banda Aceh mencapai 250 ton. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar lebih dari 50 ton. Sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga yang masih bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya dapat diolah menjadi *Refuse Derived Fuel*. Untuk melihat perkembangan penanganan sampah perkotaan di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.89 berikut.



Gambar 2.99.
Persentase sampah perkotaan yang tertangani/Persentase Sampah Terangkut (Persentase)

Capaian persentase sampah yang tertangani di Aceh pada tahun 2020 sama dengan tahun 2021 yakni sebesar 52,76 persen. Upaya pengelolaan sampah tersebut telah dilakukan oleh DLHK melalui program Program Pengelolaan Persampahan yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.324.869.463,.Pengelolaan tersampah tersebut terdiri dari kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional dan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan realisasi kegiatan tersebut secara berurutan sebesar Rp. 3.563.586.226,- dan Rp. 3.761.283.237,- . Selain itu juga dalam pengendalian limbah, DLHK telah melakukan upaya pengendalian limbah beracun dan berbahaya (B3) dengan realisasi sebesar Rp. 92.732.700,- pada tahun 2021. Status pencapaian pengelolaan sampah di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.156.
Form 1. Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 11)

TUJUAN 11 : KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani/Persentase Sampah Terangkut (%)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	45,7	52	52,76	

2.4.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Selama periode Tahun 2017 – 2021, Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah melakukan berbagai bentuk edukasi serta dukungan kepada masyarakat/instansi terkait pengelolaan persampahan dan limbah B3, diantaranya memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten/Kota, pendampingan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota, pembangunan bank sampah mini pada sekolah, Sosialisasi Aceh Bebas Sampah 2025 dan pemberian bantuan tempat sampah terpilah kepada masyarakat pada calon Gampong ProKlim, Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Provinsi Aceh, Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan berupa RDF pada TPA Regional Blang Bintang serta melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD/RSU/RS Swasta) se-Aceh.

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2020 sebesar 52,76 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 2.501 ton/hari hanya sekitar 1.320 ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat diperengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Penanganan sampah perhari di Aceh Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.157 di bawah ini.

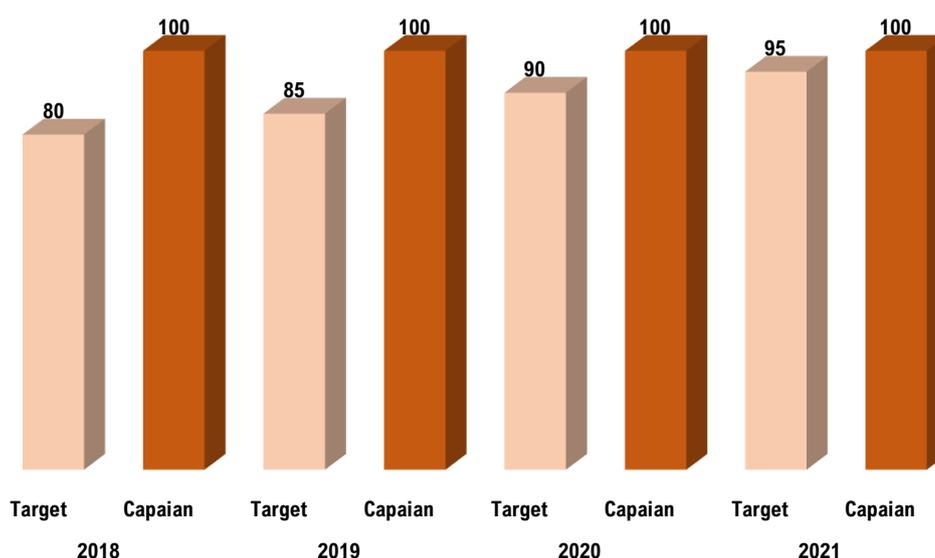
Tabel 2.157.**Persentase Sampah yang tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi 2020 (Jakstrada 2020)		Realisasi 2020	
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1	Kota Sabang	8.064	22	5.621	15,40
2	Kota Banda Aceh	90.607	248	86.870	238,00
3	Kabupaten Aceh Besar	77.248	212	9.198	25,20
4	Kabupaten Pidie	66.551	182	3.430	9,40
5	Kabupaten Pidie jaya	26.988	74	5.132	14,06
6	Kabupaten Bireuen	78.893	216	17.885	49,00
7	Kabupaten Aceh Utara	103.028	282	66.138	181,20
8	Kota Lhokseumawe	33.729	92	32.485	89,00
9	Kabupaten Aceh Timur	49.350	135	40.114	109,90
10	Kota Langsa	36.349	100	34.624	94,86
11	Kabupaten Aceh Tamiang	49.043	134	4.825	13,22
12	Kabupaten Bener Meriah	23.311	64	17.520	48,00
13	Kabupaten Aceh Tengah	36.145	99	35.770	98,00
14	Kabupaten Gayo Lues	13.983	38	12.012	32,91
15	Kabupaten Aceh Tenggara	31.155	85	7.227	19,80
16	Kabupaten Aceh Jaya	17.311	47	10.782	29,54
17	Kabupaten Aceh Barat	38.462	105	34.310	94,00
18	Kabupaten Nagan Raya	24.034	66	325	0,89
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	25.045	69	5.475	15,00
20	Kabupaten Aceh Selatan	35.714	98	22.754	62,34
21	Kota Subulussalam	13.533	37	12.775	35,00
22	Kabupaten Aceh Singkil	20.780	57	2.920	8,00
23	Kabupaten Simeulue	13.715	38	13.505	37,00
Jumlah		913.037	2.501	481.696	1.320
Persentase Sampah Tertangani				52,76%	

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.

2.4.13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Penanganan darurat bencana yang menjadi kewenangan provinsi sudah sangat baik, hal tersebut dikarenakan semua penanganan darurat bencana level provinsi dapat ditangani seperti Gempa Takengon di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie dapat ditangani BPBA dengan dinas terkait dengan baik yaitu mencapai 100 persen, artinya jumlah korban bencana 100 persen mendapatkan intervensi pemerintah. Perkembangan korban bencana yang mendapat bantuan sosial masa tanggap darurat dapat dilihat pada Gambar 2.90.



Gambar 2.100.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang./
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
(proxy)

Indikator bantuan sosial korban bencana tersebut di atas ditanggulangi melalui kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana oleh BPBA dengan realisasi kegiatan tersebut pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.854.653.738,- dan Rp. 1.904.465.097. Namun secara umum penanganan bencana dan pasca bencana yang terjadi di Aceh dilakukan melalui program penanggulangan bencana, dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 22.532.246.678,-.

Selain indikator kebencanaan, pada tujuan ke-13 ini juga berkaitan erat dengan pencapaian indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dimana tujuan dari indikator tersebut yakni ketersediaan dokumen GRK di Provinsi Aceh. Dalam mencapai indikator tersebut, DLHK Aceh telah melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun

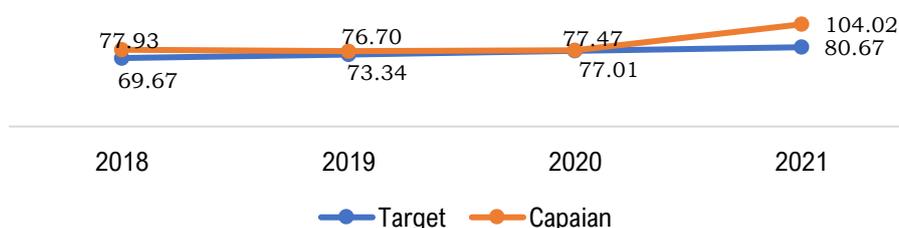
2021 terealisasi sebesar Rp. 2.161.853.099,-. Untuk melihat status perkembangan ketiga indikator yang terdapat pada tujuan ke-13 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.158.

Tabel 2.158.
Form 1. Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 13)

TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang./ Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (proxy)	BPBA	Orang	100	95	100	●
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBA	Dokumen	1	1	1	●
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLHK	Dokumen	Ada	Ada	Ada	●

2.4.14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis aman menjadi satu diantara beberapa indikator pada tujuan ke-14 yang memiliki perkembangan yang cukup baik. Pencapaian indikator tersebut berada di atas target setiap tahunnya. Pencapaian yang cukup signifikan terjadi di tahun 2021 dengan nilai sebesar 104,02 persen. Batasan biologis aman tersebut berkaitan dengan besarnya kapasitas produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan serta keramahan alat tangkap yang digunakan. Keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap tersebut tersebar di 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 atau wilayah Selat Malaka, dan WPP 572 Samudera Hindia. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Batasan biologis aman perikanan tangkap Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.91.



Gambar 2.101.
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pencapaian proporsi batasan aman penangkapan sangat berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2021. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi satu diantara program yang memiliki arti penting bagaimana pengelolaan ruang laut tersebut dapat diawasi dari aksi *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Pada tahun 2021 program tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.111.748.156,-. Program berikutnya yang dilakukan dalam mengoptimalkan proporsi tangkapan biologis aman yakni Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terealisasi sebesar Rp. 18.088.727.311,- dengan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap serta kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan realisasi masing-masing sebesar Rp. 7.468.331.500,- dan Rp. 8.472.639.111,-. Status pencapaian indikator disajikan pada Tabel 2.159.

Tabel 2.159.
Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 14)

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
14.2.1 (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	DKP Aceh	Jumlah WPP	2	2	2	
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	DKP Aceh	%	66,32	80,67	104,02	
14.b.1(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	DKP Aceh	Kab/Kota	18	18	18	

2.4.15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kondisi penutupan hutan Aceh berdasarkan hasil interpretasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, wilayah daratan Aceh yang masih memiliki tutupan berupa hutan adalah seluas \pm 3.144.216,32

Tabel 2.161.
Luas Deforestasi Aceh Tahun 2019-2020

NO	Kabupaten Kota	Fungsi Kawasan							Tidak Ada Data	Grand Total DEF
		SM	TN	HL	HPT	HP	Tubuh Air	APL		
1	Aceh Barat			3,41				9,73		13,14
2	Aceh Barat Daya						4,11	3,24		7,35
3	Aceh Besar							13,11		13,11
4	Aceh Jaya							48,66		48,66
5	Aceh Selatan			0,85	98,01	87,52		66,79		253,16
6	Aceh Singkil							39,93		39,93
7	Aceh Tamiang			53,13		271,01	9,19			333,33
8	Aceh Tengah			216,91				13,14		230,05
9	Aceh Tenggara		15,58	7,70						23,28
10	Aceh Timur			12,99		1,70	1,07	33,00	2,03	50,78
11	Aceh Utara					5,31		12,58		17,89
12	Bener Meriah					16,1		10,12		26,22
13	Bireun			19,87		235,82				255,69
14	Gayo Lues			15,18				18,55		97,63
15	Langsa					28,13	0,68	34,37		63,18
16	Nagan Raya						21,54	189,21	0,33	211,08
17	Simeulue							20,61		20,61
18	Subussalam	1,53				42,39		204,84		251,76
	Grand Total	1,53	79,49	330,04	98,01	690,96	36,58	717,86	2,36	1,956,83

Aktivitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 1.200 hektar dan seluas ± 717,86 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

2.4.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.162.

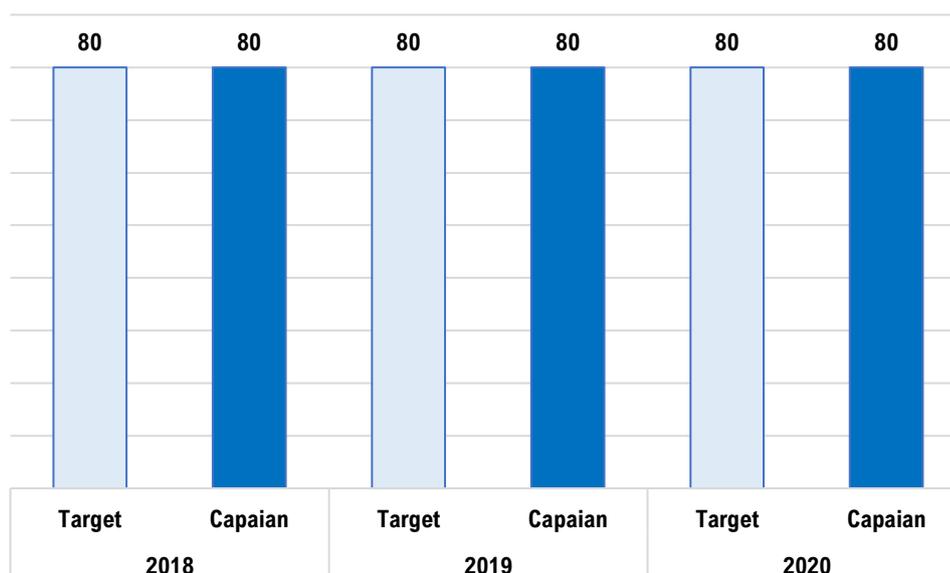
Tabel 2.162.
Predikat WTP Kabupaten Kota 2020

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	13 Kali	13	Pemerintah Aceh	6 Kali
2	Aceh Besar	9 Kali	14	Aceh Barat Daya	6 Kali
3	Kota Sabang	9 Kali	15	Aceh Selatan	6 Kali
4	Kota Lhokseumawe	9 Kali	16	Aceh Timur	6 Kali
5	Kota Langsa	9 Kali	17	Aceh Utara	6 Kali
6	Aceh Barat	7 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	7 Kali	19	Pidie	6 Kali
8	Aceh Tamiang	7 Kali	20	Pidie Jaya	6 Kali
9	Aceh Tengah	7 Kali	21	Simeulue	6 Kali
10	Bener Meriah	7 Kali	22	Aceh Singkil	5 Kali
11	Bireuen	7 Kali	23	Subulussalam	4 Kali
12	Gayo Lues	7 Kali	24	Aceh Tenggara	4 Kali

Sumber: BPK, 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh. Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Selain pencapaian status WTP, dalam tujuan ke-16 ini juga memiliki indikator lainnya yang mengalami kemajuan, salah satunya yakni cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Bila dilihat dari perkembangannya di Aceh, pencapaian indikator tersebut cukup baik yang ditandai dengan pencapaian yang mencapai target sebesar 80 persen. Perkembangan indikator ini selaras dengan target hingga di tahun 2020 sebagaimana yang terdapat pada Gambar 2.92.



Gambar 2.102.
Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy) Tahun 2018-2020

Dalam meningkatkan komitmen pencapaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Aceh, DP3A Aceh telah melakukan kegiatan diantaranya: 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, dengan realisasi anggaran terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp.180.920.614,- ; 2) Pelatihan bagi pelatih (tot) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, realisasi anggaran hanya pada tahun 2019 sebesar Rp. 106.834.606,-; 3) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan, realisasi tertinggi tahun 2019 sebesar Rp. 268.593.400,-; 4) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, realisasi tahun 2019 Rp. 54.728.230,-; dan 5) Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 542.422.984,-. Adapun perkembangan indikator yang mengalami perkembangan pada tujuan ke-5 dapat dilihat pada Tabel 2.163.

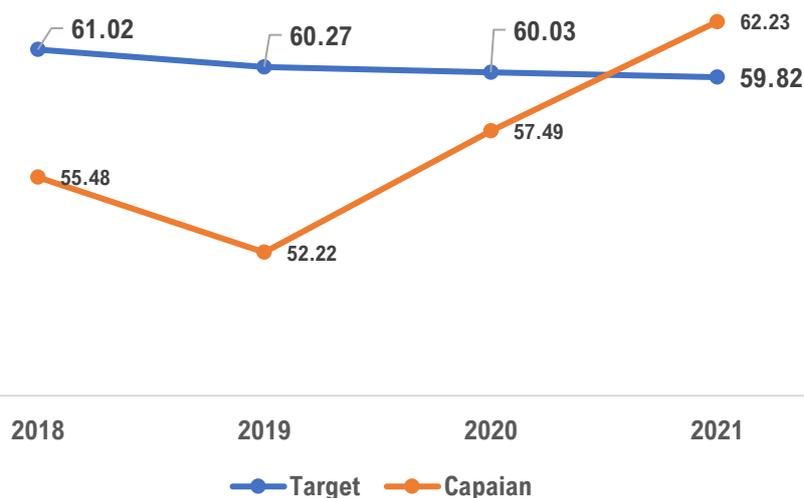
Tabel 2.163.
Perkembangan Indikator yang mengalami kemajuan
(Tujuan 16)

TUJUAN 16 : Perdamaian dan Keadilan											STATUS		
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASE LINE)	TARGET			REALISASI			2018	2019	2020
					2018	2019	2020	2018	2019	2020			
16.2.3.(a)	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy)	DP3A	%	80	80	80	80	80	80	80			
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKA	WTP/WD P	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			

2.4.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari sektor pajak mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 dengan persentase masing-masing sebesar 57,49 persen dan 62,23 persen. Hal tersebut sangat berhubungan dengan terjadinya pemulihan ekonomi dampak Covid-19 yang terus bergerak maju ke arah perbaikan terutama di Aceh. Berdasarkan hasil kajian dari Bank Indonesia (2021), bahwa perbaikan pada sektor pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kendaraan tipe mobil pada triwulan III 2021 terkontraksi sebesar 8,88 persen (yoy) atau membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 18,19 persen. Kendati demikian, insentif fiskal melalui pajak mobil baru (PPnBM) 0 persen yang telah diterapkan sejak awal Maret 2021 nampaknya mulai memberikan dampak perbaikan terhadap penjualan mobil. Hingga September 2021, jumlah penjualan mobil baru di Aceh tercatat 5.558 unit atau meningkat 6,01 persen (yoy). Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan hingga Maret 2022. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2021 dan akan memberikan perbaikan yang cukup baik dalam sektor perpajakan kendaraan bermotor hingga beberapa tahun ke depan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen.

Selain dari pajak kendaraan, pajak rokok juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2018-2021, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan kenaikan sebesar 12 persen pada beberapa jenis rokok tertentu. Kebijakan kenaikan tarif tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan pada sektor pajak rokok. Perkembangan kontribusi pajak terhadap PAA dapat dilihat pada Tabel 2.164.



Tabel 2.164.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/ Kontribusi Pajak terhadap PAA (proxy)

Peningkatan jumlah pajak tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program tersebut terkait dengan kegiatan Penagihan Pajak Daerah di Aceh dan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Secara garis besar program tersebut terealisasi tahun 2021 sebesar Rp. 11.219.503.099,-. Perkembangan status pencapaian money kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165.

Form 1. Perkembangan Indikator TPB/SDGs Yang Mengalami Perkembangan (Tujuan 17)

TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDGs	SUMBER DATA	SATUAN	2017 (BASELINE)	TARGET	REALISASI	STATUS
					2021	2021	2021
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor non migas	BPS	%	-58,1	5,56	10,36	●
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/ Kontribusi Pajak terhadap PAA (proxy)	BPKA	%		59,82	62,23	●

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPA Tahun berjalan diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi Tahun 2023 sebagai berikut:

2.5.1 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aceh yang berada di ujung barat Indonesia memiliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia;

B. Wilayah Rawan Bencana

Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 153,58 (Tahun 2020) yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ektrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ektrim, dan tanah longsor. Dalam hal penanganan banjir penanganan masih perlu dioptimalkan koordinasi tentang pelaksanaan kewenangan antar kabupaten kota dan provinsi dan nasional.

C. Demografi

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi, yaitu 53,75 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam kaitan ini kewenangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum masuk tupoksi di pemerintah Aceh.

2.5.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan -0.34 persen akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, relatif tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun

2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0.74 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Aceh non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, dimana ekonomi Nasional rata-rata tumbuh 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.06 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2021 Perekonomian Nasional tumbuh sebesar 3.69 persen.

B. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama. Rilis BPS untuk Susenas September 2021 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mengalami penurunan Angka Kemiskinan, namun Aceh justru mengalami peningkatan. Bila melihat nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index-P1*), dan Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index-P2*) Aceh dan Nasional. Secara umum selama periode 2016-2021, nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3,48 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2,64, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,74 dan 1,50. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh dan Nasional nilai Indeks bergerak meningkat (2,85; 2,95 dan 1,75 ; 1,67).

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Aceh memiliki 13 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

C. Laju Inflasi

Secara umum perkembangan laju inflasi Aceh selama 2016-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 inflasi Aceh sebesar 2.24 persen dan lebih baik dari tahun 2020 sebesar 3. 59 persen. Inflasi yang lebih rendah pada tahun 2021 disebabkan faktor cuaca yang cukup baik dan tidak terjadi gagal panen sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas perikanan dan pertanian, serta adanya dampak pemulihan ekonomi yang dapat menstabilkan kembali harga-harga komoditas strategis. Bila dibandingkan dengan Inflasi nasional, maka nilai inflasi Aceh relative masih tinggi, dimana Inflasi Nasional pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen dan tahun 2021 sebesar 1.87 persen.

D. Pendapatan per kapita

Pendapatan perkapita masyarakat Aceh yang diukur menurut PDRB ADHB baik dengan migas maupun non migas menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada

tahun 2020 pendapatan perkapita sebesar 31.63 Juta Rupiah dan tahun 2021 meningkat menjadi 34.68 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nasional, maka Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2020 PDB Perkapita Nasional sebesar 57.3 Juta Rupiah dan tahun 2021 sebesar 62.2 Juta Rupiah (US\$ 4.349,4) atau kenaikan sebesar 3,69 persen dan Indonesia berada di kategori kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dengan pendapatan antara US\$1,046 dan US\$4,095.

E. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Nilai Indek Gini Aceh relative lebih baik bila dibandingkan dengan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh termasuk kategori rendah. Namun kondisi ini juga masih mengindikasikan dan berkorelasi terhadap terjadinya kenaikan angka kemiskinan tahun 2021.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Masih Tinggi;

Jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 tercatat sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang berjumlah 167 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun signifikan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen. Sedangkan TPT Nasional tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 7.07 persen dan 6.49 persen. TPT Aceh relatif lebih baik atau berada dibawah rata-rata nasional, namun persentase TPT ini tidak mencapai target tahun 2021 dan mengindikasikan adanya korelasi terhadap kenaikan tingkat kemiskinan Aceh tahun 2021.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IPM Aceh pada tahun 2021 sebesar 72,18, naik 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2020) sebesar 71,99. Sedangkan IPM Nasional pada tahun 2021 relative lebih tinggi dan berada di atas rata-rata IPM Aceh yaitu sebesar 72.29. Kondisi pencapaian nilai IPM Aceh ini masih menjadi perhatian yang serius mengingat terjadinya disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.

2.5.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

- 1) Implementasi Lembaga keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi simpan pinjam belum melaksanakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.
- 2) Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah, Pelanggaran syariat islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 Kabupaten/Kota.
- 3) Masih rendahnya capaian standarisasi dayah, dari 1.136 dayah yang ada di Aceh, hanya 54,84 persen yang telah termasuk kedalam dayah tipe (A+, A, B dan C). Sedangkan 513 dayah masih merupakan dayah non tipe.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan. Pemanfaatan ZISWAF di Aceh belum dapat dikelola secara optimal karena belum tersedianya database muzakki, mustahik, wakaf, muallaf dan potensi harta agama lainnya. Selain itu juga belum tersedianya sistem database yang terintegrasi dengan data kependudukan maupun antara badan Baitul Mal dengan basis data terpadu sebagai bagian dari data kemiskinan di Aceh. Meskipun demikian pendistribusian ZISWAF terus meningkat di Aceh, dari Rp. 41.736.365.693 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 92.442.187.683 di tahun 2021.
- 5) Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal, Meskipun terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh, namun kesadaran produsen untuk mendapatkan sertifikat halal masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan hanya sebanyak 213 sertifikat pada tahun 2021.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim.
- 7) Belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan, mantan tapol/napol dan korban konflik.

B. Layanan Urusan Wajib

1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan, dimana ranking sekolah menengah (top 1000 UTBK) di Aceh hanya menyisakan 2 sekolah ditahun 2020 sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera;
- Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, dimana Aceh 9,37 dan nasional 8,54 tahun 2021;
- Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi, tercermin dari kontribusi TPT yang terbesar adalah dari lulusan SMK;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB, dimana perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) adalah 1 : 1,6 atau dua kali lipat perbandingan ruang kelas dan rombel SMA (1 : 0,8). Selain itu, pendidik tersertifikasi untuk SLB sangat rendah yakni sebesar 15,5 persen atau dapat diinterpretasikan lebih dari 84 persen dari pendidik SLB tidak tersertifikasi;
- Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh tahun 2020 masih sebesar 12,11 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7;
- Masih tingginya Angkatan kerja Pendidikan menengah Atas dan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2020.

b. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021;
- Masyarakat Aceh mengalami double burden penyakit dikarenakan pada waktu yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan beban gizi ganda (*Double Burden Malnutrition*), di mana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan
- Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup;
- Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen;

- Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022;
 - Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Aceh sudah terkonfirmasi sebanyak 38.458 orang pada bulan Januari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 2.067 atau sebesar 5 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Aceh adalah 4.028.891 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama sebesar 3.197.989 jiwa atau 79,4 persen (Januari 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 88,80 persen dan;
 - Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 rumah sakit regional lagi yaitu 1) Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dien di Meulaboh, 2) Rumah sakit Regional RSUD Yuliddin Awai di Tapaktuan, 3) Rumah sakit regional Datu Beru di Takengon, 4) Rumah sakit regional Langsa, dan 5) Rumah sakit regional Bireuen.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
 - Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha.
 - Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen.
 - Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

e. Sumber daya Air

- Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen.
- Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir.
- Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) mengalami penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang berada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi pada WS Pase - Peusangan dan WS Tamiang – Langsa. D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha) dan D.I. Tenggulon (2.000 Ha) merupakan contoh Daerah Irigasi yang secara signifikan mengalami penurunan debit andalan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh – Meureudu dan WS Jambo Aye, Daerah Irigasi yang mengalami penurunan debit andalan cukup besar adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha) dan D.I. Jambo Aye (17.000 Ha). Akibatnya angka Indeks Pertanaman (IP) penanaman untuk Daerah Irigasi tersebut hanya berkisar sekitar 140. Untuk meningkatkan angka Indeks Pertanaman (IP) tersebut, perlu didukung dengan upaya pembangunan bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinu.

b. Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal; Sebagian besar daerah Irigasi Teknis pada saat ini mengalami penurunan fungsi , yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada era tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

c. Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan upaya pembangunan

jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, upaya ini mengalami beberapa kendala, dimana kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha di Kabupaten Aceh Barat, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Mon Seuke Pulot seluas 1.542 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Alue Geureutut seluas 652 Ha (Lintas Kabupaten/Kota) yang bangunan utamanya terletak di Kabupaten Aceh Utara dan areal layanannya terletak di Kabupaten Bireuen serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kabupaten Simeulu.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kabupaten Aceh Barat), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kabupaten Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha (Kabupaten Pidie). Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan ini, sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dapat segera diwujudkan.

d. Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNOP) di lapangan.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama (Jaringan Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun substansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka keduanya memerlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 12 Tahun 2017, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh

yang membidangi Irigasi, Keujreun Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujreun Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani pemakai air (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan SKPA dan Biro terkait, Wakil Keujreun Blang yang dipilih dalam satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh, Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit;

- Pada pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih tingginya pelanggaran dari tahun 2018 sebesar 300 pelanggaran menjadi 1.400 pelanggaran pada tahun 2021, atau naik sebesar 420 persen.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Aceh yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 3.453.990 pemilih, yang terdiri dari 1.754.397 perempuan dan 1.699.593 laki-laki. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Aceh adalah 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

- Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019 terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terdapat 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireuen, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus masing-masing di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

g. Sosial

- Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah panti di Aceh sebanyak 58 unit sedangkan rusak ringan dan berat sebanyak 8 unit atau 13 persen;
- Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong.

h. Gedung dan Bangunan terbengkalai

Belum tuntas dan fungsionalnya pembangunan gedung/ bangunan publik yang terbengkalai sejumlah 47 unit yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen.

b. Pangan

- Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain;
- Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman sereal (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya;
- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
- Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik.
- Dari sisi produksi atau ketersediaan juga diakibatkan oleh dimasih terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta rendahnya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan akibat dari perubahan iklim yang ditandai dengan luas lahan pertanian tanaman pangan yang gagal panen berupa padi tahun 2019 sebesar 992,7 Ha, jagung 655,5 Ha, dan kedelai 52 Ha.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen.

- Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi
- d. Kepemudaan dan Olahraga
- Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
 - Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 yaitu Aceh hanya memiliki stadion harapan bangsa dan beberapa tempat untuk perlombaan cabang olahraga. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.
- e. Pertanian
- Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Aceh.
- f. Lingkungan Hidup
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Indeks kualitas hidup Aceh masih 75,54 walaupun indeks kualitas hidup nasional 71,00 persen, namun Aceh masih belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 57,14 persen, lahan dengan capaian 76,63 persen serta gas rumah kaca.
- g. Perhubungan
- Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2021 sebesar 0,71 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026.
- h. Persandian
- Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi,
 - Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian.

- i. Koperasi dan UKM
 - Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;
 - Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

- j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akte kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akte kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

3) Layanan Urusan Pilihan

- a. Pariwisata

Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi covid-19 .

- b. Pertanian

- Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar. Disamping itu hasil pertanian Aceh masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah;
- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai tukar petani yaitu 101,19 pada tahun 2021 sedangkan capaian nasional 107,18. Nilai tukar petani Aceh diharapkan mencapai 101,8 pada tahun 2026.
- Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh;

- c. Kehutanan

Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh. Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Deforestasi ini juga mengakibatkan tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat dengan jumlah kasus sebanyak 528 kasus dalam kurun waktu 2015-2021. Selain itu, Aceh memiliki potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar, namun belum dikelola secara optimal.

- d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya.
 - e. Perdagangan

Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi karena Aceh masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Aceh, termasuk untuk kebutuhan pokok dan juga kontribusi perdagangan terhadap PDRB masih berkisar 15,02 persen .
 - f. Perindustrian

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB baru sekitar 4,5 persen.
 - g. Kelautan Perikanan

Aceh belum mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 yang berbatasan dengan Selat Malaka dan WPP 572 yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (WPP PUD) 439. Termasuk juga, masih terbatasnya teknologi pasca panen hasil perikanan dan keberlanjutan klaster perikanan budidaya dan tambak garam. Permasalahan dalam produksi garam di Aceh adalah masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.
 - h. Transmigrasi

Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.
- 4) Penunjang Urusan Pilihan
- a. Perencanaan Pembangunan

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.
 - b. Keuangan
 - Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA;

- Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;
 - Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA;
 - Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (di antaranya PEN, TJSPL, CSO, dan PPP).
- c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi ;
 - Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.
- d. Penelitian dan Pengembangan
- Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Aceh. Hal ini disebabkan karena penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- e. Pengawasan
- Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan

2.5.4 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan untuk Aspek Daya Saing Daerah dapat ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan unsur Sumber Daya Manusia. Masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pada suatu wilayah memang merupakan kondisi alamiah atau natural yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Dalam konteks pembangunan di Aceh, pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh ditandai dengan indeks ketimpangan (Williamson) Aceh pada tahun 2021 berada pada angka 0,491.

B. Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita masih rendah masih 56,7 persen dan direncanakan pada tahun 2026 sebesar 67,22 persen;
- 2) Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106.

C. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

- 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum layak 87,66 sedangkan di tingkat nasional 90,21;
- 2) Ketersediaan Daya Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik masih sekitar 5,58 persen dan target peningkatan tahun 2026 sebesar 22,08 persen.

D. Iklim Berinvestasi

- 1) Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh;
- 2) Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi.

E. Sumber Daya Manusia

Indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,14 yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72,29 dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pada tabel 2.164 dapat dilihat permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

Tabel 2.166.

Permasalahan Pembangunan Aceh yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
1	2	3		4
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	2.1	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA
		2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Masih rendahnya nilai LPPD
		2.3	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP	Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan
		2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Tahun 2021 masih berada pada kategori B (60-70)
		2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen; Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan
		2.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Masih lemahnya sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran	Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah
		3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Masih rendahnya capaian standarisasi dayah
		3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal
		3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan
		3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan; Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi; Disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi; Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
		4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan
		4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif; Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
		4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan; Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
		4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh
		4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021; Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup; Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen
		4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi COVID-19	5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
		5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama.
		5.3	Pengendalian Inflasi	Nilai inflasi Aceh relative masih tinggi dibandingkan nilai inflasi Nasional
		5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong
		5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;
		5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman sereal (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan; Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
				komoditi perkebunan terbesar di Aceh
		5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya.
		5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi; Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah
		5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh; Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi
		5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi COVID-19

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
		5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).
		5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain;
		5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen; Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik
		6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman
		6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan

NO	TUJUAN	SASARAN		PERMASALAHAN
		6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	
		6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh;
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada

2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perumusan isu-isu strategis daerah yaitu isu global dan isu nasional, gambar 2.104 memperlihatkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam perumusan isu strategis Aceh.



Gambar 2.103.
Faktor - faktor yang mempengaruhi Perumusan Isu Strategis Aceh

Berdasarkan permasalahan pembangunan Daerah dan juga merujuk pada RPA Tahun 2023-2026, isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1 Peningkatan Kualitas Demokrasi

Sebagai salah satu provinsi yang akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024, maka Pemerintah Aceh dalam upaya menciptakan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan, bebas *money politic* serta berbagai intervensi dan intimidasi, berusaha untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada, meminimalisir potensi konflik antar partai politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

2.6.2 Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *outcome* dan *impact* yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan *key performance* lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan *performance cascading* agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

2.6.3 Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh mulai tahun 2000 dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan

kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

2.6.4 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik mengingat tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh 9,33 tahun sehingga belum memenuhi target Pendidikan Universal 12 Tahun. Rendahnya kualitas SDM juga dapat dilihat dari distribusi pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk tamatan SMA/ sederajat. Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat upaya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMA sederajat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Kesetaraan gender masih menjadi isu global yang tercantum dalam tujuan kelima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta terintegrasi ke dalam setiap tujuan lainnya. Untuk itu pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga perlu memperkuat partisipasi perempuan pada ruang publik, terutama pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan permasalahan sosial lainnya, perlindungan perempuan dan anak serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian. Sementara itu, pemerintah Aceh sedang mengusulkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DP3A.

2.6.5 Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan

Aceh akan menjadi Tuan Rumah PON tahun 2024, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini infrastruktur dan fasilitas keolahragaan (seperti; stadion, lapangan, GOR, dan kolam renang) beserta penunjangnya masih terbatas dan minim pemeliharaan. Di samping itu kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet juga masih membutuhkan perbaikan secara terus menerus agar atlet Aceh memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

2.6.6 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita dan neonatus. Selain itu juga terlihat dari usia harapan hidup masyarakat Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

Stunting (Balita Pendek) merupakan permasalahan krusial dikarenakan Angka Stunting di Aceh mencapai 37 persen. Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara masif pada berbagai tingkat pemerintahan dan terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya dan bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Aceh.

2.6.7 Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Aceh menjadi 15,53 persen pada September 2021 dibandingkan dengan 15,43 persen tahun September 2020. Percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh dilakukan melalui 6 (enam) strategi, yaitu: mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi biaya transaksi ekonomi, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok, dan mitigasi bencana. Selain persoalan persentase kemiskinan, Aceh juga memiliki 13 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, yaitu daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Untuk menangani persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Aceh akan memfokuskan penanganan komprehensif dan integratif pada daerah-daerah kantong kemiskinan, terutama memastikan kemudahan akses bahan kebutuhan pokok strategis, penyediaan akses layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta peningkatan pendapatan minimal di atas garis kemiskinan.

2.6.8 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh harus digenjot dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru berbasis kawasan (kluster) dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Aceh harus berfokus pada pengembangan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati pasar regional dan internasional seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, atsiri dan rempah (nilam, pala, cengkeh, dll). Pemerintah Aceh harus menyiapkan skema hilirisasi komoditi-komoditi yang dikembangkan oleh sektor pertanian, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk itu Pemerintah Aceh harus mampu menjamin perputaran *supply chain* industri komoditi-komoditi yang diunggulkan. Aceh tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar internasional. Pemerintah Aceh harus dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan laut yang dapat dilabuh oleh kapal-kapal cargo agar kegiatan ekspor dilakukan melalui kepabeanaan dalam wilayah Aceh. Salah satu infrastruktur penting yang harus segera dibangun dan dilengkapi adalah pelabuhan ekspor (salah satunya ekspor CPO) baik di pantai timur utara maupun barat selatan Aceh.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Aceh harus dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang telah diinisiasi pembangunannya, yaitu: Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, KEK Halal Barsela, Kawasan Strategis Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA), dan KEK Pariwisata Singkil Simeulue.

Disamping Kawasan-kawasan besar, terdapat beberapa kawasan skala kecil yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh, seperti kawasan agropolitan, minapolitan, peternakan, dan pariwisata. Kawasan-kawasan berbasis komoditas ini perlu dikembangkan untuk memacu pertumbuhan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas HPH dan transmigrasi yang ditinggalkan, dan juga dapat memanfaatkan potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar.

2.6.9 Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1 persen dari DAU mulai tahun 2023 dan akan menjadi nol pada tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Aceh. Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama: (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) pengentasan kemiskinan, (4) pendanaan pendidikan, (5) sosial, (6) kesehatan, (7) keistimewaan Aceh dan (8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Aceh perlu upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Aceh, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan, pengembangan kemitraan dengan swasta melalui mekanisme *Public Private Partnership*, pengembangan Lembaga Perwalian (*Trust Fund*), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), serta belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*).

2.6.10 Optimalisasi Kemandirian Pangan

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis, Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain. Aceh harus mandiri dalam menghasilkan minimal 12 (dua belas) jenis komoditi pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu meningkatkan

produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), dan juga peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Unggas).

Pengembangan komoditi-komoditi pangan tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat budidaya, tetapi juga harus sampai pada tingkat pengolahan dan distribusi/pemasaran yang berada dalam satu skema mata rantai hulu hilir yang terintegrasi.

Oleh karena itu Aceh perlu merebut kesempatan pembangunan lumbung-lumbung pangan (*Food Estate*) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemerintah karena Aceh memiliki potensi lahan yang luas dan *agroclimate* yang sesuai untuk pengembangan komoditi dan *agroindustry* pangan yang teintegrasi dan terkonsentrasi dalam bentuk Kawasan-kawasan. Pembangunan Food Estate ini diarahkan pada lahan-lahan HGU dan Kawasan Transmigrasi yang ditelantarkan.

2.6.11 Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan) saat ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, namun demikian sektor ini belum memberikan kesejahteraan kepada pelakunya. Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan rekonstruksi Sektor Pertanian untuk menghilangkan stigma bahwa lapangan kerja sektor pertanian dianggap sebagai sektor informal yang tidak menjamin kesejahteraan ekonomi. Kelembagaan petani tidak lagi hanya cukup sekedar Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), akan tetapi harus meningkat menjadi Koperasi, Perseroan, atau bentuk lainnya yang dapat mengelola usaha dalam satu manajemen sehingga dapat menciptakan efisiensi. Usaha pertanian yang selama ini memiliki skala mikro dan kecil dan identic dengan pola tradisional harus dapat bertransformasi menjadi usaha berskala korporasi yang menempatkan petani (termasuk peternak dan nelayan) sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk terlibat di dalamnya. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran.

2.6.12 Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antar wilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrik pengolahan, dll) wilayah tengah tenggara dan barat selatan. Proyek *Multi Years Contract* (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Disamping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusan jalan lintas tengah, peningkatan jalan lintas

Barat Selatan, serta pembangunan *spiral bridge* Paro-Kulu-Geurutee untuk mempermudah akses jalur Barat Selatan yang saat ini.

Infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air minum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri.

2.6.13 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana

Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (pertambangan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal pada kawasan-kawasan hutan. Luas tutupan hutan Aceh tahun 2018 mencapai 3.004.352 hektar, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 2.989.212 hektar, yang berarti dalam setahun Aceh kehilangan 15.140 hektar. Aceh Tengah merupakan daerah yang paling tinggi laju deforestasi, diikuti dengan Aceh Utara dan Aceh Timur.

Di samping itu, penanganan sampah, limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan industri maupun limbah rumah tangga semakin kurang terkendali. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

Dalam konteks kehutanan, Aceh memiliki luas kawasan hutan yang melebihi 50% dari luas daratan sehingga hutan merupakan posisi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Aceh. Keberadaan tutupan hutan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan berbagai sumber daya hayati, ketersediaan air, dan keberlangsungan kehidupan satwa liar.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik satwa maupun tumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 4 spesies kunci yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera dan Badak Sumatera (Selayang Pandang Atlas Hutan Aceh, 2010). Keberadaan 4 spesies kunci tersebut berada dalam bentang alam hutan aceh. Keempat spesies kunci tersebut juga dikenal sebagai spesies payung. Sehingga dengan melindungi keempat spesies tersebut, secara tidak langsung melindungi satwa liar lainnya.

Keadaan kritis 4 spesies tersebut akibat adanya aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar, konflik antara manusia dan satwa liar, kegiatan illegal di bidang kehutanan, kebakaran hutan dan lahan, hingga menyebabkan terancamnya populasi serta hilangnya habitat. Selain itu, bencana alam juga merupakan salah satu faktor penyebab keadaan kritis tersebut.

Terkhusus kejadian konflik antara manusia dan satwa liar, hal ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat kejadian konflik tersebut tidak saja mengakibatkan

kematian pada satwa tertentu, namun mengakibatkan korban di pihak manusia. Sebagaimana diketahui pula bahwa tidak ada satu formula khusus terbaik dalam upaya penanggulangan tersebut. Sehingga satu metode penanggulangan konflik perlu diikuti dengan strategi lainnya.

Dalam upaya penanggulangan kondisi kritis 4 spesies, dukungan dan peran serta para pihak dibutuhkan baik pada tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Upaya penanggulangan lainnya termasuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta mendorong praktik pengelolaan habitat secara baik dan benar

Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi bencana karena terletak di antara 2 lempeng (euroasia dan Indo Australia) serta akibat pengelolaan alam dan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bencana risiko tinggi yang sering terjadi di Aceh di antaranya gempa bumi, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami. Wabah penyakit, seperti halnya covid-19 yang meluas menjadi pandemi global, juga dapat dikategorikan dalam bencana dengan risiko tinggi di Aceh. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi bencana dengan melaksanakan pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan faktor kerentanan bencana serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam hal penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi dalam hal kewenangan pusat dan daerah.

2.6.14 Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Keberlangsungan perdamaian pasca konflik di Aceh belum berjalan maksimal oleh karena proses rekonsiliasi yang masih belum berjalan secara optimal. Proses penguatan perdamaian masih harus terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*).

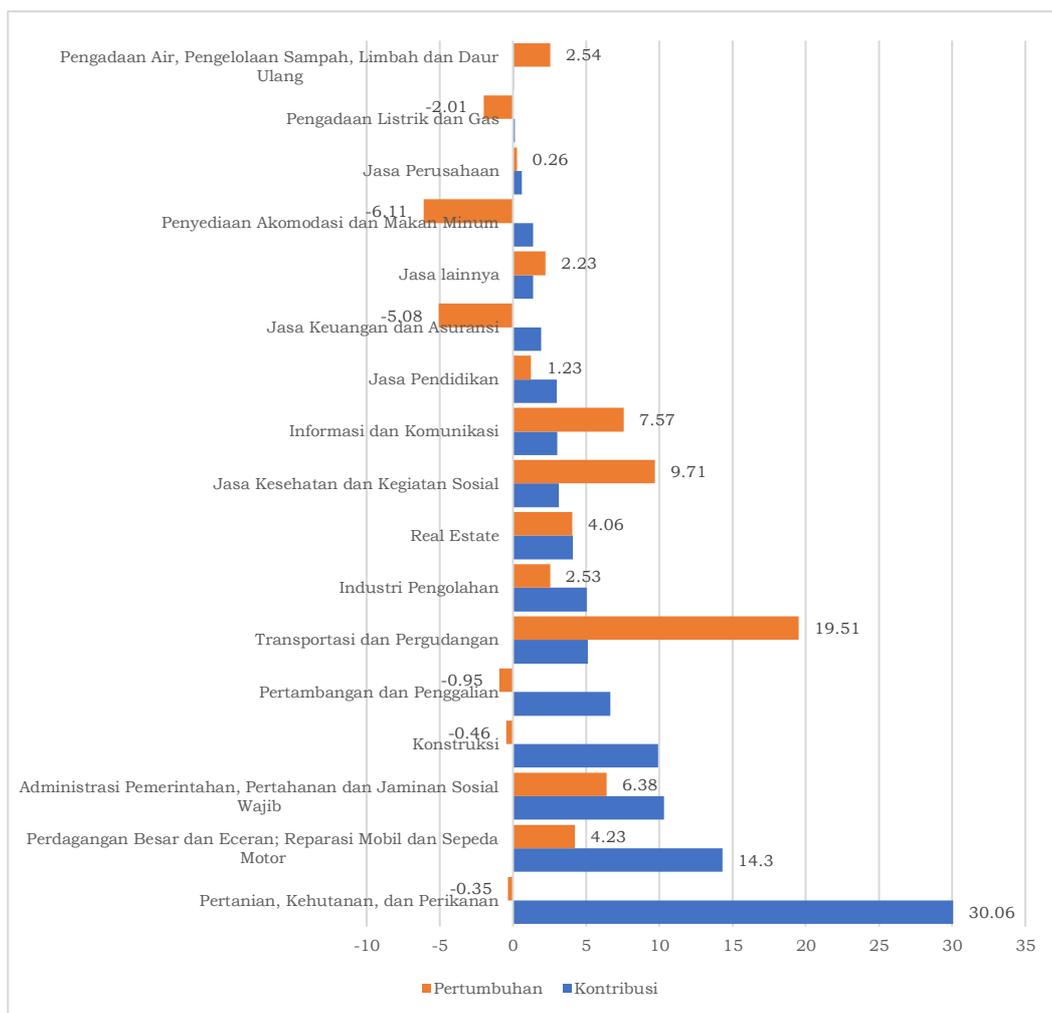
Salah satu isu krusial dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh adalah pemberdayaan ekonomi mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik yang selama ini dilakukan secara parsial. Pemberdayaan ini tidak berjalan optimal dikarenakan bantuan yang diberikan tidak komprehensif dan tidak melalui pendampingan yang intensif. Oleh karena itu ke depan pemberdayaan ekonomi kepada mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik harus melalui pola pengembangan usaha yang terpadu, bukan lagi berupa bantuan kepada individu-individu. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan perlu menjadi fokus utama, dalam bidang peraturan perundang-undangan hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan amanah UUPA. Mewujudkan hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta stakeholder terkait.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Secara garis besar kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2021 dari nilai PDRB tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik. Meskipun sempat mengalami kontraksi pertumbuhan pada Tahun 2020 (-0.34 persen) akibat merebaknya pandemi COVID-19, namun seiring dengan membaiknya pencegahan COVID-19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dengan migas kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya terjadi pada PDRB dengan migas, namun pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga terjadi pada non migas yang meningkat tajam dari minus 0,74 persen pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,59 persen di Tahun 2021.

Bila dilihat dari struktur perekonomian Aceh, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi *prime mover* perekonomian Aceh secara umum. Hal tersebut ditandai dengan dominasi dari kontribusi sektor pertanian pada tahun 2021 sebesar 30,06 persen namun sektor tersebut tumbuh minus sebesar 0,35 persen. Selanjutnya kontribusi terbesar kedua yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan capaian sebesar 14,3 persen dan pertumbuhan sebesar 4,23 persen. Dari 17 sektor penyusun PDRB Aceh, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang memiliki kontribusi terkecil di Tahun 2021 dengan pencapaian kontribusi sebesar 0,05 persen namun disertai dengan pertumbuhan yang positif sebesar 2,54 persen. Secara umum kontribusi dan pertumbuhan sektor penyusun PDRB Aceh pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyusun PDRB Aceh Tahun 2021 (Persen)

Berdasarkan prediksi dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Aceh pada Tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3.71-4.51 persen (YoY). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU perdagangan, Industri pengolahan, serta administrasi pemerintahan diyakini akan menjadi pendorong laju pertumbuhan dari sisi LU.

Meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kinerja beberapa lapangan usaha utama yang secara umum diperkirakan meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, langkah pemerintah yang sudah mulai melakukan vaksinasi masal sejak awal Tahun 2021 diperkirakan dapat mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat dan diikuti oleh tingkat belanja yang lebih tinggi (Bank Indonesia, 2021).

Bila dilihat dari angka prediksi pertumbuhan ekonomi di atas, perekonomian Aceh mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun belum dapat menyamai angka target sebesar 6 persen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022. Namun

demikian tren perkembangan tersebut juga akan dialami oleh perekonomian Sumatera dan Nasional pada umumnya. Penanganan COVID-19 masih menjadi tantangan yang harus dilakukan, meskipun tantangan lainnya yakni defisit perdagangan antar daerah di Aceh masih terjadi dengan *gap* mencapai Rp 44,5 triliun pada Tahun 2020.

Dalam meningkatkan kinerja perekonomian Aceh, tentu tidak terlepas dari aksesibilitas terhadap Pendapatan Aceh baik yang berasal dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) maupun pendapatan yang bersifat transfer dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi pelaksanaan pemerintahan daerah secara maksimal melalui pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Penerimaan tersebut harus mengacu kepada Undang-undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Aceh perlu menyesuaikan alokasi keuangan tersebut sesuai dengan arah kebijakan ekonomi daerah serta kebijakan keuangan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) agar kapasitas fiskal Aceh tersebut menjadi lebih optimal dalam perencanaannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026. Secara mendasar arah kebijakan tersebut yakni “Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam rangka mengatasi dampak sosial ekonomi dari covid-19”. Arah kebijakan tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional yang ditetapkan dengan tema “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang juga fokus pasca pemulihan ekonomi yang bersifat jangka pendek dan dilakukan dengan intervensi pada sisi permintaan (*demand side*) menuju transformasi ekonomi yang bersifat menengah dan jangka panjang, serta dilakukan dengan intervensi pada sisi produksi (*production side*).

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan kinerja ekonomi Aceh meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPA Tahun 2023-2026 sebesar 3,6 persen pada Tahun 2023 dan 3,74 persen pada Tahun 2024. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan nasional sesuai dengan hasil Rakortekrenbang dan Rancangan RKP sebesar 4-4,5 persen pada Tahun 2023. Begitu juga dengan indikator makro lainnya yakni persentase penduduk miskin yang ditargetkan menurun di tahun 2023 sebesar 15,03 persen, sementara target nasional sebesar 13,71-14 persen. Indikator lainnya yakni

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 5,48 persen, sedangkan target nasional sebesar 5,07-6,01 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari sektor pajak diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan terjadinya pemulihan ekonomi dampak covid-19 yang terus bergerak maju ke arah perbaikan terutama di Aceh. Berdasarkan hasil kajian dari Bank Indonesia (2021), bahwa perbaikan pada sektor pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kendaraan tipe mobil pada triwulan III 2021 terkontraksi sebesar 8,88 persen (yoy) atau membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 18,19 persen. Kendati demikian, insentif fiskal melalui pajak mobil baru (PPnBM) 0 persen yang telah diterapkan sejak awal Maret 2021 nampaknya mulai memberikan dampak perbaikan terhadap penjualan mobil. Hingga September 2021, jumlah penjualan mobil baru di Aceh tercatat 5.558 unit atau meningkat 6,01 persen (yoy). Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan hingga Maret 2022. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 dan akan memberikan perbaikan yang cukup baik dalam sektor perpajakan kendaraan bermotor hingga beberapa tahun ke depan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen.

Selain dari pajak kendaraan, pajak rokok juga diproyeksi mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2022, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan kenaikan sebesar 12 persen pada beberapa jenis rokok tertentu. Kebijakan kenaikan tarif tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12 persen.

Proyeksi pemulihan ekonomi daerah yang terus membaik juga memberikan dampak pada sektor usaha dan perdagangan di Aceh. Perbaikan tersebut juga akan mempengaruhi besarnya retribusi usaha yang nantinya dapat ditingkatkan beberapa tahun mendatang dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 7,75 persen. Pada sektor perizinan usaha dan retribusi jasa umum lainnya juga diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21 dan 7,24 persen.

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan juga diprediksi meningkat dengan rata-rata sebesar 1,02 persen. Pada kelompok ini menggambarkan dari besarnya *sharing return profit* dari BUMA yang ada di Aceh, diantaranya Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, dan Perusahaan Pemerintah Aceh. Besar dan kecilnya nilai pendapatan sektor BUMA ini juga didukung kapasitas dari penyertaan modal dari Pemerintah Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh.

Lain-lain PAA yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan pada semua komponen. Pada kelompok ini, pendapatan ziswaf diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5%. Besarnya proyeksi pendapatan ziswaf ini merupakan target yang akan dicapai oleh

Baitul Mal Aceh (BMA). Selain zakat, optimalisasi pemanfaatan wakaf sektor produktif juga akan dikembangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Selain pemanfaatan dari sektor ziswaf, upaya optimalisasi pendapatan Aceh juga diupayakan melalui pengelolaan BLUD di Aceh diantaranya BLUD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) di bawah Dinas Peternakan Aceh, RSUZA, RSIA, RSJ, Mekanisasi Pertanian, serta Masjid Raya Baiturrahman. Beberapa dari BLUD tersebut memberikan pendapatan yang besar bila dikelola dengan baik dan berkesinambungan di masa mendatang. Namun bila dilihat dari pencapaiannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan terutama di Tahun 2021. Sehingga dalam proyeksi pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen.

Kebijakan pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh tentu saja akan sangat mempengaruhi besarnya input pendapatan serta proyeksi yang diperoleh dalam struktur APBA. Untuk melihat besarnya realisasi dan proyeksi pendapatan Tahun 2020 sampai dengan 2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Aceh Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBA Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	14.439.920.557.021	13.899.517.101.308	13.352.983.387.589	9.616.151.064.969	10.786.324.265.156
Pendapatan Asli Aceh (PAA)	2.570.775.877.183	2.457.526.200.613	2.568.193.356.058	2.620.791.496.969	2.710.056.807.768
Pajak daerah	1.477.991.066.970	1.529.483.675.462	1.540.097.649.610	1.620.362.203.353	1.725.191.083.845
Retribusi daerah	8.159.969.910	8.183.545.280	9.071.960.000	10.711.403.000	10.351.430.550
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	181.700.799.036	152.745.336.249	182.385.550.448	170.482.717.094	171.411.411.699
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	902.924.041.268	767.113.643.622	836.638.196.000	819.235.173.523	803.102.881.674
Pendapatan Transfer	11.441.181.537.991	11.423.988.065.498	10.773.391.563.500	6.993.391.568.000	7.658.634.258.168
Dana perimbangan	3.885.903.189.991	3.868.160.259.498	3.213.391.563.500	3.213.391.568.000	3.516.634.258.168
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	127.272.935.167	170.895.239.146	136.740.173.500	145.857.788.000	156.563.351.877
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	39.867.057.258	31.415.012.322	84.282.936.000	75.165.326.000	57.237.370.523
Dana alokasi umum	1.956.492.796.000	1.945.980.616.000	1.947.783.847.000	1.947.783.847.000	1.904.530.704.990
Dana alokasi khusus	1.762.270.401.566	1.719.869.392.030	1.044.584.607.000	1.044.584.607.000	1.398.302.830.778
Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000	7.555.827.806.000	7.560.000.000.000	3.780.000.000.000	4.142.000.000.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	427.963.141.847	11.274.635.197	11.398.468.031	1.968.000.000	410.904.999.220
Hibah	43.126.992.771	9.815.653.425	11.398.468.031	1.968.000.000	30.000.000.000
Dana Penyesuaian	384.836.149.076	-	0	0	379.646.584.336
Pendapatan Lainnya	0	1.458.981.772	0	0	1.258.414.884
Dana Insentif Daerah (DID)	0	6.728.200.000	0	0	6.728.200.000
DID	0	6.728.200.000	0	0	6.728.200.000

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 (audited), 2021 (unaudited), 2023 (Proyeksi BPKA), 2024 (Proyeksi dalam RPA) /diolah)

Pada Tabel 3.1 juga menggambarkan bahwa dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang meningkat dan juga berkurang. Pada Tahun 2022, dana perimbangan Aceh berjumlah sebesar Rp. 3.213.391.563.500. Secara umum bahwa DAU untuk Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.947.783.847.000. Diprediksi anggaran tersebut sama di tahun 2023, dengan asumsi bahwa fokus Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 di Indonesia. Selain DAU, alokasi dana DAK juga diprediksi bergerak pada nilai yang sama dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.044.584.607.000. Pola proyeksi yang sama tersebut belum dapat dipastikan secara mendetail, namun di tahun 2024 diproyeksikan sedikit meningkat meskipun turun lambat ditahun 2025 dan 2026 sebagaimana proyeksi yang tertuang di dalam RPA 2023-2026.

Pada sumber Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH pajak diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 berturut-turut sebesar Rp. 1.620.362.203.353 dan Rp. 1.725.191.083.845 meskipun penurunan terjadi di tahun 2022 dengan perolehan sebesar Rp. 1.540.097.649.610. Sedangkan pada pendapatan transfer, persentase dana OTSUS akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari Tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan strategis di Aceh. Pada tahun 2022 besaran dana OTSUS sebesar Rp. 7.560.000.000.000. Dari besaran pendapatan OTSUS tersebut dapat diproyeksikan bahwa besarnya alokasi OTSUS akan mencapai sebesar 4 (empat) triliun pertahun hingga tahun 2027 mendatang.

Dalam upaya mengantisipasi pengurangan Dana OTSUS tersebut, Pemerintah Aceh perlu mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber pendanaan baru bagi program-program Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini dibiayai oleh Dana Otsus. Sebagai contoh, untuk mengantisipasi penurunan Dana Bidang Kesehatan adalah dengan mengalokasikan *share* penerimaan cukai rokok yang diterima Kab/Kota untuk dikelola oleh Provinsi dalam rangka mensupport JKA. Beberapa sumber pembiayaan lainnya yang juga bisa dioptimalkan adalah pembiayaan yang berasal dari *social finance*, seperti BMT, yang potensinya cukup besar.

Pemerintah Aceh perlu menyusun rencana transisi, untuk memastikan program-program Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini mendapat pembiayaan Dana Otsus tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh. Untuk Bidang Kesehatan, salah satunya adalah dengan mengkonversi JKA menjadi JKN. Selain itu, Pemerintah Aceh juga perlu menyusun strategi komunikasi yang tepat ke masyarakat terkait dengan penurunan Dana Otsus yang dapat berdampak pada berkurangnya intensitas program-program pelayanan masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir gejolak sosial yang mungkin muncul akibat penurunan tersebut.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh

Dalam upaya mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efektif dan efisien, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023-2026 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Pada prinsip tersebut saat ini Pemerintah Aceh telah mengimplementasikannya melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan demikian pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan tujuan, sasaran hingga ke level output pelaksanaan kegiatan;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelolaan urusan wajib, Pemerintah Aceh sangat memprioritaskan urusan pemerintahan pelayanan dasar, kesehatan, dan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). JKA merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh yang hingga saat ini masih dilakukan, meskipun perlu adanya transisi pengalihan JKA ke JKN sebagai alternatif dalam membiayai pembangunan Kesehatan ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Aceh yang terus menyempit;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Pembayaran gaji dan insentif merupakan kelompok belanja operasi yang harus dipenuhi. Belanja yang bersifat mengikat tersebut dilakukan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan yang baik di Pemerintahan Aceh;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan. Upaya stimulus belanja tersebut dilakukan guna mengurangi ketimpangan wilayah yang saat ini masih terjadi di Aceh, meskipun ketimpangan tersebut belum menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup jauh. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yakni transfer Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota melalui Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA);
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Aceh ditujukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim serta fakir miskin;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemendesakan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi; dan
7. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya Dana OTSUS 2028.

Secara umum Belanja Aceh terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa kelompok belanja. Pada kelompok belanja operasi, belanja barang dan jasa diprediksi akan mengalami penurunan yang cukup besar seiring dengan kebijakan untuk merumahkan ± 10.150 tenaga

Non ASN di lingkungan Pemerintah Aceh yang di mulai pada tahun 2023 mendatang hingga penetapan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu juga pengurangan pada kelompok belanja barang dan jasa dilakukan untuk mengefisienkan belanja agar lebih optimal seiring dengan pengurangan pendapatan Aceh.

Pada kelompok belanja hibah juga diprediksi mengalami penurunan. Alokasi belanja hibah ini menurun karena mengikuti asumsi tren penurunan di tahun 2021 sebesar minus 11,03 persen. Meskipun berkurang, namun alokasi dan proyeksi belanja hibah tersebut masih dalam batas kewajaran. Dalam mengantisipasi pengalokasian dana hibah kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran, sehingga diperlukan verifikasi dan pencermatan yang tepat agar alokasi hibah tersebut menjadi lebih memberikan efek dan dampak kesejahteraan masyarakat penerima hibah.

Pada kelompok Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan. Penurunan alokasi pada kelompok belanja tersebut dikarenakan penurunan dana OTSUS yang akan berkurang di tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS, maka Dana Otsus Kab/Kot (DOKA) juga akan berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan dari tahun 2023 tersebut mengacu kepada tren alokasinya di tahun 2022 dengan asumsi bahwa alokasi DOKA merupakan 40 persen dari alokasi OTSUS setelah pengurangan dana untuk kegiatan bersama dan alokasi Otsus Provinsi.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT), diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup besar sebagai upaya antisipasi penanggulangan bencana dan antisipasi lonjakan covid-19 bila sewaktu-waktu mengalami peningkatan. Alokasi BTT tersebut merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penurunan juga diprediksi terjadi pada kelompok belanja modal pada tahun 2023, dengan penurunan hampir mencapai 43 persen dari tahun 2022. Penurunan tersebut berkaitan dengan proyek MYC yang berakhir di tahun 2022. Meskipun demikian, penuntasan ruas-ruas jalan MYC tetap dilakukan secara *single year*, sehingga belanja modal tersebut diprediksi meningkat kembali di tahun 2024. Penurunan pada belanja modal di tahun 2023 tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal Aceh yang terus menyempit seiring dengan asumsi pendapatan Aceh yang mengalami perlambatan. Untuk melihat besarnya realisasi dan proyeksi belanja Aceh tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBA Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi	7.985.982.044.905	8.620.626.506.192	9.333.309.453.498	7.603.012.723.119	7.125.277.211.637
Belanja Pegawai	3.160.386.358.294	2.637.829.533.586	2.869.790.021.067	3.062.658.603.347	2.820.995.798.675
Belanja Barang dan Jasa	3.951.400.888.243	5.090.549.151.242	5.433.053.331.442	3.607.307.193.245	3.714.917.622.891
Belanja Hibah	856.293.338.368	758.629.271.257	883.658.081.158	774.151.926.527	499.945.566.085
Belanja Bantuan Sosial	17.901.460.000	133.618.550.107	142.340.411.831	158.820.000.000	89.418.223.986
Belanja Subsidi	-	-	4.467.608.000	75.000.000	
Belanja Modal	1.755.472.079.286	2.224.555.906.492	3.028.637.258.835	1.053.394.317.646	2.124.466.862.930
Belanja Tidak Terduga	158.460.075.459	412.071.890	295.992.597.796	117.425.963.701	345.669.108.647
Belanja Transfer	3.342.298.602.245	2.834.519.544.755	3.512.711.351.148	1.600.850.593.503	1.858.883.771.095
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	802.937.015.414	715.264.216.632	936.000.000.000	792.497.456.352	657.703.771.095
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.539.361.586.831	2.119.255.328.123	2.576.711.351.148	808.353.137.151	1.201.180.000.000
TOTAL JUMLAH BELANJA	13.242.212.801.895	13.680.114.029.329	16.170.650.661.277	10.374.683.597.969	11.454.296.954.309

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 (audited), 2021 (unaudited), 2023 (SIPD), 2024 (Proyeksi dalam RPA) /diolah

Realisasi dan proyeksi belanja Aceh tersebut juga telah menyesuaikan dengan prioritas pemulihan ekonomi pasca COVID-19, sebagaimana sesuai dengan salah satu tujuan pembangunannya dalam RPA Tahun 2023-2026 yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi COVID-19”. Tujuan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 tersebut mencakup 13 arah kebijakan yang secara mendetil terdapat pada Bab VII.

Belanja Bantuan Keuangan Aceh dalam Tahun anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Keuangan umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota (DOKA) sebesar Rp. 760.190.637.151,- (tujuh ratus enam puluh milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- b. Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 48.162.500.000,- (empat puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Bantuan keuangan Khusus kepada Pemerintah Kota Banda Aceh (BMEC) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Bantuan Keuangan khusus kepada 289 camat di 23 Kabupaten/Kota (BOP Camat) sebesar Rp. 3.248.500.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bantuan Keuangan Khusus kepada 819 Mukim di 23 Kabupaten/Kota (BOP Mukim) sebesar Rp. 4.914.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah);

- Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Pembangunan Jalan Simpang Krueng Gukueh - Simpang Leupe sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),-
- Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk MTQ ke XIII Tahun 2023 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),-
- Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk pembangunan Menara masjid Baitul A'la (masjid Giok) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),-

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh diprediksi akan mengalami penurunan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Penurunan tersebut dicapai melalui penurunan dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh yang ditargetkan menurun seiring dengan target realisasi belanja yang ingin dicapai sebesar 90,46 persen di Tahun 2022. Upaya dalam pencapaian target tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi dari peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam mengakses pelayanan tender pekerjaan Pemerintah Aceh di tahun mendatang.

Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksi adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBA Tahun 2022	Proyeksi/target pada Tahun 2023	Proyeksi/target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Penerimaan Pembiayaan	2.848.097.021.014	3.969.617.354.782	3.413.167.273.688	808.532.533.000	888.634.621.060
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	2.846.141.906.063	3.969.617.354.782	3.413.167.273.688	808.532.533.000	888.634.621.060
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.955.114.950	-	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.848.097.021.014	3.969.617.354.782	3.413.167.273.688	808.532.533.000	888.634.621.060
Pengeluaran Pembiayaan	76.187.421.358	296.572.837.949	595.500.000.000	125.000.000.000	220.661.931.907
Pembentukan Dana Cadangan	76.187.421.358	55.135.637.949	75.500.000.000	75.000.000.000	43.949.371.907
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	241.437.200.000	520.000.000.000	50.000.000.000	176.712.560.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.187.421.358	296.572.837.949	595.500.000.000	125.000.000.000	220.661.931.907
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	2.771.909.599.656	3.673.044.516.833	2.817.667.273.688	758.532.533.000	667.972.689.153

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 (audited), 2021 (unaudited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah 9 (sembilan) misi yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Lebih lanjut terkait target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Target Sasaran dan Indikator Sasaran Indikator Pembangunan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Sasaran 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.3 – 5.9
2.	Tingkat Kemiskinan	%	7.5 – 8.5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.3 – 6.0
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.31 – 73.49
5.	Rasio Gini	Indeks	0.375 – 0.378
6.	Penurunan Emisi GRK	%	27.02
7.	Nilai Tukar Petani/NTP	Nilai	103 – 105
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	106 - 107

Sumber: Rancangan RKP 2023

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

RKPA Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan Ke-4 RPJP Aceh Tahun 2005-2025 dan penjabaran tahun pertama RPA Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJP Aceh Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005 – 2025 adalah:

“ACEH YANG ISLAMIS, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”

Adapun makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Islami adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Maju adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadapan tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

Damai adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman.

Sejahtera adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera

merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Aceh tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Merujuk pada RPA Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi.

Sasaran:

Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.

2. Tujuan 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.

Sasaran:

- a. Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP;
- b. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- c. Meningkatnya tingkat maturitas SPIP;
- d. Meningkatnya nilai SAKIP;
- e. Meningkatkan profesionalitas ASN;
- f. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

3. Tujuan 3: Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah.

Sasaran:

- a. Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-qur'an;
- b. Meningkatnya kemandirian dayah;
- c. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya penyaluran ZIS;
- e. Menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh.

"

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. Meningkatnya sekolah yang terakreditasi;
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- d. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;
- e. Meningkatnya minat baca masyarakat;
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

5. Tujuan 5: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi COVID-19.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;
- b. Menurunkan beban penduduk miskin;
- c. Pengendalian inflasi;
- d. Meningkatkan kemandirian desa;
- e. Pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19;
- f. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- g. Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian;
- h. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh;
- i. Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh;
- j. Meningkatnya sub kontribusi pariwisata;
- k. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan;
- l. Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan;
- m. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. Tujuan 6: Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.

Sasaran:

- a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
- b. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW;
- c. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik;
- d. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan pengelolaan hutan lestari;
- g. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

7. Tujuan 7: Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Sasaran:

Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal.

Lebih jelas terkait hubungan tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,20	Kesbang
1.1	Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi.	Skor Aspek Hak-Hak Politik	Skor	64,94 *)	65,00	Kesbang
		Skor Aspek Lembaga Demokrasi	Skor	74,91 *)	75,00	Kesbang
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58 *)	65,00	Ro. Organ
2.1	Mempertahankan Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan pada level WTP	Opini BKP	WTP/WDP	WTP *	WTP	BPKA
2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,7785/Tinggi**	2,8000/ Tinggi	Ro.Pemotda
2.3	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	2	Inspektorat
2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65,00	Ro. Organ
2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61,63	77,5	BKA
2.6	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32	Kominsa

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1		2	3	4	5	6
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	81,84	83,00	DSI
3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Quran	Angka Melek Alqur'an	%	82,00	83,00	DSI
3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase Dayah yang Mandiri	%	31,72	38,00	Dayah
3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	%	42,00	46,50	MPU
3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69,00	75,00	BMA
3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,005	0,062	MAA
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,58	Bappeda
4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,36	14,49	Disdik
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,71	Disdik
4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	94,00	95,62	Disdik
4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	DP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,47	65,48	DP3A

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1	2	3	4	5	6	
4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berpretasi	%	1,96	3,92	Pora
		Persentase Atlet Yang Berprestasi	%	60,00	75,00	Dispora
4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	Arpus
4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,00	Dinkes
		Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00	Dinkes
		Angka Kematian Bayi	/1000 LH	11	10	Dinkes
		Angka Kematian Ibu	/100.000 LH	223	194	Dinkes
4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Regional yang Fungsional	%	20	20	Dinkes
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,10	85,30	RSJ
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,10	91,57	RSUZA
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,40	82,50	RSIA
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,03	Bappeda

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1		2	3	4	5	6
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	NTP	101,19 *)	101,34	Tanbun
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	102,00	102,5	DKP
5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	Dinsos
5.3	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	%	2,24	2,18	Indag
5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	DPMG
5.5	Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Covid-19	Rasio UMKM Yang Diberdayakan	Rasio	0,008	0,01	Kop-UKM
		Pertumbuhan PDRB	%	2,79	3,6	Bappeda
5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	%	30,98*)	31,13	Tanbun
5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	%	6,35	4,00	ESDM
5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian aceh	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	4,5	4,53	Indag
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	67,42	6	Indag
5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	8,45	10,5	DPMPTSP

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1		2	3	4	5	6
5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,29	1,29	Budpar
5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10	Bappeda, BPKA
5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,63	74,27	Pangan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	5,48	Naker
5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,78	64,43	Naker
		Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	93,7	97,18	Naker
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,491	0,413	Bappeda
6.1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	PUPR
		Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	Dishub
6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	PUPR
6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	Pengairan

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1		2	3	4	5	6
6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	40,72	43,07	Perkim
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	77,06	78	Perkim
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	Perkim
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,54	76,07	DLHK
6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	76,52	77,00	DLHK
6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ tinggi	BPBA
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	Skor Aspek Kebebasan Sipil	Skor	84,94 *)	85,00	Kesbang
7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,571	0,857	BRA

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Dari Tabel 4.3 diketahui sebgain besar Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Secara jelas keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Aceh dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2023

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi.	Skor Aspek Hak-Hak Politik	PN7	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	a) Indeks Demokrasi Indonesia, b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah
		Skor Aspek Lembaga Demokrasi			
2	Mempertahankan Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan pada level WTP	Opini BPK		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional
3	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			
4	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi			
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP			
6	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN			
7	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)			

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
	Layanan Publik Berbasis Elektronik				
8	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Quran	Angka Melek Alqur'an	-	-	-
9	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase Dayah yang Mandiri	-	-	-
10	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	-	-	-
11	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	-	-	-
12	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	PN4	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	PN3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Harapan Lama Sekolah
		Angka Rata-rata Lama Sekolah			Rata rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
14	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A			-
15	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			-
16	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		Persentase Atlet Yang Berprestasi			-
17	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PN4	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi
18	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	PN3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	-
		Persentase Balita Stunting			Prevalensi Stunting pada balita
		Angka Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi (AKB)
		Angka Kematian Ibu			Angka Kematian Ibu (AKI)
19	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Regional yang Fungsional			-
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa			-
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin			-
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak			-

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
20	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	PN1	Meningkatnya nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB Pertanian
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Pertumbuhan PDB Perikanan
21	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	PN3	Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
22	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	PN1	Meningkatnya nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	-
23	Meningkatkan Kemandirian Desa	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)			-
24	Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Covid-19	Rasio UMKM Yang Diberdayakan			Rasio Kewirausahaan Nasional
25	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan			a) Pertumbuhan PDB perikanan, b) Pertumbuhan PDB pertanian
26	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB			-

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
27	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB			Pertumbuhan PDB industri pengolahan
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas			Pertumbuhan ekspor industri pengolahan
28	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)			Pertumbuhan investasi (PMTB)
29	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB			a) Nilai devisa pariwisata, b) Kontribusi PDB pariwisata
30	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)			Rasio perpajakan terhadap PDB
31	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan		Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan	Skor pola pangan harapan
32	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PN3	Meningkatkan produktifitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
		Rasio Penduduk Yang Bekerja			Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
33	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	PN5	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	a) Penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), c) peningkatan kondisi jalur kereta api sesuai standart TQI kategori 1 dan 2, d) persentase capaian on time performance (OTP) transportasi udara
		Rasio Konektivitas Daerah			
34	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA		-	-
35	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik		Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	a) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), b) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
36	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	

No.	Sasaran Pembangunan Aceh	Indikator Sasaran	PN	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak			-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			-
37	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PN6	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
38	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas GRK terhadap baseline	a) Persentase penurunan emisi GRK, b) Persentase penurunan intensitas emisi GRK
39	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)		Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana alam dan bahaya iklim	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
40	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	PN4	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2023

Perumusan tema pembangunan RKP Tahun 2023 mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi public, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemic COVID-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian tahun 2023. Selain itu, tema RKP Tahun 2023 juga dirumuskan sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021, sehingga tema RKP Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** ”. Untuk peningkatan produktivitas diperlukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Negara dan infrastruktur digital dan konektivitas. Sementara itu, dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka perlu dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM meliputi bidang Kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang disertai dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui strategi a) penguatan sistem jaminan social, b) percepatan modernisasi pertanian dan c) peningkatan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan pendidikan dilaksanakan melalui strategi a) penguatan sistem kesehatan nasional, dan b) peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* dilaksanakan melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha dilaksanakan dengan strategi a) percepatan revitalisasi pariwisata, dan b) memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilaksanakan dengan strategi a) percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, dan b) Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) dilaksanakan melalui strategi a) mendorong paktivitas ekonomi daerah, dan b) percepatan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dilaksanakan dengan strategi a) peningkatan penyediaan air bersih

- dan sanitasi, b) percepatan pemerataan infrastruktur digital, dan c) percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi tersebut dituangkan kedalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 disajikan pada infografis berikut.



Gambar 4.2
Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Sementara itu, jika kita lihat keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PN1 “**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**” memiliki keterkaitan dengan beberapa Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi a) pengendalian inflasi; b) meningkatkan kemandirian desa; c) pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID -19; d) meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; e) meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalan; f) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh; g) meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh; h) meningkatnya sub kontribusi pariwisata; i) intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan; j) meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan.
2. PN2” **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 yang mencakup : a) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh, b) menurunkan beban penduduk miskin, c) meningkatnya sub kontribusi pariwisata;
3. PN3 “**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**” memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi: a) meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB

serta tenaga pendidik dan kependidikan; b) meningkatnya sekolah yang terakreditasi; c) meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; d) meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga, e) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; f) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan; g) menurunkan beban penduduk miskin; dan h) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. PN4 "**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi sebagai berikut: a) menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh; b) meningkatnya minat baca masyarakat; c) memitigasi munculnya potensi konflik horizontal;
5. PN5 "**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 yakni meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
6. PN6 "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi: a) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; b) meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan c) meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana;
7. PN7 "**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan yang meliputi: a) meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi; b) mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP; c) meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); d) meningkatnya tingkat maturitas SPIP; e) meningkatnya nilai SAKIP; f) meningkatkan profesionalitas ASN; g) meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

4.2.2 Penelaahan Pokok Pokok Pikiran

Berdasarkan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 4.3
Alur Penyampaian Pokok Pokok Pikiran Dewan Dalam SIPD

POKIR memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD. Hal ini disebabkan karena melalui POKIR yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian POKIR ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan POKIR yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan. Adapun permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas dan daya saing pendidikan sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup pembangunan RKB, pembangunan kantin, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi perpustakaan, pembangunan fasilitas parkir, pengadaan alat praktek dan peraga, pengadaan buku referensi, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dan pembangunan laboratorium;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana dayah yang menunjang kualitas dan daya saing dayah sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dayah yang mencakup pembangunan RKB, pembangunan asrama santri, pembangunan MCK, pembangunan sumur bor, pembangunan mushalla, pembangunan balai pengajian, pengadaan komputer, pembinaan kompetensi santri, pekan raya santri Aceh;
3. Masih lemahnya kompetensi dan kualitas SDM kesehatan sehingga perlu dilakukan pelatihan ICU, bimtek, dll;
4. Masih tingginya angka prevalensi stunting di Aceh sehingga perlu dilakukan intervensi dan sosialisasi ke masyarakat;
5. Keterbatasan sarana kesehatan di daerah yang mencakup ruang rawat inap dan alat alat Kesehatan;

6. Masih banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak sehingga diperlukan penanganan atau pemeliharaan;
7. Tingginya tingkat kerusakan/degradasi tebing sungai sehingga diperlukan pembangunan dan penguatan tebing sungai;
8. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur kawasan pemukiman sehingga perlu dilakukan pembangunan SPAM, penyediaan sarana persampahan, drainase dan sarana pendukung lainnya;
9. Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga perlu dilakukan intervensi baik melalui bantuan peralatan maupun pemberdayaan;
10. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga diperlukan berbagai pelatihan/pemagangan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai/berdaya saing;
11. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan sehingga diperlukan pengadaan sarana untuk kemandirian pangan yang meliputi berbagai peralatan, pembangunan rumah produksi, pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur;
12. Tingginya konflik antara masyarakat dan satwa (gajah) sehingga perlu dilakukan berbagai upaya seperti penanaman berbagai tanaman yang tidak disukai gajah;
13. Tingginya tingkat kerusakan/deforestasi kawasan hutan sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pembatasan hutan melalui rehabilitasi hutan;
14. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di area sekitar hutan sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan, pengadaan tanaman produktif, pengembangan agroforestry;
15. Masih terbatasnya jumlah UMKM yang tangguh dan mandiri dalam penciptaan lapangan kerja sehingga diperlukan pelatihan/bimtek dan bantuan berbagai peralatan usaha;
16. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan sehingga diperlukan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan lapangan olahraga, pelatihan atlet, pelatih, wasit, dll;
17. Masih terbatasnya koleksi buku referensi perpustakaan sehingga diperlukan pengadaan berbagai buku bacaan dalam rangka meningkatkan minat baca/literasi masyarakat;
18. Masih terbatasnya pengembangan berbagai destinasi wisata sehingga diperlukan pembangunan berbagai sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana objek wisata;
19. Masih lemahnya promosi wisata sehingga diperlukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan seperti pengadaan berbagai festival, publikasi, workshop;
20. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sehingga diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas;

21. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa sehingga diperlukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
22. Masih rendahnya produktivitas dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/prasarana penangkapan dan budidaya seperti pengadaan alat tangkap, pengadaan benih, dll;
23. Masih rendahnya produktifitas dan kesejahteraan petani sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/prasarana pertanian melalui pengadaan pupuk, alsintan, bibit;
24. Masih terbatasnya sarana penyediaan tenaga listrik sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana yang mencakup Lampu LED, PTS;
25. Belum optimalnya penanganan keluarga korban konflik sehingga diperlukan pemberdayaan ekonomi korban konflik melalui bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan;
26. Masih lemahnya penguatan terhadap penerapan syariat Islam sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/perengkapan ibadah dan pelatihan/bimbingan.

4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka disusunlah berbagai strategi dan arah kebijakan. Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023 mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026. Terdapat 61 (enam puluh satu) strategi dan 74 (tujuh puluh empat) arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi :

1. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa;
2. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
4. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
6. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBA;
7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pemantapan pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Peningkatan implementasi MRI, kapabilitas APIP dan IEPK;
10. Pemantapan penataan organisasi;
11. Peningkatan kompetensi kepegawaian daerah;
12. Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik;
13. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan;

14. Aplikasi informatika yang lebih efisien dan *update*;
15. Penyelenggaraan statistik tematik;
16. Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
17. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian;
18. Peningkatan pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam Aceh;
19. Peningkatan akreditasi dan mutu pendidikan dayah;
20. Penguatan peran ulama dalam pembangunan;
21. Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh;
22. Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat;
23. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap;
24. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan;
25. Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;
26. Peningkatan karakter pemuda yang berkualitas dan berdaya saing;
27. Pembinaan atlet dan organisasi keolahragaan;
28. Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca;
29. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
30. Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
31. Percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat;
32. Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional;
33. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
34. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian;
35. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin;
36. Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi;
37. Peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa;
38. Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha;
39. Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional;
40. Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
41. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
42. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
43. Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemerintah untuk kemudahan akses bagi calon investor;
44. Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan;
45. Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh;
46. Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal;
47. Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi;
48. Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula;
49. Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi;

50. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan;
51. Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang;
52. Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air (SDA) serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat;
53. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman;
54. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
55. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim;
56. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
57. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
58. Pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
59. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
60. Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
61. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik.

Arah Kebijakan:

1. Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya;
3. Deteksi dan cegah dini serta optimalisasi kinerja forum bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar;
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik;
5. Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas);
6. Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur;
7. Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
8. Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan;
9. Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan;
10. Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA;
11. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN;

12. Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi;
13. Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi public;
14. Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi public;
15. Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan public;
16. Penguatan rewiu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran;
17. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional;
18. Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat ;
19. Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah;
20. Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama;
21. Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi;
22. Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat;
23. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi;
24. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
25. Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;
26. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
27. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga;
28. Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca;
29. Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
30. Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakatan Germas;
31. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor;
32. Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi;
33. Memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan;

34. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
35. Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan;
36. Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah;
37. Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi;
38. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM;
39. Meningkatkan promosi produk dan kemitraan UMKM;
40. Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan;
41. Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
42. Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
43. Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
44. Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
45. Intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;
46. Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal;
47. Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan;
48. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing;
49. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
50. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan;
51. Pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan;
52. Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan;
53. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
54. Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA;
55. Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian;
56. Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air;
57. Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir;
58. Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
59. Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis;
60. Pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, sistem drainase ;

61. Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
62. Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan;
63. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim;
64. Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan;
65. Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat;
66. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
67. Peningkatan tata kelola kehutanan;
68. Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS;
69. Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan;
70. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
71. Pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar;
72. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
73. Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini;
74. Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat.

Lebih jelas terkait berbagai strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Penguatan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa	Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024
				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Dideteksi dan cegah dini dan optimalisasi kinerja forum Bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas)
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	2.1	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBA	Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur
				Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	
		2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pemantapan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan
		2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Peningkatan Implementasi MRI, Kapabilitas APIP dan IEPK	Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan
		2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Pemantapan Penataan Organisasi	Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA
		2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan Kompetensi Kepegawaian Daerah	Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN
		2.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik	Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan	Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik
				Aplikasi Informatika yang lebih efisien dan update	Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik
				Penyelenggaraan Statistik Tematik	Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	
			Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Penguatan reuiu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	
			Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui singkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional.	
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran	Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Aceh	Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat
		3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Peningkatan Akreditasi dan Mutu Pendidikan Dayah	Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah
		3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan	Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama
		3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh	Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi
		3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap,	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
		4.2 Meningkatkan Sekolah yang Terakreditasi	Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan	Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		4.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan
		4.4 Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Karakter Pemuda yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
			Pembinaan Atlet dan Organisasi Keolahragaan	Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga
		4.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca
		4.6 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
			Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui masyarakat Germas
			Percepatan Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	
		4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional	Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi
				Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan	Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan
		5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin	Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan
		5.3	Pengendalian Inflasi	Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi	Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah
		5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa	Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi
		5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha	Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM
				Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional	Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM
		5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	
		5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian	Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian
		5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri	Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri
		5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemerintah untuk kemudahan akses bagi calon investor	Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor
		5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan	Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan
		5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk Pembangunan Aceh	Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh
		5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragamaman Pangan	Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal	Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal
		5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan
				Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3		4	5
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan
					Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
				Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan	Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan
					Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan
					Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian
					Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air
					Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir
					Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		6.4 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.
				Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase
				Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum
		6.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan
			Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim
			Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan
			Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.	Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat
		6.6 Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai	Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS
				Peningkatan tata kelola kehutanan
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan
				Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
				Pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar
				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
		6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik
				Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat

Sumber: RPA 2023-2026

4.2.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023

Perumusan tema pembangunan RKPA Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan tema RKP Tahun 2023, arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026, hasil evaluasi pembangunan Aceh Tahun 2021 dan serta isu strategis yang menjadi perhatian tahun 2023. Tema RKPA Tahun 2023 disusun sebagai respons terhadap kondisi Aceh yang mengalami dampak sosial ekonomi seperti peningkatan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19. Arah kebijakan Tahun 2023 dalam RPA Tahun 2023-2026 adalah meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari COVID-19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan RKPA Tahun 2023 adalah “ **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktifitas Pangan, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Rangka Mengatasi Dampak COVID-19 untuk Kesejahteraan Masyarakat** “. Tema pembangunan tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pangan. Selanjutnya, arah peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak pandemi COVID-19.

Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan indikator (a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (b) Pertumbuhan PDRB, (c) Indeks Gini;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator (a) Persentase Penduduk Miskin dan (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

Target indikator sasaran pembangunan Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Target Indikator Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023

No	Indikator Sasaran Pembangunan Aceh	Target
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	15.03
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.58
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5.48
4.	Pertumbuhan PDRB (%)	3.60
5.	Indeks Gini	0.307

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Sementara itu, untuk pencapaian tema pembangunan di atas dirumuskan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi:

1. Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.

Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 ditampilkan pada infografis dibawah ini.



Gambar 4.4
Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023

Secara rinci sasaran masing-masing Prioritas Aceh (PA) Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut.

PA 1**Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif**

Sasaran PA 1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Menurunkan beban penduduk miskin dengan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin melalui intervensi kepada penduduk miskin dengan pemberian bantuan;
3. Pengendalian inflasi dengan mendorong stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah;
4. Meningkatkan kemandirian desa dengan memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi;
5. Pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19 dengan mendorong peningkatan status UMKM melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk UMKM;
6. Meningkatkan potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan mendorong peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas petani, peternak, dan nelayan;
7. Meningkatkan kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian dengan mendorong peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian melalui pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
8. Meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian Aceh dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
9. Meningkatkan realisasi penanaman modal di Aceh melalui peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemerintah untuk kemudahan akses bagi calon investor melalui optimalisasi fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
10. Meningkatkan sub kontribusi pariwisata dengan mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
11. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan dengan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) serta LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;

12. Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan dengan mendorong peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan local melalui perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal;
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dengan mendorong peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi melalui melalui pelatihan dan pemagangan.

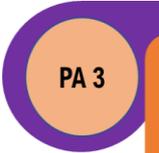
PA 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PA 2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan dengan mendorong peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi;
2. Meningkatnya sekolah yang terakreditasi dengan mendorong penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan melalui peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan melalui sosialisasi, seminar dan bimbingan;
4. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga dengan mendorong a) peningkatan karakter pemuda yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan b) pembinaan atlet dan organisasi keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan daya saing; penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor; serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
5. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan mendorong penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca melalui peningkatan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca;
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong a) peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan melalui peningkatan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan ; b) pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas, c) percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor;

7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan mendorong
 - a) penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional melalui penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi, b) pemenuhan sarana prasarana Kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan Kesehatan.


PA 3
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

Sasaran PA 3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan mendorong a) peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan, b) peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan melalui pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan; pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
2. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dengan mendorong kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang melalui pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA;
3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan mendorong peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian; peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air, pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir dan penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar dengan mendorong pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman melalui pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana; peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis; pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak; pengelolaan persampahan, sistem drainase,

dan peningkatan/pembangunan pelayanan serta pemenuhan standar kualitas air minum;

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong a) perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan; b) pengembangan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim; c) peningkatan pengelolaan persampahan melalui pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan; dan d) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan local melalui peningkatan edukasi, kualitas data, serta informasi LH kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pengelolaan hutan lestari dengan mendorong a) pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai melalui rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS dan peningkatan tata kelola kehutanan; b) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS, pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
7. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana dengan mendorong penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran melalui penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini.

PA 4

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh

Sasaran PA 4 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP dengan mendorong a) peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBA melalui peningkatan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur; b) peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui peningkatan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
2. Meningkatkan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan mendorong pemantapan pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan;

3. Meningkatnya tingkat maturitas SPIP dengan mendorong peningkatan implementasi MRI, kapabilitas APIP dan IEPK melalui peningkatan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan;
4. Meningkatnya nilai SAKIP dengan mendorong pemantapan penataan organisasi melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA;
5. Meningkatkan profesionalitas ASN dengan mendorong peningkatan kompetensi kepegawaian daerah melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN;
6. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik dengan mendorong a) peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi, b) pengelolaan Informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan melalui penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi public, c) aplikasi informatika yang lebih efisien dan update melalui penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi public, d) penyelenggaraan statistik tematik melalui penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan public, e) peningkatan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran melalui penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, f) peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional;
7. Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-qur'an dengan mendorong peningkatan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam Aceh melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat;
8. Meningkatnya kemandirian dayah dengan mendorong peningkatan akreditasi dan mutu pendidikan dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah;
9. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan dengan mendorong penguatan peran ulama dalam pembangunan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama;
10. Meningkatnya penyaluran ZIS dengan mendorong optimalisasi ZISWAF melalui optimalisasi fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi;
11. Menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh dengan mendorong peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat.

Perumusan prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan, isu strategis, arah kebijakan RPA Tahun

2023-2026, penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Dari Tabel 4.5 diketahui prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 konsisten dengan permasalahan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun berjalan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022. Lebih jelas keterkaitan antara prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan permasalahan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Permasalahan Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan	
1	Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	1	Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan
		2	Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama
		3	Nilai inflasi Aceh relative masih tinggi dibandingkan nilai inflasi Nasional
		4	Pendapatan Perkapita Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional
		5	Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong
		6	Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain
		7	Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya;
		8	Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
		9	Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi
		10	Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;
		11	Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen
		12	Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi COVID-19

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan	
		13	Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan
		14	Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan
		15	Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh
		16	Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi
		17	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah
		18	Aceh belum mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan
		19	Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).
2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1	Disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi
		2	Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan
		3	Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
		4	Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi
		5	Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB
		6	Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh
		7	Masih tingginya Angkatan kerja Pendidikan menengah Atas dan perguruan tinggi
		8	Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021;
		9	Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup;
		10	Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen
		11	Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022
		12	Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan	
		13	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin
		14	Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		15	Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen
		16	Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif
		17	Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi
		18	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		19	Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1	Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
		2	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)
		3	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman
		4	Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen.
		5	Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas
		6	Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen.
		7	Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan	
		8	Belum tuntas dan fungsionalnya pembangunan gedung/ bangunan publik yang terbengkalai sejumlah 47 unit yang tersebar di 19 kabupaten/kota
		9	Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik
		10	Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024
		11	Masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Aceh
		12	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan
		13	Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat
		14	Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh
		15	Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya
		16	Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan
4	Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	1	Implementasi Lembaga keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal
		2	Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah
		3	Masih rendahnya capaian standarisasi dayah
		4	Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan
		5	Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal
		6	Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim
		7	Belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan, mantan tapol/napol dan korban konflik
		8	Masih tingginya pelanggaran dari tahun 2018 sebesar 300 pelanggaran menjadi 1.400 pelanggaran pada tahun 2021, atau naik sebesar 420 persen.
		9	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan	
		10	Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada
		11	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		12	Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan
		13	Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA
		14	Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur
		15	Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA
		16	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kepegawaian
		17	Rendahnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN
		18	Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan
		19	Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Aceh

Sumber: Diolah oleh Bappeda Aceh, 2022

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2023 maka keempat prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 yang telah disusun konsisten dengan seluruh isu strategis yang ada. Konsistensi antara prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan isu strategis pada RKPA Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Isu Strategis Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Isu Strategis	
1	Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	1	Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
		2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
		3	Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan
		4	Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran
		5	Optimalisasi Kemandirian Pangan
2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		2	Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
		3	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1	Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
		2	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
4	Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	1	Peningkatan Kualitas Demokrasi
		2	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
		3	Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
		4	Penguatan Perdamaian secara berkelanjutan

Sumber: Diolah oleh Bappeda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui keempat prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 telah sesuai dengan arah kebijakan yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026. Lebih jelas keterkaitan antara prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPA Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026**

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026	
1	Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	1	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan
		2	Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan
		3	Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah
		4	Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi
		5	Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM
		6	Meningkatkan promosi produk dan kemitraan UMKM
		7	Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan
		8	Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalan
		9	Menyediakan sarana dan prasarana dasar di 53 embaga industri
		10	Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor
		11	Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan
		12	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh
		13	Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal
		14	Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan
		15	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing
2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi
		2	Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026	
		3	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan
		4	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
		5	Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga
		6	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca
		7	Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
		8	Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui masyarakat Germas
		9	Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor
		10	Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi
		11	Memenuhi sarana dan prasarana, alat Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan
		2	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
		3	Pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan
		4	Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan
		5	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi
		6	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan polar uang dengan RTRWA
		7	Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian
		8	Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air
		9	Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir
		10	Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026	
		11	Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas Kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.
		12	Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase
		13	Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum
		14	Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan
		15	Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim
		16	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan
		17	Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat
		18	Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS
		19	Peningkatan tata kelola kehutanan
		20	Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS
		21	Pemanfaatan hutan dan kawasan kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan
		22	Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan
		23	Pemulihan spesies kunci dan Mitigasi satwa Liar
		24	Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan
		25	Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini
4	Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	1	Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur
		2	Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah
		3	Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan
		4	Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan
		5	Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA
		6	Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Arah Kebijakan RPA Tahun 2023-2026	
		7	Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog serta aplikasi yang terintegrasi
		8	Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik
		9	Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik
		10	Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik
		11	Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran
		12	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional.
		13	Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat
		14	Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah
		15	Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama
		16	Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi
		17	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat
		18	Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat

Sumber: Diolah oleh Bappeda Aceh, 2022

Dari Tabel 4.9 diketahui seluruh Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan permasalahan pokok-pokok pikiran DPRA. Hal ini tergambar pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Pokok Pokok Pikiran DPRA Tahun 2023

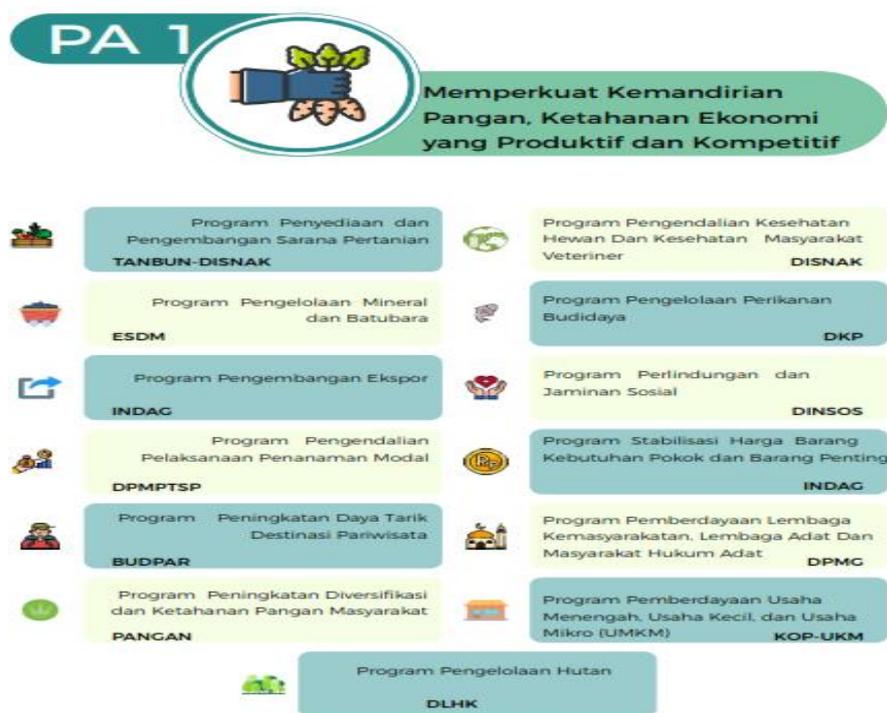
Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023		Pokok Pokok Pikiran	
PA1	Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	1	Masih terbatasnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan sehingga diperlukan pengadaan sarana untuk kemandirian pangan yang meliputi berbagai peralatan, pembangunan rumah produksi, pembangunan lumbung pangan dan lantai jamur
		2	Masih terbatasnya jumlah UMKM yang tangguh dan mandiri dalam penciptaan lapangan kerja sehingga diperlukan pelatihan/bimtek dan bantuan berbagai peralatan usaha
		3	Masih terbatasnya pengembangan berbagai destinasi wisata sehingga diperlukan pembangunan berbagai sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana objek wisata
		4	Masih lemahnya promosi wisata sehingga diperlukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan seperti pengadaan berbagai festival, publikasi, workshop
		5	Masih rendahnya produktivitas dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/prasarana penangkapan dan budidaya seperti pengadaan alat tangkap, pengadaan benih, dll.
		6	Masih rendahnya produktifitas dan kesejahteraan petani sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/prasarana pertanian melalui pengadaan pupuk, alsintan, bibit.
PA2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas dan daya saing pendidikan sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup pembangunan RKB, pembangunan kantin, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi perpustakaan, pembangunan fasilitas parkir, pengadaan alat praktek dan peraga, pengadaan buku referensi, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pembangunan laboratorium.
		2	Masih kurangnya sarana dan prasarana dayah yang menunjang kualitas dan daya saing dayah sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dayah yang mencakup pembangunan RKB, pembangunan asrama santri, pembangunan MCK, pembangunan sumur bor, pembangunan mushalla, pembangunan balai pengajian, pengadaan komputer, pembinaan kompetensi santri, pekan raya santri Aceh.

Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023		Pokok Pokok Pikiran	
		3	Masih lemahnya kompetensi dan kualitas SDM kesehatan sehingga perlu dilakukan pelatihan ICU, bimtek, dll.
		4	Masih tingginya angka prevalensi stunting di Aceh sehingga perlu dilakukan intervensi dan sosialisasi ke masyarakat
		5	Keterbatasan sarana kesehatan di daerah yang mencakup ruang rawat inap dan alat alat kesehatan
		6	Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga perlu dilakukan intervensi baik melalui bantuan peralatan maupun pemberdayaan
		7	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga diperlukan berbagai pelatihan/pemagangan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai/berdaya saing
		8	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan sehingga diperlukan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan lapangan olahraga, pelatihan atlet, pelatih, wasit, dll
		9	Masih terbatasnya koleksi buku referensi perpustakaan sehingga diperlukan pengadaan berbagai buku bacaan dalam rangka meningkatkan minat baca/literasi masyarakat
		10	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sehingga diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas
PA3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1	Masih banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak sehingga diperlukan penanganan atau pemeliharaan
		2	Tingginya tingkat kerusakan/degradasi tebing sungai sehingga diperlukan pembangunan dan penguatan tebing sungai
		3	Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur kawasan pemukiman sehingga perlu dilakukan pembangunan SPAM, penyediaan sarana persampahan, drainase dan sarana pendukung lainnya
		4	Tingginya konflik antara masyarakat dan satwa (gajah) sehingga perlu dilakukan berbagai upaya seperti penanaman berbagai tanaman yang tidak disukai gajah
		5	Tingginya tingkat kerusakan/deforestasi kawasan hutan sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pembatasan hutan melalui rehabilitasi hutan
		6	Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di area sekitar hutan sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan, pengadaan tanaman produktif, pengembangan agroforestri

Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023		Pokok Pokok Pikiran	
		7	Masih terbatasnya sarana penyediaan tenaga listrik sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana yang mencakup Lampu LED, PTS
PA4	Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	1	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa sehingga diperlukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		2	Belum optimalnya penanganan keluarga korban konflik sehingga diperlukan pemberdayaan ekonomi korban konflik melalui bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan
		3	Masih lemahnya penguatan terhadap penerapan syariat Islam sehingga diperlukan pengadaan berbagai sarana/perengkapan ibadah dan pelatihan/bimbingan

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023, maka dirumuskan beberapa program prioritas sebagaimana infografis berikut.



Gambar 4.5
Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023
(PA 1: Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif)



Gambar 4.6
Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023
(PA 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing)



Gambar 4.7
Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023
(PA 3: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan)



Gambar 4.8
Program Prioritas Pendukung Prioritas Aceh Tahun 2023
(PA 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh)

Sementara itu, berdasarkan Tabel 4.10 diketahui pagu indikatif dalam mendukung PA 1: **“Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi Yang Produktif dan Kompetitif”** berjumlah sebesar Rp. 138.251.046.573,- Terdapat 24 (dua puluh empat) Program Prioritas (PP) yang mendukung PA1. PP ini tersebar di beberapa SKPA sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
2. Dinas Peternakan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
6. Dinas Koperasi dan UKM;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pangan.

Lebih jelas terkait Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Program Prioritas (PP) dalam mendukung Prioritas Aceh (PA1) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Program Prioritas Pendukung PA 1 : Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL					138.251.046.573	
1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	11,39	11,45	9.302.400.000	TANBUN
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Komoditas Pangan Utama (padi)	Ton/Ha	5,6	5,65	16.093.772.800	TANBUN
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar	Rasio	0,23	0,18	9.866.861.598	DISNAK
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	283.676,35	237.214,46	19.170.478.000	DKP
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTPI	97,04	97,54	2.590.000.000	DKP
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	%	2,24	2,18	1.590.425.000	INDAG
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif;	Rasio	0,59	0,60	5.177.445.107	DPMG

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,89	1,9	16.510.323.450	KOP-UKM
9	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Rasio	0,008	0,01	8.541.918.801	KOP-UKM
10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio	0,26	0,42	2.057.114.255	KOP UKM
11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Rasio	n/a	0, 35	1.832.818.233	KOP UKM
12	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio	0,0008	0,001	3.229.811.070	KOP UKM
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	%	13,46	14,08	16.093.772.800	DISNAK
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	%	22,45	23,58	557.400.000	DISNAK
15	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	4	4	566.000.000	INDAG
16	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Ekspor	USD	274.644.949	208137848	350.000.000	INDAG

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	1126	1500	1.518.199.312	DPMPTSP
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	1	5	835.526.916	DPMPTSP
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2	3	8.376.604.170	BUDPAR
20	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-7,25	92,33	3.581.579.594	BUDPAR
21	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita/Tahun	150,74	153,14	1.108.000.000	PANGAN
22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	87,48	100	5.308.595.467	PANGAN
23	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10,03	8,3	1.392.000.000	PANGAN
24	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	%	100	100	2.600.000.000	PANGAN

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

Pagu indikatif dalam mendukung PA2 “**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**” berjumlah sebesar Rp. 2.168.021.437.481,- dengan Program Prioritas (PP) sebanyak 26 (dua puluh enam) PP yang terdapat di 14 (empat belas) SKPA sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
3. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Aceh;
4. Dinas Pendidikan Dayah;
5. Dinas Pendidikan;
6. Majelis Pendidikan Aceh;
7. Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA);
11. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA);
12. Rumah Sakit Jiwa (RSJ);
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Lebih detail mengenai Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Program Prioritas (PP) dalam mendukung Prioritas Aceh (PA2) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Program Prioritas Pendukung PA 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL					2.168.021.437.481	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	207.442.354	DP3A
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,38	0,41	79.632.671.725	BPSDM
3	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Fasilitas Kesejahteraan Rakyat	Indeks	16,78	100	7.121.988.403	RO ISRA
4	Program Pendidikan Dayah	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	60,30	72,72	47.902.287.605	DAYAH
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	%	75	77	927.943.535.611	DISDIK
6	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	%	13,72	27,05	1.066.821.885	DISDIK
7	Program Pengembangan Kurikulum	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,49	894.565.614	DISDIK
8	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rasio Kebijakan yang dikeluarkan	Rasio	0,8	0,8	486.975.904	MPA

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62	372.832.000	DISDIK
10	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	207.442.354	DP3A
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	55	60	6.600.000.000	PORA
12	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	%	53,57	90,32	80.696.779.989	PORA
13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70	75	700.000.000	PORA
14	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0015	0,0017	13.145.230.224	ARPUS
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi	%	93,3	100	780.152.326.722	Dinkes
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	58,50	63,00	6.083.570.571	Dinkes
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang	%	65	70	970.863.550	Dinkes

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Menerapkan Kebijakan Germas					
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang tersertifikasi	%	20	50	107.064.000	RSIA
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit zainal abidin	Indeks	91,1	91,57	150.292.950.395	RSUZA
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Ibu dan Anak	Indeks	81,4	82,5	18.080.374.475	RSIA
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit jiwa	Indeks	85,1	85,3	20.461.465.347	RSJ
22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	%	20	25	5.306.052.582	DINSOS
23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	60	65	10.708.196.171	DINSOS
24	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47,63	52,2	800.000.000	NAKER

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Aceh	Dokumen	1	1	202.025.757	NAKER
26	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	%	61,83	87,8	7.877.974.243	NAKER

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

Dari Tabel 4.12 diketahui Pagu Indikatif dalam mendukung PA3 “**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan**” berjumlah sebesar Rp. 692.741.514.974,-. PA3 didukung oleh 36 (tiga puluh enam) Program Prioritas (PP) yang tersebar di beberapa SKPA yang meliputi:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pengairan;
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Lebih jelas mengenai Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja serta SKPA Penanggung Jawab Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Aceh (PA3) dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12
Program Prioritas Pendukung PA 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL					692.741.514.974	
1	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4	1.530.000.000	ESDM
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4	4	4.954.827.480	INDAG
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	118.637.065.427	PUPR
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	82,44	84,58	30.774.782.000	DISHUB
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	73,11	76,1	13.683.290.000	DISHUB
6	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1)	Rasio	0,5	0,58	2.858.080.000	DISHUB
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	1.538.130.458	PUPR
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	89.489.636.545	PENGAIRAN

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	%	19	21	500.000.000	PERKIM
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani	%	30,14	31,65	152.862.000.000	PERKIM
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	60,21	63,22	56.073.468.477	PERKIM
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	33	38	103.957.808.045	PERKIM
13	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	Kawasan	5	5	6.800.000.000	NAKER
14	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan utk pembangunan dan pengembangan	%	1200	35,71	840.000.000	NAKER
15	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%	5 SP	35,71	7.410.000.000	NAKER
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	77,06	78	1.200.000.000	PERKIM
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	13.200.000.000	PERKIM
18	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	2.085.647.800	DLHK

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Program Pengendalian Pencemaran an/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,14	60	1.630.000.000	DLHK
20	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63	88,61	80.000.000	DLHK
21	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	66,67	67,39	130.000.000	DLHK
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	23	35	446.286.130	DLHK
23	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Dokumen	n/a	2	50.000.000	DLHK
24	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan \dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	- Persentase pengurangan sampah - Persentase penanganan sampah	%	- 10 - 34	- 10,5 - 35	400.000.000	DLHK
25	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	222.242.000	DLHK

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	45	46	5.940.000.000	DLHK
27	Program Pengelolaan Hutan	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1,09	3,1	48.072.096.000	DLHK
28	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penanganan konflik satwa	%	75,71	76,00	2.460.592.639	DLHK
29	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pemberdayaan kelompok tani hutan	%	7,96	11,15	250.000.000	DLHK
30	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	50,18	50,18	25.000.000	DLHK
31	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/ Sedang	0,58/ Sedang	22.299.594.973	BPBA
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50	60	2.340.967.000	BPBA

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

Dari Tabel 4.13 diketahui Pagu Indikatif dalam mendukung PA4 “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh**” berjumlah sebesar Rp. 2.087.756.040.650,- . PA4 ini didukung oleh 30 (tiga puluh) Program Prioritas (PP) yang terdapat di 19 (sembilan belas) SKPA yang meliputi sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Satpol PP dan WH;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh;
5. Inspektorat;
6. Biro Organisasi Setda Aceh;
7. Badan Kepegawaian Aceh;
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh;
12. Dinas Syariat Islam;
13. Majelis Permusyawaratan Ulama;
14. Baitul Mal;
15. Majelis Adat Aceh;
16. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
17. Dinas Pertanahan;
18. Badan Reintegrasi Aceh; dan
19. Keurokun Katibul Wali (KKW).

Lebih jelas terkait Program Prioritas (PP), Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja dan SKPA Pengampu Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Aceh (PA4) dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13
Program Prioritas Pendukung P4 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL						2.087.756.040.650	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	10,00	17,00	2.784.241.063	KESBANG
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	N/A	20,76	2.902.400.000	KESBANG
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang dibina	%	n/a	33,33	17.026.200.000	KESBANG
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	N/A	20,00	2.900.000.000	KESBANG

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	100	100	13.899.357.156	POL PP
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	1.745.163.627.246	BPKA
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	12,5	37,5	9.332.049.378	BPKA
8	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	3.485.888.523	RO PEMOTDA
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	3	4.704.686.239	INSPEKTORAT
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	7.509.110.203	INSPEKTORAT
11	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	84	86	1.874.850.000	RO ORGAN
12	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	76,97	79,00	0	BKA
13	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	7.808.073.642	KOMINSA
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	8.976.000.000	KOMINSA

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	%	94	95	438.109.000	KOMINSA
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Data	40	55	720.624.000	KOMINSA
17	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase paket yang selesai pemilihan	%	79	100	5.822.965.904	RO PBJ
18	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	0	BAPPEDA
19	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk	%	65	98,1	1.388.576.923	DRKA
20	Program Syariat Islam Aceh	Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam	%	82	83	21.680.292.883	DSI
21	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Rasio Sertifikat Halal yang diterbitkan	Rasio	0,44	0,71	7.624.771.405	MPU
22	Program Baitul Mal Aceh	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	69	75	93.957.293.878	BMA
23	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	0,044	0,08	1.574.123.401	MAA

NO.	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET		SKPA
				K	2023		
					K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	17,88%	20	37.438.522.938	BPKA
25	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	0	BAPPEDA
26	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan	%	30	50	250.000.000	TANAH
27	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	35	65	1.629.491.541	TANAH
28	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	15,220	21,030	72.588.509.675	BRA
29	Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	75	80	8.684.960.952	KKW
30	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	96,84	70,00	5.591.314.700	KESBANG

Sumber: Diolah Bappeda Aceh, 2022

Dari Tabel 4.14 diketahui keterkaitan Program Prioritas (PP) dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023. Secara umum, seluruh Program Prioritas (PP) mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabe; 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
1	1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KESBANGPOL
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	KESBANGPOL
			Dideteksi dan cegah dini dan optimalisasi kinerja forum Bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KESBANGPOL
			Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	KESBANGPOL

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
			Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KESBANGPOL
2	2.1	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA
			Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA
	2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan		
	2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
	2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	RO. ORGAN
	2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKA

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
	2.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	KOMINSA
			Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINSA
			Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINSA
			Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Penguatan rewiu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
			Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
3	3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran	Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat	Program Syariat Islam Aceh	DSI

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
	3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah	Program Pendidikan Dayah	DAYAH
	3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	MPU
	3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi	Program Baitul Mal Aceh	BMA
	3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	MAA
4	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
	4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
	4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
	4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	PORA
			Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	PORA
	4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca	Program Pembinaan Perpustakaan	ARPUS
	4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES/RSIA
			Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakat Germas	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
	4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES/RSIA/RSUZA/RSJ

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
5	5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	TANBUN
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	TANBUN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISNAK
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
	5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan		
	5.3	Pengendalian Inflasi	Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	INDAG
	5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMG
	5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	KOP UKM
				Program Pengembangan UMKM	KOP UKM
			Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM		
	5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan	Program Penyuluhan Pertanian	TANBUN

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
5.7		Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	ESDM
5.8		Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	INDAG
5.9		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
5.10		Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	BUDPAR
5.11		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA
				Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
5.12		Meningkatnya Kemandirian dan Keragamaman Pangan	Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PANGAN
5.13		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	NAKER

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
			Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	NAKER
6	6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
			Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
			Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
	6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
	6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PENGAIRAN
			Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PENGAIRAN

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
			Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PENGAIRAN
			Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PENGAIRAN
	6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.	Program Kawasan Permukiman	PERKIM
			Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,	PERKIM
			Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PERKIM
	6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK
			Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran an/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
			Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
			Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHK

NO	SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPA
1	2		3	4	5
	6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DLHK
			Peningkatan tata kelola kehutanan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHK
			Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DLHK
			Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan	Program Pengelolaan Hutan	DLHK
			Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	DLHK
			Pemulihan spesies kunci dan Mitigasi satwa Liar	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DLHK
			Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan	Program Pengelolaan Hutan	DLHK
	6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini	Program Penanggulangan Bencana	BPBA
7	7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat	Program Reintegrasi Aceh	BRA

Sumber: Diolah Oleh Bappeda Aceh, 2022

4.2.5 Keterkaitan dan Konsistensi Prioritas Aceh (PA), Program Prioritas (PP) dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu dalam perumusan prioritas pembangunan Aceh tahun 2023 harus memperhatikan/mengacu pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam RKP Tahun 2023. Dari Tabel 4.15 terlihat keselarasan antara prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. PA1 (memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif) selaras dengan PN1 (memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan), PA2 (meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing) selaras dengan PN3 (meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing), PA3 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan) selaras dengan PN2 (mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan), PN5 (memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar), PN6 (membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim), PA4 (penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh) selaras dengan PN4 (revolusi mental dan pembangunan kebudayaan), PN7 (memperkuat stabilitas Polhukhanham dan transformasi pelayanan publik).

Tabel 4.15

Keselarasan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Prioritas Nasional Tahun 2023	
PA 1	Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif	PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PA 2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
PA 3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
		PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
PA 4		PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023	Prioritas Nasional Tahun 2023	
	Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	PN 7	Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi pelayanan publik

Sumber: Diolah oleh Bappeda Aceh, 2022

Sementara itu, berdasarkan Tabel 4.16 diketahui sebagai besar program daerah dalam RKPA Tahun 2023 mendukung Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RKP Tahun 2023. Lebih jelas disajikan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16
Keselarasan Program Daerah dengan Kegiatan Prioritas PN Tahun 2023

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	ESDM
			2 Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	ESDM
			3 Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	ESDM
			4 Peningkatan pemenuhan energi domestik	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	ESDM
			5 Pengembangan industri pendukung EBT	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	ESDM

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
		2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Penyediaan air untuk pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN
				2	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN
				3	Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN
				4	Pengembangan danau multiguna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN
		3	Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan	1	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	PANGAN
				2	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)	PANGAN

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Komoditas pangan utama (padi);	TANBUN, PANGAN	
			4	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)	TANBUN	
			5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	PANGAN	
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	DKP
			2	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	DKP	
			3	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	DKP	

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			serta database kelautan dan perikanan					
		5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rasio Kewirausahaan	KOP UKM
				2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	KOP UKM
				3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rasio Kewirausahaan	KOP UKM
				4	Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	KOP UKM
				5	Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Kewirausahaan	KOP UKM
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi	1	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman,	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	INDAG

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
		di sektor riil, dan industrialisasi	dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir			
			2 Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	BUDPAR
			3 Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	INDAG
			4 Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	DPMPTSP
			5 Pengembangan industri halal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	DPMPTSP
		7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1 Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh	INDAG
			2 Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	INDAG

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Pengelolaan impor	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	INDAG	
			4	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Ekspor	INDAG	
			5	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	INDAG	
			6	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	BUDPAR	
		8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	BPKA
			2	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	INDAG	
			3	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	INDAG	

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			4	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	BUDPAR	
2	Membangun Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1	Pengembangan Kawasan Strategis	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB	INDAG
				2	Pengembangan sektor unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)	TANBUN
				3	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya; Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	NAKER
				4	Kelembagaan dan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu; Persentase kemandirian fiskal Aceh	BPKA
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	1	Pengendalian penduduk dan tata	1	Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk	DRKA

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
	berkualitas dan Berdaya saing	kelola kependudukan						
			2	Integrasi sistem administrasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk	DRKA	
			3	Pendampingan layanan terpadu	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk	DRKA	
		2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1	Sistem jaminan sosial nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi	DINSOS
			2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi	DINSOS	
			3	Perlindungan sosial adaptif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi	DINSOS	
			4	Kesejahteraan sosial	Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi	DINSOS	
		3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			2	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES	

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Peningkatan pengendalian penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES	
			4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	DINKES	
			5	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas	DINKES	
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas; Angka harapan lama sekolah	DISDIK
			2	Pemerataan akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	DISDIK	
			3	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	DISDIK	
			4	Penjaminan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas; Angka harapan lama sekolah	DISDIK	

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
			5 Peningkatan tata kelola pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas; Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	DISDIK
		5 Peningkatan kualitas anak perempuan, dan pemuda	1 Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA); Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	DP3A
			2 Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	DP3A
			3 Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	DISPORA
		6 Pengentasan kemiskinan	1 Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	DP3A
			2 Keberantaan usaha dan dampak sosial			
			3 Reformasi agraria	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya Kertersediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin;	TANAH

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
					Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan			
			4	Perhutanan sosial	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pemberdayaan kelompok tani hutan	DLHK	
		7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	NAKER	
				2 Prestasi olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	DISPORA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila uuntuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang dibina	KESBANGPOL

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	
			2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	SETDA,
			3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	DP3A
			4	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	KESBANGPOL
			5	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	KESBANGPOL

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
		2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1 Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Angka harapan lama sekolah	DISDIK
			2 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	BUDPAR
			3 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	BUDPAR
			4 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	BUDPAR

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
		3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1	Peningkatan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	ARPUS
				2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra	DISDIK
				3	Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	BAPPEDA
				4	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ; Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan; Rasio perpustakaan per satuan penduduk	BAPPEDA; ARPUS
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan	1	Infrastruktur pelayanan dasar	1	Pelayanan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan (khusus penilaian kota)	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani	PERKIM

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
	pelayanan Dasar		2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	PERKIM	
			3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN	
			4	Keselamatan dan keamanan transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	DISHUB	
			5	Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	BPBA	
			6	Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	PENGAIRAN	
		2	Infrastruktur ekonomi	1	Konektivitas jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	PUPR
				2	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	PUPR
		3	Infrastruktur Perkotaan (khusus peniaian provinsi dan kota)	1	Transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	DISHUB
				2	Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	DISHUB

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	PERKIM	
			4	Penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Program Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani	PERKIM	
		4	Transformasi digital	1	Penuntasan infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	KOMINSA
				2	Pemanfaatan infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	KOMINSA
				3	Fasilitas pendukung transformasi digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	KOMINSA
6	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	DLHK	
				2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	DLHK	
				3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	DLHK	

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
			4 Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup; Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	DLHK
		2 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1 Penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	BPBA
			2 Peningkatan ketahanan iklim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Udara	DLHK
		3 Pembangunan rendah karbon	1 Pembangunan energi berkelanjutan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penanganan konflik satwa	DLHK
			2 Pemulihan lahan berkelanjutan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Program Pengelolaan Hutan	Penanganan konflik satwa; Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	DLHK
			3 Pengelolaan limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	DLHK
			4 Pengembangan industri hijau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	DLHK
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam		1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	BKA

No	Prioritas Nasional/PN	Program Prioritas PN	Kegiatan Prioritas PN	Program Daerah	Indikator Program Daerah	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6	7
	dan Transformasi Pelayanan Publik					
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	BPKA
				Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	RO.ORGAN
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Admindex	DRKA
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	BPKA
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	INSPEKTORAT
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	KOMINSA
				Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	BAPPEDA
				Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase paket yang selesai pemilihan	RO. PBJ

Sumber: Diolah Oleh Bappeda Aceh, 2022

4.3 Pemenuhan SPM

SPM merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penetapan substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas (jenis SPM):

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Prinsip penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoodinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Jenis pelayanan dasar SPM provinsi terdiri atas:

1. Pendidikan menengah;
2. Pendidikan khusus;
3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
9. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Selanjutnya, target dan indikator penerima layanan SPM Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Target dan Indikator Penerima Layanan SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	2023
2	Pendidikan khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100%	2023
3	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
4	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
5	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	2023
6	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	2023

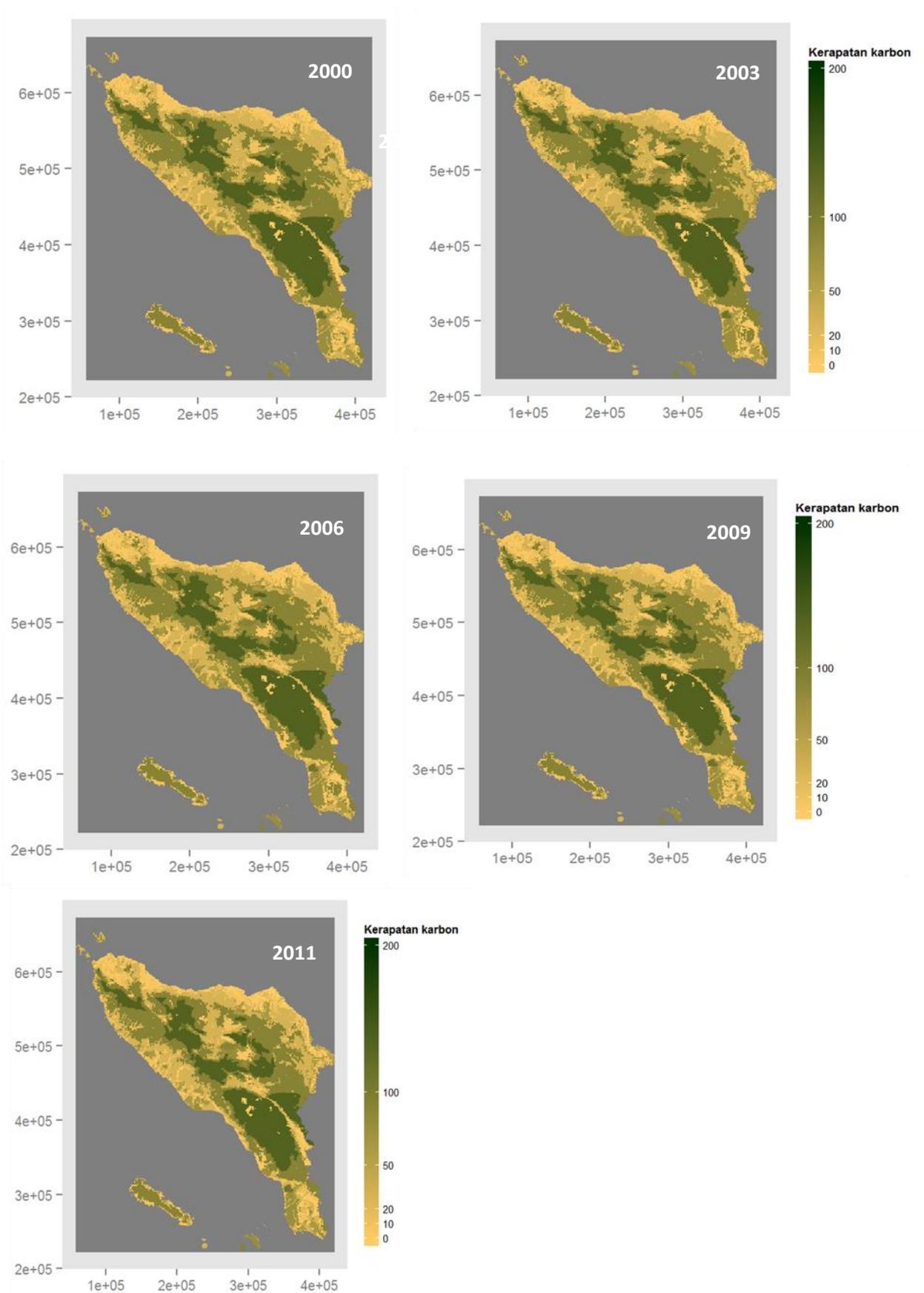
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2023
8	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2023
9	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	2023
10	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	2023
11	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar 100 % Setiap Tahun di dalam panti	100%	2023
12	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	2023
13	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	2023
14	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	2023

4.4 Pembangunan Rendah Karbon

Upaya penurunan emisi GRK sebagaimana mandat dalam Perpres No 61/ 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) telah jelas dinyatakan bersifat mandatory yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja melainkan juga Pemerintah Daerah. Sebagai daerah yang memiliki salah satu kawasan konservasi hutan terluas di Indonesia, Provinsi Aceh mempunyai peran penting dalam upaya menangani dampak dan tantangan perubahan iklim. Komitmen Pemerintah Aceh dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tertuang dalam Peraturan Gubernur No 85 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah untuk Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi dalam mengurangi emisi GRK. Dokumen RAD-GRK juga telah menjadi dasar bagi rencana aksi praktis, terukur dan terpadu untuk periode 2010 hingga 2020. Aksi mitigasi yang ditetapkan dalam RAD-GRK disusun secara selaras dengan RPJMA, RKPA, Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Aceh (RAD-GRK Aceh) mengimplikasikan aksi mitigasi di empat bidang prioritas, yaitu:

1. Bidang Pertanian;
2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut;
3. Bidang Energi dan Transportasi; serta
4. Bidang Pengelolaan Limbah.

Berdasarkan hasil pengolahan peta tutupan lahan secara time series dari tahun 2000 sampai dengan 2011 dan data cadangan karbon pada setiap kategori tutupan lahan dapat digunakan untuk membuat peta kerapatan karbon. Peta kerapatan karbon menunjukkan cadangan karbon pada periode tertentu yang dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.9
Peta Kerapatan Karbon Tahun 2006 - 2011

4.4.1 Bidang Pertanian

Potensi Emisi GRK Sektor Pertanian dapat diketahui dari hasil inventarisasi maupun perhitungan BAU Baseline emisi. Dalam Kaji Ulang RAD-GRK, potensi emisi GRK diketahui dari perhitungan BAU Baseline. Perhitungan BAU Baseline Sektor Pertanian mengacu pada Buku Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan (Bappenas, 2014). Berdasarkan Buku Pedoman Teknis tersebut di atas, perhitungan BAU Baseline emisi dilakukan pada 4 (empat) kategori sumber emisi, yaitu lahan sawah, peternakan (CH₄ dan N₂O), kapur pertanian, dan pemupukan (pupuk urea-CO₂ dan Direct N₂O). Secara garis besar, perhitungan dilakukan dalam 3 tahap utama yaitu perhitungan emisi historis, proyeksi BAU Baseline dan perhitungan total BAU Baseline emisi agregat. Dalam Kaji Ulang RAD-GRK, rentang tahun historis yang digunakan dalam perhitungan BAU Baseline adalah 11 (sebelas) tahun, yaitu mulai tahun 2000 hingga 2010. Rentang waktu tersebut lebih panjang daripada tahun dasar yang digunakan pada penyusunan RAD-GRK sebelumnya, dengan harapan agar proyeksi BAU Baseline emisi yang dihasilkan lebih valid. Hasil perhitungan emisi historis pada Provinsi Aceh ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Perhitungan Emisi Historis Bidang Pertanian Provinsi Aceh
Tahun 2000 – 2010

Tahun	Kategori Sumber Emisi					
	Lahan sawah (Gg CH ₄)	Peternakan (enterik dan manure) (Gg CH ₄)	Peternakan (manure management) (Kg CO ₂)	Kapur pertanian	Pupuk Urea (ton CO ₂ -C)	Direct (Kg CO ₂)
2000	106,52	58,37	38.414,82	-	-	-
2001	94,39	60,04	39.592,93	-	-	-
2002	100,10	60,23	39.710,53	-	-	-
2003	117,44	60,69	40.154,01	-	18.115,60	1.232.307,63
2004	118,27	58,99	39.409,24	-	13.158,20	1.214.473,27
2005	107,50	52,94	35.684,13	-	8.583,80	1.125.586,74
2006	101,98	59,84	40.859,06	-	10.384,20	1.049.062,26
2007	114,97	64,90	42.425,82	-	11.860,20	1.119.964,00
2008	105,12	51,30	34.167,47	-	11.706,40	1.145.705,42
2009	113,28	54,03	36.464,16	-	17.700,80	1.429.527,78
2010	111,90	57,55	38.634,59	-	15.913,60	1.351.593,35

Sumber: Pengolahan Data oleh Pokja RAD-GRK Aceh

Proyeksi BAU Baseline dilakukan untuk mengetahui angka estimasi emisi GRK pasca tahun 2010 hingga 2030 sesuai dengan komitmen pada *Intended Nationally Determined Contribution* atau INDC. Perhitungan proyeksi BAU Baseline emisi pada Provinsi Aceh menggunakan metode *historical linier* atau linier historis dimana tren yang dihasilkan dari data-data historis diproyeksikan secara linier untuk mengetahui emisi di masa depan. Dengan menggunakan metode di atas dan berdasarkan perhitungan emisi

historis sebelumnya, hasil perhitungan proyeksi emisi per kategori sumber emisi di Provinsi Aceh ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Proyeksi BAU Baseline Emisi Provinsi Aceh Tahun 2011-2030

Tahun	Sumber Emisi					
	Lahan sawah	Peternakan (enterik dan manure)	Peternakan N2O (manure management)	Pupuk Urea	Direct	Total Emisi/tahun
2011	2.282.872	1.161.720	10.957	5.055	424.258	3.884.862
2012	2.301.253	1.152.063	10.863	5.511	443.686	3.913.376
2013	2.319.634	1.142.406	10.769	5.966	463.114	3.941.889
2014	2.338.015	1.132.750	10.674	6.422	482.542	3.970.403
2015	2.356.396	1.123.093	10.580	6.877	501.970	3.998.916
2016	2.374.777	1.113.436	10.486	7.332	521.398	4.027.429
2017	2.393.158	1.103.779	10.392	7.788	540.826	4.055.943
2018	2.411.539	1.094.123	10.297	8.243	560.254	4.084.456
2019	2.429.920	1.084.466	10.203	8.699	579.682	4.112.970
2020	2.448.301	1.074.809	10.109	9.154	599.110	4.141.483
2021	2.466.682	1.065.153	10.014	9.610	618.538	4.169.997
2022	2.485.063	1.055.496	9.920	10.065	637.966	4.198.510
2023	2.503.444	1.045.839	9.826	10.520	657.394	4.227.023
2024	2.521.825	1.036.183	9.731	10.976	676.822	4.255.537
2025	2.540.206	1.026.526	9.637	11.431	696.250	4.284.050
2026	2.558.587	1.016.869	9.543	11.887	715.678	4.312.564
2027	2.576.968	1.007.212	9.449	12.342	735.106	4.341.077
2028	2.595.349	997.556	9.354	12.797	754.534	4.369.590
2029	2.613.730	987.899	9.260	13.253	773.962	4.398.104
2030	2.632.111	978.242	9.166	13.708	793.390	4.426.617
Total	49.149.830	21.399.620	201.230	187.636	12.176.480	83.114.796

Sumber: Pengolahan Data oleh Pokja RAD-GRK Aceh

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dan juga dokumen-dokumen perencanaan di Provinsi Aceh beberapa kegiatan mitigasi yang berhasil diidentifikasi dirangkum dalam Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20
Hasil Identifikasi Rencana Aksi Mitigasi Bidang Pertanian Provinsi Aceh

Kategori Kegiatan Mitigasi	Aksi Mitigasi Inti	Aksi Mitigasi Pendukung
Intervensi pada Sistem Pemupukan	1. Penggunaan pupuk organik dan kompos	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Kompos - Pengadaan mesin pembuat kompos - Pembangunan gudang Pengolah kompos - Pembangunan gudang pengolah pupuk organik - Pertemuan Sosialisasi Padi Organik

Kategori Kegiatan Mitigasi	Aksi Mitigasi Inti	Aksi Mitigasi Pendukung
		- Pelatihan Petani Padi Organik
Teknologi Budidaya	2. <i>System of Rice Intensification</i> (termasuk budidaya padi organik) 3. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 4. Penggunaan Varietas Padi Rendah Emisi	- Sosialisasi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) - Pelatihan Petugas dan Petani Padi Pola Sekolah Lapang - Pengadaan benih padi rendah emisi - TOT Sekolah Lapang PTT - Pelatihan Petugas Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) komoditi padi - TOT Sekolah Lapang SRI - Pembangunan Jaringan Irigasi - Pembangunan Saluran Drainase - Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi Air - Sekolah Lapang Pngendalian Hama Terpadu - Gerakan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan - Pemasarakatan Penggunaan Pestisida Nabati - Sosialisasi Penggunaan Agensi Hayati - TOT Sekolah Lapang PHT - Kegiatan Koordinasi Pemasarakatan PHT Tingkat Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis oleh Pokja RAD-GRK Provinsi Aceh

4.4.2 Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Sumber emisi GRK di Provinsi Aceh meliputi: perubahan lahan hutan menjadi non hutan atau alih fungsi lahan hutan seperti yang telah diidentifikasi dalam Tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4.21
Identifikasi Awal Sumber Emisi di Provinsi Aceh

Bidang	Potensi Sumber Emisi		
	Pemerintah Daerah	Masyarakat	Swasta/Badan Usaha
Kehutanan	Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam fokus konservasi Hutan	Tingginya Budidaya Kopi kerap kali menyebabkan perambahan lahan hutan untuk peningkatan produksi kopi	Pihak Pemilik Ijin tidak memiliki rencana karya usaha yang lestari menyebabkan banyaknya penebangan wilayah kawasan hutan berijin melebihi jatah tebang tahunannya sehingga menyebabkan stok hutan menjadi menurun

Permasalahan emisi GRK di Provinsi Aceh merupakan dampak dari perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk perkebunan, perluasan lahan pertanian, peningkatan produksi kayu yang melebihi etat/jatah tebang, illegal logging. Sedangkan permasalahan yang mempengaruhi kegiatan penurunan emisi meliputi:

1. Ruang dan Spasial

- Tumpang tindih kawasan hutan
- Belum adanya satu peta sebelum tahun 2010 menyebabkan kurang jelasnya tata batas hutan

2. Sosial dan Politik

- Komitmen Pemerintah Daerah yang belum begitu fokus terhadap peran dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan
- Kasus korupsi dan tata pemerintahan yang belum begitu baik
- Budaya masyarakat yang sering merambah kawasan hutan untuk budidaya kopi

3. Ekonomi

Dorongan peningkatan pendapatan daerah seringkali menyebabkan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk dialihfungsi tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Sementara itu, lahan gambut memiliki karakteristik tertentu terhadap emisi CO₂. Pengelolaan lahan gambut untuk berbagai penggunaan lahan berdampak pada meningkatnya emisi CO₂. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses dekomposisi dari lahan gambut dengan memprakrekan sistem drainase pada lahan. Luas lahan gambut di provinsi Aceh adalah 36.775 ha. Beberapa kegiatan yang saat ini terjadi dilahan gambut adalah adanya alihfungsi lahan gambut menjadi perkebunan, pembakaran tanah gambut untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kadar keasamaan tanah.

PEP RAD-GRK Bidang Berbasis Lahan Provinsi Aceh sudah berjalan dari tahun 2010-2016 yang terbagi ke dalam 2 (dua) kategori kegiatan yaitu Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon (PPCK) dan Peningkatan Cadangan Karbon (PCK). kegiatan mitigasi yang termasuk ke dalam kategori PCK adalah Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam, Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan.

Sedangkan Kegiatan mitigasi yang termasuk ke dalam kategori PPCK adalah Kegiatan Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Logging, Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan., Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan dan Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan.

Berdasarkan identifikasi sumber-sumber emisi dan faktor penyebab emisi di Provinsi Aceh, terdapat beberapa aksi mitigasi berbasis lahan sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Identifikasi Aksi Mitigasi Inti dan Pendukung

No	Lokasi (Unit Perencanaan)	Aksi Mitigasi Inti	Kategori Aksi (PPCK, PCK)	Aksi Mitigasi Pendukung
1	APL	Kegiatan Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Logging.	PPCK	1. Sosialisasi 2. Pengadaan Sarana Prasarana
2	APL	Kegiatan Pementapan dan Pengendalian Kawasan Hutan	PPCK	1. Inventarisasi Hutan 2. Sosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan
3	APL	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan.	PPCK	1. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri 2. Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran hasil Hutan
4	TAHURA	Kegiatan Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya.	PPCK	1. Penyediaan Sarana Prasarana 2. Sosialisasi Kegiatan konservasi pada TAHURA
5	APL	Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam	PCK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Hutan dan Lahan
6	APL	Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.	PCK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Hutan dan Lahan
7	APL	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	PCK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Hutan dan Lahan
8	TAHURA	Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan	PCK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Hutan dan Lahan
9	APL	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan.	PCK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Hutan dan Lahan

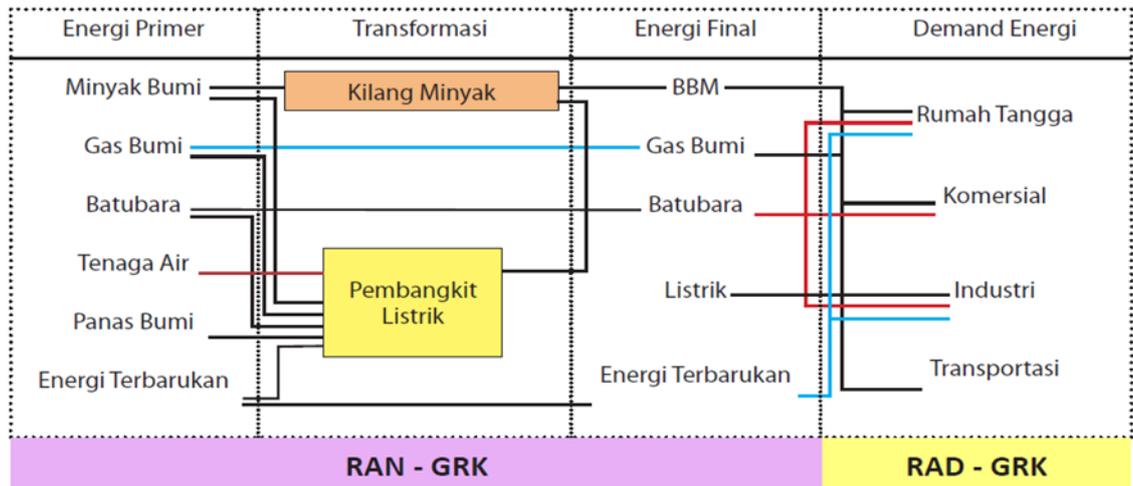
Sumber: Hasil Analisis oleh Pokja RAD-GRK Provinsi Aceh

Keterangan :

- PPCK : Pencegahan Penurunan Cadangan Karbon
- PCK : Peningkatan Cadangan Karbon

4.4.3 Bidang Energi dan Transportasi

Perhitungan emisi GRK di kelompok bidang energi dibagi berdasarkan otoritas pusat dan daerah. Sesuai kesepakatan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Energi RAN-GRK, emisi RAD-GRK sektor energi akan menghitung emisi GRK disisi kebutuhan (demand) energi. Demarkasi antara perhitungan emisi RAN dan RAD GRK dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.



Gambar 4.10
Demarkasi Antara Perhitungan Emisi RAN dan RAD GRK

Sumber-sumber emisi bidang energi mencakup penggunaan energi di tiga sektor pengguna energi utama di daerah yakni: sektor energi, sektor transportasi dan sektor industri. Ketiga sektor tersebut di atas menghasilkan emisi dari penggunaan bahan-bakar dari sumber energi fosil baik dalam bentuk bahan bakar maupun penggunaan energi listrik dari sumber-sumber energi konvensional. Lebih jelas mengenai sumber sumber emisi GRK dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Sumber-Sumber Emisi GRK

No	Sektor	Sub-sektor	Jenis Kegiatan	Bahan Bakar Penghasil GRK
1	Energi	Rumah Tangga	Memasak, penerangan, pendinginruangan, hiburan dan alat RT lainnya	Kayu bakar, arang, gas bumi, LPG, minyak tanah, listrik
		Komersial	Sarana Sosial, Komersial, Keuangan	Minyak solar, minyak tanah, listrik, gas, LPG, batubara

No	Sektor	Sub-sektor	Jenis Kegiatan	Bahan Bakar Penghasil GRK
		Lainnya	Pertanian, pertambangan, pertanian	Minyak solar, premium
		Pembangkit	Pembangkit non-EBT	Batubara, minyak diesel, minyak bakar, gas
2	Transportasi	Angkutan Darat	Mobil, motor, bus, truk, kereta api	premium, minyak solar, listrik
		Angkutan Laut	KapalLaut, Angkutan sungai dan penyeberangan	Premium, minyak solar
		Angkutan Udara	PesawatUdara	Avtur, avgas
3	Industri	Makanan	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Tekstil	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Kayu	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Kertas	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Kimia	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Non-logam	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Logam	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara
		Permesinan	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara

No	Sektor	Sub-sektor	Jenis Kegiatan	Bahan Bakar Penghasil GRK
		Lain-lain	Pemanasan langsung, pemanasan tidak langsung, proses pendinginan, mesin	Minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, LPG, gas bumi, listrik, batubara

Sementara itu, kegiatan-kegiatan aksi mitigasi GRK di bidang Energi (energi, transportasi dan industri) hingga tahun 2030 disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan yang sudah ada, maupun yang perencanaan terkait energi yang sedang disusun oleh Pemerintah Aceh. Dokumen-dokumen yang menjadi rujukan dalam penyusunan rencana aksi mitigasi Provinsi Aceh adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012- 2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012- 2017, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Energi Provinsi Aceh 2012-2017, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Aceh 2018-2050; Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Indonesia 2019-2028. Berdasarkan perencanaan daerah di atas, maka rencana aksi mitigasi GRK kelompok bidang energi yang dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24
Rencana Aksi Mitigasi GRK Kelompok Bidang Energi

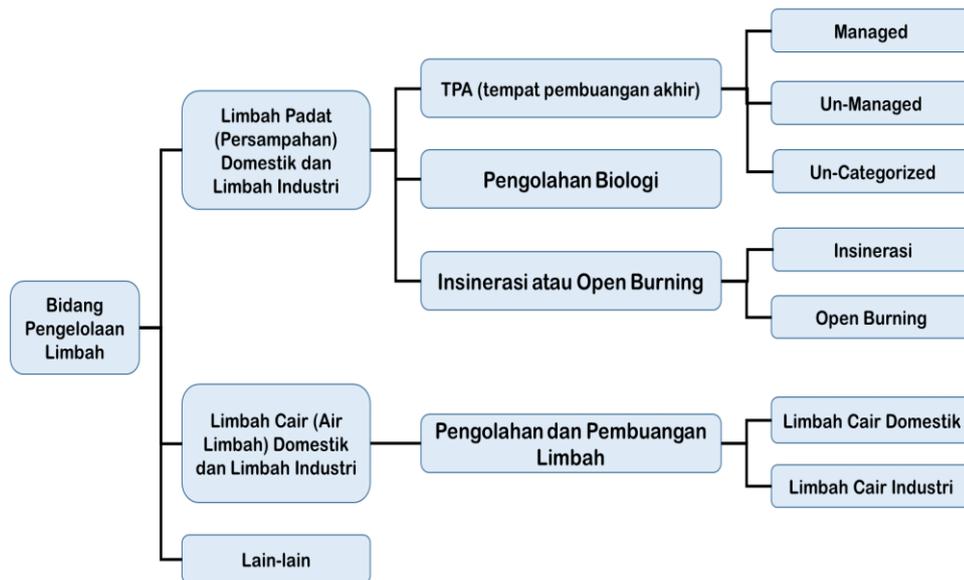
Nama Dokumen	Isi dokumen			Target hingga 2030 (MW, MWh, Persen, dll)	Estimasi Penurunan Emisi pada tahun 2030 (tCO2e)
	Kebijakan	Program	Kegiatan Mitigasi		
<i>Sektor Energi</i>					
Rencana Strategis Provinsi Aceh RPJM Aceh	Peningkatan pengembangan pembangkit listrik dari EBT	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	PLTMH	700 kW	2850,12
			PLTMH	3 MW	12.214,94
			PLTS Komunal	1,26 MWp	1.465,79
			PJU Tenaga Surya	30 kW	34,9
			Biogas	2.400 Unit	9.913,87
	Peningkatan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	PJU Hemat Energi	1.200 Unit	5.301
			Lampu Hemat Energi di Gedung Pemerintahan	14.000 Unit	1.546
RUPTL	Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi	Pemanfaatan EBT	Pengembangan PLTM	16,99 MW	49.531
			Pengembangan PLTA	88 MW	513.097
			Pengembangan PLTP	10 MW	58.306
Estimasi Penurunan Emisi GRK Sektor Energi pada tahun 2030					654.261
<i>Sektor Transportasi</i>					
RPJP Aceh	Pembangunan sarana dan prasana transportasi,	-		Ada pada Renstra	Ada pada Renstra

Nama Dokumen	Isi dokumen			Target hingga 2030 (MW, MWh, Persen, dll)	Estimasi Penurunan Emisi pada tahun 2030 (tCO2e)
	Kebijakan	Program	Kegiatan Mitigasi		
	energi listrik, air dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya				
RPJM Aceh	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung percepatan pembangunan Aceh.	Program Pembangunan prasaran dan fasilitas perhubungan		Ada pada Renstra	Ada pada Renstra
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
		Program peningkatan pelayanan angkutan			
	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ				
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			

Nama Dokumen	Isi dokumen			Target hingga 2030 (MW, MWh, Persen, dll)	Estimasi Penurunan Emisi pada tahun 2030 (tCO ₂ e)
	Kebijakan	Program	Kegiatan Mitigasi		
Renstra SKPD Prov Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kondisi Fasilitas Keselamatan Jalan - Peningkatan Keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan 	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Smart Driving	460 orang	2.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Keterpaduan Angkutan Umum Antar Moda Transportasi 	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Reformasi Sistem Transit-BRT	6 koridor	130.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pengawasan Angkutan Umum yang Belum Memenuhi Standar 	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor		
Estimasi Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi pada tahun 2030					132.000

4.4.4 Bidang Pengelolaan Limbah

Limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestic maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik. Lebih jelas terkait sumber utama GRK dari limbah domestik disajikan pada Gambar 4.11.



Sumber : berdasarkan kategori dari IPCC, 2006

Gambar 4.11
Sumber Utama GRK dari Pengelolaan Limbah

Sumber-sumber emisi GRK dari kegiatan bidang pengelolaan limbah dapat bersumber CH₄ (metana), N₂O (dinitrogen oksida), CO₂ (karbon dioksida). Lebih jelas terkait sumber emisi GRK dari Bidang Pengelolaan limbah dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut.

Tabel 4.25
Sumber Emisi GRK Bidang Pengelolaan Limbah

No	Sub-sektor	Emisi GRK	Jenis Kegiatan
1.	Persampahan	CH ₄ (metana)	<ul style="list-style-type: none"> • proses penguraian anaerobik sampah dan limbah industri (padat/sludge). • penimbunan sampah (dalam landfill, SWDS, open dumping) • pengolahan sampah dalam anaerobic digester. • pengelolaan sampah melalui pengomposan
		N ₂ O (dinitrogen oksida)	<ul style="list-style-type: none"> • pengomposan • pembakaran sampah.
		CO ₂ (karbon dioksida)	<ul style="list-style-type: none"> • pembakaran sampah. • CO₂ dari penimbunan sampah (di Landfill atau open dumping) dan pengolahan sampah secara biologi (pengomposan, anaerobic digester) tidak termasuk dalam inventarisasi karena termasuk <i>biogenic origin</i>
2.	Air Limbah	CH ₄ (metana)	<ul style="list-style-type: none"> • proses penguraian air limbah secara anaerobik

		N ₂ O (dinitrogen oksida)	• proses penguraian air limbah secara aerobik.
--	--	--------------------------------------	--

Permasalahan emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah berbanding lurus dengan jumlah populasi suatu wilayah. Jumlah timbulan sampah kota besar akan lebih besar dibandingkan dengan timbulan sampah kota kecil. Pada Provinsi Aceh memiliki jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 23 (dua puluh tiga), dengan jumlah Kabupaten/Kota yang tergolong kota besar sebanyak 1 (satu) kabupaten, kota sedang sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dan kota kecil sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Distribusi pengelolaan sampah juga mempengaruhi nilai emisi yang dihasilkan oleh bidang pengelolaan limbah.

4.5 Inovasi

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan pemerintah dalam menumbuhkembangkan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang menuntut adanya peningkatan kapasitas inovatif. Inovasi merupakan faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan public.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia melalui *Innovation Government Award* (IGA), dimana Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah mengusulkan 42 usulan inovasi yang seluruhnya diajukan oleh SKPA (daftar Inovasi layak kirim untuk Kompetisi IGA 2021) (lihat Tabel 4.7). Tahun 2021 Aceh menjadi peringkat 19, turun dari tahun lalu (2020) yang mendapat peringkat 16 dan diundang oleh Kemendagri untuk menerima "**Penghargaan Sangat Inovatif**". Ada beberapa kabupaten yang tahun lalu juga diundang untuk menerima penghargaan yaitu Aceh Tengah, Aceh Jaya, Bireuen dan Aceh Tamiang. Sedangkan tahun ini penghargaan sangat inovatif hanya diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Indeks Daya Saing Daerah Aceh Tahun 2021 mencapai kategori tinggi yaitu 2,763, yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh indeks sebesar 2,206; faktor penguat memperoleh indeks sebesar 3,134; sumber daya manusia memperoleh indeks sebesar 3,169; dan faktor pasar 2,541. Berdasarkan hasil pemetaan pilar terdiri 12 (duabelas), maka ada 10 (sepuluh pilar) dibanding rata-rata seluruh pilar yaitu dinamika bisnis sebesar 2,208; kesiapan teknologi sebesar 3, kelembagaan sebesar 4,333; infrastruktur sebesar 3,5; kesehatan sebesar 3,875; pendidikan dan keterampilan sebesar 2,464; efisiensi pasar produk sebesar 2,667; ketenagakerjaan sebesar 3,167; akses keuangan sebesar 2,333; dan ukuran pasar sebesar 2. Selain itu, untuk 2 (dua pilar) dibawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu perekonomian daerah sebesar 1,571 dan kapasitas inovasi sebesar 1,411. Lebih detail mengenai inovasi yang terdapat di OPD Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Daftar Inovasi Layak Kirim Untuk Kompetisi IGA Tahun 2021

No.	SKPA/Institusi	Nama Inovasi	Tahapan	Uji Coba	Penerapan	Kematangan
1	Disperindag	Pojok Kreatif IKM Aceh	Penerapan	10/03/2020	13/11/2020	80
2	Kesbangpol	Democratic Corner	Penerapan	01/01/2019	01/01/2020	106
3	Bappeda Aceh	JEP Berbasis Elektronik	Penerapan	04/02/2019	07/02/2020	114
4	RSUZA	Journal Of Medical Science (JMS) RSUD dr. Zainoel Abidin	Penerapan	02/01/2020	20/11/2020	124
5	RSUZA	SIKARZA (Sistem Informasi Karyawan RSUD dr. Zainoel Abidin)	Penerapan	21/04/2020	08/07/2020	126
6	RSJ	Instalasi Rehabilitasi Napza "Rumoh Harapan Atjeh" Rumah Sakit Jiwa Aceh	Penerapan	02/08/2010	01/01/2019	116
7	DSI	Aplikasi LKH DAI (Laporan Kerja Harian Da'i)	Penerapan	01/10/2019	01/01/2020	119
8	DSI	Aplikasi SIMASA (Sistem Informasi Masjid Aceh)	Penerapan	09/04/2019	09/04/2019	115
9	MPA	e-JurnalPencerahan	Penerapan	10/03/2018	08/03/2019	101
10	DPMPTSP	Kampanye Media Sosial untuk Menarik Minat Investasi	Penerapan	01/07/2019	09/03/2020	117
11	DPMPTSP	Website Promosi Investasi Investaceh.id	Penerapan	01/08/2021	01/10/2021	127
12	DPMPTSP	Aplikasi Arsip Data Elektronik DPMPTSP ACEH (E-DATA)	Penerapan	01/08/2020	01/09/2020	128

No.	SKPA/Institusi	Nama Inovasi	Tahapan	Uji Coba	Penerapan	Kematangan
13	DLHK	Aplikasi Sistem Monitoring Pembahasan Amdal dan Perizinan Online	Penerapan	10/08/2020	10/08/2020	95
14	BKA	e-Absensi (Absensi Online Pemerintah Aceh)	Penerapan	01/10/2018	01/05/2019	133
15	BKA	Sistim Pelayanan Terpusat (e-Lansat)	Penerapan	01/07/2019	25/06/2020	84
16	BKA	Sistim Informasi Ujian Dinas (SiUdin)	Penerapan	07/06/2019	01/01/2020	129
17	BKA	Sistim Informasi Manajemen Kinerja (SIManJa)	Penerapan	06/07/2018	01/06/2019	124
18	DPA	Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Penerapan	02/12/2019	12/03/2020	105
19	Distanbun	Pengembangan Cluster Padi Unggul Aceh IP 300	Penerapan	23/04/2019	23/04/2019	114
20	Distanbun	Inovasi Pelayanan E-Sertifikasi dan Label Barcode	Penerapan	02/03/2020	01/03/2021	101
21	Distanbun	Kebun Intensif SMART - BE dan Produk Turunannya	Penerapan	04/01/2018	04/01/2019	106
22	SMK PP Kutacane	Produk Kelas Industri	Penerapan	25/02/2020	13/11/2020	120
23	Baitul Mal	BaGAH (Baitul Mal Gerak Aksi Humanis)	Penerapan	01/01/2020	13/01/2020	150
24	Baitul Mal	Penghimpunan ZIS Melalui QRIS	Penerapan	01/02/2020	10/02/2020	150
25	Perkim	E-Katalog Lokal Rumah Layak Huni	Penerapan	28/08/2019	28/08/2019	110
26	Diskominsa	Aplikasi PPID Aceh	Penerapan	09/10/2019	03/08/2020	150
27	Diskominsa	Aplikasi SIAP-SPBE	Uji Coba	31/03/2019	19/07/2019	104
28	Dishub	Aplikasi Siaga Aceh Pantau (SAPA) Mudik Tahun 2020	Penerapan	14/04/2020	20/04/2020	102
29	BPKA	Samsat Jempol (Jemput Pajak Online)	Penerapan	17/10/2019	30/01/2020	123
30	Dinkes	Rumoh Gizi Gampong Sebagai Model Intervensi Stunting di Aceh	Penerapan	03/03/2019	01/07/2019	106
31	DRKA	Pelayanan Adminduk oleh Petugas Registrasi Gampong	Penerapan	29/04/2019	18/06/2019	150
32	Dishub	KoETA radja	Penerapan	09/06/2020	07/09/2020	120
33	Dishub	Si PANDA (Si Uroe Pre Keundraan)- Hari Bebas Kendaraan	Penerapan	14/08/2020	18/09/2020	132

No.	SKPA/Institusi	Nama Inovasi	Tahapan	Uji Coba	Penerapan	Kematangan
34	Diskop UKM	Sosialisasi Seleksi Wirausaha Pemula	Penerapan	01/01/2018	20/01/2020	107
35	Ro Isra	Donor Darah ASN Pemerintah Aceh	Penerapan	01/05/2020	04/05/2021	101
36	ESDM	Inovasi Edukasi Geologi untuk Masyarakat: Geomobil	Penerapan	07/01/2019	25/03/2019	125
37	BPBA	PEPB	Penerapan	01/01/2019	07/12/2019	88
38	DPMG	SIGAP	Penerapan	02/12/2019	04/01/2021	122
39	Ro Adpemb	Tuntas Infrastruktur Terbengkalai	Penerapan	17/06/2019	08/02/2020	108
40	Pangan	Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) Sayuran	Penerapan	01/06/2020	30/09/2020	110
41	Disbudpar	ACEHTOURISM.TRAVEL	Penerapan	01/02/2018	01/02/2019	127
42	Hukum	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terintegrasi	Penerapan	08/01/2019	03/06/2019	119

Sumber; Diolah Bappeda Aceh, 2022

4.5.1 SIKARZA (Sistem Informasi Karyawan RSUD-ZA)

Aplikasi Sikarza adalah aplikasi berbasis internet dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh dan merupakan wujud komitmen untuk menjaga lingkungan dan mengintegrasikan data kepegawaian. Aplikasi ini bertujuan memudahkan para karyawan di lingkungan RSUDZA untuk mengupdate data termasuk untuk kemudahan dalam pengurusan pangkat. Kehadiran aplikasi ini akan memudahkan para karyawan dalam menyimpan dan memanfaatkan data termasuk juga memudahkan administrasi karena data yang diperlukan dapat diakses setiap saat.

Aplikasi sikarza digunakan oleh pegawai RSUDZA baik ASN maupun kontrak untuk memperbarui/ update data masing-masing, aplikasi ini juga terintegrasi dengan app lainnya di RSUDZA, terdapat personal file, pelatihan, penelitian, sampai jumlah jam pelatihan dalam setahun yg didapat oleh masing-masing karyawan. Kehadiran aplikasi ini dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan.

4.5.2 SIGAP (Sistem Informasi Gampong)

Aplikasi SIGAP merupakan aplikasi yang digunakan oleh aparatur desa di seluruh Aceh untuk menghimpun data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa (gampong). Penerapan aplikasi SIGAP merupakan salah satu pondasi yang diharapkan dapat menopang implementasi Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) secara menyeluruh di Aceh. DPMG dan Diskominsa Aceh selaku leading sektor dalam pengembangan aplikasi ini bekerjasama dengan KOMPAK telah melakukan ToT (*Training of Trainer*) penggunaan

aplikasi SIGAP untuk tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Barat. Melalui aplikasi ini, data dan informasi di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten menjadi satu kesatuan yang dapat diakses di tingkat provinsi.



Gambar 4.12
Pelatihan Aplikasi SIGAP Oleh Tim DPMG dan KOMPAK

4.5.3 BaGAH (Baitul Mal Gerak Aksi Humanis)

Inovasi BaGAH merupakan salah satu inovasi dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan segera, tanpa harus melalui perjalanan panjang dan persyaratan yang rumit serta berbelu, bahkan kesan rumit, lama dan berbelu sudah sangat dikenal dalam birokrasi pemerintah. Baitul Mal Aceh dengan gebrakan BaGAH ini menjadi langkah awal yang meruntuhkan semua kesan tersebut, respon yang cepat terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, dalam hitungan menit, Tim Bagah sudah bertindak, bahkan dihari libur pun mereka bersedia turun menjumpai para mustahik yang membutuhkan bantuan segera.



Gambar 4.13
Gerak Cepat Tim BaGAH (Baitul Mal Gerak Aksi Humanis)

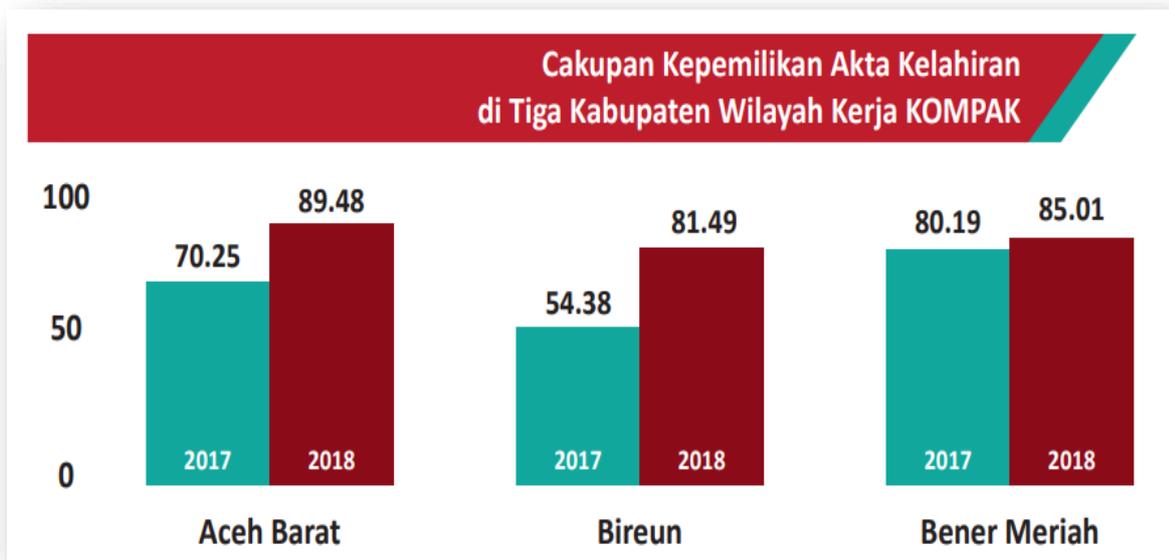
4.5.4 Pelayanan Adminduk oleh Petugas Registrasi Gampong (PRG)

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) telah menggagas Model Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Kewenangan Gampong melalui Peran Petugas Registrasi Gampong sejak 2017 di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen. Dalam Pelaksanaannya Model ini berhasil mendongkrak Angka Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Untuk Itu Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh akan melakukan Replikasi Model Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Kewenangan Gampong melalui Peran Petugas Registrasi Gampong ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Petugas Registrasi Gampong (PRG) adalah masyarakat yang ditunjuk melalui surat keputusan keuchik/reje untuk memfasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga. PRG bertugas melakukan pendataan di tingkat gampong/kampung terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, sekaligus memfasilitasi layanan dokumen administrasi kependudukan, namun tidak terbatas pada layanan dokumen akta kelahiran dan kematian.



Gambar 4.14
Pelayanan Adminduk Oleh Petugas Registrasi Gampong (PRG)

Dari Gambar 4.15 diketahui dampak pelaksanaan inovasi PRG terhadap cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di tiga kabupaten wilayah kerja KOMPAK (Aceh Barat, Bireun dan Bener Meriah) mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan Akte Kelahiran terdapat di Kabupaten Bireuen dari 54.38 persen (2017) menjadi 81.49 persen (2018). Selanjutnya, di Kabupaten Aceh Barat meningkat menjadi 89.48 persen tahun 2018 dari 70.25 pada tahun 2017.

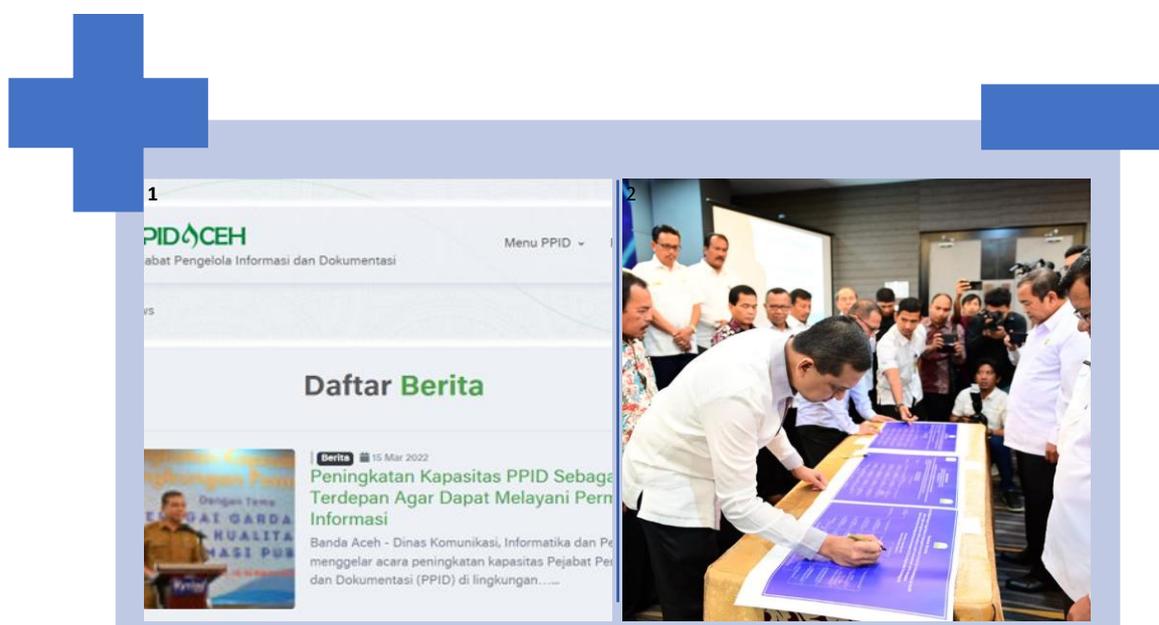


Gambar 4.15
Dampak Inovaasi Petugas Registrasi Gampong (PRG) Tahun 2017-2018

4.5.5 Aplikasi PPID Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Aceh. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Dalam bertugas, PPID Aceh dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya.

Untuk penguatan pengelolaan layanan informasi publik di Pemerintah Aceh tahun 2019 telah disahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan tahun 2020 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT. Selama terbentuk, PPID Aceh telah mendapat berbagai prestasi. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah peringkat III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2014 mendapat peringkat II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian pada tahun 2015 mendapat peringkat I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2016 mendapat peringkat II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, di tahun 2017 memperoleh peringkat III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2018 dan 2019 mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Menuju Informatif. Di tahun 2020, Pemerintah Aceh mendapat kenaikan peringkat dengan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori Informatif.



Gambar 4.16
Dashboard dan Penandatanganan Komitmen PPID Aceh

4.5.6 Donor Darah ASN Aceh

Dalam rangka membantu persediaan darah siap pakai di Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh, Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Setda Aceh

menginisiasi lahirnya “**Aksi Donor Darah Aparatur Sipil Negara (ASN)**” di lingkungan Pemerintah Aceh, yang dimulai pada akhir Mei 2020. Untuk Gerakan donor darah ASN yang lebih baik dan terkoordinir, maka dibuat kalender donor darah ASN yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh. Secara bergilir semua OPD dibawah Pemerintah Aceh akan selalu mendonorkan darahnya sesuai dengan kalender yang telah disusun dan ditetapkan. Kalender ini akan menjadi pedoman bagi setiap ASN untuk mendonorkan darahnya dan berapa lama waktu transisi sebelum ia harus mendonorkan kembali, sehingga gerakan donor darah ASN akan sistematis, terkoordinir, dan berkelanjutan.



Gambar 4.17
Aksi Donor Darah ASN di Lingkup Pemerintah Aceh

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Aceh, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dan kegiatan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Pemerintah Aceh Tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota terdiri atas arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RKPA Tahun 2023, arah kebijakan kewilayahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dan arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota

5.1.1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2021 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2023

5.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. IPM pada kabupaten/kota berkisar antara 65,27 (Kota Subulussalam) hingga 85,71 (Kota Banda Aceh). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 64,07 tahun (Kota Subulussalam) hingga 71,64 tahun (Kota Lhokseumawe). Sementara pada dimensi pengetahuan, HLS berkisar antara 13,04 tahun (Kabupaten Aceh Timur) hingga 17,80 tahun (Kota Banda Aceh), dan RLS berkisar antara 8,03 tahun (Kota Subulussalam) hingga 12,83 tahun (Kota Banda Aceh). Sedangkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara Rp7,148 juta per tahun (Kabupaten Simeulue) hingga Rp16,891 juta per tahun (Kota Banda Aceh). Status capaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus “sedang” pada tahun 2021 sebanyak 12 kabupaten/kota, dan terdapat 10 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Aceh berstatus “sangat tinggi” adalah Kota Banda Aceh.



Gambar. 5. 1

IPM Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada kabupaten/kota. Pada periode 2020 hingga 2021, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat lima kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Simeulue (0,58 persen), Kabupaten Pidie Jaya (0,55 persen), Kota Subulussalam (0,52), Kabupaten Gayo Lues (0,51 persen), dan Kabupaten Aceh Selatan (0,48 persen).

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Aceh, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah

5.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 tumbuh sebesar 2,79 persen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan pencapaian dari kabupaten dan kota.

Tabel 5.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
1	Kab. Aceh Barat	5,67
2	Kota Banda Aceh	5,53
3	Kab. Nagan Raya	5,34
4	Kota Langsa	4,23
5	Kab. Bireuen	4,13
6	Kab. Aceh Singkil	3,90
7	Kota Subulussalam	3,87
8	Kota Lhokseumawe	3,84
9	Kab. Aceh Tengah	3,21
10	Kab. Bener Meriah	3,15
11	Kab. Aceh Barat Daya	2,88
12	Kab. Simeulue	2,85
13	Kota Sabang	2,67
14	Kab. Pidie	2,63
15	Kab. Aceh Jaya	2,59
16	Kab. Aceh Selatan	2,46
17	Kab. Aceh Besar	2,44
18	Kab. Gayo Lues	2,32
19	Kab. Pidie Jaya	2,03
20	Kab. Aceh Timur	1,94
21	Kab. Aceh Tenggara	1,48
22	Kab. Aceh Tamiang	0,88
23	Kab. Aceh Utara	(0,55)
Aceh		2,79

Sumber: BPS Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Aceh menunjukkan adanya pertumbuhan pada Laju PDRB kecuali Kabupaten Aceh Utara yang turun sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2020. Laju pertumbuhan yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat dengan pertumbuhan mencapai 5,67 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang merupakan akumulasi dari pertumbuhan kabupaten/kota di Aceh memerlukan upaya pemerataan sehingga pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat merata yang pada akhirnya merupakan sebuah upaya dalam rangka pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota dimana dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Aceh maka telah disusun pola pengembangan wilayah dengan menetapkan daerah pengembangan sesuai keunggulan yang ada di daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2023

5.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh mencapai 6,3 persen, dengan Kota Lhokseumawe dengan TPT tertinggi sebesar 11,16 % dan Kabupaten Bener Meriah dengan TPT terendah sebesar 1,24 persen. Upaya-upaya penanganan pengangguran ini merupakan upaya bersama di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pola pengembangan kawasan berdasarkan sektor usaha unggulan yang ada di daerah. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Aceh sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

Tabel 5.2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
1	Simeulue	5,71
2	Aceh Singkil	8,36
3	Aceh Selatan	6,46
4	Aceh Tenggara	6,43
5	Aceh Timur	7,13
6	Aceh Tengah	2,61
7	Aceh Barat	7,09

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
8	Aceh Besar	7,7
9	Pidie	7,28
10	Bireuen	4,32
11	Aceh Utara	8,31
12	Aceh Barat Daya	4,04
13	Gayo Lues	1,84
14	Aceh Tamiang	5,87
15	Nagan Raya	4,99
16	Aceh Jaya	3,47
17	Bener Meriah	1,24
18	Pidie Jaya	3,57
19	Banda Aceh	8,94
20	Sabang	3,56
21	Langsa	7,21
22	Lhokseumawe	11,16
23	Subulussalam	6,26
Aceh		6,3

Sumber BPS Aceh, 2022

5.1.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Pada Tabel 5.3 diketahui tingkat kemiskinan di Aceh mencapai 15, 53 persen dimana Kabupaten Aceh Singkil dengan tingkat persentase tertinggi mencapai 20,36 persen dan terendah dicapai oleh Kota Banda Aceh mencapai 7,36 persen.

Persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Aceh fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Aceh terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu.

Tabel 5.3
Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	(%)
1	Simeulue	18.98
2	Aceh Singkil	20.36
3	Aceh Selatan	13.18
4	Aceh Tenggara	13.41
5	Aceh Timur	14.45
6	Aceh Tengah	15.26
7	Aceh Barat	18.81
8	Aceh Besar	14.05
9	Pidie	19.59
10	Bireuen	13.25
11	Aceh Utara	17.43
12	Aceh Barat Daya	16.34
13	Gayo Lues	19.64
14	Aceh Tamiang	13.34
15	Nagan Raya	18.23
16	Aceh Jaya	13.23
17	Bener Meriah	19.16
18	Pidie Jaya	19.55
19	Banda Aceh	7.61
20	Sabang	15.32
21	Langsa	10.96
22	Lhokseumawe	11.16
23	Subulussalam	17.65
Aceh		15,53

Sumber: BPS Aceh, 2022

5.1.2 Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh

Target keberhasilan pembangunan Aceh merupakan agregat dari kondisi kinerja makro Kabupaten dan kota. Tolak ukur keberhasilan tersebut tergambar dari beberapa indikator kinerja serta merupakan dampak dari segala pencapaian program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu merupakan amanah bagi Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan arah kebijakan pembangunan yang tepat bagi kabupaten dan kota. Pemerintah Aceh akan terus mendorong terutama bagi kabupaten/Kota dengan indikator makro berkinerja lemah untuk dapat ditingkatkan.

Sebagaimana sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 pada beberapa indikator makro antara lain; Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Persentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen. Target capaian tersebut merupakan hasil dari capaian indikator pembangunan Pemerintah Aceh tersebut yang merupakan target bersama dari seluruh capaian Kabupaten dan Kota sehingga diperlukan sinkronisasi dalam upaya pencapaian target tersebut.

Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan yang positif dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-0.34 persen) akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-0.74 persen). Pada tahun 2021 perekonomian non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada beberapa indikator makro pembangunan Pemerintah Aceh antara lain pada Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan dari 71,99 menjadi 72,18. Pada capaian pengangguran juga menunjukkan peningkatan dimana persentase TPT dari 6,59 % menjadi 6,3 %. Pada indikator kemiskinan persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.53 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1.57 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Pada masa pandemi, pemerintah Aceh optimis dalam menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Berikut pada tabel dapat dilihat target indikator kinerja Makro yang tersebar pada 23 Kabupaten/ Kota.

Tabel 5.4
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/ Kota se-Aceh Tahun 2023

No	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)		TPT (%)		IPM	
		Perkiraan 2022	Target 2023	Perkiraan 2022	Target 2023	Perkiraan 2022	Target 2023	Perkiraan 2022	Target 2023
1	Simeulue	5,37	2,95	17,00	18,48	5,00	5,22	67,67	66,79
2	Aceh Singkil	3,5-4,0	4,0	18,42	18,00	7,00	6,80	70,05	70,55
3	Aceh Selatan	3,45	3,85	12,1	11,8	6,28	6,15	70,17	70,59
4	Aceh Tenggara	1,5	2	13,41	13,39	3,10	-	69,44	69,46
5	Subulussalam	4,47	4,47	16,7	16,3	5,7	5,12	74,54	75,14
6	Pidie Jaya	2,5 - 3	4,5 - 5	18,89	18,79	4,9	3,5	71,95	73,6
7	Banda Aceh	4,04	4	6,33	7,25	5,68	8,15	85,9	86,59
8	Aceh Timur	5,75	3,34	12,43	14,02	12,60	6,77	69,00	68,17
9	Aceh Tengah	3,27	3,47	15,26	15	3,5	2,5	73,37	73,5
10	Aceh Barat	4,53	2,0-2,7	18,00	18,31	7,69	7,04	73,50	71,99
11	Aceh Besar	5,01	3,90	9,00	13,55	5,44	7,07	73,58	73,88
12	Pidie	2,35	2,41	18,85	18,56	7,76	6,25	70,97	71
13	Bireuen	3,3	4,5	12,06	12,25	3,95	3,8	72,3	72,7
14	Aceh Utara	5	3,5	14,5	17	6,9	7,5	71,9	70
15	Aceh Barat Daya	3,08	3,38	14,00	16,13	4,20	3,69	67,36	67,81
16	GayoLues	1,03	2,74	17,5	18,98	2,03	1,47	65,5	68,82
17	Aceh Tamiang	2,35	2,41	18,85	18,56	7,76	6,25	70,97	71
18	Nagan Raya	4,58	4,2	16,50	16,50	4,2	4,08	70,00	70,20
19	Aceh Jaya	4,68	2,84	12,01	12,93	2,46	3,42	69,91	69,98
20	Bener Meriah	4-5	3,24	17,05	19,02	1,2	1,38	74	73,56
21	Sabang	2,50	2,80	13,96	14,96	4,40	3,50	76,38	76,73
22	Langsa	3,75	4,37	10,11	10,29	7,51	7,17	78,62	77,44
23	Lhokseumawe	4,2	3,50	10,8	11,10	11,03	11,12	78,47	77,62

Sumber: RPK Kabupaten Kota 2023-2026 dan RPJMD Kab/Kota 2019-2024

5.2 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota diAceh mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi di Aceh mengalami penurunan akibat berbagai hal diantaranya pengurangan jam kerja, pelarangan mudik, pelarangan mengadakan pesta, pembatasan berkunjung di warung makan dan kopi, berkurangnya kegiatan ekspor akibat adanya lockdown di semua negara tujuan ekspor, berkurangnya wisatawan yang berkunjung dan lainnya. Namun pada tahun 2021 beberapa capaian indikator pembangunan sudah menunjukkan perkembangan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Capaian indikator makro pembangunan Aceh, yang digambarkan dari capaian kabupaten/kota pada umumnya masih belum tercapai secara sempurna maka diperlukan suatu upaya bersama dalam pencapaian dari indikator tersebut .

Berdasarkan hal tersebut itu Pemerintah Aceh perlu memberi masukan arah dan kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 dalam rangka melaksanakan beberapa tujuan pembangunan pemerintah Aceh Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional; Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19; Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana; Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Perumusan tema pembangunan RKPA Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan tema RKP Tahun 2023, arah kebijakan RPA Tahun 2023-2026, hasil evaluasi pembangunan Aceh Tahun 2021 dan serta isu strategis yang menjadi perhatian tahun 2023. Tema RKPA Tahun 2023 disusun sebagai respons terhadap kondisi Aceh yang mengalami dampak sosial ekonomi seperti peningkatan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19. Arah kebijakan tahun 2023 dalam RPA Tahun 2023-2026 adalah meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari COVID-19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan RKPA Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga Tema Pembangunan RKPA Tahun 2023 adalah “ Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktifitas Pangan, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Rangka Mengatasi Dampak COVID-19 Untuk Kesejahteraan Masyarakat “. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, DitjenPenataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai *growthcenter* dimana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spredeffect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional;
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah;
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Aceh meliputi:

1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional, dan;

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

Menurut posisi geografis, wilayah pengembangan (WP) Aceh secara garis besar dikelompokkan menjadi: a) Banda Aceh dan Sekitarnya, b) Pesisir Timur, c) Pegunungan Tengah dan d) Pesisir Barat, Lebih jelas disajikan dalam Tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 5.5
Wilayah Pengembangan di Provinsi Aceh

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
Banda Aceh dan Sekitarnya				
1.	WP Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKNp Banda Aceh ▪ PKSN/PKN Sabang ▪ PKL Jantho 	Pertanian, pariwisata, jasa, perdagangan, industri, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKN Banda Aceh, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai a) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, b) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau c) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. ▪ PKSN/PKN Sabang, diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai: a) pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, b) pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga serta simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, c) pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya, d) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, e) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau f) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; ▪ Pelabuhan Sabang yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas Sabang merupakan prasarana pendukung terkait fungsi PKSN/PKW Sabang.

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelabuhan Balohan di Kota Sabang ditetapkan dalam rencana dengan fungsi sebagai pelabuhan utama yang melayani angkutan penyeberangan internasional dan dalam negeri provinsi. ▪ PKL Jantho, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan/atau b) simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
Pesisir Timur				
2.	WP Timur 1 (Langsa-Kuala Simpang-IdieRayeuk)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKW Langsa ▪ PKL Kuala Simpang-Karang Baru ▪ PKL Idi Rayeuk 	Perkebunan, pertanian, industri, jasa, perikanan, pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKW Langsa, diarah sebagai kawasan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai: a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. ▪ PKL Kuala Simpang-Karang Baru, diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi/berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan/atau sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. ▪ PKL Idi Rayeuk, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Disamping sebagai sentra pengembangan industri perikanan tangkap dengan pelabuhan perikanan nusantaranya.
3.	WP Timur 2 (Lhokseumawe-Bireuen-LhokSukon)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKN Lhokseumawe ▪ PKL LhokSukon ▪ PKW Bireuen 	Pertanian, perkebunan, industri, perikanan, agro industri, petrokimia, ,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKN Lhokseumawe, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai a) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, b) pusat kegiatan

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
			perdagangan, pertambangan	<p>industri dan jasa skala nasional, c) simpul utama transportasi skala nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dengan fokus pada beberapa sektor yaitu industri, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, industri serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor industri (minyak dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau <i>cleanenergysolutionprovider</i>. Infrastruktur industri juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional. ▪ Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri dan lain-lain. ▪ PKL Lhoksukon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. ▪ PKW Bireuen, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berpotensi sebagai: a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
				provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL Matang Geulumpang Dua ibukota Kecamatan Peusangan merupakan pusat kegiatan pendukung dari PKW Bandar Bireuen sebagai pengembangan dengan fungsi utama dalam bidang pendidikan, perdagangan, perindustrian, simpul transportasi bagian timur, pertanian lahan basah, perikanan, pertahanan keamanan, pertambangan dan pemukiman dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
4.	WP Timur 3 (Sigli-Meureudu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKL Sigli ▪ PKL Meureudu 	Pertanian, perkebunan, industri, perikanan, pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Sigli, diarahkan sebagai diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan • PKL Meureudu, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan
Pegunungan Tengah				
5.	WP Tengah 1 (Takengon-Sp. Redelong)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKW Takengon ▪ PKL Sp. Tiga Redelong 	Perkebunan, pariwisata, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Takengon diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berpotensi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. • Selain sebagai sentra kopi, PKW Takengon juga diharapkan dapat menjadi sentra produksi sayur-sayuran dan perikanan darat. • PKL Simpang Tiga Redelong diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> Selain itu, PKL Simpang Tiga Redelong diharapkan dapat menjadi sentra produksi sayur sayuran untuk wilayah Aceh.
6.	WP Tengah 2 (Kutacane-Blangkejeren)	<ul style="list-style-type: none"> PKL Kutacane PKL Blangkejeren 	Perkebunan, pariwisata, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> PKL Kutacane diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dengan kawasan ekosistem Leuser yang dimiliki PKL Kotacanememiliki potensi wisata alam yang sangat potensial dan sentra produksi perkebunan. PKL Blangkejeren diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
Pesisir Barat				
7.	WP Barat 1 (Meulaboh-Calang-Suka Makmue)	<ul style="list-style-type: none"> PKW Meulaboh PKL Calang PKL Jeuram-Suka Makmue 	Perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> PKW Meulaboh diarahkan sebagai kawasan perkotaan sedang yang berfungsi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL Calang diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL Jeuram-Suka Makmue diarah sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
8.	WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie)	<ul style="list-style-type: none"> PKL Tapaktuan PKWp Blangpidie 	Perkebunan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> PKL Tapaktuan diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan

No	Wilayah Pengembangan	Pusat Kegiatan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
			perikanan, pariwisata	industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan. <ul style="list-style-type: none"> PKW Blangpidie diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
9.	WP Barat 3 (Subulussalam-Singkil)	<ul style="list-style-type: none"> PKWp Subulussalam PKL Singkil 	Perkebunan, perikanan, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> PKW Subulussalam, diarahkan sebagai kawasan perkotaan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, b) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau c) simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL Singkil, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
10.	WP Barat 4 (Sinabang)	<ul style="list-style-type: none"> PKL Sinabang 	Perkebunan, perikanan, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> PKL Sinabang, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 - 2033

Dalam rangka mendorong efektivitas pengembangan wilayah di WP dan antar WP Aceh, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pengembangan masing-masing kawasan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Wilayah
Pengembangan Aceh Tahun 2023

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
Infrastruktur Jalan		
1. Pengembangan Jaringan Jalan dan Penanganan Jalan sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan, baik antar PKN, PKN ke PKL maupun antar kawasan strategis nasional dan provinsi	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan yang terdiri dari Lanjutan Pembebasan Tanah Terusan T. Nyak Makam - Elak II, Lanjutan Pembebasan Tanah Terusan Mr. Mohd. Hasan, Pembangunan Jalan Trienggadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jalan Bts. Pidie Jaya - Samalanga, Pembangunan Jalan Lingkar Kota Langsa, Pembangunan Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jalan Nasrehe - Lewak - Sibigo
	WP Basajan, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4 WP Timur 1, WP Timur 3, WP Tengah 1, WP Tengah 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Jalan yang terdiri dari Peningkatan Jalan Sp. Tujuh - Sp. Limpok, Peningkatan Jalan Jantho - Bts. Aceh Jaya, Peningkatan Jalan Batas Kota Banda Aceh - Sp. Lam Ateuk, Peningkatan Jalan Keutapang Dua - Mata Ie, Peningkatan Jalan Blang Bintang - Krueng Raya, Peningkatan Jalan Peukan Pidie - Jabal Ghafur - Ujung Rimba - Bili Aron Kab. Pidie, Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues, Peningkatan Jalan Bts. Aceh Timur - Kota Karang Baru, Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang, Peningkatan Jalan Bts. Bener Meriah - Sp. Kebayakan, Peningkatan Jalan Takengon - Bintang, Peningkatan Jalan Bts. Aceh Timur - Pining - Blangkejeren, Peningkatan Jalan Blangkejeren - Tongra - Bts. Aceh Barat Daya, Peningkatan Jalan Sp. Lawe Deski - Muara Situlen - Bts. Kota Subulussalam, Peningkatan Jalan Sp. Lawe Deski - Muara Situlen - Bts. Kota Subulussalam, Peningkatan Jalan Pribue - Kuala Bhee - Suak Timah, Peningkatan Jalan Batas Pidie - Meulaboh, Peningkatan Jalan BabahRoet - Bts. Gayo Lues, Peningkatan Jalan Batas Aceh Tenggara - Gelombang, Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti, Peningkatan Jalan Pulau Balai - Pulau Ujung Batu, Peningkatan Jalan Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung, Peningkatan Jalan Sinabang - Sibigo,
	WP Basajan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelebaran Jalan yang terdiri dari Pelebaran Jalan Lingkar Darussalam yang merupakan kawasan strategis provinsi untuk sektor pendidikan
	WP Basajan, WP Barat 1, WP Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jembatan yang terdiri dari Pembangunan Jembatan KruengCumcum III

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
	2, WP Barat 3, WP Barat 4, WP Timur 1, WP Timur 3, WP Tengah 1, WP Tengah 2,	<p>Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Krueng Tuah Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan KeumTharek Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Blang Rheu Ruas Jalan Jantho-Bts. Aceh Jaya, Pembangunan Jembatan Leupu Ruas Jalan Sp. Turu Lutung – Geumpang, Pembangunan Jembatan Cerucuk Ruas Jalan Sigli - Kembang Tanjong - Teupin Raya, Pembangunan Jembatan Meunasah Mee Ruas Jalan TriengGadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jembatan Krueng Kiran Ruas Jalan TriengGadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jembatan Alur Drein Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Hitam I Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Tanjung I Jalan Lingkar Utara Kota Langsa, Pembangunan Jembatan Alur Jambu I Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Alur Jambu II Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Gp. Serba I Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, Pembangunan Jembatan Samarkilang Ruas Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang, Pembangunan Jembatan Pregent Alur Hitam Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Kampung Tengah Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Kampung Tengah Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Dusun Mas Ruas Jalan Isaq - JagongJeget - Sp. Gelelungi, Pembangunan Jembatan Gantung Arul Putih - Serempingen Kec. Silih Nara / Ketol Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung AntusKp. Pameu Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung Pelipen Gajah Kp. Waq Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Gantung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah, Pembangunan Jembatan Pintu Rime Ruas Jalan Bts. Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Pembangunan Jembatan Uring Ruas Jalan Bts. Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Pembangunan Jembatan Pining III Ruas Jalan Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya, Pembangunan Jembatan Gajah Geujuet Ruas</p>

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<p>Jalan Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya, Pembangunan Jembatan Gantung Seurandek - Tanoh Mirah Kec. Woyla Timur - Sungai Mas Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Gantung Kabel Baro - Sipot Kec. Woyla Timur - Sungai Mas Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Gantung Pulo Teungoh - Dsn. Sengkadeh Kec. PanteCeureumen Kab. Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Suak Leubee Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Bulu Seuma III Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Buluh Seuma IV Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Buluh Seuma V Ruas Jalan Trumon - Batas Singkil, Pembangunan Jembatan Siboyok Ruas Jalan Trumon - Bts. Singkil, Pembangunan Jembatan Mandilan Ruas Jalan Bts. Aceh Selatan - Rundeng – Subulussalam, Pembangunan Jembatan Kilangan, Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak-Sibigo, Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak-Sibigo</p>
	<p>WP Basajan, WP Timur 2, WP Barat Barat 2, WP Barat 3,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Berkala yang terdiri dari Pemeliharaan Berkala Jalan AneukLaot – Balohan, Pemeliharaan Berkala Jalan Ir. M. Thaher Kota Banda Aceh, Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Raya - Batas Pidie, Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Bili Aron - Teupin Raya, Pemeliharaan Berkala Jalan Samudera, Pemeliharaan Berkala Jalan Lhoksukon-Cot Girek, Pemeliharaan Berkala Jalan KruengGeukueh - Bts. Bener Meriah, Pemeliharaan Berkala Jalan Cunda – Lhoseumawe, Pemeliharaan Berkala Jalan Kuala Tuha – Lamie, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Kapur – Trumon, Pemeliharaan Berkala Jalan Trumon - Pulo Paya, Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan – Rundeng, Pemeliharaan Berkala Subulussalam-Rundeng
Infrastruktur Perhubungan		
<p>1. Pengembangan terminal regional tipe B</p>	<p>WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan terminal type B Bireuen sebagai CentralBussinesPoint ▪ Pengadaan alat CCTV + Monitor Terminal Type B Provinsi Aceh ▪ Revitalisasi Terminal Type B Aceh Barat Daya ▪ Revitalisasi Terminal Type B Subulussalam

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi Terminal Type B Tamiang ▪ Revitalisasi Terminal Type B Pidie Jaya ▪ Pengadaan lampu penerangan jalan pada terminal tipe b provinsi aceh (Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Subulussalam, Singkil dan Bireuen)
2. Pengembangan angkutan massal perkotaan	WP Basajan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Bus Trans Koetaradja Koridor 1 ▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja Koridor 2 ▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja Koridor 3 ▪ Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Bus Trans Koetaradja Koridor 5 ▪ Pengadaan Sarana Angkutan Massal (Bus Sedang 17 Unit) ▪ Pengadaan Bus Pelajar dan Mahasiswa Bersarana AC dan Internet (Wi-Fi) Rute Jantho - Seulimeum – Lambaro ▪ Rehab Halte Transkoetaradja Koridor 2
3. Pengembangan Pelabuhan dan Pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	WP Basajan, WP barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan prasarana sisi darat pelabuhan penyeberangan Sinabang ▪ Penanganan Darurat Fasilitas Sandar di Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak ▪ Pengadaan Dan Pemasangan Lampu LED Jalan Akses Dan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Kota Banda Aceh ▪ Pembangunan Kontruksi Pengaman Pelabuhan Penyeberangan Singkil Tahap II ▪ Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Balohan – Sabang ▪ Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Simeulue - Pantai Barat ▪ Rehab Breakwater di Alur Pelayaran Lintasan UleeLheue – Balohan ▪ Pembangunan SBNP 2 lokasi di perairan Aceh ▪ RDTR Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh
4. Pengembangan jaringan jalur kereta api	WP Basajan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Kelayakan Kereta Api Banda Aceh
5. Pengembangan Bandara	WP Basajan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan dan pemasangan Genset di Gedung VIP Pemerintah Aceh Bandara Sultan Iskandar Muda ▪ Pengadaan VCP untuk pengawasan Bandara/Air Strip di Aceh ▪ Pemeliharaan Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RDTR Kawasan Blang Bintang dan sekitarnya sebagai kawasan bandara internasional
6. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan rambu-Rambu Lalu Lintas ▪ Pengadaan Marka Jalan ▪ Pengadaan Pagar Pengaman Jalan ▪ Pengadaan Delineator ▪ Pengadaan Traffic Light ▪ Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas Jalan ▪ Pengadaan Cermin Tikungan ▪ Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan
Infrastruktur Energi dan Kelistrikan		
1. Pengembangan jaringan energi	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik ▪ Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana ▪ Survey Energi Baru Terbarukan ▪ Revitalisasi PLTMH ▪ Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan ▪ Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)
Infrastruktur Sumber Daya Air		
1. Pengembangan Jaringan Irigasi	WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. CuboTrienggadeng Kab. Pidie Jaya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. UleeGlee Kab. Pidie Jaya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen/Pidie Jaya ▪ Peningkatan Saluran Suplesi D.I. Nalan Kab. Bireuen ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kiri Kab. Bireuen ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kanan Kab. Bireuen ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Peudada Kab. Bireuen ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pandrah Kab. Bireuen ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. JamboReuhat Kab. Aceh Timur

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Peunaron Kab. Aceh Timur ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mbang Kab. Aceh Utara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. PanteKuyun Kab. Aceh Jaya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Keteungga Kab. Aceh Timur/Langsa/Aceh Tamiang ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lambesoi Kab. Aceh Jaya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya ▪ Normalisasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara ▪ Normalisasi saluran pembuang D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kab. Pidie ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureuteut Kab. Bireuen ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Mon SeukePulot Kab. Bireuen ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. UleeGle Kab. Pidie Jaya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Peudada Kab. Bireuen ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kiri Kab. Bireuen ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nalan Kanan Kab. Bireuen ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mbang Kab. Aceh Utara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JamboReuhat Kab. Aceh Timur ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Peunaron Kab. Aceh Timur ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ulee Gajah Kab. Aceh Timur ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Keutengga Kab. Aceh Timur/Langsa/Aceh Tamiang ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WeihTilis Kab. Gayo Lues ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Beutong Kab. Aceh Selatan ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PanteKuyun Kab. Aceh Jaya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. ManggengKabupaten Aceh Barat Daya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Dalem Kabupaten Aceh Selatan ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pandrah Kab. Bireuen

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambesoi Kab. Aceh Jaya ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara ▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara ▪ Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara
2. Pengembangan Pengendalian Banjir	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 4, WP Barat 1, WP Barat 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Lhoong Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Ligan Kab. Aceh Jaya ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Caleh Kab. Aceh Jaya ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Jeunieb Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peusangan Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Leubeu Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Meuh Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peuto Kab. Aceh Utara ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Mane Kab. Aceh Utara ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Cangkoi Kab. Aceh Utara ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Baru Kab. Aceh Barat Daya ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Kluet Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Meukek Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Bakongan Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Samadua Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Keumumu, Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Sawang Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Trumon Kab. Aceh Selatan

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Alue Paku Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Sarap Gp. Jilatang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Teunom Kab. Aceh Jaya ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Lamno Kab. Aceh Jaya ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Pandrah Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Peudada Kab. Bireuen ▪ Pengendalian Banjir Sungai Kr. Buloh Kab. Aceh Utara
3. Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	WP Timur 2, WP Timur 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Embung Paya Seupat Kab. Pidie Jaya ▪ Peningkatan Embung Paya Reulet Kab. Pidie Jaya ▪ Peningkatan Embung Paya Punjeuet Kab. Aceh Utara ▪ Peningkatan Embung Meudang Ara Kab. Aceh Utara ▪ Normalisasi Embung Paya Nie Kab. Bireuen
Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan		
1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Timur 3, WP Timur 4, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 6.000 unit tersebar di seluruh wilayah Aceh
Infrastruktur Perikanan		
1. Pengembangan budidaya perikanan	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan bibit ikan unggul di Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue. ▪ Pengembangan perbenihan perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Air Tawar di Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireuen, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Besar, Kota Subulusslam. ▪ Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar di Kota Jantho (Kab. Aceh Besar).

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau di Kluet Selatan dan Pasi Raja (Kab. Aceh Selatan).
2. Pengembangan perikanan tangkap	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan tempat pelelangan ikan di Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, KruengSabee (Kab. Aceh Jaya). ▪ Pembangunan pangkalan pendaratan ikan di Labuhan Hj. Timur, Meukek, Tapaktuan (Kab. Aceh Selatan), Idi Timur, Simpang Ulim (Kab. Aceh Timur), Batee, Pidie, Simpang Tiga (Kab. Pidie). ▪ Pengembangan pelabuhan perikanan di Kuala Pesisir (Kab. Nagan Raya), Jangka (Kab. Bireuen), Muara Batu (Kab. Aceh Utara), Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Selatan.
Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan		
1. Pengembangan destinasi pariwisata	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan objek pariwisata unggulan di Sukakarya (Kota Sabang), Kota Jantho, Lhokgha, Pulau Aceh (Kab. Aceh Besar), Meuraxa (Kota Banda Aceh), Penanggalan (Kota Subulussalam). ▪ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Blang Kejeren, Putri Betung, Tripe Jaya (Kab. Gayo Lues), Tapaktuan (Kab. Aceh Selatan), Meuraxa (Kota Banda Aceh), Ketambe (Kab. Aceh Tenggara), Kota Baharu, Pulau Banyak (Kab. Aceh Singkil), Kota Langsa, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kab. Pidie, Kota Sabang, Kab. Simeulue. ▪ Peningkatan daerah tujuan wisata melalui pembangunan titik nol Kota Banda Aceh di Kuta Raja (Kota Banda Aceh).
2. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 1, WP Barat 2, WP Barat 3, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana dan prasarana museum Tsunami di Kota Banda Aceh. ▪ Pengembangan sarana dan prasarana Taman Ratu Safiatudin di Kota Banda Aceh. ▪ Pengembangan sarana dan prasarana Taman Budaya di Kota Banda Aceh. ▪ Pengelolaan, pemugaran situs sejarah dan cagar budaya di Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Biruen, Kab. Bener Meriah dan wilayah lain di Aceh.

Rencana Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Arahan Pengembangan
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika		
1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika	WP Basajan, WP Timur 1, WP Timur 2, WP Tengah 1, WP Tengah 2, WP Barat 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan alat jaringan komunikasi di Kota Lhokseumawe, Kab. Bener Meriah, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Barat. ▪ Pengadaan perangkat keras pengelolaan sistem informasi manajemen daerah terintegrasi di Kab. Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh. ▪ Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda di Kota Banda Aceh.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 - 2033

5.3 Proyek Pembangunan Kabupaten/Kota Pendukung PN

Tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) sebagaimana yang terdapat dalam RKP Tahun 2023, maka terdapat beberapa sub kegiatan/proyek pembangunan Aceh Tahun 2023 yang dilaksanakan untuk mendukung PN tersebut seperti yang terdapat pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Proyek Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
1	Pembangunan Lumbung Pangan	2	unit	Aceh Besar dan Bireuen	PANGAN
2	Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	132	ton	23 kab/kota	PANGAN
3	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	20	ton	23 kab/kota	PANGAN
4	Promosi Penganekaragaman Pangan	3	kegiatan	23 kab/kota	PANGAN
5	Penyaluran Cadangan Pangan	10	ton	23 kab/kota	PANGAN
6	Produksi Perikanan Tangkap	283.672	ton	18 kab/kota	DKP
7	Pengelolaan Perikanan Budidaya	198.000	ton	14 Kab/Kota	DKP
8	Pengembangan Kawasan Pertanian (Padi)	25.000	Ha	15 Kab/Kota	TANBUN
PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan					
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1	Paket	23 kab/Kota	PUPR
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1	Paket	23 kab/Kota	PUPR

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1	Paket	23 kab/Kota	PUPR
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Paket	23 kab/Kota	PUPR
5	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Paket	23 kab/Kota	PUPR
6	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	1	Laporan		PERTANAHAN
7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1	Dokumen	23 kab/Kota	PERTANAHAN
8	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1	Dokumen	23 kab/Kota	PERTANAHAN
9	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1	Dokumen	23 kab/Kota	PERTANAHAN
PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing					
1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	543	Sekolah	23 Kab/Kota	DISDIK
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	89.069	Peserta Didik	23 Kab/Kota	DISDIK
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2	Paket	23 Kab/Kota	DISDIK
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.964	Orang	23 Kab/Kota	DISDIK

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
5	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1	Paket	23 Kab/Kota	DISDIK
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	224	Sekolah	23 Kab/Kota	DISDIK
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8.582	Orang	23 Kab/Kota	DISDIK
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.229	Peserta Didik	23 Kab/Kota	DISDIK
9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Kegiatan	23 Kab/Kota	DISDIK
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60	Sekolah	23 Kab/Kota	DISDIK
11	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1	Kegiatan	23 Kab/Kota	DISDIK
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.256	Orang	23 Kab/Kota	DISDIK
13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	304	Peserta Didik	23 Kab/Kota	DISDIK
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	255	Dayah	23 Kab/Kota	DAYAH
15	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	23	Kab/Kota	23 Kab/Kota	DAYAH
16	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri			23 Kab/Kota	DAYAH
17	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	5	Dayah Perbatasan	23 Kab/Kota	DAYAH

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
18	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.231.711	Jiwa	23 Kab/Kota	DINKES
19	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5	Unit	Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Barat, Kota Langsa, Kab. Aceh Selatan, Kab. Bireun	DINKES
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5	Dokumen	23 Kab/Kota	DINKES
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	Dokumen	23 Kab/Kota	DINKES
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40	Persen	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Punge Jurong	RSIA
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	Persen	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	RSUZA
24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Tahun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	RSJ
25	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	Persen	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	RSJ
26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	100	Persen	23 Kab/Kota	DISPORA
27	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100	Persen	23 Kab/Kota	DISPORA
28	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	100	Persen	Kota Banda Aceh	DISPORA

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
29	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	23 Kab/Kota	DP3A
30	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	290	orang	Kota Banda Aceh	DINSOS
31	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	125	orang	Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh	DINSOS
32	Penyediaan Permakanan	5.275	orang	Kota Banda Aceh	DINSOS
33	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	69	orang	Kota Banda Aceh	DINSOS
34	Penyediaan Permakanan	14.260	orang	Kota Banda Aceh	DINSOS
35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	9	Dokumen	23 Kab/Kota	DPMG
36	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	Laporan	23 Kab/Kota	DPMG
37	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	30.000	Orang	Kota Banda Aceh	ARPUS

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
38	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	50	Persen	Kota Banda Aceh	ARPUS
39	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	7	Laporan	Kota Banda Aceh	DRKA
40	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	Kota Banda Aceh	DRKA
41	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	3	Dokumen	Kota Banda Aceh	DRKA
PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan					
1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70	Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	INSPEKTORAT
2	Pelaksanaan MTQ	1	Kegiatan	Kab. Simeulu	DSI
3	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	80	Orang	Kota Banda Aceh	DSI
4	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	46	Orang	Kota Banda Aceh	DSI
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	1	Tahun	Kab. Aceh Besar	KKW
6	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	6	Dokumen	Kab. Aceh Besar	MPU
7	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	230	Kali	23 Kab/Kota	SATPOL PP&WH

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
8	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	210	Kali	23 Kab/Kota	SATPOL PP&WH
9	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2.124	Mahasiswa, PNS, Orang	23 Kab/Kota	BPSDM
PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar					
1	Rekonstruksi Jalan	12,75	Km	Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Singkil	PUPR
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	11,87	Km	Pidie, Banda Aceh, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Singkil, Subulussalanm	PUPR
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	81	Ruas Provinsi	23 Kab./Kota	PUPR
4	Pembangunan Jembatan	34,73	M	Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue	PUPR
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	81	Ruas Provinsi	23 Kab./Kota	PUPR
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1	Gedung	Aceh Besar	DISHUB
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	8	Unit	Aceh Singkil, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bener Meriah	DISHUB

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7	Koridor	Aceh Besar, Banda Aceh	DISHUB
9	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	6	Unit	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, Banda Aceh	DISHUB
10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2	Dokumen	Banda Aceh	PERKIM
11	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Banda Aceh	PERKIM
12	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	2	Kegiatan	Banda Aceh	PERKIM
13	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1	SPAM	Aceh Besar, Aceh Utara	PERKIM
14	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1	Pengelola	Banda Aceh	PERKIM
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Banda Aceh	PERKIM
16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Dokumen	Banda Aceh	PERKIM
17	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	23	Kab./Kota	23 Kab./Kota	PERKIM

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
18	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	23	Kab./Kota	23 kab/Kota	PERKIM
19	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2810	Unit	23 kab/Kota	PERKIM
20	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	19	Kawasan	23 kab/Kota	PERKIM
21	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,67	Km	Aceh Utara	PENGAIRAN
22	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5,45	Km	Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Pidie	PENGAIRAN
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,25	Km	Aceh Timur	PENGAIRAN
24	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1	Bendung	Aceh Barat Daya	PENGAIRAN
25	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	507,88	Km	23 kab/Kota	PENGAIRAN
26	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	25	Bendung	23 kab/Kota	PENGAIRAN
27	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	41,79	Km	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang	PENGAIRAN
28	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
29	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	40	Konten	23 kab/Kota	KOMINSA
30	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40 50	Kali/Tayang Kegiatan	23 kab/Kota	KOMINSA
31	Pelayanan Informasi Publik	22	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA
32	Layanan Hubungan Media	27	Kali	23 kab/Kota	KOMINSA
33	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	30	Gampong	23 kab/Kota	KOMINSA
34	Manajemen Komunikasi Krisis	2	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA
35	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	5 60	Kali Orang	23 kab/Kota	KOMINSA
36	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	20	Dokumen		KOMINSA
37	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2000	Berita	23 kab/Kota	KOMINSA
38	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2	Unit	23 kab/Kota	KOMINSA
39	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
40	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23	Kab./Kota	23 kab/Kota	KOMINSA
41	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			23 kab/Kota	KOMINSA
42	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6	Layanan	23 kab/Kota	KOMINSA
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1	FGD	23 kab/Kota	KOMINSA
44	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	Aplikasi	23 kab/Kota	KOMINSA
45	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	Pergub	23 kab/Kota	KOMINSA
46	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	6	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA
47	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA
48	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	3	Dokumen	23 kab/Kota	KOMINSA
49	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1	Unit	Aceh Besar	DLHK
50	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4	Unit	Aceh Besar	DLHK

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim					
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	3	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	3	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
9	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
10	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17	Laporan	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	3	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
13	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6	Unit	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	2	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
15	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
16	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	25	Perusahaan	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
17	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2500	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
18	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	500	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
19	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	Laporan	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
20	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	600000	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
21	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Laporan	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
23	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	50	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
24	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	5	Unit Usaha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
25	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	30	Operasi	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
26	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	3	Pemohon	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
27	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	50	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
28	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	322,99	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
29	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	56	Orang	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
30	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	45000	Ha	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK
31	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1	Dokumen	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	DLHK

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
32	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	2	Dokumen	Pidie	BPBA
33	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	60	Orang	Aceh Besar, Banda Aceh	BPBA
34	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	Aceh Utara	BPBA
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	700	Orang	Aceh Tengah, Banda Aceh, Sabang	BPBA
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12	Dokumen	23 kab/Kota	BPBA
37	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	100	Unit	Banda Aceh	BPBA
38	Pengelolaan Risiko Bencana	4	Dokumen	23 kab/Kota	BPBA
39	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3	Kawasan	Aceh Tengah, Banda Aceh, Sabang	BPBA
40	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	60	Orang	Banda Aceh	BPBA
41	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Laporan	Aceh Utara	BPBA
42	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10	Laporan	23 kab/Kota	BPBA

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
43	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20000	Orang	23 kab/Kota	BPBA
44	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	1	Dokumen	Pidie Jaya	BPBA
45	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	Banda Aceh	BPBA
46	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	Banda Aceh	BPBA
47	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	12	Dokumen	Banda Aceh	BPBA
48	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	10	Dokumen	23 kab/Kota	BPBA
49	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	Dokumen	Banda Aceh	BPBA
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50	Unit	Banda Aceh	BPBA
51	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	60	Orang	Banda Aceh	BPBA
52	Pembangunan Tanggul Sungai	3,4	Km	Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Tamiang	PENGAIRAN
53	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,25	Km	Bireuen	PENGAIRAN

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
54	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0,17	Km	Aceh Jaya	PENGAIRAN
55	Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,68	Km	Aceh Utara	PENGAIRAN
56	Normalisasi/Restorasi Sungai	2,05	Km	Aceh Utara	PENGAIRAN
57	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	34	Unit	Aceh Utara, Bireuen, Langsa, Pidie	PENGAIRAN
58	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	30	Dokumen	23 Kab/Kota	PENGAIRAN
59	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1,77	Km	23 Kab/Kota	PENGAIRAN
PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukanham dan Transformasi pelayanan publik					
1	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	32	Orang	23 Kab/Kota	BPSDM

No	Proyek Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	SKPA
1	2	3	4	4	5
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Dokumen	Kota Banda Aceh	KESBANGPOL
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Dokumen	23 Kab/Kota	KESBANGPOL
4	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	100	Persen	23 Kab/Kota	SEKRETARIAT BRA
5	Penguatan Reintegrasi	100	Persen	23 Kab/Kota	SEKRETARIAT BRA
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9	Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BIRO HUKUM
7	Fasilitasi Penataan Wilayah	100	Persen	23 Kab/Kota	BIRO PEMOTDA

Sumber: SIPD, 2022

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang dirumuskan melalui konsep THIS (tematik, holistik, integrative dan spasial). Pendekatan tematik-holistik mengutamakan kegiatan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh K/L dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Disamping itu, pendekatan integrative-spasial mengarah pada pengintegrasian program/kegiatan/sub kegiatan dan pertimbangan dimensi ruang antar SKPD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk pencapaian target pembangunan nasional maka Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Sementara itu, koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut diatas, maka Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS). Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan RAKORTEKRENBANGNAS adalah kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional dan sebagai bahan penyempurnaan RKPD. Berdasarkan hasil pembahasan Desk Kewilayahan Aceh pada Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 22 Februari 2022 disepakati beberapa program/kegiatan yang akan didanai oleh APBN sebagai berikut:

1. Normalisasi Kanal Banjir Krueng Aceh;
2. Peningkatan Struktur Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang - Pameue (Missing Link) Seksi II;
3. Pembangunan Embung Air Baku Kr. Raya Kec. Kr. Raya Kabupaten Aceh Besar;
4. Rehabilitasi Bendung Karet Krueng Aceh di Kabupaten Aceh Besar;
5. Penataan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Bandeng dan Udang;

6. Pengembangan Minyak Aatsiri (Nilam);
7. Pengembangan Kawasan Bawang Merah;
8. Pengembangan Kawasan Jagung;
9. Duplikasi Jembatan KR. Tamiang;
10. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh (Desa Kampung Pasir) di Kabupaten Aceh Barat;

Lebih detail mengenai hasil desk kewilayahan Aceh pada RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Hasil Desk Kewilayahan Aceh pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2022

NO	USULAN	VOL	SATUAN	PN	KESIAPAN DAERAH	STATUS			CATATAN PENTING
						H	K	M	
1	0015 - Normalisasi Kanal Banjir Krueng Aceh	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	RC sudah lengkap.	H			Review Design (2015) oleh Kementerian PUPR
2	0012 - Peningkatan Struktur Jalan Dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang - Pameue (Missing Link) Seksi II	25,6	Km	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	DED (2013), LARAP & AMDAL (2020), Surat IPPKH (2019)	H			Dibiayai SBSN dan dilaksanakan MYC
3	0018 - Pembangunan Embung Air Baku Kr. Raya Kec. Kr. Raya Kab. Aceh Besar	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	RC sudah lengkap. Pembebasan lahan seluas 27 Ha sudah selesai pada Tahun 2020.	H			Review Design oleh Kementerian PUPR
4	0009 - Pembangunan SPAM Regional Banda Aceh - Aceh Besar	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	RISPAM dan FS selesai, DED IPA (Juli 2021); DED Air Baku (Jan 2020); Amdal dan Lahan (2022), Lembaga SPAM sedang dibhs.		K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS

NO	USULAN	VOL	SATUAN	PN	KESIAPAN DAERAH	STATUS			CATATAN PENTING
						H	K	M	
5	0019 - Rehabilitasi Bendung Karet Krueng Aceh Di Kabupaten Aceh Besar	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	DED sudah lengkap	H			
6	0007 - Pengerukan Kolam Labuh PPS Kutaraja	130000	M3	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perencanaan sudah tersedia		K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS dan menjadi lokpri DAK Fisik 2023
7	0005 - Penataan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Bandeng dan Udang	150	Hektar	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lahan dan Potensi Daerah Yang Memadai	H			
8	0003 - Pengembangan Kawasan Padi (Food Estate)	5000	Hektar	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyediaan Benih dan Pupuk, Pendampingan Penyuluhan		K		Ubah nomenklatur dan dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS
9	0002 - Pengembangan minyak atsiri (Nilam)	300	Hektar	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Areal potensi, Petani, bibit dan Pendampingan penyuluhan	H			
10	0001 - Pengembangan kawasan bawang merah	300	Hektar	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Areal potensi bawang, Petani dan Pendampingan penyuluhan	H			

NO	USULAN	VOL	SATUAN	PN	KESIAPAN DAERAH	STATUS			CATATAN PENTING
						H	K	M	
11	0004 - Pengembangan Kawasan Jagung	8000	Hektar	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyediaan Benih, Pupuk dan Herbisida , Pendampingan Penyuluhan	H			Diakomodir 20 Ha (pengadaan benih);
12	0021 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9	Kabupaten/Kota	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS (detailkan usulan)
13	0014 - Subsidi Angkuta Penerbangan Perintis Aceh	1	Kegiatan	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Permenhub, RAB, Surat, Usulan Kab/Kota		K		Akan dibahas lebih lanjut pada RAKOR Perintis dan MUSRENBANGNAS
14	0011 - Duplikasi Jembatan KR. Tamiang	230	Meter	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	DED, Amdal dan Lahan tersedia	H			Didanai SBSN (MYC)
15	0017 - Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Lahan, FS, AMDAL		K		Bisa diakomodir jika DED & Aset diserahkan ke pusat (sebelum pembahasan anggaran 2023)
16	0013 - Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Jantho - Keumala (missing Link)	38,91	Km	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	DED (2014), LARAP & AMDAL (2020), Surat IPPKH (2019)		K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS

NO	USULAN	VOL	SATUAN	PN	KESIAPAN DAERAH	STATUS			CATATAN PENTING
						H	K	M	
17	0016 - Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Kab. Aceh Barat	1	Unit	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Lahan, DED, AMDAL, Surat Gubernur Aceh		K		Diarahkan menjadi lokpri DAK Fisik 2023
18	0020 - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh (Desa Kampung Pasir) di Kabupaten Aceh Barat	0,4	Km	05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	RC sudah lengkap.	H			2016-2021 sudah dimulai kegiatan pemasangan kantong pasir; 2022 tidak ada alokasi; diwacanakan MYC
19	0008 - Pembangunan Sheetpile PPS Kutaraja	150	M	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	DED Sudah Tersedia		K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS dan menjadi lokpri DAK Fisik 2023
20	0010 - Pembangunan Recervoir Kawasan PPS Kutaraja	1	Unit	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	DED Tersedia		K		Dibahas lebih lanjut pada MUSRENBANGNAS dan menjadi lokpri DAK Fisik 2023

Sumber: Aplikasi Krisna Selaras, 2022

Keterangan

H	Diakomodir
K	Dibahas lebih lanjut
M	Ditolak

Sementara itu, berdasarkan hasil pembahasan desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2022 diketahui terdapat 8 (delapan) usulan program/kegiatan yang diakomodir untuk didanai oleh APBN sebagai berikut:

1. Pembangunan Main Stadion Kuta Malaka;
2. Pengendalian Banjir Krueng Singkil Kab. Aceh Singkil;
3. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Alue Ubay (Pirak Timu) Kab. Aceh Utara;
4. Pengembangan Usaha BUMDes Kluster Pengelolaan Sampah dan Air Bersih di 6 Kab (Abes, Abar, Nagan Raya, Pijay, Simeulue Aceh Tamiang) dan 3 Kota (Banda Aceh, Subulussalam, Langsa);
5. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) (Provinsi dan 12 Kabupaten (Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Singkil, Pidie, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Utara, Subulussalam, Bener Meriah, Aceh Besar);
6. Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Jantho - Keumala (missing Link);
7. Pembangunan Embung Air Baku Kr. Raya Kec. Kr. Raya Kab. Aceh Besar;
8. Pembangunan SPAM Regional Banda Aceh - Aceh Besar.

Lebih jelas mengenai hasil pembahasan desk Musrenbang Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Hasil Pembahasan Desk Aceh pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Usulan	Vol	Satuan	Catatan Penting	SKPA	Status Pembahasan		
						H	K	M
						8	0	4
1	0024 - Pembangunan Main Stadion Kuta Malaka	1	Unit	RC harus disiapkan paling lambat akhir Juli 2022	Dispora	H		
2	0026 - Pengendalian Banjir Krueng Singkil Kab. Aceh Singkil	1	Paket	BWS Sumatera 1 perlu mempersiapkan review design	Pengairan	H		
3	0029 - Pembangunan Jaringan Irigasi Di. Alue Ubay (Pirak Timu) Kab. Aceh Utara	4144	Hektar	RC lengkap	Pengairan	H		
4	0030 - Pengembangan Usaha BUMDes Kluster Pengelolaan Sampah dan Air Bersih di 6 Kab (Abes, Abar, Nagan Raya, Pijay, Simeulue Aceh Tamiang) dan 3 Kota (Banda Aceh, Subulussalam, Langsa)	10	BUMDes	Diakomodir untuk permodalan BUMDes		H		
5	0031 - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) (Provinsi dan 12 Kabupaten (Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Singkil, Pidie, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Utara, Subulussalam, Bener Meriah, Aceh Besar)	597	KK	Diakomodir untuk pembangunan rumah di lokasi Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah	Disnakermobduk	H		
6	0013 - Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Jantho - Keumala (missing Link)	38,91	Km	Diakomodir untuk kegiatan pembukaan dan pembentukan badan jalan di seksi I dan II	PUPR	H		

No	Usulan	Vol	Satuan	Catatan Penting	SKPA	Status Pembahasan		
						H	K	M
7	0018 - Pembangunan Embung Air Baku Kr. Raya Kec. Kr. Raya Kab. Aceh Besar	1	Unit	Perlu surat pernyataan dari pengelola KIA Ladong tentang penyaluran embung krueng menjadi air baku	Indag	H		
8	0009 - Pembangunan SPAM Regional Banda Aceh - Aceh Besar	1	Unit	Perlu koordinasi dengan Kemen PUPR (SDA) dan BWS Sumatera I terkait pembangunan intake	Perkim	H		
9	0025 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Batas Kota Banda Aceh – Krueng Raya Kab. Aceh Besar	5	Km	Lahan belum siap tahun 2022	PUPR			M
10	0027 - Perbaikan Geometrik Jalan Paro-Kulu Kab. Aceh Besar	1	Paket	RC tidak siap tahun 2022	PUPR			M
11	0028 - DED Pembangunan Jembatan Spiral Geurute Kab. Aceh Jaya	1	Paket	DED belum menjadi prioritas Kemen PUPR tahun 2023 (Kebijakan OPOR)	PUPR			M
12	0021 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9	Kabupaten/Kota	Diusulkan melalui DAK Fisik 2023	Dinkes			M

Sumber: Aplikasi Krisna Selaras, 2022

Keterangan

H	Diakomodir
K	Dibahas lebih lanjut
M	Ditolak

6.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 6.3 diketahui total pagu indikatif yang digunakan untuk membiayai program pembangunan Aceh tahun 2023 berjumlah sebesar Rp. 10.374.683.597.969 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu indikatif untuk membiayai urusan Pemerintahan Wajib berjumlah sebesar Rp. 7.037.615.904.225 atau 67.83 persen dari total pagu indikatif tahun 2023, yang terbagi kedalam 2 (dua) sub urusan yakni:
 - a. Sub Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.169.858.632.854 atau 59.47 persen dari total pagu indikatif tahun 2023 yang terdapat di 13 (tiga belas) SKPA yang meliputi: Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengairan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial;
 - b. Sub Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar Rp. 867.757.271.371 atau 8.36 persen dari total pagu indikatif Tahun 2023 dan tersebar di 15 (lima belas) SKPA terkait yang mencakup: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Registrasi Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Majelis Adat Aceh, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Pagu indikatif untuk membiayai Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 370.502.624.527 atau 3.57 persen dari total pagu indikatif tahun 2023 yang terdapat di 5 (lima) SKPA terkait yang meliputi: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pagu indikatif untuk membiayai Urusan Pendukung berjumlah sebesar Rp. 420.135.607.523 atau 4.05 persen dari total pagu indikatif tahun 2023 dan terdapat di 2 (dua) SKPA seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Aceh.
4. Pagu indikatif untuk membiayai Urusan Penunjang berjumlah sebesar Rp. 2.179.142.834.958 atau 21 persen dari total pagu indikatif tahun 2023 yang terdapat di 5 (lima) SKPA terkait yang meliputi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Badan Kepegawaian Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh;

5. Pagu indikatif untuk membiayai Urusan Pengawasan berjumlah sebesar Rp. 48.596.085.000 atau 0.47 persen dari total pagu indikatif tahun 2023, yang terdapat pada Inspektorat.
6. Pagu indikatif untuk membiayai Urusan Pemerintahan Umum berjumlah sebesar Rp. 46.440.418.067 atau 0.45 persen dari total pagu indikatif tahun 2023 dan terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pagu indikatif untuk membiayai Kekhususan dan Keistimewaan berjumlah sebesar Rp. 272.250.123.669 atau 2.62persen dari total pagu indikatif tahun 2023 dan terdapat di 5 (lima) SKPA terkait yang meliputi: Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Tabel 6.3
Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Per SKPA

Urusan / Bidang Urusan / OPD	Pagu (Rp.)	Persentase (Rp.)
1	2	3
URUSAN WAJIB	7.037.615.904.225	67,83
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.169.858.632.854	59,47
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	2.740.308.757.937	26,41
1.01.0.00.0.00.08.0000 Dinas Pendidikan Dayah	382.949.330.381	3,69
1.01.0.00.0.00.09.0000 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	7.223.341.250	0,07
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Aceh	861.875.661.184	8,31
1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	870.070.696.303	8,39
1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa	97.737.794.813	0,94
1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Ibu dan Anak	88.187.789.679	0,85
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.060.569.885	1,76
1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pengairan	141.771.188.942	1,37
1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	617.072.703.702	5,95
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	36.832.620.355	0,36
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.050.783.787	0,39
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	102.717.394.636	0,99
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	867.757.271.371	8,36

Urusan / Bidang Urusan / OPD	Pagu (Rp.)	Persentase (Rp.)
1	2	3
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	67.286.636.120	0,65
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.934.206.552	0,19
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan	25.879.981.071	0,25
2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan	14.581.096.381	0,14
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	149.823.558.200	1,44
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Registrasi Kependudukan	17.036.954.337	0,16
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	24.133.174.700	0,23
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	89.854.845.815	0,87
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	40.142.269.642	0,39
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	92.819.780.406	0,89
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.874.198.580	0,29
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga	130.703.779.989	1,26
2.22.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Majelis Adat Aceh	11.819.953.991	0,11
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	106.883.825.617	1,03
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46.983.009.970	0,45
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	370.502.624.527	3,57
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan	81.234.807.325	0,78
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	146.812.592.800	1,42
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan	69.443.236.215	0,67
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	31.885.323.241	0,31
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.126.664.946	0,40
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	420.135.607.523	4,05
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	231.727.720.059	2,23
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPR Aceh	188.407.887.464	1,82
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.179.142.834.958	21,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.857.350.000	0,64
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.934.049.141.175	18,64

Urusan / Bidang Urusan / OPD	Pagu (Rp.)	Persentase (Rp.)
1	2	3
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Aceh	27.785.555.000	0,27
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	117.800.788.783	1,14
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Pemerintah Aceh	32.650.000.000	0,31
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	48.596.085.000	0,47
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	48.596.085.000	0,47
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	46.440.418.067	0,45
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.440.418.067	0,45
9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	272.250.123.669	2,62
9.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	83.616.878.084	0,81
9.01.0.00.0.00.02.0000 Dinas Syariat Islam Aceh	40.289.156.989	0,39
9.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	17.472.693.000	0,17
9.01.0.00.0.00.04.0000 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	23.738.404.521	0,23
9.01.0.00.0.00.05.0000 Sekretariat Baitul Mal Aceh	107.132.991.075	1,03
Grand Total	10.374.683.597.969	100,00

Sumber: SIPD, 2022

Lebih detail terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.4. yang dapat dilihat pada Buku 2 (dua) RKPA Tahun 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

BAB VII

KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH

7.1 Perkembangan Kasus COVID-19

Merujuk data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, BNPB hingga Sabtu (11/12/2021), jumlah infeksi COVID-19 di seluruh Provinsi Aceh (NAD) telah mencapai 38.422 kasus, dengan rincian meninggal sebanyak 2.066 orang dan 1 masih sakit (positif aktif) serta 36.355 orang dinyatakan sembuh. Persentase meninggal per kasus (*fatality rate*) sebesar 5.38 persen, sementara persentase sembuh per kasus (*recovery rate*) mencapai 94.62 persen.

Tabel 7.1
Perkembangan Kasus COVID-19 di Aceh per 11 Desember 2021

No	Prov/Kab/Kota	Kasus Positif Total (Terkonfirmasi)	Positif Baru (1 Hari)	Meninggal Total	Meninggal Baru (1 Hari)	Sembuh Total	Masih Sakit (Positif Aktif)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh (NAD)	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		38.422 [A]	-	2.066 [A]	-	36.355 [A]	1 [A]
		38.428 [B]		2.068 [B]		36.347 [B]	13 [B]
2	Kota Banda Aceh	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		12.054	-	345	-	11.707	2
3	Kab. Aceh Besar	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		5.881	-	303	-	5.572	6
4	Kab. Pidie	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		2.550	-	282	-	2.268	-
5	Kab. Aceh Tamiang	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.769	-	142	-	1.627	-
6	Kab. Bireuen	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.732	-	107	-	1.625	-
7	Kota Lhokseumawe	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.678	-	80	-	1.598	-
8	Kab. Aceh Tengah	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.382	-	72	-	1.310	-
9	Kab. Aceh Barat	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.150	-	66	-	1.084	-
10	Kota Langsa	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.135	-	92	-	1.043	-
11	Kab. Aceh Utara	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		1.055	-	103	-	951	1
12	Kab. Aceh Selatan	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		927	-	79	-	847	1
13	Kab. Pidie Jaya	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		789	-	33	-	756	-
14	Kab. Aceh Singkil	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		732	-	34	-	698	-
15	Kab. Gayo Lues	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		688	-	29	-	659	-
16	Kab. Nagan Raya	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		573	-	62	-	511	-
17	Kota Sabang	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		546	-	47	-	498	1
18	Kab. Aceh Timur	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		542	-	51	-	491	-
19	Kab. Bener Meriah	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		516	-	21	-	495	-
20	Kab. Aceh Jaya	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		506	-	27	-	479	-
21	Kab. Aceh Barat Daya	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		407	-	31	-	376	-
22	Kab. Simeulue	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		398	-	19	-	377	2
23	Kab. Aceh Tenggara	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		374	-	21	-	353	-
24	Kota Subulussalam	Terkonfirmasi	Positif Baru	Meninggal	Meninggal Baru	Sembuh	Kasus Aktif
		300	-	19	-	281	-

Berdasarkan Tabel 7.1 diketahui terdapat 10 (sepuluh) kota dan kabupaten dengan jumlah orang yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 tertinggi di seluruh Provinsi Aceh, sebagai berikut:

1. Kota Banda Aceh, 12.054 terkonfirmasi, 345 meninggal, 11.707 sembuh.
2. Kabupaten Aceh Besar, 5.881 terkonfirmasi, 303 meninggal, 5.572 sembuh.
3. Kabupaten Pidie, 2.550 terkonfirmasi, 282 meninggal, 2.268 sembuh.
4. Kabupaten Aceh Tamiang, 1.769 terkonfirmasi, 142 meninggal, 1.627 sembuh.
5. Kabupaten Bireuen, 1.732 terkonfirmasi, 107 meninggal, 1.625 sembuh.
6. Kota Lhokseumawe, 1.678 terkonfirmasi, 80 meninggal, 1.598 sembuh.
7. Kabupaten Aceh Tengah, 1.382 terkonfirmasi, 72 meninggal, 1.310 sembuh.
8. Kabupaten Aceh Barat, 1.150 terkonfirmasi, 66 meninggal, 1.084 sembuh.
9. Kota Langsa, 1.135 terkonfirmasi, 92 meninggal, 1.043 sembuh.
10. Kabupaten Aceh Utara, 1.055 terkonfirmasi, 103 meninggal, 951 sembuh.

7.2 Arah Kebijakan Penanganan COVID-19

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 serta memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Pemerintah Aceh sangat berkomitmen dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Aceh, hal ini terlihat dari RPA Tahun 2023-2026 dimana salah satu tujuan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi COVID-19”**. Tujuan ini dijabarkan kedalam 15 (lima belas) strategi pembangunan yang meliputi:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin;
3. Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi;
4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa;
5. Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha;
6. Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional;
7. Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
8. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
9. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industry;
10. Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemerintah untuk kemudahan akses bagi calon investor;
11. Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan;
12. Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk Pembangunan Aceh;

13. Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan local;
14. Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi ;
15. Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula.

Sementara itu arah kebijakan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi **COVID-19** mencakup:

1. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan;
3. Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah;
4. Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi;
5. Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM;
6. Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan;
7. Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
8. Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
9. Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
10. Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
11. Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;
12. Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan local;
13. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing.

Berdasarkan Tabel 7.2 diketahui program prioritas dan alokasi anggaran Tahun 2023 yang mendukung arah kebijakan dalam mengurangi dampak pandemic COVID-19 sebagai berikut:

Tabel 7.2
Program dan Alokasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2023

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
TOTAL					529,210,351,796		
I.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Penyediaan Irigasi Tersier, Penyuluhan SDM Petani dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan				146,396,571,545		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persen	56.32	56.32	99,889,636,545	
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen	Persen	95	95	2,054,820,000	TANBUN
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persen	70	70	847,600,000	TANBUN
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar	Rasio	0.23	0.18	9,866,861,598	DISNAK
5	Program Penyuluhan Pertanian	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	104.67	105.11	1,837,175,402	DISNAK

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	283,676.35	237,214.46	22,220,478,000	DKP
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai tukar pembudidaya ikan	NTPI	97.04	97.54	9,680,000,000	DKP
II.	Melakukan Intervensi Kepada Penduduk Miskin Melalui Pemberian Bantuan					57,951,918,963	
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	%	20	25	9,806,052,582	DINSOS
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	60	65	10,708,196,171	DINSOS
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	98	98	699,999,797	DINSOS
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%	55	60	35,159,205,864	DINSOS
5	Program Pengelolaan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam	%	100	100	1,578,464,549	DINSOS

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
	Taman Makam Pahlawan	Pahlawan Nasional Yang Terawat					
III.	Mengendalikan Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah				7,628,576,200		
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	%	2.24	2.18	2,090,425,000	INDAG
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh	%	2	2	387,500,000	INDAG
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Dokumen	2	2	225,651,200	INDAG
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	% IKK	43.1	43.1	1,885,000,000	INDAG
5	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah	%	2.24	2.18	3,040,000,000	RO EKONOM I
IV.	Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi				8,030,408,076		

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif;	Rasio	0.59	0.60	5,677,445,107	DPMG
2		- Rasio BUMG yang berkembang;	Rasio	0.07	0.09		DPMG
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,6	309,518,000	DPMG
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rasio desa berkembang	Rasio	0.01	0.03	2,043,444,969	DPMG
V.	Meningkatkan Promosi Produk dan Kemitraan UMKM					69,171,985,809	
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1.89	1.9	39,510,323,450	KOP-UKM
2	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Rasio	0.008	0.01	16,541,918,801	KOP-UKM

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio	0.26	0.42	2,057,114,255	KOP UKM
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Rasio	n/a	0,35	1,832,818,233	KOP UKM
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio	0.0008	0.001	3,229,811,070	KOP UKM
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rasio Koperasi Modern	Rasio	0,01	0,0125	6,000,000,000	KOP UKM
VI.	Meningkatkan Kualitas Petani, Peternak, dan Nelayan					58,946,816,528	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5.6	5.65	38,003,772,800	TANBUN
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	%	13.46	14.08	9,620,406,486	DISNAK

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	%	22.45	23.58	3,991,307,917	DISNAK
4	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	%	30	40	3,980,375,666	DKP
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	60	62	1,448,550,000	DKP
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5.25	5.3	1,902,403,659	DKP
VII.	Pemberian Kemudahan Perizinan Pertambangan dan Penggalian					8,995,266,013	
1	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6.35	4	1,530,000,000	ESDM
2	Program Pengelolaan	Usulan penetapan warisan geologi	%	0.115	12.5	1,226,000,000	ESDM

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
	Aspek Kegeologian						
3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	5.58	0.11	3,815,740,000	ESDM
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99,81%	99,16%	2,423,526,013	ESDM
VIII	Menyediakan Sarana dan Prasarana Dasar di Kawasan Industri					11,771,902,480	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4	4	7,504,827,480	INDAG
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	Kegiatan	1	1	250,000,000	INDAG
3	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Keberdayaan Konsumen	IKK	43.1	43.1	1,101,075,000	INDAG
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	4	4	1,066,000,000	INDAG
5	Program Penggunaan dan Pemasaran	Net Ekspor	USD	274,644,949	208137848	1,850,000,000	INDAG

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
	Produk Dalam Negeri						
IX	Mengoptimalkan Fasilitas Pemerintah Untuk Akses Bagi Calon Investor					4,905,024,242	
1	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	1126	1500	1,518,199,312	DPMPTS P
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	1	5	835,526,916	DPMPTS P
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan	Indeks	0	3	572,497,988	DPMPTS P
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87.34	87.50	1,547,727,826	DPMPTS P
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks SPBE	Indeks	3.1	3	431,072,200	DPMPTS P
X.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Serta Memudahkan Akses Antar Destinasi Wisata Unggulan					75,928,990,300	
1	Program Peningkatan Daya Tarik	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2	3	16,276,604,170	BUDPAR

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
	Destinasi Pariwisata						
2	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-7.25	2	15,981,579,594	BUDPAR
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	44	48	18,166,132,878	BUDPAR
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	10	48	8,486,508,536	BUDPAR
5	Program Pembinaan Sejarah	Literasi sejarah	Dokumen	3	3	1,000,000,000	BUDPAR
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemugaran Cagar Budaya	Objek	4	4	1,000,000,000	BUDPAR
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Dokumen	1	5	957,922,980	BUDPAR

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023		Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.		
1		2	3	4	5	6		7
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyerapan tenaga kerja	Orang	150	1500	4,055,621,000		BUDPAR
9	Program Pengelolaan Permuseuman	Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan	Rasio	120	131.9	10,004,621,142		BUDPAR
XI.	Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), Mendorong Peran Perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO Dalam Pembangunan Aceh					55,584,296,173		
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	17.88	20	37,438,522,938		BPKA
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	18,145,773,235		BAPPED A
XII.	Perluasan Jumlah Lahan Pekarangan Pangan Lestari di Masing Masing Kecamatan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Lokal					10,878,595,467		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita/Tahun	150.74	153.14	1,108,000,000		PANGAN

Arah Kebijakan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA	
			K	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	
	Kemandirian Pangan						
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	87.48	100	5,578,595,467	PANGAN
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10.03	8.3	1,592,000,000	PANGAN
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	2,600,000,000	PANGAN
XIII	Meningkatkan Kapasitas SDM Terhadap Digital Marketing					13,020,000,000	
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47.63	52.2	800,000,000	NAKER
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Aceh	Dokumen	1	1	202,025,757	NAKER
3	Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	19 Kasus	50	1,500,000,000	NAKER
4	Program Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	%	61.83	87.8	9,077,974,243	NAKER

Arah Kebijakan/Program		Indikator Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2023	Target 2023		SKPA
				K	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Produktivitas Tenaga Kerja						
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	867	1558	1,440,000,000	NAKER

Sumber: SIPD, 2022

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian capaian strategis yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah maka indikator kinerja mempunyai peranan yang sangat penting. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran dan program/kegiatan. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam periode tertentu, sehingga setiap program dan kegiatan harus mempunyai indikator kinerja yang terukur dan konkrit untuk mengatasi permasalahan, isu strategis dan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi target capaian indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan RPA Tahun 2023-2026.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Pemerintah Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan hasil kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian PPN/Bappenas RI dalam Desk Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (RAKORTEKRENBANGNAS) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 secara *online* disepakati target indikator makro pembangunan Aceh Tahun 2023 yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan.

Tabel 8.1
Target Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.48
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	72.58
4	Indeks Gini	%	0.307
5	Tingkat Kemiskinan	%	15.03

Sumber: RPA Tahun 2023-2026 dan Hasil Kesepakatan Desk Kewilayahan RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 8.1 diketahui untuk tahun 2023 dengan dilaksanakannya berbagai program prioritas yang telah direncanakan diharapkan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh menjadi sebesar 3.6 persen, Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5.48 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72.58, Indeks Gini turun menjadi 0.307 dan Tingkat Kemiskinan dapat ditekan menjadi 15.03 persen.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPA 2023-2026. Target capaian IKU Pemerintah Aceh Tahun 2023 secara rinci terdapat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58 *)	65,00	Ro. Organ
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,20	Kesbang
3	Indeks Resiko Bencana Aceh	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ Tinggi	BPBA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	DLHK
5	Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	Dishub
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,36	14,49	Disdik
7	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32	Kominsa
8	Opini BPK	WTP/WDP	WTP *)	WTP	BPKA
9	Indeks Pembangunan Syariah Islam (IPS)	Indeks	81,84	83,00	DSI
10	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,63	74,27	Pangan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA
1	2	3	4	5	6
11	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,7785/tinggi	2,8000/tinggi	Ro Pemotda
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	77,06	78,00	Perkim
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	87,66	88,00	Perkim
14	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	76,55	86,12	PUPR
15	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	%	59,11	54,38	Pengairan
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	Dinsos
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	Arpus
18	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	8,45	10,5	DPMPSTSP

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Sementara itu, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. IKD meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** merupakan semua indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. IKD yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari: laju inflasi, indeks ketimpangan Williamson, angka usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka melek huruf, persentase prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang, cakupan desa siaga aktif, tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain.
2. **Aspek Daya Saing Daerah** merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti: distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran per kapita, nilai tukar petani, rasio Ekspor + Impor terhadap PDB, rasio ketergantungan, produktivitas total daerah, dan lain lain.

3. **Aspek Pelayanan Umum** menjelaskan kondisi dan perkembangan tentang urusan layanan wajib dan layanan pilihan yang meliputi berbagai indikator seperti angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran, proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 km/jam), pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan dan lain lain.

Penetapan IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Inflasi	%	2,24	2,18	Ro Ekonomi/ Indag
2	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,491	0,413	Bappeda
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70	Dinkes
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,71	Disdik
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,78	64,43	Naker
6	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	30,98*)	31,13	Tanbun
7	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,1	6,13	Tanbun
8	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,9	7,94	Tanbun
9	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4,00	ESDM

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,29	Budpar
11	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,25	5,30	DKP
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,02	15,04	Indag
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,5	4,53	Indag
14	Pertumbuhan Industri	%	2	2,5	Indag
15	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribuan)	834,24	825,27	Bappeda
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	56,7	60,08	Pangan
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribuan)	9.572	9.829	Bappeda
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,19 *)	101,34	Tanbun
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Ratio	2,85	2,95	Indag
5	Rasio ketergantungan	Indeks	53,51 *)	48,70	Naker
III. ASPEK PELAYANAN UMUM					
3.1. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Pendidikan				Disdik
3.1.1.1	Rasio sekolah dengan Akreditasi A	%	94,00	95,62	Disdik
3.1.2.	Kesehatan				Dinkes
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	11	10	Dinkes
3.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	223	194	Dinkes
3.1.2.3	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	Dinkes
3.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	Dinkes
3.1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,10	85,30	RSJ
3.1.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,10	91,57	RSUZA
3.1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,4	82,5	RSIA
3.1.2.8	Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00	Dinkes

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.1.2.9	Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan	%	82,3	84	RSJ
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				PUPR
A.	Pekerjaan Umum				PUPR
3.1.3.1	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	37,94	38,50	Pengairan
3.1.3.2	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	80,28	70,26	Pengairan
B.	Penataan Ruang				PUPR
3.1.3.3	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	PUPR
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				PUPR
3.1.4.1	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	40,72	43,07	Perkim
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				Satpol PP
3.1.5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	Satpol PP
3.1.5.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/Sedang	0,58/Sedang	BPBA
3.1.6	Sosial				Dinsos
3.1.6.1	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan	%	89,29	100	Dinsos

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
3.2.1	Naker				Naker
3.2.1.1	Persentase penduduk yang bekerja	%	93,70	97,18	Naker
3.2.2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				DRKA
3.2.2.1	Persentase Cakupan Masyarakat yang terlayani Adminduk	%	94	98,1	DRKA
3.2.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DP3A
3.2.3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	DP3A
3.2.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,47	65,48	DP3A
3.2.3.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,15	76,3	DP3A
3.2.3.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	DP3A
3.2.4	Pangan				Pangan
3.2.4.1	Ketersediaan energi	kcal/kapita/hari	3788	3818	Pangan
3.2.4.2	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	86,39	86,42	Pangan
3.2.4.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,8 *)	74,28	Pangan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.2.5	Tanah				Tanah
13.2.5.1	Penyelesaian kasus tanah negara	%	35 *)	50	Tanah
3.2.6	Lingkungan Hidup				DLHK
3.2.6.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,14	60,00	DLHK
3.2.6.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63	88,61	DLHK
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				DPMG
3.2.7.1	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	DPMG
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				DP3A
3.2.8.1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Rate	2,68	2,15	DP3A
3.2.9	Perhubungan				Dishub
3.2.9.1	Rasio ijin trayek	Rasio	1:1504	1:1499	Dishub
3.2.9.2	Persentase layanan angkutan darat	%	10,00	19,80	Dishub
3.2.9.3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	%	39,78	48,1	Dishub
3.2.10	Komunikasi dan Informatika				Kominsa
3.2.10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	Kominsa
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				Kop-Ukm
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	%	62	63	Kop-Ukm

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.2.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	%	0,008	0,01	Kop-Ukm
3.2.12	Penanaman Modal				DPMPTSP
3.2.12.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	8,45	10,50	DPMPTSP
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				Dispora
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	55,00	60,00	Dispora
3.2.13.2	Persentase atlet yang berprestasi	%	60	75	Dispora
3.2.13.3	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70,00	75,00	Dispora
3.2.14	Statistik				Kominsa
3.2.14.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	27,78	Kominsa
3.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	27,78	Kominsa
3.2.15	Persandian				Kominsa
3.2.15.1	Keamanan Siber Pemerintah Aceh	%	94	95	Kominsa
3.2.16	Kebudayaan				Budpar

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.2.16.1	Terlestarikannya cagar budaya	%	27,02	27,48	Budpar
3.2.16.2	Rasio jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung/1000	187,1	142,9	Budpar
3.2.17	Perpustakaan				Arpus
3.2.17.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,001	0,0017	Arpus
3.2.18	Kearsipan				Arpus
3.2.18.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	67	Arpus
3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN					
3.3.1	Pariwisata				Budpar
3.3.1.1	Kunjungan wisata	Orang	1.357.485	2.550.339	Budpar
3.3.1.2	Lama kunjungan wisata	Hari	2	3	Budpar
3.3.1.3	Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata	Orang	-	96772	Budpar
3.3.2	Pertanian				Tanbun
3.3.2.1	Produksi komoditi pangan utama (padi)	Ton	1.611.107	1.712.000	Tanbun

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,60	5,65	Tanbun
3.3.2.3	Produksi sektor perkebunan	Ton	762.571	764.858	Tanbun
3.3.2.4	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	96,99	99,03	Disnak
3.3.2.5	Peningkatan produksi daging ternak besar	Ton	18.435	20.279	Disnak
3.3.3	Kehutanan				DLHK
3.3.3.1	Indeks kualitas lahan	Indeks	76,52	77	DLHK
3.3.3.2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	2,9	3,1	DLHK
3.3.3.3	Kerusakan kawasan hutan	%	0,03	0,03	DLHK
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral				ESDM
3.3.4.1	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	5,58	11,41	ESDM
3.3.5	Perdagangan				Indag
3.3.5.1	Ekspor bersih perdagangan	\$	274.644.949	280.137.848	Indag
3.3.6	Perindustrian				Indag
3.3.6.1	Pertumbuhan kawasan industri dan SIKIM	KI/Sentra	1/8	1/9	Indag

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.3.7	Transmigrasi				Naker
3.3.7.1	Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	%	27,8	35,71	Naker
3.3.8	Kelautan dan Perikanan				DKP
3.3.8.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	102,00	102,5	DKP
3.3.8.2	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	USD	2.051.244,00	2.153.806,00	DKP
3.3.8.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	NTPi	97,04	97,54	DKP
3.3.8.4	Produksi perikanan	Ton	417.947,05	447.303,46	DKP
3.4. PENUNJANG URUSAN					
3.4.1	Perencanaan Pembangunan				Bappeda
13.4.1.1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	Bappeda
13.4.1.2	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	Bappeda
3.4.2	Keuangan				BPKA
3.4.2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	41,88 *)	5%	BPKA
3.4.2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	23,17	20	MPA
3.4.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,74	10	BPKA
3.4.2.4	Penetapan APBD tepat waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	BPKA

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.4.2.5	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10	Bappeda, BPKA
3.4.2.6	Persentase PAA terhadap pendapatan	%	17,73	29	BPKA
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				BKA/BPSDM
3.4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61,63	77,5	BKA
3.4.3.2	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,49	0,23	BPSDM
3.4.3.3	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	16,15	20,84	BPSDM
3.4.3.4	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	60,72	61,19	BPSDM
3.4.4	Penelitian dan pengembangan				Bappeda
3.4.4.1	Penerapan SIDa:				Bappeda
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	62,50	75,00	Bappeda
3.4.4.2	Indeks inovasi daerah Aceh	Indeks	46,40	51,00	Bappeda
3.4.5	Pengawasan				Inspektorat
3.4.5.1	Meningkatnya level maturitas SPIP terintegrasi	Level	2	2	Inspektorat
3.4.6	Sekretariat DPRA				Setwan
3.4.6.1	Persentase qanun yang ditetapkan	%	30,77	70,00	Setwan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.5. PENDUKUNG					
3.5.1	Sekretariat Daerah				Setda
A	Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Ro Pemotda
3.5.1.1	Persentase penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	%	2,30	2,40	Ro Pemotda
3.5.1.2	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	n/a	80,00	Ro Pemotda
B	Ekonomi				Ro Ekonomi
3.5.1.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,44	37,08	Ro Ekonomi
3.5.1.4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	80,49	90	Ro Ekonomi
3.5.1.5	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	6,26	1,50	Ro Ekonomi
3.5.1.6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	93,6	94	Ro Ekonomi
C	Organisasi				Ro Organ
3.5.1.7	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65,00	Ro Organ
3.5.2	Kesatuan Bangsa				Kesbang
	Kesatuan Bangsa dan Politik				Kesbang
3.5.2.1	Skor aspek hak-hak politik	Skor	64,94 *)	65,00	Kesbang
3.5.2.2	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	74,91 *)	75,00	Kesbang
3.5.2.3	Skor aspek kebebasan sipil	Skor	84,94 *)	85,00	Kesbang

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.6. KEISTIMEWAAN ACEH					
3.6.1	Syariat Islam				DSI
3.6.1.1	Angka melek alquran	%	82,00	83,00	DSI
3.6.2	Perdamaian Aceh				BRA
3.6.2.1	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	15,22	21,03	BRA
3.6.2.2	Pencegahan dan mitigasi konflik	Rasio	0,571	0,857	BRA
3.6.3	Adat Istiadat Aceh				MAA
3.6.3.1	Rasio pelestarian dan pembinaan adat istiadat	Rasio	0,005	0,0062	MAA
3.6.4	Peran Ulama Aceh				MPU
3.6.4.1	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Rasio	1,63	2,33	MPU
3.6.4.2	Sertifikasi halal	Rasio	0,44	0,71	MPU
3.6.5	Pendidikan Khusus Aceh				MPA
3.6.5.1	Rasio kebijakan/pertimbangan yang diterbitkan	Rasio	0,80	1,00	MPA
3.6.6	Zakat dan Infaq Aceh				BMA
3.6.6.1	Persentase pendapatan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69,00	75,00	BMA
3.6.7	Peran Lembaga Wali Nanggroe				KKW

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Indikator 2021	Target Indikator 2023	SKPA Pengampu
1	2	3	4	5	6
3.6.7.1	Indeks pemberdayaan lembaga wali nangroe	Indeks	75	80	KKW
3.6.8	Pendidikan Dayah				Dayah
3.6.8.1	Persentase dayah yang mandiri	%	31,72	38,00	Dayah

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

BAB IX PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. RKPA Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Penyusunan RKPA Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 serta RKP Tahun 2023.

Untuk menghasilkan RKPA Tahun 2023 yang berkualitas dan dapat dilaksanakan, maka RKPA Tahun 2023 disusun berdasarkan *evidence based planning* dengan menggunakan pendekatan perencanaan berdasarkan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Selanjutnya, RKPA Tahun 2023 akan menjadi dokumen operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA Tahun 2023, pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2023; pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023; sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) Tahun 2023; serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh Tahun 2023.

GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Tabel 2.122
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RRPJA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPJA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPJA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.		K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan					Vol	Satuan	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Sandingan			Menjadi			K			K			K						
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27
		Pembinaan dan Penyelenggaraan UN/USBN	Terlaksananya Try Out dan Penyelenggaraan UN/USBN	2,925	Sekolah	59,621,205,300	-	Sekolah	9,704,990,593											-	Sekolah	9,704,990,593	-	16,28	Dinas Pendidikan Aceh						
		Supervisi pengawas satuan pendidikan		280	Orang	1,500,000,000	-	Orang	2,378,087,878	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terevaluasinya Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	3	Kegiatan	575,000,000	6	-	804,185,500	sts	139.86	sts	sts	3,182,273,378	sts	212.15	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Minat Bakat Siswa					51	BulanKeg	6,890,563,258	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa	34	Kegiatan	2,198,795,000	341	-	6,004,196,686	sts	273.07	sts	sts	12,894,759,944	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Siswa	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa	1,640	Orang	5,518,598,600	-	Orang	545,095,000											-	Orang	545,095,000	-	9.88	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Minat Bakat Siswa	Terlaksananya Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa	10,656	Orang	109,406,362,960	sts	sts	27,703,587,449												sts	sts	27,703,587,449	sts	25.32	Dinas Pendidikan Aceh					
		Penyelenggaraan Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa	Terlaksananya Lomba kreativitas dan Minat Bakat Siswa				-	-	-												-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh					
		Lomba Kompetensi dan Kreativitas Siswa					18	Bulan	229,035,000											18	Bulan	229,035,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyediaan Insentif/Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan					24,715	Bulan	375,952,348,628	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Insentif Guru PNS dan Honorarium Non PNS	3	Kegiatan	186,227,700,000	4	-	150,458,159,210	sts	80.79	sts	sts	526,410,507,838	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS SMK, SMA dan PKLK	Tersedianya Honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS SMK, SMA dan PKLK	12,163	Orang	972,817,027,800	100	%	168,976,211,351											100	%	168,976,211,351	sts	17.37	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS		12163	orang	29,533,979,584	-	orang	204,806,587,859											-	orang	204,806,587,859	-	693.46	Dinas Pendidikan Aceh						
		Penyediaan Operasional Sekolah Berasrama	Tersedianya Operasional Sekolah Berasrama	23	Sekolah	64,105,059,499	sts	sts	31,205,463,915												sts	sts	31,205,463,915	sts	48.68	Dinas Pendidikan Aceh					
																				-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terciptanya kompetensi kegiatan standar pendidikan yang sesuai keahlian pendidikan	1,293	Orang	6,465,770,700	-	Orang	278,116,800	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Angka Kelulusan Sertifikasi Guru	19	Kegiatan	592,250,000	26	-	17,060,546,990	sts	2,880.63	sts	sts	17,338,663,790	sts	268.16	Dinas Pendidikan Aceh						
		Peningkatan Kompetensi dan Supervisi pengawas Sekolah					21	BulanPaket	1,716,569,894											21	Bulan Paket	1,716,569,894	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Tersedianya pelatihan bagi tenaga kependidikan	10,079	Orang	50,394,230,052	116	1 tahun 100	Bulan	39,975,000										100%	100	Bulan	39,975,000	sts	0.08	Dinas Pendidikan Aceh					
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru berkemampuan				sts	sts	8,974,082,056											sts	sts	8,974,082,056	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Peningkatan Kualitas Guru				60%	100%	100%	100%	100%	575	1 tahun	575	1 tahun	575	1 tahun	575	1 tahun	60%	100	Bulan	385,024,799	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh					
		Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah kelompok MGMP Tingkat SMP, KKG Tingkat TK dan SD, MKPS Pengawas Tingkat TK, SD, dan SMP yang dibina	2,539	orang	12,697,455,324	-	orang	3,437,313,700											-	orang	3,437,313,700	-	27.07	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksana kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	5,421	orang	27,104,118,255	sts	sts	11,558,054,168												sts	sts	11,558,054,168	sts	42.64	Dinas Pendidikan Aceh					
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9	-	5,404,233,000											9	-	5,404,233,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru Yang memenuhi standar pendidikan				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	13,428	Orang	280,351,740,182	sts	sts	79,939,385,305											sts	sts	79,939,385,305	sts	28.51	Dinas Pendidikan Aceh						
		Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi					sts	sts	4,000,982,198											sts	sts	4,000,982,198	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				K			K			Sandangan			Menjadi				K			K		K			K												
				Vol		Satuan	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Vol		Satuan	Rp.	K		Rp.		Vol		Satuan	Rp.	K		Rp.			
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersedianya Beasiswa Lanjutan Tenaga Pendidik SMA/SMK/SLB	690	Orang	4,466,188,200	405	Bulan	449,774,779																									Dinas Pendidikan Aceh			
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk standar kualifikasi bagi Pendidik				sts	sts	10,845,550,646																									Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat Pendidik dan kependidikan SMK, SMA dan PKLK	Terlaksananya perlombaan dan pengembangan kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan PKLK	2,760	Orang	82,192,213,200	sts	sts	16,040,769,749																									Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat Pendidik dan kependidikan SMK, SMA dan PKLK	Terlaksananya perlombaan dan pengembangan kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan PKLK				sts	sts	632,665,000																										Dinas Pendidikan Aceh		
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi	13,000	Orang	36,441,254,800	sts	sts	-																										Dinas Pendidikan Aceh		
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi				100	%	996,088,100																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK	2,200	Orang	10,391,107,900	sts	sts	1,551,042,400																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK	Terlathnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK	12,716	Orang	166,587,697,100	100	%	406,145,200																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK	Terlathnya Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi SMA dan PKLK				100	%	3,736,625,889																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi					sts	sts	4,050,520,000																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan kapasitas dan Supervisi pengawas Sekolah SMA dan PKLK	Terlaksananya Pengawasan Pendidikan SMA dan PKLK	230	Orang	22,890,767,947	100	%	3,736,625,889																												Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan kapasitas dan Supervisi pengawas Sekolah SMA dan PKLK	Terlaksananya Pengawasan Pendidikan SMA dan PKLK				-	-	-																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi		3000	orang	15,000,000,000	-	orang	2,356,238,200																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan		1500	orang	7,500,000,000	-	orang	14,073,885,923																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		600	orang	3,000,000,000	-	orang	4,209,902,070																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembinaan Manajemen dan Kelembagaan Sekolah					5	Bulan	234,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terbinanya kelembagaan manajemen berbasis sekolah	10	Kegiatan	1,800,000,000								9	-	2,103,046,500	sts	-	sts	sts	2,337,046,500	tdr	tdr			Dinas Pendidikan Aceh			
		Pembinaan Manajemen dan Pengembangan kelembagaan sekolah	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa	526	Siswa	9,836,010,600	sts	sts	3,768,514,072																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Fasilitasi Peningkatan akreditasi SMA	Terakreditasinya Sekolah Menengah Atas	76	Lembaga	850,000,000	-	-	-																											Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan Teknologi dan Informasi Pendidikan	Meingkatnya Kompetensi IT bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2095	Orang	11,161,211,600	sts	sts	3,421,131,090																												Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan	Terbinanya Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan	9,200	Orang	75,170,399,000	sts	sts	13,772,219,852																												Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan kelembagaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan	Terbinanya kelembagaan Kelompok Kerja pendidik dan Tenaga kependidikan	368	Lembaga	13,579,100,000	-	-	-																												Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah		3	Kegiatan	734,455,754	-	-	-																												Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan UKS SMA/SMK/MA		14000	orang	1,750,000,000	-	orang	3,998,158,300																												Dinas Pendidikan Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Teknologi Informasi	1,020	Orang	5,100,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG I	2,500	Orang	12,500,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG II	2,500	Orang	12,500,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH III LHOESEUMAWA)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG III	2,200	Orang	11,000,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG IV	2,250	Orang	11,250,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH V TAKEONGON)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG V	2,500	Orang	12,500,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTAGANE)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VI	2,400	Orang	12,000,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VII	2,300	Orang	11,500,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANGPINE)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG VIII	2,000	Orang	10,000,000,000		Orang										-	Orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUANI)	Terseleenggaranya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Wilayah PPMG IX	2,000	Orang	10,000,000,000	sts	sts										sts	sts	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Pembinaan Sekolah Berwawasan Keunggulan		1,671	Orang		1,696	Orang										1,696	Orang	-	101.50	tdr	Dinas Pendidikan Aceh			
			Terseleenggaranya Sekolah Berwawasan Keunggulan	12	Bulan	7,324,000,000	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh			
		Pembinaan dan perlomba Sekolah Sehat	Terlaksananya pembinaan dan perlombaan sekolah sehat	276	Sekolah	24,508,605,000	sts	sts	1,517,431,657									sts	sts	1,517,431,657	sts	6.19	Dinas Pendidikan Aceh			
		Penyediaan bantuan operasional sekolah	Tersedianya bantuan operasional sekolah	571	Sekolah	6,893,320,000	sts	sts	267,109,082,487															Dinas Pendidikan Aceh		
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			
																							Dinas Pendidikan Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol		Satuan	Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	
										Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Ruang Serba Guna/Aula	12	Unit	400,000,000	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Asrama Sekolah	Terbangunnya Asrama sekolah	4	Unit	-	Pembangunan Asrama Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13	Paket	6,075,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	62	-	19,562,839,274	sts	322.02	62	-	19,562,839,274	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Fasilitas Parkir Sekolah	Tersedianya Fasilitas Parkir Sekolah	3	Unit	220,000,000	Pembangunan Fasilitas Parkir Sekolah	10	-	1,594,861,300	sts	724.94	10	-	1,594,861,300	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Kantin Sekolah	20	Unit	3,960,000,000	Pembangunan Kantin Sekolah	20	-	3,357,862,000	sts	84.79	20	-	3,357,862,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2	Unit	550,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Tersedianya Ruang/Sudut Baca bagi siswa	0	Paket	-	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terebahnya Ruang Kelas Sekolah	7	Paket	2,478,000,000	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	21	-	3,355,047,296	sts	135.39	21	-	3,355,047,296	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Terebahnya Ruang Guru/kepala sekolah/TU	12	Paket	325,000,000	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	9	-	2,107,132,000	sts	648.35	9	-	2,107,132,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Terebahnya Ruang Praktik Siswa	15	Paket	325,000,000	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	6	-	4,214,115,900	sts	-	6	-	4,214,115,900	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Laboratorium Sekolah	Terebahnya Ruang Laboratorium Sekolah	5	Paket	187,000,000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terebahnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Unit	100,000,000	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Terebahnya Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	-	-	-	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Terebahnya Ruang Serba Guna/Aula	1	-	500,000,000	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	1	-	197,979,600	tdr	39.60	1	-	197,979,600	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terenovasinya Sapras Utilitas SMK	5	Paket	400,000,000	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	-	626,697,000	sts	156.67	3	-	626,697,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah	Terebahnya Fasilitas Parkir Sekolah	0	Paket	100,000,000	Rehabilitasi Fasilitas Parkir Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Kantin Sekolah	Terebahnya Kantin Sekolah	5	Unit	100,000,000	Rehabilitasi Kantin Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terebahnya Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2	Unit	165,000,000	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Sekolah	Terebahnya Ruang/Sudut Baca Sekolah	0	Paket	-	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Mebeluer Sekolah	Tersedianya Mebeluar sekolah yang berkualitas	5	Keg	450,375,000	Pengadaan Mebel Sekolah	3	-	1,674,397,500	sts	371.78	3	-	1,674,397,500	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	4	Keg	640,750,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	-	-	tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	4	Keg	640,750,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7	-	8,048,399,100	sts	1,256.09	7	-	8,048,399,100	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sekolah	Tersedianya perlengkapan Peserta Didik sekolah	333	Unit	401,500,000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Tersedianya Sarana Mobilitas Sekolah	-	-	-	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	-	-	-	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta didik	Tersedianya perlengkapan praktik dan peraga	-	-	600,000,000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terpeliharanya Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	0	Paket	-	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Beasiswa Anak yatim, Alokasi BOS, Operasional Sekolah Bersisranga jenjang SMK	3	Kegiatan	201,601,400,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5	-	18,087,739,590	sts	8.97	5	-	18,087,739,590	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat praktik dan peraga yang berkualitas bagi siswa	7	Paket	2,518,750,000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	38	-	70,628,039,300	sts	2,804.09	38	-	70,628,039,300	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Tersedianya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	11	Keg	750,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	11	-	868,820,000	sts	-	11	-	868,820,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Tersedianya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	3	Keg	850,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	4	-	354,829,000	sts	41.74	4	-	354,829,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh	
										Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	833	orang	10,000,000,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40	-	15,991,064,504	sts	-	sts	sts	sts	55,261,842,897	sts	552.62	Dinas Pendidikan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Sandangan		Menjadi			K			K		K			K							
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.				
		Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran	Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	240	Orang	1,100,000,000	-	-	-																						Dinas Pendidikan Aceh		
		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terbinanya Gugus PAUD dalam Kabupaten Aceh Jaya				-	-	-																						Dinas Pendidikan Aceh		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terhabilitasinya bangunan sekolah	8	Unit	1,757,710,400	-	-	-																						Dinas Pendidikan Aceh		
		Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terhabilitasinya sarana air bersih dan sanitary	7	Unit	728,000,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan pagar sekolah	Pembangunan Pagar Sekolah	8	Sekolah	3,116,000,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan kelembagaan paud	Terlaksananya kegiatan Kelembagaan PAUD	50	Lembaga	8,285,007,631	100	%	1,000,885,334																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu PAUD	1445	Orang	7,226,407,007	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan dan penerapan kurikulum paud	Tercapainya standar nasional pendidikan	2221	Orang	9,216,954,000	100	%	752,827,483																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Peningkatan kompetensi Guru dan Pengelola PAUD	Meningkatnya kompetensi Guru dan Pengelola PAUD	364	Orang	1,820,000,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan sistem pendataan pendidikan PAUD	Tersedianya data pendidikan PAUD	364	Orang	1,820,000,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembiayaan dan lomba kreativitas PAUD	Terbinanya kelembagaan dan kreativitas PAUD	460	Orang	3,940,205,200	100	%	563,093,445																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya Gedung Sekolah (langas)	83	Unit	62,933,175,420	-	Unit	18,331,975,495																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, peniaga sekolah	Ruang Kelas Baru SD	12	Unit	5,865,000,000	-	Unit	3,687,582,000																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya RKB Sekolah (Biang Mangat)	232	ruang	84,203,759,983	sts	sts	35,172,158,654																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya RKB Sekolah(Gedung RKB SD Trans Rusin syiah Utama)				-	-	671,522,327																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya RKB Sekolah (arah Jambo Aye aceh Utara)				-	-	1,082,630,579																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya Kantor Dewan Guru	129	ruang	44,171,317,853	-	ruang	12,200,177,828																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya Kantor Dewan Guru				-	-	907,431,172																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya Kantor Dewan Guru				-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terbangunnya Lab Sekolah	86	ruang	20,751,972,959	-	ruang	3,150,463,766																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya Alat peraga olahraga bagi siswa	8	Sekolah	1,600,300,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan ruang serba guna/aula	Terbangunnya ruang serba guna	53	Ruang	14,383,567,220	-	Ruang	10,032,366,660																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya pemasangan paving block jalan dan taman SD Neg 11 Kota Sabang	60	Sekolah	12,630,996,050	-	Sekolah	4,044,486,628																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan ruang ibadah	tersedianya mushalla SMPs	56	Unit	13,992,515,558	-	Unit	4,647,904,307																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan perpustakaan sekolah	ruang pustaka	18	Ruang	7,114,600,000	-	Ruang	4,682,925,981																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Peningkatan Sarana Kebersihan Sekolah	7	Unit	1,092,000,000	-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengadaan buku dan alat tulis siswa	Tersedianya Buku Sekolah	16	Paket	8,089,781,710	-	-	-																								Dinas Pendidikan Aceh
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya kualitas pendidikan	156	Unit	117,105,167,515	-	Unit	69,313,430,878																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya kualitas pendidikan (Bireuen)				-	-	-																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya meubeleir ruang kelas	74878	Set	89,854,153,206	-	Set	35,048,560,340																							Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	108	Unit	28,084,500,000	-	Unit	8,299,405,500																							Dinas Pendidikan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				K		K				Alokasi Anggaran (Rp.)		Menjadi		K			K		K																	
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rp.	Rp.	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.										
														Target	Uraian												Uraian	Uraian								
																										Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol
		Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	teratanya halaman/lingkungan sekolah	3	Unit	1,625,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1	Sekolah	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpeliharanya gedung sekolah yang representatif	42	Unit	10,665,484,837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	Terhabetasinya asrama siswa	3	Unit	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terhabetasinya ruang kelas sekolah	28	ruang	4,916,182,107	-	ruang	3,743,693,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ruang	3,743,693,272	-	76.15	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terhabetasinya ruang guru sekolah	8	ruang	1,346,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Sekolah	5	ruang	728,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat ruang serbaguna/aula	Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Sekolah	5	ruang	728,000,000	-	ruang	66,305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ruang	66,305,000	-	9.11	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terseptainya Fasilitas keamanan terhadap lingkungan sekolah	8	Sekolah	1,602,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Jumlah ruang sekolah yang direvitalisasi	7	unit	1,092,000,000	-	unit	505,422,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	unit	505,422,000	-	46.28	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas Sekolah	5	ruang	728,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	7	unit	728,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB	Terpenuhinya Ruang Kelas Baru	12	ruang	2,340,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDBL dan SMP/MTs	Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDBL dan SMP/MTs	4	Paket	1,005,000,000	-	Paket	1,130,238,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paket	1,130,238,971	-	112.46	-	Dinas Pendidikan Aceh											
		Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terbangunnya Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	2	ruang	562,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya Pagar Sekolah	115	Sekolah	54,641,705,491	-	Sekolah	25,812,310,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekolah	25,812,310,508	-	47.24	-	Dinas Pendidikan Aceh											
		Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya Pagar Sekolah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendidik	4859	orang	24,298,946,015	-	orang	5,544,513,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	5,544,513,800	-	22.82	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	443	orang	2,212,500,000	-	orang	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	150,000,000	-	6.78	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tenaga pendidik	Terlatihnya pendidik yang memenuhi standar kompetensi	1270	orang	6,350,000,000	-	orang	2,490,327,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	2,490,327,700	-	39.22	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersedianya Beasiswa bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	70	orang	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya data dan terdistribusinya pendidik dan tenaga kependidikan	605	orang	3,028,835,000	-	orang	676,557,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	676,557,060	-	22.34	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	222	orang	1,110,000,000	-	orang	589,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	589,430,000	-	53.10	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan	2792	orang	13,961,392,361	-	orang	3,210,281,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	3,210,281,900	-	22.99	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan	1004	orang	5,023,868,374	-	orang	6,315,376,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	orang	6,315,376,965	-	125.71	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan kependidikan SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Guru yang memenuhi standar nasional pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs	364	orang	1,820,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Peningkatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik SD/MI dan SMP/MTs	Terpenuhinya Kualifikasi Guru yang memenuhi standar nasional pendidikan	364	orang	1,820,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh												
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terselenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs	3200	orang	20,854,105,420	sts	sts	9,298,524,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sts	sts	9,298,524,100	sts	44.59	-	Dinas Pendidikan Aceh											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandangan		Menjadi		K			K		K			K		
				Rp.			Rp.			Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Rp.		Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terseleenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs				51	BulanKeg	1,273,505,400												51	Bulan Keg	1,273,505,400	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terseleenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs				-	-	-												-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terseleenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs				-	-	-												-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terseleenggaranya lomba kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTs				-	-	-												-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan penerapan kurikulum SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Penerapan Kurikulum 2013	16000	orang	5,744,500,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Meningkatnya kompetensi siswa	1901	orang	9,505,709,366	-	orang	304,905,566												-	orang	304,905,566	-	3.21	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	12	Bulan	500,000,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA	101	orang	508,000,000	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terbinanya kelembagaan manajemen berbasis sekolah	1470	orang	7,353,124,800	-	orang	885,459,380												-	orang	885,459,380	-	12.04	Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa	7661	orang	38,311,007,549	-	orang	21,381,706,059												-	orang	21,381,706,059	-	55.81	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	250	orang	1,253,417,925	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi	638	orang	3,193,546,050	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	143	orang	719,466,340	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh
		Penyediaan beasiswa transisi	Tersedianya beasiswa transisi	12	Bulan	248,455,100,066	-	-	-												-	-	-	sts	-	Dinas Pendidikan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.											
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Target	Tolak Ukur			Vol	Satuan				Vol	Satuan														
																									Vol		Satuan	Vol	Satuan						
		Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI dan SMP/MTs	Tercapainya standar nasional pendidikan	1703	orang	8.520,497,028	-	orang	10,612,883,536																									Dinas Pendidikan Aceh	
		Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi peserta didik dan Siswa	631	orang	3,156,000,000	-	-	-																									Dinas Pendidikan Aceh	
		Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS	Meningkatnya Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12	Bulan	1,820,000,000	-	-	-																									Dinas Pendidikan Aceh	
		Bimbingan belajar siswa kelas III SMP/MTs khusus mata pelajaran ujian Nasional	Terbimbingnya Siswa yang mengikuti Ujian Nasional	231	orang	1,157,000,000	-	orang	552,644,480																									Dinas Pendidikan Aceh	
		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya data pendidikan dasar	364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan bakat tenaga pendidik dan kependidikan SD/MI dan SMP/MTs	Terseleenggaranya lomba kreativitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SD/MI dan SMP/MTs	9746	orang	40,095,169,978	-	orang	3,206,291,847																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan dan pembinaan karakter siswa SD/MI dan SMP/MTs	Terwujudnya siswa berkarakter	364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan metode pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya mutu pembelajaran pendidikan dengan teknologi informast	364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dasar	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan dasar	364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Terpenuhnya standar nasional pendidikan	3	Kegiatan	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah	Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik dibidang pendidikan	364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard mutu dan kualitas pendidikan				-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan (Migas Kab/Kota)					sts	sts	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Migas Kab/Kota)	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK				sts	sts	976,802,700																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pelatihan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Migas Kabupaten/Kota)					sts	sts	871,519,000																										Dinas Pendidikan Aceh
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Meningkatnya sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	36	unit	18,287,111,349	sts	sts	7,013,083,400																										Dinas Pendidikan Aceh
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	4	Kegiatan	878,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terciptanya Proses Belajar Mengajar Terhadap Peserta dalam mengentaskan Buta Aksara	700	Orang	3,500,000,000	-	Orang	2,495,400,200																										Dinas Pendidikan Aceh
		Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Tersedianya Peningkatan mutu pendidikan	1710	Orang	8,550,000,000	-	Orang	875,939,468																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan pendidikan keaksaraan	Peringatan Hari Aksara Internasional	584	Orang	2,920,000,000	-	Orang	4,659,220,000																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlatihnya warga belajar non formal	1285	Orang	6,428,171,389	-	Orang	1,700,167,896																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	jumlah lembaga pendidikan nonformal	100	Orang	500,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	208	Orang	1,040,580,250	-	Orang	500,000,000																										Dinas Pendidikan Aceh
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal		364	orang	1,820,000,000	-	orang	1,468,484,300																										Dinas Pendidikan Aceh
		Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan kependidikan non formal		364	orang	1,820,000,000	-	-	-																										Dinas Pendidikan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K			K			K			K					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.					Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat daerah yang terasusun tepat waktu	1	dokume n	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3	bulan	219,577,948	sts	439.16	3	bulan	219,577,948	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Administrasi Keuangan	Meningkatnya disiplin aparatur	100	persen	46,981,501,740	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	51,980,315,061	sts	110.64	-	-	51,980,315,061	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	100	persen	46,981,501,740	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53	bulan	44,242,425,978	sts	94.17	53	bulan	44,242,425,978	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Administrasi Umum	Ruang dan fasilitas Kerja yang memadai	100	persen	12,560,613,010		-	-	12,357,856,904	sts	-	-	-	12,357,856,904	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengiriman surat dan materai	12	bulan	30,780,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	bulan	30,780,000	75.00	-	sts	sts	68,267,550	sts	151.71	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	1,974,663,464	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	bulan	2,206,437,612	75.00	-	sts	sts	7,085,674,248	sts	358.83	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	12	bulan	4,643,041,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ruang kerja yang bersih	12	bulan	1,708,802,880	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	bulan	511,215,228	75.00	122.79	sts	sts	1,551,319,418	sts	310.26	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	1,040,104,190	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	bulan	326,535,840	sts	-	sts	sts	587,776,300	sts	143.36	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12	bulan	410,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	187,116,111	75.00	-	sts	sts	497,446,868	sts	236.88	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	bulan	210,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	bulan	42,625,000	75.00	87.12	sts	sts	273,543,220	sts	260.52	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	105,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	bulan	-	sts	-	sts	sts	1,763,986,000	sts	176.40	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	1,000,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9	bulan	61,830,000	75.00	24.14	sts	sts	144,939,000	sts	289.88	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan media cetak lainnya	12	bulan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	bulan	2,379,737,627	75.00	308.76	sts	sts	5,290,582,033	sts	440.88	Dinas Kesehatan Aceh					
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	1,200,000,000	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	12	bulan	200,000,000	sts	-	sts	sts	241,053,000	sts	120.53	Dinas Kesehatan Aceh					
							Penyediaan jasa dokumentasi kantor	Tersedianya dokumentasi kantor	12	bulan	200,000,000	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	4,418,065,808	sts	-	sts	sts	9,976,062,012	sts	225.80	Dinas Kesehatan Aceh					
							Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	4,418,065,808	Pengadaan Mebeleur	1	Paket	200,000,000	sts	-	sts	sts	1,890,487,350	sts	945.89	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pengadaan mebeleur	Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor	1	Paket	200,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Paket	5,025,000,000	sts	-	sts	sts	2,264,463,565	sts	45.06	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	Paket	5,025,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3	bulan	80,000,000	sts	-	3	bulan	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pembangunan gedung kantor	Tersedianya tempat kerja yang memadai	1	Paket	32,892,228,799	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38	bulan	1,322,589,445	sts	109.18	sts	sts	2,784,854,092	sts	278.49	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan	1	Paket	1,000,000,000	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			2,500,000,000	sts	-	sts	sts	2,092,051,788	tdr	83.68	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional			2,500,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1	Paket	100,000,000	sts	-	sts	sts	403,253,088	sts	403.25	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan/dinas	1	Paket	100,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3	bulan	273,953,088	sts	1,871.26	sts	sts	814,460,592	sts	254.52	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	Paket	320,000,000	Meningkatkan pemanfaatan peralatan kantor	1	Paket	420,364,687	-	-	sts	sts	814,460,592	sts	254.52	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	Paket	50,000,000																	
							Pembangunan rumah dinas													199,383,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor													2,700,107,556	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					
							Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													5,334,984,320	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K		K			K			
				Rp.			Rp.			Rp.			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.			
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.
			Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	92	%	2,200,000,000	sts	sts	3,300,386,356										sts	sts	3,300,386,356	sts	150.02	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	90	%	928,510,000	sts	sts	1,442,140,235										sts	sts	1,442,140,235	sts	155.32	Dinas Kesehatan Aceh		
			Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional					73	%	314,052,470										73	%	314,052,470	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan puskesmas keliling	Tersedianya mobil Pushing di Puskesmas			600,000,000	-	-	7,043,699,450										-	-	7,043,699,450	tdr	1,173.95	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pembangunan posyandu	Pembangunan Poskesdes			600,000,000	-	-	9,368,673,314										-	-	9,368,673,314	tdr	1,561.45	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana untuk Puskesmas			5,000,000,000	-	-	47,729,731,250										-	-	47,729,731,250	tdr	954.59	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Migas Kabupaten/Kota)	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas Tersedianya Ambulance di Puskesmas Seleh				-	-	-										-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu					-	-	16,285,066,173										-	-	16,285,066,173	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan					-	-	558,287,000										-	-	558,287,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan sarana dan prasarana posyandu					-	-	1,109,219,656										-	-	1,109,219,656	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap					-	-	3,749,204,000										-	-	3,749,204,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas					-	-	4,285,144,156										-	-	4,285,144,156	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu					-	-	4,666,645,266										-	-	4,666,645,266	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu					-	-	7,771,566,000										-	-	7,771,566,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan					-	-	2,494,034,000										-	-	2,494,034,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VIP, VIP, Kelas I, II, dan III)					-	-	11,316,393,000										-	-	11,316,393,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah	Tersedianya mobil Ambulance di Rumah Sakit			3,000,000,000	79	-	4,430,787,500										79	-	4,430,787,500	tdr	147.69	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pembangunan gudang obat/apotik					-	-	2,018,469,000										-	-	2,018,469,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengembangan ruang operasi					-	-	3,237,727,000										-	-	3,237,727,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Rehabilitasi bangunan rumah sakit					-	-	4,124,127,887										-	-	4,124,127,887	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan mebel rumah sakit					-	-	4,996,674,977										-	-	4,996,674,977	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit					-	-	1,122,964,500										-	-	1,122,964,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
											1,081,700,261,700									-	-	1,297,799,092,392	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
																				-	-	1,297,799,092,392	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Penyuluhan kesehatan anak balita					-	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Ibu dan Anak yang mendapatkan pelayanan	95	persen	1,212,261,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	45	persen	293,864,199	47.54	-	sts	sts	293,864,199	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh
			Penyuluhan kesehatan anak balita					-	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95	persen	600,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	67	persen	117,869,628	70.79	-	sts	sts	117,869,628	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh
			Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1000	Lahir Hidup		-	Lahir Hidup	465495400										-	-	Lahir Hidup	465,495,400	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh	
			Penyuluhan kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Menurunnya Angka Kematian Ibu	130/10 0000	Lahir Hidup		-	Lahir Hidup	1634048912										-	-	Lahir Hidup	1,634,048,912	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh	
			Adukasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Remaja	100	%		48	%	744635592										48	%	744,635,592	48.07	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Ibu Hamil dan Keluarga	Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Ibu Bersalin				74	%	338248300										74	%	338,248,300	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
			Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut	Peningkatan Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia				4	%	4200000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50	persen	500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	26	persen	17,120,000	52.88	-	sts	sts	21,320,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak				30.5	%	26960000												31	%	26,960,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandangan		Menjadi		K			K		K			K					
				Rp.		Vol	Rp.		Vol	Satuan	Rp.	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Rp.		Rp.		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Gizi	75	persen	5,941,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79	persen	810,292,300	104.99	-	79	persen	810,292,300	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Masyarakat yang Mencapai Gizi Baik			45	orang	160,411,025												45	orang	160,411,025	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Menurunnya Prevalensi Balita Kurus (wasting)	8	%	3	Kab/Kota	236,881,500												3	Kab/Kota	236,881,500	sts	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	%tase Bumi KEK yang mendapat PMT	95	%	sts	sts	4,774,286,326												sts	sts	4,774,286,326	sts	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.			50	%	275,220,600												50	%	275,220,600	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat				12	Kab/Kota	7,968,623,030												12	Kab/Kota	7,968,623,030	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang diberikan kepada masyarakat	346	pos	200,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	53	Persen	212,438,028	sts	-	53	Persen	212,438,028	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelayanan kesehatan lingkungan yang diberikan kepada masyarakat	85	persen	753,260,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	61	Persen	1,069,400,928	71.72	-	61	Persen	1,069,400,928	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				700,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	90	Persen	1,054,661,500	tdr	150.67	90	Persen	1,054,661,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			-	-	694,377,500												-	-	694,377,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan dan informasi yang dikembangkan	40	%	-	%	1,811,253,500												-	%	1,811,253,500	-	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cabang %tase masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat			-	-	739,331,788												-	-	739,331,788	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Puskesmas dalam Memanfaatkan Media Promosi Kesehatan			-	-	109,803,200												-	-	109,803,200	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas di Kab/Kota	1095	Orang	-	Orang	485,011,375												-	Orang	485,011,375	-	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Sosialisasi informasi hukum kesehatan kepada masyarakat	Frekuensi sosialisasi hukum kesehatan			-	-	13,757,500												-	-	13,757,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit	Jumlah Petugas Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang terlatih			-	-	254,279,500												-	-	254,279,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Pengembangan sistem informasi rumah sakit	Terkoneksi data Pasien dengan Finger Print Pasien			-	-	5,338,767,500												-	-	5,338,767,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan				64	Kab/Kota	123,946,771												64	Kab/Kota	123,946,771	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Pengembangan dan Pemanfaatan Saluran Media Promosi Kesehatan				84	Saluran Media	1,051,875,800												84	Saluran Media	1,051,875,800	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan	3839	desa	2,175,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3,810	desa	7,488,738,662	99.24	-	3,810	desa	7,488,738,662	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase pelayanan kesehatan haji yang diberikan kepada Calon Jemaah Haji	80	persen	539,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	156	persen	203,849,800	194.81	-	156	persen	203,849,800	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan	40	PKM	500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18	Bulan	107,506,500	sts	-	18	Bulan	107,506,500	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	%tase Penduduk Aceh yang mendapatkan jaminan kesehatan (JKA) dan Asuransi lainnya	100	%	1,108,000,000,000	160	%	1,608,456,760,702	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	100	persen	1,061,252,640,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	62	bulan	1,275,079,241,299	sts	-	sts	sts	2,883,536,002,001	sts	260.06	Dinas Kesehatan Aceh			
									Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Surveilans Kesehatan yang dilaksanakan	2	sampel	1,520,322,100	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	167	-	8,190,699,403	sts	-	167	-	8,190,699,403	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	357	PKM	2,103,020,000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	182	Kab/kota	357,790,270	sts	-	182	Kab/kota	357,790,270	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.			K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.
				Vol	Satuan			Vol	Satuan					Vol	Satuan					Vol	Satuan				Vol	Satuan			K	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28
									Investigasi Lanjutan Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat massal yang ditangani	5	Kasus	1.439.877,900	Investigasi Lanjutan Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	106	-	1.147.593,784	sts	-	106	-	1.147.593,784	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGD)	Jumlah tersedianya sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGD)	23	Kab/kota	2.262.480,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGD)	7	Kab/Kota	1.639.466,091	30.43	-	7	Kab/Kota	1.639.466,091	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan		5	%	290,735,188							5	%	290,735,188	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah Petugas Yang Mampu Melaksanakan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Surveilans	1-256 org. 2-23 Kab/Kota		4.000,000,000	63	%	1.179,393,736			63	%	1.179,393,736	sts	29.48	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pelayanan ambulance terpadu	Cakupan Pelayanan Ambulans Terpadu		17,9	%	2,493,531,451						17,9	%	2,493,531,451	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Pelayanan Krisis Kesehatan dan Pelayanan Ambulans Terpadu (PSC)		11	Kab/Kota	784,248,005						11	Kab/Kota	784,248,005	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan pelayanan patologi klinik	Terlayannya pemeriksaan laboratorium medik	-	-	5,841,988,196						-	-	5,841,988,196	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	terlayannya pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat	119	%	1,573,105,458						119	%	1,573,105,458	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pengujian dan Kalibrasi Alkes		-	-	-						-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				169,420,000				tdr	100.00	-	-	169,420,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Pelaporan Data dan Informasi Kesehatan Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	120	%	220,410,040	persentase data dan informasi yang dipublikasi	23	Kab/kota	169,420,000	6	bulan	169,420,000	sts	100.00	sts	sts	389,830,040	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh				
									Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				4,283,500,000				tdr	34.80	-	-	1,490,766,291	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RSUD dengan status BLUD	17	RSUD	2,239,280,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1	RSUD	640,995,769	5.88	-	1	RSUD	640,995,769	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	357	PKM	2,044,220,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	PKM	862,610,522	-	-	sts	sts	1,905,366,822	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh							
									Penyemprotan/fogging sarung nyamuk	Terlaksananya fogging di 5 Kecamatan Kota Subhulussalam	a. 90 b. 23	a. % b.kab/kota	2,662,000,000	75	%	2,234,621,000			75	%	2,234,621,000	sts	83.95	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Meningkatnya fasilitas sarana & Prasarana Kesehatan	a. 90 b. 23	a. % b.kab/kota	762,844,500	88	%	1,672,309,600			88	%	1,672,309,600	sts	219.22	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Peningkatan cakupan imunisasi	≥80	%	1,200,000,000	sts	sts	414,309,600			sts	sts	414,309,600	sts	34.53	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Meningkatnya pengetahuan petugas dan mampu mendeteksi dini kasus HIV/AIDS - Meningkatnya pengetahuan petugas dan mampu mengevaluasi kegiatan HIV/AIDS - Menurunnya API malaria - Menurunnya Angka kesakitan (IK DBD dan Kematian (CFR)	a. <0,5 b. 23 c. 90% d.55%	Kab/KOTA &%	2,181,872,000	129	%	2,512,818,875			129	%	2,512,818,875	sts	115.17	Dinas Kesehatan Aceh								
									Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemi	Peningkatan kemampuan petugas pengelolaan program Diare, Kusta, Rabies, TR, SPM, Filariasis, Malaria, HIV/AIDS	a. 55% b. 0,65 c. 3 Kab d. 50% e. 91%	Kab/ KOTA &%	3,009,735,850	72.4	%	2,751,522,639			72.4	%	2,751,522,639	sts	91.42	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Imunisasi	1. Peningkatan Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) 2. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	95	%	2,200,000,000	sts	sts	1,248,757,645			sts	sts	1,248,757,645	sts	56.76	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Imunisasi	1. Peningkatan Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) 2. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	95	%	-	25	%	-			25	%	-	26.32	tdr	Dinas Kesehatan Aceh								
									Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Peningkatan Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk Mencegah Terjadinya KLB Di Kab/Kota	80	%	500,000,000	sts	sts	1,077,357,285			sts	sts	1,077,357,285	sts	215.47	Dinas Kesehatan Aceh								

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K		K			K		
				Rp.			Rp.			Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	
		Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Jumlah peserta workshop lintas program dan lintas sektor	a. 55% b. 0,65 c. 10 d. 50% e. 91% f. 0,05%	% & Kab/Kota	600,000,000	sts	sts	704,918,800										sts	sts	704,918,800	sts	117,49	Dinas Kesehatan Aceh		
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Presentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM	80	%	2,050,000,000	144	%	3,039,971,949										144	%	3,039,971,949	179,63	148,29	Dinas Kesehatan Aceh		
		Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat					-	-	-										-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Pencapaian kajian pengembangan terhadap lingkungan sehat				-	-	505,845,000										-	-	505,845,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat				sts	sts	1,015,718,800										sts	sts	1,015,718,800	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat				-	-	179,325,100										-	-	179,325,100	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Pembinaan Pengolahan Limbah dan Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	-	63,855,000										-	-	63,855,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Kesehatan Kerja					-	-	-										-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Pembinaan Lingkungan Sehat (DAK Non Fisik)					-	-	-										-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
																			64,80	15,56		144,52	275,79	Dinas Kesehatan Aceh		
																			R	SR		ST	ST	Dinas Kesehatan Aceh		
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	%tase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	100	%	31,558,159,989	0,00	%	2,685,128,474	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2,437,822,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	14,655,622,014	tdr	601,18	sts	sts	17,340,750,488	sts	54,95	Dinas Kesehatan Aceh	
										Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			837,822,000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	14,378,185,819	tdr	-	-	14,378,185,819	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
										Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas pelayanan Kesehatan	100	persen	837,822,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	109	persen	14,378,185,819	109,10	-	109	persen	14,378,185,819	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh
																			-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
										Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1,600,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	277,436,195	tdr	-	-	277,436,195	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
										Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang lulus uji kompetensi	100	persen	1,600,000,000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	63	persen	277,436,195	63,17	-	63	persen	277,436,195	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh
																			-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh		
		Peningkatan diklat medis/non medis	tersedianya sumber daya kesehatan pelayanan dasar	112	orang	3,450,000,000	sts	sts	1,922,239,757										tdr	tdr	sts	sts	1,922,239,757	sts	55,72	Dinas Kesehatan Aceh
		Penelitian dan pengembangan medis/non medis	Jumlah Kajian yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis dan non medis	237	orang	1,303,225,000	sts	sts	762,888,717										tdr	tdr	sts	sts	762,888,717	sts	58,54	Dinas Kesehatan Aceh
																			86,14	-		#DIV/0!	57,13	Dinas Kesehatan Aceh		
																			T	ERR		#DIV/0!	R	Dinas Kesehatan Aceh		
						9,775,498,061			5,211,968,558	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	%tase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	n/a		1,087,161,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,471,026,522	tdr	135,31			6,682,995,000	tdr	68,36	Dinas Kesehatan Aceh	
										Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			169,360,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	225,340,000	tdr	133,05	-	-	225,340,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh	
										Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang aktif melaksanakan promosi kesehatan	100	persen	169,360,000	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	98	KK	225,340,000	sts	-	98	KK	225,340,000	tdr	tdr	Dinas Kesehatan Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan							Vol	Satuan											Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	2	km/m	1.851,810,500	18.45	%	201,751,838,883	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
										Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang terusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Walib)	100	%																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Dokumen	445,725,497	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.67	%	346,184,317	sts	-	75	%	346,184,317	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Dokumen	55,753,960	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	Dokumen	45,489,833	2,404.50	81.59	48	Dokumen	45,489,833	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	389,971,536	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40	Dokumen	300,694,484	795.00	77.11	40	Dokumen	300,694,484	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Administrasi Keuangan	12	Bulan	69,368,326,818	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.41	%	57,344,411,861	sts	82.67	84	%	57,344,411,861	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	435/14	Orang	55,004,413,436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,740	Orang	44,822,106,800	tdr	81.49	1,740	Orang	44,822,106,800	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	14,363,913,382	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	12,522,305,061	100.00	-	12	Bulan	12,522,305,061	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Administrasi Umum	12	Bulan	3,671,226,540	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70	%	850,750,530	sts	-	70	%	850,750,530	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	65	jenis	72,500,000	31	jenis	34,939,568	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	Lembar	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	Jenis	11,918,713	sts	-	61	Jenis	46,858,281	93.85	64.63				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70	Rekening	1,371,247,990	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219	Jenis/Bulan	190,167,950	sts	-	219	Jenis/Bulan	190,167,950	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	37500	lembar	1,074,923,068	5948000	lembar	544,009,350	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	5	Jenis	351,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161,770	lembar	84,824,650	sts	-	#####	lembar	628,834,000	#####	58.50				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan - bahan dan Literatur untuk menunjang Pelaksanaan Tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	41625	exemplar	155,440,000	16562	exemplar	68,700,000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	395	Orang/Bulan	82,124,536	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156	exemplar	13,260,000	sts	16.15	16,718	Exemplar	81,960,000	40.16	52.73				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10000	M2/Orang/Bulan	585,084,775	Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Perjalanan	550,579,217	sts	94.10	85	Perjalanan	550,579,217	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	Bulan	286,397,788	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54	%	1,454,054,041	sts	507.70	54	%	1,454,054,041	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Informasi Melalui Persuratan	15500	lembar	88,199,710	7400	lembar	30,776,500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	112,615,239	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	665	Lembar	6,000,000	sts	5.33	7,765	Lembar	36,776,500	50.10	41.70				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	340	rekening	5,231,750,000	194	rekening	2,640,783,173	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	99,620,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Rekening	886,294,881	sts	889.67	266	Rekening	3,527,078,054	78.24	67.42				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	100	%	257,312,500	21	Jenis/Bulan	339,166,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	14,743,496	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Jenis/Bulan	306,148,150	sts	2,076.50	81	Jenis/Bulan	645,314,150	sts	250.79				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
				K		K		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K		K		K		K		K												
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.			Rp.		Rp.		Rp.		Rp.			
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya Bahan bacaan/surat kabar	12	Bulan	13,560,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44	M2/Bulan	255,611,010	sts	1,885.04	44	M2/Bulan	255,611,010	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya makanan dan minuman rapat	12	Bulan	188,847,777	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahah Daerah	76	%	3,896,411,266	sts	2,063.26	76	%	3,896,411,266	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
								Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhiya Perjalanan Dinas Kehuar Daerah	12	Bulan	929,488,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174	Unit/Bulan	671,835,157	sts	72.28	174	Unit/Bulan	671,835,157	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Bulan	606,408,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13	M2/Gedung	3,224,576,109	sts	531.75	13	M2/Gedung	3,224,576,109	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	58	Unit/Bulan	1,419,545,740		-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	1468	Unit	1,154,200,000	290	Unit	323,320,922										290	Unit	323,320,922	19.75	28.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	212	Jenis	1,109,536,140	439	Jenis	594,254,028										439	Jenis	594,254,028	207.08	53.56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	85	Item/komponen	2,553,103,360	25	Item/komponen	1,047,953,038										25	Item/komponen	1,047,953,038	29.41	41.05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	18980/5400	Kotak/ Bungkus	654,460,000	9,597	Kotak/ Bungkus	289,445,000										9,597	Kotak/ Bungkus	289,445,000	tdr	44.23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	137	Kali perjalanan	4,458,360,000	89	Kali perjalanan	1,215,229,657										89	Kali perjalanan	1,215,229,657	64.96	27.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	560	OB	24,867,621,814	269	OB	10,706,415,380										269	OB	10,706,415,380	48.04	43.05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	146/ 6/ 124	roda 4/ roda 6/ roda 2	6,027,910,000	#VALUE!	4/ roda 6/ t	1,685,934,389										#VALUE!	roda 4/ roda 6/ roda 2	1,685,934,389	tdr	27.97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	44	unit gedung	6,315,400,000	33	unit gedung	3,106,492,979										33	unit gedung	3,106,492,979	75.00	49.19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	882	stel	673,132,700	2,038	stel	941,650,000										2,038	stel	941,650,000	231.07	139.89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
		Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah			1,851,810,500	70	Peserta	201,751,838,883										70	Peserta	201,751,838,883	tdr	#####	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
													Rata-rata capaian kinerja (%)				1,099.83	403.08					#####	742.80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH									
													Predikat kinerja				ST	ST					ST	ST	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH									
								Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap	93	%	1,108,309,891,920	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	852,875,787,027	sts	76.95	-	-	852,875,787,027	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										
								Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Bertambahnya Kondisi Mantap Jalan	149,6	Km	1,108,309,891,920	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	66	%	852,875,787,027	sts	-	66	%	852,875,787,027	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH										

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan		K
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Tersedianya Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seluruh Pelaksanaan Kegiatan	5	laporan	7,194,116,962	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	2	Dokumen	50,301,405	sts	-	2	Dokumen	50,301,405	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
									Pembebasan Lahan / Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Tanah untuk Jalan	3	Ruas Jalan	55,400,000,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	3	Ruas Jalan	9,222,177,328	100.00	-	3	Ruas Jalan	9,222,177,328	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
									Survey Kondisi Jalan/jembatan	Terpenuhinya data kondisi jalan dan jembatan provinsi	81	Ruas Jalan	315,806,986	Survey Kondisi Jalan/jembatan	81	Ruas Jalan	70,525,321	100.00	-	81	Ruas Jalan	70,525,321	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
									Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan	100	persen	1,008,997,692,296	Rekonstruksi Jalan	64	persen	759,524,527,777	63.59	-	64	persen	759,524,527,777	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
									Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya pemeliharaan aksesibilitas jalan untuk Masyarakat	1	ruas jalan	1,000,000,000	Rehabilitasi Jalan	1	Paket	910,000,367	sts	-	1	Paket	910,000,367	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pemeliharaan Berkala Jalan	terpeliharanya kondisi jalan baik	24.38	Km	77,975,378,664	20	Km	73,467,014,765	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Kondisi Jalan Baik		km	156,196,993	Pemeliharaan Berkala Jalan	29	Km	14,974,912,138	tdr	-	49	Km	88,441,926,903	200.04	113.42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Rutin Jalan	terpeliharanya kondisi jalan baik	1586.15	Km	10,000,000,000	1,586	Km	15,600,275,014	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan jalan yang dipelihara	81	ruas	9,946,078,683	Pemeliharaan Rutin Jalan	131	Km	8,874,667,734	sts	-	1,718	Km	24,474,942,748	108.29	244.75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan jembatan secara efektif	1651.00	Meter	340,900,000,000	2,480	Meter	154,653,815,940	Pembangunan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan jembatan secara efektif	400	meter	11,200,000,000	Pembangunan Jembatan	24	Meter	27,131,403,985	6.05	-	2,504	Meter	181,785,219,925	151.68	53.33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Pananganan fungsional jembatan	#####	meter	10,000,000,000	15,682	meter	8,899,905,288	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah ruas jalan jembatan yang dipelihara	81	Ruas	6,600,000,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	103	meter	4,308,439,700	sts	65.28	15,785	meter	13,208,344,988	100.66	132.08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
									Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	Tersedianya Penanganan Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat Ruas Jalan Provinsi	81	Ruas	7,500,000,000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	81	Ruas	509,680,000	100.00	6.80	81	Ruas	509,680,000	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
																										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
																											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemenuhan Operasioal penyelenggaraan jalan	terlaksananya penyelenggaraan jalan	3.00	Tahun	47,140,000,000	-	0	-																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Program Perencanaan Umum dan Bahan Perencanaan Teknis	12.00	Dokumen perencanaan	13,047,215,190	5	men perencanaan	3,924,276,341												5	Dokumen perencanaan	3,924,276,341	41.67	30.08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jalan	Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional	15.98	Km	142,064,570,026	26	Km	120,216,626,796												26	Km	120,216,626,796	161.14	84.62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan	Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional	150.62	Km	458,002,913,709	114	Km	391,430,748,497												114	Km	391,430,748,497	75.69	85.46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pelebaran Jalan (Km)	Panjang pembangunan jalan efektif dan fungsional	5.10	Km	15,300,000,000	4	Km	11,277,144,828												4	Km	11,277,144,828	78.43	73.71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pelebaran Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan jembatan secara efektif	15.00	Meter	3,000,000,000	-	0	-																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Tersedianya bahan laporan pelaksanaan pengawasan teknis	34.00	dokumen	34,672,482,314	22	dokumen	17,345,322,943												22	dokumen	17,345,322,943	64.71	50.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	tersedianya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan seluruh pelaksanaan kegiatan	20.00	laporan	2,629,918,000	9	laporan	1,215,300,477										9	laporan	1,215,300,477	45.00	46.21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Tersedianya Program Perencanaan Umum dan Bahan Perencanaan Tehnis	2.00	dokumen	402,822,000	2	dokumen	186,397,380										2	dokumen	186,397,380	100.00	46.27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pengadaan Alat Survey Jalan dan Lalu Lintas						0	-														tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Survey IRMS Jalan Provinsi	Tersedianya data kondisi jalan provinsi	3.00	Laporan	600,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Survey BMS Jembatan di Jalan Provinsi	Tersedianya data kondisi jembatan provinsi	3.00	Laporan	900,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Kegiatan Inventarisasi Jembatan Gantung dan Kabel Penyeberangan	Tersedianya data jembatan gantung dan kabel penyeberangan	1.00	Dokumen	200,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Kegiatan Survey Perubahan fungsi dan Status Jalan Provinsi	Tersedianya dokumen survey	1.00	Dokumen	150,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan alat-alat berat	tersedianya peralatan	5.00	item	27,576,180,000	107	item	24,215,302,320										107	item	24,215,302,320	#####	87.81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pengadaan Excavator	tersedianya peralatan	1.00	unit	2,015,200,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Excavator mini	tersedianya peralatan	1.00	unit	880,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Backho Loader	tersedianya peralatan	1.00	unit	1,650,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Vibro Roller	tersedianya peralatan	1.00	unit	1,320,000,000		0	-														sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Unit Penilik Jalan (UPJ)	Tersedianya Unit Penilik Jalan (UPJ)	10.00		5,000,000,000		0	-														-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Jalan dan Jembatan	Tersedianya alat-alat laboratorium	1.00		5,000,000,000		0	-														-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perengklapan Bengkel alat-alat berat	Terpeliharanya peralatan dan perengklapan yang baik dan siap pakai	88.00	Unit	15,921,454,314	33	Unit	3,433,078,866										33	Unit	3,433,078,866	37.50	21.56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Penataan, Pembongkaran, Pemasangan dan Pemasangan Jembatan Rangka Bailey	Terlaksananya pembongkaran, pengangkutan dan pemasangan jembatan bailey	18.00	unit	9,000,000,000	3	unit	592,666,575										3	unit	592,666,575	16.67	6.59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Terpeliharanya peralatan dan perbekalan yang baik dan siap pakai	244.00	item	4,258,520,000	98	item	1,723,313,600										98	item	1,723,313,600	40.16	40.47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Study LARAP Ruas Jalan Geumpang-Pameu		100	%	1,533,416,048		%	1,533,416,048										100	%	1,533,416,048	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Study LARAP Ruas Jalan Jantho - Reumata		100	%	1,018,186,686		%	1,018,186,686										100	%	1,018,186,686	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K			K			Sandi			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.			
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program /			Urusan/Program/Kegiatan/			Rp.			Rp.			Rp.			Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		K	Rp.
		Pembangunan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014) (Terobos)	Terlaksananya Pembangunan jalan																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		16.41	km	49,230,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				1,169,059,343	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Peningkatan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		11.30	Km	67,800,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				1,298,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		5.30	Km	15,900,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				403,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Peningkatan Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya (P. 013.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0	21,485,337,376																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		11.30	Km	67,800,000,000	1	Km	21,590,726,155												1	Km	21,590,726,155	8.05	31.84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				1,566,500,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Peningkatan Jalan Krueang Raya Batas Pidie (P.015.11)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0	5,375,166,700																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		3.60	Km	21,000,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan		0.00		571,900,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Krueang Raya-Batas Pidie (P.015.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	17,070,054,776																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		2.00		6,000,000,000	99	%	6,705,899,741												99	%	6,705,899,741	sts	111.76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan		0.00		185,000,000	-	0	-																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Tanah Terusan T. Nyak Makam-Elak II	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan				-	0	31,566,561,765																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
				5			6			7			8			9			10			11			12		13
		- Fisik Tanah		#####	m2	156,802,000,000	99	%	18,796,897,108												99	%	18,796,897,108	sts	11.99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Biaya Pendukung		0.00		4,330,109,601	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pengadaan Tanah Terusan Ruas Jalan Mr. Mohd. Hasan	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan				-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik Tanah		#####		14,075,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Biaya Pendukung				422,950,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pelebaran Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang (P. 010.13)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		3.00		12,000,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				317,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Blang Bintang-Krueng Raya (P.011)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		1.80		5,400,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				199,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pelebaran Jalan Blang Bintang-Krueng Raya (P.011)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		3.00		12,000,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				244,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pelebaran Jalan T. Iskandar (Banda Aceh-Batas Aceh Besar)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		3.32		13,280,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				345,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembebasan Tanah Ruas Jalan T. Iskandar (Banda Aceh - Batas Aceh Besar) (P.010.12.K)					-	0	-											-	-	-	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	%	10,054,824,385											-	%	10,054,824,385	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.							
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28
		- Fisik		5.40		16,200,000,000	-	0																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				459,000,000	-	0																			tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pemeliharaan Berkala Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P.022.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																			tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		3.00		9,000,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				295,000,000	-	0																			tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pelebaran Jalan Sp. Bili Aron-Taupin Raya (P.023)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0																			tdr	tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		1.15		4,600,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				137,000,000	-	0																			tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pemeliharaan Berkala Jalan Geumpang-Batas Aceh Barat (P.024.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																			tdr	tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.00		6,000,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				185,000,000	-	0																			tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Turu-Lutung-Geumpang (P.025)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																			tdr	tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		4.50		13,500,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				404,000,000	-	0																			tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pelebaran Jalan Lingkar Kota Sigi (P.016.11.K)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0																			tdr	tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.07		8,280,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				236,000,000	-	0																			tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pelebaran Jalan Lingkar Kota Sigi (P.016.12.K)	Terlaksananya pelebaran jalan				-	0																			tdr	tdr	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.89		11,560,000,000	-	0																				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandiingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		- Pengawasan			306,000,000	-	0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Trieng Gadeng-Batas Bireuen (P.026.11)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0																		tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.20	13,200,000,000	-	0																		-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			344,000,000	-	0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Trieng Gadeng-Batas Bireuen (P.026.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0																		tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		1.70	5,100,000,000	-	0																		-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			162,000,000	-	0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Meureudeu-Babah Jurong (P.028)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	sts																		tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		0.40	1,200,000,000	100	%	10,869,564,656																	100	%	10,869,564,656	sts	905.80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan			52,000,000	-	0																			tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Geukeuh-Batas Bener Merah (P.029.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0																			tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		2.40	7,200,000,000	100	%	4,882,730,618																	100	%	4,882,730,618	sts	67.82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan			237,000,000	-	0																			tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Lhoksukon-Cot Girek (P.030)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	15,389,046,000																		tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		4.60	13,800,000,000	-	0																			-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			411,000,000	-	0																			tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Peningkatan Jalan Lhoksukon - Cot Girek (P.030)				11	%	1,755,641,133																	11	%	1,755,641,133	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Cunda-Lhoksumawe (P.034.11.K)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	2,868,031,000																			tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		1.70	5,100,000,000	-	0																			-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K			K			Sandiingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.							
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			K	Rp.	Rp.			K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Target	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Target	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.			
		-Pengawasan			162,000,000	-	0																									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0			45,770,207,000																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		31.00	Km	186,000,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan				3,598,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 1)					1	%			307,396,155																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 2)					1	%			277,636,155																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3)					1	%			287,806,155																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		1.50	Km	4,500,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan				149,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				1	%			40,926,675,787																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		10.10	Km	60,600,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan				1,444,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		0.80	Km	2,400,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan				92,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Blangkejeren-Tongra-Batas Aceh Barat Daya (P.038.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				1	%			72,685,765,567																					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		12.95		77,700,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan				1,638,000,000	-	0																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandungan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			K	Rp.	Rp.			K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.				
		Pemeliharaan Berkala Jalan Blangkejeren-Tongra-Batas Aceh Barat Daya (P.038.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		7.50	Km	22,500,000,000	-	0	-																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				531,000,000	-	0	-																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Peningkatan Jalan Batas Gayo Lues-Babah Roet (P.038.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				2	%	37,313,829,760												2	%	37,313,829,760	tdr	tdr			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		1.00		6,000,000,000	-	0	-												-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				220,000,000	-	0	-												-	-	-	tdr	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Gayo Lues-Babah Roet (P.038.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		0.60		1,800,000,000	-	0	-												-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				73,000,000	-	0	-												-	-	-	tdr	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Peningkatan jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen-Batas Kota Subulussalam (P.042.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				200	%	17,701,411,889												200	%	17,701,411,889	tdr	tdr				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		11.78	Km	70,680,000,000	-	0	-												-	-	-	sts	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				1,628,000,000	-	0	-												-	-	-	tdr	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen-Batas Kota Subulussalam (P.042.11)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		5.00	Km	15,000,000,000	-	0	-												-	-	-	sts	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				436,000,000	-	0	-												-	-	-	tdr	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Peningkatan Jalan Batas Aceh Tenggara-Gelombang (P.042.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0	4,683,073,935																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		0.99		5,940,000,000	-	0	-												-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				183,000,000	-	0	-												-	-	-	tdr	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Tenggara-Gelombang (P.042.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
		- Fisik		0.40		1,200,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				52,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan-Rundeng (P.043.12)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		8.30	Km	49,800,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				1,243,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan-Rundeng (P.043.12)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	6,753,577,400													6,753,577,400	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		0.50	Km	1,500,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				63,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Subulussalam-Rundeng (P.044)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				200	%	10,910,851,646												200	%	10,910,851,646	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		3.50		10,500,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				314,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Gunung Kapur-Trumon (P.045.11)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		1.51		9,060,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				251,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Kapur-Trumon (P.045.11)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0	3,193,075,000													3,193,075,000	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		0.50		1,500,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				63,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Trumon-Batas Singkil (P.045.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				2	%	19,726,850,537												2	%	19,726,850,537	tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		22.86	Km	137,160,000,000	-	0																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandungan		Menjadi		K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program /		Urusan/Bidang		Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		Rp.			
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
		-Pegawasan			2,793,000,000	-	0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Trumon-Pulo Paya (P.046)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	2,373,483,000													2,373,483,000			tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		0.30	900,000,000	-	0	-													-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			41,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti (P.045.13)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		3.63	21,780,000,000	1	%	10,576,426,343													1	%	10,576,426,343	sts	48.56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			518,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti (P.045.13)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		1.50	4,500,000,000	-	0	-													-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			149,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Lipat Kajang - Telaga Bakti (P.047)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		1.00	3,000,000,000	-	0	-													-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			110,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Pulau Balai - Pulau Ujung Batu (P.049.11)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0	2,320,832,000															2,320,832,000	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		2.71	16,260,000,000	-	0	-													-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			410,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Peningkatan Jalan Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung (P.049.12)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0	2,297,364,000															2,297,364,000	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		5.70	34,200,000,000	-	0	-													-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		-Pegawasan			854,000,000	-	0	-													-	-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target			Menjadi			Target			Target		Target			Target					
				K			K			Indikator Kinerja Capaian Program /			Alokasi Anggaran			Nama Urusan/Bidang			K			K		K			K		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolak Ukur	Vol	Satuan	(Rp.)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
		Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		4.40		26,400,000,000	1	%			9,068,653,425										1	%			9,068,653,425	sts	34.35		
		- Pengawasan				602,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.30		6,900,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		- Pengawasan				206,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh utara-Bandara Rembele (P.029.12)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.90		8,700,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		- Pengawasan				286,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Peningkatan Jalan Bandara Rembele-Batas Aceh Tengah (P.029.13)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-					11,889,653,500															11,889,653,500	tdr	-	
		- Fisik		2.37		14,220,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		- Pengawasan				366,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (P.031)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	101	%			32,330,933,155											101	%			32,330,933,155	tdr	-	
		- Fisik		10.18	Km	61,080,000,000	-	0			-										-	-			-	sts	-		
		- Pengawasan				1,431,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (P.031)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-																				-	tdr	-	
		- Fisik		3.00	Km	9,000,000,000	-	0			-										-	-			-	sts	-		
		- Pengawasan				251,000,000	-	0			-										-	-			-	tdr	-		
		Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Merah) (P.033)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-																				-	tdr	-	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandiangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25
		- Fisik		2.00		6,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				185,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Takengon-Bintang (P.040)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0																7,548,164,300	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		4.00		24,000,000,000	-	0																		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				630,000,000	-	0																		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Takengon-Bintang (P.040)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																		tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		1.50		4,500,000,000	-	0																		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				149,000,000	-	0																		tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Peningkatan Jl. Batas Aceh Besar -Lamno (P.013.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0																	24,386,710,000	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		4.50	Km	27,000,000,000	-	0																		sts	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				753,000,000	-	0																		tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P.024.12)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan				-	0																		14,716,601,554	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		1.60		9,600,000,000	-	0																			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				262,000,000	-	0																			tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P.024.12)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																			tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		5.40	Km	16,200,000,000	-	0																		sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				464,000,000	-	0																			tdr	-	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		Pemeliharaan Berkala Jalan Pribae - Kuala Bee - Sp. Suak Timah (P.053)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan				-	0																			tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		1.80		5,400,000,000	-	0																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		K	Rp.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		- Pengawasan			170,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Kuala Tuha - Lamie (P.051)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		2.00	12,000,000,000	100	%	5,506,291,048												100	%	5,506,291,048	sts	45.89			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			317,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Kuala Tuha - Lamie (P.051)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	13,142,148,466																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		6.10	Km	18,300,000,000	-	0	-																sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			508,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Sinabang - Sibigo (P.056.11)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	2	%	9,611,283,757																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		12.04	Km	72,240,000,000	-	0	-																sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			1,677,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jalan Nasreube - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya Pembangunan jalan			-	0	15,121,386,696																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		4.00		12,000,000,000	-	0	-																-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			362,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Peningkatan Jalan Nasreube - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif peningkatan jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		72.42	Km	434,520,000,000	1	%	19,606,025,155																1	%	19,606,025,155	sts	4.51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Pengawasan			7,789,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Nasreube - Lewak - Sibigo (P.056.12)(12 Ruas Prioritas)	Terlaksananya efektif pemeliharaan berkala jalan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		5.70	Km	17,100,000,000	-	0	-																sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan			457,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			K	Rp.	Rp.			K	Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Tolak Ukur	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.		
		Pembangunan Jembatan Motodam I Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	100	sts	9,761,330,070											100	sts	9,761,330,070	sts	97.61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Motodam II Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	100	sts	8,729,729,306											100	sts	8,729,729,306	sts	87.30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Blang Rheu Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Jamboe Seng Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		26.00		5,200,000,000	-	0	-											-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				165,200,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Krueng Cot Empee Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	100	%	9,743,292,960											100	%	9,743,292,960	sts	97.43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Tuwi Keube Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	100	%	8,814,765,312											100	%	8,814,765,312	sts	88.15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		Pembangunan Jembatan Krueng Sabit Ruas Jalan Jantho-Lamno (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				
		- Pengawasan				270,000,000	-	0	-											-	-	-	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandungan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				270,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Lempu Ruas Jalan Sp. Turu Lutung-Geumpang	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		95.00		19,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				465,800,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Krueng Lhok Tungkok Ruas Jalan Sp. Turu Lutung-Geumpang	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		50.00		10,000,000,000	100	%	15,274,465,121												100	%	15,274,465,121	sts	152.74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				270,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Gerueuk Ruas Jalan Sigli-Kembang Tanjung-Teupin Raya	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		12.00		2,400,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				92,192,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Meunasah Mee Ruas Jalan Trieng Gadeng-Batas Bireuen	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		15.00		3,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				110,280,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Samarklang Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		120.00		24,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				558,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Wih Kanis Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		20.80		4,160,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandiangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		- Pengawasan			140,000,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Alur Trap Ruas Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		22.60	4,520,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			149,000,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Seuma III Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		40.00	5,000,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			160,000,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Bulu Seuma IV Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		30.00	4,000,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			137,200,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Bulu Seuma V Ruas Jalan Trumon-Batas Singkil (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		50.00	6,000,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			185,500,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak Sibigo (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		50.00	7,000,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			208,800,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Nasrehe-Lewak Sibigo (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		14.00	3,000,000,000	-	0																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan			110,280,000	-	0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Target	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
		Lanjutan Pembangunan Jembatan Kilangan Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Baki (P.045.13) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		300.00		15,000,000,000	100	%													100	%		14,953,819,745	sts	99.69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				384,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Kayu Menang Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Baki (P.045.13) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		300.00		60,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				1,171,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Pribu-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan																							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Fisik		7.00		70,000,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				1,514,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Cot Darat Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		12.80		2,560,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				96,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Cot Mejid Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		12.80		2,560,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				96,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Cot Meurong 2 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		10.80		2,160,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		- Pengawasan				84,000,000	-	0																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH			
		Pembangunan Jembatan Cot Meurong 3 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan																								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandi			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		- Fisik		11.80		2,360,000,000	-	0																				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				90,000,000	-	0																		tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Suak Trieng 1 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																			tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		11.80		2,360,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				90,000,000	-	0																			tdr		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Suak Trieng 2 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																				tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		13.80		2,760,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				102,000,000	-	0																			tdr		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Suak Trieng 3 Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																				tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		11.80		2,360,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				90,000,000	-	0																			tdr		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Gle Siblah Ruas Jalan Pribue-Kuala Bee-Sp. Suak Timah (P. 053)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																				tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		10.80		2,160,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				84,000,000	-	0																			tdr		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Krueng Luas 1 Ruas Jalan Krueng Luas-Batas Kota Subulussalam (P. 043.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																				tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		11.80		2,360,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Pengawasan				90,000,000	-	0																			tdr		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		Pembangunan Jembatan Krueng Luas 2 Ruas Jalan Krueng Luas-Batas Kota Subulussalam (P. 043.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																				tdr		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		11.80		2,360,000,000	-	0																					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Rp.			Rp.			Target			Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rp.			K	Rp.	Rp.			K	Rp.	
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
		- Pengawasan			90,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Alue Titbok Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		10.00	2,000,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			80,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Sarang Jala 1 Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		7.00	1,400,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			59,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Sarang Jala 2 Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		10.00	2,000,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			80,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Alue Pakam Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		15.00	3,000,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			110,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Alue Putoh Harapan Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		5.00	1,000,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			44,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Alue Diek le Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		10.00	2,000,000,000	-	0	-																	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan			80,000,000	-	0	-																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K			K			Sandingan		Menjadi		K			K	Rp.	K			K	Rp.					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Pembangunan Jembatan Alue Ekan Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		13.00		2,600,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				98,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Gumpa Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																	tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH	
		- Fisik		12.00		2,400,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				92,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Gajah Ruas Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P. 035.11) (12 Ruas Prioritas)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		15.00		3,000,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				110,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Cot Bak Cuh Ruas Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang (P.010.13)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		7.50		1,500,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				63,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Cot Peurabeu Ruas Jalan Batas Banda Aceh-Blang Bintang (P.010.13)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		6.80		1,360,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				57,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Swi Simpang 1 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH
		- Fisik		12.80		2,560,000,000		0																	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				96,000,000		0																tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Ujung Rimba Crot 1 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-		0																		tdr	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandiangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		- Fisik		5.80		1,160,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				50,000,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Ujung Rimba Crot 2 Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		5.00		1,000,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				44,500,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Meugit Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		7.60		1,520,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				63,000,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Blang Kupa Ruas Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		8.80		1,760,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				71,000,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Leuhan Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P. 024.12)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		24.50		4,900,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				157,000,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Gampa Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P. 024.12)	Terbangunnya efektif jembatan			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		8.00		1,600,000,000	-	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Pengawasan				66,000,000	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		Pembangunan Jembatan Gantung	Terbangunnya efektif jembatan gantung			-	-	0																tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		
		- Fisik		9.00	unit	56,600,000,000	-	0																sts	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan						Vol	Satuan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD				0														tdr	tdr	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
		sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan perencanaan tata ruang	100	%	325,664,314		0												sts	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
76	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat ketataan terhadap RTRW			356,897,250	48.55	%	395,282,089													DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
		Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	tersedianya data pengendalian pemanfaatan ruang	100	%	356,897,250			395,282,089													DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
																						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG ACEH					
		Dinas Pengairan Aceh				4,452,104,731,064			1,505,988,016,662	Dinas Pengairan Aceh			289,341,867,271	DINAS PENGAIRAN ACEH			272,578,686,231			94.21		Dinas Pengairan Aceh					
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				4,452,104,731,064			1,505,988,016,662	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			289,341,867,271	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			272,578,686,231			94.21		Dinas Pengairan Aceh					
		BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM				4,452,104,731,064			1,505,988,016,662	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			289,341,867,271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			272,578,686,231			94.21		Dinas Pengairan Aceh					
						118,551,358,318			48,027,816,748	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			46,332,287,578	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			39,463,978,573			80	%	39,463,978,573	Dinas Pengairan Aceh				
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	76,964,999,030	99.02	%	32,794,240,545	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%											Dinas Pengairan Aceh				
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	28,021,867,711	94.75	%	10,954,946,105	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur													Dinas Pengairan Aceh				
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	3,179,404,735	100.00	%	1,116,294,186	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai													Dinas Pengairan Aceh				
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	10,385,086,842	54.55	%	3,162,335,912	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi													Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				
																							Dinas Pengairan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Target			Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
		Pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambeso	Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambeso	6,00	Lap	2,368,984,400	6	Lap	1,155,936,115									6	Lap	1,155,936,115	100,00	48,79	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	1	tahun	1,597,044,120	1	tahun	493,355,445									1	tahun	493,355,445	100,00	30,89	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen	Panjang jaringan irigasi yang dibangun / jumlah dokumen yang direncanakan	7,50	Kn	56,144,391,500	1,542	Ha/ Laporan	48,582,339,900									1,542	Ha/ Laporan	48,582,339,900	sts	86,53	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0,90	Kn	5,150,000,000	-	Dok	146,973,640									-	Dok	146,973,640	sts	2,85	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0,98	Kn	5,592,663,978	-	Dok	99,052,800									-	Dok	99,052,800	sts	1,77	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lhok Nasa Kab. Pidie	Jumlah Dokumen yang direncanakan	2,50	Kn	16,561,922,200	-	dok	168,702,160									-	dok	168,702,160	sts	1,02	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0,90	Kn	5,956,265,300	-	Dok	104,374,600									-	Dok	104,374,600	sts	1,75	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1,00	Kn	3,561,265,300	-	Dok	147,262,500									-	Dok	147,262,500	sts	4,14	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen	Jumlah bendung yang dibangun / jumlah dokumen pengawasan / Panjang jaringan irigasi yang dibangun	5,00	Kn	35,869,481,296	-	Ha/ Dok	27,573,543,136									-	Ha/ Dok	27,573,543,136	sts	76,87	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue	Jumlah bendung yang dibangun / jumlah dokumen pengawasan	1,00	Unit	69,173,261,406	-	Ha/ Laporan	-									-	Ha/ Laporan	-	sts	-	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cubo/Triengadeng Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	3,00	Kn	16,087,418,900	1,400	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	949,776,973									1,400	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	949,776,973	sts	5,90	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	1,17	Kn	6,711,437,330	1,566	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	862,862,477									1,566	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	862,862,477	sts	12,86	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0,53	Kn	3,234,399,307	1,551	Ha/ Laporan	325,257,138									1,551	Ha/ Laporan	325,257,138	sts	10,06	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	1,14	Kn	6,514,562,640	539	Ha/ Laporan	15,813,861,920									539	Ha/ Laporan	15,813,861,920	sts	242,75	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	0,60	Kn	3,733,765,300	750	Ha/ Ha/ Lap	17,835,109,729									750	Ha/ Ha/ Lap	17,835,109,729	sts	477,67	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1,20	Kn	8,441,788,400	658	Ha	493,540,882									658	Ha	493,540,882	sts	5,85	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pseudada Kab. Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dibangun Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0,60	Kn	4,493,305,300	607	Ha/ Ha/ Lap	412,990,253									607	Ha/ Ha/ Lap	412,990,253	sts	9,19	Dinas Pengairan Aceh		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1,00	Kn	5,741,305,300	553	Ha	326,114,553									553	Ha	326,114,553	sts	5,68	Dinas Pengairan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandangan			Menjadi			K			K		K			K					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamun Kab. Aceh Utara	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1.00	Km	5,471,265,300	140	Ha	205,961,413											140	Ha	205,961,413	sts	3.76	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1.60	Km	8,746,345,300	542	Ha	373,734,631											542	Ha	373,734,631	sts	4.27	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab Panjang jaringan irigasi yang direhab	1.00	Km	5,391,265,300	151	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	49,009,580											151	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	49,009,580	sts	0.91	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	-			-	Ha/ Laporan	347,874,952											-	Ha/ Laporan	347,874,952	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueang Tuan Kab. Aceh Utara	Luas area yang dibebaskan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	2.84	Km	15,206,653,300	-	Ha/ Km	560,642,994											-	Ha/ Km	560,642,994	sts	3.69	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	-			-	Ha/ Laporan	427,373,658											-	Ha/ Laporan	427,373,658	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesi Kab. Aceh Jaya	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.80	Km	9,697,815,300	426	Ha	159,828,969											426	Ha	159,828,969	sts	1.65	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.60	Km	8,686,288,100	195	Ha	224,772,355											195	Ha	224,772,355	sts	2.59	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	1.10	Km	11,373,641,400	840	Ha	3,326,543,434											840	Ha	3,326,543,434	sts	29.25	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	1.90	Km	15,708,758,100	292	Ha	402,469,886											292	Ha	402,469,886	sts	2.56	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gumung Pudung Kab. Aceh Selatan	Jumlah bendung yang dibangun Jumlah dokumen pengawasan Luas area yang dibebaskan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				180	Ha/ Ha/ Ha/ Lap	522,582,910											180	Ha/ Ha/ Ha/ Lap	522,582,910	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	-			-	Ha/ Laporan	58,409,263											-	Ha/ Laporan	58,409,263	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paya Dapur Kab. Aceh Selatan	Jumlah bendung yang dibangun Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				763	Ha/ Ha/ Lap	500,518,334											763	Ha/ Ha/ Lap	500,518,334	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan	0.30	Km	1,766,565,300	1	lap	23,757,386											1	lap	23,757,386	sts	1.34	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				248	Ha	344,696,398											248	Ha	344,696,398	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.30	Km	2,070,465,300	597.97	Ha/ Laporan	426,335,883											597.97	Ha/ Laporan	426,335,883	sts	20.59	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.12	Km	1,032,126,300	387.84	Ha/ Laporan	205,492,907											387.84	Ha/ Laporan	205,492,907	sts	19.91	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weh Sejuk Kab. Gayo Lues	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.70	Km	7,751,265,300	1621.19	Ha/ Laporan	400,446,143											1621.19	Ha/ Laporan	400,446,143	sts	5.17	Dinas Pengairan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Sandangan			Menjadi			K			K		K			K		
				Rp.			Rp.			Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			K		K			K					
				Rp.			Rp.									Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	Vol	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Di Weh Tilis Kab. Gayo Lues	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	0.60	Kn	6,731,265,300	945.9	Ha/ Ha/ Lap	419,874,711											945.9	Ha/ Ha/ Lap	419,874,711	sts	6.24	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I.R Keteungga Kab. Aceh Timur/ Langsa	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				945.9	Ha/ Laporan	388,188,578											945.9	Ha/ Laporan	388,188,578	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Teunom - Lambesoi	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang pengaman pantal yang dibangun Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun	10.00	Kn	96,817,568,400	4	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	39,547,470,974											4	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	39,547,470,974	sts	40.85	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Pase - Peusangan	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang pengaman pantal yang dibangun Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun	9.50	Kn	94,177,668,400	-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	20,341,431,474											-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	20,341,431,474	sts	21.60	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Tamiang - Langsa	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun	2.00	Kn	22,554,768,400	-	Ha/ Lap/ Lap	1,434,926,768											-	Ha/ Lap/ Lap	1,434,926,768	sts	6.36	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Baru- Kluet	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang pengaman pantal yang dibangun Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun	8	Kn	66,649,328,400	-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	18,521,397,274											-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/ Lap	18,521,397,274	sts	27.79	Dinas Pengairan Aceh				
		Penyediaan Prasarana Air Baku	Luas area yang dibebaskan	26.26	Ha	12,688,716,220	-	Ha	11,639,232,200											-	Ha	11,639,232,200	-	91.73	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Tampung Air	Jumlah embung yang dibangun				49	unit	293,297,449											49	unit	293,297,449	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Aceh	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan SDA Provinsi	10.00	Kegiatan	3,467,235,000	0	%	307,202,477											0	%	307,202,477	sts	8.86	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengelolaan SDA WS. Pase- Peusangan	Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA WS. Pase - Peusangan	6.00	Lap	2,368,984,400	3	lap	849,311,517											3	lap	849,311,517	50.00	35.85	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengelolaan SDA WS. Tamiang- Langsa	Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA WS. Tamiang- Langsa	6.00	Lap	2,368,984,400	3	lap	993,918,894											3	lap	993,918,894	50.00	41.96	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengelolaan SDA WS. Baru- Kluet	Tersedianya Laporan Kegiatan dan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA WS. Baru - Kluet	6.00	Lap	2,368,984,400	3	lap	737,502,835											3	lap	737,502,835	50.00	31.13	Dinas Pengairan Aceh				
		Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Kelembagaan	4.00	Lap	10,000,000,000	88	%	8,955,186,286											88	%	8,955,186,286	sts	89.55	Dinas Pengairan Aceh				
		Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA	Terlaksananya kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA	11.00	Dok	200,000,000	3	keg	140,202,182											3	keg	140,202,182	sts	70.10	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terkelolanya Data Informasi dan Komunikasi Publik	2.00	Layanan	203,100,541	2	layanan	197,585,835											2	layanan	197,585,835	100.00	97.28	Dinas Pengairan Aceh				
		Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan, Rawa dan Tambak (Migas Kabupaten/Kota)	Watasah peningkatan Jaringan Irigasi yang dibangun/ditingkatkan				-	-	5,806,482,400											-	-	5,806,482,400	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Di Lhok Naga Kab. Pidie	Jumlah dokumen yang direncanakan				1	dok	843,510,800											1	dok	843,510,800	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandangan		Menjadi		K			K		K			K		
				Rp.			Rp.			Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Target		Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen	Jumlah bendung yang dibangun Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan				2	Ha/ Laporan	1,563,743,500									2	Ha/ Laporan	1,563,743,500	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dibangun				2	Dok	1,537,803,190									2	Dok	1,537,803,190	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue	Jumlah bendung yang dibangun Jumlah dokumen pengawasan				44,197	Unit/ Dok	26,133,815,100									44,197	Unit/ Dok	26,133,815,100	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab	3	Km	16,087,418,900	1	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	710,957,500									1	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	710,957,500	sts	4.42	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab Panjang jaringan irigasi yang direhab				1	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	709,313,000									1	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	709,313,000	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan	719,411,000									1	Ha/ Laporan	719,411,000	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab					Ha/ Ha/ Lap	-										Ha/ Ha/ Lap	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab Jumlah dokumen pengawasan				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha	-									-	Ha	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Poddada Kab. Bireuen	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dibangun Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha/ Ha/ Lap	-									-	Ha/ Ha/ Lap	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha	-									-	Ha	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jaman Kab. Aceh Utara	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha	-									-	Ha	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha	-									-	Ha	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab Jumlah dokumen pengawasan				-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	-									-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan	736,312,500									1	Ha/ Laporan	736,312,500	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara	Luas area yang dibebaskan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha/ %	-									-	Ha/ %	-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K									
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.						
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Tolak Ukur	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		521,873,000																1	Ha/ Laporan		521,873,000	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesi Kab. Aceh Jaya	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha		-																-	Ha		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha		-																-	Ha		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan				-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap		-																-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Manggeng Kab. Aceh Barat Daya	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0.42	Km		1,163	Ha		746,805,044																1,163	Ha		746,805,044	sts	15.10	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha		-																-	Ha		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gunung Padang Kab. Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	27.14	Km		-	Ha/ Ha/ Lap		-																-	Ha/ Ha/ Ha/ Lap		-	sts	-	Dinas Pengairan Aceh	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		734,868,200																	1	Ha/ Laporan		734,868,200	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paya Dapur Kab. Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	19.25	Km		-	Ha/ Ha/ Lap		-																	-	Ha/ Ha/ Lap		-	sts	-	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan				1	lap		744,300,700																	1	lap		744,300,700	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		495,264,000																	1	Ha/ Laporan		495,264,000	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		495,054,450																	1	Ha/ Laporan		495,054,450	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/MahaSingkil Kab. Aceh Tenggara	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		493,428,650																	1	Ha/ Laporan		493,428,650	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Sejak Kab. Gayo Lues	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				-	Ha/ Laporan		-																	-	Ha/ Laporan		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Tilis Kab. Gayo Lues	Jumlah dokumen pengawasan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang direhab				-	Ha/ Ha/ Lap		-																	-	Ha/ Ha/ Lap		-	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I.R Kateunga Kab. Aceh Timur/ Langsa	Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				1	Ha/ Laporan		710,820,000																	1	Ha/ Laporan		710,820,000	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Teunom - Lambesoi	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang pengaman pantal yang dibangun Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun				-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/Lap		2,657,521,500																	-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/Lap		2,657,521,500	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh
		Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantal WS. Pase - Peusangan	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen pengawasan Jumlah dokumen yang direncanakan Panjang pengaman pantal yang dibangun Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun				-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/Lap		3,158,022,875																	-	Ha/ Ha/ Lap/ Lap/Lap		3,158,022,875	tdr	tdr	Dinas Pengairan Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.		
						Vol	Satuan				Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan					Vol	Satuan
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		
																									Dinas Pengairan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Sub Kegiatan			Urusan /Program /Kegiatan / Sub Kegiatan			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Target	Vol	Satuan	Rp.	Target	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		K	Rp.	K
										Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	33	Gedung	156,207,511,512	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	12,627,350,111	sts	8.08	-	-	12,627,350,111	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
										Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terkananya Pembangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	48	Gedung	153,707,511,512	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	12,545,616,111	sts	8.16	-	-	12,545,616,111	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
										Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terkananya Rehabilitasi Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Prasarana	2,000,000,000	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
										Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Terkananya Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2	Jenis	500,000,000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1	-	81,734,000	sts	16.35	1	-	81,734,000	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																			#DIV/0!	8.15			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
																			#DIV/0!	SR			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Permukiman yang Tertangani meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis provinsi dan kawasan kumuh	1600	Ha	9,250,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
										Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan di Lingkungan Kawasan Strategis	1	Kawasan	9,250,000,000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
										Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terkananya Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	1	Kawasan	9,250,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				3,057,549,944,707				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.04)				1,879,315,319,700	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.04)				215,609,822,597			21.05			162,599,084,286	54.49	5.32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
						73,681,324,976								40,248,936,614				69,461,460,947			165.81			109,710,397,561	tdr	148.90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	61,812,698,478	103.40	%	31,009,383,775	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	n/a									tdr	tdr	103	%	31,009,383,775	103.40	50.17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	9,211,445,398	63.00	%	7,958,859,750	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a									tdr	tdr	63	%	7,958,859,750	63.00	86.40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	2,039,000,500	100.00	%	641,115,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan Disiplin Aparatur	n/a									tdr	tdr	100	%	641,115,300	100.00	31.44	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	618,180,600	95.73	%	639,577,789	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n/a									tdr	tdr	96	%	639,577,789	95.73	103.46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan					Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	
							Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan Rutin Pelayanan Kantor	1	SKPA	1,430,347,083	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,639,056,979	sts	114.59	-	-	1,639,056,979	tdr	tdr			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Materai	100	%	125,600,000	sts	sts	22,440,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas dan Materai	3000	Lembar	30,690,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500	Lembar	29,700,000	150.00	96.77	sts	sts	52,140,000	sts	41.51	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, dan listrik perkantoran	100	%	4,037,600,000	sts	sts	1,923,945,407	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	17	Rekening	1,019,732,084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68	Rekening	1,307,439,579	400.00	128.21	sts	sts	3,231,384,986	sts	80.03	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah/Luas Gedung Kantor	9	Gedung	379,924,999	Jasa Pelayanan Umum Kantor	18	-	301,917,400	sts	79.47	18	-	301,917,400	tdr	tdr			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
							Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan Rutin Pelayanan Kantor	1	SKPA	4,871,404,086	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,991,293,818	sts	102.46	-	-	4,991,293,818	tdr	tdr			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100	%	6,408,454,000	sts	sts	2,564,759,745	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	85	Unit	1,752,502,650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340	Unit	2,248,567,818	400.00	128.31	sts	sts	4,813,327,563	sts	75.11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	9	Jenis	212,769,436	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27	-	243,876,000	sts	114.62	27	-	243,876,000	tdr	tdr			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	100	%	4,347,697,650	sts	sts	3,362,327,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	2	Gedung	2,906,132,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	2,496,850,000	sts	85.99	sts	sts	5,861,177,500	sts	134.81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan	100	%	776,652,000	sts	sts	368,095,500												sts	sts	368,095,500	sts	47.40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)	100	%	796,318,607	sts	sts	456,640,717												sts	sts	456,640,717	sts	57.34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	2,281,716,281	22.00	jenis	1,463,731,820													22	jenis	1,463,731,820	sts	64.15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	100	%	397,000,000	sts	sts	147,470,000													sts	sts	147,470,000	sts	37.15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pengelola Kegiatan	100	%	39,858,208,390	sts	sts	20,933,762,770													sts	sts	20,933,762,770	sts	52.52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100	%	1,950,000,000	5.00	unit	2,776,837,750													5	unit	2,776,837,750	sts	142.40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Pengadaan Mebeleur	Jenis Alat Rumah Tangga Lainnya, Meja/Kursi, Kerja & Lemari/Arsip Pejabat Dinas	100	%	1,063,747,749	sts	sts	619,208,500													sts	sts	619,208,500	sts	58.21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	100	%	850,000,000	48.00	unit	827,909,000													48	unit	827,909,000	sts	97.40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Target	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	Jumlah Palet Pemeliharaan Halaman Kantor Dinas	100	%	1,000,000,000	sts	sts	372,577,000								sts	sts	372,577,000	sts		37.26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai	100	%	515,150,500	sts	sts	641,115,300								sts	sts	641,115,300	sts	124.45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta	100	%	118,180,600	sts	sts	96,373,973								sts	sts	96,373,973	sts	81.55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Peserta	100	%	500,000,000	sts	sts	543,203,816								sts	sts	543,203,816	sts	108.64	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
																						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
																						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
																						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
																						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
																						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
						2,471,610,066,700			1,374,654,572,043													Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	30,000	Unit	2,437,625,275,803	4243	Unit	725,944,254,686		5831	Unit	433,718,400,000		-	-	115,024,072,102	sts	26.52	-	-	1,489,678,644,145	tdr	60.27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Luas Permukiman yang Tertangani meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis provinsi dan kawasan kumuh	2,000	Ha	33,984,790,897	351.60	Ha	648,710,317,356		n/a											352	Ha	648,710,317,356	17.58	1,908.83	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Jumlah Peserta	50	Peserta	2,000,000,000	50.00	peserta	330,553,686													50	peserta	330,553,686	100.00	16.53	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
		Pembinaan Teknik Bangunan Gedung						2	jenis	183,461,180												2	jenis	183,461,180	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K							
				Vol		Satuan	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur		Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			K		Rp.			K			Rp.	
		Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah laporan	1	thn keg	800,000,000	sts	sts	2,480,420,867												sts	sts	2,480,420,867	sts	310.05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun Kegiatan	1	thn keg	4,884,790,897	sts	sts	2,261,991,215												sts	sts	2,261,991,215	sts	46.31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan jalan dan jembatan kawasan permukiman	Panjang jalan dan jembatan yang terbangun	13	kwsn	10,000,000,000	81	kwsn	118,916,683,272												81	kwsn	118,916,683,272	623.08	1,189.17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				
		Pembangunan WTP dengan kapasitas 100l/dtk dan jaringan Transmisi ke ladang kab. Aceh besar (Penuntasan Bangunan sedang Operasional)					1	unit	2,201,267,500												1	unit	2,201,267,500	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Sabang					1	unit	1,864,889,000												1	unit	1,864,889,000	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Timur							320 m saluran drainase, 2 unit masjid	km, unit	10,865,212,154										320 m sal	km, unit	10,865,212,154	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah							4110 m jaringan air bersih, 305 m saluran drainase, 4071,04 m jalan lingkungan, 14 unit gedung	unit	1,471,150,000										4110 m ja	unit	1,471,150,000	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat							1127,3 m jalan lingkungan dan 1 unit bundaran masjid	unit	17,823,817,100										1127,3 m	unit	17,823,817,100	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pemeliharaan Payung Elektrik dan Pengadaan Automatic Volt Regulator (AVR) Kapasitas 30 Kva 3 Phase Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh								unit												unit		tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat Daya								4	km, unit	4,740,748,500									4	km, unit	4,740,748,500	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Besar								4110 m jaringan air bersih, 305 m saluran drainase, 4071,04 m jalan lingkungan, 14 unit gedung	km, unit	28,182,151,814									4110 m ja	km, unit	28,182,151,814	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Jaya								1127,3 m jalan lingkungan dan 1 unit bundaran masjid	unit	5,326,331,650									1127,3 m	unit	5,326,331,650	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Selatan								1127,3 m jalan lingkungan dan 1 unit bundaran masjid	km, unit	6,724,529,900									1127,3 m	km, unit	6,724,529,900	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Singkil									km, unit	1,136,002,500										km, unit	1,136,002,500	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.				K			Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	
				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Menjadi Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			K			Rp.			K			Rp.				K			Rp.					
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tamiang				16	unit		12,255,507,500													16	unit		12,255,507,500	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tengah				2550 m jaringan air bersih, 1314 m sal. Drainase, 1 unit masjid	unit		4,046,179,000													2550 m ja	unit		4,046,179,000	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Tenggara				2	unit		5,551,557,000													2	unit		5,551,557,000	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara				2766 m jaringan air bersih, 21 unit masjid	km, unit		25,093,208,069													2766 m ja	km, unit		25,093,208,069	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Bireuen				15536,8 m jalan lingkungan, 8 unit gedung	km, unit		29,402,459,800													15536,8 m	km, unit		29,402,459,800	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Gayo Lues				450 sal. drainase, 11 unit masjid	unit		3,867,326,000													450 sal. dr	unit		3,867,326,000	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya				2000 m jaringan air bersih, 2189 m saluran drainase, 23 unit gedung	km, unit		16,116,787,700													2000 m ja	km, unit		16,116,787,700	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Pidie				2022 m sal. drainase, 7 unit masjid	km, unit		17,509,630,800													2022 m sa	km, unit		17,509,630,800	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Pidie Jaya				2550 m jaringan air bersih, 1314 m jaringan drainase	km, unit		16,143,696,500													2550 m ja	km, unit		16,143,696,500	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kab. Simeulue				3378 m drainase dan 2 unit MCK	km, unit		1,005,932,500													3378 m dr	km, unit		1,005,932,500	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh				sal. Drainase 1810 m, jaringan air bersih 2000 m	km, unit		21,076,533,634													sal. Draina	km, unit		21,076,533,634	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Langsa				1752 m jaringan air bersih, 1 unit masjid	unit		14,473,767,980													1752 m ja	unit		14,473,767,980	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan / Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Lhokseumawe				1308, 1 unit reservoir 500 m3	M, km, unit		7,340,707,940													1308, 1 un	M, km, unit		7,340,707,940	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah				2550 m jaringan air bersih, 1314 m jaringan drainase	M, km, unit		3,315,946,010													2550 m ja	M, km, unit		3,315,946,010	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar				3378 m drainase dan 2 unit MCK	m		1,012,863,577													3378 m dr	m		1,012,863,577	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah				sal. Drainase 1810 m, jaringan air bersih 2000 m	km, unit		1,196,196,072													sal. Draina	km, unit		1,196,196,072	tdr	tdr				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K			K			Sandingan		Menjadi		K			K			K			K											
				Vol		Satuan	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan																				Rp.	Vol	Satuan	Rp.
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh					1752 m	unit														1752 m	unit					1752 m	unit	4,656,034,000	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kecamatan Sylaah Kuala Kota Banda Aceh					1308,1 unit	unit														1308,1 unit	unit					1308,1 unit	unit	3,236,122,313	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kota Subulussalam					1752 m	M, unit														1752 m	ja M, unit					1752 m	ja M, unit	2,476,832,781	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Perkotaan Beureunuen Kabupaten Pidie					1308,1 unit	M														1308,1 unit	M					1308,1 unit	M	1,747,571,885	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan/Peningkatan Kawasan Permukiman Perkotaan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah					1308,1 unit	unit														1308,1 unit	unit					1308,1 unit	unit	3,245,825,230	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Migas Kabupaten/Kota)					1,445	m														1,445	m					1,445	m	3,168,561,362	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM) Kabupaten/kota (Migas Kabupaten/Kota)					1,093	km														1,093	km					1,093	km	3,228,857,756	tdr	tdr	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
		Pembangunan sarana dan prasarana gedung	Jumlah sarana prasarana gedung yang terbangun	23	kwsn	16,000,000,000	-	Unit														-	Unit					234,817,207,445	sts	1,467,61	sts	1,467,61	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																																	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
																																		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan						Vol	Satuan	Vol			Satuan	Vol	Satuan				
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%tase penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi (SKA)	175	Peserta	764,164,012	-	%	197,300,024								tdr	tdr	-	%	197,300,024	sts	25.82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah	Jumlah Peserta	175	Peserta	764,164,012	50	Peserta	197,300,024											50	Peserta	197,300,024	28.57	25.82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																	#DIV/0!	#DIV/0!					28.57	25.82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																	#DIV/0!	#DIV/0!							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	%tase Panjang drainase dalam kondisi baik	1,145	km	68,056,678,254	482	km	64,372,827,094								tdr	tdr	482	km	64,372,827,094	42.08	94.59	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	panjang saluran drainase/gorong-gorong perdesaan	1,145	km	68,056,678,254	sts	sts	64,372,827,094											sts	sts	64,372,827,094	sts	94.59	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	94.59	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!		ST	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	%tase penduduk berakses air minum	60	%	120,083,043,862	-	%	111,806,466,219								tdr	tdr	-	%	111,806,466,219	sts	93.11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	2	kwsn	10,083,043,862	3	unit	3,455,803,000										3	unit	3,455,803,000	sts	34.27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik Air Minum	50	peserta	5,500,000,000	100	peserta	291,036,354										100	peserta	291,036,354	200.00	5.29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Panjang jaringan distribusi air bersih yang terbangun	11	kwsn	95,000,000,000	sts	sts	111,369,474,025										sts	sts	111,369,474,025	sts	117.23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah peralatan pendulang dan bangunan pengolahan sampah	4	kwsn	9,500,000,000	11	unit	10,875,224,327										11	unit	10,875,224,327	sts	114.48	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
																	#DIV/0!	#DIV/0!					200.00	67.82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
																	#DIV/0!	#DIV/0!							ST	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik	90	%	59,015,554,760	-	%	47,623,908,074								tdr	tdr	-	%	47,623,908,074		80.70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Sandiangan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.
		Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah produk perencanaan pengembangan kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7	kwsn	10,035,440,388	6	lap	4,607,615,913										6	lap	4,607,615,913	sts	45.91	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang tertangani	5	kwsn	47,911,633,330	2	kwsn	42,260,550,946										2	kwsn	42,260,550,946	40.00	88.21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Monitoring dan evaluasi pelaporan	Jumlah produk monitoring dan evaluasi	1	tahun leg	1,068,481,042	5	lap	755,741,215										5	lap	755,741,215	sts	70.73	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rasio pemukiman layak huni	0.964	264,339,112,143	-	Rasio Index	240,411,309,632										tdr	tdr	Rasio Index	240,411,309,632	sts	90.95	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh		
		Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang pembangunan jalan perdesaan	8	kwsn	100,000,000,000	26	km	39,264,501,606										26	km	39,264,501,606	sts	39.26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Pembangunan sarana dan prasarana gedung	Jumlah sarana Gedung (Sert Budaya, perkantoran/fasilitas umum) yang terbangun	14	kwsn	164,339,112,143	36	unit	201,146,808,026										36	unit	201,146,808,026	sts	122.40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
																								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh			
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh				177,344,690,514			92,413,647,784	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh			46,589,564,240								40,948,637,950	87.89	225,775,933,518	127.31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				177,344,690,514			92,413,647,784	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46,589,564,240								40,948,637,950	87.89	225,775,933,518	127.31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				177,344,690,514			92,413,647,784	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			46,589,564,240								40,948,637,950	87.89	225,775,933,518	54	127.31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Vol			Satuan	Vol	Satuan										Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
						52,398,744,774			19,272,679,196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			44,489,564,556	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			38,964,639,188		87.58			58,237,318,384	tdr	111.14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh		
98	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	20,571,656,600	33.33	%	8,570,028,178				90	%							33	%	8,570,028,178	33.33	41.66	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
101	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	100	%	864,681,711	99.30	%	130,920,000											tdr		99	%	130,920,000	99.30	15.14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
102	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	6,957,702,432	33.33	%	1,999,186,194											tdr		33	%	1,999,186,194	33.33	28.73	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
103	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	23,605,366,531	50.00	%	8,563,384,824											tdr		50	%	8,563,384,824	50.00	36.28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
104	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%	399,337,500	98.00	%	9,160,000											tdr		98	%	9,160,000	98.00	2.29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja/ Persentase Ketepatan Perencanaan	11	Dokumen		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,926,000	sts				17,926,000	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan	2	dok	66,000,000				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA	1	Dok		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				sts		sts	sts		sts		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan	10	dok	321,000,000	10	dok	9,160,000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan	10	Dok		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Dokumen	17,926,000	sts	#DIV/0!	sts	sts	27,086,000	sts	8.44	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
										Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pembayaran/ Administrasi Keuangan/ Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	36	Dokumen	12,082,155,277	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,140,091,782	sts	67.37			8,140,091,782	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Honorarium PNS	Jumlah Orang yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	72	Orang	9,912,755,836	194	Orang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	72	org	11,867,277,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	306	orang	8,140,091,782	sts	68.59	500	orang	8,140,091,782	694.44	82.12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
															Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210,963,231	tdr	tdr			210,963,231	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan Pelaporan	10	Dokumen	214,878,077	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan lhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Dokumen	210,963,231	240.00		24	Dokumen	210,963,231	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Pegawai/ Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Pegawai	100	Persen	1,077,287,135	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,115,290,174	sts				1,115,290,174	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian PNS dan jumlah pakaian batik PNS	1022	pasang	3,356,000,000	181	pasang	130,920,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian	122	Pasang	110,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	75	pasang	107,965,000	sts		256	pasang	238,885,000	25.05	7.12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	###	orang	750,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,750	orang	929,825,174	116.67		1,750	orang	929,825,174	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat profesional aparatur	80	orang	1,089,000,000	221	orang	191,518,908	Bimbingan Telesis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Dalam Daerah dan Luar Daerah	23	orang	216,707,135	Bimbingan Telesis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang				221	orang	191,518,908	276.25	17.59	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Qanun Syariat Islam dan Trantibum	1500	orang	1,052,000,000	2,450	orang	449,472,286										tdr	tdr	sts	sts	449,472,286	sts	42.73	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K		Rp.			K		Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	
				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Sasaran			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Menjadi			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			K			Rp.			K		Rp.		K		Rp.
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah personel yang mengikuti uji kesehatan /jasmani tenaga kontrak	872, 100, 70	orang	2,533,000,000	924,169	orang	1,358,195,000																									Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh
										Administrasi Umum	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum/ Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	5	Kegiatan	2,908,342,524	Administrasi Umum	Perangkat Daerah		kegiatan	2,535,293,958			87.17		kegiatan	2,535,293,958	tdr	tdr					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item-item yang dibeli	13	Item	102,000,000	39	item	27,535,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Perengkapan Alat Listrik Tersedia	40	Item	22,188,427	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Item	22,180,000	67.50	99.96		66	Item	49,715,000	507.69	48.74					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	18	Item	2,749,000,000	29	item	1,088,997,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	11	Item	1,042,473,699	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Item	982,897,802	490.91			83	Item	2,071,895,302	461.11	75.37					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	135	Item	1,110,000,000	450	Item	455,082,815	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor Tersedia	25	Item	241,250,568	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Item	567,364,411	524.00	235.18		581	Item	1,022,447,226	430.37	92.11					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah frekuensi cetakan dan penggandaan	2034	Kali	395,000,000	753	Kali	154,595,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Frekuensi Cetakan dan Penggandaan	360	Kali	69,918,830	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		kali	69,752,000	sts	99.76		1,113	kali	224,347,800	54.72	56.80					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah frekuensi pembayaran surat kabar dan majalah	12500	Eks	75,000,000	5,372	Eks	28,012,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Frekuensi Pembayaran Surat Kabar dan Majalah	###	eks	12,600,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		eks	12,545,000	100.00	99.56		8,252	eks	40,557,000	66.02	54.08					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan dalam daerah	100	Laporan	2,179,000,000	200	laporan	1,143,874,725	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Dalam Daerah dan Luar Daerah	62	laporan	1,017,586,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		laporan	760,868,594	198.39	74.77		323	laporan	1,904,743,319	323.00	87.41					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum	###	Kali	502,325,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		kali	77,177,542	0.06	15.36		6	kali	77,177,542	tdr	tdr					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
																																Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibeli	1	unit	3,100,000,000	17	unit	3,312,979,000																							Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh		
										Administrasi Umum	Jumlah Jasa Penunjang Yang Tersedia/ Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah	4	Jasa	24,726,749,780	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa	23,850,184,860			96.45		Jasa	23,850,184,860	tdr	tdr						Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	400 ; 900	Lembar	87,000,000	910, 282	Lembar	19,344,017	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Pengiriman Surat; benda pos	655	lembar	12,824,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		lembar	14,150,000	sts	110.34		sts	sts	33,494,017	sts	38.50					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon yang dibayarkan	12,12, 100,12	bulan	2,239,000,000	28	bulan	1,102,692,589	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Struk Tagihan Yang Dibayar	36	Bulan	475,844,280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	380,454,193	33.33	79.95		40	bulan	1,483,146,778	tdr	66.24					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Honorarium PNS	1 ; 8 ; 67 ; 10 ; 21 ; 33 ; 6 ; 1 ; 1 ; 1 ; 10 ; 1 ; 1 ; 300 ; 15 ; 50 ; 1100 ; 1100 ; 380 ; 11 ; 400 ; 1095 ; 7900 ; 200 ; 100 ; 2,9	org/bln	10,700,000,000	352	org/bln	5,187,864,236	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Frekuensi pembayaran gaji Non PNS, dan Restribusi Sampah	12	Bulan	23,888,081,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan	23,363,950,000	100.00	97.81		sts	sts	28,551,814,236	sts	266.84					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Frekuensi jasa Cleaning Service	12	Bulan	350,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan		25.00			3	Bulan		tdr	tdr					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
										Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Persentase Penggunaan Barang Milik Daerah	165	Item	2,195,030,157	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Item	2,031,007,067			92.53		Item	2,031,007,067	tdr	tdr					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			Rp.			K			Rp.			Sandangan		Mejandi		K			Rp.		K			Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	Vol	Satuan		K		Rp.
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis mobil.	500	unit		3681,000,000	313	unit		1,578,138,224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Diservice, Dibayar Pajak, dan Pengisian BBM	21	Unit		798,268,560	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137	unit		678,286,423	652.38	84.97	450	unit		2,256,424,647	90.00	61.30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor	100	%		3,650,000,000	100	%		2,940,852,000																					Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Pemeliharaan	1: 1: 1	tahun		1,161,000,000	3	tahun		537,295,600	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Item Pemeliharaan/Rehabilitasi	4	Item/tahun		1,299,268,577	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9	tahun		1,180,007,149	sts	-	12	tahun		1,717,302,749	tdr	147.92	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor	5	tahun		356,000,000	3	tahun		194,120,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Item Sarana/ Prasarana Yang dipelihara	90	Unit		97,493,020	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	tahun		97,426,195	sts	99.93	9	tahun		291,546,195	180.00	81.89	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
																															Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
																															Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
							124,945,945,740				73,140,968,588						2,099,999,684														Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
99	Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%tase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	90	%		5,079,174,822	30.00	%		1,539,682,659	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian anggaran qanun, kebijakan kepala daerah tentang Tibumtramas dan Syariat Islam	65	%			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							30	%		1,539,682,659	33.33	30.31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
100	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pemeliharaan Kantrantibus dan Pencegahan Tindak Kriminal	%tase penurunan pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah, dan gangguan trantibus	65	%		119,866,770,918	22.00	%		71,601,285,929																				Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
												Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Kasus Gangguan Tibumtramas/ Pensektas Peningkatan Tibumtramas	95	Persen		1,499,999,683	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh	
		Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah	Jumlah kegiatan KTR	1	kegiatan		668,000,000	1	kegiatan		198,219,371	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibus	6	kegiatan		343,500,827	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	28	kegiatan		343,114,650	466.67	-	29	kegiatan		541,334,021	#####	81.04	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan PULBAKET	50	Orang		309,000,000	70	Orang		125,322,114																				Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Aset Milik Daerah	Jumlah sosialisasi/pengawasan dan penerbitan aset milik daerah	30	kali		675,000,000	5	kali		1,500,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kemarahan Massa	Jumlah Penindakan Atas Gangguan Trantibus	20	kali		74,999,824	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kemarahan Massa	242	kali		73,036,400	1,210.00	97.38	247	kali		74,536,400	823.33	11.04	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah peserta pertemuan	90	Orang		385,000,000	170	Orang		128,302,600	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor	46	orang		81,499,032	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	38	orang		80,307,605	82.61	98.54	208	orang		208,610,205	231.11	54.18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan anggota kesiap-siagaan linmas	40	Orang		715,000,000	100	Orang		301,193,457	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Bimtek Pembinaan Anggota Kesiapsiagaan Linmas	500	Orang		131,850,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81	Orang		119,094,274	sts	-	181	Orang		420,287,731	452.50	58.78	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Pembinaan Aparatur perlindungan masyarakat	Jumlah aparat ur linmas yang mengikuti pembinaan	48	Orang		1,023,000,000	81	Orang		329,548,225																				Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		
		Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan	Jumlah perangkat gampong yang mengikuti kerjasama dengan aparat keamanan	120	Orang		628,000,000	240	Orang		258,892,336																				Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahat Hisbah Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K			
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	
		Penyelenggaraan gampong sadar hukum	jumlah perangkat gampong dan aparatur linmas yang mengikuti pertemuan	260	Orang	575,000,000	255	Orang	260,326,447											tdr	tdr	255	Orang	260,326,447	98.08	45.27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Peningkatan Pengendalian dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat	jumlah pengendalian dan mobilisasi perlindungan masyarakat	20	kali	335,000,000	6	kali	9,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Pembinaan Poi PP-WH	180	Orang	68,150,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	23	kali	67,987,000	sts	-	29	kali	76,987,000	145.00	22.98	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Peningkatan kapasitas Polisi PP	jumlah peserta Pelatihan pengembangan kelembagaan Satpol PP-WH	60; 60; 92	Orang	2,077,000,000	251	orang	762,483,249											tdr	tdr	251	orang	762,483,249	tdr	36.71	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	65	Orang	499,000,000	153	Orang	166,085,346	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pertemuan Kerja sama	60	Orang	800,000,000	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	416	orang	766,537,816	693.33	95.82	569	orang	932,623,162	875.38	186.90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Satpol PP-WH	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Kelembagaan	46	Orang	215,000,000	-	orang	-											tdr	tdr	-	orang	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
										Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penegakan Qanun dan Pergub /Persentase Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun dan Pergub	15	Kasus	197,143,613	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	178,739,971	sts	90.66	-	-	178,739,971	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Pengawasan pelaksanaan Perda, Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum	jumlah tenaga kontrak yang tersedia; jumlah pengawasan yang dilakukan	861.18; 135	kali	112,863,000,000	2564; 433	kali	65,014,830,480	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan Perda dan Pergub	15	Kali	83,520,815	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30	kali	67,147,821	200.00	80.40	-	kali	65,081,978,301	tdr	57.66	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan SDM Petugas Tindak Internal	jumlah pengawasan personil; jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM Petugas Tindak Internal	35; 46	kali	701,000,000	6	Kali	9,000,000											tdr	tdr	6	Kali	9,000,000	tdr	1.28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Inspeksi dan Investigasi Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah	jumlah inspeksi dan investigasi	30	kasus	168,000,000	-	kasus	-	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Qanun	12	Kasus	113,622,798	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	68	kasus	111,592,150	566.67	-	68	kasus	111,592,150	226.67	66.42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
										Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Mengikuti Bimtek/Diklat/ Persentase Penyelesaian Kasus Pada Tahap Pengadilan	40	Orang	5,005,666	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Peningkatan kapasitas PPNS	jumlah PNS yang mengikuti diklat PPNS	7; 2; 4	Orang	1,597,000,000	16	orang	248,689,530	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas PPNS	40	Orang	5,005,666	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	orang	-	-	-	16	orang	248,689,530	tdr	15.57	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota	jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota	48	kasus	3,681,000,000	93	kasus	1,360,976,794					Pemberkasan Administrasi Pengadilan oleh PPNS					tdr	tdr	sts	sts	1,360,976,794	sts	36.97	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
		Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota	jumlah monitoring dan evaluasi kinerja PPNS	23	kab/kota	407,000,000	17	kab/kota	176,013,400											tdr	tdr	17	kab/kota	176,013,400	73.91	43.25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
										Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpra dan Wilayah Aceh	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam/ Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Syariah Islam	95	Persen	397,850,722	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh *****)	-	-	303,827,046	sts	-	-	-	303,827,046	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
																				tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			
		Pembinaan dan Koordinasi Wilayah Aceh	jumlah operasi gabungan	705	Operasi	3,516,000,000	605	Operasi	1,203,318,000	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam *****)	Jumlah operasi	50	operasi	172,245,180	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam *****)	43	Operasi	144,931,126	86.00	84.14	648	Operasi	1,348,249,126	91.91	38.35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh				
																				tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.						Vol	Satuan	Rp.										Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
		Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah serta Ulama se- kab/kota dalam wilayah Aceh	Jumlah kegiatan sosialisasi Satpol PP dan WH (HUT Satpol PP-WH Aceh)	1	Keg	2,623,000,000	3	keg	1,021,589,388											tdr	tdr	3	keg	1,021,589,388	300.00	38.95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
		Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23	kab/kota	496,000,000	23	kab/kota	287,201,812											tdr	tdr	23	kab/kota	287,201,812	100.00	57.90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
		Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota	Jumlah peserta rakor	48	Orang	979,000,000	96	Orang	351,423,266											tdr	tdr	96	Orang	351,423,266	200.00	35.90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
		Peningkatan pendidikan dan pelatihan syarat Islam bagi aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Qanun Jinayah	48	Orang	1,029,000,000	150	Orang	436,270,579	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayah Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****	Jumlah Peserta Bimtek Bagi Pol PP-WH Aceh dan Kabupaten/Kota	120	orang	82,830,820	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayah Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****	33	Orang	56,600,000	sts	68.33	183	Orang	492,870,579	381.25	47.90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh	
		Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggaran qanun	Jumlah eksekusi terhadap pelanggaran qanun	7	kali	469,000,000	48	kali	88,580,000	Pelaksanaan Eksekusi Cembuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku *****	Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Cembuk	7	Kali	47,850,722	Pelaksanaan Eksekusi Cembuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	9	Kali	29,425,560	128.57	-	57	Kali	118,005,560	814.29	25.16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh	
		Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syarat Islam	Jumlah peserta pertemuan	45	Orang	571,000,000	93	Orang	210,388,686											tdr	tdr	93	Orang	210,388,686	206.67	36.85	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
																				tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
		Peningkatan Kapasitas Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima; jumlah tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat	60; 60	lap; kasus	605,000,000	6	bin	21,480,000	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi*****	Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi*****	120	Laporan	94,924,000	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi*****	51	Laporan	47,600,000	42.50	-	sts	sts	69,080,000	sts	11.42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh	
		Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syarat Islam	Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan qanun syarat Islam	50	Orang	601,000,000	89	Orang	170,333,508											tdr	tdr	89	Orang	170,333,508	178.00	28.34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
																											Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
																											Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
																											Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
		Badan Penanggulangan Bencana Aceh				531,799,900,657			156,082,159,737	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			49,194,586,004	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			36,724,902,714			74.65			319,803,445,462		60.14	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				531,799,900,657			156,082,159,737	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			49,194,586,004	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			36,724,902,714			74.65			319,803,445,462		60.14	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
		BIDANG KEBENCANAAN				531,799,900,657			156,082,159,737	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PENANGGULANGAN BENCANA			49,194,586,004	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PENANGGULANGAN BENCANA			36,724,902,714			74.65			319,803,445,462		60.14	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
						100 %			34,466,122,255	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			12,994,586,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			14,084,803,479			108.39	-	-	14,084,803,479	sts	413.70	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	16,693,695,713	99.33	%	11,319,768,865	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%					25	%	25.00	99	%	15,775,100,753	98.53	45.77	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	768,730,829	98.33	%	497,996,500	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%					-	%	-	99	%	11,319,768,865	99.33	67.81	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	100	%	310,000,000	-		-	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%					-	%	-	sts	sts	-	-	sts	-	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	16,693,695,713	95.00	%	3,957,335,388	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%					25	%	25.00	120	%	3,957,335,388	120.00	23.71	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah lokasi jasa kebersihan kantor	3	Gedung	505,462,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lokasi jasa pelayanan umum kantor	3	Gedung	-	100.00	-	3	Gedung	-	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
									Administrasi Umum	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			1,915,715,078	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	60	Bulan	570,261,400	12	Bulan	324,543,542	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	49	Jenis	106,060,997	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	49	Jenis	217,711,939	100.00	205.27	sts	sts	542,255,481	sts	95.09	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan konsumsi peserta rapat, tamu dan tenaga pengamanan kantor	60	Bulan	971,625,873	12	Bulan	424,566,350	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Konsumsi Peserta Rapat, Tamu dan Tenaga Pengamanan Kantor	5190	orang	210,066,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,188	orang	-	99.95	-	sts	sts	424,566,350	sts	43.70	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik kantor	60	Bulan	219,612,500	12	Bulan	124,174,625	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik Kantor	522	Buah	48,952,688	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Kantor	462	Buah	48,846,522	88.41	99.78	sts	sts	173,021,147	sts	78.78	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kantor	60	Bulan	1,540,004,754	12	Bulan	3,390,556,063	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	42	Unit	921,781,157	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42	Unit	862,983,000	98.81	-	sts	sts	4,253,539,063	sts	276.20	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Media Bacaan Koran	60	Bulan	119,750,000	12	Bulan	34,396,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	50	Buah	20,440,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	Buah	20,220,300	tdr	98.92	sts	sts	54,616,800	sts	45.61	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
										Jumlah Langganan Surat Kabar	636	Eksemplar				627.00	Eksemplar		98.58	tdr	627	Eksemplar		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan dokumen	60	Bulan	381,085,000	12	Bulan	213,747,940	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Fotokopi Dokumen dan Surat	9	Jenis	98,323,236	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	#REF!	Jenis	99,935,000	tdr	-	sts	sts	313,682,940	sts	82.31	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
											99290	Lembar				24,823.33	Lembar		25.00	tdr	24,823	Lembar		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Konsultasi Pelayanan Penanggulangan Bencana	60	Bulan	3,460,780,132	sts	sts	1,576,941,636	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60	orang/kali	510,090,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	orang/kali	468,058,455	91.67	91.76	sts	sts	2,045,000,091	sts	59.09	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
												29	orang/kali				27	orang/kali		94.54	tdr					Badan Penanggulangan Bencana Aceh			

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Satuan	Rp.	K		Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Target	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	4	Unit	1.200,000,000	4	Unit	404,200,000	Administrasi Umum	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran			1.940.350,904	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.327,803,670							1.327,803,670					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	181	Unit	5.303,095,000	69	Unit	1.804,845,963	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM	30840	liter	1.806.181,904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.420	liter	1.290,779,899	50.00	71.46	sts	sts	-	-	1.694,979,899	sts	141.25	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
											Jumlah Kendaraan Dinas yang diservis	74	unit			74.17	unit	-	100.23	tdr	74	unit	-	-	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
											Jumlah pajak kendaraan yang dibayar	40	unit			40.33	unit	-	100.83	tdr	40	unit	-	-	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlatan kantor	Jumlah jasa perawatan dan pemeliharaan kantor	649	Unit	468,250,000	337	Unit	242,451,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	92	Unit	134,169,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88	Unit	685,514,221	95.29	510.93	sts	sts	-	-	685,514,221	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	12	Unit	3,459,440,083	4	Unit	1,505,837,925						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										4	Unit	1,505,837,925	33.33	43.53	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
										Administrasi Umum	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,332,533,965							1,332,533,965			Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1,332,533,965	tdr	#DIV/0!			-	-	1,332,533,965	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
									126,013,168,871	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				31,390,895,534	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	Index Risiko Bencana	130	Indeks	377,275,831,034	139/sedang	Indeks	17,084,120,941	Persentase pengurangan resiko bencana	133	Indeks		139/sedang	Indeks	-	tdr	139/sedang	Indeks	17,084,120,941	tdr	4.53							
		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Menurunnya %tase korban terdampak bencana	95	%	1,725,352,000	1.00	%	2,238,316,880												1	%	2,238,316,880	sts	129.73				
		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	%tase korban bencana yang dievakasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	%	37,180,453,500	74.00	%	64,477,558,072												74	%	64,477,558,072	92.50	173.42				
		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	%	39,436,882,764	68.00	%	35,119,882,375												68	%	35,119,882,375	sts	89.05				
		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	80	%	7,249,136,849	75.00	%	5,612,079,963												75	%	5,612,079,963	93.75	77.42				
		n/a (program n/a di RPJMA)	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi		%		35.00	%	1,481,210,640												35	%	1,481,210,640	tdr	tdr				
										Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tertaksananya Sosialisasi, komunikasi, pemutabiran informasi dan edukasi rawan bencana	1	Laporan	3,536,883,833	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Laporan	1,173,759,851							Laporan	1,173,759,851	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
										Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	dokumen	1	dok	372,341,372	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	1		371,059,285	sts	-	1	-	371,059,285	tdr	tdr			Badan Penanggulangan Bencana Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K			K									
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		Vol	Satuan	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27
		Penguatan kelembagaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan Bencana Aceh	Meningkatnya Penyebaran Informasi dan data bencana	23	Keg	9,844,000,000	3	laporan	2,943,705,503	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawaan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	kegiatan	22	Keg	3,164,542,461	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawaan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	18	Keg	802,700,566	81.82	-	sts	sts	3,746,406,069	sts	38.06	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																										Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
										Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	30	%	16,965,639,698	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	%	13,258,882,400	-	-	-	%	13,258,882,400	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penyusunan Rencana Kontijensi Mitigasi Bencana	Sosialisasi Rencana Kontijensi	1	kab	938,586,000	1	kab	724,104,400	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	dokumen	1	dok	275,000,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1	-	275,000,000	sts	-	sts	sts	999,104,400	sts	106.45	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																										Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan	420	org	2,076,386,798	10	kali	371,647,096	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kebencanaan Terlaksananya kegiatan Sekolah Aman Bencana Terlaksananya Simulasi Bencana	2	Kegiatan	2,006,442,778	2	Kegiatan	1,531,081,053	100.00	-	sts	sts	1,902,728,149	sts	91.64	Badan Penanggulangan Bencana Aceh						
		Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana				108	%	8,400,000	7			Sekolah																Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan	200	org	292,530,900	350	org	467,704,200			2003	Lokasi															Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Pengurangan Risiko Bencana	Penyelenggaraan Latihan (Gelad) Kesiapsiagaan	450	org	786,766,000	450	org	757,106,240																	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Peningkatan sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Penanggulangan Bencana	480	org	5,475,200,000	320	orang	978,421,300																	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penguatan sekolah, madrasah aman bencana dan fasilitas publik lainnya	Meningkatnya Sekolah, Madrasah, Rumah Sakti dan Puskesmas Aman Bencana	6300	org	13,217,110,852	1,506	orang	3,008,560,800																	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanggulangan bencana	450	jenis	111,633,049,786	sts	sts	43,736,611,413	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan Bencana bulanan Terbangunannya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Tersedianya peralatan penanggulangan bencana Tersedianya Sarana Penunjang Kesiapsiagaan Bencana	12	Laporan	8,601,295,826	3	Laporan	133,612,450	25.00	-	sts	sts	43,870,223,863	sts	39.30	Badan Penanggulangan Bencana Aceh						
												7	Unit					85.71	tdr	6	Unit			tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
												2	Paket					100.00	tdr	2	Paket			tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
												2	Unit					100.00	tdr	2	Unit			tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K		K			K					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	Vol	Satuan	Rp.
		Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	4	laporan	5,819,199,546	sts	sts	1,923,051,291											sts	sts	1,923,051,291	sts	33.05	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Sistem Pusat Kendali Operasi	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	13	unit	652,987,600	13	unit	555,045,925											13	unit	555,045,925	100.00	85.00	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanggulangan bencana	85	%	36,447,570,100	170	%	63,466,800,472											170	%	63,466,800,472	200.00	174.13	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Meningkatnya Sarana Prasarana Menghadapi Bencana				sts	sts	113,400,000											sts	sts	113,400,000	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
										Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Alat Perlindungan dan Kesiapsiagaan bencana	100	Unit		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				sts	tdr			tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam PRB	12	kl	17,042,600,000	3	kali	991,392,200	Pengelolaan Risiko Bencana	Desa Kab/Kota kegiatan Kegiatan	1	Desa	1,263,680,825	Pengelolaan Risiko Bencana	1	Desa	1,124,967,616	100.00	-	sts	sts	2,116,359,816	sts	12.42	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												4	Kab/Kota			4	Kab/Kota		100.00	tdr	4	Kab/Kota		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												1	Keg			1	Keg		100.00	tdr	1	Keg		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												1	Keg			1	Keg		100.00	tdr	1	Keg		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Penguatan Forum pengurangan resiko bencana	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam PRB	100	unit	4,430,272,000	sts	sts	1,340,799,016											sts	sts	1,340,799,016	sts	30.26	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana	Jumlah Sosialisasi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana Yang Dilaksanakan				3	dokumen	2,642,484,966											3	dokumen	2,642,484,966	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya gerakan PRB				99	%	479,220,000											99	%	479,220,000	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen perencanaan dan kajian serta evaluasi PRB	28	dok	10,950,400,000	5	dokumen	2,415,340,564											5	dokumen	2,415,340,564	sts	22.06	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Penguatan desa tangguh bencana	Meningkatnya jumlah desa siaga bencana	780	org	5,500,096,960	75	orang	404,895,219											75	orang	404,895,219	sts	7.36	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	Jumlah data dan dokumen rekam jejak penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana	4	dok	1,888,900,000	3	laporan	694,629,138	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan Laporan	1	Keg	691,241,835	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Kegiatan	756,090,827	sts	-	sts	sts	1,450,719,965	sts	76.80	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												1	Laporan			1	Laporan		100.00	tdr	1	Laporan		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Koordinasi Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan	54	org	185,006,500	54	org	158,126,700											54	org	158,126,700	100.00	85.47	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
																				-	-	-	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				
		Kajian kebutuhan pasca bencana	Tersedianya informasi tentang kajian kebutuhan pasca bencana	4	kl	2,502,000,000	2	kali	578,681,655	Penanganan Pacabencana	Dokumen Kegiatan Laporan Paket	1	Dokumen	4,127,978,434	Penanganan Pacabencana	1	Dokumen	2,366,514,503	100.00	-	sts	sts	2,945,196,158	sts	117.71	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												2	Kegiatan			2	Kegiatan		100.00	tdr	2	Kegiatan		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												2	Laporan			2	Laporan		100.00	tdr	2	Laporan		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
												84	Paket			84	Paket		100.00	tdr	84	Paket		tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh			
		Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	32	kl	68,480,399,973	3	kali	766,835,963											3	kali	766,835,963	sts	1.12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			K	Rp.	K		K		K	Rp.								
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.					Vol	Satuan	Rp.			Vol	Satuan	Rp.	Vol			Satuan		Rp.	Vol	Satuan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25			
		Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan akibat bencana	Meningkatnya Penanganan Kerusakan Akibat Bencana	92	proposal	1,371,400,000	22	Proposal	649,257,082													22	Proposal	649,257,082	23.91	47.34	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Inventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	dok	136,281,500	1	dok	128,686,134													1	dok	128,686,134	100.00	94.43	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Perbaikan lingkungan daerah bencana	Meningkatnya Penanganan Perbaikan Lingkungan Pasca Bencana	1	paket	4,600,000,000	1	paket	4,365,459,451													1	paket	4,365,459,451	100.00	94.90	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Perbaikan Lingkungan daerah bencana	Terlaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	7	paket	14,695,733,410	7	paket	13,041,969,640													7	paket	13,041,969,640	100.00	88.75	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	Pulihnya Pelayanan Publik dalam wilayah terjadinya bencana	4	paket	20,300,000,000	1	paket	547,860,627													1	paket	547,860,627	25.00	2.70	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	Terlaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	2	paket	23,668,004,854	2	paket	21,190,517,540													2	paket	21,190,517,540	100.00	89.53	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	Terlaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	2	paket	23,668,004,854	2	paket	21,190,517,540													2	paket	21,190,517,540	100.00	89.53	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	12	dok	4,640,000,000	4	dok	1,435,295,921													4	dok	1,435,295,921	33.33	30.93	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana	Meningkatnya Pemulihan Ekonomi masyarakat pasca bencana	400	KK	9,352,800,000	138	KK	2,358,084,912													138	KK	2,358,084,912	34.50	25.21	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana	Terlaksananya Pemulihan ekonomi Masyarakat Pascabencana	92	%	839,675,923																92	%	839,675,923			Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Psikososial bagi masyarakat korban bencana	Tertanganinya psikologi korban bencana	335	org	1,184,500,000	sts	sts	301,571,080													sts	sts	301,571,080	sts	25.46	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	150	org	712,803,500	150	org	565,097,689													150	org	565,097,689	100.00	79.28	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Koordinasi penilaian kerusakan bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1	lap	224,059,500	1	lap	193,611,372													1	lap	193,611,372	100.00	86.41	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Meningkatnya respon penanganan penanggulangan darurat bencana	650	org	6,510,000,000	120	Orang	1,886,071,186	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Aparatur Tim Reaksi Cepat yang terlatih	60	orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				sts	tdr	sts	sts	1,886,071,186	sts	28.97	Badan Penanggulangan Bencana Aceh						
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penanganan Darurat Bencana	Pertolongan Korban, Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh, Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana dan	23	kabupaten/kota	56,924,265,120	sts	sts	9,129,624,956	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis	100	Persen		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				sts	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	20	Paket	3,380,088,000																2	Paket	6,400,000	8.33		sts	sts	9,136,024,956	sts	16.05	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
		Penilaian cepat kerusakan akibat bencana	Peningatan penanganan darurat dan logistik	46	org	614,441,500	46	org	592,898,038																		Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
																											Badan Penanggulangan Bencana Aceh					
		Penguatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Tersedianya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana	788	org	7,410,000,000	sts	sts	4,271,946,165	Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	23	Kab/Kota	5,896,375,000	Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	23	Kab/Kota	226,873,440	100.00	-	sts	sts	4,498,819,605	sts	60.71	Badan Penanggulangan Bencana Aceh						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Target	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol	Satuan	Vol
				Vol		Satuan		Rp.	Vol		Satuan		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.				
3	Panti Sosial			2,538,642,642	3	Panti Sosial				1,794,845,400																	3	Panti Sosial	
200	Anak			6,756,250,000	630	Orang			4,828,179,375									630	Orang			4,828,179,375	sts	71.46	Dinas Sosial Aceh				
120	Anak			11,423,425,000	36	Bulan			9,958,975,860									36	Bulan			9,958,975,860	sts	87.18	Dinas Sosial Aceh				
n/a	n/a				1	UPTD												1	UPTD				sts	tdr	Dinas Sosial Aceh				
100	Anak			12,641,023,334	500	Anak			6,616,564,876									500	Anak			6,616,564,876	500.00	52.34	Dinas Sosial Aceh				
1	UPTD				1	UPTD			-									1	UPTD			-	100.00	tdr	Dinas Sosial Aceh				
120	Orang			15,112,465,082	50	Orang			9,917,612,957									50	Orang			9,917,612,957	41.67	65.63	Dinas Sosial Aceh				
1	UPTD				1	UPTD			-									1	UPTD			-	100.00	tdr	Dinas Sosial Aceh				
100	Orang			9,559,312,426	395	Orang			6,326,850,880									395	Orang			6,326,850,880	395.00	66.19	Dinas Sosial Aceh				
250	Orang			5,087,000,000	1,770	Orang			8,392,540,302									1,770	Orang			8,392,540,302	708.00	164.98	Dinas Sosial Aceh				
65	Orang			1,581,875,000	100	Orang			1,395,617,550									100	Orang			1,395,617,550	153.85	88.23	Dinas Sosial Aceh				
Rata-rata capaian kinerja (%)													100.00	-				201.33	265.08	Dinas Sosial Aceh									
Predikat kinerja													ST	ERR				ST	ST	Dinas Sosial Aceh									
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								0-	8,749,872,931	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								75	-	20,102,365,319	tdr	229.74	75	-	20,102,365,319	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								2000	Orang	8,749,872,931	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								75	-	20,102,365,319	sts	-	75	-	20,102,365,319	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Penyediaan Permakanan								1	Tahun	4,604,614,478	Penyediaan Permakanan								23	Kegiatan	4,237,812,030	sts	-	23	Kegiatan	4,237,812,030	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Penyediaan Sandang								1	Tahun	2,600,000,000	Penyediaan Sandang								23	Kegiatan	6,404,042,500	sts	-	23	Kegiatan	6,404,042,500	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								1	Tahun	500,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								10	Kegiatan	663,850,000	sts	-	10	Kegiatan	663,850,000	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								1	Tahun	400,000,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								24	Kegiatan	8,388,025,209	sts	-	24	Kegiatan	8,388,025,209	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Pelayanan Dukungan Psikososial								1	Tahun	645,258,453	Pelayanan Dukungan Psikososial								10	Kegiatan	408,635,580	sts	-	10	Kegiatan	408,635,580	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
500	Keluarga Rentan			22,256,951,016	200	KK			23,049,713,682									200	KK			23,049,713,682	sts	103.56	Dinas Sosial Aceh				
Rata-rata capaian kinerja (%)													#DIV/0!	-				#DIV/0!	103.56	Dinas Sosial Aceh									
Predikat kinerja													#DIV/0!	ERR				#DIV/0!	ST	Dinas Sosial Aceh									
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								0-	950,801,621	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								67	-	840,916,400	tdr	88.44	67	-	840,916,400	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								7	MPN/TMP	950,801,621	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								67	-	840,916,400	sts	88.44	67	-	840,916,400	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								1	Tahun	600,801,621	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								10	Kegiatan	494,287,400	sts	82.27	10	Kegiatan	494,287,400	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			K			K	Rp.	K			K		Rp.
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.						Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.			Vol	Satuan	Rp.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
									Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	Tahun	200,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	10	Kegiatan	200,000,000	sts	100.00	10	Kegiatan	200,000,000	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh			
									Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Tersedianya Anggaran PPhengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2	MPN	150,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	10	Kegiatan	146,629,000	sts	97.75	10	Kegiatan	146,629,000	tdr	tdr	Dinas Sosial Aceh			
		Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Kepentingan dan Kesetiaakawanan Sosial	Terlaksananya Kegiatan PWCSS	4:1	MP-TMP;Makam Tsunami;P NK3 (1600 Orang)	9,242,000,000	1	Unit	5,912,083,587									tdr	tdr	1	Unit	5,912,083,587	sts	63.97	Dinas Sosial Aceh			
																			#DIV/0!	93.34				#DIV/0!	63.97	Dinas Sosial Aceh		
																			#DIV/0!	ST				#DIV/0!	R	Dinas Sosial Aceh		

Tabel 2.122
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	
				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur				Alokasi Anggaran (Rp.)				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d				
		DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH			837,484,496,187			242,325,676,627			DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH			51,972,935,953			DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH			42,133,451,428			81.07			304,686,543,726			36.38	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			289,901,929,664			181,643,429,614			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38,887,935,953			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34,972,777,916			89.93			236,843,623,201			81.70	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		Bidang Urusan Tenaga Kerja			289,901,929,664			181,643,429,614			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			38,887,935,953			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			34,972,777,916			89.93			236,843,623,201	58.68	81.70	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
					23,062,228,960			80,909,662,684			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			32,417,935,953			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			-		tdr	95.30	-	-	111,804,246,326	tdr	484.79	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	16,476,203,960	92.36	%	20,227,415,671			Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%						25	%		25.00		59	%	20,227,415,671	58.68	122.77	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	1,032,200,000	FALSE	sts	20,227,415,671			Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%						-	%		-		sts	sts	20,227,415,671	sts	1,959.64	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	543,000,000	FALSE	sts	20,227,415,671			%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%						-	%		-		sts	sts	20,227,415,671	sts	3,725.12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	5,010,825,000	FALSE	sts	20,227,415,671			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%						-	%		-		sts	sts	20,227,415,671	sts	403.67	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
											Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan dan evaluasi kinerja bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1	Tahun	1,200,000,000			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Tahun	1,355,102,867	100.00	112.93	1	Tahun	1,355,102,867	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
											Penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2	Dok	25,346,000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dok	22,027,662	100.00	86.91	2	Dok	22,027,662	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
											Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan	10	Dok	534,875,000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.00	Dok	748,127,637	100.00	139.87	10	Dok	748,127,637	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
											Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan dan Dokumen Evaluasi	4	Dok	304,631,500			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lictisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00	Dok	509,160,068	100.00	167.14	4	Dok	509,160,068	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
											Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	2	Dok	245,812,500			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K			K		K			K			
				Rp.			Rp.			Tolak Ukur	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rp.			Rp.		Rp.				Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan					Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan		K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dok	89,335,000			6,00	Dok	75,787,500	100.00	84.84	6	Dok	75,787,500	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
									Administrasi Keuangan	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perkantoran Tepat Waktu	1	Tahun	28,107,938,973			0.75	Thn	26,568,132,829	sts	94.52	1	Thn	26,568,132,829	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	217	orang	28,107,938,973			217.00	orang	26,568,132,829	tdr	94.52	217	orang	26,568,132,829	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
										Inisentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	tahun				1.00	tahun	-	100.00	tdr	1	tahun	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
										Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	90	orang				90.00	orang	-	100.00	tdr	90	orang	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
										Tambahan Penghasilan ASN	217	orang				217.00	orang	-	100.00	tdr	217	orang	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
									Administrasi Umum	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tahun	3,055,396,980			1.00	Tahun	1,357,855,319	100.00	44.44	1	Tahun	1,357,855,319	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dalam Mempercepat Proses Administrasi	5	tahun	133,200,000	3	tahun	63,126,700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dalam	1	Tahun	20,875,200			1.00	Tahun	16,928,500	100.00	81.09	4	Tahun	80,055,200	80.00	60.10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Percepatan Kinerja Aparatur	5	tahun	3,634,500,000	3	tahun	1,423,282,660	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Percepatan Kinerja Aparatur	1	Tahun	620,852,800			1.00	Tahun	409,426,019	100.00	65.95	4	Tahun	1,832,708,679	80.00	50.43	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatkan Kelancaran Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Kepada Publik	5	tahun	491,206,085	2	tahun	465,697,840	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kelancaran Kinerja Aparatur dalam Pelayanan kepada Publik	1	Tahun	139,300,000			1.00	Tahun	397,057,000	100.00	285.04	3	Tahun	862,754,840	60.00	175.64	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perisian kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	tahun	273,000,000	3	tahun	81,903,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perisian Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Tahun	55,500,000			1.00	Tahun	534,443,800	100.00	962.96	4	Tahun	616,347,700	80.00	225.77	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perkantoran	1	Tahun	309,870,000			-	-	-	sts	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Rasa Kenyamanan dalam Proses Peningkatan Kinerja Aparatur	5	tahun	1,624,000,000	3	tahun	848,020,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya rasa kenyamanan dalam proses peningkatan kinerja aparatur	1	Tahun	275,307,491			-	-	-	sts	-	sts	sts	848,020,000	sts	52.22	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam Percepatan Administrasi	5	tahun	435,580,000	3	tahun	196,410,250	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam Percepatan Proses Administrasi	1	Tahun	50,003,276			-	-	-	sts	-	sts	sts	196,410,250	sts	45.09	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
											1	Tahun				1	Tahun	408,670,546	100.00	tdr	1	Tahun	408,670,546	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Perkantoran	5	tahun	281,953,000	3	tahun	143,541,350	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan Sarana Perkantoran	1	Tahun	45,026,600			1.00	Tahun	44,956,850	100.00	99.84	4	Tahun	188,498,200	80.00	66.85	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mewujudkan Kelengkapan gedung kantor sebagai tempat kerja	5	tahun	198,685,000	3	tahun	96,797,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	1	Tahun	30,010,604			1.00	Tahun	29,874,000	100.00	99.54	4	Tahun	126,671,000	80.00	63.75	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Implementasi Pekerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	4	tahun	92,400,000	2	tahun	45,360,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	1	Tahun	22,380,000			1.00	Tahun	21,600,000	100.00	96.51	3	Tahun	66,960,000	75.00	72.47	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Kegiatan Aparatur dalam rangka Peningkatan Kinerja	5	tahun	970,650,000	3	tahun	436,589,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk memperlancar tugas	1	Tahun	157,705,440			1.00	Tahun	168,752,500	100.00	107.00	4	Tahun	605,341,500	80.00	62.36	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja	5	tahun	1,591,475,000	3	tahun	754,054,372	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Tahun	143,643,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00	Tahun	143,487,196	100.00	99.89	4	Tahun	897,541,568	85.00	56.40	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor sebagai aset Dinas dan Daerah	5	tahun	293,725,000	3	tahun	170,826,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Tahun	54,774,209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.75	Tahun	1,174,551,339	75.00	2,144.35	4	Tahun	1,345,377,339	80.00	458.04	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana Transport Aparatur dalam Proses Percepatan Pelaksanaan Tugas	5	tahun	2,882,640,000	3	tahun	1,548,749,131	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Tahun	780,148,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.00	Tahun	781,063,041	100.00	100.12	4	Tahun	2,329,812,172	80.00	80.82	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor sebagai Aset Daerah	5	tahun	1,019,960,000	3	tahun	931,593,750	Rehabilitasi Sdang/Berat Rumah Gedung Kantor	1	Tahun	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.00	Tahun	393,488,298	100.00	112.43	4	Tahun	1,325,082,048	80.00	129.92	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																		tdr	tdr				tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Tahun	54,600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.00	Tahun	30,270,742	100.00	55.44	1	Tahun	30,270,742	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya SDM Aparatur di dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	5	tahun	424,750,000	2	tahun	161,185,940	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Tahun	54,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.00	Tahun	30,270,742	100.00	55.44	3	Tahun	191,456,682	60.00	45.08	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Penyediaan jasa dokumentasi kantor	Terlaksananya publikasi dinas tentang arah kebijakan pembangunan	5	tahun	1,178,900,000	3	tahun	549,391,000												3	tahun	549,391,000	60.00	259.34	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Memberikan rasa kenyamanan di dalam rutinitas kegiatan aparatur	5	tahun	5,552,800,000	3	tahun	3,767,638,000												3	tahun	3,767,638,000	65.00	350.25	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpeliharanya tingkat kedisiplinan aparatur	750	Stel	627,000,000	646	Stel	369,466,900												646	Stel	369,466,900	86.13	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terpeliharanya Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	5	tahun	137,600,000	3	tahun	79,400,000												3	tahun	79,400,000	60.00	265.55	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					17	Unit	590,300,000												17	Unit	590,300,000	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Kelancaran Operasional Pelayanan Publik				3	unit	1,524,000,000												3	unit	1,524,000,000	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
																		98.53	221.97						74.77	132.64	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
																		ST	ST						S	ST	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1690	Jumlah	159,301,703,570	5,898	Jumlah	40,051,519,917	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1408	Jumlah	4,570,000,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	520	Jumlah	3,780,898,809	tdr	82.73	6,418	Jumlah	43,832,418,726	379.76	27.52	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
										Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1370	orang	4,570,000,000	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	520	orang	3,780,898,809	37.96	82.73	520	orang	3,780,898,809	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja				4,908	orang	13,276,008,567	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	42010	OrangOrang	2,440,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	240	OrangOrang	2,087,900,698	0.06	85.57	sts	sts	15,363,909,265	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan							Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
							Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	300,6	Orang,Pa	2,130,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	280	Orang,Pa	1,692,998,111	93.15	79.48	280	Orang,Pa	1,692,998,111	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	20	Lokasi	-		-	Lokasi	-	-	-	-	Lokasi	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
							Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	103	LPK,Orang	-		-	LPK,Orang	-	tdr	-	LPK,Orang	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	280	Orang	-		-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	280	Orang	-		-	Orang	-	tdr	-	Orang	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	58	Orang	-		-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	58	Orang	-		-	Orang	-	tdr	-	Orang	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian dan Instruktur BIK		1 Jumlah instruktur pemerintah yang ditingkatkan kompetensinya	60	Orang	840,000,000	90	Orang	1,021,057,200								90	Orang	1,021,057,200	150.00	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			2 Jumlah instruktur swasta yang ditingkatkan kompetensinya	30	orang	390,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			3 Jumlah tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya	30	orang	390,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			4 Jumlah instruktur yang mendapat sertifikat kompetensi	60	orang	840,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Peningkatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi		1 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1682	orang	12,237,000,000	100	org	2,693,567,289								100	org	2,693,567,289	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			2 Jumlah lulusan pelatihan kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	1682	orang	6,543,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri		1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri	180	orang	1,850,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri	120	orang	5,074,314,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			3 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	180	orang	670,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
	Pengembangan sistem dan peningkatan sertifikasi kompetensi profesi		1 jumlah lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi	6	lembaga	750,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			2 jumlah tempat uji kompetensi sesuai standar kompetensi	6	lembaga	750,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			3 jumlah asesor yang bersertifikasi dan kompeten sesuai bidangnya	30	orang	560,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
			4 jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	300	orang	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Tata Kelola kelembagaan	1 jumlah lembaga pelatihan yang ditingkatkan mutu pengelolannya	120	lembaga	2,120,751,737	1	Lembaga	48,000,000	-	-	-	-	-	-	1	Lembaga	48,000,000	0.03	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh						
			2 jumlah lembaga pelatihan yang diakreditasi	60	lembaga	1,650,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas	1 jumlah tenaga kerja yang meningkatkan produktivitasnya	500	org	1,406,070,400	580	org	495,581,000	-	-	-	-	-	-	580	org	495,581,000	116.00	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			2 jumlah lembaga yang menerapkan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas	60	%	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			3 jumlah lembaga yang diukur produktivitasnya	60	%	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			4 jumlah calon wirasaha yang dilatih	600	orang	3,116,029,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			5 jumlah perusahaan yang meningkatkan produktivitasnya	60	%	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			6 jumlah kader produktivitas yang kompeten	500	orang	1,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			7 jumlah unit usaha yang dibina	60	%	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			8 jumlah institusi/lembaga yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	60	%	856,288,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Kualitras dan Produktivitas tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			Meningkatnya ketrampilan bagi calon tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			Jumlah Pencari Kerja yang Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			jumlah orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Terlaksananya Peningkatan SDM Ketenagakerjaan dan Penyusunan Roadmap Pengembangan BLK Program 3 R	100	orang	990,241,000	100	org	217,048,709	-	-	-	-	-	-	100	org	217,048,709	sts	100.00	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
			Terlaksananya Peningkatan SDM Ketenagakerjaan dan Penyusunan Roadmap Pengembangan BLK Program 3 R	-	-	-	1	dok	281,463,163	-	-	-	-	-	-	1	dok	281,463,163	ttdr	ttdr	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Kompetensi III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja (BLK)	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Workshop Pelatihan Kerja sesuai bidang kompetensi III	21	BLK	78,121,391,508	11	BLK	21,457,171,889	-	-	-	-	-	-	11	BLK	21,457,171,889	52.38	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan dan Instruktur	-	-	-	120	org	561,622,100	-	-	-	-	-	-	120	org	561,622,100	ttdr	ttdr	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
Rata-rata capaian kinerja (%)										15.53	55.02	79.80	8.00	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh																

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
		Pengembangan kelembangan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Pembangunan Pagar BLKI Kah Aceh Utara																	-	-		tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			Tersedianya pelayanan peningkatan kewirausahaan			2	tahun	2,948,566,029									2	tahun	2,948,566,029			tdr	253.72	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			Tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan konsultasi produktivitas			-	-	-									-	-	-			tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Penyelesaian informasi bursa tenaga kerja	Terciptanya Peluang Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	140	orang	1,209,130,000	100	orang	898,489,459							100	orang	898,489,459			71.43	274.10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Terciptanya Peluang Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja			-	-	-								-	-	-				tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terlaksananya Pelatihan Sumberdaya Vokasi dan Sertifikasi			-	-	-								-	-	-				tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			Terlaksananya Pelatihan Sumberdaya Vokasi dan Sertifikasi			-	-	-								-	-	-				tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Kerjasama Pelatihan dengan dunia usaha dan industri	Terlaksananya proses program pemagangan berbasis pengguna	320	orang	1,729,475,000	30	orang	172,355,000							30	orang	172,355,000			9.38	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Terlaksananya proses program pemagangan berbasis pengguna			-	-	-								-	-	-				tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja berbasis masyarakat	Terlaksananya Penyediaan Pekerjaan Sementara melalui system Padat Karya Infrastruktur	1280	orang	7,330,504,000	540	orang	5,613,274,732							540	orang	5,613,274,732			42.19	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya	1092	orang	12,194,535,345	-	-	-							-	-	-				sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			Jumlah pelatihan ketrampilan kerja berbasis ekonomi produktif bagi masyarakat	630	orang	7092504315	-	-	-							-	-	-				sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
			Pembinaan IKM	432	orang	5,065,097,674	-	-	-							-	-	-				sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pengembangan Sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur padat pekerja				1	tahun	5,796,383,245							1	tahun	5,796,383,245			tdr	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																								Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
																								Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
																								Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
																								Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pemutusan hubungan kerja	5	Kasus	28,165,218,901	47	Kasus	20,227,415,671	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja	6	Kasus	1,500,000,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Kasus			47	Kasus	20,227,415,671	940.00	71.82	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
											Pengesahan Peraturan Persahabatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya sistem perjanjian kerja	2	Akt	350,509,124	Pengesahan Peraturan Persahabatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
											Pengesahan Peraturan Persahabatan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya sistem perjanjian kerja	1	Akt	184,081,074	Pengesahan Peraturan Persahabatan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	1	Akt	177,785,840	100.00	96.58	1	Akt	177,785,840	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
											Penyeleenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	1	Akt	166,428,050	Penyeleenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1	Akt	83,724,900	100.00	50.31	1	Akt	83,724,900	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K	S	Rp.	K	S	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.		K	S	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi		402,686,942		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi			tdr													Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
							Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pencegahan perselisihan secara mediasi	1	Akt	202,234,955	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Akt	170,373,989	100.00	84.25	1	Akt	170,373,989	tdr	tdr					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
							Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Mendata organisasi pengusaha dan SPSS	1	Akt	139,709,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	1	Akt	166,182,600	100.00	118.95	1	Akt	166,182,600	tdr	tdr					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
							Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	enciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui LKS Tripartit	1	Tahun	60,742,987	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	1	Tahun	29,015,000	100.00	47.77	1	Tahun	29,015,000	tdr	tdr						Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		746,803,934		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			tdr													Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
							Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	terciptanya upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak	1/3	Thn/Akt	151,277,639	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	#VALUE!	Thn/Akt	119,750,769	tdr	79.16	#VALUE!	Thn/Akt	119,750,769	tdr	tdr						Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
							Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	menyampaikan regulasi mengenai kewajiban pengusaha untuk membentuk struktur dan skala upah di perusahaan	3	Akt	595,526,295	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	3	Akt	427,053,540	100.00	71.71	3	Akt	427,053,540	tdr	tdr						Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Tata kelola kelembagan dan kerjasama hubungan industrial	1 jumlah pelaku HI yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi	150	orang	600,000,000	442	orang	291,886,005								442	orang	291,886,005	294.67	-						Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			2 jumlah peserta yang mengikuti forum/konultasi/dialog dan penyebar lusan tentang HI dan penguatan kelembagan	150	orang	450,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			3 jumlah pengurus SP/SS yang diberdayakan	21	orang	90,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			4 jumlah anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang diberdayakan	54	orang	150,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			5 jumlah pengurus dan anggota organisasi pengusaha yang diberdayakan	12	orang	60,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			6 jumlah LKS Bipartit dan Tripartit yang terbentuk	12	orang	60,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Peningkatan Penerapan sistem penggabahan berbasis struktur, skala upah dan produktivitas	Jumlah Pelaku HI yang mendapatkan Pelatihan tentang pengupahan	205	orang	600,000,000	120/22	Perusahaan/kab/kota	498,561,997								120/22	Perusahaan/kab/kota	498,561,997	sts	-						Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Penyusunan Struktur Upah dan Skala Upah	34	orang	105,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Pejabat HI dan Pegawai Teknis HI yang mendapatkan Pelatihan Struktur dan skala Upah	15	orang	45,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah anggota Dewan Pengupahan yang diberdayakan	66	orang	150,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perusahaan besar yang diaudit kondisi Hubungan industrial	15	%	45,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah pelaku Hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan penyelesaian perselisihan	150	orang	450,000,000	-	-	-								-	-	-	-	sts	-					Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K			K			Sandi			Menjadi			K			K		K			K								
				Rp.			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Target	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	Vol	Satuan		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Perjanjian Bersama yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	16	PB	45,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pengelolaan, Persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi	Jumlah Pengusaha yang mendapatkan bimbingan teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)	150	orang	450,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			jumlah Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan bimtek Pembuatan PPK	150	orang	450,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Pelaku Hubungan Industrial yang mengikuti Bimtek tentang peningkatan Kesejahteraan Pekerja /Buruh	150	orang	450,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Pelaku Hubungan Industrial yang mengikuti bimtek tentang Kesetaraan tempat kerja	150	orang	450,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Pelaku Hubungan Industrial yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Hubungan Kerja	150	orang	450,000,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Bidang Norma Ketenagakerjaan				2	tahun	5,646,589,733												2	tahun	5,646,589,733	tdr		181.92	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyalidhan Norma Ketenagakerjaan					23	Kab/Kota	803,656,134												23	Kab/Kota	803,656,134	tdr		tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak					-	-	-												-	-	-	tdr		tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					69	Perusahaan	204,157,815												69	Perusahaan	204,157,815	tdr		tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga kerja					-	-	-												-	-	-	tdr		tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
																												Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																												Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																												Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																												Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
																												Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pemutusan hubungan kerja	5	Kasus	28,165,218,901	47	Kasus	20,227,415,671											-	kasus	tdr	tdr	47	kasus	20,227,415,671	940.00	71.82	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		n/a (program n/a di RPJMA)	Program Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	terlaksananya ketenagakerjaan di perusahaan melalui pengawasan dan pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Pemutusan hubungan kerja									tdr	tdr	47	Kasus	20,227,415,671	940.00	71.82	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
											Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
											Penyelenggaraan Ketenagakerjaan										tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi			K			K		K			K				
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rp.		Rp.			Rp.		Rp.			Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			K	Rp.
									Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma jaminan sosial tenaga kerja, mematuhi norma kerja perempaan dan norma kerja anak dan Pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	1346	Perusahaan	910,395,045	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	867	Perusaha	790,993,073	64.41	86.88	867	Perusaha	790,993,073	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh			
		Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlaksananya Prosedur Ketenagakerjaan dan Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				9	sts	4,076,509,609	Pengadilan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penyelesaian Kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan	2	Kasus	317,120,300	Pengadilan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	Kasus	54,322,593	-	17.13	sts	sts	4,130,832,202	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang mendapatkan Sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial	150	orang	450,000,000	-	-	-	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pekerja yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Kualitas Kesehatan di Tempat Kerja dan Perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3, layanan Uji K3, Pekerja yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Kualitas Kesehatan di Tempat Kerja dan Perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3, layanan Uji K3, Hygiene perusahaan dan lingkungan kerja, Perusahaan yang mematuhi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	25/12	Tenaga Kerja,Perusahaan	472,483,855	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Tenaga Kerja,Perusahaan	807,342,936	tdr	170.87	sts	sts	807,342,936	sts	179.41	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi antar lembaga dalam perluasan kepesertaan program jaminan sosial	150	orang	450,000,000	-	-	-															sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
		Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah Pembinaan Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	4249	%	3,375,595,000	-	-	-																sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
			Jumlah Pembinaan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	96	aparatur	247,080,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Pembinaan kelembagaan bidang pengawasan ketenagakerjaan	96	aparatur	246,030,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang ditingkatkan kapasitasnya (Upgrading)	93	orang	550,350,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Kasus Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	6	kasus	752,880,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Jumlah Perusahaan penerima pengurangan penerapan perlindungan tenaga kerja perempuan	207	%	327,690,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kelengkapan, Keahlian dan SMK3	100	%	694,760,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	100	%	470,960,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	125	%	391,405,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Nihil Kecelakaan Kerja	207	%	327,690,000	-	-	-																	sts	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
			Jumlah Jejaring dan Kerjasama K3	N/A		587,815,000	-	-	-																	tdr	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.						
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan					Vol	Satuan	Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
			Jumlah Promosi dan Sosialisasi K3	N/A		421,505,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
		Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan	N/A	%	690,540,000	-	-	-																			Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh					
																												Rata-rata capaian kinerja (%)	32.21	91.63	#DIV/0!	11.96	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
																												Predikat kinerja	SR	ST	#DIV/0!	SR	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Urusan Pilihan				547,582,566,523			60,682,247,013	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13,085,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	7,160,673,512	tdr	54.72	-	-	67,842,920,525	tdr	12.39	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh										
		Bidang Urusan Transmigrasi				547,582,566,523			60,682,247,013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	13,085,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	7,160,673,512	tdr	54.72	-	-	67,842,920,525	tdr	12.39	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh										
	Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	%tase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	99	%	232,509,161,488	95.50	%	20,227,415,671	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250,000,000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	93	%	223,171,200	94.44	89.27	188	%	20,450,586,871	189.95	8.80	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh										
										Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1200	Ha	250,000,000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1,200	Ha	223,171,200	100.00	89.27	1,200	Ha	223,171,200	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								
										Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	3	Kawasan	100,000,000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	3	Kawasan	90,508,500	100.00	90.51	3	Kawasan	90,508,500	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								
										Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	2	Kawasan	-	-	Kawasan	-	-	tdr	-	Kawasan	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh									
										Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5	Dok	150,000,000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5	Dok	132,662,700	100.00	88.44	5	Dok	132,662,700	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								
										Penastabsahan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1200	Ha	-	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh									
																												Rata-rata capaian kinerja (%)	66.67	89.48	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
																												Predikat kinerja	S	T	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
	Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	%tase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	99	%	232,509,161,488	95.50	%	20,227,415,671	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1,130,000,000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	86	%	2,497,388,362	87.72	221.01	181	%	22,724,804,033	183.29	9.77	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh										
										Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	SP	1,130,000,000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	SP	2,497,388,362	-	221.01	-	SP	2,497,388,362	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								
										Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Tahun	500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Tahun	461,481,350	100.00	92.30	1	Tahun	461,481,350	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								
										Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	5	SP	630,000,000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	5	SP	2,035,907,012	100.00	323.16	5	SP	2,035,907,012	tdr	tdr	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh								

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K			K		K			K				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Target	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		K	Rp.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
																											Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
																											Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
																											Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
																											Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
		Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya penanaman lahan 1 dan 2 di kawasan transmigrasi	162,25 0000	KK/batang	1.137.500,000	1	tahun	7.321.232,729												1	tahun	7.321.232,729	sts	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan jalan kawasan transmigrasi	127	unit	43.676.059,389	1	tahun	34.816.705,085													1	tahun	34.816.705,085	sts	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Terseledinya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi		-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Sarana dan Prasarana Transmigrasi		-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan		-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan		-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan		-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembinaan dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi	Terseledinya Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	N/A		1.100.000,000	-	-	-													-	-	-	tdr	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Perencanaan pengembangan dan pembangunan pemukiman transmigrasi	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Lebih Terarah dan Strategis di Permukiman Transmigrasi	4	Dokumen	2.540.132.500	-	-	-													-	-	-	sts	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Perencanaan pengembangan dan pembangunan pemukiman transmigrasi	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Lebih Terarah dan Strategis di Permukiman Transmigrasi	14	lokasi	1.724.117.000	3	lokasi	733.816.000													3	lokasi	733.816.000	21,43	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Masyarakat Permukiman Transmigrasi	140	KK	38.463.915,468	80	KK	30.632.994,683													80	KK	30.632.994,683	57,14	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan dan pengembangan prasarana masyarakat permukiman transmigrasi	15	SP	68.150.051,795	-	-	-													-	-	-	sts	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penataan dan Persebaran penduduk	Terlaksananya Penempatan Transmigran di Lokasi Transmigrasi	380	KK	7.991.714,000	20	KK	935.806,967													20	KK	935.806,967	5,26	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penataan dan Persebaran penduduk	Terlaksananya Penempatan Transmigran di Lokasi Transmigrasi	140	KK	3.384.485,000	82	KK	1.684.846,350													82	KK	1.684.846,350	58,57	-		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimungkinkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi dan	227	KK	12.232.993,342	1	tahun	450.246,000													1	tahun	450.246,000	sts	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Penggerakan dan penempatan transmigrasi	terlaksananya penempatan transmigran di lokasi transmigrasi	127	KK	7.318.249,200	1	tahun	1.684.950,624													1	tahun	1.684.950,624	sts	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
		Pelatihan Transmigrasi	terlathnya ketrampilan usaha tani, jasa dan industri penduduk/transmigran yang dimungkinkan	360	KK	2.502.242,888	1	tahun	1.581.191,402													1	tahun	1.581.191,402	sts	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K			K			Nama Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K			K		K				K				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31
			Jumlah Satuan Permukiman/KPB/Kawasan transmigrasi yang mendapatkan layanan sosial budaya	15	KK	11,029,318,989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Satuan Permukiman/KPB/Kawasan transmigrasi yang lembaga sosial budayanya berfungsi	15	KK	5,277,162,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pelayanan Pertanahan	Menciptakannya kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah	N/A		2,931,630,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Jumlah Bidang Tanah transmigrasi yang difasilitasi Pengurusan Sertifikatnya	3000	bidang	888,855,000	-	bidang	688,659,615	-	-	-	-	-	-	-	-	bidang	688,659,615	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi Penanganannya	6	lokasi	1,674,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pelatihan Transmigrasi	Terlathnya Keterampilan Usaha Tani, Jasa dan Industri Penduduk/Transmigran yang dimukimkan	420	orang	4,020,400,000	170	orang	1,288,806,722	-	-	-	-	-	-	-	-	170	orang	1,288,806,722	40.48	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pelatihan Transmigrasi	Terlathnya Keterampilan Usaha Tani, Jasa dan Industri Penduduk/Transmigran yang dimukimkan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di kawasan transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman/KPB/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan Sarana dan Prasarannya	15	kawasan	11,258,400,000	3	Kawasan	1,911,267,264	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Kawasan	1,911,267,264	sts	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Satuan Permukiman/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan	15	kawasan	1,250,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah Satuan Permukiman/KPB/Kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengalihan pengembangannya	15	kawasan	1,780,671,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Jumlah KPB yang sesuai dengan tingkat perkembangannya	15	kawasan	7,656,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Promosi dan Kemitraan	Jumlah lembaga dan Kelompok Masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi	6	lembaga	480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	90	%	12,803,135,125	93	%	20,227,415,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
		Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan mobilitas penduduk	1. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	12	Dokumen	3,000,000,000	13	sts	2,952,164,709	-	-	-	-	-	-	-	-	13	sts	2,952,164,709	sts	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	180	Laporan	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			3. Data, Informasi dan Humas	6	Buku	2,150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran				17/0	dokumen/ orang	1,192,937,460	-	-	-	-	-	-	-	-	17/0	dokumen	1,192,937,460	tdr	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan				48	Laporan	194,084,997	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Laporan	194,084,997	tdr	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
			Data, Informasi dan Humas				2	kegiatan/buku	627,383,713	-	-	-	-	-	-	-	-	2	kegiatan,	627,383,713	tdr	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh				
														Rata-rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	19.47				79.82	52.10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh							

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			K			Rp.				K			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																						
																																	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh							
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				166,214,108,195						34,136,647,147			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							20,310,259,333											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH							
		Usuran Wajib Non Pelayan Dasar				166,214,108,195						34,136,647,147			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20,310,259,333											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
		Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				166,214,108,195						34,136,647,147			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							20,310,259,333											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
						120,466,534,693						10,600,654,675			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13,196,867,828											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	111,371,170,532	96.67	%	5,590,352,693						Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	557,700,000	133.33	%	284,736,800						Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	n/a	%																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	678,020,000	85.00	%	178,787,600						%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a	%																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	100	%	340,200,340	40.00	%	167,887,265						Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	7,519,443,821	93.33	%	4,378,890,317						Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		%																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
															Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	477,831,060																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh					
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	Jumlah laporan kerja SKPA	13	set	340,200,340	6	dok	35,674,000						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	12	Bulan	74,270,000																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh					
															Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12	Bulan	403,561,060																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh					
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55	ASN	8,045,151,642																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi			K			K			K						
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			Rp.			Rp.						
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Tolak Ukur	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	55	ASN	8,045,151,642	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	7,194,643,087	sts	89.43	12	bulan	7,194,643,087	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Aparatur	12	Bulan	64,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	bulan	10,000,000	sts	15.50	6	bulan	10,000,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya kompetensi teknis aparatur II	100	%	671,560,000	20	orang	178,787,600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12	Bulan	64,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	bulan	10,000,000	sts	15.50	sts	sts	188,787,600	sts	28.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya Penyediaan Administrasi Umum	12	Bulan	1,505,989,335	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	bulan	1,317,593,244	sts	87.49	6	bulan	1,317,593,244	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100	%	186,475,000	33	Bulan	81,583,350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	70,784,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	40,478,250	sts	57.19	45	bulan	122,061,600	sts	65.46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	200,000,000	-	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Penyediaan Administrasi Umum	12	Bulan	368,710,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	unit	396,812,581	sts	107.62	sts	sts	396,812,581	sts	198.41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	151,153,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	113,616,000	sts	75.17	12	bulan	113,616,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pengisian Tabung Gas dan Tabung Kebakaran	12	Bulan	180,416,075	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	150,614,000	sts	83.48	12	bulan	150,614,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100	%	389,601,120	36	Bulan	200,547,227	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	75,556,260	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	80,295,060	sts	106.27	48	bulan	280,842,287	sts	72.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Ragam bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	%	77,000,000	36	Bulan	42,456,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12	Bulan	17,640,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	-	14,664,000	sts	83.13	sts	sts	57,120,000	sts	74.18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100	%	2,577,110,148	36	Bulan	1,018,143,299	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Luar dan Dalam daerah	12	Bulan	641,730,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	521,113,353	sts	81.20	48	bulan	1,539,256,652	sts	59.73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				660,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	-	383,567,000	tdr	58.12	1	-	383,567,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Fasilitas Pendukung dalam Kelancaran pekerjaan	100	%	203,250,000	5	unit	49,100,000	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	3	Paket	250,000,000	Pengadaan Mebel	2	-	183,167,000	sts	73.27	sts	sts	232,267,000	sts	114.28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan Pembangunan Balai serbaguna dan Kartin	2	Paket	410,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	200,400,000	sts	48.88	1	-	200,400,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,698,570,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	bulan	1,457,268,143	tdr	85.79	6	bulan	1,457,268,143	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	%	51,400,000	34	Bulan	19,887,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	11,990,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	-	7,071,000	sts	58.97	sts	sts	26,958,000	sts	52.45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%	1.422.000,000	36	Bulan	453.088.319	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	317.220,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	1.414.400,893	sts	44.59	48	bulan	594,529,212	sts	41,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan Jasa Ho	12	Bulan	1.369,360,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1.308,756,250	100.00	95.57	12	bulan	1.308,756,250	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				744,825,791	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	bulan	483,942,000	tdr	64.97	6	bulan	483,942,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas	100	%	109,850,000	36	unit	41,677,270	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Dinas/operasional	12	Bulan	449,925,000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	262,961,000	100.00	58.45	12	bulan	262,961,000	sts	239,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan Gedung Kantor	100	%	93,000,000	2	tahun	42,596,000	Pemeliharaan Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12	Bulan	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	6	-	7,750,000	sts	155.00	sts	sts	50,346,000	sts	54,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	unit	123,400,791	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	bulan	112,592,000	sts	91.24	6	bulan	112,592,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	166,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	100,639,000	100.00	60.44	12	bulan	100,639,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	%	290,853,155	33	Bulan	165,722,906																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Penyediaan makanan dan minuman tamu dan peserta rapat koordinasi	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan peserta rapat koordinasi	100	%	550,940,000	36	Bulan	214,205,000																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Pembayaran Jasa kantor	100	%	6,195,821,359	36	Bulan	3,363,042,322																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian olah raga beserta perlengkapannya	100	%	557,700,000	339	orang	284,736,800																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya	100	%	557,700,000	-	-	-																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya balai serbaguna Gedung Kantor Pelaksana teknis Kegiatan	100	%	3,044,502,071	7	pkt	1,451,064,000																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
			Terbangunnya interior P2TP2A	-	-	-	-	-	-																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
			Terbangunnya Interior Ruang Laktasi DPPPA	-	-	-	-	-	-																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Fasilitas Kendaraan	100	%	1,750,000,000	3	unit	1,022,100,000																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung dalam Kelancaran pekerjaan	100	%	200,000,000	-	-	-																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
				K			Rp.			K			Rp.			Sandiuran			Menjadi			K		Rp.		K			Rp.														
				Vol	Satuan		Rp.	Vol	Satuan		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
													Tolok Ukur	TARGET			Vol	Satuan	Vol	Satuan											Vol		Satuan										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																									
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Pendukung dalam Kelancaran pekerjaan	100	%	191,000,000	9	Unit	98,184,500												9	Unit	98,184,500	sts	51.41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																	
		Pengadaan Komputer	Tersedianya Fasilitas Pendukung dalam Kelancaran pekerjaan	100	%	215,000,000	7	unit	95,867,000													7	unit	95,867,000	sts	44.59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan gedung	100	%	355,000,000	2	tahun	484,172,000													2	tahun	484,172,000	sts	136.39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perawatan dan Operasional Kendaraan Dinas	100	%	1,226,188,750	3	tahun	758,066,230													3	tahun	758,066,230	sts	61.82	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kerja	100	%	20,353,000	1	tahun	20,331,500													1	tahun	20,331,500	sts	99.89	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Kerja kantor	100	%	320,500,000	3	tahun	224,995,000													3	tahun	224,995,000	sts	70.20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Tersedianya pemeliharaan Taman	100	%	142,900,000	3	tahun	64,692,587													3	tahun	64,692,587	sts	45.27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perbaikan dan Operasional Kendaraan Dinas	100	%	210,900,000	1	tahun	42,000,000													1	tahun	42,000,000	sts	19.91	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
		Kegiatan pembinaan kelembagaan	Tersedianya Kegiatan kelembagaan	100	%	151,450,000	2	keg	25,721,500													2	keg	25,721,500	sts	16.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																
																																					Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	76.64	#DIV/0!	53.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																																						Predikat kinerja	ST	T	#DIV/0!	R	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Menurunkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	1900	Jumlah	8,742,727,263	1,293	Jumlah	2,678,068,885	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) /	90	%	1,100,000,405	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	30	%	589,557,618	33.33	53.60	sts	sts	3,267,626,503	sts	37.38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																	
											Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak /	19	Jumlah			2	Jumlah	10.53			2	Jumlah	-	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																	
											Terbentuk 7 PUSPAGA di Aceh	7	Jumlah		1	Jumlah	14.29			1	Jumlah	-	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																		
											Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan SKPA yang telah dilakukan analisis gender	16	Keg	100,000,116	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	30	SKPA	89,879,650	sts	89.88	30	SKPA	89,879,650	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh																

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.									
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan					Vol	Satuan	Vol			Satuan													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
																														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
																														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
																														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksana Pelatihan Kepemimpinan dan Perempuan Berpolitik			-	-																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
			Meningkatnya Koordinasi dan Kapasitas SKPA/SKP dan Organisasi Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dan terlaksananya pelatihan penguatan ketahanan keluarga	400 orang		809,315,000		152 orang																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya Koordinasi Tim Pengelola Pengembangan Industri Rumah Tangga, Pelaksanaan Sistem Pendataan, Pelatihan Keterampilan Produksi dan Manajemen	1,900 orang		5,348,104,736		sts	sts																						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Terlaksananya pameran hasil karya perempuan dan berpartisipasi pada karavali	10 event		869,250,000		3 event																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah perempuan potensial kader partai yang mendapat pelatihan pendidikan politik	127 orang		704,550,000		140 orang																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	80 %		4,873,936,000		41.67 %																							Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum																												Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
																															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K			K		K			K									
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Tolak Ukur	Vol	Satuan	Rp.		Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.			
				5	6	7	8	9	10		11	12		13																		14	15	
											Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekeerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan dan penanganan KTPA sesuai dengan ISO 9001:2015	12	Bulan	276,498,000	koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekeerasan	100	korban	243,086,720	sts	87.92	100	korban	243,086,720	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
											Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang (Trafficking) dan Kapasitas Perlindungan Hukum Korban Kekeerasan	2	Kab/Kota	554,016,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	50	peserta	371,603,130	sts	67.07	50	peserta	371,603,130	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
											Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Jejaringan dan Pemetaan Wilayah yang dapat terdampak terjadi Trafficking (Perdagangan Orang)	50	Peserta	554,016,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	peserta	371,603,130	200.00	67.07	100	peserta	371,603,130	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh							
											Penyusunan Mekanisme Penanganan KTPA TOT SDM	Penyusunan Mekanisme Penanganan KTPA TOT SDM	4	keg				-	keg		-	tdr	-	keg		tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
											Pelayanan dan Pendampingan KDRT di kab/kota	Pelayanan dan Pendampingan KDRT di kab/kota	50	peserta				-	peserta		-	tdr	-	peserta		tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
											Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan KDRT di dalam Kabupaten Aceh Selatan	192	orang	110,735,000													64	orang	106,834,606	33.33	96.48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
											Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksana Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	100	n/a	55,000,000													100	orang	54,728,230	sts	99.51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
											Pendidikan politik bagi perempuan	Terlaksananya pelatihan pendidikan politik bagi perempuan	127	orang	516,650,000														145	orang	254,982,216	114.17	49.35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
											Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Advokasi dan Sosialisasi Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Penanganan Kasus	870	n/a	1,074,855,000													sts	sts	234,016,811	sts	21.77	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
											Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	192	orang	110,735,000																	sts	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
											Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Tersedianya dokumen standarisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak trainer perlindungan khusus anak untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui mekanisme komunitas aman di gampong	121	orang	1,932,816,000														316	orang	603,241,673	261.16	31.21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
											Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya Pengetahuan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1,150	orang	575,000,000													1,150	orang	542,422,984	100.00	94.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
											Peningkatan kualitas SDM remaja putri	Terlaksananya sosialisasi Kepro, HIV/AIDS, NAPZA dan Bahaya Rokok Bagi Remaja	500	orang	175,000,000													155	orang	159,397,376	31.00	91.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
											Pendidikan politik bagi perempuan	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan/Pelatihan Kepentingan bagi Perempuan dan Pelatihan Pendidikan Politik untuk masyarakat Gampong	127	orang	516,650,000													120	orang	232,817,377	94.49	45.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Tolak Ukur	Vol	Satuan			Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
			Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan (SILPA Otsus)																					tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
																Rata-rata capaian kinerja (%)			66.67	83.46				105.69	58.76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
																Predikat kinerja			S	T				ST	R	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
	Menurunya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	1900	Jumlah	8,742,727,263	1,293	Jumlah	2,678,068,885	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	1600	Jumlah	445,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah	Jumlah	435,553,950	tdr	97.88	1,297	Jumlah	3,113,622,835	68.26	35.61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Komitmen Kab/Kota untuk Pengembangan Industri Rumahan	1	Kab/Kota	145,000,000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	7	-	119,631,550	sts	82.50	7	-	119,631,550	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan korban konflik sosial dan atau pelaku industri rumahan yang mendapatkan pelatihan keterampilan	50	Peserta	145,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	57	bulan	119,631,550	sts	82.50	57	bulan	119,631,550	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tersosialisasinya ketahanan keluarga	1	keg	300,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3	-	315,922,400	sts	105.31	3	-	315,922,400	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapat peningkatan kapasitas ketahanan keluarga	75	Peserta	300,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3	-	315,922,400	sts	105.31	3	-	315,922,400	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
																Rata-rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	93.91				#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
																Predikat kinerja			#DIV/0!	ST				#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) +++ Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	23 & 16	Jumlah Kab/Kota	7,655,470,059	35	Jumlah Kab/Kota	2,998,269,770	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	23/13	Jumlah/Jumlah	228,820,100	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah/ jumlah	Jumlah/ jumlah	196,816,670	tdr	86.01	sts	sts	3,195,086,440	sts	41.74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak	21	Data	228,820,100	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	7	Data	196,816,670	33.33	86.01	7	Data	196,816,670	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah SKPA yang berkontribusi aktif dalam Pengumpulan dan Pengolahan data Gender dan Anak	20	SKPA	200,320,100	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	28	SKPA	169,316,670	140.00	84.52	28	SKPA	169,316,670	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
										Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Profil Gender Tematik	1	Profil	28,500,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	Profil	27,500,000	100.00	96.49	1	Profil	27,500,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh				
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	15797	orang	3,332,704,354	1,552	orang	1,075,945,883											1,552	orang	1,075,945,883	9.82	32.28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan					Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Informasi tentang pengesahan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,597	orang	3,332,704,354	2,035	orang	1,265,149,870									2,035	orang	1,265,149,870	127,43	37,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya FGD Tim Teknis Sistem Informasi Gender dan Anak Aceh	23	Kab/Kota	645,405,000	365	orang	350,374,617									365	orang	350,374,617	sts	54,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya pelatihan Komorosi Hak Anak dan Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1,597	orang	3,332,704,354	680	orang	292,039,400									680	orang	292,039,400	42,58	8,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan peningkatan gugus tugas KLA dan Forum Anak	8,476	orang	3,374,200,705	61	orang	14,760,000									61	orang	14,760,000	0,72	0,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
		Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	jumlah kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak	3	Dok	139,315,000	-	-	-									-	-	-	sts	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
																					120,00	90,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
																							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) +++	23 & 16	Jumlah	7,655,470,059	23	Jumlah	2,998,269,770	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) /	23	Jumlah	3,575,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3	Jumlah	2,132,032,620	13,04	59,64	26	Jumlah	5,130,302,390	tdr	67,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	16	Kab/Kota		12	Kab/Kota			Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	13	Jumlah			-	Jumlah	-	-	sts	Jumlah	-	sts	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
										Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah stake holder, masyarakat, dunia usaha, forum anak dan media yang bekerja untuk pemenuhan hak anak	23	Kab/Kota	2,309,020,000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	23	peserta	2,132,032,620	sts	92,33	23	peserta	2,132,032,620	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota Layak Anak	1	Kab/Kota	2,267,480,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	15	Kab/Kota	2,075,799,420	1,500,00	91,55	15	Kab/Kota	2,075,799,420	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Menguatnya kelembagaan pemenuhan Hak/Anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota	53	Peserta	41,540,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	70	peserta	56,233,200	tdr	135,37	70	peserta	56,233,200	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah stake holder, masyarakat, dunia usaha, forum anak dan media yang bekerja untuk pemenuhan hak anak	23	Kab/Kota	1,265,900,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	-	198,392,960	sts	15,67	1	-	198,392,960	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
										Meningkatnya Penyebaran informasi terkait pemenuhan hak anak		213	Peserta							tdr				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
										Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitas pemberi layanan Pemenuhan Hak Anak	213	Peserta	1,247,980,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	152	peserta	1,788,429,600	sts	14,33	152	peserta	1,788,429,600	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
										Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Adanya Publikasi KIE terkait pemenuhan hak anak	2	Paket	18,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	paket	19,550,000	sts	108,61	1	paket	19,550,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandi		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.									
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
																											Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
																											Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh						
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80	%	4,873,936,000	41.67	%	759,252,888				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80	%	590,555,000				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50	%	558,181,330	62.50	94.52	92	%	1,317,434,218	114.58	27.03	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
														cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	%						50	%	100.00		50	%	-	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
														Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota terkait penanganan dan pencegahan KTA yang didasirasi provinsi	3	Kab/Kota	159,225,000				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	bulan	160,519,430	sts	100.81	3	bulan	160,519,430	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang diberi peningkatan kapasitas dalam pencegahan KTA	90	Peserta	159,225,000				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	6	bulan	160,519,430	sts	100.81	6	bulan	160,519,430	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil lembaga penyelenggara perlindungan anak	9	Dok	431,330,000				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	bulan	397,661,900	sts	92.19	6	bulan	397,661,900	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
														Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan KPFAA terhadap lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak	12	Bulan	431,330,000				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	12	bulan	397,661,900	sts	92.19	12	bulan	397,661,900	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
																														Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
																														Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh			
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%tase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	100	%	3,203,306,858	60.00	%	10,664,809,386																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
				23	Jumlah																										Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
				7	Jumlah																										Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
		Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terpenuhnya kebutuhan Administrasi dan Fasilitas P2TP2	949	n/a	6,477,392,450	3	tahun	2,784,930,348																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandungan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K			K	Rp.	K			K	Rp.			
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		Tolak Ukur	Target			Vol	Satuan	Rp.			Vol	Satuan	Rp.			Vol	Satuan	
										Vol		Satuan	Rp.	Vol				Satuan	Rp.				Vol	Satuan			
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan sosialisasi konsep Puspaga				-	-	-															tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi forum data dan anak				-	-	-															tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Advokasi PUG bagi perempuan	Terciptanya pemahaman tentang PUG dan PPRG untuk SKPK				-	-	-															tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Advokasi PUG bagi perempuan	Terciptanya pemahaman tentang penguatan PUG dan PPRG untuk SKPK				-	-	-															tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Advokasi PUG bagi perempuan	Terciptanya pemahaman tentang penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk SKPK Kabupaten/kota dan meningkatkan koordinasi dan kelembagaan PUG dan PPRG di SKPA Aceh	365 orang		1.004.078.600	438 orang		814.627.272							438 orang		814.627.272	120,00		81,13					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Penguatan Kapasitas Pelopor dan Pelopor perempuan dan Anak	949 orang		6.477.392.450	sts	sts	2.453.268.654							sts	sts	2.453.268.654	sts		37,87					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Terusunnya nya Buku Data Gender dan Anak dan Terusunnya Buku Saku PPA	82		741.758.622	sts	sts	423.743.717							sts	sts	423.743.717	sts		57,13					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya rapat gugus tugas KIA dan Rakortek Pemenuhan hak anak, pelatihan forum dan fasilitator anak, sistem perlindungan anak	50,92 orang		2.730.857.633	sts	sts	1.077.543.194							sts	sts	1.077.543.194	sts		39,46					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya FGD evaluasi pelaksanaan pembangunan PP dan PA	598 orang		829.350.000	220 orang		323.265.500							220 orang		323.265.500	36,79		38,98					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terlaksananya Rapat Teknis SIGA	596 orang		1.787.345.583	202 orang		468.268.510							202 orang		468.268.510	33,89		26,20					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan Program Kegiatan	1 orang		1.648.120.660	169 orang		552.257.947							169 orang		552.257.947	16,900,00		33,51					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Terlaksananya KPPAA sebagai pengawasan terhadap anak	1 orang		3.029.060.000	36 Bulan		1.459.639.346							36 Bulan		1.459.639.346	sts		48,19					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking	Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking	16 orang		1.091.109.205	345 orang		307.264.898							345 orang		307.264.898	2.156,25		28,16					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Fembederdayaan Peempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga	5 Kab/Kota		673.206.705	-	-	-							-	-	-	sts	-	-					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
Rata-rata capaian kinerja (%)												#DIV/0!	#DIV/0!	####		39,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh										
Predikat kinerja												#DIV/0!	#DIV/0!	ST		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh										
DINAS PANGAN				24,386,605,998			11,901,643,471			DINAS PANGAN	39,711,833,268			DINAS PANGAN	37,190,024,411		93,65		49,091,667,882			201,31		DINAS PANGAN			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SDM Non ASN dan Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Bln	1,885,458,148												Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Rata-rata capaian kinerja (%)	14.29	46.89							65.68	38.44	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
														Predikat kinerja	SR	SR							S	SR	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	%tase keterkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	70	%	53,325,051,026	83	%	16,483,693,282	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase keterkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	65	%		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	63	%	466,637,187	97.15	tdr	73	%	16,950,330,469	104.34	31.79	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh			
									Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Kebijakan Dibidang Pendaftaran Penduduk	23	Kab/Kota		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	56	Kab/Kota	278,527,598			56	Kab/Kota	278,527,598	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
									Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Penyusunan Pergab Pedoman Pelayanan Adminiduk Gampong Terlaksananya Rapat Kerja Pendaftaran Penduduk Dengan Didukung Kab/Kota se-Aceh	2	Pergab/Keg	473,398,000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	3	Pergab/Keg	123,280,000	150.00	26.04	3	Pergab/Keg	123,280,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	3	-	64,099,998	tdr	tdr	3	-	64,099,998	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4	Lap	91,147,600	tdr	tdr	4	Lap	91,147,600	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-	125,309,589			0	-	125,309,589	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
														Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	4	Wilayah	125,309,589	tdr	tdr	4	Wilayah	125,309,589	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Bimbingan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	23	-	62,800,000			23	-	62,800,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
														Bimbingan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	4	Dok	62,800,000	tdr	tdr	4	Dok	62,800,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Rata-rata capaian kinerja (%)				150.00	26.04					#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh			
														Predikat kinerja	ST	SR								#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh			
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	%tase keterkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	70	%	53,325,051,026	83	%	16,483,693,282	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase keterkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	65	%		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60	%	485,522,968	91.54	tdr	71	%	16,969,216,250	101.73	31.82	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh			
									Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Kebijakan Dibidang Pencatatan Sipil	23	Kab/Kota		Pelayanan Pencatatan Sipil	56	Kab/Kota	128,915,200			56	Kab/Kota	128,915,200	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
									Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Rapat Kerja Pencatatan Sipil Dengan Didukung Kab/Kota se-Aceh	1	Keg	688,177,570	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	1	Keg	128,915,200	100.00	18.73	1	Keg	128,915,200	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	46	Kab/Kota	207,450,000			46	Kab/Kota	207,450,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
														Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	4	Kebijakan	207,450,000	tdr	tdr	4	Kebijakan	207,450,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46	Kab/Kota	149,157,768			46	Kab/Kota	149,157,768	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan kan Aceh				
														Bimbingan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	4	Kebijakan	51,973,000	tdr	tdr	4	Kebijakan	51,973,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				
														Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	46	Orang	97,184,768	tdr	tdr	46	Orang	97,184,768	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Ususan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Ususan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.									
				Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan								
		Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Tersedianya dan Terpeliharanya 24 Titik Koneksi Jaringan Komunikasi Data DRKA Dengan 23 Kab/Kota Didudicapi di Aceh Serta Tersedianya SDM Pengelola Jaringan Komunikasi Data Kependudukan Terpadu dan Aplikasi SIAK Terpadu	540 / 120	Orang & Titik Koneksi		1,691,080,000		216 & / 48			Orang & Titik Koneksi		208,912,650																216 & / 48	Orang & Titik Koneksi		208,912,650		tdr	12,35	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
		Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Terperuhnya Pengetahuan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bagi Pejabat, Administrator Database dan Operator Dalam Menjalankan Aplikasi SIAK dan KTP-el Didudicapi Kabupaten/ Kota di Aceh Guna Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Informasi Kependudukan untuk Masyarakat dan Instansi Terkait Yang Membutuhkannya	598	Orang		2,865,617,200		368	Orang		668,455,976																	368	Orang		668,455,976		sts	23,33	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membagan Updatng dan pemeliharaan)	Tersedianya Database Kependudukan Yang Up To-Date hasil dari Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Updatng, Pemeliharaan dan Pembersihan Database Kependudukan Aplikasi SIAK Untuk Pengelola Database Kependudukan Didudicapi di 23 kab/kota Aceh dan DRKA	431	Orang		1,446,521,000		223	Orang		329,298,431																	223	Orang		329,298,431		51,74	22,76	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Pembentukan Penataan Sistem Koneksi (Inter-phase tahap awal) NIK	Terpeliharanya Perangak Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Aceh, Perangkat Administrasi Kependudukan DRKA, jaringan Komunikasi Data Kependudukan dan Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD) di Kab/Kota Untuk Memperoleh Data dan Informasi Permasalahan-Permasalahan Serta Solusi di dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	542	Orang		1,877,808,364		197	Orang		490,607,228																	197	Orang		490,607,228		36,35	26,13	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya wawasan dan penyaman perspsi tentang kependudukan	500	Orang		1,697,135,600		292	Orang		742,239,606																	292	Orang		742,239,606		58,40	43,73	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya Buku Laporan Data Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Didudicapi di 23 kab/ Kota di Aceh Sesuai Permenadag Nomor 68 Tahun 2012, Tentang Laporan Penyelengga-raan Administrasi Kependudukan	145	Orang		1,389,184,100		1,032	Orang		643,093,961																		1,032	Orang		643,093,961		sts	46,29	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal dalam rangka Pental-taran Penduduk melalui Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Bimbingan teknik bagi Aparatur penduluaran Penduduk Se-Ach	1,562	Orang		2,929,672,200		433	Orang		736,049,989																	433	Orang		736,049,989		27,72	25,12	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Pengembangan Database Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Database Kependudukan untuk Didudicapi di 23 Kab/Kota, DRKA, dan adanya Buku Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I dan Semester II Serta Terlaksananya Koneksi Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan SKPA dan Instansi Terkait	750	Orang		3,142,263,000		454	Orang		1,387,955,376																	454	Orang		1,387,955,376		sts	44,17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Administrasi Kependudukan dan Penetapan Sipil Men-genal Penduduk Rentan	1,207	Orang		7,424,495,201		356	Orang		1,249,571,073																	356	Orang		1,249,571,073		29,49	16,83	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksananya SDM Aparatur Kependudukan untuk pelaksanaan Penataan Adminduk	1,293	Orang		3,664,830,000		484	Orang		992,413,364																	484	Orang		992,413,364		37,43	27,08	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Tingkat Kab/Kota	565	Orang		2,050,512,064		373	Orang		475,184,410																	373	Orang		475,184,410		66,02	23,17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan di 23 Kab/Kota - Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan 770 ASN	770	Orang		2,987,160,297		363	Orang		1,055,114,736																	363	Orang		1,055,114,736		sts	35,32	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Sandingan			Menjadi			K			K		K				K				
				K		Rp.	K		Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.	K		Rp.	K			Rp.	K		Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol
1				23	Lokasi	2,840,222,400	46	Lokasi	1,088,502,384										46	Lokasi	1,088,502,384	20000	3832	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
				1,036	Orang	2,342,105,000	482	Orang	554,914,763										482	Orang	554,914,763	4653	2369	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
				1,511	Orang	3,348,911,480	531	Orang	1,218,134,455										531	Orang	1,218,134,455	3514	3637	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
				324	Orang	1,950,834,000	589	Orang	610,146,200										589	Orang	610,146,200	18179	3128	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
				1,758	Orang	3,101,702,000	183	Orang	780,409,074										183	Orang	780,409,074	1041	2516	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
				44	SKPA	2,798,624,000	31	SKPA	942,569,787										31	SKPA	942,569,787	7045	3368	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
								3	Rehab Gedung Mobil Pelayanan + Perangkat	2,148,000,000									3	Rehab Gedung Mobil Pelayanan + Perangkat	2,148,000,000	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
																			0			tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
								80	Orang	162,119,819									80	Orang	162,119,819	tdr	tdr	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
																						65.50	29.71	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
																						S	SR	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh					
						132,740,100,002			96,315,088,917	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	36,600,271,300										36,600,271,300	100.00		87,980,507,070	66.28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
						132,740,100,002			96,315,088,917	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA	36,600,271,300										36,600,271,300	100.00		87,980,507,070	66.28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
						132,740,100,002			96,315,088,917	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG MASYARAKAT GAMPONG	36,600,271,300										36,600,271,300	100.00		87,980,507,070	77.69	66.28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
						38,404,533,213			18,155,522,048	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16,661,771,300										34,199,095,924	tdr	205.25			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
				100	%	16,150,386,046	86	%	9,387,204,982	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	n/a										135	%	sts	110	%	9,387,204,982	110.42	58.12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
				100	%	20,073,099,751	155	%	8,198,941,166	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%									105	%	105.00	130	%	8,198,941,166	130.21	40.85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Menjadi			K			K			K								
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	1,031,084,266	100	%	281,341,000										50	%	281,341,000	50.00	27.29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	600,000,000	100	%	2,750,000										50	%	2,750,000	50.00	0.46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagidengan Total Laopran Wajib)	100	%	549,963,150	99	%	285,284,900										135	%	285,284,900	117.00	51.87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	bulan	1,076,319,990						15.00	bulan	1,981,921,912	125.00	184.14	15	bulan	1,981,921,912	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	12	Laporan	443,325,000.00	23	laporan	47,211,200	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	12	Laporan	334,450,990						27	Laporan	567,902,100	225.00	169.80	50	Laporan	615,113,300	416.67	138.75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota peserta Rapat koordinasi, jumlah dokumen rencana kerja tindak lanjut yang disusun, dan jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	23	Kab/Kota	4,299,074,314.00	61	Kab/Kota	2,492,011,789	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	23	kab/kota	741,869,000						39	kab/kota	801,444,072	tdr	108.03	39	kab/kota	801,444,072	sts	18.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan dan administrasi keuangan, serta laporan dan administrasi aset yang disusun	12	Bulan	970,000,000.00	30	Bulan	238,073,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bulan	374,941,219						27	Bulan	612,575,740	225.00	163.38	57	Bulan	850,649,440	475.00	87.70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
										Administrasi Keuangan	12	Bulan	11,031,313,645						15	Bulan	23,127,220,837	125.00	209.65	15	Bulan	23,127,220,837	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Belanja Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	12	Bulan	34,317,340,326.79	36	Bulan	16,303,825,047	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123	orang	10,604,123,202						27	Bulan	23,127,220,837	sts	218.10	63	Bulan	39,431,045,884	525.00	114.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	12	Bulan	27,230,605,600.00	36	Bulan	13,194,051,774										-	Bulan	-	tdr	tdr	36	Bulan	13,194,051,774	300.00	48.45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitisar Realisasi Kinerja SKPD	12	bulan	427,190,443						-	-	-	sts	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123	orang	58,350,000						4.00	-	46,462,038	sts	79.63	4	-	46,462,038	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
		Pengadaan Pakelan Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	596	Stel	484,600,000	746	Stel	171,581,000	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Perlengkapannya	0	buah	58,350,000						-	stel	-	sts	-	-	746	stel	171,581,000	125.17	35.41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Pengembangan SDM Aparatur	Jumlah aparatur DPMG Aceh yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Orang		6	orang	#VALUE!										-	orang	-	tdr	tdr	6	orang	#VALUE!	4.00	#VALUE!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	6	orang	73,764,000						4	orang	46,462,038	sts	62.99	4	orang	46,462,038	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K			Rp.		K			Rp.									
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan		K	Rp.	Vol	Satuan		K	Rp.								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
		Pembangunan gedung kantor	Tersedia sarana dan prasarana pendukung DPMG Aceh	60	Bulan	8,541,376,411	36	Bulan	2,623,478,000																	36	Bulan	2,623,478,000	6000	3071	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedia kendaraan dinas operasional	7	Unit	2,870,000,000	12	Unit	3,316,989,000																	12	Unit	3,316,989,000	17143	11557	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibutuhkan	450	Stel	329,400,000	150	Stel	109,760,000																	150	Stel	109,760,000	3333	3332	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh					
																																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh					
						44,585,211,726			38,190,704,200						2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA																	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh					
															Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong																	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh					
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Partisipasi Masyarakat dalam Gampong	Peningkatan kemasyarakatan gampong yang berfungsi (LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna/Lembaga Pemuda Gampong)	14,210	Jumlah	35,523,260,226	13,959	Jumlah	22,170,638,647					20	%	10,000,000,000	PROGRAM PENATAAN DESA									-			122,649,166	sts	1.23			38,313,353,366	tdr	85.93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	%tase kapasitas aparatur pemerintahan gampong dalam mengelola Pemerintahan Gampong	73	%	9,061,951,500.00	54	%	16,020,065,553					71	%		Persentase kapasitas aparatur pemerintahan gampong dalam mengelola Pemerintahan Gampong									-	%				27	%	16,020,065,553	37.05	176.78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
															Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	Terwujudnya Pemerintahan Gampong yang Mandiri	23	Kab/Kota	10,000,000,000	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	1	Kab/Kot	122,649,166	tdr	1.23	1	Kab/Ko	122,649,166	tdr	tdr					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
															Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran serta imum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong	817	Imum Mukim	5,050,000,000	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	7	mukim	122,649,166	sts	2.43	2,434	imukim	15,321,136,151	107.27	123.12					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
															Fasilitas Kelembagaan Desa Adat	Jumlah aparatur gampong yang dilatih Jumlah Gampong yang mengikuti Lomba Gampong	150/23	Orang/gampong	4,950,000,000																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																											23	Kab/Kota	844,375,000.00	23	Kab/Kota	690,689,947	100.00	81.80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																											223	Orang	857,390,000.00	223	Orang	832,969,063	100.00	97.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																											8	Unit	4,419,174,856.00	16	Unit	4,258,534,400	200.00	96.36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																											60	Keuchik	384,798,000.00	60	Keuchik	320,728,280	100.00	83.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																											8	Unit	9,146,269,000.00	55	Unit	6,401,481,432	687.50	69.99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		
																																		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)									Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020									Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.											
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	Satuan		Vol			Satuan		Vol	Satuan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																									
		Pengembangan Gampong Binaan	Jumlah gampong yang dibina																																		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	Jumlah Lembaga Ekonomi Gampong yang Aktif	1735	Jumlah	10,046,560,570	2,117	Jumlah	6,522,204,213																												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
		Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya		100	%	9,475,631,250	28	%	15,198,486,985																												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh						
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																																								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Sandiangan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rp.			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		Vol	Satuan	Rp.
		Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kab/kota yang berpartisipasi dalam BBRGM, yang dibina lembaga kemasyarakatan dan jumlah anak usia dini tingkat TK/PA yang diberikan bantuan PMS-AS	23	Kab/Kota	9,832,136,500.00	23	Kab/Kota	9,201,065,009							#REF!	kab/kota	1,927,633,064	tdr	tdr	#REF!	kab/kota	11,128,698,073	tdr	113.19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah TP PKK Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan Gerakan 10 program pokok PKK	23	Kab/Kota	3,246,168,800.00	47	Kab/Kota	4,092,952,756							-	kab/kota	-	tdr	tdr	47	kab/kota	4,092,952,756	204.35	126.09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/ Desa (P3MD)	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Program P3MD	23	Kab/Kota	1,453,525,000.00	23	Kab/Kota	1,195,837,250							-	-	67,161,688	tdr	tdr	-	-	67,161,688	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemantauan UPM Rastra	23	Kab/Kota	393,109,000.00	23	Kab/Kota	366,492,652												23	Kab/Kota	366,492,652	100.00	93.23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kendaraan dinas untuk money yang tersedia				7	unit	499,000,000											7	unit	499,000,000	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh				
		Koordinasi dan pembinaan/kelembagaan mukim	Jumlah Timun Mukim yang ditingkatkan kapasitasnya	2269	Mukim	12,443,640,000.00	4,184	Mukim	15,198,486,985												4,184	Mukim	15,198,486,985	184.40	122.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		Pembinaan kelembagaan mukim																			-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
																										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh			
		DINAS PERHUBUNGAN				674,535,452,714			930,808,614,394	DINAS PERHUBUNGAN																Dinas Perhubungan Aceh			
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				674,535,452,714			930,808,614,394	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																Dinas Perhubungan Aceh			
		Bidang Urusan Perhubungan				674,535,452,714			930,808,614,394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																Dinas Perhubungan Aceh			
						108,026,664,628			58,415,690,251	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																Dinas Perhubungan Aceh			
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	45,450,129,982	36	%	25,787,246,115	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%															Dinas Perhubungan Aceh		
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	1,102,726,729	24	%	506,476,000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	n/a																Dinas Perhubungan Aceh		
		Birokrasi yang efektif dan efisien	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	8,200,433,329	21	%	2,258,538,710	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a																Dinas Perhubungan Aceh		
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	53,273,374,588	35	%	29,863,429,426	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a																Dinas Perhubungan Aceh		
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Loran Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	0	0	-	-	-	-	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Loran Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%															Dinas Perhubungan Aceh		
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tahun	732,986,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	%	968,919,784	sts	132.19	83	%	968,919,784	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		Pekan Nasional Keselamatan Jalan				95	%	269,198,800										95	%	269,198,800	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		antisipasi stagnasi, embarkasi/debaraksi, transp publik event, transp tamu negara							Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5	Kegiatan	1,106,004,600			64	%	441,145,000	sts	39.89	64	%	441,145,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	pelayanan transportasi dan kelancaran lalu lintas bagi jamaah haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan transportasi	n/a	n/a	19,850,000,000	125	%	13,689,810,711									125	%	13,689,810,711	sts	68.97	Dinas Perhubungan Aceh		
		Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terciptanya Pengoperasian angkutan umum yang tertib, aman dan lancar				-	-										-	-		tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan Disiplin Angkutan Umum	Meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum	n/a	n/a	8,456,161,070	39	%	3,313,377,102									39	%	3,313,377,102	sts	39.18	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pengaturan Kelancaran lalu Lintas penyelenggaraan Embarkasi dan Debaraksi Haji				4	%	3,396,800										4	%	3,396,800	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Penyenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional				26	%	111,564,000										26	%	111,564,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah				48	%	287,618,000										48	%	287,618,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Kegiatan Antisipasi Stagnasi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tangap Darurat Bencana				76	%	223,149,000										76	%	223,149,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pembinaan Begek Karoseri				65	%	52,200,000										65	%	52,200,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pensertihan Angkutan Umum				85	%	230,009,000										85	%	230,009,000	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
																				128	%	95,975,436	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12	Bulan	21,181,700,000			54	%	17,286,093,999	sts	81.61	54	%	17,286,093,999	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
									Tersedianya Bus Feeder Angkutan Masal Trans Kutaraja (Termasuk Charger) Terseleenggaranya angkutan masal perkotam Trans Kotaraja	2	Unit 1 Tahun	15,467,700,000			148	%	13,985,298,931	sts	90.42	148	%	13,985,298,931	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
		Pembangunan Sarana Perhubungan darat	Tersedianya kebutuhan angkutan untuk masyarakat	88	bus	317,921,300,000	82	bus	69,439,558,394									tdr	tdr	82	bus	69,439,558,394	93.18	21.84	Dinas Perhubungan Aceh
									Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	12	Bulan 25 Paket	5,714,000,000			130	%	3,300,795,068	sts	57.77	130	%	3,300,795,068	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
		Pembangunan gedung terminal	Tersedianya Halte				-	-	1,297,570,871									-	-		tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pembinaan Awak Angkutan Masal Trans Kutaraja				100	%	112,182,250										100	%	112,182,250	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis Roda Empat atau Lebih	100	%	261,307,580,004	-	-	-									-	-	-	sts	-	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	n/a	n/a	14,163,000,000	-	-	-									-	-	-	sts	-	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Meningkatnya Pelayanan Penumpang Pengguna Angkutan	n/a	n/a		-	-	-									-	-	-	sts	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya fasilitas perhubungan darat yang memadai	n/a	n/a		-	-	-									-	-	-	sts	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	n/a	n/a		-	-	-									-	-	-	sts	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	n/a	n/a		-	-	-									-	-	-	sts	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	terlaksananya pengoperasian kelakan kendaraan				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terbangunnya Sarana dan prasarana retribusi				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedia dokumen perencanaan yang dibutuhkan				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya data yang mutakhir dalam rangka penyusunan standar dan prosedur di bidang perhubungan				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya depo angkutan masal				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		
		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas				-	-	-									-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJA s/d Akhir Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan							Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
											Predikat kinerja				#DIV/0!	SR							SR	SR	Dinas Perhubungan Aceh	
											PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	85 %	3,063,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
											Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	1 Bandara	3,063,000,000	Tidak ada kewenangan provinsi	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
											Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terciptanya pelayanan transportasi udara yang aman dan nyaman	13 Paket 2 Gedung	3,063,000,000		-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perhubungan Aceh
		Pembangunan prasarana perhubungan udara	Terbangunnya fasilitas dan prasarana bandara di Subupaten/kota	1 bandara	46,203,865,950	2 bandara	47,524,584,505																		Dinas Perhubungan Aceh	
		Penyediaan sarana perhubungan udara	Tersedianya pesawat untuk pengewasaan illegal fishing dan illegal logging	-	-	-	1,238,927,393																		Dinas Perhubungan Aceh	
		Pembangunan sarana perhubungan udara	Tersedianya sarana perhubungan udara	1 unit pesawat	29,300,000,000	0 unit pesawat	292,826,672																		Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
		Perencanaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	tersedia dokumen perencanaan yang dibutuhkan	n/a	45,840,350,000	130 %	50,007,195,034																		Dinas Perhubungan Aceh	
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedia dokumen perencanaan yang dibutuhkan	-	-	100 %	1,511,651,350																		Dinas Perhubungan Aceh	
		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terciptanya koordinasi dalam pembangunan	4 FGD	1,380,000,000	2 FGD	860,825,553																		Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	
																									Dinas Perhubungan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			K		Rp.		K		Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH				190,421,704,084				128,332,902,400					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH				42,277,182,392							38,285,030,274	90.56			166,617,932,674	87.50	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				190,421,704,084				128,332,902,400					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42,277,182,392							38,285,030,274	90.56			166,617,932,674	87.50	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
		Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika				190,421,704,084				128,332,902,400					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				42,277,182,392							38,285,030,274	90.56			166,617,932,674	128.35	87.50	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
						44,866,422,834				43,425,531,540					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				21,940,342,520							19,818,547,798	tdr	90.33			63,244,079,338	tdr	140.96	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	2,365,649,375	100	%	1,049,258,469						Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%						150	%		150.00		125	%	1,049,258,469	125.00	44.35	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	12,153,389,235	85	%	7,288,198,016						Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%						150	%		sts		117	%	7,288,198,016	117.35	59.97	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	30,347,384,224	91	%	35,088,075,055						Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	n/a							150	%		sts		120	%	35,088,075,055	120.49	115.62	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Persentase laporan capaian kinerja dan kenangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%					150	%				150	%			tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPA	12	Bulan	486,834,000			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	458,131,000	sts	94.10	12	Bulan	458,131,000	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Cetak Dokumen Perencanaan	50	Dokumen	486,834,000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Bulan	411,431,000	sts	84.51	12	Bulan	411,431,000	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Honorarium ASN dan Non ASN	12	Bulan	-				12	Bulan	46,700,000	100.00	-	12	Bulan	46,700,000	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
															Makan dan Minum Lembur ASN	1125	Porsi	-				-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
															Uang Lembur ASN	250	Jam	-				-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
															Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	13,793,646,107			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	12,529,026,442	100.00	90.83	12	Bulan	12,529,026,442	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	13,793,646,107			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12,529,026,442	100.00	90.83	12	Bulan	12,529,026,442	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
															Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12	Bulan	-				-	-	-	sts	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh				
															Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang semakin cakap, terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas	24	diklat	3,541,394,195	24	diklat	1,049,258,469									24	diklat	1,049,258,469	100.00	29.63	Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K			K			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Menjadi			K			K		K			K				
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.			
									Administrasi Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	12	Bulan	7,659,862,413	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	2,063,925,791	100.00	26.94	12	Bulan	2,063,925,791	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12	Bulan	43,567,934	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	43,438,000	100.00	99.70	sts	sts	12	Bulan	180,766,982	sts	94.44	Komunikasi Informatika dan Persandian	
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	1,285,452,375	tdr	tdr	12	Bulan	1,285,452,375	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	164471	buah	3,475,598,046	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	102,243,500	100.00	91.21	sts	sts	12	Bulan	2,569,397,890	sts	73.93	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
									Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan bagi peningkatan informasi dan wawasan aparatur Pemerintah	10240	eks	143,067,996	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	19,680,000	100.00	72.89	sts	sts	12	Bulan	100,715,000	sts	70.40	Komunikasi Informatika dan Persandian	
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	1212	kali	3,644,643,825	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	613,111,916	100.00	95.85	sts	sts	12	Bulan	2,848,042,412	sts	78.14	Komunikasi Informatika dan Persandian	
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3,235,569,380	tdr	tdr	12	Bulan	3,235,569,380	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materi	200;12	materai; Bulan	94,900,625	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12,182,000	100.00	37.10	sts	sts	12	Bulan	37,717,500	sts	39.74	Komunikasi Informatika dan Persandian	
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	6,147,552,483	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	950,307,380	100.00	77.96	24	Bulan	5,288,569,801	200.00	86.03	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2,273,080,000	tdr	tdr	12	Bulan	2,273,080,000	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian			
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	1,531,895,185	tdr	tdr	12	Bulan	1,531,895,185	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh			
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	810,220,946	tdr	tdr	12	Bulan	810,220,946	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya perbaikan Mebeleur Kantor	12	Bulan	28,750,000	Pemeliharaan Mebel	12	Bulan	-	100.00	-	12	Bulan	-	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terbangunnya fasilitas kantor	5	keg	4,181,211,920	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	411,219,000	100.00	67.09	sts	sts	12	Bulan	1,658,491,462	sts	39.67	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	310,455,239	tdr	tdr	12	Bulan	310,455,239	tdr	tdr	Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang siap mendukung kegiatan pelayanan Publik	49140;24	liter; kali servis dan perpanjangan stnk	3,667,196,110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	-	75.00	-	45	Bulan	1,460,257,154	sts	39.82	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur dalam peningkatan pelayanan publik	16634	kotak	1,920,911,029	Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan	12	Bulan	-	75.00	-	sts	sts	12	Bulan	1,096,420,228	sts	57.08	Komunikasi Informatika dan Persandian	
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik	100	%	1,937,842,672	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	493,315,800	-	75.00	-	sts	sts	12	Bulan	1,837,042,000	sts	94.80	Komunikasi Informatika dan Persandian
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Honorarium Non ASN	12	Bulan	2,466,480,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9	Bulan	-	75.00	-	9	Bulan	-	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	8; 3	bidang; gedung	604,368,023	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	459,275,554	-	75.00	-	sts	sts	12	Bulan	1,670,699,000	sts	276.44	Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi			K			K	Rp.	K			K	Rp.										
				Vol		Satuan	Rp.	Vol		Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp)		Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Vol		Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan		Rp.	K	Rp.						
				5		6	7	8		9	10	Tolak Ukur	9		10		11		12	13	13			14	15										
												PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	80 %		318,532,000								PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10 %		357,777,804	12.50	112.32	10 %		357,777,804	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
												Penyeenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Komunikasi Sandi Antar SKPA	46 SKPA		318,532,000							Penyeenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan		357,777,804	sts	112.32	12 Bulan		357,777,804	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
												Pemetaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan		318,532,000							Pemetaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	11 Bulan		357,777,804	91.67	112.32	11 Bulan		357,777,804	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
													Rata-rata capaian kinerja (%)														91.67	112.32	#DIV/0!	#DIV/0!			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh		
													Predikat kinerja														ST	ST	#DIV/0!	#DIV/0!			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh		
	Meningkatnya transparansi informasi publik	Program Pengembangan Data dan Statistik	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online)	900,400	Jumlah	3,765,374,209	333	Jumlah	2,693,254,688			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	350	Informasi	599,074,400							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100	Informasi	297,177,479	28.57	49.61	sts	sts	2,990,432,167	sts	79.42	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
												Penyeenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya data yang telah terstandarisasi dan dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan	35	Data	599,074,400							Penyeenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	24	Data	297,177,479	68.57	49.61	24	Data	297,177,479	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
												Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya data diseturuh SKPA, dan terstandarisasi data yang dapat di akses secara online untuk mendukung pembangunan yang berbasis sektoral di Aceh	35	Data	599,074,400							Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14	Data	297,177,479	40.00	49.61	14	Data	297,177,479	tdr	tdr	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
		Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-Government Penda	Tersedianya Layanan Standar Format Data, Pengelolaan Data Pemerintah dan Non Pemerintah, Peningkatan SDM, Interoperabilitas, Interkoneksi dan Pusat API	85	%	4,167,000,000	43	%	463,451,915																					43	%	463,451,915	50.00	11.12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
		Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government	Tersedianya layanan Recovery data dan Informasi	100	%	102,960,000	100	%	30,610,000																					100	%	30,610,000	100.00	29.73	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
		Pengelolaan website	Tersedianya Informasi E-Government Yang Mudah di Akses	100	%	592,344,125	300	%	466,853,715																					300	%	466,853,715	300.00	78.81	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
		Pengelolaan sms centre gubernur	Tersedianya informasi dari Masyarakat Masyarakat kepada Pemerintah Aceh	100	%	934,277,515	300	%	500,970,783																					300	%	500,970,783	300.00	53.62	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
		Updating data sumberdaya alam, ekonomi, keuangan dan investasi	Terlaksananya update data yang dibutuhkan	85	%	3,819,750,000	170	%	1,231,368,275																					170	%	1,231,368,275	200.00	32.24	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
																														40.00	49.61	190.00	41.10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
																														SR	SR	ST	SR	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			359,951,935,190			80,436,968,829				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			41,441,679,057							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			50,150,220,572	121.01			50,150,220,572		13.93	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
		Urusan Wajib Non Pelayan Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			359,951,935,190			80,436,968,829				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41,441,679,057							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50,150,220,572	121.01			50,150,220,572		13.93	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K			K			Sandi		Menjadi		K			K		K			K									
				Rp.			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rp.			Rp.		Rp.			Rp.							
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.							
		Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			359,951,935,190					80,436,968,829	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			41,441,679,057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			50,150,220,572	121.01		50,150,220,572	19.57	13.93	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
											PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			18,491,679,057	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	17,684,110,744.00	tdr	95.63	-	-	17,684,110,744	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
				0 %		0 %					Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Kesanggian, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)							75 %		75.00		38 %		tdr	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %		11,976,931,645				6,100,265,906	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %						75 %		75.00	sts	sts	6,100,265,906	sts	50.93	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Penawar	100 %		632,400,000	50 %			305,510,400	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Penawar	100 %						75 %		75.00	63 %		305,510,400	62.50	48.31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %		1,279,250,000	83 %			272,263,600	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a						- %		sts	42 %		272,263,600	41.73	21.28	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		10,577,767,607	65 %			4,608,070,262	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a						- %		sts	33 %		4,608,070,262	32.75	43.56	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
											Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %		300,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %		287,974,441	100.00	95.99	90 %		287,974,441	90.00	22.51	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
											Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	2 Dok		24,363,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok		24,335,800	250.00	99.89	5 Dok		24,335,800	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tercapainya Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100 %		216,083,200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90 %		205,014,841	90.00	94.88	90 %		205,014,841	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	23 Kab/Kota		59,553,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Kab/Kota		58,623,800	tdr	98.44	23 Kab/Kota		58,623,800	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	90 %		12,762,845,212	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		12,009,943,048	111.11	94.10	100 %		12,009,943,048	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun		12,762,845,212	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Tahun		12,009,943,048	2,583.00	94.10	26 Tahun		12,009,943,048	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Administrasi Umum	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas	90 %		5,312,314,585	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %		5,273,074,755	100.00	99.26	90 %		5,273,074,755	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	100 %		120,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun		22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
											Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100 %		2,202,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun		564,067,800	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun		452,689,829	100.00	80.25	sts	sts	1,661,817,340	sts	75.47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
											Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan Peralatan kantor	100 %		370,350,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		129,360,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun		267,275,590	100.00	206.61	sts	sts	408,274,603	sts	110.24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
											Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran pajak Bumi Bangunan	sts	sts	5,377,496	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun		4,000,000	Penastasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun		2,347,136	100.00	58.68	sts	sts	7,724,632	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K		Rp.	K		Rp.		Sandiangan			Menjadi			K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	(Rp.)	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			K	Rp.	K	Rp.		
				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan																											
		Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Koperasi	- Jumlah Koperasi yang memiliki produk atau jasa unggulan dan menerapkan Teknologi untuk Inovasi Produk - Jumlah Koperasi yang Pengurus/Penggelolanya memahami pengelolaan Koperasi secara syariah - Jumlah Koperasi yang memiliki akses pembiayaan/pemodalan - Jumlah Koperasi yang memahami HakK - Jumlah Koperasi yang membangun kemitraan dengan badan usaha lainnya - Jumlah Produk atau Jasa Koperasi yang Menik Ke Pasar Nasional					sts	sts	4,146,860,118															sts	sts	4,146,860,118	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Peningkatan Daya saing Koperasi (PLUT-KUMKM)	Pelatihan bagi Koperasi Mentor Bisnis Bagi KUMKM		239	Kop	8,599,255,200		sts	sts	1,304,390,890															sts	sts	1,304,390,890	sts	15.17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Pengembangan Usaha bagi Koperasi (SILPA Otus Kab/Kota)	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi					0.00	-	-																-	-	-	tdr	tdr	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatkan neraca perdagangan	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas, produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	57	%	50,695,719,000	0.00	unit	29,717,481,984																						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program pengembangan dan pembinaan UKM	Meningkatnya jumlah UKM naik kelas	80	Buah	167,707,720,737	0	Buah	15,152,462,580																						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah produk UKM yang kompetitif	120	Buah	1,000,000,000	-	-	-																						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																															Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
		Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM	Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM	5	Dok	2.100.000,000	100	%	157.449,026										100	%	157.449,026	sts	7.50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
																									Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
																									Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			104.702,973,198			62,372,575,655	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			53,461,578,315	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			20,879,457,871	39,06			88,103,992,047	84,15		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				104.702,973,198			62,372,575,655	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			53,461,578,315	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20,879,457,871	39,06			88,103,992,047	84,15		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
		Bidang Urusan Penanaman Modal				104.702,973,198			62,372,575,655	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			53,461,578,315	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,879,457,871	39,06			88,103,992,047	111,11	84,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
						20,334,271,830			39,649,546,832	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			44,930,598,958	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			20,728,863,871	tdr	46,14	-	60,378,410,703	tdr	296,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	17,641,691,830	100	%	10,311,690,466	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%				50	%	49,89	150	%	10,311,690,466	149,89	58,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	987,400,000	100	%	501,901,440	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%				25	-	sts	sts	sts	501,901,440	sts	50,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	1,705,180,000	47	%	304,030,807	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%				25	%	25,00	72	%	304,030,807	72,33	17,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				92	%	28,531,924,119	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	75	%				56	%	74,67	148	%	28,531,924,119	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	0	0	-	-	-		%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%				50	%	50,00	sts	sts	-	sts	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
																			6	Dokume	176,463,068	tdr	tdr	6	Dokume	176,463,068	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K			K		K			K						
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24		
									2.1801.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1	Dokumen	1,700,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,699,950	100.00	100.00	1	Dokumen	1,699,950	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.01.02	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renja RKA DPA serta Lakip DPMPTSP Aceh	4	Dokumen	263,077,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Dokumen	166,548,318	100.00	63.31	4	Dokumen	166,548,318	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja LPPA LKPJ LKJP/LAKIP Rekam Jejak	5	Dokumen	8,775,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	8,214,800	100.00	93.62	5	Dokumen	8,214,800	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				tdr	tdr				tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				tdr	tdr	6	Bulan	18,589,841,114	tdr	tdr	6	Bulan	18,589,841,114	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
									2.1801.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan berdasarkan beban kerja	14/12/12/14	bulan/ bulan/ bulan/ bulan	18,492,902,413	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	16,583,361,214	sts	89.67	12	Bulan	16,583,361,214	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62/12	Org/ bulan	1,947,325,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248	org	1,875,244,200	sts	96.30	248	org	1,875,244,200	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran Neraca Calc-LPE & LO)	1	Dokumen	120,782,500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	106,980,550	100.00	88.57	1	Dokumen	106,980,550	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
									2.1801.1.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Buku Besar	24/3	Buku/ Buku/ Buah	26,092,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Buku	24,255,150	sts	92.96	1	Buku	24,255,150	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
														Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				tdr	tdr	9	Bulan	1,684,333,992	tdr	tdr	9	Bulan	1,684,333,992	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda-benda pos lainnya dan pengiriman paket		12	Bulan	362,640,799		12	Bulan	100,154,581	2.1801.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	###	Bulan/ bulan	80,705,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	70,606,500	sts	87.49	24	Bulan	170,761,081	200.00	47.09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa utility kantor		12	Bulan	2,495,069,948		12	Bulan	1,020,032,164	2.1801.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	679,947,936	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	353,945,328	100.00	52.06	24	Bulan	1,373,977,492	200.00	55.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor		12	Bulan	257,744,980		12	Bulan	162,685,900	2.1801.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1/12/12	Paket/ Bulan/ Bulan	469,019,640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	102,753,500	sts	21.91	sts	sts	265,439,400	sts	102.99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor		12	Bulan	1,860,846,777		12	Bulan	623,037,075	2.1801.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	438,429,555	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	302,905,850	100.00	69.09	24	Bulan	925,942,925	200.00	49.55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	Bulan	1,581,463,280		12	Bulan	710,732,750	2.1801.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	301,574,729	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	170,549,200	100.00	56.55	24	Bulan	881,281,950	200.00	55.73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya barang kebutuhan penerangan kantor		12	Bulan	195,261,580		12	Bulan	102,641,000	2.1801.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	28,342,985	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	32,215,000	100.00	113.66	24	Bulan	134,856,000	200.00	69.06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K			Rp.			K	Rp.	K			Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan		K	Rp.		Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	2,251,015,200	12	Bulan	1,755,496,000	2.18.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Komunikasi Konferensi Virtual Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Sewa Gudang Kantor	1/12/12 Paket/ Bulan/ Bulan	217,793,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket		200,585,000	sts	92.10	sts	sts	1,956,081,000	sts	83.20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar / majalah	12	Bulan	146,870,000	12	Bulan	73,716,700	2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12	Bulan	37,920,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	29,816,000	100.00	78.63	24	Bulan	103,532,700	200.00	70.49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan koordinasi dan kinerja aparatur	12	Bulan	649,510,000	12	Bulan	131,036,000	2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12	Bulan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	-	100.00	tdr	24	bulan	131,036,000	200.00	20.17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	mengikuti rapat koordinasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	1,763,620,000	12	Bulan	487,635,096	2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	438,114,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	420,957,614	100.00	96.08	24	Bulan	908,592,710	200.00	51.52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Bulan/Gedung			tdr	tdr							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh							
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	9,256,179,725	12	Bulan	5,144,523,200					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			-	tdr	tdr	sts	sts	5,144,523,200	sts	55.58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
														Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	1	Gedung	19,999,998,800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Gedung	17,145,636,592	100.00	85.73	sts	sts	17,145,636,592	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan mobil dinas dan kendaraan roda dua serta pajak kendaraan	60	Bulan	2,658,045,380	24		1,010,591,683	2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Mobil Dinas dan kendaraan Roda 2 Serta Pajak Kendaraan	12	Bulan	848,678,498	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	785,819,800	100.00	92.59	sts	sts	1,796,411,483	sts	67.56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawat dan terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	Bulan	2,097,299,000	24		1,010,526,436	2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	191,689,802	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	81,473,950	100.00	42.50	sts	sts	1,092,000,386	sts	52.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Steel/Bu	278,225,697		tdr	tdr	9	Steel/Bu	278,225,697	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS. Tersedianya Pakaian Batik PNS dan Non PNS	802	stel	1,184,196,140	152	stel	501,901,440	2.18.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	162	steel	128,785,800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166	Steel	112,141,700	102.47	87.08	sts	sts	614,043,140	sts	51.85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Pendidikan dan pelatihan formal	keikutsertaan pada pelatihan, bimtek dan kursus kursus	60	Bulan	2,780,780,000	12	Bulan	304,030,807	2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan Bimtek dan Kursus-kursus	12	Bulan	209,044,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	Bulan	166,083,997	100.00	79.45	24	Bulan	470,114,804	40.00	16.91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
		Pengadaan pakaian keadaeraan	Tersedianya Pakaian Batik PNS dan Non PNS																tdr	tdr				tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
														Rata-rata capaian kinerja (%)					100.15	79.97				182.22	56.59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
														Predikat kinerja					ST	T				ST	R	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh								
	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)	31	Rp (Triliun)	49,092,634,829	16	Rp (Triliun)	11,009,644,343				965,818,443	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3		658,759,330	tdr	68.21	sts	sts	11,668,403,673	sts	23.77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Vol				Satuan	Vol				Satuan	Vol				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	a. Jumlah ketersediaan data dan informasi penanaman modal	117	Dokumen	65,100,000	140	Dokumen	1,352,149,405																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
			b. Jumlah koordinasi internal dan eksternal dalam rangka verifikasi dan pengolahan data penanaman modal.	25	Kegiatan	232,680,000	-	Kegiatan	-																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
			c. Jumlah Cetak Buku analisis dan evaluasi data penanaman modal.	400	Buku	5,500,000	-	Buku	-																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
			d. Jumlah pengembangan dan pembinaan sistem informasi penanaman modal	14	Kegiatan	273,619,700	-	Kegiatan	-																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	a. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Dinas	32	Dokumen	1,337,495,000	14	dokumen	328,911,500																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Rakor sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan dan target penanaman modal	-	-	-	-	-	-																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi di daerah, workshop IKPM online, rapat koordinasi dan penyelesaian masalah perusahaan (Taskforce)			2,096,980,130	15	Triliun	761,880,150																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		K		K		K					
				Vol		Satuan	Rp.		Vol		Satuan	Rp.		Rp.	Vol		Satuan	Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	90	%	15,858,469,023	98	%	2,402,906,696			2,720,957,871			Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	2,304,849,978	tdr	84.71	sts	sts	4,707,756,674	sts	29.69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	87	%	2,002,027,600	-	%	1,528,770,448										tdr	tdr						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
															2.18.04.1.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	Izin dan	2,304,849,978	tdr	tdr	-	Izin dan	2,304,849,978	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
															2.18.04.1.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40	orang	668,482,224	sts	68.92	40	orang	668,482,224	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
															2.18.04.1.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin dan Non Izin yang Diberbitkan di Bidang B	450/30000	Izin dan Non Izin	1,335,467,614	sts	92.80	735	Izin dan	1,239,316,894	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
															2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Izin dan Non Izin yang Diberbitkan di Bidang A	450/30000	Izin dan Non Izin	1,335,467,614	sts	92.80	735	Izin dan	1,239,316,894	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan ke Kabupaten/ Kota		Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan ke Kab/ Kota	23	Kab/Kota	155,075,000	-	Kab/Kota	139,843,830						Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu	4	kasus	415,490,907	sts	95.56	7	Kasus	397,050,860	sts	346.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
	Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/ Kota		Jumlah DPMPFTSP Kab / Kota yang dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan	23	Kab/Kota	41,349,440	-	Kab/Kota	38,696,115																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Terlaksananya Penanganan kasus di kab/kota	29	Kasus	634,990,000	61	kasus	235,852,760																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Terlaksananya Bimtek Front Office			715,375,500	1	kegiatan	59,948,950																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan ke Kabupaten/Kota		Terlaksananya Monitoring Pelayanan Perizinan ke Kab/Kota jumlah izin dan non izin yang diterbitkan/ bidang penanaman modal	85	Kali	668,373,000	sts	sts	196,571,214						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	75	Izin/Non Izin	415,490,907	sts	sts	-	sts	sts	196,571,214	sts	29.61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan		Terlaksananya pembinaan TSP Kab/Kota			343,666,126	sts	sts	165,897,600						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Kab/Kot	415,490,907	sts	sts	-	sts	sts	165,897,600	tdr	48.27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A		Jumlah Aparatur perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kesehatan yang terbimbing				46	org	66,890,100																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Rapat Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Terselenggaranya pertemuan forum komunikasi PTSP Kab/Kota	300	org	234,298,100	30	org	115,509,508																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang A			1,945,260,750	1,483	Izin dan Non Izin	288,069,462																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sandi			Menjadi			K		K			K							
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Urusan	Program	Kegiatan	Tolak Ukur	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Urusan	Program	Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
		Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B																											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang B	1,474	Izin dan Non Izin	1,809,615,750	1,111	Izin dan Non Izin	605,625,707													1,111	Izin dan	605,625,707	75.37	33.47			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya buku laporan survei kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan				3	Kali	143,759,000													3	Kali	143,759,000	tdr	tdr			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang C	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di bidang C			1,716,680,750	5,473	Izin dan Non Izin	524,782,315													5,473	Izin dan	524,782,315	tdr	30.57			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan terpadu satu	Jumlah kasus Perizinan dan Non Perizinan yang tertangani	5	Kasus	91,250,000	5	Kasus	80,604,800													5	Kasus	80,604,800	100.00	88.33			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan	Jumlah SOP dan SP yang tersusun/terevisi	0	Dokumen	145,735,000	60	org	121,499,500	2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tersusunnya SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2	Buku	415,490,907															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah buku survey kepuasan masyarakat yang tersusun	2	Buku	96,000,000	2	Kali	94,600,000	2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tersusunnya Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	2	Buku	415,490,907															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Jumlah peserta Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	52	Org	32,310,000	40	Org	19,560,000													40	Org	19,560,000	76.92	60.54			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Rapat Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Forum PTSP Kab / Kota	30	Org	33,510,000	40	Org	28,154,500	2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Terlaksananya Rapat Kerja PTSP	1	Kegiatan	533,977,543															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Jumlah izin dan non izin Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A yang diterbitkan	457	Izin dan Non Izin	346,425,000	570	Izin dan Non Izin	327,497,773													570	Izin dan	327,497,773	124.73	94.54			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Jumlah izin dan non izin Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C yang diterbitkan	3,155	Izin dan Non Izin	408,325,000	2,700	Izin dan Non Izin	399,497,773													2,700	Izin dan	399,497,773	85,578.45	97.84			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Jumlah peserta Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	52	Org	33,110,000																							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Jumlah izin dan non izin Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B yang diterbitkan	326	Izin dan Non Izin	281,900,000	605	Izin dan Non Izin	278,754,112													605	Izin dan	278,754,112	185.58	98.88			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
																													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
																						175.00	32.16				#####	73.43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
																						ST	SR				ST	S	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%tase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses pembangunan ekonomi Aceh	90	%	10,805,645,293	82	%	4,574,743,561				1,406,574,150								tdr	89.97	sts	sts	5,840,326,956	sts	54.05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi														Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Sandingan			Menjadi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			
				K		Rp.	K		Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Tolak Ukur	Target		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	
																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh			
		Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah	- Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal aceh. - Terlaksananya rapat fasilitasi percepatan pelaksanaan kawasan strategis, Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal 2021			7,898,397,658	sts	sts	4,574,763,561	2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengadaan Aplikasi Sistem Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal Terusunnya Buku Laporan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal (2016 - 2020)	1/30/1	paket/Perusahaan/Buku	328,272,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	19	Perusaha	247,283,032	sts	75.33	sts	sts	4,822,046,593	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		
			- Terlaksananya rapat fasilitasi pelaksanaan kawasan strategis			-	-	kali	-											sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh			
			- Terlaksananya buku pemetaan potensi dan peluang investasi			-	-	buku	-											sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh			
										2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya publikasi media cetak/surat kabar Terlaksananya transit usd@fore	33/4/4	Perusahaan / Kali/ Kali	696,543,150	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	191	Perusaha	825,122,239	sts	118.46	191	Perusaha	825,122,239	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		
														2		Publikasi										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		
														1		Bimtek										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		
										2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	42	Perusahaan	381,759,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40	Perusaha	193,158,124	95.24	50.60	40	Perusaha	193,158,124	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		
															Rata-rata capaian kinerja (%)				95.24	81.46			#DIV/0!	61.36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh			
															Predikat kinerja				ST	T			#DIV/0!	R	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh			
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi												268,980,011	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			265,366,410	tdr	98.66			265,366,410	tdr	tdr	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.				
				Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan		
																																			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
																																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
	n/a (program n/a di RPJMA)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Minat Investasi	559	Investor	6,609,964,623	-	Investor	3,206,943,775																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah.	a. %tase peningkatan langkahan promosi penanaman modal.	15	%	6,356,761,923	-	%	2,576,829,154																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			b. Jumlah target investor yang terjaring dalam kegiatan promosi penanaman modal berdasar sektor dan negara.	95	Investor	-	-	Investor	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			c. %tase ketersediaan strategi promosi penanaman modal.	50	%	-	-	%	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			d. Jumlah kegiatan pemsasaran/forum bisnis berdasarakan sektor/kawasan.	3	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			e. Jumlah fasilitas pelayanan penerimaan misi penanaman modal dari dalam dan luar negeri.	10	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			f. Jumlah fasilitas promosi sektor unggulan	2	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			g. Jumlah pameran promosi penanaman modal di dalam negeri.	3	Pameran	-	-	Pameran	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			h. Jumlah pameran promosi penanaman modal di luar negeri.	3	Pameran	-	-	Pameran	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
			i. Jumlah iklan multimedia untuk promosi penanaman modal.	5	Iklan	-	-	Iklan	-																										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
			j. Jumlah proyek investasi yang ditawarkan.	15	Proyek	-	-	Proyek	-																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			k. Jumlah lokasi display investasi dan promosi.	2	Lokasi display	-	-	lokasi displa	-																					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh			
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	Meningkatnya Perusahaan yang Melaporkan LKPM	559	Perusahaan	-	-	Perusahaan	384.700.255																					39,84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			a. Rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	1	Kali	-	-	Kali	600.000.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			b. Jumlah perusahaan yang dipantau kegiatan penanaman modal.	20	Perusahaan	-	-	Perusahaan	64.150.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			c. Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal.	6	Perusahaan	-	-	Perusahaan	150.000.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			d. Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan kegiatan penanaman modal.	15	Perusahaan	-	-	Perusahaan	42.500.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			e. Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan penanaman modal.	35	Perusahaan	-	-	Perusahaan	59.200.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			f. Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	50	Org	-	-	Org	65.000.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			g. Frekuensi publikasi informasi terkait LKPM.	3	Kegiatan Publikasi	-	-	Kegiatan Publikasi	43.500.000																						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
			Jumlah peserta yang mengikuti keg Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	46	Peserta	-	-	Peserta	245.414.366																					87,53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh		
																															10,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
																																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Sandiungan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Tolak Ukur	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d						
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
																												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
																																		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh				
																																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh					
		Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga				26,250,200,000						3,713,075,837	Dinas Pemuda dan Olahraga					273,499,272,912	Dinas Pemuda dan Olahraga					152,380,944,960		55.72				468,179,401,822		1,783.53	Dinas Pemuda dan Olahraga				
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					26,250,200,000						3,713,075,837	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					273,499,272,912	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					152,380,944,960		55.72				468,179,401,822		1,783.53	Dinas Pemuda dan Olahraga				
		Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga					26,250,200,000						3,713,075,837	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					273,499,272,912	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					152,380,944,960		55.72				468,179,401,822	63.97	1,783.53	Dinas Pemuda dan Olahraga				
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%		30,572,078,350	86	%				12,515,230,676	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah					25,831,852,227	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83	%			21,563,570,239	tdr	83.48	85	%			34,078,800,915	84.74	111.47	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%		684,615,720	91	%				266,600,000		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai												92	%		tdr	92	%		266,600,000	91.63	38.94	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%		1,179,494,500	69	%				252,200,000		%tase aparatur yang memenuhi kompetensi												84	%		tdr	76	%		252,200,000	76.39	21.38	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%		12,131,290,055	82	%				6,602,648,425		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%											31	%		31.00	56	%		6,602,648,425	56.36	54.43	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	0	0		-	-				-	-		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%											71	%		71.43	sts	sts	-	sts	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
														Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%			1,235,380,972	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71	%			1,165,156,100	71.43	94.32	71	%			1,165,156,100	tdr	tdr		Dinas Pemuda dan Olahraga	
														Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja untuk SKPA	2	Kegiatan			650,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-			624,817,500	sts	96.13	1	-			624,817,500	tdr	tdr	Dinas Pemuda dan Olahraga		
														Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya perencanaan dan penyusunan program kegiatan seluruh Aceh Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Pada Subbag Program	1	Kegiatan			585,380,972	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	-			540,338,600	sts	92.31	1	-			540,338,600	tdr	tdr	Dinas Pemuda dan Olahraga		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi antar Kepala SKPD	46/12	Peserta/ Bulan										sts	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pemuda dan Olahraga		
														Administrasi Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%			15,714,923,386	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71	%			13,496,227,679	71.43	85.88	71	%			13,496,227,679	tdr	tdr		Dinas Pemuda dan Olahraga	
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan			15,534,923,386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10	Bulan			13,345,633,679	sts	85.91	10	Bulan			13,345,633,679	tdr	tdr		Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		K		K		K		K					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	
				Rp.			Rp.			Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.				
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	646,100,000	100	%	775,436,000		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%							100	%	775,436,000	100.00	120.02	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	2,414,217,072	100	%	527,472,000		%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a	n/a		75	%		sts		175	%	527,472,000	175.00	21.85	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	12,427,391,147	100	%	9,903,568,674		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a	n/a		75	%		sts		175	%	9,903,568,674	175.00	79.69	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
											Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Walih)	100	%			68	%		67.50	sts	sts			tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan - histas sektor dan wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%tase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	90	%	6,662,200,000	80	%	4,053,084,427									tdr	tdr						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
											Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	kegiatan	1,734,821,007				3	kegiatan	1,243,335,793	75.00	71.67	3	kegiatan	1,243,335,793	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Perencanaan Pembangunan kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi Perencanaan Kebudayaan dan Pariwisata	400	%	3,474,480,000	100	%	2,018,454,994		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	tahun	786,681,000				1	tahun	318,243,700	100.00	40.45	1	tahun	318,243,700	sts	9.16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Perencanaan Pembangunan kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi Perencanaan Kebudayaan dan Pariwisata	400	%	3,474,480,000	100	%	2,018,454,994		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	4	kegiatan	948,140,007				4	kegiatan	401,196,800	100.00	42.31	4	kegiatan	401,196,800	sts	11.55	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	4	tahun	4,922,860,000	2	tahun	1,415,646,354			1	tahun					1	tahun	699,163,093	tdr	tdr	1	tahun	699,163,093	25.00	14.20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
											Administrasi Keuangan	1	laporan	22,927,182,734				1	laporan	19,158,250,801	100.00	83.56	1	laporan	19,158,250,801	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)	Tersedianya Belanja Pegawai (Gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS)	5	tahun	110,697,260,379	3	tahun	58,339,731,783		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	22,927,182,734				1	tahun	19,158,250,801	100.00	83.56	1	tahun	19,158,250,801	20.00	17.31	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
											Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	tahun	259,055,787				1	tahun	52,344,314	100.00	20.21	1	tahun	52,344,314	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Seragam	1173	Stell	861,137,550	1,094	Stell	775,436,000											1,094	Stell	775,436,000	93.27	90.05	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Rekap Keg: - Pendidikan dan pelatihan formal - Penyeleenggaraan kegiatan		5	tahun	2,602,236,287	3	tahun	527,472,000		Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Tahun	259,055,787				1	Tahun	52,344,314	100.00	20.21	1	Tahun	52,344,314	20.00	2.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Peningkatan SDM karyawan tercapai	5	tahun	1,427,061,287	3	tahun	257,152,000																	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan keagamaan	5	tahun	1,175,175,000	3	tahun	270,320,000																	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
											berjalannya administrasi Disbudpar dengan baik, serta meningkatnya kualitas pelayanan	1	tahun					1	tahun	745,699,952	100.00	tdr	1	tahun	745,699,952	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan listrik kantor yang memadai	5	tahun	759,800,775	3	tahun	532,151,600		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	154,247,047				1	Tahun	14,322,550	100.00	9.29	1	Tahun	14,322,550	20.00	1.89	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Rekap Keg: - Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan Alat Tulis Kantor		5	tahun	1,321,827,467	3	tahun	685,546,380		Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Tahun	60,000,000				1.00	Tahun	193,416,399	100.00	322.36	1	Tahun	193,416,399	20.00	14.63	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Tersedianya Makanan dan minuman	5	tahun	942,526,620	3	tahun	463,871,300																	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			K			Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K			K		K			K				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	5	tahun	379,300,847	3	tahun	221,675,080	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Yang Memakai	1	Tahun	78,564,519											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	5	tahun	415,999,005	3	tahun	175,090,050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	91,250,853	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	88,303,250	100.00	96.77	1	Tahun	88,303,250	20.00	21.23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi	5	tahun	2,765,556,057	3	tahun	1,334,358,739	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Kedinasan	1	Tahun	514,156,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	449,657,753	100.00	87.46	1	Tahun	449,657,753	20.00	16.26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dan mencukupi	15	Unit	6,746,030,000	15	Unit	4,113,990,000																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1	Unit	12,000,000,000	1	Unit	196,168,182																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Rekap Keg: - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5	Tahun	5,660,285,599	3	tahun	4,417,328,570	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1	Tahun	587,515,183	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Tahun	704,201,813	100.00	119.86	1	Tahun	704,201,813	20.00	12.44	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	tahun	2,467,597,640	3	tahun	1,578,848,080																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran Administrasi Tercapai	5	tahun	3,192,687,959	3	tahun	2,838,480,490																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
										Administrasi Umum	berjalannya administrasi Disbudpar dengan baik, serta meningkatnya kualitas pelayanan	1	tahun	4,081,263,309	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	tahun	2,819,853,990	100.00	69.09	1	tahun	2,819,853,990	tdr	tdr		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	5	tahun	422,065,580	3	tahun	107,831,783	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1	Tahun	54,014,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Tahun	49,221,000	100.00	91.13	1	Tahun	49,221,000	20.00	11.66	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, listrik dan sumber daya air	5	tahun	8,759,749,650	3	tahun	4,292,194,929	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	1,843,684,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	1,608,294,493	100.00	87.23	1	Tahun	1,608,294,493	20.00	18.36	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Penyelesaian tugas tepat waktu	5	Tahun	10,281,718,600	3	tahun	7,720,864,664	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelesaian Tepat Waktu	1	Tahun	1,387,026,122	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Tahun	1,162,338,497	100.00	83.80	1	Tahun	1,162,338,497	20.00	11.30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
										berjalannya administrasi Disbudpar dengan baik, serta meningkatnya kualitas pelayanan	1	tahun		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1	tahun	1,067,961,692	100.00	tdr	1	tahun	1,067,961,692	tdr	tdr		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	tahun	1,268,975,000	3	tahun	626,081,282	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya 18 Kendaraan dinas roda 4 dan 1 roda 6 beserta enam kendaraan dinas roda 2	1	Tahun	427,862,536	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.00	tahun	608,471,051	sts	142.21	1.00	tahun	608,471,051	20.00	47.95	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tercapainya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	40	Kegiatan	6,010,194,787	19	Kegiatan	2,945,272,530	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan	1	Tahun	368,676,293	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Tahun	459,490,641	100.00	124.63	1	Tahun	459,490,641	sts	7.65	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	5	tahun	1,005,320,000	3	tahun	443,208,600																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Mengukuti tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan	10	Sanggar	85,402,813,598	1	Sanggar	24,051,562,115	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan	10	Sanggar	8,058,741,880	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	Sanggar	13,630,375,689	-	169.14	1	Sanggar	37,681,937,804	10.00	44.12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
										Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terciptanya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan dalam kemajuan budaya dan pengembangan SDMnya	2	kegiatan	2,769,191,980	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	kegiatan	4,943,331,458	100.00	178.51	2	kegiatan	4,943,331,458	tdr	tdr		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi		K			Rp.		K			Rp.								
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	(Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K		Rp.				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
		Rekap Keg: - Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Budaya - Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Ratu Safiatuddin - Festival seni dan pagelaran budaya - Pengelolaan Taman Budaya - Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara																																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya	1	Kawasan		7,817,580,000		2	Kawasan		3,487,224,285																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Ratu Safiatuddin	Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan	1	Kawasan		73,092,380,000		1	Kawasan		7,343,370,081																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Festival seni dan pagelaran budaya					15,300,274,677					3,708,426,897																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah pelatihan/workshop seni dan budaya	32	Kali		3,257,325,000		2	Kali		-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah pagelaran seni dan budaya	50	Kali		10,158,044,277		15	Kali		-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah keikutsertaan pada pagelaran, pameran seni se Sumatera	80	Orang		868,620,000		22	Orang		-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah keikutsertaan pada pagelaran, pameran seni se Indonesia	80	Orang		1,016,285,400		21	Orang		-																									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Taman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya	4	Tahun		2,806,067,800		2	Tahun		3,742,275,057																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	480	Orang		1,216,068,000		80	Orang		174,479,970				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terciptanya SDM yang berkualitas	1	tahun		261,436,300															DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
															Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	terbentuknya SDM yang berkualitas dan adanya bentuk perlindungan dalam kemajuan tradisi budaya	2	kegiatan		5,289,549,900															DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
															Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	terbentuknya SDM yang berkualitas dan adanya bentuk perlindungan dalam kemajuan tradisi budaya	2	kegiatan		8,687,044,231		100.00		164.23											DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Rekap Keg: - Partisipasi Adat dan Budaya Aceh Dalam dan Luar Negeri - Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh - Penyelenggaraan event adat dan budaya					40,806,710,000					5,669,644,178				Pelindungan, Pengembangan, Pemenuhan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terinformasinya Sosialisasi dan Inventarisasi Budaya di Masyarakat	3	Keg		4,509,549,900															DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Partisipasi Adat dan Budaya Aceh Dalam dan Luar Negeri	Jumlah partisipasi pada event/expo Adat dan Budaya Aceh dalam dan luar negeri	8	kali		2,605,860,000		1	Kali		164,634,000																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh	Terlaksananya Roadshow dan Pekan Kebudayaan Aceh VIII	2	Event		22,000,000,000					-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Penyelenggaraan event adat dan budaya	Jumlah event adat dan budaya yang dilaksanakan	30	Event		16,200,850,000		8	Event		5,505,010,178																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Rekap Keg: - Pengadaan alat-alat kesenian - Pelatihan Kesenian - Pelestarian Bahasa dan Karya Sastra - Pembinaan Sanggar dan Komunitas Kesenian					11,521,507,500					-				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1	tahun		700,000,000															DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pengadaan alat-alat kesenian	Jumlah Alat kesenian yang di sediakan	12	Sanggar		1,845,817,500			sanggar		5,495,600																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pelatihan Kesenian	Jumlah peserta seminar/FGD/pelatihan seni dan budaya	880	Orang		4,298,470,000		267	Orang		1,083,942,320																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pelestarian Bahasa dan Karya Sastra					2,337,050,000					-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah lomba bahasa dan Sastra Aceh	4	event		620,370,000			event		-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah peserta rangkang literasi budaya	120	orang		1,054,680,000		53	orang		-																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program /Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
			Jumlah peserta seminar/FGD/pelatihan seni dan budaya			-																	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah Warisan Budaya yang Diusulkan	15	WBTD	662,000,000	4	WBTD												sts	-		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pembinaan Sanggar dan Komunitas Kesenian	Jumlah pembinaan Sanggar Seni dan penghargaan seniman kreatif	160	Sanggar	3,040,170,000	80	Sanggar	1,136,554,860													sts	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																							DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan												Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100.00	635.07				#DIV/0!	5.75	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
									Predikat kinerja									ST	ST				#DIV/0!	SR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman	18	Jumlah Situs	4,228,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	12	Jumlah Situs	9,924,449,093	66.67	234.73	sts	sts		9,924,449,093	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
									Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	terkelolanya situs cagar budaya	8	situs	4,228,000,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	12	situs	9,924,449,093	150.00	234.73	12	situs		9,924,449,093	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengelolaan, Pemugaran Situs Sejarah dan Cagar Budaya			42,176,595,803	-	-	9,933,975,533	Pengembangan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kebancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Terpeliharanya Situs Cagar Budaya, Terjaganya Situs Cagar Budaya	100	Situs	4,228,000,000	Pemanfaatan Cagar Budaya	86	Situs	9,924,449,093	86.00	234.73	86	Situs		9,924,449,093	tdr	23.53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			Jumlah SDM pada situs cagar budaya yang ditingkatkan kemampuannya	800	Orang	3,908,790,000	168	Orang	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah Dokumen pengembangan cagar budaya	16	Dokumen	2,605,860,000	8	Dokumen	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah pengembangan kawasan cagar budaya terpadu	3	kawasan	11,839,870,000	-	kawasan	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah cagar budaya yang terpagar	32	situs	21,135,440,803	13	situs	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah Partisipasi pada kegiatan Permuseuman Dalam dan Luar Negeri	8	Kali	1,166,550,000	-	Kali	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah cagar budaya yang terdaftar secara provinsi, nasional dan internasional	16	Situs	1,520,085,000	23	Situs	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah kajian/sosialisasi/penelitian				11	Kali	-											11	Kali		-	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
																		86.00	234.73				#DIV/0!	23.53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																		T	ST				#DIV/0!	SR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
										PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman	18	Jumlah Situs	6,221,511,715	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	12	Jumlah Situs	13,587,038,322	66.67	218.39	sts	sts		13,587,038,322	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
										Pengelolaan Museum Provinsi	perawatan benda sejarah, peningkatan kunjungan wisatawan, serta peningkatan pelayanan SDM pada Museum	2	Museum	6,221,511,715	Pengelolaan Museum Provinsi	2	Museum	13,587,038,322	tdr	218.39	2	Museum		13,587,038,322	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Rekap - Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum - Pelestarian Fisik Koleksi Museum dan Buku Pustaka			1,302,930,000	-	-	1,077,306,884	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	ADANYA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KOLEKSI SECARA TERPADU (MUSEUM ACEH)	1	KEGIATAN	610,908,977	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1	kegiatan	1,442,758,877	100.00	236.17	1	kegiatan		1,442,758,877	tdr	110.73	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang diganti rugi atau direplika	28	Koleksi	651,465,000	10	Koleksi	193,937,000									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Pelestarian Fisik Koleksi Museum dan Buku Pustaka			651,465,000	-	-	883,369,884																		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			Jumlah Koleksi Benda di Museum yang dikonservasi	200	koleksi	217,155,000	700	koleksi	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah bahan pustaka yang dilerstikan	2000	Buku	217,155,000	1,660	Buku	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah Kurator dan Petugas Museum yang di Latih	24	Orang	217,155,000	4	Orang	-									-	-	-	sts	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K			K		K			K					
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		Vol	Satuan	Rp.	K
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		Rekap - Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Aceh - Partisipasi Museum Dalam dan Luar Negeri - Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno - Pengelolaan Museum Aceh			20,465,046,500	-	-	10,962,198,348				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	TERCIPTANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM (MUSEUM ACEH)	1	tahun	3,459,444,993	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1	tahun	4,582,633,941	100.00	132.47	1	tahun	4,582,633,941	tdr	22.39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Aceh	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Aceh	1	UPTD	13,052,680,000	2	UPTD	3,288,656,689																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Partisipasi Museum Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Partisipasi museum Aceh dalam dan luar negeri	26	Kali	3,980,894,000	9	Kali	1,869,852,600																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno	Jumlah naskah yang digitalisasi	480	Judul Naskah	872,000,000	132	Judul Naskah	494,381,680																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengelolaan Museum Aceh	Terlaksananya Pengelolaan Museum Aceh	4	Tahun	2,559,472,500	2	Tahun	5,309,307,379																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Rekap - Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Tsunami - Pengelolaan Museum Tsunami - Preparasi dan Edukasi Museum Tsunami			36,813,275,713	-	-	13,888,543,992				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan UPTD Museum Tsunami (MUSEUM TSUNAMI)	3	KEGIATAN	2,151,157,745	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	5	KEGIATA	7,561,645,504	166.67	351.52	5	KEGIATA	7,561,645,504	tdr	20.54	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Tsunami	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Tsunami	1	UPTD	23,952,300,000	2	UPTD	9,731,559,960																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengelolaan Museum Tsunami				7,732,081,713	-	-	3,914,266,332																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			Terlaksananya Pengelolaan Museum Tsunami	4	Tahun	7,070,081,713	2	Tahun	2,602,292,732																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			Jumlah Koleksi Museum Tsunami yang di Ganti Rugi atau di Replika	21	koleksi	662,000,000	7	koleksi	-																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Preparasi dan Edukasi Museum Tsunami				5,128,894,000	-	-	242,717,700																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			- Tersedianya Bimbingan Edukatif dan Komunikasi kepada Masyarakat	3E+06	Orang	2,648,000,000	88,550	Orang	-																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			- Jumlah Partisipasi museum Tsunami pada Kegiatan Kebencanaan Dalam dan Luar Negeri	14	Kali	2,480,894,000	2	Kali	-																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	Mengkuatnya taman budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai sejarah	12	Buah	15,404,014,121	12	Buah	15,432,071,709																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	Mengkuatnya taman budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	45	Festival	10,334,896,510	17	Festival	12,287,325,823																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	Mengkuatnya taman budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai budaya	80	%	31,259,509,315	74	%	22,765,882,418																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan (2018-2022)																										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Penyediaan alat-alat kesenian tradisional	Penyediaan alat-alat kesenian tradisional	10	Sanggar Seni	442,120,000	1	Sanggar seni	195,255,500																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Tahun 2018)																										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	terlaksananya event-event seni budaya	2	event	1,070,000,000	2	event	1,575,632,000																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terpenuhnya Sarana Pendukung Taman Budaya	6	Unit	1,689,375,000	6	Unit	3,996,234,000																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	Terawatnya benda benda koleksi museum	1,600	Buah	223,995,000	1,600	Buah	215,172,000																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Terlaksananya sosialisasi/ Edukasi Nilai-nilai budaya Aceh	500	Orang	243,924,000	273	Orang	276,846,508																			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K			Rp.			K			Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				
				7	8	9	10	11	12	13	14																							
		Program Pengembangan Kemitraan																										DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
		Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Tersedianya kemitraan kepariwisataan	3	Keg		1.644.000.000		8	Keg		1.280.562.062																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
		Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Pengumpulan data Perkembangan Siatistik Kebudayaan dan Pariwisata di kab/kota	23	Kab./Ko ta		285.760.000		23	Kab./Ko ta		127.215.000																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
		Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	500	Orang		3.207.965.000		1.108	Orang		2.143.475.984																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Pelatihan Pengembangan SDM Kepariwisata bagi Pelaku Usaha Pariwisata	700	Orang		801.245.000		237	Orang		693.892.724																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	Meningkatnya kontribusi pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi	3	Kawasan		462.676.804.700		3	Kawasan		110.201.640.763		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi	3	Kawasan		19.554.080.704	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6	Kawasan		18.282.343.692	tdr	93.50	9	Kawasan		128.483.984.455	300.00	27.77	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
														Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	terlaksananya event pariwisata	9	event		12.855.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	17	event		7.344.831.512	188.89	57.14	17	event		7.344.831.512	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pengembangan Atraksi Pariwisata Unggulan	Jumlah atraksi di destinasi wisata	108	Event		53.747.446.106		34	Event		11.236.772.613		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Tercapainya daya tarik wisata melalui event atraksi pariwisata	11	kegiatan		12.855.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	23	kegiatan		7.344.831.512	209.09	57.14	23	kegiatan		7.344.831.512	sts	13.67	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
														Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah objek pariwisata yang dikembangkan	1	tahun		6.330.830.704	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	tahun		9.245.042.860	100.00	146.03	1	tahun		9.245.042.860	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Perencanaan Destinasi pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan objek wisata (Studi)/ Perencanaan Kawasan Wisata	24	Dokumen		9.989.130.000		9	Dokumen		2.843.461.974		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan objek wisata (Studi)/ perencanaan Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi	4	paket		836.055.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	8	paket		785.621.951	200.00	93.97	8	paket		785.621.951	sts	7.86	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata	40	Objek		118.011.451.079		7	Event		6.967.400.802		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Wisata	1	Thn		4.214.775.654	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	Thn		7.889.961.896	100.00	187.20	1	Thn		7.889.961.896	sts	6.69	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
														Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	tersedianya sarpras pada destinasi wisata provinsi	1	kawasan		150.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-		-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Pembiayaan kelompok sadar wisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				13.845.661.000					2.323.686.782		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	terlaksananya kegiatan pembiayaan program kelompok sadar wisata	6	kegiatan		1.130.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	7	kegiatan		569.459.013	116.67	50.39	7	kegiatan		569.459.013	tdr	4.11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			- Jumlah pelatihan desa wisata	40	Desa		7.862.098.000		40	Desa		-																					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			- Jumlah pelatihan kelompok sadar wisata	20	Pokdarwis		868.620.000		34	Pokdarwis		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			- Jumlah SDM pengelola objek wisata	1.800	Orang		5.114.943.000		781	Orang		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
														Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terciptanya kerjasama kemitraan pariwisata	1	tahun		368.250.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	tahun		1.692.469.320	100.00	459.60	1	tahun		1.692.469.320	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
														Pengelolaan Investasi Pariwisata	terjalinya kerjasama kemitraan	1 n 2	dokumen kegiatan		368.250.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata	15	kegiatan		1.692.469.320	sts	459.60	15	kegiatan		1.692.469.320	tdr	12.27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			- Jumlah FGD/Sosialisasi kemitraan pariwisata	16	Kali		4.536.735.000		5	Kali		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			- Jumlah kerjasama kemitraan pariwisata	4	Kali		217.155.000		-	Kali		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			- Jumlah kelikutsertaan kegiatan kemitraan pariwisata nasional/internasional	18	Kali		4.691.635.000		4	Kali		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			- Jumlah Kegiatan Famtrip Stake Holder Pariwisata	20	Kali		4.343.100.000		3	Kali		-																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
																																		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Objek Wisata	37	Objek		1.601.560.000		37	Objek		1.252.555.392																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata	42	Objek		118.562.606.879		38	Objek		64.110.316.823																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya event daya tarik pariwisata Aceh	16	Event		19.656.378.000		28	Event		10.234.205.386																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		Penataan kawasan wisata	Jumlah sarana dan prasana pariwisata	1	Kawasan	7.150.000,000	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan Wisata	4	Dokumen	189,053,000	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Program Pengembangan Kemiraan sudah dipindahkan ke Program destinasi									7,392,200,000													DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Meningkatnya kontribusi pariwisata	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara	#####	Wisatawan	6,832,302,296	2,498,249	Wisatawan	4,640,819,576			902,486	Wisatawan			tdr		#####	Wisatawan	4,640,819,576	118,79	67,92		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Meningkatnya kontribusi pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	5,007.208; 3	Hari	88,481,263,781	2647318; 4	wisatawan; hari	17,368,553,810			1,62	Hari			tdr		sts	sts	17,368,553,810	sts	19,63		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	Jumlah media informasi dan promosi potensi budaya dan pariwisata (paid media, sosial media, own media, dan endorse)	16	Media	10,957,050,000	-	-				10	kegiatan	2,992,200,000			34	kegiatan	5,274,556,162	sts	176,28	34	kegiatan	5,274,556,162	tdr	34,47	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		-Terlaksananya Strategi komunikasi pemasaran pariwisata		16	Kali	4,343,100,000	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen Analisa pasar promosi dan pemasaran	4	Dokumen	3,257,325,000	2	Dokumen	585,175,096			1	tahun	2,000,000,000			1	tahun	624,687,910	100,00	31,23	1	tahun	624,687,910	sts	19,18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Tersedianya aplikasi sistem informasi pariwisata terintegrasi	4	Tahun	2,709,132,000	2	Tahun	618,983,079			6	kegiatan	400,000,000			6	kegiatan	936,148,000	100,00	234,04	6	kegiatan	936,148,000	sts	34,56	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri				57,644,117,500	-	-	9,891,235,781			1	tahun	2,000,000,000			1	tahun	1,310,078,123	100,00	65,50	1	tahun	1,310,078,123	tdr	2,27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah promosi pada media cetak	120	Media	1,737,240,000	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pemasaran/promosi kepariwisataan (nasional dan internasional)	48	Event	34,191,377,500	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
			Jumlah promosi melalui media Digital, Luar Ruang dan Indoort di Dalam dan Luar Negeri	4	Tahun	21,715,500,000	-	-																DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Program Pengembangan pemasaran pariwisata																						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Meningkatnya Jumlah Informasi Potensi Pariwisata Daerah melalui Media Cetak, Elektronik dan Outdoor	4	Media	590,260,000	3	Media	1,413,855,000												3	Media	1,413,855,000	75,00	239,53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pemasaran/promosi kepariwisataan (nasional dan internasional)	10	Kali pameran	2,923,000,685	12	Kali pameran	2,324,794,830												12	Kali pameran	2,324,794,830	120,00	79,53	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pelatihan pemandu wisata terampil	Pelatihan pemandu wisata	150	Orang	1,055,980,000	100	Orang	902,169,746												100	Orang	902,169,746	66,67	85,43	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
																								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sudah pindah ke kegiatan pada tahun <2020									700,000,000						6	Kawasan	362,637,000	tdr	51,81	sts	sts	362,637,000	tdr	tdr	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sandiungan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
											Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Tolak Ukur																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Yang ceko untuk keg di bawah Pengembangan cinderamata khas daerah					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	terciptanya pelaku usaha pariwisata dan instansi terkait tersosialisasi	1	tahun	700,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1	tahun	362,637,000	100.00	51.81	1	tahun	362,637,000	tdr	tdr	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A						
		Pengembangan cinderamata khas daerah	Tersedianya pengrajin cinderamata yang kreatif dan inovatif dan profesional	16	Jenis	3,908,790,000		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	1	tahun	500,000,000	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik				sts	-					tdr	tdr	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
								Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1	tahun	200,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1	tahun	362,637,000	100.00	181.32	1	tahun	362,637,000	sts	sts	9.28	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi	3	Kawasan	1,350,550,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6	Kawasan	2,343,373,737	tdr	173.51	sts	sts	2,343,373,737	tdr	tdr	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A						
								Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	840	orang	1,350,550,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	809	orang	2,343,373,737	96.31	173.51	809	orang	2,343,373,737	tdr	tdr	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A						
PUPK		Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Jumlah SDM pengelola objek wisata/industi kreatif pariwisata / pendukung wisata halal	4,600	Orang	10,065,469,282	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1	tahun	400,000,000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1	tahun	202,394,500	100.00	50.60	1	tahun	202,394,500	sts	sts	2.01	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
		Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah SDM yang dilatih	1,200	Orang	6,514,650,000	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	terciptanya SDM yang berkualitas	1	tahun	200,000,000	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	1	tahun	1,701,440,095	100.00	850.72	1	tahun	1,701,440,095	sts	sts	26.12	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
								Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	tahun	200,000,000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
		Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi				6,514,650,000		Jumlah SDM Pengelola objek wisata/industi kreatif pariwisata jumlah SDM Pengelola objek wisata/industi kreatif pariwisata	6	kegiatan	550,550,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	6	kegiatan	439,539,142	100.00	79.84	6	kegiatan	439,539,142	tdr	tdr	6.75	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
			Jumlah auditor (standarisasi/sertifikasi) pendukung program wisata halal	150	Orang	700,000,000												150	Orang	-	100.00	-	-	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
			Jumlah usaha kepariwisataan yang terstandarisasi/ terertifkasi	60	Usaha Pariwisata	2,340,170,000												-	-	-	sts	-	-	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
			Jumlah Pelaku Usaha kepariwisataan dan Instansi Terkait tersosialisasi	3,360	Orang	3,474,480,000												-	-	-	sts	-	-	DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A					
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lntas sektor dan wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%taee konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	90	%	6,662,200,000		80	%	4,053,084,427														DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	4	tahun	4,922,860,000																			DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
																									DINAS KEKUDAYAA N DAN PARIWISAT A				
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh			521,940,285,563					166,723,440,104	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh			83,377,366,991		-								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Urusan Wajib Non Pelayann Dasar				521,940,285,563					166,723,440,104	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			83,377,366,991		-								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Menjadi			K			K		K			K					
				Rp.			Rp.			Indikator Kinerja Capaian Program / Target			Alokasi Anggaran (Rp.)			Rp.			Rp.		Rp.			Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan		K
		Bidang Urusan Kearsipan			499,894,288,083			159,698,164,824	PERENCANAAN									80,258,152,099							239,956,316,923		48.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
					180,469,671,842			51,622,170,062	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									38,177,619,799	tdr	-	sts	sts			89,799,789,861	tdr	49.76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	36,963,935,232	(0)	%	17,926,431,271	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%									sts	sts			17,926,431,271	sts	48.50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	%tase Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan	100	%	5,026,275,154	44	%	1,732,975,313	%tase Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan	100	%									sts	sts			1,732,975,313	sts	34.48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	4,565,708,975	100	%	1,644,959,000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%										sts	sts			1,644,959,000	sts	36.03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	15,939,473,200	111	%	15,837,326,948	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%										sts	sts			15,837,326,948	sts	99.36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan	1300	Orang	16,808,023,753	sts	sts	2,304,038,679	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan	1300	Orang										sts	sts			2,304,038,679	sts	13.71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	101,166,255,528	78	%	12,176,438,851	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%										sts	sts			12,176,438,851	sts	12.04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	0	0	-	-	-	-	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%									sts	sts			-	tdr	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	bulan						1,064,975,030	sts	tdr					1,064,975,030	tdr	tdr	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
		Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Terlaksananya Penyusunan Program dan Budaya Baca	100	%	4,353,100,000	20	%	2,448,403,330	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	12	bulan	193,150,000					786,938,210	sts	407.42	178	%			3,235,341,540	177.84	74.32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
		Rapat koordinasi teknis (Rakornis)	terlaksananya Rakornis Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	2,404,645,000	200	%	1,603,747,700	Tersedianya Perencanaan dan Program	12	bulan	70,579,950					-	tdr	tdr	sts	sts			1,603,747,700	sts	66.69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Terlaksananya Monitoring Kondisi Data Arsip	100	%	2,708,549,000	186	%	390,730,950	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	70,579,950					278,036,820	sts	393.93	359	%			668,767,770	359.46	24.69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
										Administrasi Keuangan	100	%						27,986,337,635	sts	tdr	-	-			27,986,337,635	tdr	tdr	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
										Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	20,766,099,558					27,986,337,635	214.29	134.77	30	bulan			27,986,337,635	tdr	tdr	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
										Administrasi Umum								8,318,694,616	tdr	tdr	-	-			8,318,694,616	tdr	tdr	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Perangko dan Jasa Pengiriman Surat	100	%	245,641,875	60	%	149,038,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	%	36,000,000					87,320,000	896.05	242.56	239	%			236,358,600	239.21	96.22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, Jasa Air, dan Jasa Listrik	100	%	8,464,582,800	60	%	4,055,013,740	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20	%	1,020,700,000					1,875,639,416	716.95	183.76	203	%			5,930,653,164	203.39	70.06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan			Vol	Satuan								Vol	Satuan			Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Honorarium PNS dan NON PNS serta jasa Cleaning Service di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	70	bulan		14,671,070,656	42	bulan		8,179,640,924	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan ASN dan Tenaga Kontrak	14	bulan		3,695,540,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30	bulan		60,444,580,000	214.29	163.56	72	bulan		14,224,098,924	102.86	96.95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
																		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tdr	tdr										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Pengandaan	60	bulan		1,628,127,775	36	bulan		915,296,450	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	12	bulan		194,400,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	30	bulan		736,873,373	250.00	379.05	66	bulan		1,652,169,823	110.00	101.48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik Elektronik	60	bulan		2,174,740,665	36	bulan		224,810,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik serta Lighting (Penerangan) Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan	12	bulan		155,100,330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	bulan		171,760,000	250.00	110.74	66	bulan		396,570,500	110.00	18.24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan AC Gedung Pelayanan Perpustakaan Aceh	100	%		3,749,000,000	-	%		208,297,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Keakuratan dan Kelancaran Kerja	12	bulan		526,000,000		135	%		8,908,815,300	sts	1,693.69	135	%		9,117,112,900	134.91	243.19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	100	%		1,100,000,000	-	%															tdr	tdr	sts	sts				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Pengadaan mebeleur	adanya Karpet Ruang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	100	%		1,715,015,000	-	%		677,019,200														tdr	tdr	sts	sts		677,019,200	sts	39.48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sound dan Layar Infocus untuk layanan Perpustakaan	100	%		1,026,240,000	100	%		88,545,000																					88,545,000	sts	8.63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
		Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	100	%		1,450,000,000	82	%		120,736,000																					120,736,000	sts	8.33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Sarat Kabor/Majalah	60	Bln		302,748,100	sts	sts		64,615,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Informasi	12	bulan		76,702,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	138	%		34,514,119,866	sts	#####	sts	sts		34,578,734,866	sts	11,421.62			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat, Semam Kesegaran Isomoni, Makan dan Minum Satpam dan Makan dan Minum Tamu	60	Bln		1,541,012,382	sts	sts		997,325,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat, Makan dan Minum Semam dan petugas satpam serta makan dan minum tamu	12	bulan		266,633,750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166	%		408,236,203	sts	153.11	sts	sts		1,405,561,203	sts	91.21			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	%		4,633,729,996	sts	sts		2,008,985,549	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	bulan		416,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183	%		739,575,202	sts	177.57	sts	sts		2,748,560,751	sts	59.32			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	100	%		3,739,000,000	206	%		1,674,766,063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	bulan		85,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142	%		2,048,988,114	sts	2,410.57	348	%		3,723,754,177	348.14	99.59			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Perawatan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Roda 4	100	%		3,312,210,000	152	%		2,167,383,587	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan		744,340,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajangan	101	%		1,321,559,383	sts	177.55	254	%		3,488,942,970	253.55	105.34			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Komputer, Printer, Lift, dan Alat Alat Visual	60	bln		2,172,222,938	sts	sts		552,897,450	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Komputer, Printer, Lift dan Alat Audio Visual	12	bulan		295,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152	%		487,897,004	sts	165.39	sts	sts		1,040,794,454	sts	47.91			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	%		2,739,184,388	165	%		833,724,782	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Perpustakaan dan Arsip	12	bulan		225,883,024	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Ruang	138	%		297,624,880	sts	131.76	303	%		1,131,349,662	302.90	41.30			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan dan Kearsipan	100	%		1,937,230,000	316	%		813,663,700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Memahami peraturan Perundang-undangan dan Meningkatkan Mutu Perpustakaan dan Kearsipan	12	bln		202,500,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	111	%		160,498,538	sts	79.26	428	%		974,162,238	427.50	50.29			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Bimbingan/penyuluhan kearsipan	Terlaksananya : Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Umum, Gampong Kecamatan dan Pesantren dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	100	%		4,421,731,900	219	%		1,285,488,980	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan yang Berkompeten	2	keg		165,150,461	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	%		349,489,100	sts	211.62	329	%		1,634,978,080	329.07	36.98			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
		Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan dan perpustakaan	100	%		2,856,499,236	262	%		1,016,966,800																						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		
																																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)									Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
				K			Rp.			K			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target Tolak Ukur	Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.		K		Rp.			K	Rp.	K	Rp.								
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol						Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14		15																				
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
		Bidang Urusan Perpustakaan		22,045,997,480					7,025,275,280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	%tase SKPA yang sudah menerapkan Arsip secara baku	100	%	5,101,016,381	97	%	1,416,300,791	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan	100	%																						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh						
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
		Pengolahan arsip	tersedianya Khasanah Arsip	100	%	4,437,938,099	210	%	2,722,791,140	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tertata dan Terpeliharanya Arsip	100	%																							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
																																				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
		Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah	Terlaksananya Pelacakan Arsip/ Dokumen dan Penarikan Arsip	100	%	3,058,646,750	122	%	311,777,274	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Terpeliharanya Arsip/Dokumen	100	%																								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
		Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Preservasi Arsip dan Pungasi	100	%	2,346,076,869	211	%	1,342,244,363																												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				

Tabel. 2.122
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K	Rp.	K	Rp.	Samudra		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjuali	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
								Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan Target											Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan									
		Urusan Pilihan				1,373,258,609,794			518,790,517,934	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				213,781,626,949	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					135,490,708,627			63.38			654,281,226,561			47.64	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan				1,373,258,609,794			518,790,517,934	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				213,781,626,949	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					135,490,708,627			63.38			654,281,226,561	139.92	47.64	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
						47,789,021,027			19,111,750,465	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				43,405,659,430	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					36,314,206,346			83.66			55,425,956,811	tdr	115.98	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	28,335,651,027	100	%	14,735,919,405	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%									99.51	100	%	14,735,919,405	99.76	52.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	800,000,000	100	%	196,561,000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%									400.00	250	%	196,561,000	250.00	24.57	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	16,653,370,000	66	%	3,949,156,660	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a	%									100	%	tdr	83	%	3,949,156,660	82.69	23.71	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	2,000,000,000	70	%	230,113,400	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	n/a	%									-	%	tdr	35	%	230,113,400	35.00	11.51	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang bersesuaian tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL) di bagi dengan Total Laporan	100	%									99	%	99.28	99	%	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	90	Persen	1,321,998,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91	Persen	1,015,163,288	101.46	-	91	Persen	1,015,163,288	tdr	tdr	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Jumlah dokumen renstra dan renja	2	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2	dokumen	1,321,998,000	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	6	dokumen	1,015,163,288	300.00	76.79	6	dokumen	1,015,163,288	tdr	tdr	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Jumlah dokumen evaluasi DRP Aceh	4	dokumen	-	-	6	dokumen	-	150.00	-	6	dokumen	-	-	tdr	tdr	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Jumlah data dasar perencanaan kelautan dan perikanan	23	Kab/Kota	-	-	31	Kab/Kota	-	134.78	-	31	Kab/Kota	-	-	tdr	tdr	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja DRP Aceh	6	dokumen	-	-	6	dokumen	-	100.00	-	6	dokumen	-	-	tdr	tdr	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Rp.		K		Rp.		K		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rp.		K		Rp.		K			Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
						Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kinerja ASN	370	Orang	34,016,495,106	Administrasi Keuangan	1,201	Orang	29,001,557,189	324.59	-	1,201	Orang	29,001,557,189	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	29,432,905,106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	25,923,464,189	100.00	88.08	12	bulan	25,923,464,189	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tambahan penghasilan ASN	12	bulan	4,583,590,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	3,078,093,000	100.00	67.15	12	bulan	3,078,093,000	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Jumlah dokumen keuangan yang terverifikasi	1	dokumen	-		1	-	-	sts	-	1	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	1	dokumen	-		1	-	-	sts	-	1	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Jumlah penyajian dokumen tanggapan pemeriksaan	1	dokumen	-		1	-	-	sts	-	1	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja DKP Aceh	4	dokumen	-		4	dokumen	-	100.00	-	4	dokumen	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	bulan	-		12	bulan	-	100.00	-	12	bulan	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
							Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	-		1	-	-	sts	-	1	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
						Administrasi Umum	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	Persen	8,067,166,324	Administrasi Umum	98	Persen	6,297,485,869	97.89	78.06	98	Persen	6,297,485,869	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dinas (Bulan)	12	Bulan	207,500,000	36	Bulan	87,666,174	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat DNP Aceh	12	bulan	16,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	15,141,000	100.00	90.94	48	bulan	102,907,174	400.00	49.59	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	5,700,000,000	36	Bulan	3,617,807,816	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	3,089,552,848	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	1,977,063,979	100.00	63.99	48	bulan	5,594,871,795	400.00	98.16	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	1,214,250,000	36	Bulan	391,566,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	311,477,868	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	291,443,100	100.00	93.57	48	bulan	683,009,600	400.00	56.25	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	12	bulan	-			3	bulan	-	25.00	-	3	bulan	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	Keg	192,000,000	sts	sts	77,760,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	1,411,360,623	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	896,144,148	100.00	63.50	sts	sts	973,904,148	sts	507.24	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	Unit	6,222,850,000	285	Unit	1,564,695,460	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	unit	-	20.00	-	305	unit	1,564,695,460	305.00	25.14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	2,855,000,000	36	Bulan	2,084,750,450	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	1,264,816,752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1,199,470,000	100.00	94.83	48	bulan	3,284,220,450	400.00	115.03	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	5,593,500,000	36	Bulan	3,237,311,000																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	2,187,433,500	36	Bulan	863,087,184	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia alat tulis kantor	12	bulan	713,237,443	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	661,512,290	100.00	92.75	48	bulan	1,524,599,474	400.00	69.70	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	750,000,000	36	Bulan	321,569,500	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	bulan	-	25.00	tdr	39	bulan	321,569,500	325.00	42.88	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	890,000,000	36	Bulan	507,472,136	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	350,000,020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	349,996,950	100.00	100.00	48	bulan	857,469,086	400.00	96.34	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	234,000,000	36	Bulan	511,498,400																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	keg	240,805,800	36	bulan	116,984,225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	85,513,050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	84,725,906	100.00	99.08	48	bulan	201,710,131	sts	83.76	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan				3	bulan	-	25.00	tdr	3	bulan	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan				3	bulan	-	25.00	tdr	3	bulan	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	5,264,980,000	36	Bulan	1,791,126,790	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	498,258,496	100.00	99.65	48	bulan	2,289,385,276	400.00	43.48	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1	unit				-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Unit	6,732,600,000	3	Unit	944,093,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	1	SKPA	324,557,720	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	skpa	323,730,000	200.00	99.74	sts	sts	1,267,823,000	sts	18.83	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	1	Unit	5,072,350,000	3	Unit	336,193,200																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan dan terampilnya ASN DNP Aceh	100	persen		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100	%	800,000,000	100	%	196,561,000		Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya	450	orang							sts	tdr	-	-	-	-	sts	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis	60	Orang	2,000,000,000	13	Orang	230,113,400		Terdidik dan terlatihnya ASN DNP Aceh	50	orang							sts	tdr	-	-	-	sts	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	5	Unit	1,500,000,000	2	unit	1,104,175,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional									tdr	tdr	-	-	-	sts	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				K		Rp.	K		Rp.	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Capaian Program / Koharian Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.												
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25									
		Kegiatan pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Meningkatnya Uluhan Hasil Perikanan (ton)			-	-	-																		tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh										
		Kegiatan pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Tersedianya Pengembangan Perikanan (keg)			-	-	-																		tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh										
									Pengelolaan Penuhapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	222959	Ton	200,000,000	Pengelolaan Pemangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	576,253	Ton	199,173,000	tdr	99.59	576,253	Ton	199,173,000	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh											
									Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD	1	Dokumen															tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh										
		Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan	Sarana dan prasarana perikanan tangkap (unit)	10,00	unit	1,621,150,000	2	unit	299,897,688	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana yang dibangun	1	Unit	200,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1	Unit	199,173,000	100.00	99.59	1	Unit	199,173,000	10.00	12.29	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh										
		Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan	Produktivitas Sektor Perikanan Tangkap (ton)			-	-	-			Jumlah sarana usaha yang dibangun	40	Unit				3	Unit	7.50	tdr	3	Unit	-	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh										
		Kegiatan Pengadaan Armada Kapal	Jumlah kapal perikanan ≤ 15 GT yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit; Kumulatif)	6,007	Unit	29,000,000,000	23	Unit	842,748,750																		tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh									
		Kegiatan Pengadaan Armada Kapal	Jumlah kapal perikanan > 15 GT yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit; Kumulatif)			-	-	-																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh								
		Kegiatan Pengadaan Armada Kapal	Jumlah kelompok usaha nelayan yang dibina (kelompok; Kumulatif)	50,00	kdp	500,000,000	-	-	-																				-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh							
		Kegiatan Pengadaan Armada Kapal	Jumlah bagan apung (unit; Kumulatif)	43,00	Unit	19,350,000,000	-	-	-																					-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh						
		Kegiatan Pengadaan Armada Kapal	Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan Perikanan/RTP (Kumulatif)	20,00	RTP	750,000,000	-	-	-																					-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh						
									Penetapan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	222959	Ton	50,000,000	Penetapan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	576,253	Ton	40,944,700	tdr	-	576,253	Ton	40,944,700	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh								
		Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (paket)			-	-	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumen persetujuan yang dikeluarkan izimnya	18	Dokume n	50,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	18	Dokume n	40,944,700	tdr	81.89	18	Dokume n	40,944,700	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh								
		Kegiatan pembinaan kelembagaan dan SDM nelayan	Jumlah usaha nelayan yang dibina (orang; non kumulatif)	1,500,00	Orang	2,900,000,000	130	Orang	394,051,955																					-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh						
		Kegiatan pembinaan kelembagaan dan SDM nelayan	Jumlah kelembagaan nelayan yang dibina (unit; non kumulatif)	18,00	Unit	2,250,000,000	2	Unit	5,100,000																						-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					
		Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Peningkatan Produksi dan pemasaran perikanan			-	-	-	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	222959	Ton	11,431,346,093	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	576,253	Ton	9,890,865,511	tdr	-	576,253	Ton	9,890,865,511	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh							
		Kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan	Terlaksananya pembangunan PPI (meter)	21,00	lokasi	85,500,000,000	20	lokasi	65,700,317,953	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan	7	Lokasi	9,601,114,340	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	7	Lokasi	8,472,639,111	100.00	88.25	7	Lokasi	8,472,639,111	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh							
		Kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan	Sarana dan prasarana perikanan tangkap (keg)			-	-	-																							-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					
		Kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan (paket)			-	-	-																								-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan	Pelabuhan Perikanan (%)	100,00	%	15,000,000,000	35	%	5,176,012,250																							-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan	Tersedianya Bangunan Jetty Alur Pelayaran Sesuai Gambar Rencana (paket)			-	-	-																									-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
		Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah Bangunan (unit)	5,00	unit	5,000,000,000	1	Unit	3,723,502,281																								-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
		Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah Bangunan (unit)			-	-	-																										-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi;kumulatif)	1	Lokasi	109,054,327,093	2	Lokasi	31,767,329,140																									-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi;kumulatif)			-	-	-																											-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi; non kumulatif)	1	Lokasi	210,324,267,155	2	Lokasi	67,604,698,318																										-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi; non kumulatif)			-	-	-																												-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
				K			K			Sandiangan			Menjadj				K		K			K															
				Rp.			Rp.			Rp.			Rp.				Rp.		Rp.			Rp.															
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah penyediaan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi; non kumulatif)	5	Lokasi	326,985,850,407	37	Lokasi	40,398,680,817																										Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Penyusunan Dokumen Lingkungan (Dokumen Kumulatif)	17	Dokumen	28,000,000,000	3	Dokumen	2,410,715,000																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (Dokumen Kumulatif)	17	Dokumen	32,000,000,000	1	Dokumen	752,201,715																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	Jumlah layanan keayahbantuan (Bulan)	12	Bulan	4,500,000,000	12	Bulan	734,718,289	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan	12	Bulan	1,830,231,753	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	12	Bulan	1,418,226,400	100.00	77.49	12	Bulan	1,418,226,400	100.00	31.52										Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	Jumlah layanan usaha pelabuhan (Bulan)	12	Bulan	4,500,000,000	12	Bulan	634,207,194																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	Jumlah layanan administrasi pelabuhan (Bulan)	12	Bulan	6,000,000,000	12	Bulan	1,803,522,851																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	222959	Ton		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Ton																				Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
										Jumlah kapal yang memenuhi persyaratan pendaftaran		32	Unit																							Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
																																				Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
																																				Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
																																				Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
																																				Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
	Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	138682	ton	380,099,591,734	319,938	ton	240,413,589,006	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	128470	Ton	137,141,138,783	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	292,028	ton	75,123,595,712	tdr	54.78	305,983	ton	315,537,184,718	220.64	83.01										Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	128470	Ton	137,141,138,783	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	292,028	Ton	75,123,595,712	tdr	-	292,028	Ton	75,123,595,712	tdr	tdr										Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
										Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan		1	Dokumen																							Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air laut	Jumlah Keramba Jaring Apung	36	Unit	6,800,000,000	12	Unit	2,070,190,627	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu	6	Unit	667,564,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4	Unit	69,662,800	66.67	10.44	4	Unit	69,662,800	11.11	1.02										Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air laut	Jumlah Pengadaan Pakan Ikan Rucuh (ton; non kumulatif)	85	Ton	1,825,000,000	10	Ton	1,870,170,000																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air laut	Jumlah benih komoditas unggulan budidaya air laut yang dibantu yang dibantu	7.1	Juta Ekor	5,450,000,000	1	Juta Ekor	5,197,150,190																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Revitalisasi perikanan budidaya air tawar	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pemuliharaan Perikanan Budidaya	21	Lokasi	32,800,000,000	21	lokasi	23,412,997,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Ditentukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya	21	lokasi	1,824,210,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Ditentukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17	lokasi	439,163,000	80.95	24.07	17	lokasi	439,163,000	80.95	1.34											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar	Jumlah pengadaan agroinput ikan air tawar																																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau	Meningkatnya produksi komoditi budidaya air payau	80,200	ton	66,150,000,000	61,252	ton	28,684,879,700																											Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau	Tersedianya lokasi perikanan budidaya yang direvitalisasi																																		Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pembangunan perikanan budidaya terpadu	Berkembangnya budidaya perikanan air tawar																																		Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar	Luas kawasan budidaya ikan air tawar yang direvitalisasi (Ha; kumulatif)	170	Ha	48,000,000,000	28	Ha	22,687,505,256																												Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Luas kawasan budidaya ikan air payau yang direvitalisasi (ha)	6200	Ha	48,600,000,000	76	Ha	11,143,890,875		Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang dibantu	20	unit																								Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Panjang saluran tambak yang direhab (Km; Kumulatif)	184.1	Km	11,858,269,237	30	Km	5,971,516,181																												Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Jumlah jembatan produksi yang dibangun (unit; kumulatif)	120	Unit	13,800,000,000	-																														Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Panjang jalan produksi yang dibangun (km; kumulatif)	60	Km	7,700,000,000	-																														Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/kegiatan)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol			Satuan	Vol	Satuan					Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar	Pakan ikan air tawar (ton; non kumulatif)	703	Ton	9,786,000,000	305	Ton	8,003,207,807	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang menggunakan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarannya	21	lokasi	134,649,364,783	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang menggunakan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21	lokasi	74,614,769,912	100.00	55.41	21	lokasi	74,614,769,912	sts	762.46	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan mandiri (kelompok; kumulatif)	33	Kelompok	10,500,000,000	5	Kelompok	595,141,037																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar	Jumlah benih komoditas unggulan budidaya air tawar yang dibantu (juta ekor;kumulatif)	126	Juta Ekor	12,000,000,000	81	Juta Ekor	11,540,960,640																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Jumlah KJA yang direvitalisasi (unit; Kumulatif)	25	Unit	17,000,000,000	-		-																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan mandiri (kelompok; kumulatif)	47	Kelompok	9,400,000,000	4	Kelompok	872,659,010																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Pakan ikan air payau (ton; non kumulatif)	600	Ton	14,250,000,000	290	Ton	7,480,592,395																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Jumlah benih komoditas unggulan budidaya air payau yang dibantu (juta ekor; kumulatif)	410	Juta Ekor	85,800,000,000	80	Juta Ekor	53,615,217,109																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau	Jumlah perencanaan pembangunan (RIPJM, ID Tambak, IED, Kelembagaan) kawasan klaster komoditi unggulan perikanan budidaya berbasis mukim (dokumen; kumulatif)	261	Dokumen	12,600,000,000	72	Dokumen	875,201,900																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Unit Pembenhian Rakyat (UPR) yang menghasilkan benih unggul (unit;kumulatif)	68	Unit	15,200,000,000	25	Unit	2,129,505,016	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya kesehatan ikan dan lingkungan	-	lokasi	-	tdr	tdr	-	lokasi	-	tdr	tdr	-	lokasi	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya pembenih yang bersertifikat CPB (Cara Pembenhian Ikan yang Baik) (orang)	290	Orang	8,880,000,000	165	orang	23,368,847,475		Jumlah pantauan dan pembenihan dikawasan pembudidayaan ikan	-	lokasi	-	tdr	tdr	-	lokasi	-	tdr	tdr	-	lokasi	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pelaku usaha pendederan (orang;kumulatif)	225	Unit	19,350,000,000	70	Unit	24,866,630,255																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pelaku usaha pendederan (orang;kumulatif)	-	-	-	-	-	-																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Unit Pembenhian Rakyat (UPR) yang menghasilkan benih unggul (unit;kumulatif)	-	-	-	-	-	-																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pembinaan kelembagaan dan pembudidayaan ikan	Terbtiannya kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	980	Klp	3,688,300,000	160	Klp	5,575,805,400																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pembinaan kelembagaan dan pembudidayaan ikan	Berkembangnya kegiatan percobaan teknologi anjuran (pilot project)	50	keg	-	-	-	-																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Pengembangan sarana dan prasarana Balai Benih Air Tawar (unit; non kumulatif)	3	Unit	11,675,682,876	4	Unit	520,515,740																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Pengembangan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan pantai (unit; non kumulatif)	2	Unit	35,957,508,277	6	Unit	644,123,660																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Produksi calon induk unggul air tawar (Ekor; kumulatif)	79595	Ekor	2,746,325,000	54346	Ekor	842,146,400																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Produksi benih unggul (juta ekor; non kumulatif)	7	Juta Ekor	2,400,000,000	1	Juta Ekor	317,067,000																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pembinaan kelembagaan dan pembudidayaan ikan	Terbtiannya kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	980	Kelompok	11,175,000,000	150	Kelompok	1,536,807,981																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Kegiatan pembinaan kelembagaan dan pembudidayaan ikan	Jumlah percobaan teknologi anjuran (pilot project) (kegiatan; kumulatif)	105	Kegiatan	8,000,000,000	21	Kegiatan	3,961,416,419																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan Perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Air Tawar (unit; non kumulatif)	4	unit	34,475,682,876	8	Unit	9,483,328,284																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan Perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Ikan pantai (unit; non kumulatif)	2	unit	35,957,508,277	4	Unit	26,135,202,310																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan Perikanan	Produksi calon induk unggul air tawar (Ekor; kumulatif)	79595	ekor	2,746,325,000	24000	Ekor	691,763,926																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan Perikanan	Produksi benih unggul (juta ekor; non kumulatif)	4	Juta Ekor	6,936,250,353	4	Juta Ekor	6,936,250,353																	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Koharan Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol			Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
				20	Kelompok		45	Kelompok							20	Kelompok		45	Kelompok				225,00	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
									Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Meningkatnya nilai ekspor perikanan dan jumlah pengolahan ikan (jumlah masyarakat pengolahan hasil perikanan)	30	Kelompok																	
										Meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan	10	Unit	894,424,711		8	Unit	670,785,350	80,00	-	8	Unit	670,785,350	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
										Jumlah bintek penerapan syarat dan standar produk olahan	200	orang			-	orang	-	-	tdr	-	orang	-	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Customer (Dokumen; non kumulatif)	2	Dokumen	200,000,000	4	Dokumen	736,708,719	Jumlah pantauan mutu dan keamanan hasil perikanan	200	sampel	894,424,711		187	sampel	670,785,350	93,50	75,00	187	sampel	670,785,350	sts	335,39	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Monitoring (Dokumen; non kumulatif)	3	Dokumen	400,000,000	4	Dokumen	482,173,150														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana UPTD (LPPMHP) (lokasi; non kumulatif)	1	Lokasi	500,000,000	1	Lokasi	397,115,101														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah pelatihan sosialisasi mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan (kegiatan; non kumulatif)	10	Kegiatan	400,000,000	10	Kegiatan	662,636,880														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah Surveillance UPI (Unit Pengolahan Ikan) (Dokumen; non kumulatif)	4	Dokumen	160,000,000	4	Dokumen	205,424,721														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah surveillance KAN (Komite akreditasi nasional) (Dokumen; non kumulatif)	4	Dokumen	60,000,000	2	Dokumen	53,961,063														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Akreditasi laboratorium pengujian (penambahan parameter; kumulatif)	5	Parameter	50,000,000	4	Parameter	62,017,952														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah pembinaan kompetensi analis laboratorium perikanan (orang; non kumulatif)	20	Orang	248,000,000	11	Orang	128,908,070														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Monitoring (Dokumen; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana UPTD (LPPMHP) (lokasi; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelatihan sosialisasi mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan (kegiatan; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Surveillance UPI (Unit Pengolahan Ikan) (Dokumen; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah surveillance KAN (Komite akreditasi nasional) (Dokumen; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pembinaan kompetensi analis laboratorium perikanan (orang; non kumulatif)																				tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian dan Penerimaan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Customer (Dokumen; non kumulatif)	500	LHU	250,000,000	500	LHU	247,353,977														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
									Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri/ Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terperluhnya bahan baku perikanan di kabupaten/kota	23	Lokasi	959,693,928		20	lokasi	854,370,000	tdr	-	20	lokasi	854,370,000	tdr	tdr	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan; operasional pusat jaringan usaha dan inovasi (PUSJU) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan	Terbanggunya sentral-sentral pengolahan ikan (unit)	25	Unit	1,500,000,000	25	Unit	1,860,143,900	Jumlah lokasi pendistribusian bahan baku perikanan	23	lokasi	959,693,928		20	lokasi	854,370,000	86,96	89,03	20	lokasi	854,370,000	sts	56,96	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
		Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan/ pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersertifikasi (Unit; kumulatif)	46	Unit	2,310,000,000	13	Unit	334,050,410														-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			
				Vol			Satuan			Rp.			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian			-	-	-																		Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Tersedianya Sarana Produksi Pertanian			-	-	-																		tdr	tdr	
			Jumlah Sarana Produksi Perkebunan/Pertanian			-	-	-																		tdr	tdr	
			Terlaksananya Peningkatan Jalan Produksi Pertanian dan Perkebunan			-	-	-																		tdr	tdr	
			Tersedianya Traktor 4 Roda			-	-	-																		tdr	tdr	
			Tersedianya jalan produksi			-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembinaan peremajaan karet dan kelapa rakyat	Jumlah Luasan Tanam		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembangunan kebun kelapa sawit	Tersedianya Sarana Produksi		-	-	-																		tdr	tdr	
			Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Meningkatnya Budidaya Pinang dan Pala		-	-	-																		tdr	tdr	
			Terehabilitasinya Kebun Pinang Rakyat Betara			-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembangunan Kebun Karet Rakyat	Jumlah Bibit Karet yang disalurkan		-	-	-																		tdr	tdr	
			Perkebunan Kebun Kakao Rakyat	Jumlah Luasan Tanam		-	-	-																		tdr	tdr	
				Jumlah Bibit Kakao yang disalurkan		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi	Peningkatan produksi pertanian		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Tersedianya pupuk tanaman perkebunan sawit		748	Ha	6,505,461,912														748	Ha	6,505,461,912		tdr	tdr	
				Terpeliharanya tanaman perkebunan kakao musyarakat		-	-	-																		tdr	tdr	
				Terpeliharanya Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kopi)		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (DBHCHT)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)		67	Ha	3,331,006,617														67	Ha	3,331,006,617		tdr	tdr	
			Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani		2	Keg	1,183,643,050														2	Keg	1,183,643,050		tdr	tdr	
			Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	Tersedianya Sawah Baru		-	-	-																		tdr	tdr	
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Saproti Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.		-	-	-																		tdr	tdr	
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Saproti Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dan sarana penlukungannya.		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dan sarana penlukungannya.		-	-	-																		tdr	tdr	
			Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Perkebunan		-	-	-																		tdr	tdr	
			Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Perkebunan		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembinaan dan pengawasan peredaran benih dan bibit perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan	22	Kab	2,730,103,000	22	Kab	1,501,612,996												22	Kab	1,501,612,996	100.00	55.00	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Perkebunan.		-	-	-																	tdr	tdr		
			Pembangunan kebun kelapa sawit	Terbangunnya kebun kelapa sawit rakyat	170	Ha	9,124,540,000	170	Ha	5,602,944,100												170	Ha	5,602,944,100	100.00	61.40	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
				Terbangunnya kebun kelapa sawit rakyat		-	-	-																		tdr	tdr	
			Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat; Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan rakyat	3402	Ha	34,860,794,500	3,402	Ha	27,132,261,150												3,402	Ha	27,132,261,150	100.00	77.83	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
				Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat; Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan rakyat		-	-	-																		tdr	tdr	
			Pembangunan Kebun Karet Rakyat	Terbangunnya kebun karet rakyat	40	Ha	4,214,382,000	40	Ha	1,663,059,000												40	Ha	1,663,059,000	100.00	39.46	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
				Terbangunnya kebun karet rakyat		-	-	-																		tdr	tdr	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Indikator Kinerja Capaian Program / Kebutuhan Kegiatan Target	Vol			Satuan	Vol				Satuan	Vol				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
		Perlebuan Kebun Kakao Rakyat	Terbangunnya kebun kakao rakyat	320	Ha	7,720,444,000	320	Ha	4,497,921,883	-	-	-	-	-	-	-	-	320	Ha	4,497,921,883	100.00	58.26	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi	Terbinanya penangkar dan usaha perbenihan tanaman perkebunan	22	Kab	10,907,102,500	22	Kab	4,166,600,018	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Kab	4,166,600,018	100.00	38.20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan sarana Produksi	Terbinanya penangkar dan usaha perbenihan tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat	Terpeliharanya tanaman perkebunan rakyat	20,090	Ha	42,582,088,100	4,070	Ha	15,034,477,368	-	-	-	-	-	-	-	-	4,070	Ha	15,034,477,368	20.26	35.31	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar	terlaksananya penyelesaian konflik lahan usaha perkebunan besar	-	-	-	158	Perusahaan	1,466,845,294	-	-	-	-	-	-	-	-	158	Perusahaan	1,466,845,294	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar (DPH)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)	1	-	286,745,871	-	-	286,745,871	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	286,745,871	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	Tersedianya benih sumber padi kelas BD	7	Komoditi	1,490,226,860	7	Komoditi	1,490,226,860	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Komoditi	1,490,226,860	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	3	Kmdt	5,938,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Meningkatnya sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	725	Ha	5,260,550,000	7	Komoditi	810,122,500	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Komoditi	810,122,500	sts	15.40	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan	25	Pkt	10,772,200,000	8	Pkt	2,112,243,004	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Pkt	2,112,243,004	32.00	19.61	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya kegiatan Badan Layanan Umum Daerah pada BBTP Keumala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	1	UPTD	4,000,000,000	3	Pkt	3,255,419,036	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Pkt	3,255,419,036	sts	81.39	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	Tersedianya benih sumber bawang merah	18	Komoditi	2,708,455,695	18	Komoditi	2,708,455,695	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Komoditi	2,708,455,695	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Hortikultura	tersedianya benih sumber	1	Kmdt	751,032,950	-	-	751,032,950	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kmdt	751,032,950	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Persegar	Tersedianya bibit unggul kelapa, karet, pinang	5	Kmdt	4,260,955,000	10	Kmdt	5,983,553,564	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Kmdt	5,983,553,564	200.00	140.43	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Persegar	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Persegar	10	Kmdt	9,171,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Persegar	Tersedianya bibit unggul kopi, kakao, lada, cendek,eh	-	-	-	2,744	Btg	613,161,598	-	-	-	-	-	-	-	-	2,744	Btg	613,161,598	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan dan Persegar	Terlaksananya Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	3	Kmdt	4,405,720,000	3	Kmdt	491,908,050	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Kmdt	491,908,050	100.00	11.17	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	Terbinanya dan berkembangnya usaha penangkar benih perkebunan	6	Ha	1,319,620,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Ha	1,319,620,634	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Kebun Induk Kakao dan Kopi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan perkebunan	terbinanya dan berkembangnya usaha penangkar benih perkebunan	-	-	-	3,160	Btg	1,175,653,204	-	-	-	-	-	-	-	-	3,160	Btg	1,175,653,204	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi	Terbinanya desa mandiri benih Padi	690	Ha	1,080,000,000	611	Ha	955,578,230	-	-	-	-	-	-	-	-	611	Ha	955,578,230	88.48	88.48	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi	Terbinanya desa mandiri benih Padi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	Perbanyakan Benih Padi Tingkat Penangkar	5	Keg	7,230,329,440	40	sts	2,465,155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	sts	2,465,155,000	sts	34.09	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan	Terbinanya Penangkar	2600	Ha	9,685,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan (SILPA Otus)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)	-	-	-	-	-	1,953,704,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,953,704,000	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	Terbinanya Penangkar Benih Buah-buahan	11	Kmdt	7,871,975,000	17	Keg	2,400,874,530	-	-	-	-	-	-	-	-	17	Keg	2,400,874,530	sts	30.50	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura	Terbinanya Penangkar Benih	3	Keg	293,369,000	-	-	293,369,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Keg	293,369,000	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Sandingan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		
				K		Rp.	K		Sasaran		Alokasi Anggaran (Rp.)		Menjadi		K		Rp.	K			Rp.	K	Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		Optimasi lahan pertanian	bertambahnya luas tanam pertanian	-	-	-	-	-													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Optimasi lahan sawah	4.000	Ha	22.201.000.000	310	Ha	13.538.461.831												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Perluasan Areal Pertanian	Meningkatnya luas areal pertanian/ perkebunan	-	-	-	-	-													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya perluasan baku sawah	1.000	Ha	21.020.000.000	330	Ha	4.875.707.609												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pragaan	tersedianya Traktor 4 WD	240	Unit	26.830.000.000	2	sts	208.922.859												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Pengadaan Traktor 4-WD	240	Unit	26.830.000.000	7	Unit	2.288.166.500													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	tersedianya combine Harvester	130	Unit	24.050.000.000	6	sts	1.051.075.353												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Pengadaan Combine Harvester	130	Unit	24.050.000.000	244	Unit	9.227.824.500													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Peningkatan Prasarana Pertanian	Meningkatnya aksesibilitas jalan usahatan	-	-	-	-	-													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Peningkatan/Rehabilitasi jalan usahatan pola Padat Karya	12	Keg	32.718.000.000	44.517	Meter	26.499.676.000													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Peningkatan Prasarana Pertanian (SILPA)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (pad)	-	-	-	-	-	9.526.814.000												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Peningkatan Prasarana Perkebunan	Meningkatnya aksesibilitas jalan produksi perkebunan	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	6	Ke	49.565.423.392	87.377	Meter	34.153.358.133												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengawasan dan pembiinan peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	Terdatanya peredaran peralatan mesin pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Pengawasan dan Pendataan Peredaran Peralatan Mesin Pertanian	23	Kab	1.700.000.000	3	Keg	193.519.000												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pembiinan Pengoperasian alat Mesin Pertanian/Perkebunan	terlatihnya operator alat mesin pertanian	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana UPTD Mekanisasi Pertanian	1.100	Ha	20.229.253.960															Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana UPTD Mekanisasi Pertanian	32	Keg	7.078.700.000	2	Keg	3.588.684.338													Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Penyeleenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian	tersedianya peralatan dan perlengkapan teknolog pengalihan hasil perkebunan	4	Keg	4.000.000.000	1	Keg	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan padi	tersedianya saprodi pengembangan kawasan padi	32	Kab/Kota	23.728.863.650															Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	280.000	Ha	106.448.293.302	39.310	Ha	5.495.454.515												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan padi (SILPA Dtas)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (pad)	31	Kab/Kota	20.261.313.375															Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan jagung	tersedianya saprodi pengembangan kawasan jagung	28.000	Ha	13.547.341.936	3.431	Ha	14.196.128.673												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan kawasan jagung	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan tanaman aneka kacang dan umbi	Pengalihan Saprodi Benih dan Pupuk Pengembangan Kawasan Ubi Kayu	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan kawasan	7.500	Ha	3.218.985.000	120	Ha	471.510.534												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan buah-buahan	tersedianya saprodi pengembangan kawasan jeruk	2	Kmtd	1.374.916.669	38	Ha	696.567.775												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan kawasan jeruk	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan sentra buah-buahan	tersedianya saprodi pengembangan sentra pisang	6	Kmtd	7.520.270.000	30	Ha	4.985.984.370												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan sentra dan alokat	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan tanaman sayuran	tersedianya saprodi pengembangan kawasan cabe merah	214	Ha	10.252.351.200															Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan kawasan bawang merah dan cabe merah	3	Kmtd	13.424.400.000	148	Ha	3.108.112.329												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan kawasan tanaman sayuran (SILPA)	tersedianya saprodi pengembangan sentra Sayur-sayuran	96	Ha	1.900.642.950															Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan sentra kentang	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan sentra kentang	3	Kmtd	1.000.000.000	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Pengembangan sentra biofarmaka dan florikultura	tersedianya saprodi pengembangan jabe	3	Kmtd	2.300.000.000	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			tersedianya saprodi pengembangan jabe/kuuyil/Aggregok	-	-	-	-	-	-												Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K			K			Sandingan				Menjadi			K			K										
				Rp.			Rp.			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rp.			Rp.									
				Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis	terlaksananya pengembangan kebun kakao rakyat	3870	Ha	63,800,960,000	976	Ha	14,913,445,370																				Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SLPA)	terlaksananya Pengembangan Perkebunan Komoditi Strategis				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi strategis (SLPA)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)				476	Ha	10,988,738,750																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengembangan kawasan Perkebunan komoditi unggul	terlaksananya pengembangan kebun pinang rakyat				96	Ha	2,649,427,950																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		terlaksananya pengembangan Komoditi Unggul Perkebunan	2820	Ha	52,750,895,000	515	Ha	7,799,025,510																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		terlaksananya pengembangan kebun				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	terlaksananya pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura	22	Kab	6,759,935,000	13	Laporan	2,993,039,270																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		tercapainya penggunaan benih				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Peningkatan Sarana Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan perkebunan	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan sertifikasi benih TPH	22	Kab	5,997,100,000	1	Keg	10,905,000																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan, Identifikasi dan Gangguan Usaha Perkebunan, Terlaksananya Identifikasi Kebun Plasma/Masyarakat terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Perkebunan dan Terealisasinya Penyelesaian Kredit Eks UPP.	4	Kmdt	4,980,000,000	8	sts	1,649,703,406																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Tercapainya penggunaan benih perkebunan bersertifikat				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Tercapainya penggunaan benih perkebunan bersertifikat				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat	Terlaksananya rehabilitasi tanaman engklah rakyat	7,750	Ha	22,493,925,560	783	Ha	4,329,935,450																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Terlaksananya rehabilitasi lahan perkebunan rakyat				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengolahan dan penutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan	Terlaksananya pengolahan dan penutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan				-	-	-																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Besar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	23	Kab	11,838,984,689	20	Kab	1,218,860,878																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Pengembangan dan penguatan desa mandiri benih padi	Terlaksananya pengembangan dan penguatan desa mandiri benih padi	2370	Ha	7,500,000,000	736	Ha	1,166,799,760																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pelatihan operasional alat mesin pertanian	Terlaksananya pelatihan operasionalisasi alat mesin pertanian	24	Keg	1,700,000,000	-	-	-																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan kawasan aneka buah	Terlaksananya pengembangan kawasan aneka buah	2	Kmdt	7,800,000,000	-	-	-																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan sentra aneka buah	Terlaksananya pengembangan sentra aneka buah	6	Kmdt	19,200,000,000	350	Ha	1,856,275,823																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan sentra aneka buah (SLPA)	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas (Padi)				1,669	Ha	2,848,389,285																					Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
	Perlindungan tanaman pangan	Terlaksananya perlindungan tanaman pangan	18	Kab	8,734,550,000	4	sts	2,003,082,500																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Perlindungan tanaman hortikultura	Terlaksananya perlindungan tanaman hortikultura	7	Kab	1,293,900,000	1	sts	78,400,000																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan sumber benih tanaman perkebunan dan pelestarian plasma nutfah	Terlaksananya pengembangan sumber benih tanaman perkebunan dan pelestarian plasma nutfah	12	Kab	4,500,000,000	-	-	-																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan perkebunan di lahan dayah/pesantren	Terlaksananya pengembangan perkebunan di lahan dayah/pesantren	500	Ha	7,000,000,000	-	-	-																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pemberdayaan kejuruen blang (P3A/GP3A)	Terlaksananya pemberdayaan kejuruen blang (P3A/GP3A)	20	Kab	2,000,858,464	1	sts	10,247,864																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	60	Bln	1,090,000,000	1	sts	511,327,400																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Facilitas pembiayaan pertanian	Terlaksananya fasilitas pembiayaan pertanian	60	Bln	1,020,000,000	1	sts	23,614,990																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan		300	Kmdt	5,938,450,000	7	Kmdt	2,044,730,860																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Optimasi lahan pertanian					-	-	-																						Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester Penanggung Jawab					
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	
				7			8			9			10			11			12			13			14		
		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	32	Kls	10,902,887,518	63	sts	4,317,944,150	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	28	Kelas	8,000,000,166	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	64	Kelas	1,623,160,871	228,57	-	sts	sts	5,941,005,021	sts	54,49	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani	7	Keg		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	17	Keg	7,341,148,835	242,86	tdr	17	Keg	7,341,148,835	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
										Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	6	Keg	2,999,995,000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani		Keg	1,595,444,650	-	-	-	Keg	1,595,444,650	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
										Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Terlaksananya IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programe) Bidang Pertanian Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan SDM Petani	6	Keg	200,000,000	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani		Keg	1,369,331,500	-	-	-	Keg	1,369,331,500	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
										Pembentukan dan Penguatan Sekolah Kelompok Tani	Meningkatnya Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian	6	Keg	6,686,249,939	Pembentukan dan Penguatan Sekolah Lapangan Kelompok Tani	#VALJIE!	-	4,376,372,685	#VALJIE!	-	#VALJIE!	-	4,376,372,685	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
		Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pemberdayaan petani melalui aih teknologi tepat guna	10	Klp	3,540,786,000	10	sts	2,747,327,327										10	sts	2,747,327,327	sts	77,59	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh			
		Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	Terlaksananya sistem dan mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida				1	Keg	452,514,200											1	Keg	452,514,200	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Semusim dan Rempah	Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil allam	9	Unit	13,056,964,000	6	Unit	2,397,534,515											6	Unit	2,397,534,515	66,67	18,36	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Semusim dan Rempah				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tahunan dan pernyegar	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil kelapa sawit				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya Pembinaan Kelompok Binaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Tahunan dan Penyegar	162	Unit	15,133,500,000	47	Unit	2,961,151,813											47	Unit	2,961,151,813	29,01	19,57	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen padi	4	Keg	9,991,750,000	6	Keg	1,770,948,017											6	Keg	1,770,948,017	150,00	17,72	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya Pembinaan Kelompok Binaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Bawang Merah	8	Kawasan	5,364,414,957	9	Kawasan	1,371,845,023											9	Kawasan	1,371,845,023	112,50	25,57	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya Pembinaan Kelompok Binaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya pengembangan informasi pasar	8	Keg	12,470,000,000	1	Keg	2,915,023,256											1	Keg	2,915,023,256	sts	23,38	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya Pengadaan Belanja Promosi komoditi unggulan daerah	5	Keg	4,445,000,000	-	-	-											-	-	-	sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan	Terlaksananya pengadaan bahan promosi dan pemasaran tanaman pangan	5	Event	3,484,000,000	3	Event	797,162,706											3	Event	797,162,706	60,66	22,88	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya pengadaan bahan promosi dan pemasaran tanaman pangan				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
		Promosi dan pemasaran hasil hortikultura	Terlaksananya pengadaan bahan promosi dan pemasaran hortikultura		Event	2,294,737,268	8	Event	2,294,737,268											8	Event	2,294,737,268	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
			Terlaksananya pengadaan bahan promosi dan pemasaran hortikultura				-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA Tahun 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keharan Kegiatan Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.							
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan					Vol	Satuan	Vol			Satuan	Vol	Satuan			Vol	Satuan					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	
		Pendidikan kejuruan pertanian		3	Unit	32,574,569,753	5	SMK PP	8,668,377,630										5	SMK PP	8,668,377,630	sts	26.61	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh						
		Pendidikan kejuruan pertanian																				tdr	tdr	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh						
		Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat suda		23	Kab	15,701,639,885	23	sts	2,444,606,350										23	sts	2,444,606,350	sts	15.57	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh						
																									Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh					
																									Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh					
	Meningkatnya kontribusi FDRB sektor pertanian	Program pelayanan pertanian masyarakat pada Badan Layanan Umum (BLUD)	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Pertanian	4	%	2,000,000,000	-	-	-															sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh				
		Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian	Terseleenggaranya badan layanan umum daerah	7	Unit	1,000,000,000																			sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh			
		Kualitas dan pendukung pelayanan pertanian	Terseleenggaranya badan layanan umum daerah	465	Ton	800,000,000																			sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh			
		Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan pertanian	Terseleenggaranya badan layanan umum daerah	21	Kindt	200,000,000																			sts	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh			
																											Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh			
						1,578,367,529,020			430,345,938,278	Dinas Peternakan				205,936,614,892	Dinas Peternakan												Dinas Peternakan Aceh			
						1,578,367,529,020			430,345,938,278	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				205,936,614,892	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												Dinas Peternakan Aceh			
						1,578,367,529,020			430,345,938,278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				205,936,614,892	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												Dinas Peternakan Aceh			
						40,790,561,924			27,166,653,459	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				45,251,904,835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												Dinas Peternakan Aceh			
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	24,472,498,724	sts	sts	18,835,040,538	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%									71.00	sts	sts	18,835,040,538	sts	76.96	Dinas Peternakan Aceh			
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	850,000,000	sts	sts	515,962,000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%															Dinas Peternakan Aceh			
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Keleengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	14,047,031,700	sts	sts	7,552,882,521																		Dinas Peternakan Aceh			
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	1,421,031,500	52	%	262,768,400																		Dinas Peternakan Aceh			
																											Dinas Peternakan Aceh			
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3	Dokumen	746,860,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84	Dokumen	622,710,786	2,800.00	#REF!	84	Dokumen	622,710,786	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			2	Dokumen	386,360,932	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				77	%	336,006,536	sts	86.97	77	%	336,006,536	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			4	Dokumen	290,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penganggaran				31	%	271,935,400	sts	93.48	31	%	271,935,400	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			1	Dokumen	69,599,068	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	Dokumen	14,768,850	100.00	21.22	1	Dokumen	14,768,850	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RPKA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			Sandingan			Menjadi				K			K			K					
				Rp.			Rp.			Rp.			Rp.			Rp.				Rp.			Rp.			Rp.		
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	Satuan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	tahun	299,249,450	36	Bulan	166,754,350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Cetakan dan Penggandaan Kantor	8	Unit	182,176,000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	sts	sts	#VALUE!	sts	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bola lampu, fitting, wayer dan komponen listrik lainnya	5	tahun	144,861,231	36	Bulan	228,697,186	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya fasilitas instalasi listrik (Bola Lampu)	1200	Buah	346,710,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Buah	-	-	-	sts	sts	228,697,186	sts	157,87	Dinas Peternakan Aceh								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian dan tabloid	5	tahun	94,779,600	33	Bulan	118,408,900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhihnya kebutuhan informasi surat kabar	25	Eksemplar/Bulan	346,710,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	%	-	-	-	sts	sts	118,408,900	sts	124,93	Dinas Peternakan Aceh								
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya Biaya Kebutuhan Logistik Kantor	12	Bulan	-	-	Bulan	-	-	tdr	-	Bulan	-	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh									
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum satpam serta tamu kantor	5	tahun	919,048,800	36	Bulan	344,469,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat kantor	3640	Porsi	7,814,148,718	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Porsi	-	-	-	sts	sts	344,469,000	sts	37,48	Dinas Peternakan Aceh								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas di dalam dan luar daerah	5	tahun	2,182,639,950	36	Bulan	854,439,272	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Biaya koordinasi dan konsultasi	259	ASN/Tenaga Kontrak	85,654,718	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	sts	sts	#VALUE!	sts	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500.00	unit	1,147,162,150	sts	sts	1,234,556,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Alat Pendingin (AC) kantor Tersedianya Fasilitas Komputer kantor Tersedianya Fasilitas Meubelair gedung kantor yang memadai	13 32 4	Unit	1,300,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	%	#VALUE!	-	#VALUE!	sts	sts	#VALUE!	sts	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas gedung kantor aparatur yang memadai	50	Unit	421,924,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	%	#VALUE!	tdr	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi bangunan kantor	50.00	paket	1,401,943,125	21	paket	2,307,766,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	6	Unit	6,006,570,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	sts	sts	#VALUE!	sts	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1	Unit	1,090,265,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Unit	619,975,543	-	56,86	-	Unit	619,975,543	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh								
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya BBM	270.00	unit	2,807,688,700	144	unit	2,008,773,086	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Tersedianya Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	60 35	Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107	%	23,084,000	sts	23,08	sts	sts	2,031,857,086	sts	72,37	Dinas Peternakan Aceh								
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah gedung kantor	-	unit	-	2	unit	299,244,000	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor, Pagar dan Canopy Mess Dinas Peternakan Aceh	3	Unit	930,265,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104	%	954,281,470	sts	102,58	sts	sts	1,253,525,470	sts	-	Dinas Peternakan Aceh								
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terbinanya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	259	Pegawai	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Pegawai	24,149,664,800	38,45	40,249,44	100	Pegawai	24,149,664,800	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh								
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	180	Stel	12,577,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	Stel	12,074,832,400	-	-	-	Stel	12,074,832,400	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh								
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya fasilitasi aparatur untuk mengikuti diklat, sosialisasi, kursus, pelatihan dan workshop di luar daerah	100	%	1,544,084,133	42	%	262,768,400	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlathnya kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	30	Orang	12,577,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12	Orang	12,074,832,400	40,00	96,01	sts	sts	12,337,600,800	sts	799,02	Dinas Peternakan Aceh								
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	tahun	840,500,000	27	Bulan	1,834,435,000												27	Bulan	1,834,435,000	sts	218,26	Dinas Peternakan Aceh								
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Honorarium PNS, Non PNS dan pelaksanaan kegiatan	5	tahun	4,340,358,710	36	Bulan	4,109,249,000												36	Bulan	4,109,249,000	sts	94,68	Dinas Peternakan Aceh								
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	0	0	923,000,000	sts	sts	515,962,000												sts	sts	515,962,000	sts	55,90	Dinas Peternakan Aceh								
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Prasarana Gedung Kantor	5	Tahun	1,703,447,125	3	tahun	1,702,542,935												3	tahun	1,702,542,935	60,00	99,95	Dinas Peternakan Aceh								
																										Dinas Peternakan Aceh								
		Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi Daging Ruminansia	66353, 36478, 31324	ton	449,609,932.011	Ton	107,706,080,764	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi daging dan telur (Daging Ruminansia / Daging Non Ruminansia / Telur	60321 / 33162 / 28477	Ton	123,147,381,417	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	58	-	#VALUE!	sts	#VALUE!	sts	sts	#VALUE!	sts	#VALUE!	Dinas Peternakan Aceh								

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Rp.		K Satuan		Rp.		K Satuan		Rp.		Rp.		K Satuan		Rp.		K Satuan			Rp.				
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26			
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi Daging Ruminansia	66353,36478,31324	ton	449,609,932,011		Ton		107,706,000,764	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi daging dan telur (Daging Ruminansia / Daging Non Ruminansia / Telur	60321/33162/28477	Ton	31,501,563,143	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	93	-	14,346,341,585	sts	45.54	sts	sts	122,052,422,349	sts	27.15	Dinas Peternakan Aceh	
										Penataan Prasarana Pertanian	Tersedia Laporan Penataan Prasarana Pertanian	1	Laporan	31,401,563,143	Penataan Prasarana Pertanian	93	-	14,331,755,585	sts	-	93	-	14,331,755,585	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh	
									Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedia Dokumen Perencanaan Kawasan Peternakan	1	Dokumen		Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh
									Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terpeliharanya Pos Kesehatan Hewan	4	Unit	150,000,000	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	144	-	236,230,486	sts	-	144	-	236,230,486	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terpeliharanya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Tahun	100,000,000	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	100	-	99,938,900	sts	-	100	-	99,938,900	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangunnya Rumah Potong Hewan Kota Lingsa Tersalurnya Bantuan untuk Kelompok	12	Paket Kelompok	250,000,000	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	102	%	201,502,640	sts	-	102	%	201,502,640	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersalurnya Bantuan untuk Kelompok	31	Kelompok	25,758,525,141	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	53	-	10,016,861,230	sts	-	53	-	10,016,861,230	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya Ayam Ras Petelur UPTD BTNR Terpeliharanya Fasilitas dan Sarana Pendukung UPTD BTNR Terpeliharanya fasilitas dan sarana pendukung UPTD IBI Tersedia Sarana pendukung bangunan UPTD IBI Tersedia Sarana Pendukung UPTD BTNR	1	Tahun		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	76	-	3,777,222,329	sts	-	76	-	3,777,222,329	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Teridentifikasinya Calon Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1	Wilayah	100,000,000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15	-	14,586,000	sts	-	15	-	14,586,000	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
									Peletarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak	1	Laporan	100,000,000	Peletarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	15	-	14,586,000	sts	-	15	-	14,586,000	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		
				Rata-rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!		#DIV/0!						#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!							
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Agan Penyakit (Bakteri / Parasit / Virus)			3,396,353,077	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	97	-	3,140,820,168	tdr	92.48	sts	sts	41,679,968,044	sts	42.92	Dinas Peternakan Aceh		
Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit Bakteri	11	%	97,101,679,359	60	%	38,539,147,876			Meningkatnya Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit (Bakteri / Parasit / Virus)	12/37/14	% / % / %					sts	tdr						tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh
									Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1,000,000,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	48	-	1,116,221,288	tdr	111.62	48	-	1,116,221,288	tdr	tdr	Dinas Peternakan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Sandiangan			Menjadi		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol			Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Rapat koordinasi teknis (Rakornis)	Terselenggarakannya acara rakornis pengelolaan lingkungan hidup	1	Kali	512,126,000	4	Kali	1,072,784,267																	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas harian PNS dan Non PNS	78	Stel	94,916,380	2,890	Stel	1,762,521,800																	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi pegawai dalam penanganan HIBK	60	Orang	1,311,600,000	124	Orang	607,652,162																	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota	Pembinaan SPM Di Bidang LH Kab/Kota	23	Kab/Kota	-	-	-	-																	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
																										Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Rp.	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keharan Kegiatan Target		Vol	Satuan	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6			7					8	9	10		11	12	13	14		15		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	35,000	Surat	180,000,000	64,250	Lembar	149,786,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	5,000	Lembar	41,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,403	Lembar	41,000,000	88.06	100.00	68,653	Lembar	190,786,000	sts	105.99	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, wifi, faximile, air bersih dan listrik	61	Rekening	6,456,500,000	61	Rekening	3,066,358,764	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, wifi, faksimile, air bersih dan listrik Kelancaran aktifitas kantor	2	Kantor	983,704,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	Kantor	650,000,000	350.00	66.08	sts	sts	3,716,358,764	sts	57.56	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
												12	Bulan	-	9	Bulan	-	75.00	-	sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
												12	Bulan	100,342,000	12	Bulan	100,342,000	100.00	100.00	12	Bulan	100,342,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengurusan dokumen perizinan kendaraan dinas	98	unit	733,000,000	300	Unit	178,360,300	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksana/Lancarnya Pelayanan dan Terpeliharanya Kantor											300	Unit	178,360,300	306.12	24.33	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
												1	Tahun	1,996,403,150	1	Tahun	1,224,371,730	50.00	61.33	1	Tahun	1,224,371,730	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengurusan dokumen perizinan kendaraan dinas	98	unit	733,000,000	300	Unit	178,360,300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengurusan Dokumen perizinan kendaraan dinas, Tersedianya dokumen perizinan kendaraan dinas	85	Unit	58,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99	Unit	264,950,000	116.47	452.91	399	Unit	443,310,300	407.14	60.48	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan pembelian BBM kendaraan dinas	50	Unit	6,731,252,900	331	Unit	3,058,556,191	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service dan pembelian BBM Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas	85	Unit	610,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Tahun	285,215,000	sts	46.70	sts	sts	3,343,771,191	sts	49.68	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
												12	Bulan	759,200,000	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rehab kantor BKPH dan RH	180	Set	1,427,500,000	24	Unit	2,798,015,099	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab pagar dan rumah dinas	3	Unit	314,563,150	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	420,866,730	100.00	133.79	27	Unit	3,218,881,829	sts	225.49	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan genset, AC, komputer dan notebook	530	Unit	6,804,120,000	401	Unit	548,679,970	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan genset, AC, Komputer, Notebook dan pembelian BBM Genset Perengkapan Kantor Yang Layak Pakai	397	Unit	253,340,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	397	Unit	253,340,000	100.00	100.00	798	Unit	802,019,970	150.57	11.79	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan dan terpeliharanya kantor	142	Orang kali	13,607,288,500	sts	sts	12,343,173,884																12,343,173,884	-	90.71	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pembangunan gedung kantor	Terbanggunya gedung kantor	100	Unit	23,681,169,861	35	Unit	6,431,068,432																6,431,068,432	-	27.16	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
												1	Tahun	1,790,220,511	1	Tahun	1,197,200,486	50.00	66.87	1	Tahun	1,197,200,486	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	65	Item	826,076,400	191	Item	532,686,501	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	58	Jenis	110,517,896	Penyediaan Bahan Logistik	71	Jenis	259,501,896	122.41	-	sts	sts	792,188,397	sts	95.90	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
												12	Bulan	-	6	Bulan	-	50.00	-	sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan fotocopy	17	Item	750,000,000	39	Item	457,666,891	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan fotocopy untuk kelancaran administrasi perkantoran	12	Jenis	109,202,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Jenis	101,857,500	100.00	93.27	sts	sts	559,524,391	sts	74.60	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
												220	Lembar	-	-	-	-	sts	sts	sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	20	Item	450,000,000	114	Item	323,534,624	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik & Elektronik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33	Jenis	43,321,090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33	Jenis	43,321,090	100.00	100.00	sts	sts	366,855,714	sts	81.52	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung operasional kantor	30	Item	2,957,663,895	166	Item	1,254,419,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Pendukung untuk operasional kantor (AC, Komputer, Laptop Dll)	49	Unit	755,939,025	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63	Unit	425,000,000	128.57	56.22	sts	sts	1,679,419,500	sts	56.78	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi melalui media cetak	7	Item	150,000,000	43	Item	69,480,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi melalui media cetak	14	Eks	21,240,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16	Eks	18,280,000	114.29	86.06	sts	sts	87,760,000	sts	58.51	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K			K			Sandingan			Menjadi			K			K			K						
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		K		K		K		K					
										Tolak Ukur			n/ Sub Kegiatan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan satpam	20,000	Kotak	475,500,000	7,330	Kotak	299,365,972	100,000,000	4720	Kotak	-	Kotak	-	-	-	7,330	Kotak	299,365,972	36.65	62.96	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh					
											12	Bulan	-	Bulan	-	-	-	sts	sts	-	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	70	Rapat/Pertemuan	3,250,000,000	239	Rapat/Pertemuan	1,552,583,235	650,000,000	73	Rapat/pertemuan	111	Rapat/Pertemuan	274,240,000	152.05	42.19	350	Rapat/Pertemuan	1,826,823,235	500.00	56.21	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh					
																		1	Tahun	75,000,000	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																		1	Tahun	291,753,893	50.00	85.06	1	Tahun	291,753,893	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	75	Item	560,000,000	343	Unit	393,850,000	343,000,000	170	Unit		170	Unit	291,753,893	100.00	85.06	513	Unit	685,603,893	sts	122.43	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh				
		Memelihara rutin/berkala alat studio dan komunikasi	volume Kualitas alat studio dan komunikasi kantor	25	Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Unit	749,650,000	17.24	99.93	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
		Rehabilitasi sedung/berat rumah jabatan	Jumlah Rumah jabatan	29	Unit	750,200,000	5	Unit	749,650,000									1	Tahun	176,000,000	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																		1	Tahun	176,000,000	tdr	tdr	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																					116.72	68.80	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																					ST	S	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
		Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	IKLH	268,015,403,875	78.99	IKLH	29,947,160,088	214,765,490	75	IKLH	304	IKLH	214,765,490	405.32	100.00	191	IKLH	30,161,925,578	255.32	11.25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh				
																		6	Dokumen	214,765,490	200.00	-	6	Dokumen	214,765,490	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
																		3	Dokumen	214,765,490	133.33	100.00	4	Dokumen	214,765,490	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
		Perencanaan dan Penyusunan program pembangunan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen RPPH Final, terawainya kegiatan doka dan migas kab/kota	1	Dokumen	10,430,000,000	2	Dokumen	379,373,800									2	Dokumen	379,373,800	200.00	-	2	Dokumen	379,373,800	200.00	3.64	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
		Pengembangan taman rekreasi	Tersedianya Taman Rekreasi	1	Kegiatan	1,188,207,078	-	-	-									-	-	-	-	sts	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya Pameran, diseminasi informasi lingkungan	2	Pameran PJJ,IKLH, Data Lingkungan	5,634,000,000	3	Pameran PJJ, Data Lingkungan	1,546,032,865									3	Pameran PJJ, Data Lingkungan	1,546,032,865	sts	27.44	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Terusannya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Aceh serta Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	2	Judul Buku	4,450,000,000	5	Judul Buku	690,690,150									5	Judul Buku	690,690,150	250.00	15.52	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																					133.33	100.00	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																					ST	ST	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh			
																		84.99	IKLH	3,139,530,000	113.32	289.48	85	IKLH	3,139,530,000	113.32	1.17	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
																		2	Dokumen	1,084,530,000	650.00	286.75	13	Dokumen	3,109,883,598	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh
																		1	Kantor	784,530,000	114,530,000	14.60	10	Lokasi	114,530,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Menjauli		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tidak Ukur	Keharatan Kegiatan Target			Vol	Satuan											Vol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Rp.	Sandiingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan								Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah IV	Terlindungnya kawasan hutan KPH IV	6	Kegiatan	3,000,000,000	7	kegiatan	1,257,024,710										7	kegiatan	1,257,024,710	sts	41.90	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah V	Penurunan perubahan hutan di wilayah KPH V	6	Kegiatan	3,000,000,000	7	kegiatan	2,444,378,180										7	kegiatan	2,444,378,180	sts	81.48	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah VI	Terlindungnya kawasan hutan KPH VI	6	Kegiatan	3,000,000,000	7	kegiatan	1,901,410,590										7	kegiatan	1,901,410,590	sts	63.38	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Areal penyiapan perhutanan sosial	30,000	Ha	2,700,000,000	30,000	Ha	364,345,552										30,000	Ha	364,345,552	100.00	13.49	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya	Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan kawasan Tahura Pocut Meurah Intan, patroli dan operasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	1	UPTD TAHURA	1,420,250,000	4	kegiatan	553,216,832										4	kegiatan	553,216,832	sts	38.95	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan	Terrehabilitasinya hutan dalam kawasan Tahura PMI dan terbahayanya fasilitas ekhilib	150	Ha	5,875,072,873	300	Ha	1,630,953,652										300	Ha	1,630,953,652	200.00	27.76	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	Meningkatnya pengelolaan operasional CRU Gajah	4	CRU	17,688,610,958	5	CRU	1,721,373,896										5	CRU	1,721,373,896	125.00	9.73	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengembangan Wisata Alam	Terlaksananya pengembangan wisata alam di kawasan hutan	1	Kegiatan	8,149,000,000	6	Kegiatan	569,430,146										6	Kegiatan	569,430,146	600.00	6.99	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Tersedianya data dan informasi perubahan dan penggunaan kawasan hutan	1	Dokumen	350,000,000	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2	Dokumen	400,000,000	225.00	-	2	Dokumen	400,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
									Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya data/informasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	3	Lokasi	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3	Lokasi	150,000,000	100.00	-	3	Lokasi	150,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
									Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya data/informasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tersedianya data/informasi perubahan kawasan hutan	8	Lokasi	200,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	8	Lokasi	200,000,000	100.00	-	8	Lokasi	200,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
														Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1	-	50,000,000	tdr	tdr	1	-	50,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pengembangan hasil hutan non-kayu	Meningkatkan potensi sumber daya hasil hutan non kayu	400	Ha	22,999,773,021	668	Ha	2,409,094,538										668	Ha	2,409,094,538	167.00	10.47	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan	Monitoring dan pembinaan peredaran kayu, rekonsiliasi PNPB, pendataan kayu teman, saksi ahli kayu teman	10	Lokasi	1,425,000,000	9	Lokasi	585,822,012										9	Lokasi	585,822,012	90.00	41.11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pengusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan	Dokumen statistik lingkungan hidup dan kehutanan	5	Laporan	3,963,880,000	1	judul buku	694,167,720										1	judul buku	694,167,720	sts	17.51	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
									Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terwujudnya hutan rakyat	200	Ha	4,836,380,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	5,531,100,000	-	-	-	Ha	5,531,100,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
									Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya penanaman hutan rakyat	400	Ha	4,200,000,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	400	Ha	5,391,100,000	100.00	-	400	Ha	5,391,100,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Monitoring hotspot dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10	Lokasi	496,380,000		-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
									Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Monev kegiatan RHL dan Rehabilitasi DAS	1	Kegiatan	140,000,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4	Kegiatan	140,000,000	400.00	100.00	4	Kegiatan	140,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
		Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penyediaan bibit tanaman dan upah penanaman untuk rehabilitasi hutan dan lahan	3,250	Ha	15,601,570,072	340	Ha	3,113,342,674										340	Ha	3,113,342,674	10.46	19.96	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penyediaan bibit tanaman dan upah penanaman	650	Ha/715.000 batang	15,601,570,072	500,000	batang	-										500,000	batang	-	sts	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya riset dan analisis kehutanan	5	Penelitian	2,500,000,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
									Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Berkurangnya kerusakan kawasan hutan	6	UPTD KPH	49,948,820,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	UPTD KPH	51,416,877,630	tdr	-	-	UPTD KPH	51,416,877,630	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	
									Kasus					Kasus					Kasus				tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keuaran Kegiatan Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	890,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	2,031,549,685	100.00	-	1 Tahun	2,031,549,685	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
								1 Tahun	-	25.00	0 Tahun	-	tdr	0 Tahun	-	tdr	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	1 Kegiatan	49,058,820,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	4 Kegiatan	48,858,019,945	tdr	99.59	4 Kegiatan	48,858,019,945	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Terbayarnya Honor	1752 Orang	-	300.00	5,256 Orang	-	tdr	5,256 Orang	-	tdr	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Terselesainya kasus tindak pidana kehutanan PAMHUT	4 Kasus	-	-	-	-	tdr	-	-	tdr	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	44	-	496,380,000	44	-	tdr	44	-	496,380,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan (TORA)	Terselesainya peta hasil identifikasi pemanfaatan lahan (TORA)	2 Lokasi	2,917,606,000	25 Lokasi	802,964,175	-	-	-	-	-	-	25 Lokasi	802,964,175	1,250.00	27.52	27.52	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1 Kegiatan	21,820,000,000	7 Kegiatan	1,277,399,200	-	-	-	-	-	-	7 Kegiatan	1,277,399,200	700.00	5.85	5.85	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Penyusunan Regulasi Kewenangan Perhutanan Sosial Termasuk Hutan Adat	Terusunnya regulasi kewenangan perhutanan sosial termasuk hutan adat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Pengelolaan dan Pemantapan Kawasan Perhutanan Sosial Termasuk Hutan Adat	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Pembentukan dan Penyelahan Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan	Terbetuknya demplot areal KTH terfasilitasinya SOM penyuluhan	11 Kab/kota	4,365,900,000	12 Kab/kota	857,500,300	-	-	-	-	-	-	12 Kab/kota	857,500,300	109.09	19.64	19.64	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Hegal Logging	Terbayar honor Pamhut	sts	sts	sts	47,266,766,750	-	-	-	-	-	-	sts	sts	47,266,766,750	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan Operasi Hegal Logging	Menurunnya tindak pidana kehutanan dan terbayarnya honor PAMHUT	8 Kasus	239,406,577,992	sts	163,429,840,250	-	-	-	-	-	-	sts	sts	163,429,840,250	sts	68.26	68.26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh						
		Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam	Pembinaan masyarakat reboisasi agroforestrv	3 Kab/Kota	103,029,850,000	sts	14,858,500,094	-	-	-	-	-	-	sts	sts	14,858,500,094	sts	14.42	14.42	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh						
		Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan	Terdatanya lokasi perambahan hutan dan izin pinjam palak kawasan hutan	10 Lokasi	3,932,319,074	sts	812,530,817	-	-	-	-	-	-	sts	sts	812,530,817	sts	20.66	20.66	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh						
							Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Tahun	125,000,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Tahun	125,000,000	100.00	-	1 Tahun	125,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Tahun	125,000,000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Tahun	125,000,000	100.00	-	1 Tahun	125,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Perencanaan DPA DLHK, Laporan pemeriksaan monitoring kegiatan Lalup, Sakip	23 Kab/Kota	4,046,612,000	sts	2,339,385,972	-	-	-	-	-	-	sts	sts	2,339,385,972	sts	57.81	57.81	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh						
							Perbenihan Tanaman Hutan	1 Tahun	50,000,000	Perbenihan Tanaman Hutan	1 Tahun	50,000,000	100.00	-	1 Tahun	50,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	10 Perusahaan	50,000,000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	13 Perusahaan	50,000,000	130.00	-	13 Perusahaan	50,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Rata-rata capaian kinerja (%)					133.75	19.96			335.16	27.97	27.97	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Predikat kinerja					ST	SB			ST	SB	SB	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
Terjaganya Keaneekaragaman Hayati	Program Pemulihan Spesies Kunci Terancam Punah dan Mitigasi Konflik Satwa Liar	Penurunan Jumlah konflik satwa liar	70 %	32,643,224,475	75	Konflik Satwa	5,705,684,804	4 %	6,940,000,000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	27 %	5,150,000,000	666.75	74.21	sts	sts	10,855,684,804	sts	33.26	33.26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh					
							Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1 IPTD/ KPH	190,000,000	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	3 IPTD/ KPH	300,000,000	sts	-	3 IPTD/ KPH	300,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							
							Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1 Tahun	190,000,000	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1 Tahun	300,000,000	100.00	157.89	1 Tahun	300,000,000	tdr	tdr	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	872,298,972	92	%	20,227,415,671	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%		100	%	100.00		96	%	20,227,415,671	95.83	2,318.86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%ase aparaturn yang memenuhi kompetensi	100	%	1,525,000,000	92	%	20,227,415,671	%ase aparaturn yang memenuhi kompetensi	100	%		100	%	100.00		96	%	20,227,415,671	95.83	1,326.39	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparaturn	100	%	14,303,310,770	100	%	20,227,415,671	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparaturn	100	%		100	%	100.00		100	%	20,227,415,671	100.00	141.42	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
										Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang terusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Renangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%		100	%	100.00		sts	sts		tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
										Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan keuangan yang terusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100	%	915,000,000	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	190	%	907,481,790	190.33	-	190	%	907,481,790	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	615,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	104	%	614,018,450	104.40	-	104	%	614,018,450	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	300,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121	%	293,463,340	121.50	97.82	121	%	293,463,340	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										ADMINISTRASI KEUANGAN	12	bulan	16,652,225,857	ADMINISTRASI KEUANGAN	12	bulan	16,869,989,528	100.00	90.44	12	bulan	16,869,989,528	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	17,009,155,857	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500	orang	15,284,897,778	400.00	89.86	500	orang	15,284,897,778	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	%	1,643,070,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119	%	1,585,091,750	119.00	-	119	%	1,585,091,750	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
										ADMINISTRASI UMUM	12	bulan	3,826,220,486	ADMINISTRASI UMUM	12	bulan	3,641,592,696	100.00	-	12	bulan	3,641,592,696	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan biaya pengiriman surat/paket	100	%	410,000,000	100	%	102,350,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	40,510,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	21,606,815	100.00	-	sts	sts	123,957,315	sts	30.23	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik, Media Elektronik	100	%	2,900,000,000	100	%	1,023,315,038	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Rekening	386,000,039	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	rekening	301,991,431	400.00	-	sts	sts	1,325,306,469	sts	45.70	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan taman, tempat parkir, dan halaman kantor	3	Kegiatan	279,337,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	kegiatan	252,638,250	400.00	-	12	kegiatan	252,638,250	tdr	tdr		tdr		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya materi dan biaya pengiriman surat/paket	100	%	1,492,469,240	100	%	769,165,930	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	bulan	293,126,341	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	292,706,110	100.00	99.86	sts	sts	1,061,872,040	sts	71.15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakn Kebutuhan Kantor, Foto copy dan jilid	100	%	858,000,000	100	%	295,307,200	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12	bulan	402,799,076	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12	bulan	402,149,500	100.00	99.84	sts	sts	697,456,700	sts	81.29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100	%	450,000,000	100	%	214,344,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12	bulan	118,988,968	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12	bulan	115,280,000	100.00	96.88	sts	sts	329,624,000	sts	73.25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Cetak dan Buku-buku Teknis	100	%	367,923,911	100	%	53,115,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96	Eksemplar	18,240,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96	Eksemplar	18,240,000	100.00	100.00	sts	sts	71,355,000	sts	19.39	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.			K			Rp.						
				Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan		Vol		Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100	%	940,000,000	94	%	261,491,200	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat di luar jam dinas dan Satpam	5500	Porsi	-	-	-	Porsi	-	-	-	sts	sts	261,491,200	sts	27.82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	%	2,333,800,000	100	%	1,094,578,821	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan Instansi Terkait	12	bulan	1,309,330,972	1,264,185,048	100.00	96.55	12	bulan	1,264,185,048	100.00	96.55	sts	sts	2,358,763,869	sts	101.07	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	%	6,134,310,700	100	%	1,821,653,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung, taman, tempat parkir dan halaman kantor	100	Persen	513,169,927	508,885,733	99.17	99.17	99	Persen	508,885,733	99.17	99.17	sts	sts	2,330,538,733	sts	37.99	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	100	%	2,081,500,000	100	%	960,960,519	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas	21	unit	207,327,573	207,276,109	100.00	99.98	21	unit	207,276,109	100.00	99.98	sts	sts	1,168,236,628	sts	56.12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	%	1,850,000,000	100	%	603,124,670	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Rutin Gedung dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	257,390,000	256,633,700	75.00	99.71	9	bulan	256,633,700	75.00	99.71	sts	sts	859,758,370	sts	46.47	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Roda 4 dan roda 2	100	%	1,150,000,000	100	%	1,104,480,000													100	%	1,104,480,000	100	96.04	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor	100	%	1,525,000,000	100	%	273,425,000													100	%	273,425,000	100	17.93	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya instalasi listrik	100	%	385,000,000	100	%	98,610,000													100	%	98,610,000	100	25.61	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	100	%	599,500,000	100	%	316,700,000													100	%	316,700,000	100	52.83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	100	%	578,000,000	100	%	258,790,000													100	%	258,790,000	100	44.77	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100	%	2,107,200,000	100	%	2,000,032,500													100	%	2,000,032,500	100	94.91	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya Honorarium PNS dan Non PNS, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Dekorasi, Cek dan Giv, Iasa Publikasi	100	%	6,450,000,000	100	%	3,693,557,680													100	%	3,693,557,680	100	57.26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
									PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai	125	orang	242,156,000				-	orang	233,155,195	-	96.28	-	orang	233,155,195	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya kedisiplinan dalam berpakaian dinas	100	%	872,298,972	100	%	327,401,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai	150	orang	121,072,000	119,040,000	100.00	98.32	150	orang	119,040,000	100.00	98.32	sts	sts	446,441,000	sts	51.18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana kontribusi dan biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan formal	100	%	1,525,000,000	100	%	491,832,734	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah	100	persen	121,084,000	114,115,195	94.25	94.24	94	persen	114,115,195	94.25	94.24	sts	sts	605,947,929	sts	39.73	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
																					145.18	65.12		100.00	53.54	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
																					ST	S		ST	R	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
		Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian	Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	%tase peningkatan jumlah wilayah hlin usaha pertambangan dan penyelidikan geologi dan air tanah	68.00	%	95,986,071,018	34	%	20,227,415,671	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	%	1,853,110,800	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	112.67	%	1,787,252,720	tdr	96.45	73	%	22,014,668,391	107.49	22.94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
										PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	9	Kab/kota	1,749,112,800	1,687,801,650	100.00	-	9	Kab/kota	1,687,801,650	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
										Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9	Kab/kota	1,749,112,800	1,687,801,650	100.00	-	9	Kab/kota	1,687,801,650	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
										PENATAUSAHAAN IZIN PENGEBORAN, IZIN PENGALIAN, IZIN PEMAKAIAN, DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	9	Kab/kota	103,998,000	99,451,070	100.00	-	9	Kab/kota	99,451,070	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
										Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengboran, Izin Pengalihan, Izin Pemakaian, dan Izin Penguasaan Air Tanah	9	Kab/kota	103,998,000	99,451,070	100.00	-	9	Kab/kota	99,451,070	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
																					100.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
																					ST	ERR		#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
		Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian	Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	%tase peningkatan jumlah wilayah hlin usaha pertambangan dan penyelidikan geologi dan air tanah	68.00	%	95,986,071,018	34	%	20,227,415,671	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase peningkatan jumlah wilayah hlin usaha pertambangan dan penyelidikan geologi dan air tanah	55	Lokasi	723,758,700	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	117	%	674,011,324	sts	93.13	75	%	20,901,426,995	110.49	21.78	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nana Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Koharian Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K			K			K					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	23	Kab/Kota	1,588,520,000	13	Kab/Kota	468,968,108													13	Kab/Kota	468,968,108	56.52	29.52	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	23	Kab/Kota	1,380,000,000	15	Kab/Kota	371,153,737													15	Kab/Kota	371,153,737	65.22	26.90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	23	Kab/Kota	904,635,713	7	Kab/Kota	229,817,300													7	Kab/Kota	229,817,300	30.43	25.40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Pembangunan Tanpa Izin	Terlaksananya penerbitan penambangan tanpa izin (PBTI) di Kab/Kota	23	Kab/Kota	1,220,000,000	23	Kab/Kota	238,152,900													23	Kab/Kota	238,152,900	100.00	19.52	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pembinaan dan Pendataan Usaha Mineral dan Batubara	Tersedianya Data Usaha mineral dan Batubara	23	Kab/Kota	350,000,000	-	-	-													-	-	-	sts	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Tersedianya air bersih dari sumber daya air tanah dan air permukaan	411	Lokasi	82,200,000,000	168	Lokasi	34,046,103,833													168	Lokasi	34,046,103,833	40.88	41.42	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah (Migas Aceh)					31	Lokasi	2,618,672,905													31	Lokasi	2,618,672,905	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Terlaksananya Survey Konservasi Air Tanah serta Terawasinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	23	Kab/Kota	1,212,130,000	13	Kab/Kota	264,938,500													13	Kab/Kota	264,938,500	56.52	21.86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	23	Kab/Kota	1,631,700,000	9	Kab/Kota	340,886,770													9	Kab/Kota	340,886,770	39.13	20.89	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	23	Kab/Kota	1,011,600,000	5	Kab/Kota	180,248,346													5	Kab/Kota	180,248,346	21.74	17.82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Rata-rata capaian kinerja (%)			66.38	62.04		52.68	25.76	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
												Predikat kinerja			S	R		R	SR	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	29	%	22,550,000,000	4	%	20,227,415,671	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	28.65	%	7,918,399,900	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	54	%	7,636,780,374	188.94	96.44	29	%	27,864,196,045	99.74	123.57	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
										PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI	Tersedia Sarana dan Prasarana Energi Bersih Terbarukan Yang Ramah Lingkungan	5	Kab/Kota	7,918,399,900	PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI	4	Kab/Kota	7,636,780,374	80.00	-	4	Kab/Kota	7,636,780,374	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
											Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1	Laporan	158,294,900	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	3	Laporan	142,653,358	300.00	-	3	Laporan	142,653,358	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
																										DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
																										DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		Pengelolaan Data Dan Informasi Energi Bersih Terbarukan		-	-	-	100	%	54,245,000													100	%	54,245,000	sts	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Energi Bersih Terbarukan		-	-	-	100	%	99,428,465													100	%	99,428,465	sts	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi Bersih Terbarukan		-	-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Pengembangan Energi Bersih Tenaga Surya		-	-	-	1	Kab/Kota	636,914,415												1	Kab/Kota	636,914,415	sts	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		Pengembangan Energi Bersih Tenaga Air		-	-	-	-	-	-													-	-	-	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
												Rata-rata capaian kinerja (%)			200.00	-		# DIV/0!	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
												Predikat kinerja			ST	ERR		# DIV/0!	ERR	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
		Terwujudnya kemandirian energi	%tase peningkatan ketahanan energi **jumlah ketersediaan dan pemakaian daya listrik	72	%	106,410,502,257	41	%	20,227,415,671	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah ketersediaan dan pemakaian daya listrik	61.6	%	4,260,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	76	%	4,183,380,305	123.77	98.20	59	%	24,410,795,976	81.60	22.94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
											PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	1	Laporan	280,000,000	Penawasli Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara	3	Laporan	274,941,000	300.00	98.19	3	Laporan	274,941,000	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA s/d Akhir Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Koharian Kegiatan Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
									Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik	1	Laporan	280,000,000			3	Laporan	274,941,000	300.00	-	3	Laporan	274,941,000	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU PEMBAUNGAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Listrik desa Tertinggal	2	Kabupaten	3,980,000,000			2	Kabupaten	3,908,439,305	100.00	-	2	Kabupaten	3,908,439,305	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkendalinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	Laporan	180,000,000			1	Laporan	177,292,900	100.00	-	1	Laporan	177,292,900	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya Instalasi Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Aceh Timur	200	Unit	3,800,000,000			198	Unit	3,731,146,405	99.00	-	198	Unit	3,731,146,405	tdr	tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Tersedianya Instalasi Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Aceh Utara		200	Unit													DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang pengelolaan energi sesuai dengan rencana kerja	4	Laporan	1,446,084,457	2	Laporan	670,258,215							2	Laporan	670,258,215	50.00						46.35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Pengelolaan Data dan Informasi Energi	Terkelolanya Data, Informasi dan Komunikasi bidang pengelolaan energi	4	Laporan	1,000,000,000	2	Laporan	234,996,000							2	Laporan	234,996,000	50.00						23.50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium bidang pengelolaan energi	4	Laporan	623,400,000	5	Laporan	253,147,000							5	Laporan	253,147,000	125.00						40.61	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan bidang pengelolaan energi	4	Laporan	1,089,700,000	4	Laporan	105,135,000							4	Laporan	105,135,000	100.00						9.65	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketersediaan	Meningkatnya akses energi listrik bagi masyarakat yang hemat energi dan/atau terbarukan	100	%	30,200,100,200	100	%	23,401,604,242							100	%	23,401,604,242	99.70						77.49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	23	Kab/Kota	1,290,100,200	17	Kab/Kota	617,455,974							17	Kab/Kota	617,455,974	73.91						47.86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	16,962	Unit	18,400,000,000	5,686	Unit	13,423,116,578							5,686	Unit	13,423,116,578	33.52						72.95	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	40	kms	-	-	-	-							-	-	-	-	sts	-				-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Retrofit Lampu Jalan	2100	Unit	4,000,000,000	566	Unit	3,733,801,335							566	Unit	3,733,801,335	26.95						93.35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	206	Unit	2,446,645,200	64	Unit	2,446,645,200							64	Unit	2,446,645,200	sts						tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	920	Unit	3,500,000,000	717	Unit	3,180,585,155							717	Unit	3,180,585,155	77.93						90.87	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	9002	Unit	22,505,000,000	844	Unit	2,145,555,800							844	Unit	2,145,555,800	9.38						9.53	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	136	Unit	5,848,000,000	-	-	-							-	-	-	-	sts	-				-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	0	kms	-	-	-	-							-	-	-	-	sts	tdr				-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED	420	Unit	2,940,000,000	18	Unit	127,868,958							18	Unit	127,868,958	4.29						4.35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meterisasi/Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum LED (SILPA Otis)				1,052	Unit	6,703,253,445							1,052	Unit	6,703,253,445	tdr						tdr	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan				118	unit	6,094,380,545							118	unit	6,094,380,545	tdr						41.80	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	23	Kab/Kota	225,950,000	1	Kegiatan	304,564,684							1	Kegiatan	304,564,684	sts						134.79	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Rehabilitasi PLTMH	23	Unit	-	-	-	-							-	-	-	-	sts	tdr				-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembangunan Biogas	23	Unit	5,202,829,000	-	-	-							-	-	-	-	sts	-				-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	23	Lokasi	1,652,000,000	2	Lokasi	180,180,000							2	Lokasi	180,180,000	8.70						10.91	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keharan Kegiatan Target		Vol	Satuan	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	Vol		Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Perindustrian dan Perdagangan	1	Tahun	128,680,000		Tahun	-	-	-		Tahun	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90	%	16,598,612,913		%	13,743,181,017	111.27	-	100	%	13,743,181,017	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur	1	Tahun	16,569,112,913		Tahun	13,454,170,117	100.00	-	1	gr	13,454,170,117	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Tahun	0		Tahun	-	-	-		Tahun	-	-	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya honorarium PPBJ dan PPHP	1	Tahun	h		Tahun	115,850,000	100.00	-	1	Tahun	115,850,000	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan	12	Bulan	14,750,000		Bulan	142,828,100	100.00	968.33	12	Bulan	142,828,100	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12	Bulan	14,750,000		Bulan	30,332,800	100.00	205.65	12	Bulan	30,332,800	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar, efektif dan efisien	90	%	828,600,000		%	632,066,600	40.22	76.28	36	%	632,066,600	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai dan Tenaga Honorer/Kontrak	7	Paket	775,900,000	-	Paket	264,990,500	100.00	74.98	1	Paket	377,454,500	14.29	48.65	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1	Paket	200,000,000	-	Paket	-	-	-	-	Paket	-	-	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	2	Paket	185,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-	-	sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	180	Orang	960,000,000	3	Orang	39,580,372	100.00	6.64	sts	sts	71,370,372	sts	7.43	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Administrasi Umum	Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan lancar, efektif dan efisien	90	%	8,507,447,939		%	530,409,828	45.48	-	41	%	530,409,828	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat dan Materai	8886	Lembar	50,300,000	3,127	sts	26,450,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, materai, dan benda pos lainnya	1800	Lembar	10,205,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,550	Lembar	8,598,500	86.11	84.26	sts	sts	35,049,000	sts	69.68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60	Bulan	2,870,200,000	27	Bulan	1,809,321,703	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiannya Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	643,038,240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	521,811,328	sts	81.15	sts	sts	2,331,133,031	sts	81.22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Pelayanan Administrasi perkantoran berjalan lancar, efektif dan efisien	90 %			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	96	%	8,750,670,428	106.61		96	%	8,750,670,428	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya Barang Milik Daerah	1	Paket	48,050,000	Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Paket	12,471,000	-	25.95	-	Paket	12,471,000	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa pembayaran pajak bumi dan bangunan gedung kantor dan rumah dinas dan pajak kendaraan bermotor	44	Unit	240,000,000	57	sts	88,655,100	Tersedianya jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor		44	Unit					15.91	tdr	sts	sts	88,655,100	sts	36.94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium tenaga kontrak dan pelaksanaan kegiatan	12	Bulan	536,488,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Paket	1,888,178,940	sts	351.96	6	Paket	1,888,178,940	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	16	Paket	2,159,000,000	12	sts	982,141,740	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedang dan Lingkungan Kantor Bersih dan Rapi	4	Paket	500,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Bulan	53,440,000	sts	-	sts	sts	1,035,581,740	sts	47.97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kertas HVS, ATK Lainnya, Catridge, Tinta Printer dan Kertas Fax	60	Bulan	401,500,000	19	sts	309,803,617	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	150,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	Bulan	-	50.00	-	sts	sts	309,803,617	sts	77.16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko Cetak	700	Rim	122,265,000		sts	82,417,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	150	Rim	52,064,083	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183	Rim	69,481,330	122.00	133.45	sts	sts	151,898,930	sts	124.24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik	5	Paket	136,917,000	6	Paket	73,518,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan bahan penerangan bangunan kantor	1	Paket	40,593,735	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	713,611,475	125.00	1,757.93	7	Paket	787,129,975	145.00	574.90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Spanduk	5	Paket	4,641,716,000	5	sts	1,072,021,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	1,183,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Paket	3,598,339,800	150.00	304.17	sts	sts	4,670,360,800	sts	100.62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	1,680	Eks	128,990,000	802	Eks	79,719,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah, bahan bacaan dan perundang-undangan	336	Exp	26,202,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180	Exp	26,247,000	53.57	100.17	sts	sts	105,966,500	sts	82.15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum kegiatan dan rapat	36	Bulan	450,000,000	12	sts	273,921,800	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1	Paket	446,831,850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	265,028,866	sts	-	12	Bulan	265,028,866	33.33	58.90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	60	Bulan	2,980,000,000	27	Bulan	2,739,398,450																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi/Koordinasi ke luar daerah	60	Bulan	1,565,000,000	27	Bulan	718,562,135	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12	Bulan	550,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Bulan	311,871,434	66.67	-	35	Bulan	1,030,433,569	58.33	65.84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor	1	Paket	174,972,000	-	Paket	170,136,000	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	1	Paket	0				100.00	-	1	Paket	170,136,000	100.00	97.24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan terhadap peralatan Gedung kantor	5	Paket	1,159,460,000	171	sts	946,704,419	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3	Paket	671,900,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Paket	881,835,547	100.00	131.25	sts	sts	1,828,539,966	sts	157.71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	116	Unit	2,661,746,948	61	sts	1,440,110,731	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	44	Unit	836,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49	Unit	633,844,166	111.36	75.82	sts	sts	2,073,954,897	sts	77.92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1	Paket	502,583,031	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	296,320,870	100.00	58.96	1	Paket	296,320,870	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah jabatan	Terlaksananya rehabilitasi rumah jabatan	1	Paket	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Paket	-	-	-	Paket	-	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K		Rp.	K		Rp.	Sandiangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.						
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Indikator Kinerja Capaian Program / Kebaran Kegiatan Target			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan			Vol	Satuan		Vol			Satuan	Vol	Satuan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	8	Unit	1.400,000,000	-	sts	-	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	1	Unit	245,000,000	-	Unit	-	-	-	sts	sts	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	3	Gedung	3.888,500,844	4	sts	1.158,893,640	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	3	Paket	1.865,500,000	1	Paket	46,596,044	33.33	2.50	sts	sts	1,205,489,684	31.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
		Pengadaan UPS/Stabilizer komputer	Tersedianya Komputer	-	sts	-	-	sts	-														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh						
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	3	Unit	2,000,000,000	3	Unit	1,590,000,000														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	98.77	263.63			76.97	98.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
						55,351,057,545			5,525,508,724	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				547,646,940			Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	46	IKK (%)	25,633,989,253	32	IKK (%)	2,295,150,313	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	43.1	IKK (%)							sts	tdr	sts	sts	2,295,150,313	8.95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	0	0	29,717,068,292	-	-	3,230,358,411	Meningkatnya pertumbuhan ekspor dan terkendalinya impor (Pertumbuhan Ekspor / Pertumbuhan Impor)	6 / 4 % / %								tdr	tdr	-	-	3,230,358,411	10.87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
										Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengeceq Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya perlindungan konsumen	80 %	287,280,000			88 %	650,784,595	110.33	226.53		88 %	650,784,595	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
										Facilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Tertib Niaga	23	Kab/Kota	287,280,000			Facilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	16	Kab/Kota	650,784,595	69.57	226.53		16	Kab/Kota	650,784,595	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
										Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	14 %	260,366,940			96 %	398,267,200	685.71	152.96		96 %	398,267,200	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
										Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan	725	Lembar	146,995,940			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	950	Lembar	275,832,100	tdr	-		950	Lembar	275,832,100	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
										Facilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Data Kinerja Impor dalam rangka Penerbitan API	1	Dokumen	113,371,000			Facilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	Dokumen	122,435,100	100.00	-		1	Dokumen	122,435,100	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
		Peningkatan Pengawasan Perdagangan dan Peredaran Barang dan Jasa	Pengawasan Barang beredar dan jasa	23	Kab/Kota	1,383,000,000	12	Kab/Kota	675,489,704															Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
		Pemberdayaan Konsumen dan Pembinaan Pelaku Usaha	Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen kepada Anak Didik dan Guru	2400	Orang	6,370,000,000	388	sts	1,231,943,800																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Peningkatan Kerjasama Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Komunitas Perlindungan Konsumen	2,1	BPSK, LPKSM	2,396,000,000	14	sts	772,176,200																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		23	Kali	2,551,956,118	23	sts	1,160,970,559																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Peningkatan pengawasan perdagangan dan tertib niaga		1350	Produk	5,646,033,135	-	-	-																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Peningkatan kapasitas Lab Penguji Barang Ekspor dan Impor	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Mutu Komoditi Unggulan	1200	Pelaku Usaha	7,257,000,000	19	sts	156,915,954																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor	Terlaksananya Monitoring Kinerja Impor dan Sosialisasi Peraturan Impor	3	Kmtd	11,500,000,000	3	sts	4,380,351,990																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Monitoring dan Evaluasi Ekspor Impor	Terlaksananya Edukasi Publik bagi Eksporir dan Importir	n/a	n/a	13,010,500,292	12	sts	1,934,476,326																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
		Pembinaan Eksporir dan Importir	Terlaksananya Edukasi Publik bagi Eksporir dan Importir				12	sts	294,025,596																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
				580	Aparatur	2,814,560,000	2	sts	219,420,092																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	82.21	152.11			82.73	94.09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
																	Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terjaganya inflasi daerah	2	%	202,327,846,496	-	%	63,347,753,248	PROGRAM PINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terjaganya inflasi daerah	2	%	170,000,000	PROGRAM PINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	%	163,389,800	71.00	96.11	1	%	63,511,143,048	71.00	31.39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Pembangunan dan Pengelolaan Pasat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Meningkatnya nilai transaksi perdagangan	80	%	170,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Pasat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	160	%	163,389,800	199.98	-	160	%	163,389,800	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional Provinsi	2	Paket				-	Paket	-	-	tdr	-	Paket	-	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	1	Paket	170,000,000		Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	1	Paket	163,389,800	100.00	-	1	Paket	163,389,800	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Tersedianya bangunan pasar				49	sts	18,719,944,339																Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Tersedianya Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdagangan	213	Unit	119,908,819,872	33	sts	33,578,728,107																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksananya pasar murah dan operasi pasar	23	Kab/Kota	62,304,866,624	32	sts	11,049,180,802																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pembinaan usaha perdagangan	Tersedianya Perlelangan Perdagangan	23	Kab/Kota	15,750,000,000	-	-																		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																			127.66	190.81					85.10	101.29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terjaganya inflasi daerah	2	%	202,327,846,496	-	%	63,347,753,248	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terjaganya inflasi daerah	2	%	8,190,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	%	11,053,206,150	70.00	134.96	1	%	74,400,959,398	70.00	36.77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Terjaganya stabilitas harga	80	%	8,190,000,000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	93	%	11,053,206,150	116.46	134.96	93	%	11,053,206,150	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemantauan Harga Bapoking	1	Paket	8,190,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	1	Paket	1,183,789,900	100.00	-	1	Paket	1,183,789,900	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Operasi pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				Operasi pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	111	%	9,869,416,250	tdr	#DIV/0!	111	%	9,869,416,250	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	0	0	29,717,068,292	-	-	3,230,358,411	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pertumbuhan ekspor dan terkendalinya impor (Pertumbuhan Ekspor / Pertumbuhan Impor)	%		266,618,960	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	24	%	223,273,574	tdr	83.74	sts	sts	3,453,631,985	sts	11.62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam Provinsi	Meningkatnya nilai ekspor non migas	14	%	266,618,960	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam Provinsi	28	%	223,273,574	200.00	-	28	%	223,273,574	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
										Pameran Dagang Internasional/Nasional	Memfasilitasi UKM melalui Promosi Dagang	1	Kegiatan	266,618,960	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1	Kegiatan	223,273,574	100.00	-	1	Kegiatan	223,273,574	tdr	tdr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																										Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Penguasaan Perdagangan	Meningkatnya Indeks Kebudayaan Konsumen (IKK)	46	IKK (%)	25,633,989,253	32	IKK (%)	2,295,150,313	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Indeks Kebudayaan Konsumen (IKK)	43.1	IKK (%)		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	249	%	1,980,823,577	tdr	776.79	sts	sts	4,275,973,890	sts	16.68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya neraca perdagangan	Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	0	0	29,717,068,292	-	-	3,230,358,411																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandiungan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Tujuan Kegiatan			Vol	Satuan				Vol	Satuan					Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		Partisipasi Pemerintah bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya	Tersedianya Peralatan Pengolahan Pakan Ternak untuk IKM																			sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh			
		Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Tersedianya Pembinaan industri kecil	n/a		1.860.000,000			-							848.937,024							sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
		Fasilitas Pengembangan usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Serifikasi Halal																				sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
																Rata-rata capaian kinerja (%)							112,67	5,70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
																Predikat kinerja							ST	SR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
	Meningkatnya pembangunan industri	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya kontribusi sektor industri	7	%	33.549.635,839	6	%	18.523.925,594														sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
			%tase kontribusi subsektor jasa perusahaan dan jasa lainnya	0,79	%																			sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Penyediaan sarana industri kecil dan menengah	Tersedianya sarana dan prasarana industri kecil dan menengah	n/a	n/a	10.028.654,353			-															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Penyediaan sarana industri kecil dan menengah	Tersedianya sarana industri kecil dan menengah																					sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Penyediaan sarana industri kecil dan menengah	Tersedianya Peralatan dan bahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)																					sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Penyediaan sarana industri kecil dan menengah	Meningkatnya Sarana Industri Kecil dan Menengah						6	sts														sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	Terlaksananya Rakor Deskwas, Launching Produk dan Pameran Dalam Negeri	n/a	n/a	2.838.200,000	6	sts	2.353.002,881															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pembinaan industri kecil dan menengah	terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah	n/a	n/a	6.705.000,000			-															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Persiapan pembangunan kawasan industri daerah	terbangunnya kawasan industri daerah	n/a	n/a	6.409.150,000			-															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		pembinaan dan pengawasan industri agro, kimia dan aneka	terbinanya industri agro dan aneka	n/a	n/a	1.427.000,000			-															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																Rata-rata capaian kinerja (%)								112,67	5,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																Predikat kinerja								ST	SR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya pembangunan industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya jumlah IKM	80	IKM	1.600.000,000																		sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Pembinaan kemampuan teknologi industri	Tersedianya pembinaan Industri Kecil Menengah	2	%	500.000,000																		sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																Rata-rata capaian kinerja (%)								112,67	6,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																Predikat kinerja								ST	SR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	Meningkatnya konsistensi antar perencanaan dokumen pembangunan lintas sektor dan wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%tase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	90	%	12.883.976,125	40	%	3.291.360,900															sts	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
		Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Rapat Kerja Pembangunan Industri dan Perdagangan	21	Dok	9.733.976,125	6	sts	2.726.289,400										6	sts				2.726.289,400	sts	28,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Perindustrian dan Perdagangan	1	Lap	2.000.000,000	4	sts	297.746,500										4	sts				297.746,500	sts	14,89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
		Pengelolaan data dan informasi		3	Dok	1.150.000,000	3	sts	267.325,000										3	sts				267.325,000	sts	23,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
																Rata-rata capaian kinerja (%)								112,67	13,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
																Predikat kinerja								ST	SR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	

Tabel 2.122
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)										Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020										Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K					Rp.					K					Rp.					K				Rp.				K		Rp.		K		Rp.										
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
		Inspektorat				83,490,489,701				46,673,896,786	Inspektorat				48,549,732,985	Inspektorat				39,829,994,928	164.98	82.04					117,506,795,421	96.85	140.74	Inspektorat																		
		Usuran Peningjian Urusan				83,490,489,701				46,673,896,786	Usur Pengawasan Urusan Pemerintahan				48,549,732,985	Usur Pengawasan Urusan Pemerintahan				39,829,994,928	164.98	82.04				117,506,795,421	96.85	140.74	Inspektorat																			
		Bidang Urusan Inspektorat				83,490,489,701				46,673,896,786	Inspektorat Daerah				48,549,732,985	Inspektorat Daerah				39,829,994,928	164.98	82.04				117,506,795,421	96.85	140.74	Inspektorat																			
					93 %	27,364,344,636			87 %	18,348,753,511	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				33,705,581,490	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				28,343,770,816	tdr	84.09			90 %	46,692,524,327	96.31	170.63	Inspektorat																			
		Program Administrasi Perkantoran	Tertakutnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %		15,364,264,433		90 %		7,008,139,094	Tertakutnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %						80 %		16,461,474,793	sts			85 %		23,469,613,887	84.83	152.75	Inspektorat																			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tertakutnya peningkatan disiplin aparatur	100 %		1,186,702,410		97 %		354,350,000	Tertakutnya peningkatan disiplin aparatur	100 %						75 %		616,319,250	sts			86 %		970,669,250	85.83	81.80	Inspektorat																			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertakutnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %		10,630,377,793		96 %		10,649,173,417	Tertakutnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77 %						59 %		1,576,356,153	sts			78 %		12,225,529,570	77.67	115.01	Inspektorat																			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %		183,000,000		79 %		337,091,000	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakp, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %						85 %		-	sts			82 %		337,091,000	81.87	184.20	Inspektorat																			
										Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersajitnya Data Program dan kegiatan didalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Tahun	150,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dok		56,247,150	sts		37.50	6	Dok		56,247,150	tdr	tdr	Inspektorat																			
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Aech	Tersedianya Renstra dan Renja Inspektorat Aech	2	Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok		35,248,900	sts		70.50	2	Dok		35,248,900	tdr	tdr	Inspektorat																			
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program beserta penganggarannya	4	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Dok		20,998,250	sts		21.00	4	Dok		20,998,250	tdr	tdr	Inspektorat																			
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan dan Kinerja SKPA	2	Laporan	28,397,759,780	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan		22,800,169,586	sts		80.29	12	Bulan		22,800,169,586	tdr	tdr	Inspektorat																			
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghalangan pegawai pada Inspektorat Aceh	14	Bulan	26,660,482,041	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan		21,471,806,936	sts		80.54	12	Bulan		21,471,806,936	tdr	tdr	Inspektorat																			
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertakutnya Administrasi perkantoran	12	Bulan	1,467,245,731	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan		1,068,783,150	100.00		72.84	12	Bulan		1,068,783,150	tdr	tdr	Inspektorat																			
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan capaian keuangan	20	Laporan	732,000,000		1	Laporan	310,291,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	tahun	225,750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		245,019,500	sts		108.54	3	Laporan		555,310,500	15.00	75.86	Inspektorat																			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan lbtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja	18	Laporan	381,000,000		4	Laporan	26,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lbtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	44,282,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Laporan		14,560,000	sts		32.88	6	Laporan		41,360,000	33.33	10.86	Inspektorat																			
												36			Penyediaan Jasa Peningjian Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan		296,047,904	tdr		tdr	12	Bulan		296,047,904	tdr	tdr	Inspektorat																			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas	60	Bulan	88,810,000		36	Bulan	26,985,800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	10,800,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan		9,730,000	100.00		90.09	48	Bulan		36,715,800	80.00	41.34	Inspektorat																			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas	60	Bulan	1,850,992,246		36	Bulan	834,945,674	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	315,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan		286,317,904	100.00		90.89	48	Bulan		1,121,263,578	80.00	60.58	Inspektorat																			
															Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	177	orang		1,614,536,881	tdr		-	177	orang		1,614,536,881	tdr	tdr	Inspektorat																			
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54	orang		601,368,203				54	orang		601,368,203	tdr	tdr	Inspektorat																			
															Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52	Orang		180,036,175				52	Orang		180,036,175	tdr	tdr	Inspektorat																			
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	52	Orang		833,132,503				52	Orang		833,132,503	tdr	tdr	Inspektorat																			
															Administrasi Umum	12	Bulan		5,157,821,710	100.00		24.68	12	Bulan		1,272,994,813	tdr	tdr	Inspektorat																			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan ATK demi kelancaran tugas	60	Bulan	873,958,346		36	Bulan	643,743,880	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	247,502,600	Tertakutnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan		218,163,000	100.00		88.15	48	Bulan		861,906,800	80.00	98.62	Inspektorat																			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Target	Target	Target	Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
										Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Terselenggaranya Proses Penyusunan Anggaran APBN, DAK, DID, CSR terhadap Dokumen Perencanaan Pusat, Daerah dan Swasta serta Kerjasama	3	Dokumen	1,383,847,080	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3	Dokumen	1,151,977,070	100.00	83.24	3	Dokumen	1,151,977,070	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
		Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	70	Laporan	4,719,500,000	209	Laporan	2,534,092,611	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	8	Laporan	998,226,250	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Laporan	961,708,159	100.00	96.35	217	Laporan	3,495,880,770	310.00	74.07	Bappeda Aceh	
										Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Terseleenggaranya proses perencanaan pembangunan tahunan daerah	100	%	3,160,180,965	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	157	%	1,407,064,469	157.00	44.52	157	%	1,407,064,469	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
										Analisis dan Pengujian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	Dokumen	3,160,180,965	Analisis Kondisi Daerah, Pemaksimalan dan Iso Strategis Pembangunan Daerah	2	Dokumen	1,407,064,469	100.00	44.52	2	Dokumen	1,407,064,469	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Tersedianya capaian pembangunan daerah	100	%	9,185,373,750	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	90	%	8,430,631,910	90.00	91.78	90	%	8,430,631,910	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
										Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	2	Laporan	7,200,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2	Laporan	6,883,236,833	100.00	95.60	2	Laporan	6,883,236,833	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
										Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	4	Laporan	1,630,465,840	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Laporan	1,233,913,463	100.00	75.68	4	Laporan	1,233,913,463	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
										Penyusunan Pelaporan Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Laporan	354,907,900	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	313,481,614	100.00	88.33	2	Laporan	313,481,614	tdr	tdr	Bappeda Aceh	
		Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain				864,485,926	1	Laporan	580,061,218											1	Laporan	580,061,218	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Survey data primer provinsi	Tersedianya data spasial hasil survey dan pemetaan			4,037,341,000	58	dokumen	1,613,695,476											58	dokumen	1,613,695,476	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan				1,045,633,356	90	%	498,962,461											90	%	498,962,461	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan Penerapan Standardisasi Data Spasial	Tersedianya DG dan IG yang telah di standarisasi dan dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan			4,697,125,300	105	Data	1,687,536,149											105	Data	1,687,536,149	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Koordinasi Pengembangan Informasi Spasial	Terselenggaranya administrasi perkantoran, rapat-rapat koordinasi di bidang informasi spasial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial			2,299,028,500	5	Laporan	675,494,212											5	Laporan	675,494,212	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Percepatan Pengendalian APBA	Terselenggaranya percepatan pencapaian kinerja pembangunan yang terkendali			29,264,054,700	93	%	21,440,545,164											93	%	21,440,545,164	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penetapan RPJMA				745,850,000	1	Dokumen	470,136,110											1	Dokumen	470,136,110	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penyusunan rancangan RKPA	Buku Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2019-2024			3,482,500,000	5	Dokumen	981,712,205											5	Dokumen	981,712,205	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			7,900,000,000	12	Laporan	2,892,885,068											12	Laporan	2,892,885,068	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	FGD Perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota			1,830,000,000	2	Laporan	403,472,200											2	Laporan	403,472,200	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan	Dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2019 dan Perubahannya Tahun 2018			8,869,196,149	12	Dokumen	4,826,690,817											12	Dokumen	4,826,690,817	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota	Tertelaksananya pembahasan program dan kegiatan Dana Otus dan TDBH Migas Provinsi Aceh dan Kabupaten			2,320,000,000	2	pergub	264,618,455											2	pergub	264,618,455	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur Aceh terhadap pertanyaan/pernyataan/kegiatan	Tersedianya koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur Aceh terhadap pertanyaan/pernyataan/kegiatan			528,534,000	-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	penggunaan aplikasi penyusunan dokumen perencanaan Aceh 2019-2024 dan 2020-2024			6,217,915,000	440	orang	3,692,103,053											440	orang	3,692,103,053	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penilaian RKPD Kabupaten/ Kota	Tersedianya penilaian dokumen perencanaan terbaik Kabupaten/ Kota untuk anggaran perencanaan di Pusat dan kabupaten/ kota			1,887,702,400	4	laporan	862,916,061											4	laporan	862,916,061	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Integrasi Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Serta Monev	Pendampingan sistem integrasi perencanaan dan penganggaran serta monev			400,000,000	-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Integrasi dan Sinergitas Rencana Aksi Nasional dan Daerah				261,050,000	-	-	-											-	-	-	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penyusunan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional				1,097,421,050	1	Dokumen	530,312,835											1	Dokumen	530,312,835	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah				1,987,700,000	1	Laporan	35,936,400											1	Laporan	35,936,400	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	Tertelaksananya koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara			341,000,000	1	Laporan	215,975,913											1	Laporan	215,975,913	tdr	tdr	Bappeda Aceh		
															Rata-rata capaian kinerja (%)			#VALUE!	77.03				228.92	48.87	Bappeda Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K			Rp.			K			Rp.			Sandingan			Menjadi			K		Rp.		K		Rp.							
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Vol	Satuan		Vol	Satuan		K	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan			K	Rp.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Target Tolak Ukur	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan				
				Rp.		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	100 %		1,712,150,000	sts	sts	1,545,765,200	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya Kebutuhan Makan dan Minum	1	Tahun	1,467,895,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	sts	-	sts	sts	1,545,765,200	sts	90.28	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kop surat, amplop, map, spk, kartu investasi dan acrylic	12	jenis barang	794,650,000	sts	sts	640,455,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan penunjang pelayanan kantor	7	Bidang	528,151,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28	Bidang	299,636,300	400.00	56.73	sts	sts	940,091,800	sts	133.41	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	1	Tahun	82,000,000	sts	sts	19,590,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undang tentang keuangan daerah	1	Tahun	45,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Tahun	-	-	-	sts	sts	19,590,000	sts	23.89	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Tugas-tugas Dinas	100 %		4,530,151,016	sts	sts	3,875,980,771	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya tugas-tugas Dinas dan UPTD Kab/Kota	1	Tahun	1,896,120,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	1,524,126,098	sts	80.30	sts	sts	5,400,106,869	sts	119.20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		1	Tahun				327,000,000	tdr	tdr	1	-	327,000,000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
			Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	Tahun	6,450,411,636	300.00	tdr	tdr	3	Tahun	6,450,411,636	tdr	tdr	3	Tahun	6,450,411,636	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	174	Unit	12,860,000,000	55	Unit	28,903,758,650	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1	Tahun	800,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	-	4,490,080,000	sts	561.26	sts	sts	33,393,838,650	sts	259.67	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		12	Tahun	1,960,331,636	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	-	1,960,331,636	tdr	tdr	12	-	1,960,331,636	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terealisasikan Surat Menyurat	100 %		1,785,000,000	sts	sts	932,642,604	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1	Tahun	403,201,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	138,728,403	sts	34.41	sts	sts	1,071,370,647	sts	60.02	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Air, Listrik dan Jasa Komunikasi	12	Bulan	15,841,400,000	36	Bulan	8,511,166,211	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Administrasi Perkantoran	1	Tahun	6,544,465,351	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	4,168,900,692	sts	63.70	48	bulan	12,680,066,903	400.00	80.94	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran dan Kesumatan	100	%	11,266,760,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	%	14,689,586,902	100.00	130.38	sts	sts	14,689,586,902	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terealisasikan Kebersihan Kantor			3,034,283,264	19	bidang	2,858,366,400	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor Badan dan Gudang Arsip	1	Gudang Kantor	947,080,293	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Gudang Kantor	400.00	-	sts	sts	2,858,366,400	tdr	tdr	94.20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												2	Gedung Kantor				400.00	tdr	tdr	sts	sts	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
												1	Tahun				3,419,248,127	400.00	tdr	tdr	4	Tahun	3,419,248,127	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKD) dan Terawatnya Kendaraan Dinas	571	Unit	5,466,000,000	349	unit	2,532,126,255	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Kendaraan dinas,terlaksananya tugas-tugas perkantoran	250	Kendaraan	1,392,314,371	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250	Kendaraan		tdr	-	sts	sts	2,532,126,255	sts	46.33	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas	1	Tahun	900,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Tahun	625.00	-	sts	sts	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terawatnya Gedung Kantor	43	bangunan	9,523,340,000	sts	sts	7,842,967,330	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah dan gedung kantor UPTD Tersedianya rehabilitasi gedung kantor	23	1	UPTD Gedung BPKA	24,050,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	UPTD Gedung BPKA	tdr	-	sts	sts	7,842,967,330	sts	82.36	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	18	unit	157,750,000	sts	sts	2,485,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas	23	UPTD	550,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	UPTD	26.09	-	sts	sts	2,485,500,000	sts	1,575.59	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	10	jenis alat kantor	2,062,000,000	sts	sts	1,415,947,046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1	Tahun	800,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Tahun	625.00	-	sts	sts	1,415,947,046	sts	68.67	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
						139,373,024,048			81,744,248,702																	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
						134,935,209,048			78,378,503,026																	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	0	WTP	134,935,209,048	WTP	-	78,378,503,026	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP	WTP/W DP		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	100		WTP							Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan kab/kota, Terwujudnya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan kab/kota	22	Kab/Kota	4,437,815,000	22	Kab/Kota	3,366,745,676	Program Pembiayaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan kab/kota, Terwujudnya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan kab/kota															Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
										Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	TERSEDIANYA DOKUMEN KIA PPAS	4	Dokumen	13,391,538,781	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11	dokumen	6,358,260,324	sts	47.48	11	dokumen	6,358,260,324	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan KIA dan PPAS	Terusunnya Dokumen KIA dan PPAS	2	Dokumen	501,430,353	Koordinasi dan Penyusunan KIA dan PPAS	2	-	1,367,787,578	sts	272.78	2	-	1,367,787,578	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	Terusunnya Dokumen Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	333,962,241	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	-	-	8,400,000	sts	2.52	-	-	8,400,000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Terusunnya DPA, SKPA dan Perubahan DPA, SKPD	50	DPA	510,494,777	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA, SKPD	50	-	197,710,000	sts	38.73	50	-	197,710,000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Terusunnya DPA, SKPA dan Perubahan DPA, SKPA	Terusunnya DPA, SKPA dan Perubahan DPA, SKPA	50	DPPA	-			sts	tdr	tdr	50	-	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan								Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol	Satuan	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	RANCANGAN QANUN TENTANG APBD 2020	2 Qanun, SE 2 Dokumen 4 RanQanun		10,631,821,520	sts	sts	6,764,344,769	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Terusunnya Jumlah Qanun tentang APBD dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBD	1	Pergub	6,401,694,427	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	Pergub	2,124,157,792	300.00	33.18	sts	sts	8,888,502,561	sts	83.60	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Terusunnya Jumlah Qanun	1	Qanun			3	Qanun		300.00	tdr	sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN APBD 2019	2 Qanun, SE 2 Dokumen 4 RanQanun		2,437,030,000	sts	sts	627,901,465	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Terusunnya Jumlah Qanun tentang APBD dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBD	1	Qanun	171,644,427	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				sts		sts	627,901,465	sts	25.77	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
											Terusunnya Jumlah Qanun	2	Pergub						sts	tdr				tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	1	Rancangan Qanun	3,153,210,469	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Rancangan Qanun	2,660,204,954	tdr	84.36	sts	sts	2,660,204,954	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	2	Kepgub	915,102,088	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2			sts		2			tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												2	SE Gubernur			1			sts	tdr	1			tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												3	Pergub			3			sts	tdr	3			tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	50	RKA RKPA	1,404,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				sts					tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD								tdr	tdr				tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD								tdr	tdr				tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	46	KEPUB	6,179,721,929	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	1	Pergub Qanun	4,688,445,922	sts		1	1	1	1	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
											Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	23	Kepgub	1,967,117,842	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1	Pergub Qanun	1,885,697,851	sts		95.86	sts	sts	1,885,697,851	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
											Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	23	Kepgub	821,257,500	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	21	Kepgub	531,171,100	91.30	64.68	sts	sts	531,171,100	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	KepGub tentang Evaluasi Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota			803,340,000	sts	sts	741,374,051	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terseadainya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan APBD	23	Kepgub	821,257,500	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	23	Kepgub	762,467,790	100.00	92.84	sts	sts	1,503,841,841	tdr	187.20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	95	Orang	952,539,000	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	95		894,488,300	sts	93.91	95		894,488,300	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	270	Orang	1,617,550,087	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	471	Orang	614,620,881	174.44	38.00	sts	sts	614,620,881	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	250	REGISTE R SP2D	5,629,348,644	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	69	laporan	4,338,529,551	sts		69	laporan	4,338,529,551	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	sk rekonstruksi	441,788,806	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	301	sk rekonstruksi		sts	451.84	sts	sts	1,996,164,739	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	250	Register SP2D SP2D	1,279,282,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	250	Register SP2D SP2D		100.00		sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												40000	Register SP2D SP2D			29,819	Register SP2D SP2D	1,996,164,739	74.55	tdr	sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPP Gaji dan Non Gaji Serta Penerbitan SKPP	4	Jenis Laporan SP2D dan SKPP	323,948,500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4	Jenis Laporan SP2D dan SKPP		100.00		sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												1800	Jenis Laporan SP2D dan SKPP			760	Jenis Laporan SP2D dan SKPP	42.22	tdr	sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		Rp.	K		Rp.	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Tolak Ukur	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol				Satuan	Vol					Satuan	Vol
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
										Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	4	Laporan	2.180.907.999	Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3	Laporan	1.220.037.421	75,00	55,94	sts	sts	1.220.037.421	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
										Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	5	jenis Laporan				3	jenis Laporan		60,00	tdr	sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
										Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	250	BKU	505.481.450	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	128	BKU	434.457.150	51,20	85,95	sts	sts	434.457.150	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	3	Draft Pergub/ SE Gub	897.939.893	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Draft Pergub/ SE Gub	687.870.241	66,67	76,61	sts	sts	687.870.241	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											80	Draft SK PA/RPA				101	Draft SK PA/RPA		126,25	tdr	sts	sts		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	QANUN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	5.037.632.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	laporan	6.150.636.894	sts	122,09	4	laporan	6.150.636.894	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAI, dan GalK)	6,8	Qanun Nandamun	8.613.448.640	sts	sts	5.067.943.984	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	1	Laporan	2.092.496.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	Laporan	1.870.526.652	400,00	89,39	sts	sts	6.938.470.636	sts	80,55	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	1	Kegiatan	1.724.922.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	Kegiatan	2.939.249.950	400,00	170,40	sts	sts	2.939.249.950	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	11	Peraturan Gubernur	200.300.000	sts	sts	123.551.515	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Buku	236.861.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-	508.465.742	sts	214,67	sts	sts	632.017.257	sts	315,54	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	5	Kegiatan	983.353.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8	Kegiatan	832.394.550	160,00	84,65	sts	sts	832.394.550	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Kegiatan Penunjang Urusan	1	Qanun	632.321.570	Penunjang Urusan Keunggulan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Qanun	2.834.931.616.645	-	448,337,01	-	Qanun	2.834.931.616.645	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	5	Jenis Laporan				3	Jenis Laporan		60,00	tdr	3	jenis Laporan		tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
										Tersulurnya bantuan keuangan khusus	5	Dokumen	632.321.570	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	Dokumen	2.834.931.616.645				sts	sts	2.834.931.616.645	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya Administrasi Perkantoran	6	Tahun	8.253.029.587	sts	sts	5.283.505.533												sts	sts	5.283.505.533	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penatausahaan Aset	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel						Tahun Anggaran Unit Barang berita acara buku laporan BMA												sts	sts	298.989.000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	KepGub Tentang Evaluasi Rancangan Qanun APBD dan Rancangan Qanun Perubahan APBD 23 Kab/Kota			1.138.340.000	46		KepGub												sts	sts	963.529.620	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota	Tertindakannya Rakor yang di Bantu 23 Kab/Kota			377.855.000	100	orang	243.910.320												sts	sts	243.910.320	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Biitek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah			941.050.000	640	orang	760.027.425												sts	sts	760.027.425	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Biitek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota di 23 Kab/Kota			757.240.000	1	Lap.Keuangan	656.904.260												sts	sts	656.904.260	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Biitek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah			941.050.000	640	orang	760.027.425													sts	sts	760.027.425	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
		Biitek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota di 23 Kab/Kota			757.240.000	1	Lap.Keuangan	656.904.260												sts	sts	656.904.260	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Pembangunan rumah dinas	Tertbanggunya Rumah Dinas di UPTD	8	Unit	1.805.200.000	sts	sts	1.761.987.810												sts	sts	1.761.987.810	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Pembangunan gedung kantor	Tertbanggunya Pembangunan Gedung Kantor	24	DED	42.977.800.000	sts	sts	27.337.923.379												sts	sts	27.337.923.379	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
				23	Gedung																				tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
				4	Bangunan lainnya																				tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																					sts	sts	1.160.601.000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan				Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Kebutuhan Barang	15	jenis barang	2.035.000,000	sts	sts	4.258.084,075										sts	sts	4.258.084,075	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	39	jenis barang	1.201.000,000	sts	sts	1.815.364,500										sts	sts	1.815.364,500	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		jenis barang	200.000,000	100	sts	197.800,000										sts	sts	197.800,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengadaan Komputer	tersedianya kebutuhan dan perlengkapan kantor	23	jenis barang	1.956.500,000	sts	sts	9.505.347,550										sts	sts	9.505.347,550	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	65	Unit	344.000,000	sts	sts	164.805,750										sts	sts	164.805,750	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	Gedung	852.000,000	sts	sts	1.063.446,990										sts	sts	1.063.446,990	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	10	jenis alat kantor	2.062.000,000	sts	sts	1.415.947,046										sts	sts	1.415.947,046	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Siap Pakai	3	tahun	3.607,920,000	sts	sts	1.150,098,780										sts	sts	1.150,098,780	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala sisten/jaringan IT	Terpeliharanya Peralatan Jaringan Sistem Online		jaringan SIPKD, Samos, SIKD dan Aplikasi	533.000,000	sts	sts	173.486,500										sts	sts	173.486,500	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian Korpri	1.200	pasang	586.300,000	sts	sts	511.500,000										sts	sts	511.500,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas	1.200	pasang	729.300,000	sts	sts	1.363.997,200										sts	sts	1.363.997,200	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan pelaporan prognostic realisasi anggaran	Tersedianya target realisasi program kegiatan	15	dokumen	1.420.300,000	sts	sts	594.646,587										sts	sts	594.646,587	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja	RENJA, RENSTRA, RUA-PPAS, RKA SIPA dan PPA, DPA SIPA dan PPKA, LKJ, LPPD, LKJ serta Laporan Lainnya	34	dokumen	2.817,329,230	sts	sts	1.539.903,576										sts	sts	1.539.903,576	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pemerintah Aceh dalam Rangka Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Anggaran	6	Peraturan Gubernur	1.446.215,000	sts	sts	360.339,042										sts	sts	360.339,042	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	2	Peraturan Gubernur	506.300,000	-	-	-										-	-	-	-	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN APBD 2020	2	Pergub, Dokumen RanPerGub	10.248.000,000	sts	sts	11.940.628,220										sts	sts	11.940.628,220	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2020	2	Pergub, Dokumen RanPerGub	568.200,000	sts	sts	82.164,500										sts	sts	82.164,500	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	Peraturan Gubernur	100.500,000	sts	sts	1.145.745,000										sts	sts	1.145.745,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	64	Kegiatan	7.621.817,500	26	Kegiatan	2.579.343,915										sts	sts	2.579.343,915	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang		2	pergub	2.085.690,000	sts	sts	1.362.240,744										sts	sts	1.362.240,744	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Peningkatan manajemen investasi daerah	TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA INVESTASI PEMERINTAH ACEH TAHUN JANGKA PANJANG 2020	600	unit/barang SIPA - bulan kali	1.513.980,000	sts	sts	164.763,000										sts	sts	164.763,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Aceh	Tercapainya Realisasi pendapatan daerah	4,4	triliun	3.892.350,000	sts	sts	2.715.629,244										sts	sts	2.715.629,244	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dana desentralisasi	Tersedianya data dan laporan perencanaan dana desentralisasi	6	jenis laporan (3 sumber dana)	1.338.335,000	sts	sts	1.144.660,749										sts	sts	1.144.660,749	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
										Tolak Ukur	Target											Vol	Satuan	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak	Terdapatnya data potensi wajib pajak sebagai landasan penerbitan kebijakan peningkatan PAD	1.700,00	4300	5.703.750,000	sts	sts	2.799.581,749								sts	sts	2.799.581,749	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Kota/subsahab	3	bidang dan 23 upid	8.121,059,640	sts	sts	5,928,049,649								sts	sts	5,928,049,649	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Peningkatan penataan arsip keuangan daerah	Terlaksananya Terbit Dolamen Kearsipan BPKA		Kantor Induk dan UPTD	2.703,454,000	sts	sts	2,380,114,000								sts	sts	2,380,114,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan hitung realisasi kinerja SKPA	Tersedianya laporan kinerja	6	jenis buku	152,060,000	sts	sts	138,902,755								sts	sts	138,902,755	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan dan Penganggaran SKPA	Tersedianya anggaran kerja SKPA	8	jenis buku	509,610,000	sts	sts	462,339,230								sts	sts	462,339,230	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	APLIKASI SIPKD DALAM RANGKA PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PEMERINTAH ACEH YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PENDUKUNG LAINNYA	1	APLIKASI YANG TERDIRI DARI 3 MODUL	7,145,458,000	sts	sts	4,680,770,000								sts	sts	4,680,770,000	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	Tersedianya Dolamen Serapan Belanja Hibah Kepada Lembaga, BOS dan Obat	30	Jenis Laporan	2,409,455,400	sts	sts	1,530,509,999								sts	sts	1,530,509,999	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD)	Tersedianya dasar perencanaan kebutuhan barang umum Pemerintah Aceh	15	2 buku dokumen	105,500,000	sts	sts	59,573,850								sts	sts	59,573,850	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Evaluasi, Penilaian dan manfaat serta Pelaporan Aset	Terlaksananya evaluasi, penilaian, pemanfaatan serta pelaporan aset sesuai dengan peraturan serundang-undangan	24	kegiatan	957,606,000	sts	sts	389,058,188								sts	sts	389,058,188	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengendalian, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Terkendalinya dan terjaminnya barang milik daerah	45	Serifikat, Asrama, Plang Papan Nama, IMB	2,194,396,000	sts	sts	1,240,590,608								sts	sts	1,240,590,608	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Kegiatan implementasi aplikasi sistem informasi giro PNSD	Terbit administrasi keuangan daerah		Penerbitan SP2D Gaji, SKPP, dan Pelaporan Potongan IWP/Pajak/ZIS /Taperum/BPI 5	277,885,000	sts	sts	272,812,456								sts	sts	272,812,456	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah	tersedianya pergub standar pedoman dalam penyusunan keuangan daerah	250	3 Orang Pergub	372,830,000	sts	sts	307,366,792								sts	sts	307,366,792	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan dan Penilaian Pelaksanaan BLUD	TERSUSUNNYA DOKIMEN PENGELOLAAN BLUD SECARA TERKUIB, EFEKTIF DAN EFISIEN	34	3 BLUD Keputusan Gubernur	2,051,530,000	sts	sts	435,206,318								sts	sts	435,206,318	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertatanya pengelolaan barang milik daerah	351	52 orang SKPA	485,490,000		orang SKPA	290,160,261								sts	sts	290,160,261	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamastan UPTD	Terselenggaranya kebutuhan kesamastan dan meningkatnya keuntabusi PPA terhadap pendapatan	#####	wajib pajak	10,585,985,677		wajib pajak	9,082,226,735								sts	sts	9,082,226,735	sts	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan standar biaya umum pemerintah Aceh	TERSEDIAANYA DOKIMEN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RAPRA	8	Dokumen SBU Pemerintah Aceh	622,175,000	sts	sts	151,656,400								sts	sts	151,656,400	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	Terusunnya jumlah Dokumen KIA dan PPAS serta Dokumen KIA dan PPAS Perubahan AP	8	Dokumen KIA dan Dokumen PPAS	3,447,840,000	sts	sts	547,185,682								sts	sts	547,185,682	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	KepGub Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun APBK dan Rancangan Qanun Perubahan APBK	184	KepGub	4,710,215,000	sts	sts	2,653,032,276								sts	sts	2,653,032,276	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Kantor Keuangan Daerah	380	Orang	1,433,975,000	sts	sts	509,916,888								sts	sts	509,916,888	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	KepGub Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	92	KepGub	3,713,357,040	sts	sts	1,569,676,281								sts	sts	1,569,676,281	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Blintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah	1880	Orang	3,906,650,000	sts	sts	875,167,300								sts	sts	875,167,300	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengembangan Regional SIKD	Terintegrasi data pengelolaan keuangan Kab/kota berbasis anlitik	100	%	3,119,984,320	sts	sts	1,231,592,335								sts	sts	1,231,592,335	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan	Terselaksananya Administrasi Belanja Daerah			1,522,540,000	sts	sts	4,898,906,578								sts	sts	4,898,906,578	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Indikator Kinerja Capaian Program / Target	Tolok Ukur			Vol	Satuan				Vol	Satuan				Vol		Satuan	Vol
		Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan kas	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	BKU, Laporan Bulanan/Trialan/Semesteran/Tahunan, Penyerahan Dana Transfer dan Belanja Daerah Laporan	1,274,519,500	sts	sts	317,096,382										sts	sts	317,096,382	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
		Pengelolaan administrasi gaji PNSD dan Belanja Tidak Langsung	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	Penerbitan SP2D gaji, SKPP, dan Rekapitulasi Potongan Pajak/ZIS SP2D	1,356,395,880	sts	sts	517,293,804										sts	sts	517,293,804	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
		Pembinaan perbendaharaan	Bendahara yang memiliki sertifikasi		550	Orang	1,562,566,000	sts	sts	543,196,100								sts	sts	543,196,100	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
		Koordinasi, rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan	Laporan Keuangan Lebih Akumulatif		360	Laporan	827,560,000	sts	sts	487,264,263								sts	sts	487,264,263	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
							610,560,000	-	-	-													tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh				
																				155.96	88.97			-	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
																				ST	T			ERR	#VALUE!	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Basio nilai barang milik daerah yang clear & clean portofolio barang milik daerah	100	%	22,984,600,889	73	%	9,369,107,891	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							85	%	6,028,547,066	tdr	sts	sts	-	sts	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
											Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMA	1	tahun	8,240,562,275	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	tahun	6,028,547,066	100.00	-	1	tahun	6,028,547,066	tdr	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
		Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Kepgub standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	Keputusan Gubernur	8		2,394,925,000	sts	sts	1,026,422,713	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	1	kepgub	962,543,922	Penyusunan Standar Harga	2		45,116,754	sts	4.69	sts	sts	1,071,539,487	sts	44.74	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBM)	Pergub RKBM	Keputusan Gubernur	4	kepgub	629,425,000	sts	sts	113,309,640	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	kepgub	237,490,129	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2		237,152,690	sts	99.86	sts	sts	350,462,330	sts	55.68	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penatausahaan Aset	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel	Laporan BMD	8	laporan	3,901,422,000	sts	sts	1,832,653,650	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	1,685,133,757	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	laporan	1,419,305,465	200.00	84.23	sts	sts	3,251,959,115	sts	83.35	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	1	laporan	2,411,223,900	Pengamanan Barang Milik Daerah	2	laporan	2,475,716,946	200.00	102.67	sts	sts	2,475,716,946	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
											Koordinasi Hasil Penilaian	1	kepgub	1,032,100,110	Penilaian Barang Milik Daerah	1	kepgub	196,634,912	100.00	19.05	sts	sts	196,634,912	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												2	Kegiatan					100.00	tdr	sts	sts	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
		Pemindahtanganan Aset	Jumlah laporan legalitas perpindahtanganan aset		15647	Unit	3,294,604,000	sts	sts	1,083,474,854	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penindahtanganan Barang Milik Daerah	7	SK	926,474,257	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemudahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14	SK	1,654,620,299	200.00	178.59	sts	sts	2,738,095,153	sts	83.11	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemudahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Persetujuan	985,588,189	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
												4	SK	985,588,189													Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Sensus Barang Milik Daerah (BMD)	Laporan hasil sensus BMA		1	laporan sensus BMA	500,000,000	-	-	-															tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Peningkatan Manajemen Aset	Jumlah laporan pengelolaan BMA		4	Kepgub nilai BMA Bimtek	7,627,382,000	sts	sts	1,673,275,023															21.94	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penghapusan Aset	Jumlah laporan aset yang dikeluar dari pencatatan Barang Milik Aceh		15647	Unit	1,511,440,000	sts	sts	434,673,854															28.76	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Pengamanan Aset	jumlah sertifikat kepemilikan BMA		85	Sertifikat	6,794,400,560	sts	sts	2,676,740,099																39.40	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
																										tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																										tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Pemanfaatan Aset	jumlah laporan BMA yang dilakukan pemanfaatan		4	Laporan	3,035,450,000	sts	sts	528,558,038																17.41	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
																											Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K		K		Sandingan		Menjadi		K			K		K		K		K							
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan		
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pendapatan Aceh	Manajemen Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	30	%	98,842,609,516	58	%	33,412,799,328	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN ASLI ACEH	1	triliun	19,471,247,059	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18	%	11,095,423,099	tdr	-	sts	sts	-	sts	-	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
										Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	JUMLAH PENDAPATAN ASLI ACEH	1	triliun	19,471,247,059	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		triliun	11,095,423,099	-	-	-	triliun	11,095,423,099	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4	Kab/Kota	792,131,305	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	46	Kab/Kota	512,800,000	1,150.00	64.74	sts	sts	512,800,000	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	3	Basis Data	771,780,600	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2,989,927	Basis Data	571,484,229	#####	74.05	sts	sts	571,484,229	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	860000	Wajib Pajak	12,904,097,843	Penagihan Pajak Daerah	1,417,480	Wajib Pajak	7,501,785,335	164.82	58.13	sts	sts	7,501,785,335	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	pelatihan dan rapat koordinasi	4	Kegiatan	4,453,580,326	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16	Kegiatan	2,509,353,335	400.00	56.34	sts	sts	2,509,353,335	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
										Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Terintegrasiya aplikasi pengelolaan keuangan	3	Aplikasi	2,113,568,896	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				8.7	Triliun	14,197,971,280	#####	sts	5,289,455,297												#####	-	-	37.26	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				3	Jenis Laporan	1,339,135,000	-	Jenis Laporan	1,177,958,780												#####	-	-	87.96	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				23	kab/kota	533,000,000	90	%	403,500,000												#####	-	-	75.70	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				4,545.94	Unit Kendaraan	2,359,260,000	1,304,769	sts	679,407,976												#####	-	-	28.80	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				178.014	unit kendaraan	2,194,494,626	211,863	wajib pajak	1,492,841,887												#####	-	-	68.03	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				64,790	unit kendaraan	1,488,760,400	57,273	wajib pajak	904,590,581												#####	-	-	60.76	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				74,163	unit kendaraan	1,194,168,600	65,023	wajib pajak	779,497,699												#####	-	-	65.28	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				50,221	unit kendaraan	1,172,616,450	72,779	wajib pajak	772,718,971												#####	-	-	65.90	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				56,075	unit kendaraan	1,255,102,700	52,403	wajib pajak	776,740,650												#####	-	-	61.89	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				22,676	unit kendaraan	920,999,200	78,033	wajib pajak	542,623,745												#####	-	-	58.92	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				28,171	unit kendaraan	680,138,960	46,707	wajib pajak	369,489,593												#####	-	-	54.33	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				31,137	unit kendaraan	779,711,650	34,027	wajib pajak	593,549,475												#####	-	-	76.12	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				38,518	unit kendaraan	620,602,600	46,159	wajib pajak	383,178,537												#####	-	-	61.74	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				38,518	unit kendaraan	483,573,400	21,282	wajib pajak	404,658,983												#####	-	-	83.68	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				38,518	unit kendaraan	718,206,400	31,808	wajib pajak	537,182,988												#####	-	-	74.80	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				5866	unit kendaraan	411,217,050	7,324	wajib pajak	327,721,620												#####	-	-	79.70	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				11,982	unit kendaraan	419,702,550	11,931	wajib pajak	274,759,679												#####	-	-	65.47	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				13,533	unit kendaraan	420,676,400	9,307	wajib pajak	324,933,702												#####	-	-	77.24	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				38,518	unit kendaraan	803,246,980	33,215	wajib pajak	519,505,502												#####	-	-	64.68	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				22,064	unit kendaraan	917,561,480	19,610	wajib pajak	524,719,714												#####	-	-	57.19	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				22,502	unit kendaraan	668,367,760	16,941	wajib pajak	474,650,897												#####	-	-	71.02	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
				19,660	unit kendaraan	643,249,150	22,409	wajib pajak	447,440,590												#####	-	-	69.56	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		K		K		Sandingan		Menjadi		K		K		K		K		K				
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamastan UPTD XIX Aceh Singkil	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Aceh Singkil	14854	unit kendaraan	451,081,200	9,207	wajib pajak	269,241,561											*****	-	-	59,69	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamastan UPTD XX Sabang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Sabang	2380	unit kendaraan	340,623,080	9,359	wajib pajak	289,246,438											*****	-	-	80,21	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamastan UPTD XXI Simeulue	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Simeulue	4754	unit kendaraan	390,507,700	5,161	wajib pajak	133,547,060											*****	-	-	34,20	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamastan UPTD XXII Pidie Jaya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Pidie Jaya	18803	unit kendaraan	509,578,250	19,109	wajib pajak	350,348,190											*****	-	-	68,75	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamastan UPTD XXIII Subulussalam	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Subulussalam	5946	unit kendaraan	347,167,250	5,534	wajib pajak	199,139,962											*****	-	-	57,36	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan rutinitas dan teknis pengelolaan teknologi informasi (PZTI)	Integrasinya aplikasi pengelolaan keuangan	8	aplikasi	1,125,000,000	1	sts	1,915,235,942											*****	-	-	170,24	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyusunan dan pelaporan perencanaan dan desentralisasi	laporan perencanaan dan desentralisasi	12	Laporan	2,480,000,000	4	laporan	1,169,525,403											*****	-	-	47,16	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Sosialisasi kebijakan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23	kab/kota	1,550,000,000	1	%	364,136,000											*****	-	-	23,49	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD I Banda Aceh	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	607542	unit kendaraan	5,580,000,000	156,974	Unit Kendaraan	1,215,518,482											*****	-	-	21,78	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD II Aceh Besar	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	260370	unit kendaraan	3,720,000,000	115,306	Unit Kendaraan	771,133,863											*****	-	-	20,73	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD III Pidie	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	264489	unit kendaraan	2,790,000,000	84,711	Unit Kendaraan	604,479,750											*****	-	-	21,67	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD IV Bireuen	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	247157	unit kendaraan	2,945,000,000	99,318	Unit Kendaraan	596,770,630											*****	-	-	20,26	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD V Lhokseumawe	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	216225	unit kendaraan	2,945,000,000	56,445	Unit Kendaraan	687,010,818											*****	-	-	23,33	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD VI Aceh Utara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	140028	unit kendaraan	2,635,000,000	99,824	Unit Kendaraan	535,178,786											*****	-	-	20,31	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD VII Aceh Timur	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	144513	unit kendaraan	1,860,000,000	60,363	Unit Kendaraan	394,965,078											*****	-	-	21,23	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD VIII Langsa	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	123411	unit kendaraan	2,170,000,000	40,725	Unit Kendaraan	584,984,203											*****	-	-	26,96	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD IX Aceh Tamiang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	163554	unit kendaraan	1,860,000,000	54,999	Unit Kendaraan	404,323,669											*****	-	-	21,74	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD X Bener Meriah	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	133554	unit kendaraan	1,395,000,000	24,277	Unit Kendaraan	435,079,810											*****	-	-	31,19	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XI Aceh Tengah	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	139554	unit kendaraan	2,170,000,000	37,461	Unit Kendaraan	531,078,285											*****	-	-	24,47	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XII Aceh Barat	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Aceh Barat	151554	unit kendaraan	2,325,000,000	47,717	Unit Kendaraan	514,477,196											*****	-	-	22,13	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XIII Nagan Raya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Nagan Raya	96192	unit kendaraan	2,325,000,000	33,252	Unit Kendaraan	479,031,641											*****	-	-	20,60	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XIV Aceh Barat Daya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Barat Daya	82506	unit kendaraan	2,015,000,000	22,631	Unit Kendaraan	475,444,394											*****	-	-	23,60	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XV Aceh Selatan	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Selatan	82980	unit kendaraan	1,922,000,000	34,743	Unit Kendaraan	323,827,575											*****	-	-	16,85	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XVI Pidie Jaya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Pidie Jaya	71409	unit kendaraan	1,550,000,000	24,375	Unit Kendaraan	399,978,300											*****	-	-	25,81	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XVII Sabang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Sabang	13140	unit kendaraan	1,085,000,000	11,257	Unit Kendaraan	237,615,344											*****	-	-	21,90	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XVIII Aceh Jaya	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Jaya	34999	unit kendaraan	1,085,000,000	15,330	Unit Kendaraan	278,583,830											*****	-	-	25,68	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XIX Subulussalam	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Subulussalam	26838	unit kendaraan	775,000,000	9,280	Unit Kendaraan	220,527,844											*****	-	-	28,46	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XX Aceh Singkil	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Aceh Singkil	56562	unit kendaraan	1,147,000,000	15,565	Unit Kendaraan	256,052,233											*****	-	-	22,32	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Satuan	Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.
							Vol	Satuan									Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		Vol	Satuan
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XXI Gayo Lues	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Gayo Lues	23598	unit kendaraan	1.085.000.000	9,700	Unit Kendaraan	314,254,071											#####	-	-	28,96	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XXII Aceh Tenggara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Aceh Tenggara	37946	unit kendaraan	1.085.000.000	15,589	Unit Kendaraan	264,019,214											#####	-	-	24,33	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesamastan UPTD XXIII Simeulue	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap Objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Simeulue	20262	unit kendaraan	1.085.000.000	6,997	Unit Kendaraan	196,917,400											#####	-	-	18,15	tdr	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
		Badan Kepegawaian Daerah Aceh				158,832,923,217			42,442,734,129				40,912,263,400	Badan Kepegawaian Daerah Aceh				25,952,586,415	63,43								
		Urusan Peningkatan Urusan				158,832,923,217			42,442,734,129				40,912,263,400	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				25,952,586,415	63,43								
		Bidang Urusan Kepegawaian				158,832,923,217			42,442,734,129				40,912,263,400	KEPEGAWAIAN				25,952,586,415	63,43								
						52,331,711,488			14,798,600,763				23,052,263,412	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				20,766,022,031	tdr	90,08							
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	20,756,606,084	81	%	6,379,775,160	n/a																	
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	30,252,730,404	81	%	7,880,087,855	100	%																
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	1,294,125,000	84	%	515,986,400	n/a																	
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Presentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	28,250,000	100	%	22,751,348	n/a																	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sandangan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
									Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target													Vol	Satuan		Vol	Satuan
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	%tase kesejahteraan anggota KORPRI dan %tase ASN yang Melek Al-Qur'an	85	%	12,896,159,885	70	%	5,211,877,326		%tase kesejahteraan anggota KORPRI dan %tase ASN yang Melek Al-Qur'an					75	%		tdr		72	%	5,211,877,326	85.04	40.41	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
	n/a Program di RPJMA	Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	Presentase Jumlah Purna Tugas yang dilatih	100	%	284,658,000	100	%	115,985,500										tdr		100	%	115,985,500	100.00	40.75	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase Kesejahteraan Aparatur	100	%	1,288,770,000	100	%	1,028,786,859										tdr		100	%	1,028,786,859	100.00	79.83	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
	Mengutamakan kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadisi, Ijma' dan Qiyas	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Presentase Aparatur yang Melek Al-Qur'an	45	%	541,345,000	100	%	327,363,998										tdr		100	%	327,363,998	222.22	60.47	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terpenuhiya kebutuhan Pegawai	100	%	500,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	#VALUE!	%	3,119,037,466	tdr	623.81	#VALUE!	%	3,119,037,466	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	ASN	5000	Peserta	10,326,598,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	623	Peserta	658,679,347	tdr	6.38	623	Peserta	658,679,347	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)		6	Kegiatan	5,000,000,000	fasilitasi Lembaga Profesi ASN	11	Kegiatan	2,023,873,252	183.33	40.48	11	Kegiatan	2,023,873,252	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Nashah dan Dokumen ASN	ASN	22374	ASN	436,418,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25,922	ASN	300,395,967	tdr	68.83	25,922	ASN	300,395,967	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
															Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17,035	ASN	74,290,000	tdr	tdr	17,035	ASN	74,290,000	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian	1	kegiatan	4,275,500,000	2	kegiatan	238,694,260	Pengelolaan Data Kepegawaian	ASN	22374	ASN	63,582,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	34,680	ASN	61,798,900	tdr	97.20	sts	sts	300,493,260	sts	7.03	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Administrasi Kepegawaian	Terpenuhiya kebutuhan Pegawai	100	%	11,631,283,250	Mutasi dan Promosi ASN	#VALUE!	%	1,385,950,830	tdr	11.92	#VALUE!	%	1,385,950,830	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
		Pemindahan Tugas PNS	jumlah penyelesaian administrasi pemindahan Tugas ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, Kab/Kota dan antar Lembaga/Kementerian	58	%	284,658,000	85	%	115,985,500	Pengelolaan Mutasi ASN	ASN	2000	ASN	119,931,250	Pengelolaan Mutasi ASN	4,810	ASN	212,750,561	tdr	177.39	sts	sts	328,736,061	sts	115.48	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terlaksananya pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu serta pelayanan administrasi kepegawaian lainnya	100	%	322,192,500	100	%	787,626,130	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	ASN	7023	ASN	520,108,200	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,898	ASN	618,881,516	tdr	118.99	sts	sts	1,406,507,646	sts	436.54	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	ASN	850	ASN	179,891,800					sts						tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh
										Pengembangan Karir ASN									tdr	tdr					tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh
										Pengembangan Karir dan Promosi ASN	ASN	2500	ASN	228,716,750	Pengelolaan Promosi ASN	3,720	ASN	554,318,753	tdr	242.36	3,720	ASN	554,318,753	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
											Terpenuhiya kebutuhan Pegawai	100	%	484,754,000	Pengembangan Kompetensi ASN	#VALUE!	%	259,437,094	tdr	53.52	#VALUE!	%	259,437,094	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
		Penataan mutasi jabatan Struktural dan fungsional	Penempatan pegawai sesuai kebutuhan	100	%	2,600,000,000	90	%	706,976,455	Penataan dan Mutasi Jabatan	ASN	395	ASN	484,754,000	Peminaan Jabatan Fungsional ASN	2,361	ASN	259,437,094	597.72	53.52	sts	sts	966,413,549	sts	37.17	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Peningkatan Kapasitas ASN	Tersedianya Alat Ukur Penilaian Kinerja Aparatur dalam Bentuk Peraturan Gubernur	100	%	330,993,420	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	#VALUE!	%	325,308,718	tdr	98.28	#VALUE!	%	325,308,718	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.		K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
										Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Tertelaksananya pengukuran kinerja ASN	55	SKPA	330.993.425	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	317	ASN	325.308.718	sts	98.28	317	ASN	325.308.718	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
											ASN kab/kota SKPA	110/23/54	ASN/kab/kota/SKPA											tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	85	%	169.006.503				96.830.276	sts	57.29			96.830.276	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
										Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya ketepatan penyampaian laporan kesehatan aparaturnya program Tertelaksananya Sumpah/janji dan Penanda tangkapan pakta integritas ASN ditandatangani Pemerintah Aceh	600/55/400	WL/SKPA/ASN	105.832.564	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			47.361.000	sts	sts	sts	sts	658.138.701	sts	35.38	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
														Pembinaan Disiplin ASN				42.867.828	tdr	tdr			42.867.828	tdr	tdr	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																		59.856.448	sts	94.75	sts	sts	55.341.143	sts	81.15	Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	
																										Badan Kepegawaian Daerah Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																										Vol	
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kebutuhan kantor	100	%	1,010,000,000	36	Bulan	4,299,494,039	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Kebutuhan Kantor	12	Bulan	1,105,426,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1,184,538,248	sts	107.16	12	Bulan	1,184,538,248	sts	117.28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36	Bulan	3,699,968,100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	1,718,651,114	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	951,899,538	sts	#VALUE!	12	Bulan	951,899,538	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	100	%	950,000,000	36	Bulan	3,940,989,800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	12	Bulan	3,199,680,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2,709,170,000	sts	84.67	12	Bulan	2,709,170,000	sts	285.18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	%	450,000,000	36	Bulan	1,973,707,400	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	338,346,659	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	816,400,750	sts	241.29	12	Bulan	816,400,750	sts	181.42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	%	150,000,000	36	Bulan	321,103,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	99,632,772	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	89,711,675	sts	90.04	12	Bulan	89,711,675	sts	59.81	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	3,000,000,000	36	Bulan	3,699,968,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	2,922,395,834	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	3,152,375,570	sts	107.87	12	Bulan	3,152,375,570	sts	105.08	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan satpam	Tersedianya makan dan minuman rapat, tamu dan satpam	100	%	400,000,000	36	Bulan	1,946,012,500	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat, Tamu dan Satpam	12	Bulan	219,705,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	816,400,750	sts	371.59	12	Bulan	816,400,750	sts	204.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertindakannya rapat koordinasi BPSDM, SKPA dan BKPSDM				36	Bulan	1,555,485,146	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertindakannya Rapat Koordinasi BPSDM, SKPA dan BKPSDM	375	Orang	1,366,211,379	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	762,694,875	sts	55.83	12	Bulan	762,694,875	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	%	110,000,000	sts	sts	7,696,019,909	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	4,033,117,287	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	-	2,896,031,041	sts	71.81	6	-	2,896,031,041	sts	2,632.76	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya maintenance kendaraan dinas/operasional	100	%	220,000,000	sts	sts	1,161,540,294	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Maintenance Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	728,293,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	637,934,245	sts	87.59	12	Bulan	637,934,245	sts	289.97	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		100	%	11,000,000				Rehabilitasi Sengah/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya Rehab Gedung Kantor	12	Bulan	2,952,740,000	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	12	Bulan	2,426,277,814	sts	82.17	12	Bulan	2,426,277,814	sts	22,057.07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	%ase peranko, materi dan pengiriman naber	100	%	35,000,000	36	Bulan	31,181,500																	Pengembangan	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional		100	%	80,000,000	1	tahun	23,669,400																		Pengembangan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhihnya komponen instalasi listrik/penerangan	100	%	60,000,000	36	Bulan	786,251,500																		Pengembangan
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	100	%	1,000,000,000	36	Bulan	915,152,600																		Pengembangan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya pengadaan surat kabar, majalah dan buku	100	%	90,000,000	36	Bulan	159,820,850																		Pengembangan
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya dokumen dan terpenuhihnya jasa administrasi penunjang perkantoran	100	%	1,400,000,000	sts	sts	1,040,182,100																		Pengembangan
		Penyediaan bahan perkantoran	Tersedianya sarana pendukung kinerja	100	%	25,000,000	sts	sts	308,305,000																		Pengembangan
		Penyediaan jasa dokumentasi kantor																									Pengembangan
		Pembangunan Gedung kantor		100	%	1,320,000,000	36	Bulan	5,898,655,693																		Pengembangan
		pengadaan kendaraan dinas/operasional		100	%	859,503,958	24	bulan	3,625,812,000																		Pengembangan
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	%	55,000,000																					Pengembangan
		Pengadaan peralatan gedung kantor		100	%	110,000,000	12	Bulan	182,204,700																		Pengembangan
		Pengadaan mebeleur		100	%	110,000,000																					Pengembangan
		Pengadaan peralatan studio dan komunikasi		100	%	110,000,000																					Pengembangan
		Pengadaan komputer		100	%	110,000,000	12	Bulan	359,895,000																		Pengembangan
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100	%	67,760,000																					Pengembangan
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	%	110,000,000	36	Bulan	895,169,250																		Pengembangan
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		100	%	55,000,000	12	Bulan	301,002,456																		Pengembangan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya taman perkantoran				Bulan		495,194,000																		Pengembangan
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum	Terpeliharanya jaringan instalasi air				24	Bulan	49,691,300																		Pengembangan
		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		100	%	112,200,000																					Pengembangan
		Kegiatan pembinaan kelembagaan	Tertindakannya aktivitas penunjang kelembagaan	100	%	550,000,000	36	Bulan	2,133,378,900																		Pengembangan
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				550,071,300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.16001598	0	311839000			46	-	311,839,000	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		K		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K		K		K		K		K							
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan			
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
			Tersedianya pilihan dinas beserta perengkapannya	100	%	326,700,000	1,098	stel	495,342,600	Pengadaan Pilihan Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya Pilihan Dinas dan Pakaian Kerja ASN dan Non ASN	205	Stel	550,071,300	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	sts	sts	-	sts	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
			Pengadaan mesin/kartu absensi	100	%	36,600,000														-	-	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100	%	243,137,400														-	-	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
			Pengembangan SDM aparatur	100	%	5,280,547,552														-	-	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
			Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Stratesis, Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Daerah	100	%	2,074,908,000	18	orang	966,475,022											18	orang	966,475,022	sts	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	100	%	116,160,000,000	36	bulan	1,046,310,157											36	bulan	1,046,310,157	sts	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah				165	orang	1,095,218,831											165	orang	1,095,218,831	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Rapat Koordinasi BPSDM	100	%	1,232,627,000	575	orang	584,940,508											575	orang	584,940,508	sts	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pengembangan Kompetensi Teknis Inti				100	%	1,102,223,675											100	%	1,102,223,675	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Lembaga Bahasa Asing	100	%	11,550,000,000	100	%	1,482,340,750												100	%	1,482,340,750	100,00	12,83	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
																				-	#VALUE!		100,00	2,072,33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
																				ERR	#VALUE!		ST	ST	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
						126,274,442,074			179,072,044,056	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				162,488,461,299	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	172,973,661,653				0	0	352,045,705,709	tdr	278,79	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	%sae mahasiswa terbuah Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas yang bergengsi di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan Pemerintah Aceh	60	%	28,227,285,000	108	%	149,194,292,654											tdr		108	%	149,194,292,654	180,13	528,55	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pendidikan Kedinan	%sae aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan diklat bedinasan	85	%	69,819,872,074	56	%	21,835,692,863											tdr		56	%	21,835,692,863	65,83	31,27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%sae Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur sesuai Kebutuhan Instansi	60	%	28,227,285,000	63	%	8,042,058,539											tdr		63	%	8,042,058,539	105,71	28,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
										Pengembangan Kompetensi Teknis				3,593,027,878	Pengembangan Kompetensi Teknis	45,516,249,43	%	2,102,038,427				46	%	2,102,038,427	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
											Terlaksana pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan dan kepemimpinan pegawai bagi pejabat penerintah Aceh	60	Orang	2,366,143,200	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				240	Orang	778,761,545	sts	32,91	-	-	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
											Terlaksananya diklat kepemimpinan tingkat III/Pelatihan kepemimpinan administrator bagi pejabat penerintah Aceh	60	Orang		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							66	orang	13,595,500,056	sts	123,83	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
											Tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis inti sertifikasi Spesifik terhadap unit kerja	200	Orang	1,000,084,678	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				800	Orang	763,705,682	sts	76,36	270	orang	2,138,057,617	sts	74,68	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
				Vol	Satuan		Vol	Satuan							Vol	Satuan								Vol		Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23			
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlaksananya diklat diklat teknis	100	%	3,025,000,000	1,220	orang	2,495,515,530		Kursus Pelatihan Sosialisasi/Bimbingan Teknis PNS/Non PNS	12	Bulan	226,800,000		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Televisi, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konsuler, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	240	Orang	236,201,100	sts	104.15	1,220	orang	2,495,515,530	sts	82.50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya kegiatan profesionalisme bagi ASN Strategis dan Widaiswara	100	%	1,705,982,154	300	%	3,606,619,660												300	%	3,606,619,660	300.00	211.41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
											Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			150,895,431,413		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	817.2119078	%	1,708,726-11			817	%	170,871,623,226	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
											Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertjabatan Fungsional	Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	60	Peserta	363,081,932		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertjabatan Fungsional	120	Peserta	275,623,400	tdr	75.91	-	-	-	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
											Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak (Tenaga Honorer)	75	Orang	2,980,240,000		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	-	-	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
																				0	0	0	tdr	tdr	-	-	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																													Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa	Terlaksananya kegiatan kerjasama, monitoring dan evaluasi beasiswa	100	%	2,297,858,367	150	%	2,070,250,543		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya kerjasama monitoring dan evaluasi beasiswa di dalam dan luar negeri	12	Bulan	649,999,937		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	12	Bulan	606,304,574	sts	93.28	150	%	2,070,250,543	150.00	90.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
																				0	0	0	tdr	tdr	-	-	-	tdr	tdr	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K			K			Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Sandingan		Menjadi		K			K		K		K												
				Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Tolok Ukur	Target		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											Vol	Satuan																			Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																									
				12	laporan	90.000,000			laporan																										
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SAKIP																									
										Administrasi Umum																									
				408	palet/pengiriman	955,731,800	181	palet/pengiriman	472,386,556	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
				60	Bulan	9,411,967,170	36	Bulan	2,771,975,345	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																									
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
				130	STNK	612,890,000	84	STNK	307,136,200	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional																									
				20	Gedung	2,483,629,336	12	Gedung	958,079,976	Penyediaan jasa kebersihan kantor																									
				360	Jenis	378,094,670	220	Jenis	287,856,300	Penyediaan Alat Tulis Kantor																									
				150	Jenis	1,705,648,889	99	Jenis	379,923,191	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																									
				20	Gedung	446,586,600	12	Gedung	248,158,605	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																									
				100	barang	1,957,171,000	56	Barang	567,105,530	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																									
				15	jenis	3,078,534,500	16	Jenis	781,267,677	Penyediaan peralatan rumah tangga																									
				22	Jenis	206,880,000	32	Jenis	52,902,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Tolak Ukur	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
												Vol	Satuan														Vol	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya makan dan minum untuk tamu Pimpinan dan Pegawai yang bekerja diluar jam dinas	55	Bulan	7,048,173,700	33	Bulan	3,149,956,584	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang yg bekerja diluar jam Dinas	11	bulan	1,849,984,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	1,827,192,053	109.09	98.77	45	Bulan	4,977,148,637	81.82	70.62	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat kordinasi dalam dan luar daerah	620	kali	6,546,970,200	295	kali	3,019,675,161	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	140	kali	1,729,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67	Kali	1,718,108,790	47.86	99.34	362	Kali	4,737,783,951	58.38	72.37	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediaya Perlengkapan Gedung Kantor	1	Unit	250,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	67,800,000	300.00	27.12	3	Unit	67,800,000	tdr	tdr	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pengadaan mebeleur	Tersediaya meubelair Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas dan Anjungan Aceh	16	Gedung	2,777,277,900	4	Gedung	418,110,000	Pengadaan Mebeleur	Tersediaya Mebeleur Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas dan Anjungan Aceh	4	gedung	124,369,051	Pengadaan Mebel	4	gedung	163,763,312	100.00	131.68	8	gedung	501,873,312	50.00	20.95	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor, Mess Aceh dan Anjungan Aceh	15	Gedung	14,775,690,000	12	Gedung	10,163,726,614	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas dan Anjungan Aceh	4	gedung	784,382,260	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	gedung	1,070,732,400	100.00	136.51	16	gedung	11,234,459,014	106.67	76.03	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya peralatan Kantor komputer, printer dll	770	service	12,038,908,963	423	Service	6,318,169,954	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	160	service	3,068,587,979	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72	Service	3,276,394,067	45.00	106.77	495	Service	9,594,564,021	64.32	79.70	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					6	gedung	99,671,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4	gedung	158,844,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	#VALUE!	Gedung	#VALUE!	tdr	#VALUE!	#VALUE!	Gedung	#VALUE!	tdr	#VALUE!	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung Kantor, Mess, Rumah, Mess Pemda Aceh dan Anjungan	20	Gedung	1,743,947,400	9	Gedung	563,079,200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12	bulan	49,920,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		bulan	878,982,760	tdr	1,760.78	sts	sts	1,442,061,960	sts	82.69	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersediaya dana penunjang pelayanan admin Perkantoran	60	Bulan	16,792,647,840	36	Bulan	6,961,863,800																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya	Jumlah kegiatan pelayanan terhadap pejabat yang bertugas di Jakarta dan sekitarnya	900	kali	9,836,980,250	4,900	Kali	4,407,410,072	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan	1800	kali	1,767,760,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	776	kali	2,130,981,986	43.11	120.55	5,676	kali	6,538,392,058	63.067	66.47	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pembangunan gedung kantor	Tertelaksananya Pembangunan gedung Kantor	1	Gedung	60,350,000,000																				Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersediaya kendaraan opt. Untuk pelayanan ke. Pejabat	9	unit	4,800,000,000	3	Unit	1,058,000,000																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Tersediaya peralatan studio dan komunikasi Kantor	7	Gedung	2,912,267,000	3	Gedung	735,073,500																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pengadaan Komputer	Tersediaya perangkat/ alat perkantoran	8	unit	1,569,702,000	2	Unit	720,680,000																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas	5	Gedung	920,696,000	8	Gedung	360,342,094																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor komputer, printer dll	60	Bulan	228,424,200	36	Bulan	119,520,000																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Menevahi Kompetensi	100	%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	#DIV/0!	%	168,000,000	tdr	tdr	#DIV/0!	%	168,000,000	tdr	tdr	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediaya pakaian dinas harian Pegawai BPPA	346	pegawai	519,100,000	94	pegawai	133,370,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersediaya Pakaian Dinas Harian Pegawai	110	pegawai	70,280,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	#VALUE!	Pegawai	#VALUE!	tdr	#VALUE!	#VALUE!	Pegawai	#VALUE!	tdr	#VALUE!	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	170	orang	603,156,208	11	Orang	71,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	50	orang	194,800,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15	orang	99,000,000	30.00	50.82	26	orang	170,500,000	15.29	28.27	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah Kegiatan Pengajian rutin dan pembinaan mental Pegawai BPPA	88	pertemuan	759,465,100	44	pertemuan	173,235,000																	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
																										Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
																										Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
																										Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
						5,770,617,014			5,414,762,776	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				4,496,957,300	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			1,265,625,640	tdr	28.14					Badan Penghubung Pemerintah Aceh			
		Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang dilami	Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	1.50 2.7000	1. festival/tahun 2. orang	2,852,616,208	44	kegiatan	1,960,595,786	1. Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta (Festival/Tahun)		n/a			4	kegiatan		sts		24	kegiatan	1,960,595,786	sts	68.73	Badan Penghubung Pemerintah Aceh			
		Meningkatnya transparansi informasi publik	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.1 577 2.3 10400 3.1 36	1.1) - 2.1) orang 3.1) %	226,747,257	62,635	Orang	139,991,400	Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta		n/a			800			tdr		sts	sts	139,991,400	sts	61.74	Badan Penghubung Pemerintah Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sandingan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Target				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol		Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	85	%	2.691.253,549	100	%	3.314.175,590		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	65	%			153	%		236.12		127	%	3.314.175,590	149.11	123.15	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
										Pelaksanaan Pelayanan Penghub	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terhadap Masyarakat di Aceh diperantauan dan Pejabat Daerah Aceh	100	%	4.496.957,300	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	28	%	1.265.625,640	28.30	28.14	28	%	1.265.625,640	tdr	tdr	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya	Jumlah masyarakat yang dilayani BPPA	406	orang	5.022.744,500	197	Orang	2.327.595,500	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dayani	125	orang	623.871,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	130	orang	470.537,415	104.00	75.42	327	orang	2.798.133,005	80.54	55.71	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Peremuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta	Jumlah Terselenggaranya kegiatan silaturahmi dan penyampaian program Pemerintah Aceh kepada masyarakat Aceh di Jabodetabek	4	kali	1.120.300,000	1	kali	279.910,000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Terselenggaranya Pertemuan Pejabat Pemerintah Aceh/DPR/DPD RI Asal Aceh dan Kegiatan Silaturahmi Pemerintah Aceh dan menyampaikan Program	2	Keg	708.300,000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	#VALUE!	Keg	245.191,340	tdr	34.62	sts	sts	525.101,340	sts	46.87	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Pagelaran Seni Budaya Aceh	Jumlah terselenggaranya kegiatan pagelaran seni budaya Aceh di Jabodetabek	41	kegiatan	6.490.990,120	21	kegiatan	1.747.903,786	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Aceh di Jakarta	2	Keg	617.986,300	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	#VALUE!	Keg	234.693,900	tdr	37.98	sts	sts	1.982.597,686	sts	30.54	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Promosi Potensi Aceh	Jumlah terselenggaranya kegiatan Promosi Potensi Aceh				1	kegiatan	211,692,000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Potensi Aceh	1	Keg	779,040,000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	3	Keg	315,202,985	300,00	40,46	sts	sts	526,894,985	tdr	tdr	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Koordinasi pelestarian pengembangan kebudayaan & seni tradisional	Jumlah terselenggaranya kegiatan koordinasi dan pengembangan kesenian bhah Aceh di Jabodetabek	3	kegiatan	1.655,000,000	1	kegiatan	139,120,000											1	kegiatan	139,120,000	33,33	8,41	Badan Penghubung Pemerintah Aceh		
		Penyusunan data base masyarakat aceh se- Jabodetabek	Jumlah pendataan informasi Masyarakat Aceh	120	informasi	75,000,000	-	-	-													-	-	-	sts	-	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
		Pengembangan Informasi melalui website	Jumlah teruploadnya informasi melalui pengelolaan website	577	informasi	325,991,500	290	informasi	139,991,400												290	informasi	139,991,400	50,26	42,94	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
		Peremuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes	Jumlah Terselenggaranya kegiatan pertemuan antara Pejabat/ Pemerintah Aceh bersama Forbes DPR/DPD RI asal Aceh	4	kali	652,850,000	2	kali	343,940,000												2	kali	343,940,000	50,00	52,68	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
																				202,00	47,12					Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
																				ST	SR					Badan Penghubung Pemerintah Aceh	

**Tabel Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja SKPA : BIRO PEREKONOMIAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2021**
Tabel. 2.122

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s/d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi (Kepmendagri 050/2020)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
									Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan													Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Tolak Ukur	Target	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		Biro Perekonomian		29,479,815,713	10,166,688,032	Biro Perekonomian		3,109,325,292	Biro Perekonomian		3,382,114,033	tdr	108.77		13,548,802,065	77	39	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
		Usuran Pendukung		29,479,815,713	10,166,688,032	Usur Pendukung Usuran Pemerintahan		3,109,325,292	Usur Pendukung Usuran Pemerintahan		3,382,114,033	tdr	108.77		13,548,802,065	77	39	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
		Bidang Usuran Sekretariat Daerah		29,479,815,713	10,166,688,032	SEKRETARIAT DAERAH		3,109,325,292	SEKRETARIAT DAERAH		3,382,114,033	tdr	108.77		13,548,802,065	77.29	39.23	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
				5,787,315,713	2,769,570,763										2,769,570,763	tdr	47.86	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
422	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingsukungan Hidup	Persentase tercapainya Kebijakan Yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	60 %	4,411,315,713	- %	2,385,660,064								2,385,660,064	sts	54.08	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
424	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	Persentase Pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah	2 %	1,126,000,000	- %	285,133,900								285,133,900	sts	25.32	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
413	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengembangan Industri Strategis	Persentase tercapainya kebijakan yang sinergi dalam pengembangan Industri Strategis	60 %	250,000,000	- %	98,776,799								98,776,799	sts	39.51	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
		Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Industri Strategis	Sosialisasi percepatan pengembangan industri strategis	1	Laporan	-	Laporan	98,776,799							98,776,799	sts	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
				23,692,500,000	7,397,117,269	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3,109,325,292	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3,382,114,033	108.77			10,779,231,302	tdr	45.50	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
426	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	80 %	12,570,000,000	65 %	4,021,647,091								4,021,647,091	65 %	81.25	31.99	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)			
427	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Persentase tercapainya kebijakan strategis perekonomian	75 %	11,122,500,000	55 %	3,375,470,178								3,375,470,178	55 %	73.33	30.35	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)			
						Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Persiapkan Peraturan terkait kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	70 %	3,109,325,292	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	- %	1,510,055,006	-		1,510,055,006	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)				
		Koordinasi Pengembangan Perekonomian Daerah	Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian se-Aceh	1	Laporan	1	Laporan	190,732,600					100.00	95.65	1	Laporan	343,774,942	100.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)		
		Kebijakan Perekonomian Strategis				2	Laporan	254,203,400					tdr	sts	sts	254,203,400	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)			
		Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah	1	Laporan	1	Laporan	204,663,500	1	laporan	359,400,000		343,774,942		tdr			400.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)		
		Pengendalian Inflasi Daerah				2	Laporan	495,645,020					tdr	sts	sts	495,645,020	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)			
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan RASKIN dan SEMBAKO	Sosialisasi Pelaksanaan Program Raskin	1	Laporan	1	Laporan	100,989,400					12	Laporan	sts	92.83	13	Laporan	1,267,269,464	1,300.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
		Kebijakan Bidang Pangan				2	Laporan	165,826,556					1	Laporan	tdr		3	Laporan	165,826,556	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
		Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kelancaran Kerja Biro Perekonomian	1	Laporan	5	Laporan	2,717,081,560	1	dokumen	1,256,396,000		1,166,280,064		tdr	8	Laporan	2,717,081,560	800.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
		Penyusunan Rencana, Standar Pelayanan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian				9	dokumen	333,952,269					-		tdr	9	Dokumen	333,952,269	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
															tdr	sts	sts	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
															513,881,628	tdr	tdr	513,881,628	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	Pertemuan Forum Pengelolaan Sumberdaya Pangan dan Perikanan	1	Laporan	1	Laporan	101,896,400					1	Dokumen	sts	102.57	sts	sts	312,467,881	sts	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
		Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan				3	Laporan	238,618,609							tdr	sts	sts	238,618,609	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) se-Aceh	1	Laporan	1	Laporan	230,073,616	1	laporan	205,300,000		210,571,481		tdr	1	Laporan	230,073,616	100.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
		Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pertanian				3	Laporan	556,201,639							tdr	4	Laporan	556,201,639	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)	
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengelola dan Pengawasan Lingsukungan Hidup	Pertemuan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Laporan	1	Laporan	152,575,750							100.00	99.29	2	Laporan	255,837,442	200.00	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	laporan rancangan kebijakan penanganan Lingkungan Hidup															Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s/d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKA s/d Akhir Semester II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K		K		Rp.	
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolok Ukur	Target	Vol	Satuan					Vol	Satuan			Vol	Satuan				Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		3	Laporan	281,197,537		Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	laporan	104,000,000			-	Laporan	103,261,692			3	Laporan	281,197,537	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)
		Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Monitoring dan Koordinasi Pengendalian Distribusi Energi Bersubsidi	1	Laporan	129,425,965		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	laporan	204,000,000		1	Dokume	sts	98.06	1	Dokumen	200,048,455	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)		
		Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral		3	oran & E	373,886,213			1	laporan				-	Laporan			-	Laporan		tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
														-	-	1,358,177,399	tdr	tdr	-	-	1,358,177,399	tdr	tdr				Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Industri dan Perdagangan serta SRG	Rapat Koordinasi terkait Peningkatan Ekspor dan Pengembangan SRG	1	Laporan	127,266,750							1	Laporan		1,358,177,399	33.33	138.56	1	Laporan		100.00	tdr	tdr			Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Pembinaan Pengembangan Industri dan Perdagangan		3	oran & E	491,312,446												-	-		tdr	tdr				Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)		
		Pembinaan Kebijakan Transportasi		1	Laporan	162,519,952												-	-		tdr	tdr				Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)		
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/Kota	1	Laporan	90,868,031							1	Laporan					1	Laporan		100.00	tdr	tdr			Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3	oran & E	254,603,616		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3	laporan	980,229,292										tdr	tdr				Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)		
		Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Aceh	1	Laporan	143,842,000							1	Laporan					1	Laporan		100.00	tdr	tdr			Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Koordinasi Penggunaan Penghasilan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sosialisasi terkait Percepatan Akses Keuangan kepada Penyuluh/Pendamping UMKM	1	Laporan	111,725,500															tdr	tdr				Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)		
		Pembinaan Kelembagaan Perencanaan dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Pemertanian		16	Laporan	635,865,770								1	Laporan						tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Rancangan Qanun BUMA	1	Laporan	285,133,900															tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Kegiatan Pembentukan Perkuat Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Meningkatnya Perjanjian (MoU/MOA) Kerjasama Antar Daerah	1	Laporan	47,841,973															tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
		Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal dan Kinerja Badan Usaha Milik Aceh		3	Laporan	1,189,961,261															tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Perencanaan)	
Rata-rata capaian kinerja (%)													77.78	104.49			266.67	#DIV/0!										
Predikat kinerja													T	ST					ST	#DIV/0!								
		Biro Organisasi		-	-			Biro Organisasi			1,389,260,747		Biro Organisasi		5,549,989,092	tdr	399.49			5,549,989,092	7.4	7.4				Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)		
		Usuran Pendukung		-	-			Usur Pendukung Usuran Pemerintahan			1,389,260,747		Usur Pendukung Usuran Pemerintahan		5,549,989,092	tdr	399.49			5,549,989,092	48.33	7.37					Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Bidang Usuran Sekretariat Daerah		-	-			SEKRETARIAT DAERAH			1,389,260,747		SEKRETARIAT DAERAH		5,549,989,092	tdr	399.49			5,549,989,092							Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			150,334,127		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		2,896,714,361	tdr	1,926.85	-	-	2,896,714,361	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
								FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN					FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN		697,074,743	tdr	tdr	7	-	697,074,743	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilakukan Penataan	151	SKPA/Unit Kerja	2,750,670,000	121	SKPA/Unit Kerja	676,246,118		80	%	160,000,000		80	%	151,056,143	94.41	80	%	151,056,143	sts	5.49				Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi/asistensi OPD	23	Kab/Kota	2,001,975,000	67	Kab/Kota	550,963,408		80	%	170,000,000		238	%	332,417,500	298.00	195.54	238	%	332,417,500	sts	16.60			Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa jabatan	151	SKPA/Unit Kerja	4,473,527,000	165	SKPA/Unit Kerja	2,272,087,251		20	SKPA/Unit Kerja	180,000,000		80	SKPA/Unit Kerja	213,601,100	118.67	80	SKPA/Unit Kerja	213,601,100	sts	4.77			Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)		
								FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA					FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA		1,849,826,818	tdr	tdr	7	-	1,849,826,818	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rakor Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota	300	Peserta	624,064,947	sts	sts	624,064,947		46	Kegiatan	230,000,000		47	Kegiatan	130,853,796	102.17	56.89	47	Kegiatan	130,853,796	sts	tdr			Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
			Prokese Pelaksanaan Fasilitas/Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	300	peserta	3,633,435,000	-	-	-												sts	-				Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)		
		Pengembangan indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dalam SAKIP	7	Dok	2,564,403,350	20	Dok	1,014,737,244		9	dokumen	369,043,674		9	dokume	932,980,150	100.00	252.81	9	dokumen	932,980,150	sts	36.38			Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	
		Penyusunan dan Penyajian Dokumen AKIP	Jumlah Laporan Kinerja (LKJ)	3	Dok	4,464,960,000	10	Dok	959,186,420												sts	sts					Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
									Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)													Tolak Ukur	Target	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
			Sumlah SKPA yang difasilitasi/assistensi penyusunan SKPA	50	skpa	2,848,915,000	45	SKPA	735,345,602																
			Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara (RACORPAN/DA)	500	peserta	1,362,703,000	sts	sts	1,113,660,109																
			Peningkatan kualitas pelayanan publik	50	skpa	2,241,266,000	sts	sts	607,677,601																
			Pengelolaan perpustakaan satuan kerja	1050	org	1,401,715,000	1,651	Orang	498,672,135																
Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Yakase Aparatur yang mendapat pembinaan dan kesejahteraan	90 %	%	3,120,378,750	180	%	1,264,349,966	150,334,127	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100	-	421,863,650	tdr	280.62	100	-	421,863,650	sts	13.52					
	Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian	Panataan Arsip Kepegawaian dilijungkan Setda Aceh	95	%	1,053,072,000	571	%	506,135,120	150,334,127	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	215	%	349,533,500	tdr	232.50	215	%	349,533,500	226.32	33.19					
	Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kedisiplinan	Jumlah PNS Setda Aceh yang difasilitasi mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial	12	ASN	1,809,133,000	33	ASN	346,513,196		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	ASN	72,330,150	tdr	tdr	-	ASN	72,330,150	-	4.00					
	Pelayanan Kesejahteraan PNS	Jumlah ASN Setda yang mendapatkan Cuti	1000	ASN	1,644,367,400	561	ASN	411,701,650		Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	sts	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)													161.15	162.87			93.10	21.37							
Predikat kinerja													ST	ST			ST	SR							
	Program pelayanan administrasi perkantoran								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan capaian kinerja dan Persentase aparatur yang mendapat pembinaan dan Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	1,389,260,747	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	-	2,653,274,731	sts	190.98	100	-	2,653,274,731	tdr	40.52	
																		1,264,349,966	sts	tdr	tdr	tdr	tdr		
										PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100	%	94,040,708	PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2	-	255,690,350	sts	271.89	2	-	255,690,350	tdr	tdr	
										Tersusunnya Renstra dan Renja	12	Bulan	94,040,708	Perencanaan dan Pengolahan Perangkat Daerah	2	dokume	255,690,350	100.00	271.89	2	dokumen	255,690,350	tdr	tdr	
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	dokumen	94,040,708	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	2,397,584,381	sts	226.48	12	Bulan	2,397,584,381	sts	69.05	
										Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan Asesor	12	Bulan	1,058,638,548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	-	2,397,584,381	sts	226.48	12	-	2,397,584,381	tdr	tdr	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	1,058,638,548	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	2,397,584,381	sts	226.48	12	Bulan	2,397,584,381	sts	69.05	
										Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3,472,382,979	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	2,397,584,381	sts	226.48	12	Bulan	2,397,584,381	sts	69.05	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	1,058,638,548	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90	%	236,581,491	-	sts	-	-	-	-	tdr	tdr
Rata-rata capaian kinerja (%)													100.00	229.79			#DIV/0!	54.78							
Predikat kinerja													ST	ST			#DIV/0!	R							
	Biro Tata Pemerintahan				5,917,766,933		3,114,097,148			Biro Tata Pemerintahan			10,158,803,595	tdr	tdr			10,158,803,595	26	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)					
	Usuran Pendukung				5,917,766,933		3,114,097,148			Usur Pendukung Urusan Pemerintahan			10,158,803,595	tdr	tdr			10,158,803,595	26	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)					
	Bidang Urusan Sekretariat Daerah				5,917,766,933		3,114,097,148			SEKRETARIAT DAERAH			10,158,803,595	tdr	tdr			10,158,803,595	26.42	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran								Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran							10,158,803,595	tdr	-	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)				
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	100	%	5,917,766,933	13	tersedianya 13 Tenaga Kooptak	3,114,097,148		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	1	Tahun	1,279,847,935	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	-	12,299,890	sts	0.96	sts	sts	3,126,397,038	sts	52.83
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	tahun	12,299,890	tdr	tdr	1	tahun	12,299,890	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	-	107,728,950	tdr	tdr	1	-	107,728,950	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	tahun	66,996,950	tdr	tdr	1	tahun	66,996,950	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	tahun	40,732,000	tdr	tdr	1	tahun	40,732,000	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	465,219,450	tdr	tdr	1	-	465,219,450	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	tahun	28,393,700	tdr	tdr	1	tahun	28,393,700	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	tahun	436,825,750	tdr	tdr	1	tahun	436,825,750	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penelitian dan Pengembangan															
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	745,746,469	tdr	tdr	1	-	745,746,469	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	tahun	140,866,469	tdr	tdr	1	tahun	140,866,469	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	tahun	604,880,000	tdr	tdr	1	tahun	604,880,000	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	
402/4 dan 9/410/412	Birokrasi yang bersih dan akuntabel - Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas - Meningkatkan hak-hak politik - Birokrasi yang efektif	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KWH/WKWH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Skor dan status laporan penyalangan pemerintahan Aceh Fasilitas pemanfaatan data kependudukan kepada SKPA Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KWH/WKWH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru								8,827,808,836	tdr	-	8,827,808,836	tdr	-	Sekretariat Daerah (Biro Tapem) Sekretariat Daerah (Biro Tapem) Sekretariat Daerah (Biro Tapem)	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi																Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020				Sandingan (Permendagri 90/2019)				Menjadi (Kepmendagri 050/2020)					Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)	
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			K		Rp.		K		Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
		Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota	teraksrahnya pemantauan terhadap penyusunan LPPK kab/kota serta terfasilitasinya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota	100	%	644,204,600			Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota	1	Laporan di 23 Kab/Kota	129,043,200	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	#VALUE!	Peserta	891,229,269	#VALUE!	690.64	sts	sts	891,229,269	sts	138.35	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)				
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan	Teraksrahnya sosialisasi penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Aceh	100	%	758,080,000	1	Laporan	217,799,600	23	Kab/Kota, 1 Laporan	191,360,000		-	-	-	sts	-	sts	217,799,600	sts	28.73	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)					
		Penyelesaian P3D Daerah Induk ke daerah pemekaran dan pengalihan P3D urusan pemerintahan konkuren	Terfasilitasinya Penyerahan P3D daerah induk ke daerah pemekaran dan pengalihan P3D urusan pemerintahan konkuren	100	%	2,298,822,000	4	Kabupa ben/ Kota/ Pemeka	1,171,840,213	4 dan 23	Kab/Kota Urusan	412,032,000		-	-	-	sts	-	sts	1,171,840,213	sts	50.98	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)					
		Pengutan Kerjasama Pemerintah Aceh	Terinvestiasinya, terfasilitasi dan terlaksana biwas terkait kerjasama Pemerintah Aceh	100	%	1,417,913,670	1	Laporan	399,716,763	100	Peserta	353,267,528	fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1	tahun	343,881,150	sts	97.34	sts	sts	743,597,913	sts	52.44	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)				
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Penataan Pengussanan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6	kasus	920,099,208	-	kasus	698,163,282										-	kasus	698,163,282	-	75.88	Sekretariat Daerah				
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil	20	%	605,212,470	-	%	204,351,300										-	%	204,351,300	-	33.77	Sekretariat Daerah				
			Pengadaan pembangunan gedung kantor						6,129,010,856												6,129,010,856	tdr	tdr	Sekretariat Daerah				
			Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman						228,747,113												228,747,113	tdr	tdr	Sekretariat Daerah				
			Persiapan pengaduan Tanah						366,837,684												366,837,684	tdr	tdr	Sekretariat Daerah				
			Rapat koordinasi bidang kependudukan						204,351,300												204,351,300	tdr	tdr	Sekretariat Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	#DIV/0!	19.47	#DIV/0!	29.47	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)							
Predikat kinerja																	#DIV/0!	SR	#DIV/0!	SR	Sekretariat Daerah (Biro Tapem)							
	BIRO HUKUM			0		0	BIRO HUKUM		10,445,453,213		BIRO HUKUM				9,219,425,369	tdr	88.26			9,219,425,369		#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)					
	Usuran Pendukung			0		0	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		10,445,453,213		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9,219,425,369	tdr	88.26			9,219,425,369		#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)					
	Bidang Urusan Sekretariat Daerah			0		0	SEKRETARIAT DAERAH ACEH		10,445,453,213		SEKRETARIAT DAERAH ACEH				9,219,425,369	tdr	88.26			9,219,425,369		#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lekip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL) dilain dengan Total	100	%	10,445,453,213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Tahun	9,219,425,369		88.26	1	Tahun	9,219,425,369	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah. Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi			100			%													tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	Terusunnya Renstra dan Renja	12	BULAN	968,675,900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Keg	54,930,350	sts	5.67	2	Keg	54,930,350	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyusunan laporan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			12	Terusunnya laporan Renstra dan Renja	12	bulan	30,953,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1	Keg	30,766,350	sts	99.39	1	Keg	30,766,350	sts	1.81	sts	sts	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			2	Tersedianya dokumen penyusunan program beserta penganggarannya	2	dokumen	937,722,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Keg	24,164,000	sts	2.58	1	Keg	24,164,000	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Administrasi Keuangan			12	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN serta Aceh lainnya	12	bulan	818,285,678	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Keg	815,460,671	sts	99.65	12	Keg	815,460,671	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1	Pegawai/tenaga Kontrak sebagai pegawai	1	tahun	758,441,743	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Keg	756,656,621	sts	99.76	1	Keg	756,656,621	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan			1	Terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawab an kinerja dan keuangan	1	tahun	21,168,180	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1	Keg	21,103,750	sts	99.70	1	Keg	21,103,750	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			12	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran	12	dokumen	19,518,180	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Keg	18,836,900	sts	96.51	1	Keg	18,836,900	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	19,157,575	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Keg	18,863,400	sts	98.46	1	Keg	18,863,400	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Administrasi Umum			12	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	12	BULAN	362,520,007	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Keg	159,703,929	sts	44.05	9	Keg	159,703,929	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1	tahun	38,397,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Keg	38,290,729	sts	99.72	1	Keg	38,290,729	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor			1	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1	tahun	133,849,720	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1	Keg	121,413,200	sts	90.71	1	Keg	121,413,200	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1	Terwujudnya pengadministrasian keuangan sebagai penyelenggaraan	1	tahun	18,156,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Keg	-	sts	-	1	Keg	-	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Jasa perlatan dan perlengkapan kantor			95	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	2	Unit	331,763,370	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Keg	110,601,688	tdr	tdr	9	Keg	110,601,688	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Aliat Tulis Kantor			1	Tersedianya ATK	1	tahun	38,916,787	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Keg	73,433,841	sts	188.69	1	Keg	73,433,841	sts	14.95	sts	sts	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
			Penyediaan Makanan dan Minuman			1	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat terbatas biro dan snack ruang	1	tahun	35,750,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1	Keg	-	sts	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			1	Tersedianya barang optikan dan pengandaan	1	tahun	27,850,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1	Keg	7,439,700	sts	26.71	1	Keg	7,439,700	tdr	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			

No	Sasaran	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi																Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020				Sandingan (Permendagri 90/2019)				Menjadi (Kepmendagri 050/2020)					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Ususan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan
1	2	3	4	5		6		7	8		9	10	11		12		13		14		15								
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat perlengkapan kebutuhan rumah dan administrasi biro	1	tahun	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Keg	29,728,147	sts	99.09	1	Keg	29,728,147	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4	unit	39,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	Tahun	39,558,000	sts	99.89	1	Tahun	39,558,000	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
									PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	-	-	221,789,359	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	-	-	221,789,359	sts	82.55	-	-	221,789,359	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
									Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN Biro Hukum yang difasilitasi mengikuti Dilkat	10	orang	28,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Tahun	-	sts	-	1	Tahun	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum		6		5,012,565,900	sts	sts	1,349,600,342	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Qanun	240,676,300	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Keg	221,789,359	sts	92.15	1	Keg	221,789,359	sts	4.42	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
									Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah	Sosialisasi qanun Aceh dan Produk Hukum lainnya	6	Qanun	8,027,295,328	Facilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	3	Tahun	3,667,189,496	tdr	45.68	3	Tahun	3,667,189,496	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	PP dan Perpres amahan UUPA		1	RPP	1,294,350,000			670,906,314	Terlaksananya evaluasi rancangan kab/kota Tersedianya Prolega Aceh dan Tersedianya Naskah akademik/ kajian akademik Tersedianya rekomendasi/ hasil konsultasi rancangan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat Tersesekainya Pergub/Kegub/Ingub/RPP/R Perpres	1	persen		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1	Tahun	2,944,630,969	sts	96.56	1	Tahun	2,944,630,969	sts	227.50	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dan pembahasan FGD, Naskah Akademik, Rancangan Qanun dan Qanun Aceh, Pergub, Kebugab, serta produk dan dokumen hukum lainnya		14	Qanun	12,181,741,698	11	Qanun	8,131,778,475	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	95		3,049,454,409	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	-	-	-	tdr	-	-	-	-	-	sts	-	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			
	Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya website JDI Hukum		1	Website	4,598,624,502	sts	sts	1,165,702,764	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1	website	336,079,128	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1	Website	333,839,927	100.00	99.33	1	Website	333,839,927	100.00	7.26	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota	Tersesekainya pembahasan produk hukum kabupaten/kota		150	rajan	1,527,938,321	sts	sts	689,848,544	Evaluasi Produk Hukum Daerah kabupaten/kota	150	Ra Qanun	402,840,919	Facilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1	Tahun	388,718,600	sts	96.49	1	Tahun	388,718,600	sts	25.44	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
														Facilitasi Bantuan Hukum	39	Perkara MoU/MoA	4,150,191,876	tdr	tdr	39	Perkara MoU/MoA/NP/HA	4,150,191,876	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Peningkatan pelayanan bantuan hukum	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah		18	gugatan	23,838,636,733	20	gugatan	17,075,215,013	Facilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	50	Kasus Perkara	3,325,593,381	Facilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	20	Perkara	3,240,256,164	sts	97.43	20	Perkara	3,240,256,164	sts	13.59	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
										Facilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	40	MoU/MoA/NP/HA	913,327,491	Facilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	23	MoU/MoA/NP/HA	909,935,712	sts	99.63	23	MoU/MoA/NP/HA	909,935,712	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)				
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		95	%	491,110,000	2	Unit	331,763,370															2	Unit	331,763,370	sts	67.55	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		95	%	1,696,924,800	sts	sts	32,621,965,912															sts	sts	32,621,965,912	sts	1,922.42	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan APPK	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Pengakuan dan Pemajuan HAM (PRSHAM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020		1	fgd	2,100,000,000	-	-	-															-	-	-	sts	-	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	PP dan Perpres amahan UUPA		1	RPP	1,294,350,000	1	RPP	670,906,314															1	RPP	670,906,314	100.00	51.83	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dan pembahasan FGD, Naskah Akademik, Rancangan Qanun dan Qanun Aceh, Pergub, Kebugab, serta produk dan dokumen hukum lainnya		14	Qanun	12,181,741,698	11	Qanun	8,131,778,475															11	Qanun	8,131,778,475	78.57	66.75	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum		6		5,012,565,900	sts	sts	1,349,600,342															sts	sts	1,349,600,342	sts	26.92	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserisan antar peraturan perundang-undangan daerah	Terlaksananya fasilitas/konsultasi kebijakan pemerintah kab/kota, penyusunan Perwali/Perpup dan Peraturan DPRK kab/kota		23	Qanun	5,894,852,230	23	Qanun	2,123,804,661															23	Qanun	2,123,804,661	100.00	36.03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Peningkatan pelayanan bantuan hukum	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah		18	gugatan	23,838,636,733	20	gugatan	17,075,215,013															20	gugatan	17,075,215,013	111.11	71.63	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya website JDI Hukum		1		4,598,624,502	sts	sts	1,165,702,764															sts	sts	1,165,702,764	sts	25.35	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
									Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol										Satuan	Vol	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Evaluasi dan pengujian produk hukum kabupaten/kota	Terselenggaranya pembahasan produk hukum kabupaten/kota	150	rajan	1,527,938,321	sts	sts	689,848,544					sts	sts	689,848,544	sts	45.15	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)					
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00	80.14			97.94	144.92	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)							
Predikat kinerja											ST	T			ST	ST	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)							
		Biro Administrasi Pembangunan		17,837,200,000		3,017,019,599			6,576,148,356		6,135,321,987	tdr	93.30		9,152,341,586	120.12	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)							
		Usuran Pendukung		17,837,200,000		3,017,019,599			6,576,148,356		6,135,321,987	tdr	93.30		9,152,341,586	120.12	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)							
		Bidang Urusan Sekretariat Daerah		17,837,200,000		3,017,019,599			6,576,148,356		6,135,321,987	tdr	93.30		9,152,341,586	120.12	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)							
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan	90	%	17,837,200,000	150	%	3,017,019,599		6,576,148,356		30	%	6,135,321,987	33.33	93.30	180	%	9,152,341,586	200.00	51.31	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan rencana umum pengadaan pemerintah dan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) SKPA	95	%	4,585,088,580	165	%	504,510,408		4,200,275,231		90	%	3,913,871,136	112.50	93.18	255	%	4,418,381,544	268.42	96.36	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pemilihan penyedia barang dan jasa Pemerintah Aceh	95	%	1,199,653,682	-	laporan	149,156,000		2,533,275,231		100	persen	2,402,884,418	100.00	94.85	sts	sts	4,246,075,514	sts	353.94	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan Pengendalian Penyelenggaraan Bidang Administrasi Pembangunan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95	%	2,328,180,136	150	%	212,804,040		317,000,000		1	laporan	246,667,742	100.00	77.81	sts	sts	459,471,789	sts	19.74	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Adm Kab/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	95	%	1,216,406,050	92	laporan	88,333,000		1,350,000,000		95	persen	1,264,318,976	sts	93.65	sts	sts	1,933,910,432	sts	158.99	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan rencana umum pengadaan pemerintah dan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) SKPA	95	%	2,620,476,000	185	%	632,025,769		2,375,873,125		80	persen	2,221,450,851	sts	93.50	280	%	2,853,476,620	294.74	108.89	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pemilihan penyedia barang dan jasa Pemerintah Aceh	95	%	2,479,864,000	185	%	1,211,165,327		1,010,000,000		100	persen	958,690,059	95.00	94.92	sts	sts	1,462,927,106	sts	58.99	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan kawasan permukiman dan pemanfaatan ruang daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95	%	1,250,000,000	30	%	15,925,048		1,365,873,125		1	laporan	1,262,760,792	-	92.45	sts	sts	1,894,786,561	sts	151.58	Sekretariat Daerah (Biro Adpem)	
		Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan otsus Aceh	Jumlah kegiatan pelaksanaan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	95	%	1,140,135,318	145	%	203,100,000				0	laporan										
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100	%	1,347,600,000	90	%	6,848,730,135									90	%	6,848,730,135	90.00	508.22	Sekretariat Daerah	
		Luas kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pemantauan Ruang	85	%	300,000,000	-	%	204,852,924									-	%	204,852,924	-	68.28	Sekretariat Daerah	
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Facilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	90	%	1,531,700,000	-	%	1,071,702,006									-	%	1,071,702,006	-	69.97	Sekretariat Daerah	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
									Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)														
				Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh	90	%	350,000,000	-	%	284,451,670	-	%	284,451,670	sts	81.27	Sekretariat Daerah									
		Pemantauan Pemaksimalan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya Data Hasil Pantauan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	61,362,000	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tersedianya Data Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	201,121,993	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Tersedianya Data Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Pemantauan Pemaksimalan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	tersedianya hasil pemantauan kondisi dan permasalahan pembangunan infrastruktur bidang kehutanan	-	-	-	-	-	228,488,173	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota	terkoordinasinya kegiatan pembinaan, pemanfaatan ruang dan kawasan	1	-	-	1	-	204,852,924	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota	Terlaksananya persamaan persepsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kab/ Kota	-	-	-	-	-	271,468,059	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Pembinaan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	laporan monitoring dan pembinaan pelaksanaan administrasi pembangunan	-	-	-	-	-	800,233,947	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pengembangan Industri Strategis	Peningkatan ketersediaan peraturan perundang-undangan	60	%	250,000,000	sts	sts	298,776,799	sts	sts	298,776,799	sts	119.51	Sekretariat Daerah									
		Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Industri Strategis	Sosialisasi percepatan pengembangan industri strategis	-	-	-	-	-	98,776,799	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan	Tersedianya data laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan dana APBD dan Tersedianya laporan fisik dan keuangan khususnya kegiatan Dekonsentrasi Tugas Perbantuan kab/kota dalam provinsi Aceh	-	-	-	-	-	284,451,670	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
		Pembinaan dan peningkatan SDM	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Sekolah-Sekolah Berasama (Boarding School) di Aceh	-	-	-	-	-	99,628,770	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Daerah									
Rata-rata capaian kinerja (%)										90.74					148.65	Sekretariat Daerah (Biro Admep)								
Predikat kinerja										ST					ST	Sekretariat Daerah (Biro Admep)								
		Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol														Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol								
		Usuran Pendukung				0			0							Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol								
		Bidang Urusan Sekretariat Daerah				0			0							Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah			0			3,055,114,852	75	%	25,784,315,119	75.00	843.97	sts	sts	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai							-	-	-			-	-	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi							-	-	-			-	-	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
		Administrasi Keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan KDH/WGHT	12	bulan	937,722,000				50	%	1,694,395,185	sts	180.69	sts	sts	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terperuhnya tambahan penghasilan lainnya bagi ASN	12	Bulan	937,722,000				3	Dok	1,694,395,185	sts	180.69	sts	sts	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol					
		Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	12	Bulan	2,072,392,852				75	%	2,215,790,681	sts	106.92	sts	sts	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat Kantor	1	dokumen	9,800,000				9	Bulan	2,215,790,681	sts	22,610.11	sts	sts	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol					

No	Sasaran	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		Nama Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Nama Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		K		K			K								
				K	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan					
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
	Pembinaan fasilitas pelayanan acara Pemerintah Aceh	Terlaksananya rapat koordinasi keprotokolan			sts	sts	5,329,556,753	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Acara Pimpinan Pemerintah Aceh dengan baik	2	dokumen	1,859,122,362	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	9	Bulan	1,701,867,900		sts	sts	7,031,424,653	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
	Pelayanan tamu Pemerintah Aceh				42	Kegiatan	894,063,472	Facilitasi Tamu	Terlayannya Tamu Pemerintah Aceh dengan baik	1	dokumen	1,297,325,000	Facilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	Dok	1,152,509,021		sts	sts	2,046,572,493	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
	Facilitasi pelayanan tamu Pemerintah Aceh	%ase Fasilitas terhadap pelayanan acara dan tamu KDH/WKDH			sts	sts	2,464,011,191											sts	sts	2,464,011,191	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
	Pelayanan tamu Pemerintah Aceh				42	Kegiatan	894,063,472											42	Kegiatan	894,063,472	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
	Pembinaan fasilitas pelayanan acara Pemerintah Aceh				12	Bulan	2,627,957,813											12	Bulan	2,627,957,813	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
								Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Hubungan Keprotokolan	1	dokumen	179,750,000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	-	Dok	-		-	Dok	-	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol						
																				-	-	tdr	tdr	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol					
Rata-rata capaian kinerja (%)											#DIV/0!	93.22	71.43	1,455.36															
Predikat kinerja											#DIV/0!	ST	S	ST															
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa						85,469,493,352	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				17,335,470,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa							12,614,424,116	tdr	72.77			13,669,537,242	56.11		Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
	Usuran Pendukung						85,469,493,352	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17,335,470,000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							12,614,424,116	tdr	72.77			13,669,537,242	56.11		Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
	Bidang Ususan Sekretariat Daerah						85,469,493,352	SEKRETARIAT DAERAH				17,335,470,000	SEKRETARIAT DAERAH							12,614,424,116	tdr	72.77			13,669,537,242	56.11		Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, dll. di...	100	%	6,888,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	Bulan	4,232,342,944	61.45	sts	sts	4,232,342,944	tdr	tdr							Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
								Administrasi Keuangan	Terbnyanya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan KDH/WKDH	12	bulan	6,888,000,000	Administrasi Keuangan	12	Bulan	4,232,342,944	100.00	61.45	12	Bulan	4,232,342,944	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
								Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan	2200	paket	6,888,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	4,232,342,944	sts	61.45	12	Bulan	4,232,342,944	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pemantauan Barisan	%tase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	95	%	15,535,720,000	35	%	1,055,113,126	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	%tase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	10,447,470,000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	-	%	8,382,081,172	80.23	35	%	9,437,194,298	36.85	60.75						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Bermediasi	%tase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa	95	%	69,933,773,352	41	%	27,615,758,988	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa	95	%	8,382,081,172	tdr	41	%	35,997,840,160	43.19	51.47	35,997,840,160	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang/jasa	90	%	7,645,079,560	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	6,675,397,573	sts	87.32	-	-	6,675,397,573	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
		koordinasi kerjasama antar lembaga bidang pengadaan barang/jasa	terlaksananya kerjasama antar lembaga bidang pengadaan barang/jasa	100	%	60,000,000	-	%	59,005,144									-	%	59,005,144	-	98.34						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
		Penyusunan dan Penumusan Pola Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha di Bidang Barisan dan Jasa	Jumlah peserta kemitraan Pemerintah dengan dunia usaha di bidang barisan dan jasa	60	orang	3,823,770,000	sts	sts	215,810,800									sts	sts	215,810,800	sts	5.64						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
		Pencapaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bermediasi	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan rencana umum pengadaan	95	%	3,240,534,000	sts	sts	825,258,310									sts	sts	825,258,310	sts	25.40						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
								Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah dengan Pelaku Usaha Jumlah Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang dituntaskan Jumlah Sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang	1	Pola Kemitraan	430,992,984	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1	Kemitraan	346,555,998	sts	1	Pola Kemitraan	346,555,998	tdr	tdr							Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
										22000	Paket			12,649	Paket		sts	12,649	Paket		tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
										2	Kegiatan			-	Kegiatan		-	-	Kegiatan		tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
		Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah paket pemilihan penyedia barang dan jasa Pemerintah Aceh	95	%	44,801,460,056	sts	sts	16,751,026,859									sts	sts	16,751,026,859	sts	37.39						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
		Peningkatan Layanan Administrasi dan Sarana Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pelaksanaan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	95	%	19,819,779,296	68	%	9,593,979,874									68	%	9,593,979,874	71.58	48.41						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
								Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan	2200	Paket	6,814,086,576	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,915	Paket	5,929,821,875	87.05	87.02	1,915	Paket	5,929,821,875	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
									Persentase pelayanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	85	%				74	%		87.05	74	%		tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95	%	2,063,000,000	sts	sts	445,493,945									sts	sts	445,493,945	sts	21.59						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	
								Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan	7	laporan	400,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	7	laporan	399,019,700	100.00	99.75	7	laporan	399,019,700	tdr	tdr						Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)
								Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1,768,530,440	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	1,207,475,553	tdr	68.28	-	-	1,207,475,553	tdr	tdr					Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Sandingan (Permendagri 90/2019)				Menjadi (Kepmendagri 050/2020)				K		K		K		K														
				Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		K		K		K												
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																		
		Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pemenuhan pengurusan layanan pengadaan secara elektronik di Provinsi dan Kabupaten/Kota	276	orang	4.908.090,000	115	orang	971,531,028						115	orang	971,531,028	41.67	19.79	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)												
		Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah peserta bimbingan teknis pengguna e-Purchasing, e-RFP dan e-Money	1100	orang	4,674,040,000	624	orang	348,836,120						624	orang	348,836,120	56.73	7.46	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)												
		Penyenggaraan Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah penyedia dan pengelola yang menggunakan dan memahami sistem pengadaan	300	penyedia	4,974,936,000	300	penyedia	399,901,676						300	penyedia	399,901,676	100.00	8.04	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)												
		Peningkatan Pengelolaan keamanan Informasi layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan elektronik	1	aplikasi	256,227,330								1	aplikasi	24,205,700	100.00	9.45	1	aplikasi	24,205,700	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)								
		Pengadaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang dikelola serta dikembangkan	4	aplikasi	3,611,505,000	1	aplikasi	565,669,352						1	aplikasi	565,669,352	25.00	15.66	1	aplikasi	565,669,352	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
		Manajemen Informasi	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi	300	Penyedia					68	Penyedia	22.67		68	Penyedia					tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
		Manajemen Informasi	Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna LPSE	150	Permasalahan	145,860,000				119	Permasalahan	79.33	129,443,503	88.75	119	Permasalahan	129,443,503	tdr	tdr	tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
		Manajemen Informasi	Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi	23	Kab/Kota					14	Kab/Kota	60.87			14	Kab/Kota				tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							1,033,860,000						-	Kegiatan	499,208,046	tdr	48.29	-	Kegiatan	499,208,046	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
		Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengadaan	Jumlah personal tenaga pengadaan barang/jasa yang terbiasa dan terampil	150	orang	4,531,501,272	sts	sts	341,809,740						sts	sts	341,809,740	sts	7.54	sts	sts	341,809,740	sts	7.54	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
		Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN lingkup Pemerintah Aceh yang dilakukan Bimbingan teknis, dsj, Certificasi, Berstandar	480	orang	3,746,494,728	-	orang	303,499,100						-	orang	303,499,100	-	8.10	-	orang	303,499,100	-	8.10	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
		Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan Anggaran	Jumlah pembinaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan keuangan	63	kasus	3,373,954,000	1	kasus	134,988,342						1	kasus	134,988,342	1.59	4.00	1	kasus	134,988,342	1.59	4.00	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
		Pengembangan Kebijakan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Tertindakannya proses penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	4	Ran PerGub	3,162,837,790	1	Ran PerGub	148,641,280						1	Ran PerGub	148,641,280	25.00	4.70	1	Ran PerGub	148,641,280	25.00	4.70	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)							
			Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaksanaan training/sosialisasi aplikasi sistem pendukung pengadaan	12	Kegiatan				6	Kegiatan	499,208,046	50.00	48.29	6	Kegiatan				tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
				Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	4	Kasus				2	Kasus	50.00			2	Kasus				tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
				Jumlah penyelesaian pengadaan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	30	Pengadilan sanggah				11	Pengadilan sanggah	36.67			11	Pengadilan sanggah				tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
				Jumlah kegiatan pembinaan kepada fungsional PBI	3	Angkatan				3	Angkatan	100.00			3	Angkatan				tdr			Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)									
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	98	%	21,396,468,790	25	%	2,197,396,512						25	%	2,197,396,512	25.51	10.27				25.51	10.27	Sekretariat Daerah							
Rata-rata capaian kinerja (%)													72.15	70.11	49.14	45.00	Sekretariat Daerah (Biro Barang dan Jasa)															
Predikat kinerja													S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		Biro keistimewaan dan kesra			36,573,744,020		18,438,662,383		7,947,669,386	Biro keistimewaan dan kesra		11,503,109,698	tdr	144.74			32,941,404,586		135				135		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
		Usuran Pendukung			36,573,744,020		18,438,662,383		7,947,669,386	Usur Pendukung urusan Pemerintahan		11,503,109,698	tdr	144.74			32,941,404,586		135				135		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
		Bidang Usuran Sekretariat Daerah			36,573,744,020		18,438,662,383		7,947,669,386	Sekretariat Daerah		11,503,109,698	tdr	144.74			32,941,404,586		135.16				135.16		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	bln	1,337,831,952																		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	1	Dok	518,544,020																		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Barang Tv Led 42 inch	3	unit	1,572,442,852																		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
			Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur	Tersedianya pelayanan kesehatan Aparatur dan keluarga di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh	565	Orang	858,404,980																		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	156,873,977,762	63	%	71,677,596,224															Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya aset dan sarana perkantoran	sts	sts	614,372,970																		Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi																Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2021 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020				Sandangan (Permendagri 90/2019)				Menjadi (Kepmendagri 050/2020)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021							
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15									
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	%tase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	50	%	7,815,616,438	sts	sts	2,999,632,505	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		6,162,042,379	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		3	Kegiatan	7,563,955,374	tdr	122.75	sts	sts	10,563,587,879	sts	135.16	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)								
	Hengatnya tanaman budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	%tase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	100	%	6,435,427,950	67	%	2,598,245,735						-	-		tdr		sts	sts		sts	-	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)								
										4.01.02.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					tdr	tdr							Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		11	Kegiatan	2,931,309,224	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		16	Kegiatan	1,982,351,499	145.45	67.63	sts	sts	1,982,351,499	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		3	Kegiatan	1,099,948,170	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		17	Kegiatan	1,644,925,550			sts	sts	1,644,925,550	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Kordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		6	Kegiatan	474,875,639	Kordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahrag, Kebudayaan, dan Pariwisata		9	Kegiatan	1,370,754,410	150.00	288.66	sts	sts	2,240,928,151	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Kordinasi pelayanan dan pengulangan masalah kesehatan		172	Orang	1,943,809,864	Kordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		10	Kegiatan	621,312,600	166.67	tdr	sts	sts	2,565,122,464	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Pembinaan kesejahteraan sosial		sts	sts	37,627,000	Kordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		6	Kegiatan	-	100.00	tdr	sts	sts	37,627,000	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak		sts	sts	148,021,900	Kordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		6	Kegiatan	598,574,395	300.00	121.03	sts	sts	746,596,295	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan		4	Kegiatan	215,700,683	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		8	Kegiatan	851,667,500			sts	sts	851,667,500	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Kordinasi dan Sinkronisasi pembangunan pendidikan/pembinaan pemuda/olahrag		9	Kgt	622,483,451	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		5	Kegiatan	494,369,420			sts	sts	1,116,852,871	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Pembinaan lembaga pendidikan		sts	sts	527,253,330	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					sts	sts	527,253,330	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)								
										Kordinasi dan Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat		3	kgt	1,448,508,954	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					3	kgt	1,448,508,954	tdr	tdr	1,448,508,954	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
										Rata-rata capaian kinerja (%)									172.42	159.10			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)								
										Predikat kinerja									ST	ST			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)								
	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis Islami	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan Tim TPHD	98	%	36,573,744,020	72	%	18,438,662,383	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		1,785,627,007	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		63	Kegiatan	3,939,154,324	220.60	sts	sts	22,377,816,707	sts	61.19	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)									
										Pelaksanaan Administrasi Umum		1,785,627,007	Pelaksanaan Administrasi Umum					tdr								Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)							
										Pembinaan dan Peningkatan Sarana Masjid		3	Dok	448,442,180	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Masjid												Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Kordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan		105	Orang	6,124,020,852	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12	Bulan	895,370,000			sts	sts	8,084,603,602	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						
										Peningkatan Syiar Ramadhan		69	Kab/kota	5,587,795,172	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	Bulan	271,573,630			sts	sts	6,839,928,251	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)						

No	Sasaran	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s/d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		Nama Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		K	Rp.	K		K	Rp.	K		K	Rp.						
				K		Rp.			K				Rp.				K				Rp.				K		Rp.			
				Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol				Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol
1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15							
	Peningkatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam	Terselenggaranya pelaksanaan Peringatan Hari - Hari Besar Islam (PHBI)				sts	sts	1,526,193,490	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan	12	Bulan	42,176,097	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5	Bulan	30,627,900			sts	sts	1,556,821,390	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan	Terselenggaranya Peribadatan dan Pengajian di Mushalla At- Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligo Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligo Wakil Gubernur Aceh				9	Mushalla	2,159,420,839	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur	12	Bulan	167,776,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	Bulan	127,695,200			sts	sts	2,287,116,039	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	peningkatan kegiatan keagamaan	terkoordinirnya hari-hari besar Islam pemerintah Aceh				sts	sts	956,636,723	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya aset dan sarana perkantoran	12	Bulan	196,531,280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	378,020,395			sts	sts	1,334,657,118	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid	Terlaksananya Rapat Koordinasi Imam Mesjid				3	Kgt	349,223,607	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya aset dan sarana perkantoran	12	Bulan	212,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	12	Bulan	190,095,000			sts	sts	539,318,607	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama					-	-	-															tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran Ulama					1	-	1,286,929,520												1	-	1,286,929,520	tdr	tdr	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Hengsatnya tatanan Ekonomi Swastah.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Anama	Peningkatan kualitas pendidikan Anama	450	%	7,529,460,000	-	%	4,260,888,658											-	%	4,260,888,658	sts	56.59	Sekretariat Daerah					
	Peningkatan sumber daya manusia dan peran ulama / silaturahmi Ulama - Ulama	Terlaksananya rapat koordinasi sertifikasi halal, terbinaanya hubungan baik ulama dan ulama melalui silaturahmi Dapat terbinaanya hubungan Ulama dengan Ulama				1	-	4,161,259,888												1	-	4,161,259,888	tdr	tdr	Sekretariat Daerah					
Rata-rata capaian kinerja (%)															#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
Predikat kinerja															#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah (Biro keistimewaan dan kesra)					
	Biro Umum					#VALUE!		162,036,556,863	Biro Umum					Biro Umum			151,648,559,891	tdr	tdr			313,685,116,754	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)						
	Usuran Pendukung					#VALUE!		162,036,556,863	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung urusan Pemerintahan			151,648,559,891	tdr	tdr			313,685,116,754	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)						
	Bidang Usuran Sekretariat Daerah					#VALUE!		162,036,556,863	Sekretariat Daerah					Sekretariat Daerah			151,648,559,891	tdr	tdr			313,685,116,754	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)						
						60	Bulan	#VALUE!	36	Bulan	162,036,556,863			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	12	bulan	212,643,507,110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6	Bulan	151,648,559,891	50.00	71.32	42	Bulan	313,685,116,754	70.00	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	100	%	#VALUE!	###	%	47,215,309,936												#VALUE!	%	47,215,309,936	#VALUE!	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur	100	%	#VALUE!	###	%	97,534,396,408												#VALUE!	%	97,534,396,408	#VALUE!	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai	100	%	5.240.907.583	###	%	4,776,386,700												#VALUE!	%	4,776,386,700	#VALUE!	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100	%	284.268.938	###	%	96,306,000												#VALUE!	%	96,306,000	#VALUE!	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)					
	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas laporan	100	%	300,000,000	32.23	%	96,702,000													32	%	96,702,000	32.23	32.23	Sekretariat Daerah (Biro Umum)				
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepada KDH/WKDH	100	%	49,365,597,555	24.95	%	12,317,455,819													25	%	12,317,455,819	sts	24.95	Sekretariat Daerah (Biro Umum)				
									Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		12	bulan	400,000,000	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah												Sekretariat Daerah (Biro Umum)				
									Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	12	bulan	400,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112	-	799,868,084						112	Bulan	1,199,868,084	311.06	99.99	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
									Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		100	%	2,037,965,000													Sekretariat Daerah (Biro Umum)				
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut/kelengkapannya	Ketersediaannya pakaian dan atribut/kelengkapannya	7550	stel	5.240.907.583	4,770	stel	4,776,386,700	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Aparatur	500	stel	1,872,965,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	236	stel	2,126,648,300					5,006	stel	6,903,035,000	66.31	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)			
	Pendidikan dan pelatihan formal	Ketersediaannya biaya kontribusi	210	org	284.268.938	22	org	96,306,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Keluutserbaan Bimtek / balatihan	37	org	165,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	org	40,500,000					42	org	136,806,000	20.23	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)			
									Administrasi Umum Perangkat daerah		100	%	11,317,457,855													Sekretariat Daerah (Biro Umum)				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaannya alat listrik dan elektronik kebutuhan kantor serta RD Jabatan	94	%	5.847.000.000	###	%	2,272,362,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	94	%	1,331,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	174	%	2,257,023,000					#VALUE!	%	4,529,385,100	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)			

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K		Rp.	K		Rp.	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		K		Rp.	K		Rp.	K			Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Vol	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	Vol		Satuan	K	Rp.		
																										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Ketersediaannya perlengkapan rumah dinas jabatan	90	%	8.275.800,000	###	%	3,038,197,097	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	90	%	5,609,300,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164	%	9,232,275,331	#VALUE!	%	12,270,472,428	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ketersediaannya perlengkapan gedung kantor	90	%	2.850.000.000	###	%	1,402,088,766	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	90	%	520,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97	%	1,368,732,439	97	%	2,770,821,205	107.26	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Penyediaan bahan logistik kantor	Ketersediaannya kebutuhan logistik Meuligoe dan RD Jabatan	92	%	15.078.000.000	###	%	5,490,928,333	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	92	%	2,820,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135	%	6,340,473,906	#VALUE!	%	13,320,910,139	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaannya alat tulis kantor	90	%	3,452,000,000	43.15	%	1,489,507,900																Sekretariat Daerah (Biro Umum)	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan	90	%	2,329,500,000	37.13	%	865,000,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan untuk Kelancaran Kinerja Pegawai	90	%	287,157,855	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	161	%	419,308,000	122.32	%	1,284,308,400	135.91	55.13	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Rapat-rgat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaannya koordinasi serta konsultasi dalam dan luar daerah	90	%	3.350.000.000	###	%	2,787,597,665	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya pelayanan oleh konsultasi ke Luar Daerah	90	%	750,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168	%	1,480,907,785	#VALUE!	%	4,268,505,450	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pem			100	%	15,401,028,000						50	%	11,863,081,100	50.00	77.03			11,863,081,100				Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Ketersediaannya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	514	unit	19,536,365,691	75	unit	13,086,943,788	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat	514	unit	10,420,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	2,266,537,400	2.01	21.75	185	unit	18,701,232,688	36.06	81.72	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Ketersediaannya kebutuhan meubeler	92	%	6.320.000.000	###	%	2,570,823,000	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubiler kantor dan Rumah Dinas	92	%	3,352,000,000	Pengadaan Mebel	145	%	7,023,814,700	157.97	209.54	#VALUE!	%	9,594,637,700	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Ketersediaannya peralatan rumah jabatan/dinas	92	%	5,282,363,000	60	%	3,653,335,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	1,629,028,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181	%	2,572,729,000	181.32	157.93	241	%	6,226,064,000	262.30	117.87	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Ketersediaannya peralatan gedung kantor	90	%	9,721,500,000	###	%	9,274,000,308																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Ketersediaannya perawatan taman, halaman serta lingkungan kantor dan rumah dinas jabatan	90	%	60	%	3,847,158,000																		Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Penyediaan bahan perkantoran	Ketersediaannya biaya serta bahan publikasi	92	%	2,304,000,000	###	%	1,228,512,500																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah			100	%	19,042,670,000						50	%	27,815,376,652	50.00	146.07	50	%	27,815,376,652	50.00	84.08		Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Ketersediaannya biaya penunjang operasional perkantoran	88	%	111,786,106,418	###	%	33,081,401,038	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	88	%	19,042,670,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	#VALUE!	%	27,815,376,652	tdr	146.07	#VALUE!	%	60,993,479,690	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan lntexar realisasi kinerja esen		100	%	150,000,000	32.50	%	48,750,000																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Penyediaan laporan capaian kinerja dan lntexar realisasi kinerja esen		100	%	150,000,000	31.97	%	47,952,000																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pe			100	%	48,655,297,700						50	%	35,297,680,217	50.00	72.55	50	%	35,297,680,217	55.56	200.88		Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ketersediaannya jasa, OM, suku cadang, aksesoris dan perlengkapan/keengkapan kendaraan dinas operasional	88	%	7,072,933,359	###	%	26,409,754,758	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rasya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	88	%	500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75	%	12,495,903,181	85.23	2,499.18	159.35	%	38,905,657,939	181.08	550.06	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Ketersediaannya perawatan bangunan serta halaman rumah dinas jabatan	88	%	13,172,100,000	###	%	5,661,002,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	%	44,963,208,713	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75	%	19,146,274,616	75.00	42.58	#VALUE!	%	24,807,276,616	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ketersediaannya perawatan gedung serta halaman kantor	88	%	14,616,022,362	###	%	23,612,064,181																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Ketersediaannya perawatan peralatan rumah dinas jabatan	90	%	3,925,000,000	###	%	1,446,792,390	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	3,192,088,987	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75	%	3,655,502,420	75.00	114.52	#VALUE!	%	5,102,294,810	tdr	#VALUE!	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Ketersediaannya perawatan peralatan kantor	90	%	6,601,000,000	53.51	%	3,532,237,120																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Fasilitas Keprotokolan			100	%	9,667,335,000						50	%	5,569,022,387	50.00	57.61			5,569,022,387					Sekretariat Daerah (Biro Umum)	
			Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Ketersediaannya Koordinasi, Konsultasi dan Investasi dalam Daerah, Luar Daerah serta Luar	100	%	49,365,597,555	24.84	%	12,263,455,819	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Tertersedianya Acara Pimpinan Pemerintah Aceh	100	%	9,367,335,000	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	75	%	5,316,922,387	75.00	56.76	81.21	%	17,580,378,206	81.21	35.61	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
			Peningkatan pelayanan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah						54,000,000																	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	
			Fasilitas Kunjungan Tamu			100	%	300,000,000						50	%	252,100,000	50.00	84.03	50.00	%	252,100,000	50.00	84.03		Sekretariat Daerah (Biro Umum)		
			Rata-rata capaian kinerja (%)											60.10	242.00						113.08	#VALUE!		Sekretariat Daerah (Biro Umum)			
			Predikat kinerja											R	ST						ST	#VALUE!		Sekretariat Daerah (Biro Umum)			
			Sekretariat DPRA			159,128,519,325			111,118,426,648	Sekretariat DPRA					#VALUE!	196,572,073,018	tdr	119.52			433,739,522,350	73		Sekretariat DPRA			
			Usuran Pendukung			159,128,519,325			111,118,426,648	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					#VALUE!	196,572,073,018	tdr	119.52			433,739,522,350	73		Sekretariat DPRA			
			Bidang Usuran Sekretariat Daerah			159,128,519,325			111,118,426,648	Sekretariat DPRD					#VALUE!	196,572,073,018	tdr	119.52			433,739,522,350	99.01	73.24	Sekretariat DPRA			
			Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berdampak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Burematika	100	%	108,049,812,401	87	%	63,088,433,381	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	100	%	#VALUE!	126,246,714,337	#VALUE!	81	%	80.84	186.29	sts	sts	237,365,140,985	tdr	149.17	Sekretariat DPRA
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	40,159,692,019	111	%	42,077,825,430	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	76	75.96	%	93	%	42,077,825,430	93.34	104.78			Sekretariat DPRA		

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			
									Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol												Satuan	Vol	Satuan
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	1,142,402,815	83	%	286,564,038	Persentase Anggota DPRPA yang dapat	100	%						sts	sts	286,564,038	sts	25.08	Sekretariat DPRPA			
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Diaplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan	100	%	9,176,612,090	113	%	5,492,839,347	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam	100	%						sts	sts	5,492,839,347	sts	59.86	Sekretariat DPRPA			
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%	600,000,000	81	%	172,764,452	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	%						tdr	tdr	172,764,452	tdr	28.79	Sekretariat DPRPA			
										Pencapaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	630,827,469	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	#VALUE!	%	388,557,889	tdr	61.59	#VALUE!	%	388,557,889	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7	Dokumen	442,854,804	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokume	242,408,339	100.00	54.74	7	Dokumen	242,408,339	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	8	Dokumen	174,576,665	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9	Dokume	133,873,600	112.50	76.68	9	Dokumen	133,873,600	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
											3	Dokumen	13,396,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD Tahun SKPD	3	Dokume	12,275,950	100.00	91.64	3	Dokumen	12,275,950	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Administrasi Keuangan	100	%	31,788,636,417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#VALUE!	%	29,730,613,933	tdr	93.53	#VALUE!	%	29,730,613,933	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	19,932,226,118	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	18,247,945,376	100.00	91.55	12	Bulan	18,247,945,376	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	11,585,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	11,244,210,000	100.00	97.06	12	Bulan	11,244,210,000	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12	Bulan	96,850,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	181,798,275	100.00	187.71	12	Bulan	181,798,275	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	Dokumen	102,680,050	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokume	29,998,632	100.00	29.22	12	Dokumen	29,998,632	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Kegiatan	62,532,250	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Kegiatan	17,427,200	100.00	27.87	5	Kegiatan	17,427,200	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD								tdr	tdr	-	-	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA		
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	9,347,999	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokume	9,234,450	100.00	98.79	5	Dokumen	16,740,600	sts	15.51	Sekretariat DPRPA	
										Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	Dok.	107,947,500													
										Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	24	Dok.	272,682,100													
										Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	4	Dokum	7,506,150													
										Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun tepat waktu	10	Dokum	165,258,302													
										Persentase Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100	%	1,101,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	82	%	622,496,831	82.05	56.54	82	%	622,496,831	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Jangka Waktu Jasa Penjurusan Paket	12	Bulan			9	Bulan	#REF!	75.00	#REF!	9	Bulan	#REF!	tdr	#REF!	Sekretariat DPRPA	
										Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya	50	Orang	1,101,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58	Orang	289,963,856	116.00	tdr	58	Orang	289,963,856	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Jumlah Material yang Tersedia	3025	Lembar			1,700	Lembar	-	56.20	tdr	1,700	Lembar	-	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Administrasi Umum	100	%	2,788,748,641	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109	%	1,736,067,680	109.10	62.25	109	%	1,736,067,680	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan	525,375,690	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	146,644,564	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00	90.29	48	Bulan	420,081,200	80.00	79.96	Sekretariat DPRPA
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bulan	1,517,058,955	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	982,308,550	100.00	55.45	48	Bulan	1,807,070,250	80.00	119.12	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan makanan dan minuman	60	Bulan	10,191,550,200	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan		100.00		48	Bulan	5,462,662,000	80.00	53.60	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	60	Bulan	4,572,310,375	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12	Bulan	137,863,150	100.00	49.65	48	Bulan	2,488,314,116	80.00	54.42	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	1,876,190,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	359,817,500	100.00	99.99	48	Bulan	1,302,367,800	80.00	69.42	Sekretariat DPRPA	
											7	Media								sts	sts				Sekretariat DPRPA	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186	Orang	2,330,063,620	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25	Orang	123,676,780	147.06	53.06	71	Orang	1,442,763,413	38.17	61.92	Sekretariat DPRPA	
										Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100	%	8,776,428,302	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86	%	10,092,062,494	85.58	114.99	86	%	10,092,062,494	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang	14	Kegiatan			13	Kegiatan	92.86	114.99	13	Kegiatan		tdr	tdr	Sekretariat DPRPA		
										Jumlah kegiatan pengadaan Belanja Modal yang	53	Kegiatan			58	Kegiatan	109.43		58	Kegiatan		tdr		Sekretariat DPRPA		
										Jumlah kegiatan konstruksi yang Terlaksana	15	Kegiatan			6	Kegiatan	40.00		6	Kegiatan		tdr		Sekretariat DPRPA		
										Pemeliharaan yang Terlaksana	1	Kegiatan			1	Kegiatan	100.00		1	Kegiatan		tdr		Sekretariat DPRPA		
										Persentase Jasa Penunjang Urusan Sekretariat DPRPA	100	%	5,865,353,420	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	%	4,826,235,082	87.54	82.28	88	%	4,826,235,082	tdr	tdr	Sekretariat DPRPA	
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	20,375,033,487	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	4,059,432,240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	86.93	48	Bulan	14,089,523,962	80.00	69.15	Sekretariat DPRPA

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		K	Rp.	K		K	Rp.	K		K	Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol	Satuan			Vol				Satuan	Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	702,904,500	sts	sts	133,025,553	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	326,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Bulan	-	-	-	sts	sts	133,025,553	sts	18.93	Sekretariat DPRA	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan medical check up	81	Orang	1,652,400,000	146	Org	370,745,200	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Bantuan/kegiatan/penyediaan Barang dan Jasa Yang Terlaksana	7	Kegiatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Kegiatan	71.43	87.71	sts	sts		sts	100.96	Sekretariat DPRA		
									Penyediaan Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Yang Terlaksana	Jumlah Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Yang Terlaksana	2	Kegiatan	1,479,421,180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Kegiatan	1,297,548,650	50.00	sts	sts	1,668,293,850	sts		Sekretariat DPRA		
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	100.00		12	Bulan		tdr		Sekretariat DPRA		
									Persentase Jasa Penunjang Usuran Sekretariat DPRA	100	%	12,890,570,212	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	102	%	9,244,150,311	102.41	71.71	102	%	9,244,150,311	tdr	tdr	Sekretariat DPRA		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRA yang terpelihara	4	Unit	1,302,200,000	15	Unit	539,442,563	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRA yang Terpelihara	4	Unit	368,943,080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas	4	Unit	300,133,982	100.00	81.35	19	Unit	839,576,545	sts	64.47	Sekretariat DPRA	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional Kantor yang terpelihara	77	Unit	12,087,676,000	214	Unit	4,810,491,145	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	79	Unit	2,810,785,420	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas	79	Unit	1,653,539,715	100.00	58.83	293	Unit	6,464,030,860	380.52	53.48	Sekretariat DPRA	
									Pemeliharaan Yang Terlaksana		15	Kegiatan	9,710,841,712	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	sts	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat DPRA		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	tahun	2,140,910,000	24	Bulan	976,328,590											24	Bulan	976,328,590	sts	45.60	Sekretariat DPRA		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1	tahun	2,796,674,950	sts	sts	1,895,936,750											sts	sts	1,895,936,750	sts	67.79	Sekretariat DPRA		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas DPRA dan Rumah Jabatan Ketua DPRA yang tersedia	82	Unit	5,658,795,107	407	Unit	3,825,286,167											407	Unit	3,825,286,167	496.34	67.60	Sekretariat DPRA		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	22	Keg	1,070,500,000	sts	sts	831,189,231											sts	sts	831,189,231	sts	77.64	Sekretariat DPRA		
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil Jabatan Pimpinan DPRA yang tersedia	4	Unit	2,600,000,000	-	-	-											-	-	-	sts	-	Sekretariat DPRA		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	9	Unit	2,680,000,000	8	Unit	6,758,890,960											8	Unit	6,758,890,960	88.89	252.20	Sekretariat DPRA		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terlaksana	36	Keg	15,011,736,381	sts	sts	12,771,592,635											sts	sts	12,771,592,635	sts	85.08	Sekretariat DPRA		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana	36	Keg	4,440,436,359	sts	sts	8,935,335,785											sts	sts	8,935,335,785	sts	201.23	Sekretariat DPRA		
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	2	Unit	5,777,269,649	5	Unit	733,331,604											5	Unit	733,331,604	250.00	12.69	Sekretariat DPRA		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	60	Bulan	181,800,000	36	Bulan	74,109,640											36	Bulan	74,109,640	60.00	40.76	Sekretariat DPRA		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	60	Bulan	7,020,000,000	24	Bulan	3,373,288,000											24	Bulan	3,373,288,000	40.00	48.05	Sekretariat DPRA		
	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	Jangka waktu penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi	60	Bulan	8,578,020,000	36	Bulan	5,476,971,009											36	Bulan	5,476,971,009	60.00	63.85	Sekretariat DPRA		
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jangka waktu pembayaran honorarium tim/juri/tenaga ahli dan pegawai Non PNS	60	Bulan	63,447,418,453	36	Bulan	32,283,010,550											36	Bulan	32,283,010,550	60.00	50.88	Sekretariat DPRA		
									Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRA yang Terlaksana	100	%	3,927,962,884	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76	%	2,276,254,076	75.69	57.95	76	%	2,276,254,076	tdr	tdr	Sekretariat DPRA	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRA, PNS dan Non PNS Set. DPRA yang memperoleh pakaian dinas dan atributnya	597	Orang	8,975,500,190	sts	sts	5,492,839,347	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang Tersedia	692	Stel	402,557,450	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	568	Stel	381,108,500	82.08	94.67	sts	sts	5,873,947,847	sts	65.44	Sekretariat DPRA	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS Sekretariat DPRA yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	157	Orang	1,110,206,165	27	Org	160,704,056	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang terlaksana	2	Kegiatan	1,279,534,754	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	Kegiatan	211,401,600	100.00	16.52	sts	sts	372,105,656	sts	33.52	Sekretariat DPRA	
									Jumlah Pegawai Sekretariat DPRA yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		284	Orang			31	Orang	-	10.92	tdr	sts	sts	-	tdr	tdr	Sekretariat DPRA	
									Jangka waktu kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem kepegawaian		12	Bulan	538,280,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bulan	492,888,346	100.00	91.57	12	Bulan	492,888,346	tdr	tdr	Sekretariat DPRA	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah (Qanun) yang terlaksana	15	Keg	2,088,223,672	8	Kali	1,026,494,850	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yaitu Terkait dengan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	10	Kegiatan	1,707,590,680	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Kegiatan	1,190,855,630	100.00	69.74	sts	sts	2,217,350,480	sts	106.18	Sekretariat DPRA	
	Pengembangan SDM Aparatur	Jumlah PNS dan non PNS Sekretariat DPRA yang mengikuti Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Negeri	167	Orang	1,310,762,000	9	Orang	125,859,982											tdr	tdr	9	Orang	125,859,982	5.39	9.60	Sekretariat DPRA
	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	%tase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya	100	%	4,349,034,410	82	%	370,745,200	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya	100	%	54,025,740,158		-	-	67,330,276,041	sts	124.63	sts	sts	67,701,021,241	sts	1,556.69	Sekretariat DPRA
									Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terealisasi	100	%	8,005,593,703	Layanan Administrasi DPRD	106	%	15,391,418,184	106.12	192.26	106	%	15,391,418,184	tdr	tdr	Sekretariat DPRA	
									Jangka Waktu Jasa Pengiriman Paket		12	Bulan			-	-	tdr		-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat DPRA		

No	Sasaran	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi													Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Sandiangan (Permendagri 90/2019)			Menjadi (Kepmendagri 650/2020)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)					
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K	Rp.	K	Rp.		K		K	Rp.				
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Tolak Ukur	Target		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensi	50	Orang												tdr		Sekretariat DPR		
							Jumlah Materi yang Tersedia	3025	Lembar												tdr		Sekretariat DPR		
							Facilitasi Rapat DPRD	30	Kegiatan	1,259,047,000				28	Kegiatan	857,114,470	93.33	68.08	28	Kegiatan	857,114,470	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Jangka Waktu Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	12	Bulan	150,480,000				12	Bulan	72,786,000	100.00	48.37	12	Bulan	72,786,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	21	Kegiatan					27	Kegiatan		128.57	219.24	27	Kegiatan		tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlaksana	18	Kegiatan	6,596,066,703				12	Kegiatan	14,461,517,714	sts	tdr	12	-	14,461,517,714	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Jumlah Kegiatan Pengadaan Belanja Modal yang Terlaksana	10	Kegiatan					18	Kegiatan		sts	tdr	18	-		tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	46,020,146,455				58	%	51,938,857,857	57.92	112.86	58	%	51,938,857,857	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	Bulan	44,067,463,075				12	Bulan	50,147,422,958	100.00	113.80	12	Bulan	50,147,422,958	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	10	Buah	1,720,500,000				324	Buah	1,349,557,899	3,240.00	78.44	324	Buah	2,699,115,798	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang Tersedia	405	Stel					81	Stel		20.00		81	Stel		tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	81	Orang	232,183,380				81	Orang	441,877,000	100.00	190.31	sts	sts	812,622,200	sts	49.18	Sekretariat DPR	
							Rata-rata capaian kinerja (%)									156.22	81.87				122.46	67.70	Sekretariat DPR		
							Predikat kinerja									ST	T				ST	S	Sekretariat DPR		
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	%	96,704,421,690				96	%	70,325,358,681	96.30	72.72	120	%	196,374,381,365	119.97	82.25	Sekretariat DPR	
							Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	%	19,038,263,698				82	%	12,402,387,192	82.03	65.14	82	%	12,402,387,192	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan Rancangan Perda	13	Kegiatan	18,538,263,698				18	Kegiatan	11,827,387,192	138.46	63.80	sts	sts	59,995,678,831	tdr	67.45	Sekretariat DPR	
							Pembahasan Rancangan Perda	13	Kegiatan				3	Kegiatan		23.08									Sekretariat DPR
							Facilitasi penyusunan naskah akademik yang difasilitasi	5	Kegiatan	500,000,000				5	Kegiatan	575,000,000	100.00	115.00	5	Kegiatan	575,000,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	8,858,655,819				67	%	1,231,399,234	66.67	13.90	67	%	1,231,399,234	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan KUA dan PPAS	2	Kegiatan	1,164,163,200				2	Kegiatan	38,147,350	100.00	3.28	2	Kegiatan	38,147,350	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2	Kegiatan	1,245,945,797				-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPR	
							Pembahasan APBD	1	Kegiatan	2,968,783,461				1	Kegiatan	845,430,084	100.00	28.48	1	Kegiatan	845,430,084	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan APBD Perubahan	1	Kegiatan	2,968,783,461				-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPR	
							Pembahasan Laporan Semester	1	Kegiatan	110,979,900				1	Kegiatan	110,703,300	100.00	99.75	1	Kegiatan	110,703,300	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Kegiatan	400,000,000				1	Kegiatan	237,118,500	100.00	59.28	1	Kegiatan	237,118,500	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	8,299,751,850				100	%	9,638,788,298	100.01	116.13	100	%	9,638,788,298	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	Kali	881,418,810				3	Kali	1,127,303,071	100.00	127.90	3	Kali	1,127,303,071	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	Kali	881,418,810				3	Kali	1,191,798,809	100.00	135.21	3	Kali	1,191,798,809	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	Kali	881,418,810				3	Kali	940,887,387	100.00	106.75	3	Kali	940,887,387	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	3	Kali	881,418,810				3	Kali	1,092,268,624	100.00	123.92	3	Kali	1,092,268,624	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	Kali	881,418,810				3	Kali	885,416,500	100.00	100.45	3	Kali	885,416,500	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Kali	1,944,335,600				1	Kali	3,072,517,882	100.00	158.02	1	Kali	3,072,517,882	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Kali	1,948,322,200				1	Kali	1,328,596,025	100.00	68.19	1	Kali	1,328,596,025	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	24,996,019,358				92	%	9,092,278,113	91.71	36.37	92	%	9,092,278,113	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Bimbingan Teknis DPRD	81	Orang	1,810,279,996				24	Orang	1,172,303,935	29.63	64.76	24	Orang	1,172,303,935	tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							Jumlah kegiatan bintek yang diikuti anggota DPRD	1	Kegiatan					1	Kegiatan		100.00	tdr	1	Kegiatan		tdr	tdr	Sekretariat DPR	
							angka waktu pelaksanaan publikasi dan dokumentasi Dewan	12	Bulan	4,682,073,000				12	Bulan	3,718,977,000	100.00	79.43	12	Bulan	3,718,977,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sandingan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kepmendagri 050/2020)		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
									Tolak Ukur	Target	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan												Vol	Satuan	Vol	Satuan
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15					15						
								Jumlah publikasi melalui media cetak, elektronik dan online	500	Kegiatan		450	Kegiatan	90,00	tdr	450	Kegiatan		tdr			Sekretariat DPR					
								Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan DPR/RA yang terfasilitasi	12	Bulan		12	Bulan	852,426,422	100,00	tdr	12	Bulan	852,426,422	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42	Orang	2,016,000,000	42	Orang	1,528,000,000	100,00	75,79	42	Orang	1,528,000,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9	Orang	432,000,000	16	Orang	432,000,000	177,78	100,00	16	Orang	432,000,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Penyusunan Program Kerja DPRD	1	Kegiatan		1	Kegiatan	100,00	-	1	Kegiatan		tdr	tdr	Sekretariat DPR						
								Jumlah kunjungan kerja tim nageri Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Kali	16,055,666,362	1	Kali	100,00	-	1	Kali		-	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Jumlah KKT DPR/RA yang tersusun	1	Dokumen		1	Dokumen	100,00	-	1	Dokumen		-	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	27,551,077,130	113	%	32,056,547,709	113,33	116,35	113	%	32,056,547,709	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	25	Keg	22,817,163,596	13	Keg	15,870,533,228			25	Keg	15,870,533,228			Sekretariat DPR					
								Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	Kali	56,854,026	1	Kali	42,062,750	100,00	73,98	1	Kali	42,062,750	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Kegiatan Reses	15	Kali	47,567,150,317	8	Kali	33,455,845,887			15	Kali	33,455,845,887			Sekretariat DPR					
								Penyusunan dan Pelaksanaan Reses	3	Kali	23,609,852,929	3	Kali	28,241,862,993	100,00	119,62	11	Kali	61,697,708,880	73,33	129,71	Sekretariat DPR					
								Pengawasan Kode Etik DPRD	3	Kali	1,520,810,000	3	Kali	707,822,657	100,00	46,54	3	Kali	707,822,657	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Pembahasan Kerja Sama Daerah	100	%	1,170,752,172	77	%	370,532,000	77,47	31,65	77	%	370,532,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1	Dokumen	25,200,000	-	Dokume	9,600,000	-	38,10	-	Dokumen	9,600,000	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Pelaksanaan Undang-undang DPRD	10	Kali	1,780,671,000	10	Kali	1,642,520,731	100,00	92,24	10	Kali	1,642,520,731	tdr	tdr	Sekretariat DPR					
								Rapat-rapat paripurna	20	Kali	4,135,101,846	33	Kali	2,212,477,600			33	Kali	2,212,477,600	165,00	53,50	Sekretariat DPR					
								Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	26	Keg	44,227,186,527	15	Keg	24,663,629,375			15	Keg	24,663,629,375	57,69	55,77	Sekretariat DPR					
Rata-rata capaian kinerja (%)													90,48	72,44					74,01	65,42	Sekretariat DPR						
Predikat kinerja													ST	S					S	S	Sekretariat DPR						
								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			29,437,784,570		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	29,041,145,425	tdr	98,65			59,990,763,421	49		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
								URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			29,437,784,570		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29,041,145,425	tdr	98,65			59,990,763,421	45		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
								KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			29,437,784,570		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29,041,145,425	tdr	98,65			59,990,763,421	92,23	45,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			13,520,512,611		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	13,136,748,831	tdr	97,16	-	-	29,623,155,056	tdr	73,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
								Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	22,378,969,331	91	%	10,692,138,596	100	%	99,80	95	%	10,692,138,596	95,38	47,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
								Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	13,968,138,188	87	%	3,706,408,853	-	%	tdr	43	%	3,706,408,853	43,28	26,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
								%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	880,228,125	82	%	141,575,300	-	%	tdr	41	%	141,575,300	sts	16,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
								Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	527,723,175	97	%	148,275,900	100	%	100,00	99	%	148,275,900	98,63	28,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
								%tase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	100	%	2,821,247,125	97	%	1,798,007,576	100	%	100,00	98	%	1,798,007,576	98,33	63,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
								Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tahun	780,392,259	1,00	Tahun	791,440,225	100,00	101,42	1	Tahun	791,440,225	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.		K		Rp.		Sandiangan (Permendagri 90/2019)		Menjadi (Kemendagri 050/2020)		K		Rp.		K			Rp.			
				Vol	Satuan	%	Rp.	Vol	Satuan	%	Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		Vol	Satuan	%	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
									Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja	2	Dokumen	195,998,111	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokume	195,970,941	tdr	99.99	2	Dokumen	195,970,941	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	188,528,164	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokume	188,489,740	tdr	99.98	2	Dokumen	188,489,740	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	9	Kali	188,724,742	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9	Kali	42,435,037	100.00	22.49	9	Kali	42,435,037	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Kali	207,141,242	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Kali	364,544,507	100.00	175.99	7	Kali	364,544,507	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Administrasi Keuangan	Terlaksananya Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja	1	Tahun	8,419,956,890	Terlaksananya Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja	1	Tahun	7,766,651,746	100.00	92.24	1	Tahun	7,766,651,746	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Pembinaan Aparatur		10	Dokumen		1,090,692,000	sts	sts	1,069,162,300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	8,280,111,348	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.00	Tahun	7,503,806,736	100.00	90.62	sts	sts	8,572,969,036	sts	786.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur		156	Kegiatan		550,584,125	27	sts	203,940,294	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	128,120,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	90,600,000	100.00	70.71	sts	sts	294,540,294	sts	53.50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselaksananya Laporan keuangan Akhir Tahun		1	Laporan		419,655,000	3	Laporan	216,540,838	Penyediaan Bahan Pelaksanaan Pelaksanaan Vertifikasi	1	Laporan	11,725,542	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Laporan	172,245,010	100.00	1,468.97	4	Laporan	388,785,848	400.00	92.64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
									Administrasi Umum	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	Tahun	4,269,063,462	Terlaksananya pelayanan administrasi	1.00	Tahun	4,545,048,575	100.00	106.46	1	Tahun	4,545,048,575	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat-surat		100	%		53,577,500	83	%	11,664,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Tahun	5,020,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Tahun	4,020,000	100.00	80.08	sts	sts	15,684,000	sts	29.27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jaringan telepon, listrik dan air		100	%		2,877,548,000	88	%	1,128,559,768	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	571,435,040	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.00	Tahun	351,222,482	100.00	61.46	sts	sts	1,479,782,250	sts	51.43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	39,480,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.25	Tahun	112,299,630	125.00	284.45	1	Tahun	112,299,630	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10	unit	221,774,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	422,487,450	tdr	190.50	10	unit	422,487,450	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	1,764,952,580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.00	Tahun	1,819,695,920	100.00	103.10	1	Tahun	1,819,695,920	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		100	%		117,002,000	98	%	82,028,512	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21	jenis barang	11,524,555	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	sts	sts	sts	sts	82,028,512	sts	70.11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat-alat Tulis Kantor		100	%		717,565,400	92	%	328,423,150	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	101,458,754	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.00	Tahun	217,560,432	100.00	214.43	sts	sts	545,983,582	sts	76.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang-barang Cetak dan Penggandaan		100	%		371,894,300	88	%	168,838,796	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	209,275,090	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.00	Tahun	61,920,640	100.00	29.59	sts	sts	230,759,436	sts	62.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat-alat Listrik dan Elektronik		100	%		29,501,250	93	%	10,234,064	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	6,027,163	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.00	Tahun	10,352,000	100.00	171.76	sts	sts	20,586,064	sts	69.78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	%		2,879,623,750	98	%	690,981,442	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Unit	151,008,980	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Unit	452,570,679	100.00	299.70	sts	sts	1,143,552,121	sts	39.71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran, Majalah		100	%		100,342,000	80	%	46,754,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Tahun	16,225,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.00	Tahun	8,520,000	100.00	52.51	sts	sts	55,274,000	sts	55.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman		100	%		588,842,500	75	%	181,804,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Tahun	166,940,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.00	Tahun	-	100.00	-	sts	sts	181,804,000	sts	30.87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dapat terlaksananya koordinasi/konsultasi di daerah dan luar daerah		100	%		6,011,984,000	85	%	2,239,282,114	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Tahun	993,942,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00	Tahun	976,729,742	100.00	98.27	sts	sts	3,216,011,856	sts	53.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Tahun	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.75	Tahun	107,669,600	75.00	1,076.70	1	Tahun	107,669,600	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
									Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut organisasi	1	Tahun	51,100,000	Terlaksananya kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut organisasi	1.00	Tahun	33,608,285	100.00	65.77	1	Tahun	33,608,285	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Profesionalisme Aparatur		46	Diklat		805,625,000	15	Diklat	141,575,300	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	Kali	51,100,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	Kali	33,608,285	100.00	65.77	sts	sts	175,183,585	sts	21.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya pelayanan Adm. Perkantoran		100	%		9,484,139,050	81	%	5,281,964,800															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	Dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan		100	%		1,559,830,000	86	%	521,603,950															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Paket Pembangunan		6	Paket		275,190,000	2	Paket	272,723,000															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya sarana gedung kantor		16	Paket		1,755,181,000	sts	sts	1,057,250,000															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
	Kegiatan pembinaan kelembagaan	Meningkatnya mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas		19	Kegiatan		1,451,865,000	11	Kegiatan	594,383,571															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								Sandangan (Permendagri 90/2019)					Menjadi (Kepmendagri 050/2020)																					
								Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan																				
								Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Target	Vol	Satuan			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.			K	Rp.						
		Pemeliharaan rutin/bekala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5	Tahun	671,390,000	sts	sts	233,977,539										sts	sts	233,977,539	sts	34.85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	10	Unit roda 4	3,050,800,000	2	Unit roda 4	790,720,000										2	Unit roda 4	790,720,000	20.00	25.92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
		Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya peralatan Kendaraan Dinas/Operasional	18	Unit roda 4	1,994,015,000	sts	sts	757,354,743										sts	sts	757,354,743	sts	37.98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas	651	Stel	356,164,125	215	Stel	148,275,900										215	Stel	148,275,900	33.03	41.63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	Terlaksananya Pembinaan Aparatur	5	Dokumen	1,884,217,725	5	Dokumen	308,364,144										5	Dokumen	308,364,144	100.00	16.37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
Rata-rata capaian kinerja (%)																94.74	216.23			101.41	80.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh												
Predikat kinerja																ST	ST			ST	T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh												
						12,407,678,282			4,664,335,496										79	%	1,493,302,171	96.67	100.57	sts	sts	6,157,637,667	tdr	390.16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
						3,965,668,438	10	Jumlah	1,356,761,960										10	Jumlah	1,356,761,960	58.82	34.21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
						5,448,073,219	10	%	2,067,186,642										10	%	2,067,186,642	20.00	37.94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
						2,993,936,625	22	%	1,340,386,894										22	%	1,340,386,894	21.63	41.43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh										
																			1	Laporan	1,493,302,171	100.00	100.57	1	Laporan	1,493,302,171	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
																			210	Peserta	495,549,874			210	Peserta	353,309,554	tdr	71.30	210	Peserta	353,309,554	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
																			1	Rekomendasi	357,520,864	100.00	80.29	1	Rekomendasi	287,046,994	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
																			1	Rekomendasi	484,442,128	100.00	58.98	1	Rekomendasi	285,722,514	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
																			18	Kali	147,304,339	100.00	262.46	18	Kali	386,610,063	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
																			1	Kali	-	-	-	-	kali	180,613,046	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
																			480	Peserta	1,602,289,200	320	Peserta	740,258,204	320	Peserta	740,258,204	66.67	46.20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
																			286	Peserta	965,750,000	250	Peserta	291,893,590	250	Peserta	291,893,590	87.41	30.22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
																			340	Peserta	745,225,500	130	Peserta	208,235,100	130	Peserta	208,235,100	38.24	27.94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
																			460	Kader	3,299,500,000	350	Kader	1,228,698,464	350	Kader	1,228,698,464	76.09	37.24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Sandangan (Permendagri 90/2019)			Menjadi (Kepmendagri 06/2020)			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.				
				Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan			
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11		12		13		14		15							
		Penyajian kader pembauran kebangsaan	Kader Pembauran Kebangsaan	241	Sekolah	1,384,565,000	100	Sekolah	474,948,178									100	Sekolah	474,948,178	41.49	34.30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
		Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan kebangsaan bagi generasi	Terlaksananya pembinaan nilai nilai sejarah karakter, dan wawasan	210	Sekolah	1,294,560,000	35	Sekolah	363,540,000									35	Sekolah	363,540,000	16.67	28.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
		Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi pembauran kebangsaan bagi komunitas masyarakat	1070	Peserta	2,281,670,000	400	Peserta	898,654,102									400	Peserta	898,654,102	37.38	39.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
		Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya rapat koordinasi pembauran kebangsaan	295	Peserta	1,041,370,000	168	Peserta	458,107,858									168	Peserta	458,107,858	56.95	43.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
Rata-rata capaian kinerja (%)															75.00	94.60					52.61	35.92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
Predikat kinerja															S	ST					R	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada		73	%	12,682,420,313	67	%	4,933,437,321	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	73	%	5,764,023,573	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			73	%	5,499,481,025	100.00	95.41	70	%	10,432,918,346	95.65	82.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							1	Tahun	5,499,481,025	100.00	95.41	1	Tahun	5,499,481,025	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							285	Peserta	354,949,611			285	Peserta	4,469,037,525	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							250	Peserta	223,250,380	100.00	112.52	250	Peserta	251,202,000	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							220	Peserta	254,665,208	100.00	91.20	220	Peserta	232,265,600	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							300	Peserta	151,418,154	100.00	110.23	300	Peserta	166,907,941	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							260	Peserta	331,020,220	100.00	114.82	260	Peserta	380,067,959	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan							Terlaksananya Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan								1	Paket	4,448,720,000	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA SKPA s.d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Sandingan (Permendagri 90/2019)				Menjadi (Kepmendagri 050/2020)				K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.			
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.		K		Rp.			
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		Satuan	Vol	Satuan	Vol
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10	11		12		13		14		15					
		Penantauan Situasi Politik	Terpantainya perkembangan politik di daerah dan terciptanya stabilitas politik Pemerintahan yang kondusif di daerah	1	Laporan	2,245,950,000	sts	sts	996,798,504									sts	sts	996,798,504	sts	44.38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan masyarakat di mata politik	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dan Partai Politik dalam Pembangunan	1910	Peserta	1,587,742,000	370	Peserta	619,646,835									370	Peserta	619,646,835	19.37	39.03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman etika dan budaya dalam berpolitik	Terwujudnya partisipasi politik dan inisiatif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan berenerasi	1	Laporan	1,800,476,000	sts	sts	1,023,099,200									sts	sts	1,023,099,200	sts	56.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Pengelolaan database parpol	Terumpulnya data base parpol	1	Dokumen	1,501,736,000	sts	sts	652,064,930									sts	sts	652,064,930	sts	43.42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Sosialisasi regulasi politik bagi masyarakat	Adanya Sosialisasi regulasi-regulasi kebijakan politik	1910	Peserta	1,482,349,000	650	Peserta	615,450,502									650	Peserta	615,450,502	34.03	41.52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Penguatan kapasitas politik perempuan dan kaum marginal	Terwujudnya eksistensi dan partisipasi perempuan dalam berpolitik	1100	Peserta	1,239,349,000	sts	sts	522,326,775									sts	sts	522,326,775	sts	42.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Pendidikan politik bagi pengurus parpol	Terwujudnya sikap dan perilaku Partai Politik yang terpolo dan sistematis yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi	1470	Peserta	1,443,029,000	455	Peserta	504,050,575									455	Peserta	504,050,575	30.95	34.93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
Rata-rata capaian kinerja (%)															80.00	281.31					28.12	43.18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
Predikat kinerja															T	ST					SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
	Meningkatnya peran lembaga demokrasi	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar	23	Jumlah LSM	5,321,217,320	59	Jumlah LSM	1,892,708,830	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar	21	Jumlah LSM	2,873,909,192	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	21	Jumlah LSM	1,779,573,178	sts	61.92	80	Jumlah LSM	3,672,282,008	347.83	69.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Dokumen	2,873,909,192						1	Dokumen	1,779,573,178	100.00	61.92	1	Dokumen	1,779,573,178	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	40	Peserta	56,402,363						40	Peserta	367,931,790	tdr	652.33	40	Peserta	367,931,790	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140	peserta	194,650,498						140	peserta	700,754,964	100.00	360.01	140	peserta	700,754,964	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40	Peserta	64,089,952						40	Peserta	62,951,580	200.00	98.22	80	Peserta	62,951,580	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Pengambilan Data Ormas di seluruh Kab/Kota Se Aceh	1	Laporan	760,778,615						1	Laporan	647,934,844	100.00	85.17	1	Laporan	647,934,844	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh		
			Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	1	Laporan	1,797,987,764						-	Laporan	-	-	-	-	-	Laporan	-	tdr	tdr			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
		Penguatan kapasitas Ormas dan LNL	Adanya rapat-rapat tentang penguatan Ormas dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus Ormas dalam mengelola organisasi	2320	Peserta	2,050,570,000	sts	sts	877,282,505									sts	sts	877,282,505	sts	42.78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Pengelolaan Data Base Ormas dan LNL	Terjadinya Ormas, LNL dan mitra Politik dengan lengkap, terbit dan teratur serta terkoneksi secara	1	Dokumen	726,965,000	15	Dokumen	342,872,832									15	Dokumen	342,872,832	1,500.00	47.16			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
		Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL	Terjalarnya hubungan yang harmonis dalam komunikasi dan konsultasi bagi pimpinan organisasi kemasyarakatan/LSM	540	Peserta	748,465,000	325	Peserta	288,185,266									325	Peserta	288,185,266	60.19	38.50			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
		Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran Ormas	Tersebarinya Informasi tentang tatacara Pendaftaran Ormas bagi Masyarakat	685	Peserta	1,119,606,500	520	Peserta	256,563,320									520	Peserta	256,563,320	75.91	22.92			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
		Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing	Adanya rapat-rapat tentang Ormas Orang Asing dan meningkatkan kapasitas pengurus Ormas orang asing dalam membina organisasi	1	Laporan	238,881,500	151	Laporan	72,729,357									151	Laporan	72,729,357	15,100.00	30.45			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas/LNL		1	Dokumen	157,625,000	2	Dokumen	55,075,550									2	Dokumen	55,075,550	200.00	34.94			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100.00	239.15					3,387.22	36.13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
Predikat kinerja															ST	ST					ST	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi																												
				Target RENSTRA SKPA s/d tahun 2022 (akhir RENSTRA SKPA)				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPA s/d Akhir Tahun 2020				Sandingan (Permendagri 90/2019)						Menjadi (Kepmendagri 050/2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																		
	Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	Program Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%Tase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	85	%	6,201,840,375	60	%	2,972,730,124	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di wilayah Kecamatan	80	%	1,438,628,092	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	80	%	2,225,636,446	100.00	154.71	70	%	5,198,366,570	82.35	83.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Dokumen	1,438,628,092	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	Dokume	2,225,636,446	100.00	154.71	1	Dokumen	2,225,636,446	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	Peserta	60,212,665	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	Peserta	5,771,777	100.00	95.95	50	Peserta	5,771,777	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	Peserta	400,344,139	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	Peserta	1,529,465,009	100.00	382.04	25	Peserta	1,529,465,009	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Laporan	40,760,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Laporan	23,325,730	100.00	57.23	1	Laporan	23,325,730	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Laporan	498,670,900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Laporan	571,087,580	100.00	114.52	1	Laporan	571,087,580	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Laporan	438,640,388	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	Laporan	43,986,350	-	10.03	-	Laporan	43,986,350	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
		Forum Komunikasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Tertindakannya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan terlaksananya rapat PKUB	1030	Peserta	2,550,975,000	sts	sts	998,393,108											sts	sts	998,393,108	sts	39.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
		Forum Pelestarian pengembangan dan pemantapan seni dan budaya	meningkatkan pemahaman terhadap seni dan budaya, terlaksananya parade persembahan	652	Peserta	1,316,325,000	sts	sts	356,667,678											sts	sts	356,667,678	sts	27.10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
		Pemantauan, pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Terorgangnya masalah sosial masyarakat dari pengaruh narkoba	5250	Peserta	2,921,117,055	sts	sts	1,465,001,240											sts	sts	1,465,001,240	sts	50.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
		Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	1	Laporan	490,522,500	sts	sts	152,261,286											sts	sts	152,261,286	sts	31.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
																				80.00	131.95		#DIV/0!	36.86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
																							#DIV/0!	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
						16,330,807,795			9,729,687,267	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Ancaman/deteksi dini konflik yang tertangani	91	%	4,355,893,897	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	91	%	4,906,403,774	100.00	112.64	91	%	4,906,403,774	tdr	185.51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh						
	Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	Program Fasilitas Kewaspadaan Nasional	%Tase Ancaman/deteksi dini konflik yang tertangani	91	%	7,122,133,175	70	%	5,725,349,537															70	%	5,725,349,537	76.56	80.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
	Menggunanya kapasitas SDM dan	Program Penanganan Konflik	%Tase konflik yang tertangani	99	%	9,208,674,620	68	%	4,004,337,730															68	%	4,004,337,730	68.35	43.48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	Tahun	4,355,893,897	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.00	Tahun	4,906,403,774	100.00	112.64	1	Tahun	4,906,403,774	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	405	peserta	486,842,075	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	450	peserta	460,473,449	111.11	94.58	450	peserta	460,473,449	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021 yang dievaluasi										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target (Perencanaan 90/2019)					Menjadi (Kepmendagri 050/2020)					K		Rp.		K		Rp.				
				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			
				Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
			Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	140	peserta	458,816,000					140	peserta	447,103,360	100.00	97.45	140	peserta	447,103,360	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Laporan	2,202,892,081					1	Laporan	1,218,542,666	100.00	55.32	1	Laporan	1,218,542,666	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	530	peserta	796,247,341					530	peserta	637,709,699	100.00	80.09	530	peserta	637,709,699	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Kali	211,096,400					12	kali	201,574,600	100.00	95.49	12	kali	201,574,600	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
			Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	1	Paket	200,000,000					1	Laporan	1,941,000,000	sts	970.50	1	Laporan	1,941,000,000	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Forum Dialog di daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional	Terdeteksi nya permasalahan di daerah	1	Rekomendasi	5,407,105,000	1,158	Peserta	4,208,334,924							1,158	Peserta	4,208,334,924	sts	77.83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Kemampuan Anggota FKDM meninjau Keamanan	1140	Peserta	1,556,391,000	570	Peserta	597,245,215							570	Peserta	597,245,215	50.00	38.37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional	Tersedianya hasil kajian/analisis dan data situasi dan kondisi daerah	465	Peserta	1,152,399,500	315	Peserta	516,448,449							315	Peserta	516,448,449	67.74	44.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
		Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Duras Asing di				sts	sts	333,024,500						sts	sts	333,024,500	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
		Pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing		1	Laporan	1,003,904,000	4	Laporan	70,296,449						4	Laporan	70,296,449	400.00	7.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
		Koordinasi Penanganan Konflik	Terkoordinasinya penanganan konflik secara efektif terpadu dan sinergi, serta terbentuknya pusat ilmu pengetahuan konflik Aceh				1,395	Peserta	1,769,742,400						1,395	Peserta	1,769,742,400	tdr	tdr	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
		Konferensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh	Terpahaminya potensi dan sumber konflik	1470	Peserta	1,828,655,000	sts	sts	557,529,780						sts	sts	557,529,780	sts	30.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
		Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh	Tersedianya hasil capaian penanganan Konflik Aceh	400	Peserta	942,240,500	sts	sts	1,570,471,750						sts	sts	1,570,471,750	sts	166.67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
		Penanganan potensi konflik		3365	Peserta	5,521,270,725	58	Peserta	106,593,800						58	Peserta	106,593,800	1.72	1.93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh				
Rata-rata capaian kinerja (%)														102.22	232.24				129.87	52.44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
Predikat kinerja														ST	ST				ST	R	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																								

Tabel. 2.122
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2021 dan Realisasi RPJMA 2017-2022

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Menjadi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
									Tolak Ukur	Target																					Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH				1,574,103,634,345		1,057,298,432,711	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH					377,605,704,328	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH					539,663,258,038			142.92			1,099,902,670,739			69.87	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
		Usuran Kestimewaan dan Kekhususan Aceh				1,574,103,634,345		1,057,298,432,711	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					377,605,704,328	BIDANG PENDIDIKAN					539,663,258,038			142.92			1,099,902,670,739			69.87	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
		Bidang Usuran Pendidikan				1,574,103,634,345		1,057,298,432,711	Bidang Usuran Kekhususan Aceh					377,605,704,328	Bidang Usuran Kekhususan Aceh					539,663,258,038			142.92	176.80		1,099,902,670,739		176.80	69.87	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
						527,935,374,587		27,269,464,836	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					18,988,622,158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					15,334,773,192			80.76	-	-	42,604,238,028			8.07	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%	14,387,096,637	96	%	13,383,017,260	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	%							100.00			100.00	196	%	13,383,017,260	195.94	93.02	Dinas Pendidikan Dayah Aceh							
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	511,994,209,365	91	%	12,832,422,682	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a								sts			sts	191	%	12,832,422,682	191.25	2.51	Dinas Pendidikan Dayah Aceh							
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100	%	986,113,585	50	%	547,067,000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	n/a								sts			sts	150	%	547,067,000	150.00	55.48	Dinas Pendidikan Dayah Aceh							
		Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%tase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%	567,955,000	70	%	506,957,894	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	%							100.00			100.00	170	%	506,957,894	170.00	89.26	Dinas Pendidikan Dayah Aceh							
										Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi DLL di bagi dengan Total Laporan Waik)	100	%							100			100	100	%				tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
										Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi DLL di bagi dengan Total Laporan Waik)	100	%							100			100.00	100	%				tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh						
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	1,637,919,489	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92	Dokumen	555,278,196	1,020.93	33.90	sts	sts	sts	sts	555,278,196	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Dokumen	232,308,128	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67	Dokumen	34,943,000	3,350.41	15.04	sts	sts	sts	sts	34,943,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	321,739,935	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	106	Dokumen	289,649,580	3,538.14	90.03	sts	sts	sts	sts	289,649,580	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2	Dokumen	64,100,580	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99	Dokumen	19,554,500	4,938.68	30.51	sts	sts	sts	sts	19,554,500	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	512,636,047	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Dokumen	-	-	-	sts	sts	sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	507,134,799	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	Dokumen	211,131,116	8,134.92	41.63	sts	sts	sts	sts	211,131,116	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Administrasi Keuangan	12	Bulan	8,816,399,686	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Bulan	7,544,938,704	602.79	85.58	sts	sts	sts	sts	7,544,938,704	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52	ASN	8,816,399,686	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	ASN	7,544,938,704	139.10	85.58	sts	sts	sts	sts	7,544,938,704	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Administrasi Umum	12	Bulan	8,266,612,998	Administrasi Umum	86	Bulan	7,228,956,292	715.57	87.45	sts	sts	sts	sts	7,228,956,292	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12	Bulan	135,200,000	36	Bulan	52,422,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	30,162,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	Bulan	9,024,000	249.33	29.92	66	Bulan	61,446,500	549.33	45.45	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	Bulan	2,526,200,000	36	Bulan	1,350,262,211	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	663,853,884	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63	Bulan	421,940,590	525.61	63.56	99	Bulan	1,772,020,801	825.61	70.15	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	3,098,330,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85	Bulan	2,778,502,800	708.73	89.68	sts	sts	sts	sts	2,778,502,800	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	416,043,655	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Bulan	-	-	-	sts	sts	sts	sts	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12	Bulan	940,011,940	33	Bulan	526,826,850	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	197,609,451	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94	Bulan	402,872,205	782.71	203.87	127	Bulan	929,699,055	###	98.90	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12	Bulan	1,160,025,017	36	Bulan	637,300,620	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	200,442,990	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92	Bulan	186,738,100	768.08	93.16	128	Bulan	824,038,720	###	71.04	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	Bulan	384,270,000	27	Bulan	198,802,560	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	66,994,022	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64	Bulan	26,082,100	531.58	38.93	91	Bulan	224,884,660	756.58	58.52	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	428,258,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67	Bulan	563,382,800	562.08	131.55	sts	sts	sts	sts	563,382,800	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		10	Media	493,680,000	36	Bulan	309,882,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan	31,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	88	Bulan	52,545,000	733.83	165.24	124	Bulan	362,427,000	sts	73.41	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		11	Bulan	1,441,152,978	36	Bulan	540,675,000	Kelancaran Administrasi Perkantoran	11	Bulan	404,800,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Bulan	-	-	-	36	Bulan	540,675,000	327.27	37.52	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah		12	Bulan	3,385,610,000	36	Bulan	2,519,288,411	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	745,240,992	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106	Bulan	697,298,675	879.74	93.57	142	Bulan	3,216,587,086	###	95.01	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		15	Paket	1,005,100,000	25	Bulan	410,893,080	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	212,474,020	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90	Unit	178,468,510	1,125.75	84.00	sts	sts	sts	589,361,590	sts	58.64	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
		Pengadaan mebel	Tersedianya Meubeleur Kantor		5	Unit	715,000,000	25	Bulan	644,886,000	Pengadaan Mebel	318	Unit	594,022,000	Pengadaan Mebel	89	Unit	770,523,050	28.08	129.71	sts	sts	sts	1,415,409,050	sts	197.96	Dinas Pendidikan Dayah Aceh									
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12	Bulan	690,000,000	25	Bulan	399,452,972	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	173,230,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57	Bulan	106,912,500	472.42	61.72	81	Bulan	506,365,472	678.67	73.39	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	Bulan	1,533,313,000	25	Bulan	993,468,818	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	520,812,080	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	77	Bulan	384,059,126	640.92	73.74	102	Bulan	1,377,527,944	849.25	89.84	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12	Bulan	1,137,800,000	25	Bulan	587,617,658	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	129,636,720	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93	Bulan	650,606,836	771.33	501.87	117	Bulan	1,238,224,494	977.58	108.83	Dinas Pendidikan Dayah Aceh										
										Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Gedung Kantor	2	Kegiatan	352,902,584	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Kegiatan	-	-	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh								
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	267,689,985	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22	%	5,600,000	22.22	2.09	22	%	5,600,000	tdr	tdr	Dinas Pendidikan Dayah Aceh											

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)																Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Peringkat Daerah Penanggung Jawab													
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Sandiingan				Menjadi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)				
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan			
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	14	Kegiatan		353,805,000	1	Kegiatan		149,624,900	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Kegiatan		267,689,985	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		22	Kegiatan		5,600,000	2,222.00	2.09	23	Kegiatan		155,224,900	167.64	43.87	Dinas Pendidikan Dayah Aceh				
			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan		11,887,333,610	36	Bulan		6,580,443,408																						Dinas Pendidikan Dayah Aceh			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan		1,346,780,000	36	Bulan		667,113,700																						Dinas Pendidikan Dayah Aceh			
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Pembangunan	5	Gedung		2,934,823,396	25	Bulan		4,364,936,554																						Dinas Pendidikan Dayah Aceh			
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	Unit		2,592,980,637	1	Bulan		2,118,200,000																						Dinas Pendidikan Dayah Aceh			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	6	Unit		1,920,000,000	25	Bulan		946,923,200																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	5	Unit		2,332,003,000	25	Bulan		2,183,353,400																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Kegiatan pembinaan kelembagaan	Terbinanya Kegiatan Sosial dan pelatihan Aparatur	12	Bulan		395,000,000	24	Bln		118,091,000																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional																																Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	271	Stel		1,092,863,585	325	Stel		547,067,000																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Pengembangan SDM Aparatur	23	ASN		214,150,000	17	ASN		357,332,994																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
							1,046,168,259,758				1,030,028,967,875																							Dinas Pendidikan Dayah Aceh			
			Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	%tase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah	85	%	511,994,209,365	65	%	844,313,983,675				358,617,082,170	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****																			Dinas Pendidikan Dayah Aceh		
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	%tase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	100	%	189,505,760,384	75	%	66,628,112,954																									Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Dayah	5	Unit	175,116,527,848	18	Unit	79,558,790,280																									Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	%tase Santri yang Hafal Al-Qur'an dan Membaca Kitab Kuning	95	%	26,759,945,000	65	%	3,490,048,248																										Dinas Pendidikan Dayah Aceh
			Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist, Jima' dan Qiyas	Program Pendidikan Dayah	Terwujudnya peningkatan angka kelulusan santri	95	%	35,294,751,860	48	%	11,982,037,014																									Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya %tase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	80	%	35,490,616,750	51	%	3,618,820,595																										Dinas Pendidikan Dayah Aceh
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Pemberdayaan Santri	%tase santri yang memiliki kecakapan Hidup (Life skill)	95	%	72,006,448,551	50	%	20,437,175,109																										Dinas Pendidikan Dayah Aceh
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
			Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah	Sarana dan Prasarana Dayah	787	Dayah		469,000,000,000	1,439	Dayah		831,321,107,919	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	1	Kegiatan		291,792,230,969	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah *****	#VALUE!	-			427,297,610,430	#VALUE!	146.44	sts	sts		1,258,618,718,349	sts	268.36	Dinas Pendidikan Dayah Aceh				
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
																																				Dinas Pendidikan Dayah Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%) □ □		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K		Rp.	K		Rp.	K	Satuan					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				Vol	Satuan		Vol	Satuan																	Vol		Satuan	Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14	15						
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	965,570,000	36	Bulan	305,655,174	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	223,440,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	212,147,889	100.00	94.95	48	Bulan	517,803,063	400.00	53.63	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/Operasional	30	unit	72,580,000	8	unit	17,736,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	25,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan	3	Bulan	20,772,100	25.00	81.78	sts	sts	38,508,200	sts	53.06	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48	Bulan	1,025,950,000	24	Bulan	414,811,250	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	12	Bulan	19,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Bulan	19,169,500	25.00	99.84	27	Bulan	433,980,750	56.25	42.30	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan kantor	12	Bulan	147,659,082	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	145,813,170	100.00	98.75	sts	sts	145,813,170	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
										Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Terhimpun pertimbangan dan rekomendasi pendidikan kearahannya yang lebih baik	85	%	201,150,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	184,250,000	117.65	91.60	100	%	184,250,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
										Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya informasi pendidikan Aceh di media	95	%	201,150,000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	100	%	184,250,000	105.26	91.60	sts	sts	184,250,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
											Tersusunnya Revisi Qanun MPD No.3 Tahun 2005	1	Kegiatan												tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
		Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Kelikutsertaan dalam koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah	48	Bulan	2,916,837,500	-	-	-																	sts	-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Penyediaan Hari-Hari Besar	Partisipasi MPA dalam perayaan hari-hari besar	36	tahun	255,830,353	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan	8,796,596,236	36	Bulan	4,737,501,380												36	Bulan	4,737,501,380	60.00	53.86		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	202,000,000	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24	Bulan	2,203,108,741	24	Bulan	401,729,000													24	Bulan	401,729,000	100.00	18.23		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Prosentase pelaksanaan Kegiatan expo dan parwara	60	Bulan	2,066,840,082	36	Bulan	743,880,745												36	Bulan	743,880,745	60.00	35.99		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
		Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan	1. Aparatur memahami jejaring dan pelaksanaan program 2. Aparatur memahami ketatalaksanaan	10	Kegiatan	2,248,729,410	8	Kegiatan	686,244,710												8	Kegiatan	686,244,710	80.00	30.52		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Meubler dan gedung kantor	60	Bulan	742,470,282	36	Bulan	427,567,700												36	Bulan	427,567,700	60.00	57.59		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon	12	Bulan	60,000,000	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	10	unit	2,038,722,365	6	unit	2,407,160,000													6	unit	2,407,160,000	60.00	118.07		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	4	unit	1,279,663,400	1	Paket	124,200,000													1	Paket	124,200,000	sts	9.71		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	tersedianya Mesin/ Kartu Absensi	4	unit	25,000,000	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	62	Orang	73,600,000	52	Orang	95,645,000													52	Orang	95,645,000	83.87	129.95		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Dinas bagi PNS	28	Orang	20,600,000	38	Orang	25,691,600													38	Orang	25,691,600	135.71	124.72		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Dinas bagi PNS	28	Orang	25,600,000	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
		Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Tersedianya Pakaian batik	76	Orang	72,700,000	-	-	-																		-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
																												Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%) □ □		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Target		Vol	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	Vol	Satuan		K	Rp.		
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	%tase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	100	%	17,729,000,000	75	%	4,094,112,000		%tase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	75	%			75	%	100.00	150	%	4,094,112,000	150.00	23.09	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Terwujudnya peningkatnya mutu, tata kelola, dan akuntabilitas manajemen pengelolaan Dayah	80	%	4,093,120,000	100	%	71,715,000		Terwujudnya peningkatnya mutu, tata kelola, dan akuntabilitas manajemen pengelolaan Dayah	100	%			65	%	65.00	165	%	71,715,000	206.25	1.75	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	%tase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	80	%	1,948,183,750	65	%	75,025,000		%tase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	65	%			60	%	92.31	125	%	75,025,000	156.25	3.85	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	392040	Orang/ Tahun	1,313,669,387	715	Orang/ Tahun	352,453,500		Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	715	orang/ tahun			125	Orang/ Tahun	17.48	840	Orang/ Tahun	352,453,500	0.21	26.83	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya %tase Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	85	%	6,304,400,328	65	%	860,824,035		Meningkatnya %tase Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	66	%			60	%	90.91	126	%	860,824,035	147.65	13.65	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
			Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh							275,333,429	Merumuskan SOP guna mengukur standarisasi dan akreditasi dayah di Aceh	85	%			100	%	248,862,500	117.65	90.39	100	%	248,862,500	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
			Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh							157,277,303	Meningkatnya budaya baca dan menulis pada masyarakat	2	edisi			3	edisi	112,074,000	150.00	71.26	3	edisi	112,074,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
			Terbangunnya koordinasi dantar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan (TK-PPA)									2	Angkatan			1	Angkatan	23,843,000	50.00	tdr	1	Angkatan	23,843,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
			Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren							118,056,126	Menentukan langkah-langkah konkrit standarisasi pendidikan dayah	1	Kegiatan			-	-	112,945,500	sts	95.67	-	-	112,945,500	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah		Teridentifikasi kebutuhan jenis fasilitas di lingkungan pendidikan dayah di Aceh	90	%	774,415,000	1	Dokumen	71,715,000									1	Dokumen	71,715,000	sts	9.26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
	Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pendidikan dayah		Terselenggaranya study evaluasi ekistensi dayah tahfidz diAceh	90	%	671,482,500	-	-	-									-	-	-	-	-	-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan Pengembangan Dayah		Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah	95	%	1,150,662,500	-	-	-									-	-	-	-	-	-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah		Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah	95	%	1,950,083,750	1	Dokumen	75,025,000									1	Dokumen	75,025,000	sts	3.85	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
	Penyelenggaraan Akreditasi Dayah		Evaluasi klarifikasi dan standarisasi dayah tipe dan Non tipe				-	-	-									-	-	-	-	-	-	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh		
	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan			1	Kegiatan	968,848,900	1	Dokumen	200,853,500									1	Dokumen	200,853,500	sts	20.73	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
	Penerbitan jurnal pendidikan (Pencerahan)						2	Edisi	75,100,000									2	Edisi	75,100,000	tdr	tdr	75,100,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca		Penerbitan jurnal pencerahan MPA	2	Edisi	390,460,487	2	Edisi	76,500,000									2	Edisi	76,500,000	100.00	19.59	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		Tersedianya Kajian-kajian Peningkatan mutu Pendidikan kependidikan	1	Dokumen	5,191,712,173	2	Dokumen	703,844,035									2	Dokumen	703,844,035	200.00	13.56	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)		Workshop Peningkatan kompetensi guru dalam penilaian	1	Dokumen	1,537,507,578	2	Dokumen	156,980,000									2	Dokumen	156,980,000	200.00	10.21	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh			
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
																									Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	Alokasi Anggaran (Rp.)	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol					Satuan	Vol				Satuan	Vol	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	
		Publikasi adat dan adat istiadat melalui media luar ruang	Terlaksananya publikasi adat dan adat istiadat melalui media luar ruang			8	frek	225,000,000								8	frek	225,000,000	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat	Jumlah tokoh adat/kader yang aktif di lembaga adat			-	-	-								-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pilot proyek gampong percontohan adat	Jumlah gampong pembinaan adat			-	-	-								-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan penyusunan Peraturan/Regulasi tentang Adat dan Adat Istiadat	%tase lembaga adat yang mempunyai regulasi tentang adat dan adat istiadat	100	%	401,186,000	-	%	-							-	%	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Adat	Jumlah kesepakatan dan rekomendasi	3	Dok	193,116,073	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Hukum Adat	Jumlah data/dokumen yang diperoleh	3	Dok	191,186,000	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah tokoh adat yang handal dalam mediasi adat	60	Orang	415565432	-	Orang	-							-	Orang	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan gampong percontohan adat	Jumlah gampong pembinaan adat			90	Tokoh Adat	7,073,477,400								90	Tokoh Adat	7,073,477,400	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penunjang Kegiatan MAA Perwakilan	%tase perkembangan program/kegiatan yang dilaksanakan MAA Kabupaten/kota			3	Lokasi	324,179,975								3	Lokasi	324,179,975	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pelatihan pemberdayaan kelembagaan Adat	Jumlah tokoh adat/kader yang aktif di lembaga adat	652	Orang	3,135,163,927	200	Tokoh Adat	570,139,500							200	Tokoh Adat	570,139,500	sts	18.19	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Gampong dan Mukim yang melaksanakan Peradilan Adat	150	gp/mukim	2,571,291,000	140	Akt	943,946,700							140	Akt	943,946,700	sts	36.71	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penerbitan majalah dan buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah buku dan majalah yang diterbitkan	2,400	Eks	901,760,000	5	Judul/buk u	224,090,000							5	Judul/buku	224,090,000	sts	24.85	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembuatan Film Dokumenter dan CD/DVD tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Cb/ DVD yang diedarkan	3	Judul	410,000,000	-	Judul	-							-	Judul	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penyuluhan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Sadar Etika, melalui media cetak dan elektronik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya			-	-	-								-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Lokakarya Adat	Terbinanya keanekaragaman adat dan adat istiadat	150	Dok	618,030,314	7	Dok	257,988,000							7	Dok	257,988,000	4.67	41.74	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3	Dok	610,000,000	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan kapasitas MAA kabupaten/kota dan Perwakilan	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan	5	frek	1,659,975,000	-	frek	-							-	frek	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6	Dok	430,000,000	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Rapat Koordinasi Lembaga-lembaga adat	Jumlah kesepakatan dan rekomendasi	6	Dok	550,000,000	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pengembangan Data Base Sistem Informasi Adat	Jumlah dan jenis data adat yang tersedia	3	Dok	190,000,000	-	Dok	-							-	Dok	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penelitian tentang Adat	Jumlah hasil penelitian dan standarisasi jenis adat istiadat			-	-	-								-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan pemuda pelopor adat yang dirbina	Jumlah pemuda pelopor adat yang dirbina	120	Orang	410,000,000	-	Orang	-							-	Orang	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan gampong percontohan adat	Jumlah gampong pembinaan adat	6	Gampong	7,559,718,000	-	Gampong	-							-	Gampong	-	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan gampong percontohan adat	Jumlah gampong pembinaan adat			57,663,000	1	Gp/Mukim	53,513,000							1	Gp/Mukim	53,513,000	tdr	92.80	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Adat			240,939,666	1	Keg	230,280,000							1	Keg	230,280,000	tdr	95.58	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penelitian Tentang Adat dan Adat Istiadat	Adanya laporan penelitian tentang adat dan adat istiadat			135,290,000	1	Keg	98,684,000							1	Keg	98,684,000	tdr	72.94	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Perencanaan Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi hukum adat			164,895,000	1	Akt	154,609,000							1	Akt	154,609,000	tdr	93.76	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Adat Istiadat	Terbinanya keanekaragaman budaya adat dan adat istiadat			1,394,230,000	2	Akt	1,375,880,000							2	Akt	1,375,880,000	tdr	98.68	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat	Terlaksananya Penerbitan majalah/Jeurnals dan buku tentang Adat dan Adat Istiadat			485,100,000	3	Judul Buku	465,285,000							3	Judul Buku	465,285,000	tdr	95.92	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Meningkatnya kualitas tokoh adat			284,454,000	14	Gp/Mukim	256,468,000							14	Gp/Mukim	256,468,000	tdr	90.16	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Pembinaan gampong percontohan adat	Jumlah gampong pembinaan adat			57,663,000	1	Gp/Mukim	53,513,000							1	Gp/Mukim	53,513,000	tdr	92.80	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Adat			240,939,666	1	Keg	230,280,000							1	Keg	230,280,000	tdr	95.58	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
		Penelitian Tentang Adat dan Adat Istiadat	Adanya laporan penelitian tentang adat dan adat istiadat			135,290,000	1	Keg	98,684,000							1	Keg	98,684,000	tdr	72.94	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
									Rata-rata capaian kinerja (%)							102.64	124.49		15.55	51.74	Sekretariat Majelis Adat Aceh		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi											Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	K	Rp.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam	Jumlah Pelatihan Akhlak Remaja Sesuai Syariat Islam Pada Lembaga Pendidikan	1,440	org	1,128,000,000	400	Org	356,030,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya TOT jagasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam	100	Orang	-	-	-	sts	sts	356,030,000	sts	31.56	Dinas Syariat Islam Aceh				
										Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Quran	Imam Hafid peserta STQ Nasional, MTQ Provinsi	1180	Orang	58,692,199,965	Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Quran	3	-	40,334,705,765	sts	68.72	3	-	40,334,705,765	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pembinaan imam hafidh pada masjid	Terlaksananya pembinaan kapasitas imam hafidh masjid agung Kab/Kota	230	org	7,886,413,300	80	Org	1,460,457,000	Pembinaan Imam Hafidh Pada Masjid	imam hafid	23	Orang	1,000,000,000	Pembinaan imam Hafidh Pada Masjid	4	keg	976,295,715	sts	97.63	sts	sts	2,436,752,715	sts	30.90	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ Tingkat Provinsi	642	org	9,350,000,000	1	Keg	1,630,732,691	Pelaksanaan MTO	Terlaksananya MTQ Tingkat Provinsi dan MTQ Internasional DMND	11804	Orang	83,442,189,871	Pelaksanaan MTO	4	keg	37,143,500,877	sts	69.50	5	keg	38,774,233,568	sts	414.70	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pelatihan/training center peserta MTQ/STQ tingkat nasional	Terlaksananya seleksi calon peserta STQ/STQ tingkat Nasional	214	org	12,100,000,000	93	Org	2,483,632,200	Pelatihan/ Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Tersedianya seleksi dan TC Peserta STQ Nasional	110	Orang	1,249,999,994	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	4	keg	734,228,908	sts	58.74	sts	sts	3,217,861,108	sts	26.59	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ/STQ tingkat Nasional dan Internasional	Terlaksananya pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ/STQ tingkat nasional dan internasional	3	Peringkat	19,196,700,000	-	peringkat	3,146,341,145	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terlaksananya keikutsertaan kafilah Aceh mengikuti STQ Tingkat Nasional	40	Orang	3,000,000,000	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	2	-	1,480,680,265	sts	49.36	sts	sts	4,627,021,410	sts	24.10	Dinas Syariat Islam Aceh
										Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Meningkatnya penyemarakan syar islam	1	Kegiatan	2,500,000,000	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	-	-	2,126,243,000	sts	85.05	-	-	2,126,243,000	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh
		Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syar islam	Jumlah Perlombaan Syiar islam yang dilaksanakan	1	Kegt	195,500,000	6	Kegt	978,945,587	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Pentas PAI	1	Kegiatan	2,800,000,000	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	-	-	2,126,243,000	sts	sts	sts	3,105,188,587	sts	1,588.33	Dinas Syariat Islam Aceh	
										Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syariat Islam	Meningkatnya pembinaan dakwah dan aktifitas peribadatan	5	Kegiatan	13,594,800,000	Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syariat Islam	9	-	16,073,274,726	sts	118.23	9	-	16,073,274,726	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pembinaan dai perbatasan dan daerah terpencil	Terlaksananya pembinaan dai perbatasan dan daerah terpencil	200	Org	15,000,000	400	Org	11,365,082,108	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Tersedianya Honorarium Dai dan Kotap	210	Orang	10,232,800,000	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	8	Bln	10,081,223,433	sts	98.52	sts	sts	21,446,205,541	sts	#####	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pelatihan Takmir Mesjid se Aceh	Terlaksananya pelatihan bagi takmir masjid (20 Orang/ Kab/ Kota) pada 23 Kab/ Kota	23	Kab/Kota	7,900,009,250	6	Kab/Kota	1,150,083,549	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Tersedianya pelatihan bagi takmir masjid	20	Kab/Kota	800,000,000	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	8	keg	1,880,497,260	sts	376.10	sts	sts	3,030,580,809	sts	38.36	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pembinaan gampong percontohan syariah	Terlaksananya pembinaan gampong percontohan syariah	12	Gampong	3,850,000,000	6	Gp	1,039,756,400	Pembinaan Clampong Percontohan Syariah	Terlaksananya gampong percontohan berisyariat	2	Kab/Kota	270,000,000	Pembinaan Gampong Percontohan Syariah	8	keg	311,268,017	sts	115.28	sts	sts	1,351,024,417	sts	35.09	Dinas Syariat Islam Aceh
		Ceramah Bulan suci Ramadhan di mushalla As Salam	Terlaksananya Ceramah Bulan suci Ramadhan di Mushalla As Salam bagi aparatur komplek keistimewaan Aceh	64	Bulan	49,862,550	sts	sts	10,350,000	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Mushalla Asalam	Terlaksananya Ceramah bulan suci ramadhan	1	Bulan	17,000,000	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Munasab/Mushalla	7	-	12,911,000	sts	75.95	sts	sts	23,261,000	sts	46.65	Dinas Syariat Islam Aceh
		Penyediaan, pendistribusian dan pengawasaan sarana peribadatan	Tersedianya sarana peribadatan	23	Kab/Kota	250,000,000	-	Kab/Kota	-	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasaan Sarana Peribadatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat ibadah	21	Kab/Kota	2,128,000,000	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasaan Sarana Peribadatan	3	-	3,338,230,000	sts	157.09	sts	sts	3,338,230,000	sts	1,335.29	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama	Terlaksananya inventarisasi rumah ibadah dan harta agama	23	Kab/Kota	5,175,500,000	9	Kab/Kota	1,324,692,000	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Tersedianya data masjid berbasis aplikasi	4	Kab/Kota	480,000,000	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	4	keg	449,145,016	sts	99.81	sts	sts	1,773,837,016	sts	34.27	Dinas Syariat Islam Aceh
										Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Tenaga keagamaan yang memahami pelaksanaan syariat islam	2	Kegiatan	2,030,000,000	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	9	-	3,050,210,175	sts	150.26	9	-	3,050,210,175	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keistaman	Terlaksananya sosialisasi melalui multi media	3	Media	6,589,267,610	6	Media	2,031,434,716	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keistaman	Tersedianya buku cetakan Minna Syariat Islam Aceh Tersedianya Film Dokumenter DVI di Perbatasan Tersedianya Film Dokumenter Pelaksanaan Ibadah Nikah Tersedianya Film Tradisi Beut Ba Tersedianya film tradisi masjid Nabi Muhammad SAW Tersedianya rekaman pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tersedianya	11	Paket	1,830,000,000	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keistaman	12	Bln	2,191,882,260	sts	119.77	sts	sts	4,223,316,976	sts	64.00	Dinas Syariat Islam Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp.		K		Rp.		Alokasi Anggaran (Rp.)		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Tolak Ukur	Target		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
													Vol	Satuan												
		Pelatihan peningkatan kapasitas imam meunasah dalam pelaksanaan syariat Islam	Terlaksananya pelatihan imam meunasah dalam pelaksanaan syariat Islam	500	Org	1,861,250,000	34	Org	355,919,000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Meunasah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	46	Orang	800,000,000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam *****	9	-	858,327,915	sts	429.16	sts	sts	1,214,246,915	sts	65.24	Dinas Syariat Islam Aceh	
										Pengutusan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kejasama Peradilan Syariat Islam	88	Persen	2,432,752,000	Pengutusan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Peradilan Syariat Islam	3	-	3,352,990,940	sts	137.83	sts	sts	3,352,990,940	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Penyuluhan regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan regulasi Syariat Islam	800	Org	7,239,431,676	sts	sts	371,674,708	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	100	Orang	800,000,000	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam *****	-	-	823,727,340	sts	91.53	sts	sts	1,195,402,048	sts	16.51	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Bimbingan teknis peradilan islam	Terlaksananya TOT Bimtek Penyelesaian perkara Jinayah bagi panitera pengganti, panitera muda dan operator SIPP	630	Org	2,234,000,000	73	Org	781,176,043	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	50	Persen	680,000,000	Terlaksananya Bimtek Hakim Mahkamah Syar Terlaksananya Bimtek Panitera Muda Jinayah dan Operator SIPP Mahkamah Syar	4	keg	615,706,600	sts	94.72	sts	sts	1,396,882,643	sts	62.53	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Isbat Nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin	Terlaksananya isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin	7,240	Org	16,654,000,000	1,200	Org	2,421,632,051	Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	150	Pasangan	280,000,000	Terlaksananya Isbat Nikah bagi korban konflik dan Masyarakat Miskin	4	keg	435,043,200	sts	174.02	sts	sts	2,856,675,251	sts	17.15	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Penyusunan regulasi syariat Islam	Terlaksananya Draft Naskah Akademik dan Draft Rancangan Qanun Syiyah	10	Regulasi	1,603,300,000	sts	sts	314,693,200	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	2	Regulasi	432,782,000	Penyusunan Regulasi Syariat Islam *****	4	keg	1,289,677,800	sts	298.02	sts	sts	1,604,371,000	sts	100.07	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pengawasan penegakan hukum syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan penegakan hukum syariat Islam	23	Kab/Kota	1,143,700,000	2	Kab/Kota	172,800,000	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	7	Instansi	200,000,000	Terbinanya koordinasi penegakan qanun syariat Islam	2	-	188,836,000	sts	94.42	sts	sts	361,636,000	sts	31.62	Dinas Syariat Islam Aceh	
										Penyenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	3	Kegiatan	4,061,782,377	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	3	-	2,858,876,744	sts	70.39	sts	sts	2,858,876,744	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Terlaksananya pembinaan lembaga pendidikan dan lembaga dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh	18	kali	865,000,000	sts	sts	213,851,205	Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman	3	Kegiatan	2,211,782,377	Terbinanya lembaga dakwah pada MDR dan FRIH	4	keg	1,027,834,450	sts	46.47	sts	sts	1,241,685,655	sts	143.55	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Bimbingan teknis petugas IT Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Terlaksananya Bimbingan teknis petugas IT Masjid Raya Baiturrahman Aceh	110	Org	279,000,000	90	Org	99,411,000	Bimbingan Teknis Petugas IT Masjid Raya Baiturrahman	30	Orang	180,000,000	Terlaksananya Bimtek Petugas IT Masjid Raya Baiturrahman	1	-	45,990,500	sts	30.66	sts	sts	145,401,500	sts	52.12	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah Masyarakat	60	Bulan	32,000,000,000	24	Bulan	3,472,925,000	Pelayanan BLUD	1	Kegiatan	1,700,000,000	Penerimaan BLUD UPTD PMRB	1	-	1,401,242,934	sts	82.43	sts	sts	4,874,167,934	sts	15.23	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pembinaan dan Koordinasi Dal Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terlaksananya pembinaan dal perbatasan dan daerah terpencil	200	Org	42,084,140,050	399	Org	19,134,006,843											399	Org	19,134,006,843	199.50	45.47	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Muallaf	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan muallaf	1,120	Org	2,296,339,180	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pembinaan dan Peningkatan kualitas lembaga dakwah	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga dakwah	560	Org	490,000,000	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dal dan Koordinator Lapangan	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kualitas dal dan koordinator lapangan	636	Org	1,609,698,486	245	Org	921,779,757											245	Org	921,779,757	38.52	57.26	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan	600	org	620,000,000	200	Org	173,104,000											200	Org	173,104,000	33.33	27.92	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pelaksanaan Hari-hari Besar dan Syiar Islam	Terlaksananya Peringatan hari-hari besar dan Syiar Islam	3	Keg	720,000,000	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
		Festival anak shaleh di wilayah Dal Perbatasan dan daerah terpencil	shaleh di wilayah Dal Perbatasan dan daerah terpencil	-	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pelaksanaan cerdas cermat syariat Islam	Terlaksananya cerdas cermat Syariat Islam	23	Kab/Kota	1,890,000,000	23	Kab/Kota	1,424,244,000											23	Kab/Kota	1,424,244,000	100.00	75.36	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Pengiriman Imam Hafidh ke Kab/Kota	Terlaksananya Pengiriman Imam Hafidh ke Kab/Kota	-	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
		Pengiriman khatib jum'at ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengiriman khatib jum'at ke Kab/Kota	10	Kab/Kota	790,000,000	2	Kab/Kota	158,806,454											2	Kab/Kota	158,806,454	20.00	20.10	Dinas Syariat Islam Aceh	
		Safari Ramadhan ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Safari Ramadhan ke Kab/Kota	23	Kab/Kota	788,125,000	-	-	-											-	-	-	-	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi																Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Sandiangan			Menjadi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester I) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.		K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Tolak Ukur	Target			Vol	Satuan	Vol				Satuan	Vol	Satuan	Vol			Satuan	Vol
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
		Penyenggaraan Pengajian di Gampong	Terlaksananya kegiatan pengajian di gampong	3,000	Gampong	11,424,391,708	500	Gp	2,398,894,929										500	Gp	2,398,894,929	sts	21.00	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Rapat koordinasi pelaksanaan syariat islam	Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan syariat islam	100	Org	331,909,848	200	Org	334,191,500										200	Org	334,191,500	200.00	100.69	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pelatihan peningkatan kapasitas imam mesjid dalam pelaksanaan syariat islam	Terlathnya kapasitas imam mesjid	100	Org	385,120,100	40	Org	311,040,600										40	Org	311,040,600	40.00	80.76	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Training advokasi syariat islam	Terlaksananya training advokasi syariat islam	710	Org	3,138,587,209	860	Org	2,654,469,000										860	Org	2,654,469,000	121.13	84.58	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan dan Peningkatan kualitas lembaga dakwah	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga dakwah	600	Org	496,500,000	60	org	146,231,700										60	org	146,231,700	10.00	29.45	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan dan pemberdayaan muallaf	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan muallaf	105	org	250,000,000	105	org	115,960,952										105	org	115,960,952	100.00	46.38	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Workshop penyelesaian perkara	Terlaksananya workshop penyelesaian perkara syariat islam	1	Permasalahan	128,900,000	1	Permasalahan	127,940,000										1	Permasalahan	127,940,000	100.00	99.26	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Monitoring pelaksana dan penegakan syariat islam	Terlaksananya monitoring pelaksanaan dan penegakan qanun/syariat islam	4	Raqan	809,275,000	4	Raqan	501,743,200										4	Raqan	501,743,200	100.00	62.00	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	23	Kab/Kota	1,436,389,200	4	Kab/Kota	129,079,719										4	Kab/Kota	129,079,719	17.39	8.99	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Bimtek Penyelesaian Kasus Khalwat/Mesum bagi Aparatur Gampong	Terlaksananya bimtek bagi aparatur gampong	500	Org	472,500,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan Keluarga Islami	Terlaksananya TOT Tingkat Provinsi dalam pembinaan keluarga islami	400	Org	1,383,636,350	200	Org	394,724,546										200	Org	394,724,546	50.00	28.53	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan Pelaku ekonomi mikro/kecil berbasis syariah	Terlaksananya pembinaan pelaku ekonomi mikro/kecil berbasis syariah	1,200	Org	2,015,000,000	60	Org	427,410,000										60	Org	427,410,000	5.00	21.21	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pengajian materi dan kelengkapan syariah.	Terlaksananya pengkajian materi dan lembaga syariah	10	Kajian	827,500,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Penyusunan buku panduan pelaksanaan syariat Islam	Terlaksananya penyusunan buku panduan pelaksanaan syariat Islam	40	Buku	2,209,425,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Launching buku panduan pelaksanaan syariat Islam	Terlaksananya Launching buku panduan pelaksanaan syariat Islam	40	Buku	265,028,390	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Kajian tinggi keislaman	Terlaksananya kajian tinggi keislaman	49	Kali	500,000,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam	TerlaksananyaRapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam	200	Org	599,446,781	-	Org	27,637,000										-	Org	27,637,000	-	4.61	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Workshop dan FGD perkara syariah	Terlaksananya FGD Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Syariah	1	Raqan	150,000,000	1	Raqan	144,006,500										1	Raqan	144,006,500	100.00	96.00	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Penyayarakatan dan penyebaran informasi keislaman	Terlaksananya sosialisasi melalui multimedia	3	Media	450,000,000	4	Media	2,184,748,713										4	Media	2,184,748,713	133.33	485.50	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan gampong percontohan syariah	Terlaksananya kegiatan pembinaan gampong percontohan syariah	4	Gampong	640,000,000	5	Gampong	332,775,000										5	Gampong	332,775,000	125.00	52.00	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman	Terlathnya dan terbelahnya wawasan keislaman bagi guru SLTA	100	Org	250,000,000	1,560	Org	1,909,734,708										1,560	Org	1,909,734,708	###	763.89	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Peningkatan dan pembinaan aqidah umat	Terlaksananya pembinaan dan penguatan aqidah umat	50	Org	450,000,000	270	Org	202,491,800										270	Org	202,491,800	540.00	45.00	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ruyat	Terselenggaranya TOT dalam rangka Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ruyat	292	Org	360,000,000	92	Org	228,551,500										92	Org	228,551,500	31.51	63.49	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Seminar problematika syariat islam	Terlaksananya seminar Pencegahan Narkoba, Prostitusi online dan	6	Keg	1,460,000,000	150	Org	316,800,000										150	Org	316,800,000	sts	21.70	Dinas Syariat Islam Aceh						
		TOT Pelathan tajhiz mayit	Terselenggaranya TOT Pelathan tajhiz mayit bagi kader/ Petugas	300	Org	1,230,000,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan mental spiritual siswa/siswi SLTA sederajat	Terlaksananya TOT Pembinaan mental spiritual siswa/siswi SLTA sederajat	1,790	Org	1,384,000,000	640	Org	347,137,549										640	Org	347,137,549	35.75	25.08	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana syariat islam	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana syariat Islam	20	Org	650,000,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Rapat koordinasi antar umat beragama	Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Umat Beragama	290	org	712,700,000	60	org	52,581,200										60	org	52,581,200	20.69	7.38	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah kasus yang diselesaikan	6	Permasalahan	716,150,000	1	Kasus	136,776,500										1	Kasus	136,776,500	sts	19.10	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan kelembagaan tilawati quran	Jumlah kelembagaan tilawatiQuran	2	lembg	1,392,263,179	6	Lembaga	1,103,194,935										6	Lembaga	1,103,194,935	sts	79.24	Dinas Syariat Islam Aceh						
		TOT Tenaga pelath MTQ/STQ	Terlaksananya TOT Tenaga pelath MTQ/STQ				-	-	-										-	-	-	tdr	tdr	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ tingkat nasional	Terlaksananya pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti STQ dan MTQ tingkat nasional	640	org	14,471,235,000	56	Org	1,816,170,700										56	Org	1,816,170,700	8.75	12.55	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pelatihan peserta MTQ tingkat nasional	Terlaksananya pelatihan peserta MTQ tingkat nasional	180	Org	2,541,235,000	180	Org	2,190,738,900										180	Org	2,190,738,900	100.00	86.21	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Rapat kerja daerah LPTQ	Terlaksananya rapat kerja daerah LPTQ Aceh	225	org	799,586,000	55	Org	127,393,000										55	Org	127,393,000	24.44	15.93	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Bimbingan teknis tenaga pelath/juri tilawati quran	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis tenaga pelath/juri tilawati quran	620	org	1,313,020,000	80	Org	194,291,000										80	Org	194,291,000	12.90	14.80	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA, TPA, dan TQA		150	org	496,500,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						
		Hafiah Al-Qu'an	Terlaksananya Kegiatan Hafiah Alqur'an	6	Kab/kota	950,000,000	-	-	-										-	-	-	sts	-	Dinas Syariat Islam Aceh						

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)														Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi														Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020						Sandiangan				Menjadi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Tolak Ukur	Target	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	5 Tahun		590,000,000	3 Tahun		339,742,413	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam proses percepatan proses administrasi	12 Bulan			Rp	327,603,508	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.00	Tahun	285,019,132	sts	87.00	4.00	Tahun	895,866,577	80.00	151.84	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Penyediaan makanan dan minuman	Efektifitas kinerja	5 Tahun		702,000,000	3 Tahun		271,105,032	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum											tdr	tdr							SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan	5 Tahun		809,490,000	3 Tahun		334,007,528	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan untuk proses percepatan proses administrasi	12 Bulan			Rp	150,002,623	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		9	-	140,776,372	sts	93.85	sts	sts	474,783,900	sts	58.65	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan kantor terjaga	5 Tahun		131,641,050	3 Tahun		73,139,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mewujudkan kelengkapan gedung kantor sebagai tempat kerja- Aparatur	598 Buah			Rp	66,748,764	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		598	-	66,550,000	sts	99.70	sts	sts	139,689,000	sts	106.11	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan / informasi	5 Tahun		1,253,400,000	3 Tahun		139,621,900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Implementasi Pelaksanaan Sesuai peraturan perundang-undangan	12 Bulan			Rp	50,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.00	Tahun	50,400,000	sts	100.00	4.00	Tahun	190,021,900	80.00	15.16	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi	5 Tahun		740,947,228	3 Tahun		518,809,998	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran	240 OH			Rp	749,436,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.00	Tahun	411,845,036	sts	54.95	4.00	Tahun	930,655,034	80.00	125.60	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Tahun		2,014,500,000	3 Tahun		457,711,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 Paket			Rp	66,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya		2	Set	195,324,375	sts	295.95	sts	sts	653,035,375	sts	32.42	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor bertambah	5 Tahun		3,313,600,000	2 Tahun		131,089,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Unit			Rp	150,810,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya				-	-									SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	5 Tahun		1,588,000,000	2 Tahun		61,890,000	Pengadaan Mebeleur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Set			Rp	55,199,196	Pengadaan Mebel		3	-	107,084,000	sts	194.00	sts	sts	168,974,000	sts	10.64	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kebersihan gedung kantor	5 Tahun		800,408,473	3 Tahun		314,427,200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor	1 Tahun			Rp	254,559,096	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.00	Tahun	409,340,710	100.00	160.80	4.00	Tahun	4,153,785,284	80.00	518.96	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Meningkat nya fungsi Gedung MPU Aceh	5 Tahun		10,469,480,080	3 Tahun		3,430,017,374	Rehabilitasi Sdang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor, mess, gedung perpustakaan geray halal dan pos satpam	1 Tahun			Rp	928,100,000	Rehabilitasi Sdang/berat rumah gedung kantor				-	-									SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 Tahun		1,187,850,000	3 Tahun		403,122,175	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun			Rp	338,405,914	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.00	Tahun	1,111,756,347	100.00	328.53	4.00	Tahun	1,514,878,522	80.00	127.53	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
																						tdr	tdr	-	-			tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
										Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Atribut Pegawai	100 Persen			Rp	274,324,820	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100	Persen	295,439,900	100.00	107.70	100	Persen	295,439,900	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Efektifitas Pelayanan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	595 Org		1,096,743,500	367 Org		681,206,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	2 Paket			Rp	77,275,220	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		182	Org	295,439,900	sts	382.32	549	Org	976,645,900	92.27	89.05	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		595 Org		111,000,000	- -		-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus	1 Paket			Rp	197,049,600					-	sts	-	sts	sts	-	sts	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik	5 Tahun		6,595,010,000	3 Tahun		3,688,306,750																3	Tahun	3,688,306,750	60.00	55.93	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Pengadaan pakaian Koppri	Tersedianya pakaian kopri	595 Org		104,000,000	- -		-																-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					
		Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	2 Akt		130,500,000	- -		-																-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					
		Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20 Keg		619,900,000	8 Keg		115,766,000																8	Keg	115,766,000	40.00	18.67	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	5 Tahun		760,400,000	3 Tahun		237,955,700																3	Tahun	237,955,700	60.00	31.29	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis)					- -		-																-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					
		Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer	5 Tahun		1,245,000,000	2 Tahun		89,267,000																2	Tahun	89,267,000	40.00	7.17	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	5 Tahun		663,610,000	3 Tahun		257,370,000																3	Tahun	257,370,000	60.00	38.78	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2 Paket		300,000,000	100 %		2,910,324,580																100	%	2,910,324,580	sts	970.11	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)						
		Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah	1 Paket		7,000,000,000	- -		-																-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)					

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.					
				Vol	Satuan		Vol	Satuan			Tolak Ukur	Target			Vol	Satuan				Vol	Satuan					Vol	Satuan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung kantor	2	Paket	8,185,808,484	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terbangunnya pagar dan pembatas lingkungan kantor	5	Tahun	211,131,525	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon	5	Tahun	25,000,000	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan dokumen dan buku bacaan kantor	terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor	5	Tahun	75,000,000	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon	5	Tahun	25,000,000	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
		Pemeliharaan dokumen dan buku bacaan kantor	terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor	5	Tahun	75,000,000	-	-									-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)							
										Rata-rata capaian kinerja (%)						57.24	111.67			43.31	78.23	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)								
										Predikat kinerja						R	ST			SR	T	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)								
						94,020,429,842						26,067,354,073											PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH							
		Menguatnya tatanan Ekonomi Syaria'h	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	%stase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	99	%	25,122,512,700	82	%	2,185,145,998							24	%		25.00		53	%	2,185,145,998	53.57	8.70	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)			
		Menguatnya tatanan Ekonomi Syaria'h	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	%stase peran ulama dalam pembangunan Aceh	99	%	62,219,905,142	92	%	22,889,142,474							24	%		25.00		58	%	22,889,142,474	58.29	36.79	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)			
		Menguatnya tatanan Ekonomi Syaria'h	Program Silaturahmi Umara - Ulama	Meningkatnya Ukhwah Islamiyah, Wathaniah, Insaaniah dalam Beramal Ma'ruf Nahi Mungkar	95	%	6,678,012,000	80	%	993,065,601							24	%		25.00		52	%	993,065,601	54.39	14.87	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)			
				Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	100	Persen					Rp	7,018,055,199					100	Persen				100	Persen	6,139,491,854	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)			
		Pembinaan Badan Otonom MPU	Tersusunnya program kerja Syaikh, BQI, Muslimat dan LPPOM	Dana	12	Keg	1,658,950,274					Rp	465,000,000				-	Keg				437,500,000	sts	94.09	12	Keg	2,096,450,274	60.00	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Tersedianya Fatwa / Keputusan	Terlaksananya sidang-sidang MPU	7	Fatwa/Tausiah	12,283,593,405					Rp	4,673,000,000				7	fatwa/Tausiah				4,124,265,975	100.00	88.26	29	fatwa/Tausiah	16,407,859,380	58.00	73.36	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Pendidikan Kader Ulama	Terselenggaranya TOT bagi Peningkatan Kapasitas Ulama	Meningkatnya kemampuan kader ulama	25	Org	7,474,965,508					Rp	612,000,010				#VALUE!	-				409,923,696	#VALUE!	66.98	sts	sts	7,884,889,204	sts	42.61	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Rapat koordinasi MPU	Adanya Koordinasi Antar Ulama dan Umara	Koordinasi dan Konsolidasi MPU Kab/kota	2	Kegiatan	332,360,755					Rp	100,000,000				3	Kali				96,693,000	sts	96.69	8	Kali	429,053,755	80.00	46.03	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Pengkajian aliran sempalan	Tersedianya laporan penyebaran aliran sesat dan pendangkalan aqidah	Tersedianya Laporan Penyebaran Aliran Sesat dan Pendangkalan Aqidah	2	Laporan	645,400,355					Rp	251,622,286				#REF!	-				211,484,515	#REF!	84.05	sts	sts	856,884,870	sts	44.66	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Penerbitan Media MPU	Tersampainya informasi publik	Peningkatan Informasi dan Publikasi	120	Balho dan Spanduk	569,603,000					Rp	555,490,000				1	Tahun				535,663,180	sts	96.43	4	Tahun	1,105,266,180	80.00	73.88	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Tarifomatikannya fatwa dan hukum syariah	Dana Persentase peran ulama dalam pembangunan Aceh	22695000	Rupiah	771,386,623					Rp	226,950,000				2	Kali				205,369,000	sts	90.49	12	Kali	976,755,623	60.00	43.90	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
				Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	85	%											-	%				-	-	tdr	-	%	-	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
				Tersosialisasi Informasi mengenai Koperasi Hukum dan Fatwa	1	Kegiatan Orang											-	glatan Orang				-	-	tdr	-	glatan Orang	-	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
		Evaluasi kesiapan pelaksanaan pembangunan	terevaluasi pembangunan peran ulama	Terlaksananya kegiatan keagamaan	4	Kegiatan	6,895,800					Rp	133,992,903				1	-				118,592,454	sts	88.51	sts	sts	125,488,254	sts	15.43	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
				Muzakarah Masalah Kaagamaan																				-	-	-	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
				Nadwah/Mubahasah Ilmiah																				-	-	-	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)
				Penjerjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya																				-	-	-	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA (MPU)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi														Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
				Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Sandiangan		Menjadi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester I) (%) □ □		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)							
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan					Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol
				811	Orang	16,427,664,770		1,686	Orang	12,291,672,221			6,214,000,000	Pendidistribuan dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf *****	12	Bulan		3,589,910,200	100.00	57.77	sts	sts		15,881,582,421	sts	96.68	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				1100	Orang	3,395,110,000		2,390	Orang	4,603,762,179			3,250,000,000	Pendidistribuan dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin *****	12	Bulan		1,718,000,000	100.00	52.86	sts	sts		6,321,762,179	sts	186.20	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				110	Orang	3,102,000,000		205	Orang	1,084,760,000			800,000,000	Pendidistribuan dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah *****	12	Bulan		833,665,000	100.00	104.21	sts	sts		1,918,425,000	sts	61.84	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				2738	Orang	48,230,910,700		8,753	Orang	36,703,417,619			30,935,200,000	Pendidistribuan dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil *****	12	Bulan		22,540,727,287	100.00	72.86	sts	sts		59,244,144,906	sts	122.83	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				2,427	Orang	208,820,000,000		12	Orang	88,986,260			190,895,469,364	Pendidistribuan dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq *****	12	Bulan		-	100.00	-	sts	sts		88,986,260	sts	0.04	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				24	Bulan	238,455,000		12	Bulan	165,348,500				Bimtek Baitul Mal Kab/Kota	12	Bulan		165,348,500			sts	sts		165,348,500	50.00	69.34	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				24	Bulan	147,192,000		12	Bulan	88,142,000				Rapat kerja Baitul Mal	12	Bulan		88,142,000			sts	sts		88,142,000	50.00	59.88	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				120	Orang	248,033,000		60	Orang	202,160,000				Pelatihan akuntansi zakat	12	Orang		202,160,000			sts	sts		202,160,000	50.00	81.51	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				180	Orang	634,970,000		90	Orang	291,231,056				Sosialisasi kesadaran zakat	12	Orang		291,231,056			sts	sts		291,231,056	50.00	45.87	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				8,868	Orang	50,248,000,000		8,868	Orang	41,736,365,693				Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)	12	Orang		41,736,365,693			sts	sts		41,736,365,693	100.00	83.06	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				29,904	Orang	1,782,062,343		29,904	Orang	1,375,668,559				Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS	12	Orang		1,375,668,559			sts	sts		1,375,668,559	100.00	77.20	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				24	Bulan	632,950,000		12	Bulan	456,666,176				Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)	12	Bulan		456,666,176			sts	sts		456,666,176	50.00	72.15	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				5	%	9,653,330,744		12	Bulan	171,582,000				Pengelola wakaf	12	Bulan		171,582,000			sts	sts		171,582,000	sts	1.78	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				12	Bulan	988,227,319		12	Bulan	988,227,319				Pendataan, Verifikasi, dan Pendistribusian ZISWAF	12	Bulan		988,227,319			sts	sts	tdr	tdr		988,227,319	tdr	tdr	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				90	%	2,884,678,098		6	Bulan	178,571,297				Monitoring dan evaluasi	6	Bulan		178,571,297			sts	sts	tdr	tdr		178,571,297	sts	6.19	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				-	-	-		-	-				Bimbingan Teknis (Bimtek)				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	
				-	-	-		-	-				Rapat Koordinasi Baitul Mal (Rakor)				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	
				6	Bulan	16,800,000								Edukasi Kesadaran ZISWAF	6	Bulan		16,800,000			tdr	tdr		16,800,000	tdr	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				6	Bulan	158,446,000								Sosialisasi Kesadaran ZISWAF	6	Bulan		158,446,000			tdr	tdr		158,446,000	tdr	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				50	%	2,228,000,000		50	%	131,625,498				Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota	50	%		131,625,498			sts	sts		131,625,498	100.00	5.91	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				80	%	3,060,335,750		80	%	145,773,400				Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	80	%		145,773,400			sts	sts		145,773,400	100.00	4.76	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				60	%	1,740,579,250		30	%	846,075,240				Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	60	%		846,075,240			sts	sts		846,075,240	50.00	48.61	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		
				6	Bulan	431,354,000								Sosialisasi Kesadaran ZISWAF	6	Bulan		431,354,000			tdr	tdr		431,354,000	tdr	tdr	tdr	tdr	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				50	%	982,400,000		-	-	-				Advokasi dan Regulasi ZISWAF				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				70	%	1,378,160,000		-	-	-				Edukasi ZISWAF				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
				1	Orang	1,650,000,000		-	-	-				Pendayagunaan Wakaf				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
														Rata-rata capaian kinerja (%)				100.43	67.57					46.67	49.42	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH			
														Predikat kinerja				ST	S					SR	SR	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH			
				39,741,883,750				50,838,852,883					25,183,966,867	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				32,714,276,380	129.90					70,420,898,191	177.20		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
				39,741,883,750				50,838,852,883					25,183,966,867	Urusan Kekhususan dan Keistimewaan				32,714,276,380	129.90					70,420,898,191	177.20		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
				39,741,883,750				50,838,852,883					25,183,966,867	Bidang Urusan Kesatuan dan Perdamaian				32,714,276,380	129.90					70,420,898,191	177.20		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
				11,465,689,058				11,465,689,058					9,266,184,336	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				8,116,356,250	tdr	87.59				19,582,045,308	118.01		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
				100	%	10,735,161,000		91	%	8,661,037,288				Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang efisien	100	%		50.00			141	%			8,661,037,288	141.15	80.68	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
				100	%	580,955,000		100	%	206,578,000				Birokrasi yang efektif dan efisien	100	%		-			100	%			206,578,000	99.83	35.56	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
				100	%	1,074,512,750		70	%	299,144,477				Birokrasi yang efektif dan efisien	100	%		-			70	%			299,144,477	70.22	27.84	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
				100	%	788,625,000		90	%	610,003,429				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	100	%		75.00			165	%			610,003,429	164.54	77.35	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
				100	%	3,413,850,000		96	%	1,688,925,864				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	100	%		21.00			118	%			1,688,925,864	117.86	49.47	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
				100	%			100	%	609,131,929				Administrasi Keuangan	100	%		7,972,534,664	100.00	5.48	100.00			436,620,211	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
				100	%	772,289,000		100	%	609,131,929				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	%		455,948,280	100.00	95.76	200	%		1,045,752,140	200.00	135.41	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh		
				89.00	%								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.00	%		6,530,571,206	tdr	tdr	89.00	%			6,530,571,206	tdr	tdr	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Menjadi Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																						Vol	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	5,050,178,384	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89 %	4,191,912,636	89.00	83.01	89 %	4,191,912,636	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN dengan tertib dan lancar	100 %	2,466,408,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89 %	2,338,658,570	89.00	94.82	89 %	2,338,658,570	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	100 %	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- %	-	-	-	- %	-	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	580,955,000	100 %	206,578,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %	-	-	-	100 %	206,578,000	100.00	35.56	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	350,764,000	100 %	299,144,477		Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	-	-	-	100 %	299,144,477	100.00	85.28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	723,648,750	-	-		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	-	-	-	sts	sts	-	sts	-	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
						Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kantor	100 %	1,293,649,672	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	517,858,927	100.00	40.03	100 %	517,858,927	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	209,972,700	92 %	128,492,343		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	28,744,963	100 %	28,576,966	100.00	99.42	192 %	157,069,309	191.67	74.80	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	100 %	9,637,470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	9,601,250	100.00	99.62	100 %	9,601,250	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	100,490,000	259 %	56,129,360		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	15,360,000	100 %	15,300,000	100.00	99.61	359 %	71,429,360	359.46	71.08	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	1,301,325,000	100 %	437,308,000		Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	188,145,554	100 %	217,087,620	100.00	115.38	200 %	654,395,620	200.00	50.29	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	1,379,000,000	100 %	856,387,906		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100 %	330,265,280	100 %	247,293,091	100.00	74.88	200 %	1,103,680,997	200.00	80.03	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- %	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya administrasi perkantoran	100 %	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- %	-	-	-	-	-	-	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60 %	600,700,000	67 %	284,882,450		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	-	-	-	67 %	284,882,450	111.11	47.43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60 %	1,473,115,000	100 %	887,937,356		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	-	-	-	100 %	887,937,356	166.67	60.28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47 %	277,462,209	tdr	tdr	47 %	277,462,209	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	56,300,000	100 %	11,878,500		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	6,600,000	63 %	4,140,740	63.00	62.74	163 %	16,019,240	163.00	28.45	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	530,700,000	89 %	464,742,559		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	213,743,820	77 %	173,675,458	77.00	81.25	166 %	638,418,017	166.33	120.30	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	292,202,962	100 %	272,624,903		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100 %	102,131,370	-	-	-	100 %	272,624,903	100.00	93.30	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 %	353,843,697	tdr	tdr	38 %	353,843,697	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 %	854,000,000	100 %	768,640,939		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	305,688,145	100 %	293,154,800	100.00	95.90	200 %	1,061,795,739	200.00	124.33	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60 %	891,199,338	100 %	516,106,058		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	21,023,070	75 %	15,665,897	75.00	74.52	175 %	531,771,955	291.67	59.67	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60 %	150,000,000	-	-		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	-	-	-	sts	sts	-	sts	-	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90 %	45,023,000	90.00	202.26	90 %	45,023,000	tdr	tdr	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh					
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 %	50,050,000	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh				

No	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Vol	Satuan				Vol	Satuan				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	72.226.807.068	61 %	36.077.143.265		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %		85 %		85,24	sts	sts	36.077.143.265	sts	49,9	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	7.969.564.667	28 %	1.602.207.595		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n/a		98 %		sts	sts	1.602.207.595	sts	20,1	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
	Birokrasi yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	1.124.243.149	54 %	262.465.000		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	n/a		82 %		sts	sts	262.465.000	sts	23,3	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	1.124.243.149	59 %	29.501.040.059		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a		93 %		sts	sts	29.501.040.059	sts	2.624,0	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	123.500.000	100 %	95.968.900		Kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, dll di bagi)	100 %		97 %		96,52	sts	sts	95.968.900	sts	77,7	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	Dokumen	565.241.160	1.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		648.074.047	sts	114,65	3	648.074.047	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			2.22.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					12	OB	513.241.160	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12	OB	486.319.700	100,00	94,75	12	OB	486.319.700	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
			Dokterja mptjearitah untuk beasari daerah (din rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/keg dan lembaga keistimewaan di kab/kota Belanja					8	Kab/kota					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Honorarium Penghubung di P2K (Kebua dan anggota penghubung di P2K-APBA)					2	OT					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Cetak dan Penggandaan dokumen perencanaan Honorarium Pelaksana Kegiatan ASN dan Non ASN (Tim e-budgeting dan SIPKD)					6	Dokumen					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Honorarium Penghubung di P2K (Kebua dan anggota penghubung di P2K-APBA)					48	OB					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Honorarium Penghubung di P2K (Kebua dan anggota penghubung di P2K-APBA)					36	OB					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Perbaikan Atap dan Plafon Gedung Keurukon Katibul Wali/Sekretariat LWN					1	Dokumen					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Perbaikan Atap dan Plafon Rumah Kediaman Wali Nangroe Lembur PNS Bagian Program dan					12	OB					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			2.22.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3	Dokumen	52.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jikhsar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	161.754.347	133,33	311,07	4	Dokumen	161.754.347	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
2			Administrasi Keuangan					12	bulan	15.447.675.664	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	12.415.530.887	100,00	80,37	12	Bulan	12.415.530.887	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
			2.22.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					34	ASN			12	Bulan	12.415.530.887	sts	191,12	12	Bulan	12.415.530.887	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
			benarja usptuar manganjaran asst Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Tambahan Penghasilanberdasarkan beban					12	bulan					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
			benarja usptuar manganjaran asst Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah Tambahan Penghasilanberdasarkan beban					12	bulan					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
								11	bulan					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
								14	bulan					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
								630	OK					sts	tdr				tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			

No	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi															Peringkat Daerah Penanggung Jawab											
				Target RPJMA s/d tahun 2022 (akhir RPJMA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020				Sandiangan			Menjadi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d. Semester II) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K			Rp.		K	Rp.	K		Rp.		K	Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan		Vol	Satuan			Vol	Satuan	Vol	Satuan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
						2.22.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelaksanaan honorarium panitia pelaksanaan kegiatan (E-Keuaran) (3 orang x 12 bn) Terlaksananya pembayaran honorarium	12 bulan		8.922.965.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								108 Orang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								12 bulan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								114 Orang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								8 bulan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								10 bulan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
								12 bulan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
						2.22.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan penatuausahaan keuangan SKPA	12 bulan		28.584.060	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
						Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		1.086.040.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman tamu	60 Bulan		4.210.830.000	36 Bulan		1.899.049.921	2.22.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman rapat,tamu dan kegiatan di LWN	12 bulan		836.340.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	sts	sts	sts	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya pembangunan infrastruktur gedung	8 Unit		1.325.750.000	2 Unit Gedung		220.995.000	2.22.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1 Dokumen		249.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	sts	sts	-	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
										Konsultasi Penguasaan Penyusunan Dokumen Pembuatan Interior Ruang Kerja Katibul Wali/Kepala Sekretariat LWN	1 Dokumen				-	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
										Konsultasi Perencanaan Penyusunan Dokumen Pembuatan Interior Ruang Kerja Katibul Wali/Kepala Sekretariat LWN	1 Paket				-	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
										Pembuatan Interior Ruang Kerja Katibul Wali/Kepala Sekretariat LWN	4 gedung				-	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
										Terlaksananya Rehabilitasi sedang	4 gedung				-	-	-	-	sts	tdr	-	-	-	-	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
3						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sosialisasi kegiatan lembaga wali nangroe melalui media cetak dan elektronik	12 bulan		237.577.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		582.877.383	100,00	245,34	12 bulan		582.877.383	tdr	tdr	12 bulan		582.877.383	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
						2.22.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Quan LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nangroe media massa dan elektronik	12 bulan		237.577.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan		582.877.383	100,00	245,34	12 bulan		582.877.383	tdr	tdr	12 bulan		582.877.383	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
4										Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		3.805.666.644	tdr	tdr	12 bulan		3.805.666.644	tdr	tdr	12 bulan		3.805.666.644	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		80.379.000	tdr	tdr	12 bulan		80.379.000	tdr	tdr	12 bulan		80.379.000	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah tangga	60 Unit		846.810.000	sts	sts	386.460.100	2.22.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan		54.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan		538.256.194	100,00	989,44	sts	sts	538.256.194	sts	63,5	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan ATK	60 Bulan		787.482.080	36 Bulan		540.510.100	2.22.01.1.03.11 Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan		99.068.864	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		1.848.043.956	100,00	1.865,41	sts	sts	1.848.043.956	sts	234,6	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan penggandaan	60 60,60		477.840.000	sts	sts	186.588.020	2.22.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan		44.747.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		40.985.000	100,00	91,59	sts	sts	40.985.000	sts	8,5	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,60		186.450.240	sts	sts	116.570.000	2.22.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan		30.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan		41.920.000	100,00	137,35	sts	sts	41.920.000	sts	22,4	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah	24 Bulan		1.774.372.000	36 Bulan		2.823.388.926	2.22.01.1.03.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan		1.413.478.814	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		1.256.082.494	100,00	88,86	sts	sts	1.256.082.494	sts	70,7	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K		Rp.	K		Rp.	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	K		Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.			
				Vol	Satuan		Vol	Satuan						Tolak Ukur	Target				Vol	Satuan					Vol	Satuan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Tertindaknya Pemeliharaan komplek LWN	12	Bulan	1.200.000.000	33	Bulan	584.517.400							33	Bulan	584.517.400	275,00	48,7	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Tertindaknya pembangunan infrastruktur gedung	2	Unit	1.062.450.000	3	tahun	1.038.165.961							3	tahun	1.038.165.961	sts	97,7	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tertindaknya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA	3	Dokumen	113.120.000	3	Dokumen	95.968.900							3	Dokumen	95.968.900	100,00	84,8	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
										Rata-rata capaian kinerja (%)				101,33	458,48			137,08	64,11	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh							
										Predikat kinerja				ST	ST					ST	R	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
				28,558,066,036		11,781,951,657	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGROE			Jumlah Rekomendasi/Saran/Pendapat Wali Nangroe kepada Pemerintahan Aceh	21	Rekomendasi	470,935,648	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGROE ACEH *****			-	-	7,058,248,626	sts	1,498.77	sts	sts	7,058,248,626	tdr	24.72	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengembangan Nilai Budaya	%tase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	100	%	9,412,666,600	49	%	4,996,946,450	n/a	n/a	n/a	%	-	sts	-	sts	sts	4,996,946,450	sts	53.09	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan Event/festival seni dan budaya	23	Kab/kota	1,450,750,000	16	Kab/kota	473,510,571	n/a	n/a	n/a	Kab/kota	-	sts	-	sts	sts	473,510,571	sts	32.64	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	10	Situs / Cagar Budaya	5,901,936,000	6	Situs / Cagar Budaya	3,043,572,129	n/a	n/a	n/a	Situs / Cagar Budaya	-	sts	-	sts	sts	3,043,572,129	sts	51.57	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Sosialisasi Hukum Adat Berdasarkan Reusam yang dibagikan	23	Kab/Kota	1,506,000,000	28	Kab/Kota	242,054,723	n/a	n/a	n/a	Kab/Kota	-	sts	-	sts	sts	242,054,723	sts	16.07	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nangroe Aceh	Jumlah Rekomendasi/Saran/Pendapat Wali Nangroe kepada Pemerintahan Aceh	28	Rekomendasi	10,286,713,436	9	Rekomendasi	3,025,867,784	n/a	n/a	n/a	Rekomendasi	-	sts	-	sts	sts	3,025,867,784	sts	29.42	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh						
								Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nangroe Aceh	Tersusunnya jml rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya	4	reusam/ pertimbangan	470,935,648	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nangroe Aceh *****	23	kab/kota	3,309,301,641	sts	702.71	23	kab/kota	3,309,301,641	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe	Tertindaknya Penyusunan Reusam dan pertimbangan LWN	25	Reusam LWN, Rekomendasi LWN,	4,134,963,444	9	Reusam LWN, Rekomendasi LWN,	1,699,546,346	2.22.09.1.01.03 Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe	Tertindaknya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan LWN	4	reusam	370,935,648	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat *****	4	reusam	81,045,700	sts	21.85	sts	sts	81,045,700	sts	1.96	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nangroe	Tertindaknya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nangroe	4	kali sidang	862,000,000	2	kali sidang	254,844,000	2.22.09.1.01.05 Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nangroe	Tertindaknya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nangroe	1	kali	100,000,000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Insum Hukum *****	6	wilayah	725,258,978	sts	725.26	sts	sts	725,258,978	sts	84.14	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh		
													Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe *****	5	reusam	808,421,080	tdr	tdr	5	reusam	808,421,080	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe *****	23	-	126,328,140	tdr	tdr	23	-	126,328,140	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nangroe *****	2	-	615,938,300	tdr	tdr	2	-	615,938,300	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nangroe *****	120	orang	507,850,193	tdr	tdr	120	orang	507,850,193	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nangroe *****	6	perangkat	444,459,250	tdr	tdr	6	perangkat	444,459,250	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh *****	23	kab/kota	2,251,254,228	tdr	tdr	23	kab/kota	2,251,254,228	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	23	kab/kota	611,479,750	tdr	tdr	23	kab/kota	611,479,750	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	23	kab/kota	924,146,511	tdr	tdr	23	kab/kota	924,146,511	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Moli Helsinki	21	bulan	715,627,967	tdr	tdr	21	bulan	715,627,967	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Peradaban dan Tamadun Aceh	23	kab/kota	1,497,692,757	tdr	tdr	23	kab/kota	1,497,692,757	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	4	seminar	74,805,600	tdr	tdr	4	seminar	74,805,600	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	4	dokumen	1,034,706,357	tdr	tdr	4	dokumen	1,034,706,357	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, baik Dalam maupun Luar	4	event	198,560,000	tdr	tdr	4	event	198,560,000	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			
													Pengembangan Sistem Informasi Tamadun Aceh (SITA)	4	dokumen	189,620,800	tdr	tdr	4	dokumen	189,620,800	tdr	tdr	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMA s.d tahun 2022 (akhir RPJMA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMA s/d Akhir Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPA Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)			Perangkat Daerah Peranggung Jawab								
				Sandangan						Menjadi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA yang dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2021 (s.d Semester II) (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMA s/d Akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMA s/d Tahun 2021 (%)									
				K		Rp.		K		Rp.		Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.	
				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan				Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan		Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan
		Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Terlaksananya dukungan pemberian penghargaan dan kerjasama adat budaya	28	acara/ event	4,353,424,800	5	acara/ event	2,698,942,598																		Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh				
		Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat	Terlaksananya penerbitan dan tersedia majalah/buku adat	6,750	lembar	399,420,000	sts	sts	339,200,000								sts	sts	339,200,000	sts	sts	339,200,000	sts	sts	84.92	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Survey dan Penekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno	Terlaksana survey dan Alih Bahasa/Aksara Manuskrip/Naskah Kuno	33	Kegiatan	986,633,000	27	Kab/kota	381,148,984								27	Kab/kota	381,148,984	sts	sts	381,148,984	sts	sts	38.63	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap peran dan fungsi kelembagaan adat	950	Peserta	813,740,700	350	Peserta	173,566,800								350	Peserta	173,566,800	36.84	sts	173,566,800	36.84	sts	21.33	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istimad Melalui Media Massa dan Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istimad melalui Media Massa dan Elektronik	207	media cetak, media elektronik	1,834,856,000	131	media cetak, media elektronik	1,393,449,368								131	media cetak	1,393,449,368	63.23	sts	1,393,449,368	63.23	sts	75.94	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Istimad	Terlaksananya Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Adat Istimad	13	Reusam, Rekomendasi, Rambuuh	691,305,000	13	Reusam, Rekomendasi, Rambuuh	10,638,700								13	Reusam, R	10,638,700	100.00	sts	10,638,700	100.00	sts	1.54	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Terlaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	23	Kab/kota	1,422,748,000	28	Kab/kota	473,510,571								28	Kab/kota	473,510,571	121.74	sts	473,510,571	121.74	sts	33.28	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga Sejarah Budaya/Adat dan Adat Istimad	Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan	18	Etnis Kebudayaan Ke Aceh dan data etnografi budaya	1,075,510,000	sts	sts	586,341,319								sts	sts	586,341,319	sts	sts	586,341,319	sts	sts	54.52	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	Terusunnya Renstra, RKA/DPA, Renja serta laporan LJK, Rekam jejak, DED interior pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh	26	Dokumen	2,057,100,000	18	Dokumen	1,592,217,123								18	Dokumen	1,592,217,123	69.23	sts	1,592,217,123	69.23	sts	77.40	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Adat Istimad	Terlaksana Pembinaan Keanekaragaman Budaya/adat dan Adat Istimad	23	Kab/kota	745,000,000	5	Kab/kota	190,739,350								5	Kab/kota	190,739,350	21.74	sts	190,739,350	21.74	sts	25.60	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Perencanaan pengendalian dan evaluasi program	Pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi program	6	Dokumen	347,600,000	7	Dokumen	290,831,917								7	Dokumen	290,831,917	116.67	sts	290,831,917	116.67	sts	83.67	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah purbakala	Pelaksanaan pengembangan database system informasi sejarah purbakala	3	Keg	346,650,000	2	Keg	34,580,000								2	Keg	34,580,000	66.67	sts	34,580,000	66.67	sts	9.98	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Rapat Kerja (Raker) Perangkat Lembaga Wali Nangroe	Terlaksananya Rapat Kerja (Raker) Perangkat Lembaga Wali Nangroe	3	kali	540,000,000	-	Peserta	348,862,420								-	Peserta	348,862,420	sts	sts	348,862,420	sts	sts	64.60	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Wali Nangroe	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Wali Nangroe	3	kali	724,100,000	-	-	-								-	-	-	sts	sts	-	sts	sts	-	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Sosialisasi Adat Istimad	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat yang tetap terjaga secara islami	23	kab/kota	1,502,415,000	7	kab/kota	242,054,723								7	kab/kota	242,054,723	30.43	sts	242,054,723	30.43	sts	16.11	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Penyusunan Fatwa hukum syar'i dan Regulasi tentang Adat Istimad	Terlaksana Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istimad	27	Fatwa/Perimbangan/Rekomendasi, dokumen, lain	2,155,000,000	3	Rekomendasi	388,280,500								3	Rekomendasi	388,280,500	sts	sts	388,280,500	sts	sts	18.02	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Pembinaan Kelembagaan adat dan umum mukim	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan adat dan umum mukim	5	Kali	1,939,500,000	2	kali	427,882,138								2	kali	427,882,138	40.00	sts	427,882,138	40.00	sts	22.06	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
		Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe	Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nangroe	9	Kali	1,185,250,000	5, 5	Kali Sidang/ Reusam	255,314,800								5, 5	Kali Sidang	255,314,800	sts	sts	255,314,800	sts	sts	21.54	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					
																										Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh					



FOTO-FOTO KEGIATAN PENYUSUNAN RKPA





FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBAHASAN SKPA (Ranwal Renja RKPA 2023)



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00



NO	DESKRIBSI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	1. KEBERKEMBANGAN BAKAT																			
2	2. KEBERKEMBANGAN KEKAWAHLAN																			





FOTO-FOTO KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK





FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBAHASAN DOKA (Ranwal Renja RKPA 2023)



FOTO-FOTO KEGIATAN MUSRENBANG



FOTO-FOTO FASILITASI RPKA TAHUN 2023 KE KEMENDAGRI



Pelaksanaan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 (Jum'at-17 Juni 2022, Kemendagri-Jakarta)

BAPPEDA ACEH

Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureu-Eh No 26
Telp (06451) 21440 (hunting). Fax. 33654
email : bappeda@acehprov.go.id

